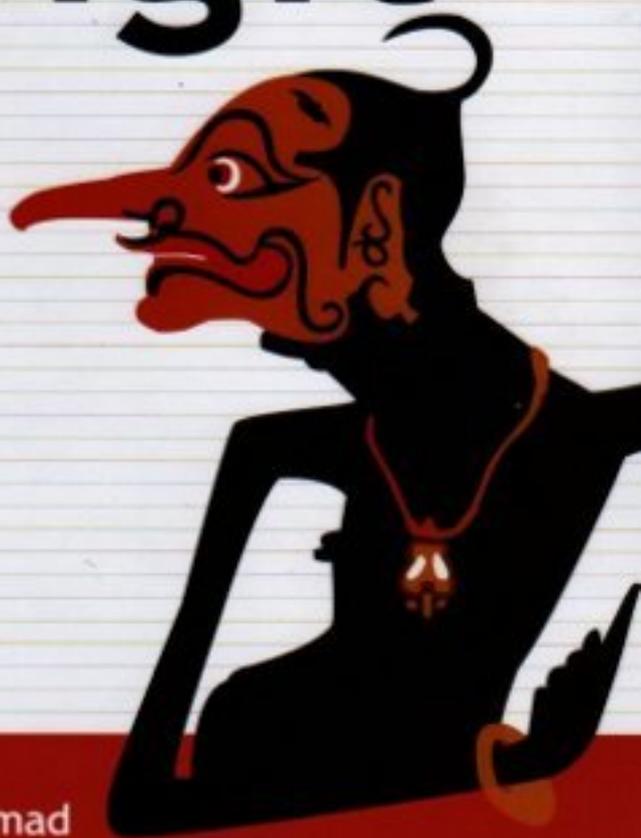


Rizal Mallarangeng

Dari Langit

Kumpulan Esai
tentang Manusia,
Masyarakat, dan
Kekuasaan



Pengantar:
Goenawan Mohamad

Dari Langit

Kumpulan Esai
tentang Manusia,
Masyarakat,
dan Kekuasaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rizal Mallarangeng

Dari Langit

Kumpulan Esai
tentang Manusia,
Masyarakat,
dan Kekuasaan

Pengantar
Goenawan Mohamad



Jakarta:
KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
bekerjasama dengan Freedom Institute

Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan
© Rizal Mallarangeng

KPG: 32S23808

Cetakan Pertama, November 2008

Penyunting

Zaim Rofiqi
Redaksi KPG

Perancang Sampul

Wendie Artswenda

Penataletak

Dadang Kusmana

MALLARANGENG, Rizal

Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2008

xxviii + 659 hlm. ; 13,5 cm x 20 cm

ISBN: 978-979-91-0142-6

*“If Men were Angels,
No Government would be Necessary.”*
(James Madison)

*Buku ini dipersembahkan untuk:
Umar Kayam, Ashadi Siregar,
Y.B. Mangunwijaya, Arief Budiman,
Ignas Kleden, dan Goenawan Mohamad.*

DAFTAR ISI

Pengantar Goenawan Mohamad	xiii
Pengantar Penulis	xix
BAB I Individualisme dan Utopia: Tentang Filsafat Sosial, Politik, dan Ekonomi	1
• Freedom: Sebuah Kerangka Umum	2
• Individualisme dan Utopia: Tanggapan Atas Polemik Liddle, Mubyarto, dan Budiawan	14
• Isaiah Berlin	20
• Wajah Lain Machiavelli	24
• Liberal Kiri, Sosialis Kanan	28
• Barat dan Demokrasi	32
• Demokrasi dan Liberalisme	36
• Individu vs Masyarakat	47
• Persamaan di Depan Hukum	59
• Arief Budiman	69
• Ilmuwan dan Aktivis	73
• Manifesto Sang Pemberontak	77
• Nozick	82
• Tentang Kebebasan: Berlin vs Charles Taylor	99
• Kontrak Sosial: Pedang Rousseau	112
• Membela Kaum Pluralis	119
• Huntington: Dari Keteraturan ke Demokrasi	130
• Guncangan Besar	149
• Alexis de Tocqueville: Penemu Teori Demokrasi	154
BAB II Pertimbangkan Kembali Masyarakat: Tentang Negara, Pasar, dan Masyarakat	163
• Munculnya Negara: Antara Teori Konflik dan Integratif	164
• Pendekatan Otonomi Negara: Bagaimana Mengkritiknya?	175
• Pertimbangkan Kembali Masyarakat	187
• Struktur dan Aktor: Mengapa Politik Orde Baru Bertahan?	191

• Revolusi Cina	199
• Memperkuat Negara	208
BAB III Pedang Saleh Afiff: Tentang Isu-isu Ekonomi-Politik	215
• Teori Konspirasi dan Krisis Moneter	216
• Blok Cepu, Mission Accomplished	222
• Kaum Intelektual, BBM, dan Iklan Freedom Institute	228
• Pedang Saleh Afiff	234
• Profesor Widjojo	239
• Soedradjad, Bravo	243
• Friedman	247
• George Soros	251
• Alan Greenspan, Sang Maestro di Balik Dollar	255
• Norman Borlaug, Pemberi Makan Dunia	260
• Indonesia 1995: Pertarungan Kekuasaan dan Kebijakan	265
• Indonesia 1996: Tekanan dari Atas dan Bawah	279
• Demokrasi dan Kapitalisme: Kasus Asia Timur dan Asia Tenggara	293
• Max Weber dan Kapitalisme	309
• Nabi yang Gagal	313
• Roti sebagai Senjata	322
• Anggur Lama dalam Botol Baru	327
• Reformasi Ekonomi di Cina dan Uni Soviet: Sebuah Perbandingan	333
• The Brave New World	360
• Merosotnya Third-worldism	365
• Apa yang Harus Kita Lakukan Bagi Dunia Ketiga?	377
• Kapitalisme, Sosialisme, dan Dunia Ketiga	384
BAB IV Hentikan Kebiadaban: Tentang Integrasi Nasional, Separatisme, Konflik Etnik dan Daerah	401
• Akankah Sejarah Berulang?	402
• Pemberontakan Daerah dan Demokrasi	410
• Teori dan Kerusuhan di Dua Kota	418
• Jalan Skotlandia Buat Aceh	422
• Jalan California Buat Papua	426
• Aceh, Ujian Pertama dan Terakhir	431
• Konflik Maluku dan Reorientasi Ilmu Sosial	436
• Hentikan Kebiadaban	445
• Dialog Frans Seda dan Amien Rais	449
• Lincoln	454
BAB V Hukum Liddle: Tentang Pemilu dan Partai Politik	459
• Hukum Liddle	460
• Nasib Partai Golkar	466
• Konvensi Partai Golkar Akal-akalan?	470

• Konvensi Partai Golkar Tidak Demokratis?	475
• 200 Partai, Siapa Takut?	480
• Banteng dan Beringin: Berseteru atau Bersekutu?	484
• PRD dan Megawati	490
BAB VI Dekrit Gus Dur: Tentang Kepemimpinan	495
• Tipe Kepemimpinan Baru	496
• Gus Dur di Titik Nadir	499
• Dari Langit	503
• Dekrit Gus Dur	507
• Megawati dan Soal Persiapan Jadi Presiden	510
• Megawati ke Amerika	515
• Bush Goyah, Pelajaran Buat Mega	518
• Perlukah Setneg dan Setkab Dipisah?	523
• Despot Paling Keji	527
BAB VII Menuju Pelembagaan Reformasi: Tentang Isu-isu Seputar Reformasi	531
• Kaum Aktivis Kebablasan	532
• Konstitusi 2002 dan Dua Perkara	536
• Tunda Dulu Sistem Distrik	543
• Menuju Pelembagaan Reformasi	547
• Tiga Faktor Penyebab SI MPR	552
• Konsensus Elite dan Politik Kekuatan	558
• Kegagalan SI MPR: Rahmat Terselubung	563
• Indonesia: Persoalan Demokratisasi	567
BAB VIII Setelah Perang: Tentang Amerika dan Isu-isu Internasional	577
• Gore, Bush, dan Kita	578
• Pemilu AS, Drama Politik, dan Tuntutan Akal Sehat	583
• Darurat Sipil di Cincinnati	587
• Presiden Bush dan Pertaruhan Amerika	591
• Setelah Perang	596
• Sirkus Amerika?	600
• Demokrasi Amerika	604
• Demokrasi, Alan Greenspan, dan Sembilan Sulaiman	608
• Barack Obama: Superstar Politik Jalan Tengah	613
• Masalah Kerjasama	619
BAB IX Catatan Pribadi	625
• Pak Bill dalam Hidup Saya	626
• Surat Buat Semua	644
• Sumber Tulisan	650
Tentang Penulis	656

Membaca Rizal Mallarangeng: Sebuah Pengantar

Oleh Goenawan Mohamad

SAYA TAK TAHU, mana yang lebih baik: Rizal Mallarangeng sebagai peserta aktif dalam arena politik, atau ia tetap jadi seorang ilmuwan dan sekaligus “*public intellectual*” seperti selama ini.

Yang pasti, tulisannya tentang pelbagai persoalan politik di Indonesia, yang dihimpun dalam buku ini, menunjukkan kualitas yang langka di antara mereka yang mengisi kolom-kolom koran dan majalah sejak dua dasawarsa terakhir: paparannya terang, tapi tak pernah simplistis, argumennya bergairah, tapi tak pernah meremehkan pandangan yang berlawanan. Ia dapat menggabungkan pengetahuan teori yang luas dan dalam—yang tak saya lihat pada ilmuwan politik lain—dengan rasa terlibat dalam soal-soal yang aktual di sekitarnya.

Dan yang juga tak dapat diabaikan: Rizal tidak takut untuk mengutarakan pendiriannya yang—dalam kategori kalangan intelektual Indonesia—dianggap “kanan”. Kritiknya terhadap

tesis-tesis Marxisme (dari “Nabi yang Gagal” sampai dengan bahasannya tentang teori Peter Berger), pembelaannya kepada pemikiran “pluralis” terhadap kritik Gaventa, dukungannya kepada pemikiran Nozick, dan enthusiasmenya kepada Isaiah Berlin yang lebih ketimbang kepada Charles Taylor, meletakkannya di dalam garis “liberal”.

Kata “liberal” memang bisa membingungkan; di dalam lek-sikon politik Amerika ia berarti lawan dari “konservatif” dan tak jarang dikaitkan dengan pengertian “progresif”. Dalam *The New Republic* (Maret, 2007) Paul Starr, sosiolog Princeton University, merumuskan “liberalisme” dengan mengatakan bahwa kaum liberal “mendukung peran negara yang lebih luas dalam urusan sosial dan ekonomi”. Di dalam kancah politik Inggris dan Eropa, “liberal” berarti bukan “kiri”, bukan misalnya komunis atau sosial-demokrat. Di Indonesia, sejak Bung Karno mengutuk “demokrasi liberal” dalam rangkaian kampanye “demokrasi terpimpin” dan “sosialisme”, kata “liberal” punya konotasi yang buruk, dikaitkan dengan sikap pro-“Barat”.

Jika Rizal Mallarangeng dikatakan “liberal”, itu mungkin karena ia mendukung kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, dan kebebasan memilih kepercayaan. Ia juga mendukung perluasan pasar bebas, kebebasan peradilan dari campurtangan kekuasaan lain, dan tentu saja jadi penganjur “demokrasi liberal”, yang tak lain: demokrasi dengan pemilihan terbuka dan adil, yang tersedia bagi semua warganegara yang dianggap setara di depan hukum.

Dengan kata lain: cita-cita pokok Reformasi menjelang dan sejak 1998, tahun runtuhnya “Orde Baru”.

Saya belum diyakinkan apakah dewasa ini di Indonesia telah tumbuh ide-ide alternatif bagi cita-cita pokok itu. Yang umumnya paling terdengar adalah semangat yang menentang pasar bebas, apalagi “globalisasi” dan yang disebut sebagai “neoliberalisme”. Sekarang oposisi ini satu-satunya argumen

yang paling berpengaruh yang melantunkan semangat “kiri”, setelah “kiri” yang terdahulu jadi menciut karena gagalnya eksperimen sosialisme di pelbagai negeri.

Semangat “kiri” ini bagi saya merupakan ekspresi terkuat kembalinya “*the ethical*” ke dalam “*the political*”. Dengan itu, beberapa hal buruk yang tampak dewasa ini disoroti dan diserang: ketimpangan sosial, rusaknya lingkungan karena modal dibiarkan merajalela, dan bercabulnya komodifikasi kehidupan.

Tapi harus diakui, semangat “kiri” ini punya problem ketika harus menguraikan sejauh mana peran “Negara” dalam mengatasi hal-hal buruk itu. Terutama di Indonesia. Inilah republik yang pernah mengalami ambruknya perekonomian karena percobaan “sosialisme Indonesia” pada 1958-1965. Sejak itu birokrasi sangat berkuasa, tercermin dari banyaknya perizinan dalam hidup ekonomi dan sosial. Sejak itu—sejak “ekonomi terpimpin” meletakkan jenderal dan pejabat untuk memegang bisnis perkebunan, pertambangan, transportasi, dan lain-lain—meruyak korupsi. Hingga hari ini.

Menghadapi kondisi itu, pemikiran yang menentang “pasar bebas” tak banyak berbicara untuk menguraikan posisinya. Persoalan klasik belum terjawab: bagaimana menghadapi “modal besar” tanpa menggunakan tangan birokrasi yang besar? Di tengah kekosongan jawaban itulah Rizal Mallarangeng sangat fasih dalam menghadapi semangat yang disebutnya “populis” itu—sebuah “populisme” yang bersuara keras tapi akhirnya terasa gagap.

Persoalan yang bisa timbul dari situasi polemis—yang tampak merangsang dan menghidupkan pelbagai tulisan dalam buku ini—ialah menajamnya sebuah pendirian. Sebuah argumen bisa jadi seperti pisau bedah: tajam, menyempit, tegar. Pada saat yang terbaik, argumen Rizal sulit ditangkis; pada saat yang terburuk, ia jadi kurang kritis terhadap kesimpulan-kesimpul-

annya sendiri. Saya, misalnya, melihat bahwa pandangannya tentang pemerintahan George W. Bush keliru. Bush, yang bagi Rizal “wakil yang hampir sempurna arus realisme dalam politik”, tak lebih daripada boneka desain “*The New American Century*” yang berangkat dari ilusi besar tentang kekuatan Amerika di abad ini. Kekuatan militer Amerika memang tak tertandingi, tapi kekuatan itu tak bisa menyelesaikan tujuan-tujuan penting, bahkan bisa kontraproduktif: terorisme yang diperangnya mendapatkan angin dari perasaan anti-Amerika yang meluas sejak Perang Irak yang bermula dari alasan yang salah dan palsu. “Bush tentu tidak mungkin menghindari sepenuhnya dari tuntutan agar kebijakan luar negeri pemerintahannya juga mencerminkan sentiman moral rakyat AS yang sangat memuja demokrasi dan hak-hak asasi,” tulis Rizal. Tapi Bush ternyata bisa terus bekerja dengan reputasi yang tercela justru dalam soal hak asasi: Guantanamo, penghalalan penyiksaan tahunan. Demokrasi Amerika mengagumkan—tapi juga bisa jadi saluran paranoia setelah “11/9”, atau “patriotisme” yang naif dan berpikiran sempit dan dengan mudah siap mengagungkan peperangan. Tak mengherankan bila sejarawan Tony Judt menulis dalam *The New York Review of Books* (1 Mei 2008): “Amerika Serikat kini satu-satunya demokrasi yang telah lanjut di mana tokoh-tokoh publik mengagungkan dan menjunjung tinggi militer, sebuah perasaan yang dikenal di Eropa sebelum 1945 tapi tak terasa lagi sekarang.”

Tapi harus saya katakan segera: kekeliruan analisis seperti tentang pemerintahan Bush itu—yang ditulis sebagai polemik cepat—bukan cerminan dari tulisan-tulisan Rizal umumnya. Tak boleh dilupakan: sumbangan Rizal terpenting adalah dalam mengubah pemikiran dan penulisan politik yang dominan di Indonesia. Rizal menunjukkan dengan efektif bahwa analisis politik bukanlah serangkaian petuah tentang “apa yang sebaiknya”, melainkan tentang apa yang tidak.

Ketika demokrasi liberal dirundung apa yang disebut Simon Critchley dalam *Infinitely Demanding* (Verso, 2008) sebagai “*motivational deficit*”, kembalinya “*the ethical*” ke dalam “*the political*” memang perlu. Dalam tulisan-tulisannya, Rizal tidak mencoba membantu pencarian ke arah itu. Tapi itu memang bukan tugas dan panggilannya sebagai seorang ilmuwan politik—meskipun ia ilmuwan dan sekaligus komentator politik terbaik yang kita punyai selama ini.

Pengantar Penulis

Setangkai Anggur, I Can Do No Other

AKHIRNYA TERBIT JUGA.

Sudah cukup lama sebenarnya kumpulan tulisan ini disiapkan dan beberapa sahabat dekat saya di Freedom Institute, terutama Nirwan Dewanto dan Zaim Rofiqi, sudah membaca naskahnya berulang kali. Zaim bahkan telah menerjemahkan dengan baik beberapa paper saya dalam bahasa Inggris yang saya tulis di Columbus, Ohio. Tapi entah kenapa, saya cukup lama terombang-ambing antara ya dan tidak. Barulah setelah mereka meyakinkan beberapa kali, akhirnya saya setuju.

Malahan, setelah melihat kumpulan tulisan ini dirangkai menjadi satu draf buku, dibagi dalam topik yang tersusun rapi, saya jadi agak terkejut bercampur senang. Ternyata, dalam rentang waktu 1993-2008, saya telah menulis cukup banyak tentang beragam isu, mulai dari filsafat politik, demokratisasi, globalisasi, kebudayaan, ekonomi, politik internasional, hingga tokoh-tokoh politik dan sejarah. Keragaman isu dan topik yang ada di sini barangkali mencerminkan kelemahan saya yang

cenderung tidak terlalu sabar untuk berlama-lama mempelajari hanya satu atau dua topik saja. Saya senang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membaca buku politik minggu ini, dan minggu depan sudah memegang buku lain lagi mengenai sejarah ekonomi.

Yang juga membesarkan hati saya adalah bahwa, di samping keragaman dan cakupannya yang cukup luas, kumpulan tulisan ini ternyata tidak tercerai-berai, melainkan disatukan oleh beberapa ide dasar, suatu cara pandang tertentu terhadap dunia dan kompleksitas permasalahan di dalamnya. George F. Will pernah berkata bahwa ide-ide datang pada kita seperti buah anggur, berkelompok dan berderetan dalam tangkai yang sama. Kalau harus menggunakan terminologi, maka mungkin bisa dikatakan bahwa tangkai anggur saya adalah gagasan liberal, dalam pengertian klasik, suatu gugusan ide yang didasarkan pada kepercayaan besar terhadap kebebasan manusia. Barangkali, tanpa sepenuhnya sadar, gagasan inilah—yang tumbuh di Eropa pada abad ke-18, terutama di Inggris dan Skotlandia—yang selalu mewarnai cara pandang saya terhadap dunia di sekitar saya.

Saya cukup senang, karena dengan begitu sebagai penulis saya bukan lagi tanpa alamat. “*A writer*,” seingat saya kolomnis Thomas L. Friedman pernah setengah meledek, “*is an observer with attitude*.” Seperti setiap penulis lainnya, saya percaya bahwa ide-ide saya mewakili kebenaran, setidaknya untuk sementara waktu. Tapi kalau toh ternyata saya keliru, atau mungkin terlalu kaku dan sempit dalam memandang beberapa hal, setidaknya saya telah berusaha menawarkan sesuatu.

Karena itu, kalau boleh meminjam Martin Luther, saya ingin berkata, “*Ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.*”¹ Kini saya serahkan kepada sidang pembaca untuk menilai

1 “*Here I stand. I can do no other. So help me God. Amen.*”

apakah setangkai anggur yang saya tawarkan lewat buku ini cukup bermanfaat dalam upaya pencarian pengertian yang lebih baik tentang hal-hal penting dalam kehidupan ini.

Saya masih harus membuka-buka catatan pribadi untuk mengerti dengan persis kapan dan bagaimana ide-ide dasar yang ada dalam kumpulan tulisan ini mulai membentuk kerangka berpikir saya. Pada mulanya barangkali adalah sifat dan kepribadian. Beberapa kawan sering memperingatkan saya dengan setengah frustrasi bahwa saya terlalu optimistis dalam melihat manusia dan kehidupan. Saya tidak tahu, tapi harus saya akui bahwa saya memang senang dan gampang tertarik dengan hal-hal yang membangkitkan semangat, pandangan yang terbuka dan melihat sisi yang baik dari kehidupan ini, yang melihat kelemahan manusia sebagai sisi lain dari kekuatannya, yang melihat proses perjalanan waktu sebagai suatu kecenderungan progresif justru karena manusia selalu berusaha, bekerja, berpikir, menghindari kelemahannya sambil mendorong kelebihanannya, dan seterusnya dan seterusnya.

Apakah hal itu adalah hasil belajar, akumulasi pengalaman hidup, atau datang begitu saja, suatu kenyataan internal yang berada di luar kontrol saya? Terus-terang, saya tidak tahu. Tapi saya menduga, hal itulah barangkali yang menyebabkan saya gampang tertarik pada gagasan liberal sewaktu mulai mendalami teori-teori sosial semasa mahasiswa di UGM sekian tahun silam. Setelah melewati tahun-tahun pertama dan terpukau pada pemikiran sosialis, teori ketergantungan, hingga ke Jalan Hidup Mahatma Gandhi, saya seolah mendapat pencerahan dan pelan-pelan mulai menyadari kelemahan ide-ide yang saya pelajari. Saya mencari penggantinya, dan tanpa mengalami banyak kesulitan, bertemu dan masuk semakin dalam ke jantung tradisi pemikiran liberal klasik.

Saya merasa bahwa ide-ide ini bukan saja lebih benar, lebih mampu membawa manusia ke cita-cita yang ideal, seperti kesejahteraan, perdamaian, kemajuan, melainkan juga karena ia lebih kena di hati saya. Ada skeptisisme, tetapi ada juga optimisme. Ada romantisme, tetapi tidak kurang juga realisme dan sikap yang realistik dalam memandang manusia dan masyarakat. Singkatnya: suatu pandangan dunia yang ingin mendorong kemajuan, tetapi dengan tetap berpijak di bumi, dengan menyadari kelemahan dan kelebihan manusia sebagai manusia; suatu pandangan yang menyadari bahwa masyarakat yang lebih baik hanya mungkin dibangun justru dengan menyerap dan memberi saluran pada kelemahan dan kelebihan tersebut, pada kecemasan dan harapan mereka, bukan dengan mematikan atau menafikan salah satunya.

Setelah periode awal di Yogya, sambil melanjutkan studi di AS saya berusaha semakin mendalami ide-ide tersebut, sambil terus berupaya memahami alternatif dan penentang-penentangannya. Pastilah usaha seperti ini tidak akan pernah bertemu ujungnya. Kalau bisa memutar kembali jarum jam, saya sebenarnya ingin mempelajari lebih banyak lagi. Kegelisahan tidak pernah berhenti. Pertanyaan tidak pernah selesai. Walau demikian, sejauh ini saya sudah merasa sanggup berdamai dengan diri sendiri. Dengan segala kelemahan yang ada, saya merasakan kepuasan tersendiri telah mencoba mengeksplorasi suatu gagasan, berikut jalinan ide-ide turunannya, dengan keterlibatan emosional yang cukup intens, dengan perasaan bahwa saya berdiri *on the right side of history*.

“*On the right side of history?*” sebagian orang mungkin bertanya, bukan tanpa alasan yang jelas. Bukankah akhir-akhir ini, dengan bangkrutnya Lehman Brothers dan rontoknya raksasa-raksasa di Wall Street, dengan krisis global saat ini,

yang mengingatkan banyak orang pada Depresi Besar di tahun 1930-an, kapitalisme dan liberalisme sudah gagal? Moskwa 1989 dan Wall Street 2008: tidakkah keduanya menjadi buktiagalnya dua sistem besar, terkuburnya dua 'isme' modern yang saling bersaing?

Karena masih berada di tengah pusarannya, agak terlalu dini untuk saat ini menjelaskan akhir prahara finansial 2008. Dan tentu saja dengan terjadinya peristiwa ekonomi yang dahsyat ini—mungkin ia bisa disebut sebagai krisis globalisasi pertama di abad ke-21—akal sehat menuntut kita untuk bertanya dan menimbang-nimbang, kalau perlu dengan menggali kembali asumsi-asumsi dasar yang ada. Dan kalau kita membaca komentar dan tulisan-tulisan para pemikir di berbagai media populer dalam minggu-minggu belakangan ini, hal itu memang sudah mulai dilakukan. Paul Krugman, George Soros, Alan Greenspan, Francis Fukuyama, Fareed Zakaria adalah beberapa penulis dan pemikir, belum lagi para editor dan wartawan, yang sudah mencoba melakukannya dengan versi mereka masing-masing.

Tapi perdebatan di antara mereka bukanlah tentang kapitalisme vs sosialisme, atau kapitalisme vs sistem lainnya. Perdebatan mereka adalah pengulangan kembali dalam bentuk baru perdebatan Keynes vs Hayek di tahun 1930-an yang mencari jalan keluar dan sebab-musabab terjadinya Depresi Besar. Ia adalah serangkaian perdebatan intramural: bagaimana meningkatkan dan menyesuaikan sistem kapitalisme dengan konteks zamannya.

Kalau kita lihat fakta-faktanya, krisis global 2008 adalah kombinasi dari beberapa faktor pemicu. Pertama, meletusnya *bubble* pada sektor perumahan di AS; kedua, terlalu lamanya kebijakan *easy money* The Fed di bawah Alan Greenspan; dan ketiga, terjadinya peningkatan inovasi instrumen finansial terutama dalam satu dekade terakhir, seperti *collateralized debt*

swap dan berbagai *derivatives* lainnya. Faktor-faktor ini berlangsung dalam konteks globalisasi yang semakin intensif, yang berarti bahwa begitu banyak kalangan dari berbagai belahan dunia yang juga turut terlibat secara serempak, langsung atau tidak, dalam jalinan satu atau dua faktor tersebut.

Selain itu, dari segi *mood* para pelaku bisnis dan tokoh-tokoh pemerintahan terutama di AS, tumbangnya komunisme pada akhir 1980-an barangkali memberi ruang yang terlalu luas pada euforia dan optimisme, yang terus berlanjut. *Let's dance the night and stop the coming of the morning sun*. Akibatnya adalah kehatian-hatian dan *prudence* yang berkurang, yang pada ujungnya adalah malapetaka.

Isu yang diperdebatkan sekarang adalah perlu tidaknya peran pemerintah diperbesar agar di masa-masa mendatang kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Perlukah regulasi diperketat, pengendalian dan kontrol usaha swasta diperkuat?

Saya kira pendulum memang sedang bergerak, walaupun masih tersisa pertanyaan besar: regulasi seperti apa, sejauh mana, peran pemerintah yang bagaimana? Apapun jawaban atas pertanyaan ini, ia pasti akan bersifat temporer, sebagaimana setelah Depresi Besar teori-teori Keynesian menjadi dominan, lalu disusul oleh teori-teori Hayekian dan Friedmanian.

Justru di situlah salah satu kekuatan sistem kapitalisme. Dari satu krisis ke krisis lainnya ia menyerap pembaruan, perubahan, penyesuaian dengan kondisi kontemporer, sambil terus memperbesar kemungkinan bagi banyak orang untuk meraih kecukupan material. Semua ini terjadi tanpa menghilangkan elemen-elemen dasar yang menopangnya sebagai suatu sistem, yaitu kebebasan dalam memilih, kebebasan untuk berusaha, kebebasan untuk mengambil risiko, serta penghargaan terhadap hak-hak dasar pemilihan.

Jadi, walaupun bandul pemikiran tentang hal-hal tertentu dalam pengelolaan kehidupan bersama sedang bergeser, dalam

hal ini isu-isu ekonomi yang spesifik, saya masih belum terlalu yakin bahwa tenda besar pemikiran liberal klasik sedang goyah. Malah mungkin sebaliknya. Dengan semakin meningkatnya infrastruktur pendidikan di berbagai belahan dunia, dengan demokratisasi yang terus terjadi, walaupun dengan pasang dan surut, dengan semakin banyaknya informasi dan pilihan yang tersedia bagi semakin banyak individu: semua ini semakin memungkinkan kita untuk memikirkan, merumuskan dengan lebih baik, serta membela ide-ide kebebasan dalam berbagai aspeknya.

Dengan menjelaskan semua itu, saya tidak mengatakan bahwa pemikiran liberal tidak memiliki ketegangan di dalam dirinya sendiri. Ia bukanlah suatu kerangka berpikir yang memiliki jawaban yang selesai terhadap semua soal. Dari kerangka berpikir yang pada dasarnya sama, di AS misalnya, bisa tercipta dua kubu atau partai politik yang memiliki program dan basis pendukung berbeda, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kalau kita menghilangkan ekstremisme di ujung kiri dan kanan dalam kedua partai ini, maka yang terlihat adalah persamaan dalam perbedaan, *unity in diversity*, baik dalam program ekonomi maupun dalam banyak soal lainnya. Perbedaan yang ada hanyalah soal *degree*, bukan *kind*, soal sekian persen tambahan atau pengurangan pajak penghasilan, bukan pada ide bahwa ekonomi pasarlah yang paling mungkin membawa kesejahteraan dan memperluas kemungkinan bagi kemajuan masyarakat.

Di berbagai negeri lain, hal yang sama juga terjadi walaupun dalam konteks dan ekspresi politik yang berbeda-beda. Beberapa tulisan dalam buku ini akan memperlihatkan bahwa beberapa isu, seperti hakikat dan peran negara yang optimal, sikap terhadap separatisme, posisi individu dan masyarakat yang pas dalam kenyataan yang terus berubah, posisi dan ca-

kupan hak-hak asasi manusia, tipe ideal sistem pemerintahan yang demokratis, dan semacamnya, dapat disikapi secara berbeda oleh orang-orang yang pada dasarnya setuju terhadap asumsi dasar tentang hak dan kebebasan manusia.

Sejarah dengan huruf kapital memang mungkin telah berakhir. Namun sejarah dengan huruf kecil terus berlangsung setiap hari di sekeliling kita. Dan kalau sudah begitu, maka menurut saya, kita harus mengingat kembali apa yang selalu disampaikan oleh Sir Isaiah Berlin dengan mengutip Kant: *Out of the crooked timber of humanity, no straight thing was ever made.*

Jadi menurut saya, selain memang ada koherensi gagasan, tenda besar pemikiran liberal membuka peluang bagi perbedaan, inovasi ide-ide, penyesuaian pemikiran universal dengan konteks lokal, dan semacamnya. Dalam hal ini konsistensi berjumpa dengan kearifan, teori bertemu dengan kekayaan pengalaman.

Karena itulah, tradisi pemikiran ini tidak pernah kering. Dan jika diterapkan sebagai suatu perspektif dalam melihat sejarah politik, pergulatan ide-ide dan aktor-aktor sejarah di dalamnya, serta dalam melihat dilema-dilema yang dihadapi dalam mengaplikasikan kekuasaan politik untuk mencapai tujuan-tujuan bersama, maka tradisi ini akan menjadi semakin kaya dan penuh warna.

Untuk konteks pemikiran di Indonesia, harus saya akui bahwa tradisi pemikiran demikian memang belum terlalu berkembang. Warisan tradisi intelektual kita lebih banyak bertumpu di aras sosialis, nasionalis, dan religius. Apa yang diungkapkan oleh Bung Karno sebagai suatu penciptaan tenda politik besar dari penggabungan ketiganya—nasionalisme, sosialisme, agama—adalah suatu ekspresi yang tanpa sadar sebenarnya te-

lah menggambarkan dengan baik genealogi pemikiran di negeri kita.

Bukanlah hal yang mudah untuk merintis jalan baru. Ke-rapkali, salah pengertian dan kecurigaan lebih sering terjadi, bahkan di tingkat istilah atau terminologi. Tapi syukurlah, konteks besar Indonesia juga telah berubah, dan sekarang sudah muncul cukup banyak pemikir muda yang mulai membuka diri dan juga merintis suatu tradisi pemikiran baru.

Kepada mereka semua, mudah-mudahan buku ini dapat menjadi teman di perjalanan, sekadar pembanding untuk merumuskan ide-ide yang lebih baik lagi.

Akhirnya, yang tersisa adalah rasa syukur dan ungkapan terimakasih. Saya tidak mungkin menyebut satu persatu mereka yang telah membantu saya, langsung maupun tidak. Tetapi secara khusus saya ingin berterimakasih kepada Nirwan Dewanto, Zaim Rofiqi, Nong Darol Mahmada, Candra Gautama, Luthfi Assyaukanie, Sugianto Tandra, Saiful Mujani, Jeffrie Geovannie, Hamid Basyaib, Kuskridho Dodi Ambardi, Prof. Bill Liddle, Ulil Abshar-Abdalla, Ahmad Sahal, Nirwan Arsuka, Ayu Utami, Rustam F. Mandayun, M. Chatib Basri, M. Ikhsan, Raden Pardede, Lin Che Wei, Mahendra Siregar, Bayu Khrisnamurti, Amir Hakim Ekananda, Hidayaturohman, Agatha Dyah Sedah Asih. Mereka adalah sahabat-sahabat saya.

Saya pernah membaca beberapa laporan penelitian bahwa salah satu kunci kebahagiaan hidup adalah persahabatan yang akrab dan tulus. Saya tidak terlalu mengerti bagaimana mendefinisikan “kebahagiaan”. Namun saya merasa bahwa hidup saya memang lebih kaya dan menyenangkan dengan adanya sahabat-sahabat yang membantu saya.

Secara khusus saya juga ingin berterimakasih kepada Andi A. Mallarangeng. Sebagai kakak, dia sangat menyenangkan. Dia mungkin tidak sepenuhnya mengerti betapa besar jasanya dalam perjalanan hidup saya. Sejak kecil hingga mahasiswa,

bahkan hingga sekarang, dia bukan saja kakak dan teman sepermainan, melainkan juga seseorang yang menjadi *sparring partner* dalam begitu banyak perdebatan yang *passionate* tentang berbagai hal. Selain itu, dalam beberapa percabangan jalan hidup di masa remaja saya, dia adalah titipan Tuhan, yang mengajak saya untuk menuju pada jalan yang benar.

I am a very lucky person because of him.

Kepada Dewi Tjakrawati, saya juga ingin menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya. Banyak tulisan dalam buku ini saya tulis hingga larut malam. Dan salah satu kepuasan terbesar saya adalah jika keesokan paginya, Dewi, setelah membaca naskah saya diam-diam, membangunkan saya sambil memberi komentar yang membesarkan hati.

Semoga terbitnya buku ini juga memberi kepuasan yang sama baginya.

Jakarta, 6 November 2008

Individualisme dan Utopia:

Tentang Filsafat Sosial, Politik, dan Ekonomi

Freedom: Sebuah Kerangka Umum

SANGAT PENTING bagi kita membahas *freedom* dalam konteks Indonesia mutakhir. Arti dasar kata *freedom* adalah bebas. Dalam kebudayaan kita, bebas ini kadang dikonotasikan kurang tepat; diasosiasikan dengan cara hidup yang terlalu bebas, seks bebas, dan segala hal yang buruk. Ringkasnya: diidentikkan dengan liar. Jadi, kebebasan disamakan dengan keliaran.

Padahal *free* itu bermakna positif. Kebebasan mengandaikan makhluk yang secara alamiah memiliki kemampuan untuk berpikir, untuk merasa, dan untuk memilih bagi dirinya sendiri. Karena itu, kebebasan jika diterjemahkan sebagai sebuah sistem pengaturan masyarakat, berarti sistem yang percaya bahwa individu-individu yang ada dalam suatu masyarakat sesungguhnya bisa menggunakan kemampuan dan harkat mereka secara alamiah, serta mampu memilih bagi diri mereka sendiri.

Kadang memang ada kekhawatiran bahwa kalau orang dibiarkan bebas memilih, misalnya dalam konteks sebagai warganegara, maka orang akan memilih ke arah yang buruk. Tindakan memilih terkadang memang bisa keliru. Tetapi itu bagian dari proses pembelajaran untuk menjadi dewasa, untuk menjadi otonom. Seorang pemikir Jerman, Immanuel Kant, pernah

menulis risalah tentang kebebasan dan emansipasi manusia. Kita, kata filsuf abad ke-19 itu, harus percaya bahwa manusia mampu memilih, mampu tumbuh. Dalam proses itulah berlangsung pembelajaran.

Kalau sang manusia, sang individu, ingin dibuatkan pilihan terus-menerus oleh otoritas di luar dirinya, maka individu tersebut—dan ini bisa kita perluas menjadi masyarakat—tidak akan kunjung matang. Jadi situasinya adalah: kita buat sebuah sistem yang menjamin kebebasan agar individu-individu bebas memilih, dan dalam proses memilih terus-menerus dalam hidupnya itulah ia menjadi lebih matang, lebih otonom lebih dewasa.

Itu tidak perlu disalahpahami sebagai hal yang akan menjurus ke individualisme, sebagai sesuatu yang dilawankan dengan “budaya Timur”, termasuk kita di Indonesia, yang biasanya mengecamnya karena individualisme dianggap akan menciptakan manusia dan masyarakat yang individualistik, yang tidak solider terhadap penderitaan sesama, dan sebagainya. Kita harus akui fakta keras bahwa setiap manusia punya kecenderungan untuk melihat dunia dengan kaca mata yang dia miliki; untuk melihat kepentingan yang ada di sekitarnya lewat kepentingannya sendiri. Dan itu kenyataan alamiah. Manusia di mana pun selalu begitu. Tidak ada masyarakat yang mengerti di luar kaca mata yang digunakannya. Karena itu individualisme bukanlah sebuah paham. Ia adalah sebuah kenyataan.

Saya sendiri tidak pernah mengkhawatirkannya. Yang saya cemas justru hal sebaliknya. Orang mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan agama, untuk memaksakan kehendaknya pada orang lain. Saya baru baca koran bahwa di Padang, misalnya, siswi-siswi—yang beragama Islam maupun non-Islam—dipaksa untuk memakai jilbab. Ini bentuk pemaksaan kehendak yang paling kasar. Kalau hal itu diwajibkan di kalangan internal kaum muslimat, kita masih bisa berdebat.

Tapi kalau ketentuan itu juga dipaksakan terhadap warga non-Islam, ini betul-betul bentuk kolektivisme yang paling kasar. Itu merupakan otoritarianisme yang tidak menghargai individu, tidak menghargai kebebasan pilihan.

Mari kita lihat bagaimana kenyataan tentang individualisme itu berlangsung di Amerika Serikat, yang selama ini dianggap memunculkan sikap individualistik, yang tidak memerhatikan kepentingan dan derita manusia lainnya. Saya hidup di Amerika selama delapan tahun, dan saya segera melihat betapa tidak benarnya anggapan itu. Kehidupan berkeluarga, kehidupan berkelompok, selalu ada dalam masyarakat Amerika. Jadi, antara individu dan lingkungannya tidak mungkin dipisahkan. Yang menghubungkan mereka adalah paham atau pandangan tentang bagaimana sang individu dan lingkungannya berhubungan.

Di satu pihak, ada kecenderungan pada masyarakat yang lebih tradisional, yaitu ingin memaksakan apa yang disebut sebagai kepentingan kelompok atau kepentingan kolektif kepada individu. Kalau kita lihat dalam masyarakat yang non-demokratis, kepentingan kelompok hampir selalu berarti kepentingan segelintir orang yang bisa memaksakan kekuasaannya, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Inilah yang sebenarnya menjadi masalah. Kalau kita mengatakan ada sebuah kepentingan bersama yang harus diutamakan atau diperjuangkan, bagaimana kita sampai pada perumusan kepentingan bersama itu, dan bagaimana kita mengharuskan individu untuk takluk?

Di Amerika atau masyarakat Barat umumnya, ada konstitusi yang memberikan garis batas yang jelas, di mana negara sebagai perwakilan kelompok bersama tidak boleh melampaui batas-batas tertentu. Hak-hak kebebasan berpendapat adalah hak individual yang tidak boleh diambil oleh negara dalam kondisi apapun, kecuali kondisi ekstrem.

Di negeri-negeri itu, apa yang disebut kemaslahatan umum dirumuskan melalui serangkaian prosedur tertentu. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa menyatakan bahwa “sayalah yang mewakili kepentingan umum”. Itu harus diolah dalam suatu prosedur yang disebut prosedur demokratis, di mana ada parlemen, eksekutif, ada mahkamah agung yang memeriksa apakah prosedurnya sudah dilewati. Jadi, ada hukum, ada konstitusi yang memberi batasan apa yang disebut kepentingan bersama. Makanya dalam Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, yang pertama kali dijelaskan adalah bahwa ada hak-hak individu yang tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah dan negara. Inilah yang disebut *inalienable rights*. Hak-hak yang tak dapat dilucuti itu mencakup hak untuk hidup, hak untuk mencari penghidupan, hak untuk bahagia; kemudian ada tambahan melalui amandemen: hak individu untuk berpendapat, untuk beragama, memilih agama masing-masing. Itulah hak yang paling dasar.

Secara implisit, konstitusi kita yang paling baru, setelah amandemen, pun sudah menjamin semua hak itu, meski ada beberapa masalah. Tetapi masalah kita yang lebih besar sekarang adalah konteks sosial dan kulturalnya, sedangkan aturan-aturan legalnya kita sudah punya.

Kritik yang lazim kita dengar bahwa semua konsep itu—individualisme, liberalisme, *freedom*—adalah berasal dari Barat, berakar dan berkembang di lahan Barat, dan dengan sendirinya tidak cocok bagi lahan Timur (Indonesia) yang penuh solidaritas, kekeluargaan, dan sebagainya, perlu diberi perspektif yang tepat. Kenyataannya, di Barat pun, sebelum lahirnya modernitas, situasinya sama dengan yang kita alami; kultur masyarakat mereka cenderung kolektivistik, bersifat gotong-royong, dan sebagainya. Tapi di Amerika dan di Eropa terjadi perkembangan,

dan evolusi. Berkembangnya modernitas membawa pula perkembangan paham yang menganggap individu sebagai otonom, yang mampu memilih bagi dirinya.

Ini pun bahkan terjadi dalam rumahtangga kita. Semakin anak-anak saya tumbuh, semakin tampak karakter bahwa anak-anak ini membutuhkan ruang bagi dirinya sendiri—yang paling gampang adalah: mereka mulai minta kamar sendiri. Dengan kata lain, jika kemampuan ekonomi keluarga mendukung, secara alamiah anak-anak yang berangkat remaja mulai menuntut privasi. Ini berlangsung secara alamiah, tanpa diatur oleh siapapun. Begitu seorang anak melihat kemampuan-kemampuan alamiahnya mulai berkembang, dia sedikit-banyak meminta ruang bagi dirinya sendiri. Unit analisis dengan berbasis pada keluarga seperti yang saya ilustrasikan itu juga penting, sebab individualisme tidak berarti mempersetankan keluarga dan kelompok-kelompok yang lebih besar dari keluarga.

Individualisme adalah pengakuan bahwa individu adalah subyek yang mampu merasa dan mampu memilih bagi dirinya sendiri. Dia harus dibiarkan dalam proses belajar. Kalau kita tidak mengakui ini, kita terjebak dalam suatu situasi seperti yang lazim terjadi dalam masyarakat tradisional—sekadar menyebut contoh yang paling gampang dan jelas. Dalam masyarakat semacam itu individu selalu diberitahu bahwa suatu kepentingan tertentu adalah kepentingan adat atau kepentingan suku. Tapi siapa yang mendefinisikan kepentingan adat atau kepentingan suku itu?

Kalau ada seorang anggota masyarakat Bugis klasik sudah mau meninggalkan sarung, apa alasan kita untuk berkata bahwa dia tidak boleh lagi memakai jins karena hal itu bertentangan dengan tradisi masyarakat Bugis; bahwa adat harus dijaga? Kalau anak tidak lagi ingin kawin secara adat, tapi mau kawin secara modern supaya hak-haknya terjaga, baik dengan surat, dengan kontrak dan sebagainya, apa alasan terbaik untuk

mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa bertindak begitu, sebab adat kita tidak demikian? Ini sebenarnya dilema antar-pilihan. Kita bisa melihatnya secara gamblang pada kisah Siti Nurbaya dalam sastra kita. Siapa yang memilih buat sang individu: dirinya sendiri (Siti Nurbaya) atau otoritas di luar dirinya—ayah, ibu, paman?

Di belakang skema itu ada sistem adat besar, ada prasangka, kecurigaan terhadap orang lain; barangkali juga ada paham yang keliru; ada paham yang pada suatu waktu bisa benar tapi dalam perubahan zaman tidak lagi benar. Pertanyaan pokoknya: boleh atau tidak Siti Nurbaya memilih buat dirinya sendiri, dalam hal ini memilih suami. Akhirnya soal pilihan ini meluas, bukan hanya untuk memilih suami, tapi juga untuk memilih sekolah, untuk memilih cara hidup—untuk memilih macam-macam hal. Harus ada batas-batas bagi kita untuk berkata pada diri sendiri bahwa sesuatu itu merupakan hak individu untuk memilih; bahwa dia harus melakukan itu buat dirinya sendiri, agar dia tumbuh menjadi manusia yang semakin dewasa.

Maka kritik yang menampik semua itu dengan alasan bahwa ia berasal dari Barat, tidaklah sah. Zaman sekarang ini tidak lagi mengizinkan kita untuk memilah-milah Barat dan Timur. Kalau kita masih memakai argumen ini, berarti kita mundur ke perdebatan sebelum 1960-an dan 1970-an sampai jauh ke belakang. Bahwa kita masih bisa mempersoalkan konsep kebebasan secara filosofis, ya tentu saja. Setiap konsepsi pasti punya kelemahan. Tapi saya tidak melihat alternatif yang bisa kita terapkan sebagai dasar sistem sosial atau sistem politik, selain paham kebebasan. Jika kita gunakan sebagai sistem gagasan, kebebasan ini akan menjadi dasar bagi sebuah paham dan sebuah sistem yang kita sebut sistem liberal atau liberalisme.

Sebagai orang Indonesia, orang “Timur”, saya sendiri tidak merasakan kompleks tertentu terhadap Barat. Mungkin saya mendapat keberuntungan-keberuntungan tertentu. Sejak pertama kali tinggal di Amerika, saya tidak merasakan sesuatu yang disebut *cultural shock*. Saya juga mengamati perkembangan anak saya. Sejak awal, dia kelihatannya sangat Amerika, karena lahir di sana. Dia bersekolah di sana sejak kelas nol kecil. Ketika dia di kelas 3 SD, kami pulang, dan dia harus pindah ke sekolah Indonesia. Saya khawatir dia mengalami *cultural shock* yang sebaliknya—sebagai “anak Amerika” yang tiba-tiba harus hidup di Indonesia. Ternyata secara umum situasinya normal belaka.

Pada satu-dua bulan pertama memang ada sedikit masalah, terutama dalam soal yang remeh-temeh seperti makanan dan gigitan nyamuk. Tapi dari sudut paham kehidupan, saya tidak melihat adanya *shock* tertentu dalam batin anak saya. Saya justru melihat transisi yang *smooth*—tampak dari cara dia bersekolah, bercengkerama, berbincang-bincang, bermain dengan kawan-kawannya. Dia bisa dengan gampang menjadi orang Indonesia. Dan kalau bertemu dengan kawan-kawannya yang pernah tinggal di Amerika, dia bisa berbincang dengan enteng dengan bahasa Inggris.

Jadi saya melihat manusia punya kemampuan untuk beradaptasi. Nilai atau kebudayaan bukanlah sesuatu yang absolut, bukan sesuatu yang kalau “sudah dari sononya begitu” tidak bisa lagi berubah. Itulah Bugis, itulah Indonesia. Saya melihat kultur, kebudayaan, nilai, paham itu fleksibel dan yang menentukan adalah manusia. Anak saya bisa. Maka kita yang dewasa, yang sudah banyak baca buku dan punya pengalaman lebih banyak, mestinya lebih mampu dan arif. Mungkin kita bisa berkata bahwa anak-anak memang bisa dengan gampang seperti itu karena mereka, meminjam Geertz, belum dijalin oleh tali-temali nilai-nilai yang koheren. Tapi argumennya bisa juga

kita balik: bahwa anak-anak bisa seperti itu karena mereka memang tidak bisa berhenti mencari dan mau belajar. Pertanyaannya: apakah kita yang tua-tua mau terus belajar atau mau berhenti belajar? Apakah kita mau mandek pada suatu sistem nilai tertentu, sementara dunia berubah; kita mau mengikuti perubahan dunia atau kita mau dunia yang mengikuti kita?

Fakta bahwa terjadi perubahan nilai tidak mungkin bisa ditolak. Tidak ada satu pun masyarakat, kecuali mau disebut masyarakat terasing, yang terisolasi, yang tidak mengalami perubahan nilai, perubahan orientasi, perubahan cara hidup. Tinggal bagaimana kita melihat perubahan itu. Kita mau melihatnya sebagai sesuatu yang membuat kita sedih dan merasa terdesak. Atau kita mau menyambutnya dengan tangan terbuka dan mengakui bahwa itulah hidup dan kita ingin melihat yang terbaik dari sana? Itu adalah hukum alam: perubahan dalam setiap hal. Hidup pun secara fisik berubah. Ini adalah hal yang elementer. Kalau tidak ada perubahan tidak ada kemajuan.

Mari kita lihat secara gampang. Saya kadang-kadang sentimental. Mengingat masa kecil di sebuah desa, di sebuah kota kecil yang indah, hidup dengan saudara-saudara dan keluarga yang sekarang harus tinggal di Jakarta. Apakah saya ingin melihat masa kecil saya yang indah, lalu sedih terus-menerus, meratapi masa yang sudah berlalu, atautkah saya akan melihat ke depan? Dalam soal kebebasan pun saya terkadang melihatnya sebagai masalah melihat kehidupan. Apakah *by nature*, secara alamiah, kita mau pesimistis melihat ke belakang, melihat apa yang berbahaya dan yang jelek dari kehidupan, atautkah kita mau melihat yang bagus dan bermanfaat? Ini soal cara pandang kita melihat manusia.

Kalau kita melihat manusia tumbuh bebas dan memilih, mampukah kita bersikap optimistis bahwa mereka pada akhirnya akan memilih dengan benar dan baik? Atau kita akan

selalu takut, berdebar-debar, khawatir jangan-jangan akan begini dan begitu? Jadi saya melihat ada dua cara melihat kehidupan yang berhubungan dengan pandangan kita tentang manusia, tentang kebebasan, tentang perubahan. Kalau kita *by nature* optimistis, tangan terbuka, melihat ke depan, rasanya kita akan lebih gampang menerima paham yang disebut *kebebasan*—menerima *freedom* sebagai kehendak untuk bebas itu.

Memang ada sesuatu yang hilang. Saya, misalnya, semula hidup dalam suatu keluarga dan masyarakat tertentu, yang memegang nilai-nilai tertentu, katakanlah nilai Bugis atau nilai Indonesia. Setelah menengok ke Barat, bukan hanya sekolah, tapi juga karena bacaan dan sebagainya, tentu ada porsi-porsi nilai dalam diri saya yang tergantikan oleh sistem nilai baru, dan nilai-nilai yang lama itu mungkin hilang entah ke mana. Tapi saya anggap itu sebagai bagian dari proses saya untuk menjadi lebih dewasa, lebih arif, lebih luas melihat dunia. Saya tidak melihat itu sebagai masuknya unsur Amerika atau Barat; saya melihat tumbuhnya diri saya sendiri dalam melihat dunia. Jadi, saya senang bahwa saya berkembang. Bukan karena saya menjadi Amerika atau menjadi Barat, tapi karena saya berkembang sebagai manusia; menjadi mampu melihat begitu banyak hal, belajar begitu banyak, belajar mengadopsi paham yang baru.

Saya tidak perlu membenci paham yang lama atau cara lama. Saya memahaminya. Ibu saya masih sangat Bugis, saya memahaminya. Tetapi saya senang dan dia pun pasti senang melihat saya tumbuh berkembang melampaui generasi orangtua saya. Dan saya berharap anak saya pun seperti itu. Saya, bagaimanapun, hidup dalam konteks tertentu, dan tidak ingin anak kita selalu lebih baik dari diri kita, dan mereka akan semakin tumbuh, semakin lengkap menjadi manusia. Dan pada akhirnya, ini lucunya, dalam perjalanan menjadi manusia, ada yang ber-

kata bahwa itu masalah paham yang paling dasar; ada yang berkata bahwa seseorang itu progresif, linear, atau terkadang berputar kembali menjadi sirkular menuju titik tertentu—saya tidak tahu. Tapi yang pasti: ada perubahan, ada perkembangan, ada sebuah proses di mana manusia mampu belajar untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Kalaupun disebut ada porsi-porsi nilai yang hilang, ada juga penggantinya. Dan mungkin penggantinya lebih baik. Harus begitu. Kalau tidak begitu, kita melangkah ke belakang. Sebagai bangsa, Indonesia pun dihadapkan pada pilihan-pilihan. Sebuah masyarakat senantiasa dihadapkan pada pilihan-pilihan tentang mau melangkah ke manakah mereka. Saya kira dengan proses demokratisasi yang terjadi tujuh tahun terakhir, kita harus bangga bahwa pilihan kita secara umum benar. Tetapi selalu ada orang, kelompok, atau tahap yang bisa menghambat proses kemajuan ini. Dan itulah yang harus kita sadari.

Indonesia memang dinamis dan berkembang, terdiri atas begitu banyak suku, banyak kepentingan, banyak keragaman, banyak kebudayaan. Tetapi kita harus tahu bahwa dalam garis besarnya kita sudah melangkah dengan baik sebagai sebuah masyarakat. Membangun sistem yang baru di mana sebagai landasannya paham kebebasan semakin mendapat tempat. Itu yang harus kita sadari bersama. Dan kita harus melawan potensi-potensi yang bisa menghambatnya. Saya tadi kasih contoh betapa di daerah-daerah, misalnya Sumatra Barat, masih ada dimensi itu. Kita tidak boleh membiarkan hal semacam itu dalam berbagai manifestasinya menjadi dominan di kemudian hari. Itu adalah tugas bersama.

Dalam soal kebebasan (*freedom*) ini, kadang-kadang orang berpikir bahwa eksperimen yang dilakukan oleh negara Amerika Serikat, misalnya, terasa terlalu berani. Mereka memberi ke-

bebasan begitu besar kepada pers, kepada macam-macam institusi, sehingga ada kesan bahwa kebebasan itu akhirnya batasnya tipis sekali dengan keliaran atau anarki. Lagi-lagi, kita perlu lebih cermat melihat hal ini. Kita lihat Amerika memang amat sangat bebas untuk ukuran kita, tapi justru masyarakatnya amat sangat teratur. Lihat saja lalu-lintasnya. Kita mau bilang kita terlalu senang dengan kebebasan, tapi lihatlah jalan raya kita. Begitu liarnya orang, para pengendara. Jadi, kita kadang-kadang juga agak munafik dengan diri kita sendiri, atau kita menerapkan kebebasan pada tempat yang salah.

Artinya, pada saat kita harus bebas, kita justru bersikap sebaliknya. Tapi pada saat kita harus mengikuti aturan dengan ketat, kita justru mau liar. Perilaku di jalan raya dapat dilihat sebagai salah satu contohnya. Tapi dalam masalah hukum pun begitu. Kalau Anda ke Amerika, atau kota-kota yang Anda sebut Barat itu, Anda lihat betapa tertibnya berlalu-lintas di sana; itu merupakan cermin betapa tertibnya perilaku mereka dalam hukum. Mereka terima itu, dan bersikap sebagaimana yang dituntut oleh hukum bersama. Kita tahu bahwa hukum adalah kehendak bersama yang diwujudkan dalam ketentuan tertulis. Nah, kita di sini barangkali mau mengatakan bahwa secara budaya kita tidak terlalu senang dengan kebebasan, kita mau kehendak bersama. Tetapi dipandang dari sudut ke-modernan dalam tata hukum masyarakat, kadang-kadang kita jauh lebih liar ketimbang masyarakat yang bebas.

Lalu, apakah semua masalah dengan sendirinya akan beres jika kita mengusung kebebasan? Tentu tidak. Hal ini sangat bergantung pada dinamikanya dari hari ke hari, ketika paham kebebasan itu diterapkan. Menurut John Stuart Mill, salah satu pemikir tentang paham kebebasan di Inggris pada abad ke-19, kebebasan adalah prakondisi bagi lahirnya kreativitas dan genius-genius dalam masyarakat. Yang dia maksud bukanlah bahwa semua orang dalam masyarakat itu akan

pintar berkat adanya kebebasan. Maksudnya: dengan adanya kebebasan, adanya sikap menghargai orang untuk bersikap dan berpikir, kemungkinan masyarakat itu untuk berkembang, berdialog, untuk mencari hal yang lebih baik, terbuka lebih lebar. Ruangnya dibuka lebih besar. Itulah yang menjadi kunci mengapa masyarakat tersebut tumbuh. Dan ini memang secara empiris terbukti.

Dalam masyarakat-masyarakat di mana kebebasan menjadi institusi, artinya telah terlembagakan menjadi perilaku, menjadi kitab hukum, sistem politik, dan sebagainya, memang kelihatan mereka maju dengan cepat, atau menjadi negara-negara yang maju. Pasti ada hubungan mengapa “Barat” adalah juga negara-negara yang paling kaya, paling kuat, sekaligus paling bebas. Pasti ada hubungan antara kebebasan, kesejahteraan, dan kemajuan sebuah bangsa. Itulah yang dikatakan oleh John Stuart Mill.

Dan, sebagaimana Mill, saya juga meyakini.

Individualisme dan Utopia: Tanggapan Atas Polemik Liddle, Mubyarto, dan Budiawan

INDIVIDUALISME ADALAH salah satu paham yang paling sering dibahas sebagai karikatur dalam banyak perdebatan di kalangan intelektual kita. Setiap kali berbicara tentang paham ini, biasanya kita langsung berpikir tentang egoisme, keserakahan, kompetisi yang amburadul dan semacamnya. Polemik menarik yang diawali oleh Liddle (*Kompas*, 8/1) saya harap dapat menjernihkan pandangan kita terhadap salah satu ide terpenting dalam sejarah politik modern itu.

Dalam tulisan singkat ini saya ingin menguraikan salah satu aspek penolakan beberapa filsuf terhadap paham individualisme. Kemudian, saya mencoba menjelaskan dasar-dasar paham individualisme yang sebenarnya. Tujuan saya bukanlah untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi menjelaskan perbedaan fundamental antara keduanya.

Sebelumnya, saya ingin memberi catatan kecil bahwa dalam menolak atau menerima individualisme, penggunaan kategori “Timur” atau “Barat” sudah amat membingungkan. Budiawan (*Kompas*, 2/2) misalnya, harus menekankan kecurigaannya terhadap anjuran Liddle dengan alasan bahwa

klaim individualisme yang universalistik mungkin saja mengandung “nafsu-nafsu imperialistik”. Budiawan khawatir bahwa di balik penyebaran individualisme, tersembunyi kepentingan kekuasaan Barat untuk menaklukkan Timur. Yang cukup ironis adalah, dalam memperlihatkan kelemahan individualisme, Budiawan tidak menggunakan *Serat Centini*.

Utopia: Dari Plato ke Marx

Dasar argumen Mubyarto (*Kompas*, 2/2) dalam menolak paham individualisme, bersumber pada sebuah cita-cita tentang masyarakat yang harmonis. Jika harmoni ini tercapai, individu dan masyarakat tidak lagi perlu dipertentangkan. Siapa yang tidak senang bila korupsi menghilang, pemimpin tidak lagi menyalahgunakan kekuasaan, dan setiap konflik bisa diselesaikan dengan damai? Sejumlah pemikir, dengan cara masing-masing, telah mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang sekarang kita ajukan.

Plato, misalnya, menyimpulkan bahwa cita-cita itu bisa dicapai jika masyarakat dipimpin oleh tipe manusia *philosopher-king* (kira-kira jenis pemimpin semacam Lee Kuan Yew dalam konteks sekarang; pemimpin yang bersih dan berpikiran jernih 2.000 tahun setelah Plato). Dalam salah satu dari sekian banyak bukunya, *The Philosophy of Right*, Hegel membagi kehidupan sosial ke dalam tiga tingkat. Tingkat pertama adalah kehidupan dalam keluarga. Di sini manusia sejak kecil belajar tentang otoritas, tanggungjawab dan cinta. Pada tingkat kedua adalah kehidupan dalam masyarakat sipil. Jika pada tingkat pertama cirinya didasarkan pada semangat kebersamaan dan tanggungjawab (dalam hubungan ayah terhadap anak misalnya), maka pada tingkat kedua ini cirinya yang utama adalah kompetisi dan pengejaran kepentingan diri yang tak terkendali.

Masyarakat sipil, buat Hegel, adalah satuan-satuan tanpa bentuk yang terlalu didasarkan pada pengejaran kepentingan

ekonomi. Dari tingkat kehidupan pertama yang luhur dan penuh cinta, setelah dewasa manusia terpaksa harus terjun ke dunia persaingan yang keras.

Untuk mengimbangi dan mengatur masyarakat sipil diperlukan hadirnya negara atau pemerintahan yang kuat dan korporatis. Jika ini bisa tercapai maka tahap kehidupan sosial yang ketiga tercapai. Di tahap ini pendulum bergerak kembali, dari kompetisi kembali lagi ke harmoni. Dan bagi Hegel, yang menjadi motor penggerak dalam tahap ketiga ini adalah kaum birokrat. Kaum ini oleh Hegel disebut sebagai “kelas universal”.

Dalam perkembangan selanjutnya, Hegel memberi inspirasi kepada dua kelompok pemikir, yaitu kaum Hegelian kanan dan kiri. Kaum kanan menggunakan ide negara korporatis Hegel untuk membela sebuah argumen bahwa individu dan negara pada dasarnya satu dan sebangun: kita tidak perlu melihat keduanya dalam hubungan yang konfliktual. Yang diperlukan oleh individu, karena itu, bukanlah jaminan hak-hak perorangan, tapi pelaksana kewajiban kepada negara, pengabdian dan disiplin (karena pengaruh Hegel, kira-kira hal seperti inilah yang dikatakan oleh Prof. Supomo dalam perdebatan penyusunan UUD 45 kita dulu).

Di kiri, contoh yang terbaik adalah Karl Marx. Walaupun teori dia ditujukan untuk “memutarbalikkan Hegel”, tema-tema Hegelian sangat kental terasa pada Marx. Berpijak pada pengertian Hegel tentang masyarakat sipil, Marx mengembangkan teori tentang kelas sosial. Dari Hegel pula Marx mengambil tema tentang “sejarah yang berakhir”, di mana tidak ada lagi konflik-konflik yang mendasar dalam masyarakat. Buat Hegel, seperti kita lihat di atas, hal ini terjadi jika “kelas universal” telah mampu mengatasi kelemahan dalam masyarakat sipil. Buat Marx, konflik-konflik mendasar itu akan hilang jika kelas proletariat yang juga dianggap kelas universal telah melakukan revolusi sosial dan mendirikan negara komunis.

Di sinilah harmoni itu terjadi: sebuah situasi di mana bahkan kehadiran negara pun, sebagai pengatur masyarakat, tidak lagi diperlukan. Bagi Marx, seperti dituliskannya dalam *The German Ideology*, apa yang dilakukan oleh manusia dalam harmoni total itu adalah “berburu di pagi hari, memancing ikan di siang hari, beternak di sore hari, dan berdiskusi setelah makan malam”, tanpa harus menjadi pemburu, pemancing, peternak, dan kritikus.

Individualisme

Apa yang membedakan Mubyarto beserta para pemikir besar di atas dengan para filsuf dari tradisi individualisme dalam banyak hal bertumpu pada perbedaan terhadap cita-cita kemasyarakatan. Para filsuf dari tradisi individualisme, sejak John Locke, David Hume, Adam Smith, hingga Frederick Hayek, menolak cita-cita masyarakat penuh keselarasan dan keseimbangan itu. Hal ini mereka lakukan bukan karena mereka mencintai pertikaian dan membenci persaudaraan. Jauh daripada itu. Buat mereka impian-impian harmoni itu adalah mimpi yang terlalu indah, yang jika dipaksakan untuk diwujudkan akan sangat berbahaya bagi manusia umumnya. Secara sederhana argumen mereka saya bagi ke dalam dua segi.

Segi pertama bertumpu pada penerimaan terhadap ketidaksempurnaan masyarakat. Buat paham individualisme masyarakat adalah kumpulan banyak kepentingan yang berbeda dan sering bertentangan. Hal ini adalah kenyataan alamiah. Karena itu, yang harus dilakukan bukanlah menentang alam.

Segi kedua, yang menjadi dasar segi pertama di atas, adalah penerimaan paham ini akan keterbatasan manusia. Bagi paham ini sangat sedikit manusia yang mampu menjadi *superhero*, yang dalam bertindak tidak pernah memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Paham ini menolak kemungkinan hadir-

nya tipe manusia jenis *philosopher-king*-nya Plato, atau kelas universalnya Hegel, atau kelas pendobraknya Lenin. Dengan kata lain, paham ini tidak percaya bahwa kaum birokrat, misalnya, adalah kelompok individu yang tidak lagi mempunyai kepentingan apa-apa selain mengabdikan kepada masyarakatnya. Penguasa di mana pun adalah juga manusia biasa, yang sebagai manusia dibatasi oleh kepentingan-kepentingannya sendiri. Dengan demikian paham ini menerima keterbatasan manusia bukan untuk mendorong meluasnya egoisme dan kompetisi yang keras—yang mereka lakukan adalah mencoba menerima kenyataan apa adanya tentang sifat-sifat manusia.

Lenin dan Mao seringkali berkata bahwa untuk mewujudkan cita-cita masyarakat sosialis, diperlukan lahirnya tipe-tipe manusia baru, yang senantiasa membela kepentingan umum dan melupakan kepentingan dirinya sendiri. Buat paham individualisme, hal ini adalah utopia besar yang berbahaya. Manusia selalu sama dari dulu hingga sekarang: makhluk rasional yang selalu bereaksi terutama terhadap hal-hal yang berakibat langsung terhadap dia dan terhadap lingkungan terdekatnya. Menciptakan manusia baru hanya bisa terjadi dengan menghancurkan manusia itu sendiri. Buat paham ini, sejarah kelam Rusia di bawah Lenin dan Cina di bawah Mao adalah monumen sejarah yang mengingatkan kita semua terhadap “biaya sosial”—untuk menggunakan bahasa Budiawan—atas upaya penciptaan manusia baru tersebut.

Berangkat dari dua segi argumen inilah para filsuf dari tradisi individualisme membangun argumen dan konsep-konsep tentang perlunya demokrasi, penegakan kekuasaan hukum, dan pemerintahan yang terbatas. Demokrasi, misalnya, mereka anggap alternatif sistem pemerintahan yang terbaik yang dapat meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan oleh pengejaran kepentingan oleh individu-individu yang duduk di kursi kekuasaan.

Selain itu, demokrasi juga mereka percaya sebagai sistem yang memungkinkan perbedaan dalam masyarakat untuk tidak menjadi konflik yang terbuka dan berdarah. Konsep-konsep penting inilah yang menjadi sumbangan paling besar para filsuf dalam tradisi individualisme, dari John Locke hingga Frederick Hayek, bagi sejarah politik modern.

12 Februari 1996

Isaiah Berlin

PADA 6 NOVEMBER lalu, dalam usia 88 tahun, Isaiah Berlin telah pergi, meninggalkan sekian banyak tulisan yang dapat disejajarkan dengan karya-karya pemikiran terbaik di abad ke-20 ini.

Dalam banyak esai panjangnya, Isaiah Berlin yang semasa kecilnya sempat menjadi saksi pergolakan Revolusi Rusia pada 1917, sering mengingatkan kita betapa berbahayanya bagi sejarah kemanusiaan ide-ide besar yang mengklaim kebenaran bagi dirinya sendiri. Dari ruang studinya di Oxford, dia mengabdikan hidupnya untuk menjelaskan dan mendalami sejarah ide-ide semacam ini.

Isaiah Berlin adalah seorang intelektual sejati yang hidup dan menghirup nikmatnya udara kehidupan melalui eksplorasi dan pertarungan ide-ide. Di tangannya, ide-ide tidak lagi menjadi sekadar konsepsi-konsepsi abstrak yang dingin. Bagai seorang penyihir, dia sanggup menghidupkan kembali berbagai pemikir klasik yang telah beku dan dilupakan, misalnya Hamann, Vico, Herzen, de Maistre, dan mencari kaitan ide-ide mereka dengan gagasan-gagasan besar yang di zaman modern ini mengharu-birukan nasib manusia.

Dia banyak menelusuri asal-usul, substansi, dan kaitan antara gagasan-gagasan besar karena dia percaya pada kekuatan pemikiran. Dia pernah berkata, “Konsep-konsep filosofis yang dilahirkan di ruang studi yang sepi seorang profesor dapat menghancurkan sebuah peradaban.” Baginya, kekuatan-kekuatan sosial dan material memang penting, tapi semua ini hanya akan menjadi kekuatan buta tanpa arah jika tidak dibingkai oleh ide-ide. Dia sangat yakin bahwa dunia pemikiranlah yang memberi petunjuk ke arah mana sejarah harus bergerak.

Satu dari ide-ide besar yang menarik perhatiannya adalah ide atau konsepsi kebebasan positif. Konsepsi ini berasal dari spektrum pemikiran yang luas, mulai dari Plato, Rousseau, Hegel, de Maistre, hingga Marx. Menurut konsepsi ini, manusia bebas adalah manusia yang menjadi tuan bagi dirinya sendiri, yang menjadi manusia sejati, yang mencapai hidup sepenuhnya. Manusia semacam ini bukanlah manusia yang senantiasa diperbudak oleh berbagai nafsu dan kesadaran palsu. Kebebasan hanya mungkin terjadi jika manusia memang bisa merealisasikan potensinya yang sejati, yang “benar”, yang “lebih tinggi”.

Konsepsi ini, menurut Isaiah Berlin, berbau romantik. Kebebasan tidak lagi dikaitkan dengan pembatasan tindakan sewenang-wenang terhadap individu, tetapi dengan proses pemenuhan kesempurnaan hidup manusia. Jadi, dalam konsepsi ini, walaupun seseorang secara legal dan faktual tidak dikekang oleh siapapun, dia tetap bukan manusia yang bebas sejauh dia masih diperbudak oleh kesadaran palsunya, oleh pikiran dan perasaannya yang “keliru”.

Yang menarik adalah, bagi Isaiah Berlin, konsepsi kebebasan semacam ini bisa berbahaya, bahkan sangat berbahaya. Kenapa? Karena, dengan sedikit manipulasi makna, pengertian “tuan” dalam konsepsi ini dapat menjadi “bangsa”, “negara”, “partai”, atau “kelas”. Sementara “hidup yang sepenuhnya” dapat

diartikan sebagai hidup dalam “masyarakat sosialis”, “masyarakat baru”, “sejarah baru”. Berkaitan dengan hal ini, diri manusia pun diartikan sebagai makhluk yang terdiri atas dua kenyataan yang berlawanan, yaitu dirinya yang sejati, yang lebih tinggi, yang benar, dan dirinya yang lebih rendah, sumber nafsu dan kesadaran palsu.

Jika pembalikan makna ini sudah terjadi maka, menurut Isaiah Berlin, terbentangleh jalan yang sangat lebar bagi seorang despot untuk memerintah dengan sewenang-wenang dan memberangus kebebasan individu. Bukankah tetek-bengek nasib individu adalah hal yang terlalu kecil untuk dianggap serius bagi sebuah bangsa, atau partai, atau negara, yang sedang mengejar tuntutan sejarahnya untuk membangun masyarakat baru? Bukankah dalam proses pemenuhan tuntutan sejarah ini Diri yang Lebih Tinggi (yaitu Sang Bangsa, Sang Partai, Sang Negara) memang layak untuk memberangus Diri yang Rendah (manusia yang hanya terbawa oleh kesadaran palsu, yang tidak mengerti tuntutan sejarah)?

Konsepsi kebebasan positif, dengan kata lain, sangat cocok untuk menjadi alasan pembenar bagi tirani dan kekuasaan despotik. Dalam konsepsi ini tidak ada argumentasi yang secara prinsipil dapat mengatakan kepada Sang Penguasa untuk membatasi kekuasaannya dan menghargai kedaulatan masing-masing individu. Sekali Sang Penguasa berhasil memanipulasi beberapa pengertian kunci yang ada di dalam konsepsi ini, maka ia seolah-olah mendapat cek kosong, *carte blanche*, untuk melakukan apa saja yang dianggapnya perlu dalam mengejar “tuntutan sejarah”, “masyarakat baru”, atau apapun yang sanggup menjamin tercapainya “hidup yang sepenuh-penuhnya”.

Karena itulah tidak mengherankan jika Isaiah Berlin, yang dikenal sebagai penentang gigih para pemimpin garis keras Israel, berkata bahwa konsepsi kebebasan semacam inilah yang berada di balik banyak malapetaka kemanusiaan pada abad ke-20.

Di abad ini, kita tahu, muncul banyak pemimpin besar yang, atas nama bangsa, partai, kelas, atau negara, melindas nasib orang per orang untuk mengejar tujuan-tujuan yang dianggapnya bersifat historis, luhur, atau progresif. Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot: tangan mereka berlumuran darah justru untuk menggiring bangsa mereka ke arah “kebebasan” yang lebih sejati.

24 November 1997

Wajah Lain Machiavelli

SEBAGAIMANA LAYAKNYA seorang penulis besar, karya-karya Niccolo Machiavelli telah menghasilkan banyak penafsiran, yang tidak jarang saling bertentangan.

Buat sebagian kalangan, pemikir dan penulis drama dari Florence ini adalah seorang amoralis, penganjur metode berpolitik tanpa pertimbangan etika. Buat kalangan yang lain lagi, ia adalah seorang nasionalis yang meletakkan dasar konsepsi negara beserta alasan kehadirannya, *raison d'etat*. Tulisan menarik dari Frans Magnis-Suseno di *Kompas* beberapa saat lalu (15/9/1997), dalam beberapa hal, mengikuti penafsiran dari kalangan seperti ini.

Buat sebagian kalangan yang lainnya lagi, Machiavelli bukanlah seorang pemikir yang dapat dipandang secara sederhana. Dalam satu hal, menurut kalangan ini, Machiavelli memang dapat dianggap sebagai pemikir besar serta seorang genius yang mendahului zamannya. Tapi dalam hal lain lagi, ia bisa pula dikritik sebagai intelektual tukangnya fasisme dan korporatisme, gurunya para tiran, atau setidaknya pemikir tanggung yang membingungkan.

Sekularisasi Politik

Walau beragam, penafsiran tentang Machiavelli memang sah-sah saja, namun buat saya satu hal tidak boleh kita lupakan: ia adalah peletak dasar ilmu politik dan pemikir awal yang mendorong terjadinya proses sekularisasi (desakralisasi) politik.

Dalam *Il Principe*, buku tipisnya yang termasyhur itu, Machiavelli berkata bahwa tujuan dia menulis bukanlah untuk mengatakan apa yang seharusnya. Ia ingin melihat dunia politik sebagaimana adanya, yang *is*, dan bukan yang *ought* (*la verita effentuale della cosa*). Proses kekuasaan, buatnya, adalah bagian dari kenyataan alamiah yang harus kita mengerti sebagaimana jika kita ingin mengerti dan menyingkap berbagai hal lainnya di alam nyata. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa Machiavelli, secara sangat sederhana, telah mendahului Francis Bacon, filsuf dan negarawan Inggris peletak dasar empirisisme itu, hampir seabad lamanya.

Motivasi keilmuan seperti inilah yang dapat digunakan sebagai dasar penafsiran *Il Principe*. Memang betul bahwa buku ini secara eksplisit dimaksudkan sebagai sebuah kumpulan nasihat kepada Lorenzo, penguasa Florence (1448-1492) dari keluarga Medici. Tetapi melalui dasar penafsiran Machiavelli sebagai ilmuwan, maka *Il Principe* sesungguhnya bisa dimengerti lebih jauh daripada hal itu, yaitu sebagai sebuah analisis yang dingin terhadap berkerjanya mesin politik dan proses kekuasaan yang riil.

Dengan kata lain, ajaran Machiavelli, misalnya Sang Penguasa dalam mempertahankan kekuasaannya, harus berbohong, menipu, menindas, haruslah dimengerti bukan sebagai “nasihat politik” dalam pengertian yang umum. Ia adalah sebuah pernyataan faktual bahwa dunia kekuasaan memang tidak semurni dunia mitologi surgawi zaman pra-Renaisans. Dunia kekuasaan, sebagaimana adanya, adalah sebuah dunia yang penuh intrik, kekejian, ambisi, dan ketololan.

Pemikiran Machiavelli seperti ini, dalam konteks zamannya, sangatlah bersifat subversif. Secara implisit ia menolak simbiosis antara pemikiran politik dan ide-ide teologis yang pada zamannya itu menjadi dasar pembenaran bagi kekuasaan tradisional. Para raja dan pangeran bukanlah wakil Tuhan di bumi, bukan pula *philosopher-king*, seperti kata Plato. Mereka, bagi Machiavelli, adalah pelaku-pelaku politik biasa yang karena tuntutan logika kekuasaan seringkali bertindak jauh dari prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Dengan melihat raja dan pangeran pada dasarnya adalah pelaku politik, maka Machiavelli, mungkin tanpa sepenuhnya sadar, sebenarnya telah memulai sebuah proses besar yang terus berlanjut hingga akhir abad ke-20 ini, yaitu proses sekularisasi politik. Tentu saja, sebagaimana layaknya setiap pelopor, apa yang ia rintis ini dilakukannya dengan cukup canggung dan samar-samar (karena itu pula ia dapat ditafsirkan dalam berbagai versi). Tapi jelas bahwa dalam konteks sejarah pemikiran, analisis politik Machiavelli yang dingin itu merupakan sebuah pertanda dari terjadinya pergeseran paradigmatis dalam memandang politik dan organisasi kekuasaan.

Demokrasi

Lebih jauh lagi, desakralisasi politik Machiavelli seperti itu turut membuka jalan bagi munculnya berbagai pemikiran tentang demokrasi modern pada abad ke-17 dan abad ke-18. Tokoh-tokoh peletak dasar konsepsi demokrasi modern, seperti Locke di Inggris, Montesquieu di Prancis, dan Jefferson di Amerika, berangkat dari sebuah asumsi yang pada dasarnya Machiavellian, yaitu bahwa para penguasa adalah juga manusia yang memiliki berbagai kelemahan manusiawi, yang memiliki sejumlah ambisi serta nafsu untuk berkuasa terus-menerus. Karena itu, kepentingan Sang Penguasa, menurut mereka, sering bertolak-belakang dengan kepentingan rakyat banyak.

Buat para pemikir ini, dengan kata lain, panggung politik adalah arena pertarungan kekuatan. Mengikuti Machiavelli, mereka tidak ingin memandang dunia politik secara teologis-romantik. Mereka ingin menyingkap realitas kekuasaan sejelas-jelasnya, sebagaimana adanya, seperti yang dilakukan oleh para ahli fisika di zaman pasca-Renaissance yang ingin mengungkapkan rahasia gravitasi bumi.

Tapi berbeda dengan Machiavelli, para pemikir abad ke-17 dan abad ke-18 itu tidak hanya berhenti pada deskripsi tentang kenyataan politik. Mereka melangkah dan bertanya lebih jauh: Bagaimana agar dampak buruk dari kenyataan alamiah politik seperti itu dapat diminimalisir? Bisakah pembatasan kekuasaan dilakukan demi keuntungan masyarakat luas? Adakah cara untuk melakukannya? Justifikasi konsepsional seperti apa yang harus disusun bagi pembatasan kekuasaan Sang Penguasa?

Berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang menjadi fondasi intelektual bagi pembentukan sistem demokrasi modern, yang dimulai di Inggris, Prancis, dan Amerika pada akhir abad ke-18. Kelanjutan proses ini, kita tahu, masih terus berlangsung hingga sekarang.

Jadi, walau tidak selengkap dan sejauh sumbangan Locke, Montesquieu dan Jefferson, sumbangan intelektual Machiavelli tidak dapat disangkal. Hanya melalui cara pandang Machiavellian terhadap dunia politik, sakralisasi dan mitologisasi politik yang mengungkung umat manusia selama berabad-abad dapat diruntuhkan. Dan dari keruntuhan inilah titik tolak pembatasan kekuasaan dapat dapat dirumuskan secara lebih sistematis. Karena pentingnya sumbangan Machiavelli, bisa dimengerti jika Rousseau memuji *Il Principe* sebagai *le livre des republicains*, bukunya kaum republikan.

6 Oktober 1997

Liberal Kiri, Sosialis Kanan

AKHIR-AKHIR INI terjadi semacam revitalisasi isu “kiri dan “kanan”. Dalam berbagai diskusi di forum publik dan media massa, polarisasi yang dibuat umumnya masih mengikuti pembagian klasik. Kaum sosialis dan ide-ide Marxis ditempatkan di kiri, sementara kaum liberal dan ide-ide liberalisme diletakkan di kanan.

Betulkah polarisasi seperti ini? Dalam beberapa hal, ya. Sebagaimana yang umum diketahui, dalam doktrin Marxisme asal-usul penindasan adalah pemilikan pribadi terhadap sarana-sarana produksi. Pemilikan inilah yang menjadi fondasi struktur masyarakat kapitalis. Agar masyarakat bisa lebih “baik”, struktur ini harus dibongkar, dihancurkan. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah *to start from the basic*, yaitu menghilangkan hak milik pribadi. Karena itu, dalam Manifesto Marx (dan Engels) yang terkenal itu, pelenyapan pemilikan pribadi dianggap sebagai aksi sentral yang revolusioner.

Dalam perdebatan kaum kiri pada akhir abad ke-19 hingga beberapa saat sebelum runtuhnya Uni Soviet, pemihakan dan dukungan terhadap aksi seperti ini menjadi ukuran kekirian sebuah kelompok. Mereka yang ingin menghilangkan pemilikan pribadi secara total dan radikal biasanya disebut kaum komunis.

Mereka yang lebih moderat tetap ingin menghilangkan pemilikan pribadi, namun hanya terbatas pada sarana produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Metode perubahan kelompok kiri radikal adalah revolusi sosial, sedangkan metode kaum kiri moderat biasanya nasionalisasi. Kelompok moderat ini, jika mereka memperjuangkan nasionalisasi melalui parlemen, umumnya disebut sebagai kelompok sosdem (sosialis demokrat).

Jadi polarisasi di atas benar sejauh definisi kiri kita kaitkan dengan isu pemilikan pribadi dan metode perubahan struktur masyarakat kapitalis. Tapi kita harus ingat, definisi semacam ini bukan satu-satunya definisi yang ada. Sejak di Parlemen Prancis abad ke-19, istilah kiri juga sering dikaitkan dengan pengertian “progresif” dan “alternatif terhadap kekuatan dan struktur dominan”. Dalam pengertian seperti ini, polarisasi tadi bisa terbolak-balik: justru kaum sosialis dan ide-ide Marxis-lah yang menjadi kanan dan reaksioner.

Di negeri-negeri pasca-komunis pada dekade 1990 ini, misalnya, justru kaum sosialis dan komunis yang menganjurkan langkah-langkah “regresif”. Mereka menjadi pembela *status quo* dan pelindung dominasi kaum birokrat yang tersebar di berbagai industri milik negara. Kelompok ini, dengan kata lain, menjadi kaum reaksioner dalam arti kata sesungguhnya.

Sebaliknya, kaum liberal justru menjadi pendobrak struktur ekonomi “lama”. Mereka memperjuangkan terjadinya deregulasi dan privatisasi secara cepat dan serentak. Mereka berupaya menghilangkan basis kekuasaan kaum birokrat—kelompok yang oleh Milovan Djilas pada 1950-an disebut *the new class* itu—dan mendukung munculnya kekuatan pengusaha swasta yang mandiri dan efisien. Jadi, dalam konteks sistem pasca-komunis, kaum liberal betul-betul menjadi kaum progresif dan oposisi alternatif. Liberalisme, dengan kata lain, menjadi kekuatan kiri radikal.

Di negeri lain, di Amerika misalnya, hal yang hampir sama terjadi walau dalam bentuk yang berbeda. Politikus paling radikal di Amerika saat ini adalah Newt Gingrich, juru bicara Kongres yang bekas profesor sejarah. Program ekonomi Gingrich ingin membalikkan arus besar “welfarisasi” yang menjadi arus dominan dalam kapitalisme Amerika sejak era Roosevelt pada 1930-an. Buat tokoh ini, problem Amerika hanya dapat diatasi jika mekanisme liberal, yaitu pasar bebas, berjalan seluas-luasnya. Liberalisme, karena itu, ditempatkan sebagai kekuatan alternatif untuk mengubah sistem *welfare state* secara mendasar.

Bagaimana dengan kita? Apakah, misalnya, aktivis PRD yang kini banyak dibicarakan dan para teknokrat pro-pasar seperti Prof. Widjojo dapat diletakkan dalam polarisasi kiri-kanan seperti ini?

Dalam satu hal, jika kita menggunakan pembagian klasik, yaitu definisi kekirian yang dikaitkan dengan pemilikan pribadi, dengan cukup jelas kita bisa berkata bahwa PRD kiri dan para teknokrat kanan. Tapi jika kita menggunakan definisi kiri yang berhubungan dengan progresivitas dan potensi sebagai alternatif terhadap tradisi dominan, maka soalnya agak lebih rumit.

Dalam hal ini kita harus ingat bahwa dalam tradisi pemikiran ekonomi-politik kita, ide-ide sosialis berakar sangat dalam. Umumnya tokoh utama pendiri bangsa kita berkiblat pada gagasan ekonomi sosialis, dengan berbagai variasinya. Hatta dan Sjahrir, misalnya, sangat dipengaruhi kaum sosdem di Eropa Barat (ide tentang koperasi bukanlah “milik” bangsa kita, melainkan digali dari tradisi sosialisme yang universal). Pengaruh pemikiran seperti ini dengan gampang terlihat jika kita membaca UUD 1945.

Karena dalamnya tradisi pemikiran sosialis, yang berkinerja dengan semangat nasionalisme, tak heran jika dalam sejarah ekonomi kita justru negara dan birokrasilah yang ber-

peran dominan. Mekanisme pasar dan peran swasta selalu bersifat pinggiran dan sangat dipandang secara negatif. Baru 10 tahun belakangan ini pendulum agak berbalik, dengan dilakukannya langkah-langkah deregulasi yang dimotori kaum teknokrat.

Karena itu, dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa justru Prof. Widjojo, dan bukan Budiman Sudjatmiko, yang sebenarnya sangat progresif dan kiri. Langkah-langkah yang telah dimotori Pak Widjojo, kalau dilaksanakan sungguh-sungguh, akan mengikis basis dominasi kaum birokrat dan merombak *status quo* kekuasaan ekonomi-politik.

Sebaliknya, ide-ide ekonomi yang tersirat di balik manifesto PRD, kalau dilaksanakan secara tuntas, akan mendesak mekanisme pasar untuk makin berada di posisi pinggiran. Yang akan kita saksikan adalah revitalisasi birokrasi dalam kehidupan ekonomi kita. Artinya, dominasi kaum birokrat akan makin diperkukuh. Maka PRD, dalam pengertian ini, dapat dipandang sebagai kekuatan kanan yang “konservatif”.

28 September 1996

Barat dan Demokrasi

AMERIKA DAN NEGERI BARAT lain mengaku sebagai pendekar demokrasi, tapi politik luar negeri mereka terhadap revolusi Islam di Iran, FIS di Aljazair, dan rezim Erbakan di Turki tak demokratis. Karena itu Riza Sihbudi, dalam *Gatra* edisi 31 Mei, menulis bahwa apa yang disebut sebagai demokrasi Barat pun ternyata tak selamanya sungguh-sungguh demokratis.

Kesimpulan ini digunakan untuk memperkuat pendapatnya bahwa demokrasi seringkali menimbulkan kontradiksi dalam pelaksanaannya. Walau tak terlalu jelas apa yang ingin dikembangkannya dengan pendapat semacam ini, saya pikir Riza pada akhirnya ingin mengatakan bahwa dalam kebijakan luar negerinya, negeri-negeri Barat yang demokratis sering bersikap hipokrit dan inkonsisten dalam slogan demokrasi yang sering mereka banggakan.

Saya tak banyak berbeda pendapat dengan Riza dalam soal politik luar negeri Barat dalam contoh-contoh yang diberikannya. Tapi dalam soal inkonsistensi dan hipokrisi kebijakan luar negeri, semua negeri melakukan hal yang sama, di Barat atau di Timur. Di negeri Islam atau negeri sekular. Di Timur Tengah, misalnya, Pan-Islamisme dianggap sebagai cita-cita dan tujuan moral yang luhur.

Semua negeri di kawasan ini menginginkannya. Tapi dalam praktik yang terjadi adalah *real politics*: semuanya berlomba mendahulukan kepentingan negerinya dan menjadikan Pan-Islamisme sebagai slogan belaka. Dalam hubungan ini doktrin moral dan mekanisme demokratis memang belum banyak diterapkan. Logika yang digunakan dalam politik luar negeri adalah logika kepentingan dan kekuatan.

Inkonsistensi Barat dalam politik luar negerinya terhadap Dunia Islam sebenarnya tak terlalu tepat jika disebut sebagai tindakan hipokrit dan anti-demokratik. Mereka bertindak sebagaimana negeri-negeri lainnya akan bertindak dalam situasi yang sama: mengimplementasikan apa yang mereka definisikan sebagai kepentingan nasional mereka. Implementasi doktrin nasional Amerika dalam beberapa kasus memang dapat dihujat, seperti yang dilakukan Riza, tapi dalam beberapa kasus lain dapat pula dipuji. Misalnya upaya negeri ini, dengan segala kekurangannya, mendesak Serbia untuk mencari jalan damai di Bosnia.

Saya berbeda pendapat dengan Riza dalam satu hal: saya tak ingin mencampuradukkan antara dinamika politik internasional yang kompleks dan penilaian terhadap sistem demokrasi di Barat. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat di sebuah negeri. Dengan demikian penilaian saya terhadap luasnya kebebasan pribadi dan terbukanya peluang untuk melakukan kritik terhadap penguasa di Amerika tak saya kaitkan secara langsung dengan sikap saya terhadap keputusan Presiden Clinton untuk membantu salah satu faksi yang sedang bertikai di Aljazair.

Pandangan saya terhadap demokrasi Barat jauh lebih positif ketimbang pandangan Riza. Ini bukan berarti saya tak lagi kritis terhadap praktik demokrasi yang senyatanya berlangsung di Amerika, Inggris, atau di mana saja. Demokrasi adalah sebuah cita-cita, sebuah aspirasi. Hingga sekarang sistem peme-

rintahan di Baratlah yang paling mendekati perwujudan cita-cita ini.

Agar sebuah negeri bisa dikatakan demokratis, setidaknya harus ada tiga prasyarat kelembagaan. Pertama, undang-undang yang menjamin hak-hak politik yang paling dasar bagi tiap warganegara, seperti hak untuk berpendapat, beragama dan berserikat. Kedua, pers yang bebas. Dan ketiga, pemilu yang jujur dan lembaga perwakilan yang otonom. Dengan memakai ketiga prasyarat ini sebagai ukuran demokrasi, Amerika, Inggris, dan negeri lainnya di Barat telah mencapai titik terdekat dalam ujung skala yang positif. Sementara itu Korea Utara, Cina, dan Arab Saudi berada dalam titik terdekat dalam ujung skala yang negatif. Barangkali Indonesia berada di tengah-tengah.

Semua ini akan menjadi problem jika kita ingin mencari pengertian tentang demokrasi, yang samasekali berbeda dengan pengertian yang saya gunakan di sini. Lenin, misalnya, pernah memperkenalkan konsep demokrasi sosialis dengan lebih memberi penekanan pada kepemimpinan yang progresif serta pemerataan ekonomi ketimbang kebebasan individual dan perwakilan yang otonom. Contoh yang lebih kontemporer adalah Lee Kuan Yeuw, yang lebih mengaitkan konsepsi demokrasi dengan nilai-nilai kedisiplinan dan tujuan-tujuan pembangunan okonomi.

Pembalikan pengertian seperti ini hanya akan melahirkan kebingungan konseptual terhadap apa yang sesungguhnya dimaksud dengan demokrasi. Di bawah Hitler, misalnya, Jerman memang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dan tingkat pertumbuhan yang hampir nol. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa Jerman dalam era naziisme adalah negeri yang demokratis?

Pembalikan pengertian seperti itu bukan cuma menghasilkan kebingungan konseptual, melainkan juga melahirkan pem-

benaran bagi sistem pemerintahan yang otoriter. Bung Karno pernah melakukannya dengan mengatakan bahwa demokrasi kita bukanlah demokrasi Barat, yang menurutnya bukanlah sungguh-sungguh demokrasi, sebab bersandar pada mekanisme mayoritas yang “50+1”. Setelah zaman Bung Karno pembenaran semacam ini justru meningkat.

Apakah kita akan terus memperpanjang kecenderungan seperti itu? Kalau kita mau mencegahnya sejak sekarang (merupakan cara terbaik), para intelektual tak akan terlalu sering “berdansa” dengan bermacam-macam pengertian tentang demokrasi. Kita bisa belajar dari pemikir besar yang menjadi peletak dasar konsepsi demokrasi Barat, misalnya Montesquieu, Voltaire, dan John Locke.

7 Juni 1997

Demokrasi dan Liberalisme

LIBERALISME ADALAH paham yang berusaha memperbesar wilayah kebebasan individu dan mendorong kemajuan sosial. Jadi, liberalisme dan demokrasi sekarang ini umum dianggap sebagai dua hal yang tak terpisahkan dan tak terelakkan, terutama dalam tata pemerintahan dan masyarakat. Nah, masalahnya banyak sekali tantangan yang dihadapi liberalisme dan demokrasi. Misalnya, baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang mengharamkan paham ini, selain pluralisme, dan juga sekularisme. Dalam bidang ekonomi juga demikian. Tradisi kita rupanya banyak yang anti-liberal, yang mungkin dikaitkan dengan kolonialisme dan sebagainya.

Demokrasi berarti kekuasaan rakyat, dan liberalisme merupakan paham kebebasan, artinya manusia memiliki kebebasan atau, kalau kita lihat dengan perspektif filosofis, merupakan tata pemikiran yang landasan pemikirannya adalah manusia bebas. Bebas karena manusia mampu berpikir dan bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Dia tahu apa yang diinginkan; dia merasa dia memiliki hak untuk bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, cita-cita dasarnya adalah mulia, dalam arti liberalisme sebagai paham pemikiran yang optimistis tentang manusia.

Liberalisme percaya akan kemampuan manusia untuk berpikir sendiri, tidak perlu diatur oleh orang lain, tidak perlu dipaksa oleh orang lain. Manusia mampu memahami apa yang baik bagi dirinya dan mampu bertindak. Jadi, ini yang mengherankan saya kenapa paham ini ditentang dan dianggap hanya sebagai seks bebas dan perilaku seks tanpa norma. Dan kalau bicara tentang kebebasan atau menyangkut hal yang bebas, orang biasanya mengasosiasikannya dengan hal yang jorok atau berkonotasi negatif, padahal artinya sama dengan merdeka. Bangsa bebas, manusia bebas, dan bukan bangsa yang jorok.

Bangsa merdeka dan manusia merdeka itu berada dalam tataran yang sama, walaupun unitnya berbeda. Kenapa bangsa harus merdeka dan perlu merdeka jika individu yang merdeka dianggap jorok, berbahaya, dan kemudian harus dibatasi? Ini kadang-kadang bersumber dari ketidakpahaman yang agak sistematis terhadap paham-paham modern.

Kalau kita kaitkan dengan demokrasi, keduanya (demokrasi dan liberalisme) tidak langsung berhubungan. Demokrasi bisa tidak liberal, bisa juga liberal. Makanya pendidikan liberal perlu bagi demokrasi, karena demokrasi bisa mengandung unsur yang tak-liberal, bisa juga yang liberal. Kalau kita lihat hubungan keduanya, demokrasi modern bisa tumbuh dengan sehat dan langgeng kalau ia mengadopsi unsur-unsur yang liberal, dalam pengertian bahwa jika manusia yang diatur sistem demokrasi itu adalah manusia-manusia yang mandiri, yang mampu memilih bagi dirinya sendiri, yang tahu tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Singkatnya, inilah apa yang disebut sebagai demokrasi liberal.

Kalau kita berbicara lebih lanjut mengenai paham liberal, ada pertanyaan: jika semua manusia bebas bertindak, bebas melakukan apa yang dia inginkan, bagaimana jika terjadi benturan? Makanya, pemikir-pemikir liberal datang dengan formula bahwa Anda bebas sebebas-bebasnya selama Anda

tidak mengancam, mengganggu, membahayakan orang lain. Artinya batas kebebasan Anda adalah kebebasan orang lain. Kebebasan Anda berhenti manakala Anda sudah mengancam kebebasan orang lain. Itu saja formulanya. Sangat simpel dalam segi teoretis, tapi tentu saja dalam praktik tidak demikian.

Contohnya: apakah rokok membahayakan orang lain? Jika membahayakan, perlu dilarang atau tidak? Itu formulasi praktis. Tapi ide dasarnya adalah: Sejauh Anda tidak membahayakan orang lain, Anda bebas. Anda tidak bebas menipu saya, Anda tidak bebas menghukum saya, Anda tidak bebas membunuh saya. Karena orang lain mempunyai kebebasan pula. Tetapi untuk memilih istri, sekolah, pacar, baju, rumahtangga, Anda bebas. Itulah dasar pemikiran liberal, walaupun tidak dikatakan. Anda bebas untuk bekerja di mana pun Anda suka, Anda bebas juga untuk memilih agama Anda. Untuk anak saya, saya dapat berkata "kamu harus ikut saya". Tetapi, jika Anda sahabat saya, tetangga saya, atas dasar apa Anda harus ikut agama saya? Anak saya pun, jika dia sudah berumur 13 tahunan, saya tidak lagi berhak mengharuskan dia ikut agama saya. Jadi, kita perlu memperlakukan orang lain tidak sebagai anak kecil.

Kebebasan, sebagaimana segala sesuatu dalam hidup, selalu mengandung risiko. Orang tidak langsung tahu apa yang dia inginkan, berlaku sesuai dengan apa yang dia dianggap baik. Orang memerlukan proses atau waktu untuk belajar. Orang kadang-kadang baik dan kadang-kadang jahat. Kalau kita melihat potret kehidupan manusia, ada yang di masa mudanya nakal, kemudian dia tumbuh menjadi dewasa dan baik, atau sebaliknya. Orang pasti berubah-ubah, tetapi selalu ada ruang untuk belajar, untuk bereksprimen. Ada orang yang dipaksa-paksa dengan sistem otoriter tetap menjadi liar. Jadi, tidak ada sistem yang dapat menjamin tidak ada orang yang nakal dan liar di dalamnya.

Namun dalam sistem yang menganut asas-asas liberal, ada sarana dan metode yang dapat menjamin manusia secara

umum untuk menentukan apa yang mereka inginkan. Kalaupun ada penyimpangan (anomali), ada sistem untuk memperbaiki mereka, seperti sistem hukum, penjara, dan sebagainya. Kalau itu tidak dicakup oleh sistem hukum, ada pula yang dinamakan sanksi sosial, dan ini selalu melekat dalam masyarakat. Tetapi sebagai gagasan, liberalisme modern adalah salah satu penopang sistem demokrasi liberal.

Sistem-sistem lain, misalnya otoritarianisme, pada akhirnya mengekang kebebasan manusia. Ada negara-negara yang berhasil memajukan warganya, tapi tidak menganut sistem demokrasi dan tidak liberal, seperti Singapura. Singapura memang negara yang sejahtera, sistem hukum dan ketaatan warganya terhadap hukum lebih baik dibanding Indonesia, yang secara formal demokrasi. Singapura tidak kalah dibanding Amerika dalam hal pelaksanaan dan ketaatan pada hukum. Tapi di Singapura tidak ada sistem yang dapat menjamin kebebasan seseorang pada tingkat politik. Tidak berarti bahwa Singapura tidak liberal. Ada masyarakat yang lebih ekstrem di mana negara masuk terlalu jauh dalam pengaturan kehidupan sosial. Singapura memang mengatur kehidupan sosial dalam masyarakatnya, tapi tidak masuk terlalu jauh.

Sistem lainnya, misalnya di Arab Saudi, masih mengatur bagaimana seharusnya seorang wanita berpakaian. Itu lebih ekstrem dibanding negara-negara lainnya. Wanita dibatasi kebebasannya dalam hal menentukan pilihannya, misalnya dalam memilih sekolah. Saya kira hal itu tidak akan berjalan terlalu lama, karena sudah menjadi kodrat manusia modern untuk terus-menerus menjadi mandiri, baik itu di Indonesia, Singapura, maupun Arab Saudi. Suatu saat sistem seperti itu akan menjadi terbuka dan akan menjadi bagian dari sejarah.

Mungkin penduduk negeri-negeri semacam itu sekarang bahagia. Tapi seiring dengan proses kemajuan, modernisasi, proses perluasan ruang bagi manusia untuk bergerak sesuai

dengan gerak sejarah, saya rasa hal itu tidak dapat dipertahankan. Artinya mereka hanya bersifat temporer. Anda juga harus melihat bahwa sekitar 300 tahun yang lalu semua bangsa, dalam pengertian modern, juga bersifat tak-liberal, tapi kemudian mereka berubah.

Kebanyakan orang di Indonesia, termasuk kalangan cendekiawannya, masih mengartikan liberalisme secara negatif. Ini merupakan pengaruh sejarah. Sebagian karena masyarakat Indonesia masih berada dalam kompleks agraris yang bersifat komunal—dan tidak ada masyarakat agraris yang liberal. Lihatlah kehidupan di pedesaan. Kecenderungan untuk ikut campur masalah orang lain, sibuk untuk mengatur masalah orang lain—atau bahasa kerennya: paternalistik—luarbiasa kuatnya. Di negara-negara maju pun ada kecenderungan bahwa semakin terpencil tempat tinggal Anda, semakin parokial cara berpikir Anda, semakin kurang liberal cara berpikir Anda.

Kita mengerti juga, selain ada masalah sosio-ekonomi, ada masalah historis. Indonesia lahir dari proses penentangan kolonialisme yang sering dikaitkan dengan kapitalisme, liberalisme, dan sebagainya. Kebanyakan pendiri negara kita adalah orang-orang sosialis-nasionalis; itu merupakan produk sejarah yang unik pada awal dan pertengahan abad ke-20. Kalau Indonesia lahir pada abad ke-21 tentunya akan berbeda; tapi kebanyakan negara Dunia Ketiga lahir pada pertengahan abad ke-20, ketika hak asasi manusia, liberalisme, sedang didiskreditkan di beberapa belahan dunia. Jadi, memang agak sedih juga kita melihat hal itu. Tapi itu masalah masa lalu.

Sekarang justru arah dan kecenderungannya sudah berbalik. Mau tidak mau, sekarang ini kita dipaksa untuk menjadi semakin liberal. Lihat saja media elektronik seperti televisi. Atau bagaimana Anda bisa melarang Internet, koran, *hand phone*, atau media komunikasi lainnya? Hal itu secara langsung memperluas ruang kebebasan, ruang pilihan-pilihan, bagi individu. Jadi, saya

melihatnya lebih ke depan, selain ke belakang. Orang bicara bahwa kehidupan kita sarat dengan sejarah, tetapi sejarah juga hidup dalam batin kita. Dan perlu diingat, sejarah itu bergerak. Dan sekarang, kalau kita lihat, arusnya tidak tertahankan. Yang mengkhawatirkan sebetulnya adalah dimensi ekonomi.

Sekali lagi, ekonomi-politik liberal percaya pada kebebasan, bahwa manusia mampu menemukan apa yang baik, mampu berpikir bagi dirinya sendiri, dan dalam proses mengejar kepentingan dirinya sendiri yang membawa manfaat bagi orang lain. Dalam ekonomi juga dipercaya bahwa para penjual dan pembeli memikirkan kepentingan mereka sendiri. Ini tidak perlu dinafikan. Dalam proses tersebut kemudian mereka membawa kepentingan bagi semua orang. Pedagang koran, misalnya, mengantarkan koran ke rumah Anda bukan karena mereka baik, melainkan karena mereka ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka demi kelangsungan hidup mereka. Jadi, itulah dasar-dasar ekonomi liberal, walaupun rumit dalam kembangankembangannya.

Dan terbukti bahwa sistem ekonomi yang menganut asas seperti ini adalah sistem ekonomi yang mampu menjamin kemajuan. Dan justru ide yang ingin melawan ide liberalismelah yang terpuruk, baik negara komunis maupun negara etatis. Itu merupakan bukti bahwa mereka tidak mampu memberikan alternatif atas sistem ekonomi liberal. Indonesia pada awalnya lebih banyak diatur oleh gelora sosialisme dan nasionalisme. Tapi pada era 80-an kita berubah. Kita semakin terintegrasi dengan perdagangan dunia yang asas-asasnya liberal, dengan adanya deregulasi dan sebagainya. Sejak itu pertumbuhan kesejahteraan semakin meningkat, walaupun masih banyak kekurangan rezim Orde Baru. Harus kita akui bahwa Pak Harto, dibanding Bung Karno, telah membuka ekonomi Indonesia, walaupun tidak sepenuhnya; ia memulai langkah pertama mengintegrasikan ekonomi Indonesia, dan kemajuannya luarbiasa.

Negara-negara yang tertutup atau setengah tertutup, proteksionis, juga membuka diri, dan tidak dapat dimungkiri bahwa dengan mengintegrasikan diri ke dalam ekonomi dunia mereka mengalami kemajuan besar. Mulai dari Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Malaysia, Thailand, Singapura, semua adalah contoh konkret bahwa hanya dengan perdagangan, hanya dengan membuka diri, mereka menjadi negara yang maju, dan sekarang sama majunya dengan negara-negara maju di Eropa. Sebaliknya, negara-negara yang menutup diri atau memproteksi ekonominya, atau yang sangat membenci ekonomi pasar, seperti Myanmar, juga negara-negara Afrika, Amerika Latin, Asia, tetap terbelakang. Cina dan India, setelah membuka diri, bisa kita lihat sendiri bagaimana perkembangannya.

Jadi, tanpa teori canggih-canggih, akal sehat saja bisa menunjukkan bahwa Anda menggunakan kebebasan manusia justru demi kesejahteraan manusia. Yang saya khawatirkan Indonesia. Karena selalu setengah-setengah, tidak pernah benar-benar jelas terhadap semua ini, kita tidak dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk semakin memicu tingkat kesejahteraan ke arah yang lebih baik. Jika dibanding negara-negara lain, kita hanya mengalami pertumbuhan ekonomi 5,7% per tahun; ini memang sudah cukup bagus, dan mungkin ketiga atau keempat tertinggi di Asia, setelah Cina dan India. Tapi sebenarnya kita juga mampu tumbuh sampai 8-9%, seperti Cina, atau 7% seperti India. Kenapa tidak?

Kita bisa menggerakkan pertumbuhan ekonom kita, bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi rakyat kita, bisa membawa masyarakat miskin di pedesaan menjadi bagian dari masyarakat industri yang baik dan sejahtera. Proses ini terhambat karena kita mendua dalam melihat kebebasan ekonomi dan kebebasan manusia.

Kesenjangan antara si kaya dan si miskin itu selalu ada di semua sistem, bahkan lebih parah lagi dalam sistem non-

liberal. Artinya, perbedaan antara kaya dan miskin adalah fakta sosial. Kita tinggal melihat kecenderungannya. Apakah si miskin berpendapatan Rp500 ribu sementara yang kaya Rp500 juta? Ini merupakan kesenjangan. Tetapi ada juga: yang kaya berpendapatan Rp500 juta dan yang miskin Rp5 juta. Ini juga senjang. Jadi, yang kita bicarakan kesenjangan yang mana? Liberalisme tidak berkata bahwa kesenjangan itu akan hilang. Liberalisme, dalam pengertian sistem ekonomi pasar yang dikelola oleh kepentingan masing-masing, dan yang terbuka terhadap dunia luar, bisa menjamin bahwa yang miskin memiliki pendapatan minimal yang mampu untuk hidup dalam kesejahteraan.

Kondisi miskin itu berbeda-beda di tiap negara. Di negarane-negara yang katakanlah tertinggal, kalau Anda miskin Anda praktis tidak punya apa-apa. Kalau Anda miskin di New York, Anda punya apartemen, mobil, televisi, bisa menyekolahkan anak. Miskin dalam pengertian Amerika tetap memiliki kelengkapan-kelengkapan hidup di mana Anda bisa menjadi manusia yang punya martabat. Mereka yang miskinnya dianggap ekstrem, mendapat tunjangan sosial. Dan sistem tunjangan sosial ini samasekali tidak berlawanan dengan prinsip liberalisme modern; ia merupakan bagian dari liberalisme modern, yang mengakui bahwa negara juga memiliki peran. Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang tidak punya fungsi atau peran sosial seperti itu.

Anda tidak mungkin menanggung orang miskin jika Anda tidak punya uang. Artinya, ada yang harus tumbuh dan berkembang, yaitu ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kita bisa menanggung orang miskin; mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Kalau Anda tutup dan hambat ekonomi dengan segala macam ilusi seperti sosialisme, utopia, populisme, justru Anda tidak bisa menanggung orang miskin dengan baik.

Anda lihat di India, misalnya, orang-orang miskin tidur di pinggir jalan. Jumlahnya ribuan. Negara tidak bisa menanggung mereka, karena negara tidak punya sumberdayanya. Tetapi, hal semacam itu tidak terjadi di negara-negara yang sudah maju dengan ekonomi yang terbuka. Saya tidak bilang semua ekonomi maju adalah liberal dalam pengertian yang saya maksud, tapi elemen-elemen pasarnya itu kuat dan bekerja dengan baik. Negara memetik keuntungan dengan kuatnya ekonomi. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan punya ilusi bahwa kemiskinan bisa tertanggulangi jika ekonomi tidak tumbuh. Pertanyaannya: bagaimana kita menumbuhkan ekonomi? Tidak ada cara selain mengadopsi pikiran-pikiran liberal, dalam arti bahwa kita harus membuka pasar, membuka ekonomi Indonesia, mengundang investasi; kita perkuat hukum supaya kepastian antara kaum pengusaha dan kaum buruh bisa terjadi.

Ada sejumlah kemungkinan sebab mengapa pemerintah kita tidak secara tegas memilih ekonomi pasar. *Pertama*, mungkin ada persoalan intelektual, yaitu kebelumyakinan kita terhadap baiknya pemikiran pro-pasar. Ini adalah tradisi, dan merupakan tantangan kita dan salah kita kenapa kita tidak membujuk mereka dengan cara-cara yang efektif. *Kedua*, persoalan politik. Mengubah ekonomi ke arah yang lebih sehat itu menciptakan kalah dan menang. Ada yang semua diproteksi, kemudian dibuka. Yang paling gampang adalah kasus BBM. Proteksi BBM dengan subsidi adalah untuk kalangan kelas menengah, bukan untuk kalangan miskin. Kalau kita mengubahnya—dari semula terbiasa membayar murah kemudian harus membayar mahal—itu menjadi alasan untuk menuding pemerintah. Padahal sebenarnya kita naik mobil dengan membayar harga yang sewajarnya. Malahan, 95% negara di dunia lebih mahal harga bensinnya dibanding di Indonesia. Tapi karena kita terbiasa beli murah, maka ketika kemudian dimahalkan kita marah-marah. Ada banyak contoh lain yang persoalannya mungkin tidak hitam-putih.

Demikian juga masalah-masalah seperti kepemilikan BUMN, misalnya Garuda dan lainnya. Mereka disebut milik pemerintah, milik rakyat, kalau kita jual kepada swasta kita kehilangan aset negara. Padahal, apa sebenarnya arti kepemilikan tersebut? Lion Air adalah milik swasta, Garuda milik kita. Tapi kalau kita ingin naik pesawat mereka, kita sama-sama beli tiket. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud *milik kita*? Apakah Lion Air tidak memelihara pesawatnya dan tidak menggaji karyawannya? Mungkin mereka menggaji karyawannya lebih tinggi. Saya tidak tahu apa beda antara Lion Air milik swasta dan Garuda milik kita.

Bagi saya yang penting adalah mereka membayar pajak, yang nantinya kita gunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Lion Air harus bayar pajak, dan Garuda pun harus bayar pajak; tidak mentang-mentang milik kita kemudian Garuda tidak bayar pajak. Para pejabat negara pun kalau naik Garuda harus bayar. Tidak wajar kalau mereka tidak bayar hanya karena Garuda “milik kita”. Jadi, apa makna “memiliki” dalam konteks itu? Hambatan mental seperti ini yang harus kita tembus.

Perusahaan yang dimiliki swasta mungkin lebih baik, lebih efisien, tapi saya tidak tahu. Saya tidak bilang Lion Air lebih baik. Ini sekedar contoh, dan bukan untuk mempromosikan Lion Air. Pertanyaan pokoknya adalah: apa bedanya bagi kita, warganegara, dalam hal perusahaan yang satu dimiliki swasta dan yang lain dimiliki negara? Tidak ada.

Saya kira masalahnya selain muncul dari para ekonom, juga dari para cendekiawan umumnya. Mereka mengemukakan macam-macam argumentasi yang, kurang-lebih, dianggap ilmiah. Mereka terus berusaha membuktikan bahwa sistem pasar bebas itu tidak adil, dan yang adil adalah sistem yang sebaliknya. Tapi, apakah yang disebut adil itu? Ini tampaknya konsep yang sederhana. Tapi, apa yang adil? Apakah jika saya

memiliki penghasilan yang sama dengan orang lain dapat dikatakan adil? Kalau orang lain pintar dan saya bodoh, mengapa saya ingin penghasilan saya sama dengan dia? Ada yang ganteng, cantik, yang kurang cantik, dan yang diterima yang cantik. Apakah ini adil?

Pertanyaan tentang yang adil ini sangat elusif. Tetapi intinya adalah: apakah ia menjamin kesejahteraan dalam pengertian umum, buat semua orang?

Individu vs Masyarakat

INDIVIDUALISME SERING dianggap sesuatu yang negatif, yang disejajarkan dengan egoisme (sikap egois) atau egosentrisme. Orang yang dianggap individualistik biasanya orang itu dianggap hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan seraya otomatis dianggap melanggar hak-hak masyarakat.

Konsepsi terhadap paham penting ini memang sering disalahpahami. Padahal, sebenarnya paham ini sangat sederhana. Ia mengakui fakta yang alamiah bahwa setiap manusia dalam memandang dunia di sekitarnya selalu memakai kacamata atau persepsi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang mencoba melihat dunia ini lewat pikiran dan mata orang lain—selain karena memang tidak mungkin demikian berdasarkan bangunan fisik manusia.

Ada sebuah contoh gampang yang pernah diberikan oleh Adam Smith, pemikir ekonomi yang dianggap sebagai "Bapak Kapitalisme". Coba lihat, kata Smith, kalau misalnya ada seribu orang mati di Cina, Anda yang di Inggris mungkin malam itu bisa tidur lelap. Tapi coba jika pada saat yang sama jari kelingking Anda tergores sedikit dan kemudian memar atau bernanah. Maka rasa sakit itu mungkin akan membuat Anda semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan jari kelingking Anda itu.

Atau misalnya Anda diberi pilihan yang ekstrem: kalau Anda disuruh memilih antara kehilangan jari kelingking Anda besok pagi karena dipotong atau dua puluh orang meninggal di Cina. Mana yang akan Anda selamatkan: kelingking Anda atau nyawa dua puluh orang itu? Mungkin Anda relakan kelingking Anda. Tapi dilemanya: Anda berpikir tentang sakitnya kelingking Anda itu. Nah, itu berarti Anda tidak salah memikirkan kelingking Anda. Karena bagaimanapun manusia harus berpikir, dia harus melalui bangunan dirinya.

Individualisme sebagai sebuah paham sebenarnya mulai dari fakta sederhana itu. Dia tidak ingin mengingkarinya dengan berkata bahwa, “Lupakan dirimu atau jangan pikirkan dirimu, tapi pikirkan masyarakat yang lebih besar.” Memikirkan diri sendiri itu jangan disamakan dengan egoisme. Jadi yang bisa dilakukan bahwa dalam melihat masalah dan dilema-dilema masyarakat, jangan ingkari kepentingan individu; jangan ingkari cara berpikir masing-masing individu dalam melihat persoalan dan kepentingannya.

Saya pernah memberi contoh sederhana tentang Siti Nurbaya, yang dipaksa oleh ayahnya untuk kawin dengan lelaki yang bukan pilihannya, Datuk Maringgih. Sang ayah bisa bilang bahwa perjodohan paksa tersebut untuk kepentingan keluarga, padahal kita tahu itu demi penyelesaian utang-piutang. Tetapi apapun alasan di luar Siti Nurbaya, pemaksaan itu sebenarnya tidak mengakui individu sang anak yang boleh memilih bagi dirinya sendiri. Jadi individualisme itu bukan berarti seseorang harus egosentris. Itu sekadar pengakuan bahwa manusia dalam melihat persoalan tidak melalui kacamata orang lain.

Dan hal itu tidak berarti harus bertentangan dengan masyarakat. Justru masyarakat akan sangat beruntung jika individu-individu yang ada di dalamnya, yang membentuk masyarakat itu adalah individu-individu yang matang, dewasa, yang mampu memilih bagi dirinya sendiri. Masyarakat semacam

itulah sebenarnya yang terbaik. Bukan masyarakat yang dikomando oleh seseorang—bisa ayah, paman, pemimpin politik, pemimpin agama atau apapun—yang memaksakan kehendak bagi individu-individu dalam proses beragam pilihan dalam kehidupan.

Dalam ungkapan lain, dalam konteks masyarakat, paham individualisme itu menekankan bahwa hendaknya individu atau hak-hak individu itu dipertimbangkan atau dijamin, bukan digerus atau dikalahkan oleh apa yang disebut kepentingan umum. Dalam bangunan tata masyarakat modern dan demokratis, biasanya yang disebut kepentingan paling dasar individu-individu itu dijamin pada bab-bab konstitusi. Selalu begitu. Jadi, apa saja yang tidak boleh dipaksa oleh umum dijelaskan garisnya. Kita sebenarnya sudah menerimanya sejak 1945, dengan Pasal 28 UUD, tapi kita masih ragu-ragu. Belum benar-benar *clear-cut*, atau secara tegas dan penuh. Dengan amandemen terhadap UUD 45 itu, kita sudah bersikap *clear-cut*, bahwa ada hak-hak dasar individu: hak bicara, hak untuk hidup, hak untuk mencari kebahagiaan, *life, liberty, and happiness*. Inilah definisi dasar tentang hak-hak individu itu, tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Tetapi tentu saja selalu ada situasi ketika hak-hak ini untuk sementara bisa ditangguhkan. Contoh yang paling klasik adalah: dalam sebuah bioskop yang gelap, Anda tidak boleh berteriak "Api!", karena orang bisa kaget, panik, keluar bersamaan, ada yang terinjak-injak dan mungkin mati. Jadi, kebebasan itu bisa dibatasi jika kebebasan itu mengancam hidup orang lain. Inilah yang disebut John Stuart Mill sebagai *a very simple principle of liberty*, karena dalam filosofi kebebasan selalu ada pertanyaan: di mana batasnya? Mill, pada pertengahan abad ke-19, memberikan definisi yang amat jelas dan sangat terkenal, yaitu bahwa kebebasan individu berakhir manakala kebebasan itu mengancam hak hidup atau hak orang lain. Ini-

lah prinsip dasarnya, meskipun penjabarannya sangat kompleks dan mengikuti perkembangan zaman.

Misalnya dalam soal merokok. Tahun 1960-an tidak ada larangan merokok di ruangan, apalagi tahun 1950-an. Dalam politik dulu ada istilah *smoke-filled room*—untuk menunjuk keputusan politik dilakukan dalam ruangan yang penuh asap rokok. Bayangkanlah Amerika atau di Eropa di musim dingin, yang mengharuskan semua jendela ditutup. Dan semua orang di ruang-ruang rapat itu merokok, karena belum ada larangan. Baru pada 1970-an, terutama 1980-an, mulai ada aturan tentang larangan merokok di ruangan tertutup. Lalu pada 1990-an larangan itu diperluas, meliputi restoran. Tahun 2000-an di California, di bar pun orang tidak boleh merokok. Ini jelas pembatasan kebebasan.

Tapi pembatasan itu diterima karena muncul teori kedokteran yang baru: bahwa kalau Anda merokok di ruang seperti itu, Anda membahayakan hidup orang lain, sehingga kebebasan merokok harus dibatasi. Itu contoh yang paling gampang. Tentu saja ada beberapa hal praktis tentang kebebasan yang masih diperselisihkan batas-batasnya, tetapi semua menerima prinsip umumnya, yakni bahwa kalau seseorang tidak membahayakan kehidupan orang lain, dia harus bebas memilih bagi dirinya.

Keberanian dalam hal memberi kebebasan pada individu, yang di banyak negara dijamin oleh konstitusi, sesungguhnya juga didasarkan pada asumsi atau pada kepercayaan bahwa manusia itu sebetulnya bisa atau cenderung berbuat baik. Kita, atau “Masyarakat Timur”, dalam hal ini kadang bersikap ambivalen. Kita sering berkata bahwa kita percaya pada sifat baik dalam diri manusia, *the goodness of people, of human being*. Tetapi kita tidak percaya bahwa mereka mampu memilih buat dirinya. Kita ingin *ngatur* hidup orang—gaya berpakaianya, gaya rambutnya. Jadi kita tidak percaya bahwa mereka bisa menentukan pilihannya sendiri.

Bahwa sekali atau dua kali mereka salah, itu lebih baik dianggap sebagai proses belajar ketimbang Anda yang harus menentukan pilihan mereka, misalnya mereka harus pakai jilbab dan sebagainya. Padahal, dengan semangat *ngatur-ngatur* itu, implikasinya secara filosofis, kita tidak percaya bahwa mereka mampu memilih buat dirinya sendiri; kita mau bilang, “Tuhan sudah pilihkan A buat kamu, agama sudah pilihkan B buat kamu.” Kita mau limpahkan semua paket itu, sehingga yang tersisa pada individu hanyalah kepatuhan terhadap aturan-aturan yang ada. Kita mau patuh, tentu saja. Masyarakat yang individualis itu sebenarnya masyarakat yang patuh pada aturan yang dianggap masuk akal dan diputuskan secara bersama. Di jalan mereka tertib pada aturan umum. Kita di sini mau kepatuhan, tapi pada saat kita harus patuh, kita sangat liar.

Dilihat dari sudut lain, antara motif individual dan kepentingan masyarakat itu juga sering terjadi “keanehan”. Milton Friedman, pemenang Nobel Ekonomi 1978, pernah bilang bahwa biasanya kegiatan-kegiatan ekonomi itu dimulai dengan motif individual, motif pribadi, yang dalam perjalanannya kemudian menguntungkan orang banyak. Inilah yang sering terjadi ketimbang sebaliknya: orang yang semula berpretensi atau berkata bahwa semua kegiatannya bukan buat dirinya sendiri melainkan buat orang banyak, ternyata justru merugikan masyarakat; jadi, masyarakat yang diatasnamakan itu dirugikan, dan dia secara pribadi diuntungkan, diperkaya. Kasusnya yang ekstrem adalah korupsi. Tapi di luar soal korupsi juga banyak kasus semacam itu.

Dalam hal ini kita bisa melihat fakta yang tak terbantah bahwa di negeri-negeri yang paling kaya cenderung juga menjadi negeri-negeri yang paling bebas. Kebebasan dan kesejah-

teraan ekonomi itu rupanya berhubungan. Penjelasannya bermacam-macam. Selain memakai penjelasan Friedman, kita juga bisa menengok contoh yang paling klasik yang sudah diberikan Adam Smith dua ratus tahun silam. Waktu itu dia bicara soal penjual roti. Dia bertanya, “Dari mana kita dapat roti setiap hari?” Dengan hanya lima sen, sangat gampang kita beli roti di pasar. Kalau kita melanggan di rumah, roti diantar ke rumah kita. Pendeknya kita dapat makan roti. Apakah karena pedagang atau penjual roti ini mau menolong kita atau penjual roti itu sebenarnya mau mencari untung buat dirinya sendiri? Ternyata penjual dan pemilik pabrik yang mengantar roti itu mencari keuntungan buat dirinya sendiri.

Nah, sistem ekonomi tersusun dari begitu banyak penjual, pencari, pedagang roti, dan macam-macam pedagang lainnya, dan semua ini mencari untung bagi dirinya sendiri, tetapi akibatnya ada suplai pada masyarakat. Kita dapat ini, kita jual itu; saling membeli dan saling menjual. Ketersediaan roti atau beras bagi masyarakat dengan demikian jadi tercukupi. Itulah yang disebut masyarakat yang interaksi ekonominya bebas. Setiap orang mencari untung bagi diri masing-masing. Dan dengan cara itu, kebutuhan semua orang ternyata tercukupi; semua orang pun bahagia karena merasa dimudahkan.

Justru harus kita ragukan atau curigai kalau ada orang berteriak-teriak, “Hei, saya mengantarkan roti ini sebenarnya bukan untuk mencari untung! Saya mau kasih saja roti ini pada kalian, hai para konsumenku.. Saya tidak mau untung. Saya mau rugi...” Orang itu pasti gila—atau setidaknya tidaknya munafik. Dalam sejarah, ada sistem yang pernah mencoba cara itu dengan berbagai variasi. Ada sistem komunisme di Soviet, Cina, Korea Utara, Vietnam, dan Kuba.

Cara yang kemudian meluas ke sistem sosial dan politik itu kemudian runtuh semua, atau tetap terbelakang dibanding negeri-negeri lain. Di Cina, Mao dulu pernah bilang (adaptasi

dari Lenin) bahwa kita harus menciptakan manusia-manusia baru. Sebelumnya, di Soviet, Lenin ingin menciptakan manusia-manusia sosialis yang tidak memikirkan kepentingan dirinya, tetapi memikirkan kepentingan rakyat banyak, kaum buruh. Mereka lupa pada fakta dasar tentang manusia yang, menurut data-data biologis, sosio-bologis, sudah berumur lebih dari sejuta tahun dalam bentuknya yang sudah mulai modern. Jadi, Mao, Lenin, dan orang-orang yang sealiran dengan mereka pasti tidak akan mampu mengubah manusia. Tidak ada namanya manusia baru itu.

Manusia adalah hasil evolusi panjang dengan karakteristiknya sendiri, yang melihat manusia dengan kaca mata dirinya, bukan diri orang lain. Maka sistem apapun yang dibangun tidak berdasarkan pandangan manusia yang benar dan realistis akan runtuh. Itulah yang dialami oleh sistem komunisme, karena pretensi mereka bukan cuma menciptakan sebuah sistem baru, tetapi pada fundamentalnya ingin menciptakan manusia baru dengan karakteristik baru. Manusia yang tidak memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan anaknya, keluarganya, bapaknya, melainkan memikirkan masyarakat sosialis. Karena itu di Cina, waktu Revolusi Kebudayaan, bapak, ibu, anak dipisahkan.

Ide itu sebenarnya mengikuti Plato. Dalam karya masyhurnya, *Republic*, dia menyebut bahwa pendidikan terbaik yang ideal adalah jika anak dan ibu dipisahkan sejak awal, karena ini akan menumbuhkan pikiran-pikiran anak berdasarkan bakat-bakatnya. Ini masyarakat idealis-utopis. Jadi ini yang diulang dalam bentuk baru oleh Lenin di Rusia, Mao di Cina, Pol Pot di Kamboja. Mereka mau mencetak anak-anak sosialis baru. Itu sebabnya sejak kecil, setiap bangun tidur, mereka diharuskan baca *Buku Merah*, kitabsuci Mao.

Yang terjadi adalah tragedi kemanusiaan yang amat dahsyat. Proses di Cina itu memakan korban puluhan juta jiwa

yang kelaparan. Sistem pertanian Cina samasekali ambruk. Kolektivisme runtuh, dan baru mulai diperbaiki kembali oleh Deng Xiao Ping, pada 1978. Hasilnya sekarang cukup menakutkan, sebagai keberlanjutan dari semakin terbukanya kebebasan ekonomi di Cina, belum politik. Jadi kolektivisme dibalikkan dan elemen-elemen liberalisme diperkenalkan. Sejak beberapa belas tahun lalu, ekonomi Cina tumbuh dua digit, 11, 12, 13 persen setahun.

Di sisi lain, sistem Soviet hanya bertahan 70 tahun, jika kita hitung dari Revolusi Bolshevik 1917. Sangat singkat. Bandingkanlah misalnya dengan Amerika Serikat yang sudah berusia 200-an tahun—tak perlulah kita bandingkan dengan Inggris yang sudah terlalu lama. Jadi kemenangan sistem yang percaya pada kebebasan itu juga karena ia cocok dengan watak manusia, dan juga fleksibel terhadap perubahan. Kuncinya adalah karena pada dasarnya keputusan diambil oleh begitu banyak individu. Sementara pada sistem komunisme, yang mengambil keputusan adalah sekretariat jenderal partai (politbiro), yang hanya terdiri atas 50-an orang. Bandingkan dengan sistem pasar, di mana di dalamnya begitu banyak pedagang, penjual, dan pembeli sama-sama memutuskan yang mana paling menguntungkan.

Ada jutaan orang setiap hari mengambil keputusan; jutaan keputusan berdasarkan kepentingan diri masing-masing. Dan paradoksnya lagi, sistem yang sangat bebas ini justru yang sangat teratur. Ia dinamis, fleksibel, cepat. Dan seperti yang dikatakan Friedrich Hayek, seorang filsuf asal Austria yang pernah mendapat hadiah Nobel Ekonomi, sebenarnya kepentingan diri yang dicerminkan oleh harga yang mau kita bayar itulah yang akhirnya membuat sistem yang luarbiasa, yang di dalamnya jutaan orang berinteraksi tanpa saling mengenal.

Sistem yang liberal itu tak perlu dikhawatirkan bakal menimbulkan kekacauan. Sebab yang terjadi adalah "kekacauan

yang kreatif” atau situasi dinamis yang sangat kreatif (*a very creative and dynamic situation*). Lihatlah ekonomi Amerika atau Hongkong yang begitu dinamis, tetapi begitu cepat menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini ada satu elemen yang membuat perdagangan juga penting dari segi moral dan segi kebudayaan. Ini sudah dikatakan dua abad yang lalu oleh Montesquieu, seorang pemikir Prancis.

Dulu orang menganggap bahwa perdagangan itu membuat orang serakah, materialistis, dan sebagainya. Tetapi, kata Montesquieu, sebelum tumbuhnya sistem perdagangan atau pertukaran modern, yang terjadi justru adalah perang suku, perang etnis, perang agama. Orang jadi terkucil oleh perbedaan-perbedaan yang bersifat nilai dan keyakinan. Tetapi di pasar, di mana ada penjual dan pembeli, yang penting harganya cocok. Entah penjualnya orang Arab, Yahudi, atau Cina, kalau harganya cocok kita beli. Artinya, sebagai sistem, pertukaran yang didasarkan pada kepentingan tersebut sebenarnya membuat manusia menghilangkan prasangka. Jadi kalau model pertukaran ini menjelma menjadi sistem sosial, atau menopang sistem sosial, maka pada dirinya sendiri sistem ini tidak mengandung bias *prejudice*, yang telah turun-temurun diwarisi oleh masyarakat manusia. Itulah salah satu pengaruh penting sistem pertukaran yang kita sebut sebagai perdagangan modern.

Di dalam kehidupan ini memang ada banyak elemen. Kita juga tidak bisa berkata bahwa sistem pertukaran ini akan merembes ke mana-mana, ke semua aspek kehidupan. Orang masih kembali ke agama, etnik, daerah, bahkan ada yang disebut sebagai *nation state*. Ini semua bercampur-aduk. Tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah bahwa kita ingin melihat individualisme dalam berbagai macam manifestasinya. Kita tidak bisa dengan sederhana berkata bahwa individualisme itu anti-masyarakat, anti-kepentingan umum atau egois. Ini sebuah

paham modern yang menurut saya menjadi salah satu dasar dari suksesnya masyarakat modern. Jadi janganlah paham ini dipandang secara sangat simplistis. Ia berhubungan dengan berbagai macam hal dan justru menjadi salah satu kekuatan konstruktif yang progresif dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat modern.

Kita kemudian teringat pada Francis Fukuyama, yang bilang bahwa sejarah sudah berakhir. Tentu yang dia maksud bukan sejarah dalam arti kronologis, tapi sejarah dalam arti pertarungan gagasan, antara sistem demokrasi liberal dengan komunisme. Dengan runtuhnya komunisme, maka demokrasi liberal—yang merupakan abstraksi atau perluasan paham individualisme—menjadi pemenang, dan sejarah berakhir. Ide Fukuyama ini memang masih terlalu abstrak. Tapi pada dasarnya dia ingin berkata bahwa pada akhirnya sistem masyarakat yang ingin kita buat, setelah berputar ke mana-mana dan melakukan macam-macam percobaan, akhirnya membuat kita kembali ke kearifan lama yang benar, yang kebetulan dia namakan kapitalisme-liberal. Dasarnya adalah penghargaan pada kedaulatan individu, pada kebebasan masing-masing orang untuk memilih. Kalau Anda pakai paham itu, Anda bikin sistem itu, tentu namanya kapitalisme-liberal, tidak bisa lain.

Mereka yang hidup dalam sistem itu punya kebebasan, punya kehendak untuk bebas. Itulah yang menjadi motor perubahan. Ke sanalah arah sejarah. Masyarakat yang masih memakai sistem yang di dalamnya ada perbudakan, misalnya, suatu saat akan hilang. Budak-budak itu akan merdeka. Mereka akan merdeka, dalam arti akan menentukan kehendaknya sendiri, menjadi tuan bagi dirinya sendiri.

Itulah yang dikatakan Fukuyama. Dan kita sulit menyebut bahwa dia keliru.

Persamaan di Depan Hukum

KONSEP *EQUAL OPPORTUNITY*, persamaan peluang, merupakan salah satu masalah yang rumit dalam pengaturan kehidupan modern, dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Dalam masalah persamaan kesempatan, ada dua hal yang harus kita pikirkan. Pertama, masalah ideal, cita-cita, arah besar yang harus kita tuju. Tapi, kedua, ada juga masalah kenyataan. Kita tidak bisa memungkirinya. Kalau kita mau membangun masyarakat, harus berdasarkan kenyataan yang ada, untuk kemudian kita ubah. Tapi kalau kita ingkari kenyataan, kita akan terjebak pada utopia yang akhirnya juga gagal, menyedihkan, dan akan memakan korban yang sangat banyak.

Itu sudah terjadi pada komunisme, yang mau membuat masyarakat baru, manusia baru. Sama-rasa, sama-rata. Mereka tidak mengakui sejarah dan mau menghancurkannya. Kalaupun tidak sampai dihancurkan, agama, sejarah, simbol-simbol masa lalu itu, mereka lupakan. Sebab mereka ingin membentuk sesuatu yang samasekali baru, yang sesuai dengan ideal mereka, tetapi pada akhirnya gagal. Dan sungguh menyedihkan, gagalnya itu dengan memakan korban yang luarbiasa besar. Saya kira, ini tragedi kemanusiaan terbesar yang pernah kita lihat dalam sejarah. Dalam soal *equal opportunity*, kenyataan

yang saya maksud adalah kenyataan bahwa manusia berbeda-beda.

Orang ingin mencari distingsi. Saya ini berkarya, bekerja, berkarir, ingin agar saya berbeda, bukan supaya saya sama. Kalau orang mau jadi sama, dia akan menjadi medioker—tanggung, kemampuannya setengah-setengah. Setiap manusia pada dasarnya ada yang kuat, ada yang dorongannya lemah, tetapi terkait dengan kepentingan dan persepsi dirinya. Ibaratnya, setiap orang ingin jadi elang, tidak ingin jadi bebek. Setiap orang ingin terbang tinggi dan berkata, “Inilah saya!” Dalam memilih pakaian, Anda ingin lebih baik; dalam memilih istri, Anda ingin lebih baik. Artinya tidak umum. Pokoknya, Anda ingin berprestasi.

Orang bahkan harus didorong untuk mencari ketidaksamaan. Kalau anak kita bilang bahwa di sekolah dia mau sama saja dengan anak-anak lainnya, belajarnya mau biasa-biasa saja, tidak mau lebih bagus daripada teman-temannya, kita akan bilang, “Aduh, anak ini tidak punya motivasi untuk belajar.”

Dan dengan ke-biasa-an dan ke-sama-an itu, kemajuan tidak mungkin tercapai. Lihatlah para jenius dan penemu. Mereka biasanya orang yang punya motivasi kuat, punya kemauan keras. Mereka mau kerja keras, karena ingin berbeda. Ini fakta. Dan memang dalam kenyataannya orang berbeda-beda. Sesosialis dan seegalitarian apapun seseorang, kalau dia melihat sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih cantik, selalu ada impuls-impuls untuk ikut mengagumi atau menghargai, yang merupakan bagian dari kenyataan alamiah di dalam diri manusia.

Jadi, pada dasarnya kita mau berbeda, kita suka berbeda. Tetapi pada saat yang sama ada impuls lain. David Hume, seorang filsuf dari Skotlandia yang menulis buku yang sangat terkenal, *Treatise of Human Nature*, mengatakan bahwa salah satu dasar manusia membentuk masyarakat dan berinteraksi

dengan masyarakat adalah perasaan simpati atau empati. Artinya, kalau kita melihat penderitaan orang, kita ikut sedih. Intinya, kita mau memperlakukan orang sebagaimana kita mau diperlakukan. Ada semangat untuk berbeda, berdistingsi. Mau jadi juara, jadi jagoan, jadi terbaik, jadi lebih cantik, lebih kuat, lebih kaya, tapi kita mau diperlakukan sama. Intinya juga simpati kepada diri. Saya tidak mau diperlakukan sewenang-wenang, saya mau diperlakukan sama. Tetapi ini impuls lain. Jadi, di dalam diri manusia ada semangat untuk berbeda, tetapi ada semangat yang sama pada titik-titik tertentu. Kedua impuls inilah yang membentuk kenyataan: manusia dan masyarakat.

Nah, dalam konteks tata kemasyarakatan, apa yang disebut *equal opportunity* itu sebenarnya agak rancu kalau kita terjemahkan terlalu jauh. Yang lebih tegas adalah *equality before the law*, persamaan di depan hukum. Anak jenderal, presiden, orang miskin, rakyat kecil, pengusaha besar, pedagang kecil, di depan hukum posisinya sama. Kalau yang satu tidak boleh mencuri, yang lain pun tidak boleh; yang satu tidak boleh melanggar rambu-rambu lalu-lintas, yang lain pun tidak boleh melanggar. Begitulah sederhananya.

Dengan menjamin persaman bagi semua orang di depan hukum, otomatis prinsip ini berlaku dalam menjamin persamaan dalam semua hal. Sebab hukum adalah fondasi interaksi manusia dan masyarakat. Hukumlah yang mengatur boleh dan tidaknya suatu tindakan dilakukan. Memang, ada etika dan kebudayaan, tapi itu adalah hal yang berbeda. Kalau kita bicara tata aturan dalam masyarakat secara formal, maka yang kita maksud dengan *equality* sebenarnya adalah persamaan di depan hukum. Karena kalau kita mulai menafsirkan hukum sebagai kesempatan, maka konsepsi ini agak elusif, sulit dipegang. Apa yang kita maksud dengan *kesempatan*? Yang saya tahu, itu artinya kesempatan buat anak saya dan kesempatan buat anak orang lain harus sama—dan memang sama di depan

hukum. Tetapi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan: apakah itu berarti anak yang pintar dan anak yang kurang pintar mau dipersamakan? Tesnya harus sama-sama menang? Tentu saja harus ada tes kalau Anda melamar pekerjaan. Misalnya tes matematika. Pelamar yang diterima adalah yang dapat nilai 8,5. Kalau Anda dapat 8,2, tentu tidak bisa masuk. Jadi basisnya adalah ketidaksamaan.

Yang penting, sistemnya harus memungkinkan bahwa semua orang berhak ikut tes itu. Dasar utamanya ada di konstitusi. Anda memperlakukan saya tidak sama, tetapi Anda tidak bisa menghukum atau menuntut seorang pemilik perusahaan yang menerima anak yang lebih pintar berdasarkan tes yang universal. Dalam masyarakat yang kompleks, yang di dalamnya ada potensi-potensi konflik antar-agama, etnik, warna kulit, dan sebagainya, situasinya memang agak problematis. Misalnya, anak kulit hitam dan kulit putih sama-sama dites matematika. Si anak kulit putih dapat 8,5, sementara anak kulit hitam 8. Kalau tes matematikanya berdasarkan standar universal, maka yang 8,5 ini yang diterima—kebetulan dia berkulit putih. Tetapi beberapa aktivis kaum kulit hitam mungkin berkata, "Ya, tentu saja anak kulit putih yang menang, sebab tesnya matematika, coba kalau tesnya basket...."

Padahal tes basket mungkin tidak relevan untuk pekerjaan yang dimaksud. Dan argumen semacam itu membuat ukuran-ukuran universal menjadi sia-sia. Maka saya kurang suka kalau konsep *equal opportunity* ditarik terlalu jauh, karena sifat elusifnya itu. Ia menimbulkan interpretasi yang licin, bisa ditarik ke sana, kemari, tergantung kepentingan kelompok atau tujuan tertentu yang kita inginkan. Tetapi kalau disebut sebagai *equality before the law*, konsep ini jelas, artinya persamaan di depan hukum. Ini harga mati.

Kadang-kadang aktivis perempuan juga lebih memilih untuk menggunakan konsep *equal opportunity* daripada *equality*

before the law. Tentu saja kita tidak mau ada diskriminasi. Tetapi tidak cukupkah penegasan jaminan konstitusi bahwa semua orang dijamin bebas dan sama?

Aktivis perempuan biasanya meminta kuota untuk diperlakukan. Misalnya dalam rekrutmen politik. Mereka tidak ingin ada persaingan terbuka, dan ingin persaingan pakai kuota. Implementasinya misalnya berupa permintaan pada partai-partai politik untuk memberi sedikitnya 30% peluang kursi bagi calon legislatif. Buat saya dalam konteks kesejarahan tertentu yang ekstrem, metodenya mungkin saja masih bisa diterima sejauh bersifat sementara. Tetapi metode kuota untuk *equal opportunity* ini pada dasarnya *self-defeating*, menyalahi prinsip dasarnya. Anda ingin persamaan bagi setiap orang. Tapi kalau Anda minta kuota, itu berarti dasarnya adalah ketidaksetaraan bagi setiap orang. Dan yang dapat kuota hanya perempuan. Pria tidak dapat. Ini melanggar prinsip kesetaraan yang ingin diperjuangkan. Entah Anda minta jatah untuk kulit hitam, untuk perempuan, untuk minoritas, dan sebagainya, jika itu didasarkan pada sistem kuota untuk menjamin *opportunity*, maka ia *self-defeating*, menggugurkan prinsip dasarnya sendiri.

Formula kuota semacam itu mungkin diajukan dengan bertolak dari kenyataan bahwa kondisi antara perempuan dan laki-laki tidak setara. Tapi harap diingat bahwa dalam masyarakat mana pun, tidak ada kondisi setara untuk mulai. Anda bisa bandingkan, misalnya, kondisi di kalangan kelompok-kelompok minoritas di Amerika Serikat. Kelompok yang paling tidak pernah minta-minta perlindungan antara lain minoritas etnik dari Korea, Cina, dan Asia pada umumnya. Tanpa pernah minta kuota, minoritas-minoritas ini justru lebih cepat tumbuh, paling maju, paling menguasai teknologi dan bisnis yang berkembang di Amerika. Sebab mereka berprinsip bahwa kesempatan itu tidak dijamin dan tidak diberikan oleh siapapun. Ke-

sempatan adalah sesuatu yang harus mereka rebut. Karena itu mereka mau bekerja lebih keras daripada orang lain; mereka mau lebih pandai daripada orang lain. Mereka merebut dan menciptakan kesempatan.

Orang-orang yang melihat kesempatan atau *opportunity* sebagai sesuatu yang diberikan, disediakan oleh orang lain—termasuk oleh pemerintah—justru tidak akan pernah maju. Dalam konteks ini saya tidak sedang membicarakan hukum positif. Saya sedang bicara soal cara pandang kita dalam melihat masalah tertentu. Tentu saja benar kalau dikatakan bahwa asal-muasal kita ini tidak sama. Ini serupa halnya kalau kita mengu-sut kesalahan atau mencari siapa yang salah: kenapa orang hitam jadi budak; kenapa orang putih jadi tuan? Ini akan berkepanjangan tanpa ujung. Dari mana kita memulai sejarahnya? Apalagi kalau kita ingat bahwa yang pernah jadi budak bukan hanya orang hitam, tapi orang putih juga pernah. Seandainya orang Turki menang di Eropa melawan orang-orang kulit putih, yang menjadi budaknya orang Turki di Balkan tentu orang kulit putih. Bahkan, di Nusantara ini kita pernah saling memperbudak. Fakta sejarah itu harus diakui.

Tapi marilah kita melihat ke depan. Dalam menyusun sistem yang baru sekarang ini, kita bisa menengok masa lalu, tapi orientasinya harus ke masa depan. Kalau kita merasa bahwa di masa lalu sejarah tak berpihak pada kita, *opportunity* itu bukan di tangan kita, kita harus bertekad bahwa di masa depan peluang itu akan kita rebut dengan tangan kita sendiri, sejauh hukumnya sama. Hukumnyalah yang tidak boleh diskriminatif terhadap diri kita. Soal kesempatan, kita akan mencarinya sendiri. Pemerintah tidak perlu ikut campur. Kuncinya adalah kerja keras dan kreativitas, dengan melihat ke depan. Ini soal cara kita melihat kehidupan.

Dalam konstitusi di negara demokratis modern sekarang ini, elemen diskriminasi sebenarnya sudah hilang. Lain halnya

kalau kita bicara tentang Amerika di masa sebelum 1919 atau di Eropa sebelum 1920. Hukum positif mereka waktu itu tidak memberi wanita hak memilih. Jangankan wanita, kaum pria pun—kalau kita tarik ke masa 50 tahun sebelumnya—tidak semua diberi hak memilih. Di Inggris, negara pertama yang menganut demokrasi, dalam proses perubahan reformasi secara formal, pemberian hak pilih kepada masyarakat dimulai untuk kaum pria bangsawan dan terdidik, bukan pada semua pria. Sampai 1894, tahun terakhir reformasi, wanita masih belum boleh memilih. Setelah itu barulah wanita diberi hak memilih—dan dengan demikian terjadi revolusi besar dalam hal *equality before the law*. Sejak itu prosesnya berlangsung sangat cepat. Hukum positifnya mendukung.

Sebagai konsep sosial, *equal opportunity* itu baik. Saya tidak menentanginya. Saya cuma mau katakan bahwa kita perlu hati-hati dalam memaknainya, sebab konsep ini elusif, gampang *merucut*. Lain halnya dengan *equality before the law*, yang sangat jelas, yakni jaminan kesetaraan di depan hukum. Tapi yang namanya *opportunity*, siapa yang harus memberikannya? Apakah negara wajib memberikan *opportunity*? Buat saya: *No!* Negara hanya wajib menjamin hukum yang sama. Tetapi kesempatan bukan diberikan oleh negara. Hidup kita bukan di tangan negara, tetapi di tangan kita sendiri.

Bagaimana dengan program *affirmative action* di Amerika Serikat, yang kadang dianggap sebagai diskriminasi positif? Program ini memang didasarkan pada semacam rasa bersalah orang kulit putih terhadap kaum kulit hitam, yang kini jumlahnya puluhan juta jiwa. Tapi saya ingat pidato Martin Luther King (1969). Tokoh terpenting perjuangan kulit hitam itu berkata: *I have a dream, one day my children will not be judged because of the colour of their skin*. Artinya, King ingin anak-cucunya, temannya dan siapapun, diperlakukan bukan karena

warna kulitnya—bahkan walaupun perlakuannya positif. Nah, *affirmative action* itu memperlakukan seseorang sesuai warna kulitnya. Karena seseorang itu kulitnya hitam, maka dia harus diberi kuota. Kenapa? Karena nenek-moyang orang hitam itu pernah diperbudak oleh nenek-moyang orang kulit putih.

Martin Luther King tidak menginginkan hal itu. Jadi, semangat King itu berbeda dengan semangat pemberi *affirmative action*. Para pendukung *affirmative action* berkata bahwa tujuan mereka sama dengan tujuan Martin Luther King. Tetapi metode dan dasar filsafatnya berbeda. Sekali lagi saya katakan bahwa ini masalah yang mungkin tidak bisa dilihat secara hitam-putih. Hal ini benar hanya karena konteks kenyataan yang memang kompleks. Tetapi saya berpegang pada prinsip dasar. Saya tidak mau melihat masalah ini dari kacamata hitam-putih. Saya bersedia memberikan beberapa kemudahan sejauh masuk akal, tetapi kemudahan itu hanya sementara dan betul-betul karena *political expediency*. Jangan menganggap itu benar pada dirinya sendiri, apalagi menganggap itulah mahkota perjuangan *equality of opportunity*. Itu keliru besar. Kalau dianggap demikian, tentu boleh saya katakan bahwa itu merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan kaum yang ingin membebaskan dirinya dari segala bentuk kekangan, termasuk kekangan diskriminasi warna kulit.

Saya mau kasih contoh supaya kita bisa melihat persoalan ini dengan proporsional. Katakanlah Anda keluarga kulit putih, sementara saya keluarga kulit hitam. Tentu bukan salah kita berdua kenapa nenek-moyang kita saling memperbudak. Kepada anak-anak kita masing-masing kita bilang, “Belajarlah yang baik dan belajarlah yang keras”. Dua-duanya mengikuti saran itu. Tentu saja baik jika dua-duanya diterima di universitas, tapi ternyata yang diterima cuma satu, anak Anda atau anak saya. Kehidupan ini memang kadang-kadang kejam, mes-

ki kita mau kehidupan ini jangan kejam. Kita dihadapkan pada pilihan. Kursi untuk menerima mahasiswa di universitas terbatas. Maka harus ada tes.

Anak Anda yang kulit putih mendapat nilai 8,5 untuk matematika, anak saya dapat 5,5. Dengan adanya *affirmative action*, mungkin anak saya yang nilainya 8,3 itulah yang masuk. Bayangkan apa yang harus Anda katakan pada anak Anda? “Oh, anakku, nilaimu memang lebih tinggi daripada anak kulit hitam itu, tetapi nenek-moyang kita dulu pernah memperbudak nenek-moyang dia, jadi kau harus menanggung dosa nenek-moyangmu.” Ini terjadi dalam situasi di mana kedua anak ini belajar dengan baik. Bayangkan, kalau anak Anda belajar dengan baik untuk dapat 8,5, sementara anak saya yang malas dan cuma dapat 5,5 malah bisa masuk. Anda mau bilang apa pada anak Anda? Mungkin situasi ekstrem seperti ini tidak pernah terjadi. Tapi setelah program itu berlangsung dua puluh tahun dalam masyarakat yang berpenduduk 300 juta orang, pasti satu atau dua kasus semacam itu terjadi. Dan beberapa tahun lalu hal semacam itu terjadi di Universitas Michigan, sehingga sejumlah mahasiswa kulit putih yang merasa dirugikan mengajukan gugatan hukum.

Jadi sekarang program itu mulai ditentang. Dan jangan lupa, sejarah pada akhirnya berpihak pada kebenaran. Setelah beberapa puluh tahun dicoba, ternyata memang *in the long run* sistem kuota atau sistem diskriminasi ini tidak menghasilkan siswa-siswa yang cemerlang. Sebab tes itu universal. Kalau Anda dites waktu Anda mahasiswa, tesnya kan sebenarnya bukan saat itu saja. Tes itu adalah akumulasi pengalaman hidup.

Affirmative action yang diterapkan di Amerika itu kadang dipuji oleh kalangan tertentu yang menganggap bahwa pemerintah itu sebaiknya bersikap seperti itu. Yang lemah diberi kesempatan lebih, yang kuat tidak perlu dibantu. Pada prinsipnya kita senang membantu yang lemah. Semua agama meng-

ajarkan hal yang sama. Semua orangtua mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya: agar anak-anak mereka menjadi orang yang baik, suka bekerja keras, punya keberanian, dan suka menolong. Tidak ada hal yang salah dengan semua itu.

Yang jadi soal adalah: apa yang kita maksud dengan menolong? Bagaimana metode menolong? Apa bentuk pertolongannya? Masalah ini tidak sederhana. *Affirmative action* muncul hanya dalam periode sejarah tertentu, yang memang kita harus mengerti dalam konteks dinamika politik Amerika tahun 60-an. Pada prinsipnya kita harus membiasakan orang untuk berjuang bagi dirinya. Dia maju bukan karena ditolong. Betapapun baiknya tindakan menolong, tidak ada orang yang maju karena sistem pertolongan. Orang maju karena mau berusaha keras untuk mencapai kemajuan itu dan bersedia berkorban—waktu, pikiran, dana—untuk mencapai kemajuan itu. Mungkin secara temporer ada orang-orang lemah yang kita tolong. Tapi yang membuat dia maju, modern, merasa bangga terhadap dirinya, bukanlah karena dia ditolong, tapi karena dia menolong dirinya sendiri.

Arief Budiman

BARU-BARU INI Arief Budiman mendapat penghargaan Hellman/Hammets Award 1996, yang diberikan Human Rights Watch, lembaga internasional yang bergerak di bidang HAM (hak asasi manusia). Sebagai seorang sahabat, saya ikut merasa bangga atas penghargaan ini.

Saya tahu bahwa, bagi Arief, selama kondisi HAM kita masih seperti sekarang, penghargaan seperti itu tak berarti apa-apa. Dengan atau tanpa penghargaan, Arief akan terus berusaha mewujudkan idenya dan mengkritik segala bentuk tindakan publik yang mengusik hati nuraninya. Arief adalah tipe manusia Kantian, seorang yang akan terus memperjuangkan kebenaran walaupun langit runtuh.

Siapa Arief Budiman? Bagi banyak orang, dia adalah pengkritik Orde Baru, penulis yang cerdas, dan penganjur sosialisme humanis. Semua itu betul. Namun, bagi saya, ada sebuah dimensi persoalan yang menarik pada diri Arief yang belum banyak dimengerti. Persoalan ini bersumber pada ketegangan dan tarik-menarik antara dunia keilmuan dan dunia aktivisme, antara dunia pencarian pengetahuan dan dunia perjuangan politik. Arief Budiman, sebagai sebuah fenomenon, memberi gambaran yang cukup jelas tentang hubungan yang dilematis antara

apa yang disebut oleh Max Weber sebagai *the vocation of science* dan *the vocation of politics*.

Titik tolak dunia keilmuan adalah skeptisisme, bukan kepastian. Seorang ilmuwan adalah seorang yang peragu, skeptis. Berbeda dengan seorang kiai, pendeta, dan penyebar “kebenaran” lainnya, tugas seorang ilmuwan bukanlah menyebarkan kebenaran, melainkan mencarinya, mempertanyakannya, mengujinya.

Tentu para ilmuwan sering menganut atau percaya pada “kebenaran” tertentu, katakanlah sebuah teori tentang pembangunan sosialis. Namun kebenaran semacam ini selalu bersifat sementara, cair, dan siap diuji terus-menerus. Jika ternyata akumulasi fakta-fakta yang ada cenderung menolak kebenaran tersebut, maka sang ilmuwan akan dengan senang hati mengubahnya, bahkan meninggalkannya samasekali, untuk kemudian mencari kebenaran baru.

Berbeda dari kerja seorang ilmuwan, kerja seorang pejuang atau aktivis bermula dari kepastian dan berakhir dengan kepastian. Buat seorang aktivis, skeptisisme adalah cermin dari ketakutan untuk bersikap. Perjuangan politik pada hakikatnya adalah upaya untuk memperluas basis dukungan publik terhadap cita-cita tertentu. Karena itu, yang harus diperlihatkan oleh seorang pejuang sejati bukanlah keraguan, melainkan justru jalan yang pasti, yang “benar”, yang lebih “baik”. Siapa gerakan yang bersedia menjadi pengikut seorang peragu?

Seorang ilmuwan akan berbahagia jika sesuatu yang semula disangkanya benar ternyata kemudian bisa dibuktikan keliru. Dalam hal ini sang ilmuwan akan memulai proses pencariannya lagi, sebuah proses yang memang menjadi puncak dambaannya. Sebaliknya, buat seorang pejuang, jika ternyata hal yang selama ini dianggapnya sebagai kebenaran ternyata ditolak realitas, keliru, *chimera*, maka yang terjadi adalah ma-

lapetaka besar. Seluruh *raison d'être*-nya sebagai pejuang runtuh. Sang pejuang kemudian menjadi *a fighter without a cause*.

Arief Budiman berada dan bergumul di antara dua dunia yang berbeda itu. Siapapun yang pernah bergaul akrab dengan Arief pasti mengerti bahwa dalam diri tokoh yang satu ini terdapat semangat untuk bertanya terus-menerus, sikap yang terbuka bahkan terhadap kritik setajam apapun serta kecintaan yang besar terhadap pengetahuan. Singkatnya, dalam diri Arief terdapat impuls-impuls dasar seorang ilmuwan. Barangkali karena hal inilah maka sejak awal, dunia yang dipilih Arief sebagai basis segala kegiatannya adalah dunia universitas.

Di pihak lain, Arief juga seorang aktivis sejati—penghargaan yang diterimanya dari Human Rights Watch itu hanyalah salah satu buktinya. Sebagai pembicara dan penulis, yang tampak jelas pada dia adalah karakter seorang pejuang. Dalam banyak tulisannya kita jarang berjumpa dengan keragu-raguan. Yang selalu kita baca dalam tulisan-tulisan tersebut adalah kepastian yang sederhana dan kesederhanaan dalam kepastian. Lebih-lebih jika menulis tentang tema-tema di seputar sosialisme dan kapitalisme, yang terutama Arief lakukan adalah menyebarkan dan mempopulerkan “kebenaran”, bukan mencarinya.

Sejauh manakah Arief dapat mempertemukan kedua dunia yang berbeda itu? Bisakah dia mempertahankan integritas seorang ilmuwan, sambil pada saat yang sama terus-menerus menjadi aktivis di jalan sosialisme? Apakah ternyata dia sudah mengabaikan dunia keilmuan dan hanya menjadi penganjur serta pembela ajaran-ajaran sosialis, dan karena itu cenderung menjadi ideolog yang tertutup?

Barangkali hanya Arief seorang yang dapat sepenuhnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang jelas, tokoh yang sangat populer di kalangan mahasiswa itu kini berhadapan

dengan sebuah persoalan mendasar yang menggugat hakikatnya sebagai pejuang sosialis: sosialisme telah gagal, dan bahkan ditolak pendukung utamanya sendiri, kaum buruh.

Apakah Arief memilih menjadi *a hero with a lost cause*? Sebagai sahabat, saya ingin melihat Arief menolak pilihan ini, dan lebih mengedepankan kemampuannya sebagai ilmuwan yang terus-menerus belajar dari perkembangan fakta-fakta baru. Tapi tentu semua berpulang pada diri Arief sendiri. Dan buat saya, di sinilah sesungguhnya terletak perjuangan Arief Budiman yang terbesar.

17 Agustus 1996

Ilmuwan dan Aktivistis

KOLOM SAYA di *Gatra*, 17 Agustus, tentang Arief Budiman rupanya mendapat tanggapan yang cukup serius dan menarik. Yang pertama datang dari Arief sendiri (*Kompas*, 27 Agustus), dan kedua dari Bur Rasuanto di majalah ini (*Gatra*, 23 November).

Apa yang bisa saya katakan terhadap kedua tanggapan tersebut? Karena agak lebih sederhana, saya mulai dengan tulisan Bur. Kalau saya tak keliru, inti tulisan dia terletak pada kalimat penutupnya: “Saya ilmuwan. Saya tidak bisa ikut menuntut UU Antisubversi dihapus, karena saya harus mulai dari ragu-ragu dan berakhir dengan ragu-ragu.” Dengan ironi semacam ini, Bur ingin mengkritik saya yang dianggapnya telah berpandangan bahwa ilmuwan haruslah bersikap netral secara moral dan politik.

Terus-terang saya agak kurang mengerti kenapa Bur sampai pada kesimpulan seperti itu. Buat saya, tak ada yang secara prinsipil membatasi seorang ilmuwan untuk memilih sikap moral dan politik tertentu terhadap berbagai hal dalam kehidupan ini. Yang menjadi soal adalah, dalam waktu dan konteks tertentu, sering pilihan moral ini menjadi dilematis jika dihadapkan pada pengetahuan dan fakta-fakta yang dipelajarinya sebagai seorang ilmuwan.

Dilema semacam inilah yang sesungguhnya menjadi topik utama kolom saya terdahulu. Arief Budiman “kebetulan” saat itu saya anggap sebagai contoh sosok yang berada dalam dilema tersebut. Jadi, buat saya, kritik Bur salah alamat. Bur, agaknya, mencampuradukkan dua hal yang berbeda ini: skeptisisme sebagai “metode” dalam memandang serta mempelajari realitas dan pilihan moral sebagai bentuk pertanggungjawaban pribadi.

Menyangkut tanggapan Arief Budiman, harus saya akui bahwa persoalannya agak lebih rumit. Ada beberapa argumen Arief yang serius, ada pula yang agaknya sekadar ekspresi kegenitan yang tak perlu. Dalam hal terakhir ini bisa kita lihat, misalnya, saat dia berkata bahwa pandangan saya bersumber pada aliran positivis-empiris yang ‘simplistik dan ketinggalan zaman’. Saat ini, bagi dia, ‘teori ilmu sudah berkembang jauh’ dan karena itu mereka yang berpendapat seperti saya ‘perlu lebih banyak membaca teori-teori baru di bidang filsafat ilmu’.

Menarik juga bahwa Arief ternyata tetap membaca buku-buku baru. Cuma sayangnya, dari sejumlah pemikir yang disebut Arief, tak satu pun yang betul-betul ‘baru’. Arief lagi-lagi balik ke Gramsci, Foucault, dan Marx. Saya harap, lain kali Arief bisa menyinggung Bobbio, atau paling tidak Charles Taylor, kalau memang ingin berbicara tentang hal yang sedikit lebih baru dan masih tetap berdiri di samping kawan sealaran.

Di samping itu, saya harap Arief mau menjelaskan tentang relevansi ‘baru’ dan ‘lama’ dalam menilai kualitas sebuah argumen dalam filsafat. Apakah argumen dalam filsafat bersifat kumulatif? Kalau ya, seperti yang implisit pada pernyataan Arief tentang filsafat ilmu yang ‘berkembang jauh’, tidakkah berarti bahwa dia menentang pandangannya sendiri yang menolak positivisme, mengingat bahwa klaim akumulasi ilmu pada dasarnya adalah klaim positivistik?

Argumen Arief yang serius bersumber pada penolakannya untuk menyederhanakan hubungan antara pengetahuan (subjektivitas) dan realitas empiris (obyektivitas). Hubungan ini bersifat dialektis. Dalam penjelasannya, yang Arief maksudkan dengan ini adalah realitas empiris tak mudah kita dekati tanpa bantuan nilai dan ideologi. Bahkan kedua hal terakhir inilah yang menjadi dasar dari pengetahuan kita. Realitas (baca: kebenaran) kita simpulkan bergantung pada posisi kita dalam konstelasi kedua hal ini.

Karena begitu menentukannya nilai dan ideologi ini maka, buat Arief, sejak awal seorang ilmuwan harus berpihak. Tanpa pemihakan ini sang ilmuwan hanya menjadi alat kekuatan-kekuatan masyarakat yang ada. Karena hal inilah maka dikotomi ilmuwan dan aktivis, seperti yang saya lakukan, menjadi lebur dan tak relevan. Dengan ini pula Arief menolak anjuran saya untuk lebih menjadi ilmuwan ketimbang sekadar aktivis, seorang *fighter with a lost cause*.

Apakah semua ini berarti bahwa, bagi Arief, “sekali sosialis, tetap sosialis”, tanpa ada satu hal pun yang bisa mengubahnya? Jika ada, dalam bentuk apa, dan bagaimana cara kita mengetahuinya? Apakah kriteria “salah-benar” semata-mata bergantung pada ideologi dan posisi politik kita masing-masing? Lalu masih adakah yang disebut ilmu?

Dalam konsepsi saya, skeptisisme seorang ilmuwa adalah kesediaannya untuk menerima kemungkinan bahwa sesuatu yang semula disangkanya benar ternyata bisa keliru. Seorang ilmuwan adalah seseorang yang bisa berkata, “*Well the facts are too strong for me not to change my mind.*” Katakanlah saya seorang ilmuwan sosial dan percaya pada sosialisme. Saya berharap bahwa proposisi Marxian, misalnya akumulasi kapital akan memiskinkan kaum buruh, memang benar. Tapi ternyata, dari fakta-fakta yang ada, saya tahu bahwa peningkatan akumulasi itu terjadi bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan

buruh. Artinya, ada kemungkinan bahwa proposisi yang saya yakini keliru. Menolak kemungkinan ini berarti meruntuhkan dasar kemungkinan pengembangan ilmu.

Saya tahu, bagi Arief, konsepsi tentang fakta itu sendiri harus dipertanyakan. Dalam hal ini argumen Arief cukup kukuh. Persoalannya adalah ia kemudian berusaha menjelaskan bahwa pada akhirnya segala hal bertumpu pada ideologi, dan dengan demikian, pemihakan politik. Dengan cara ini dia bisa menghindari pertanyaan-pertanyaan serius tentang gagalnya percobaan sosialisme, dari Rusia hingga Cina dan Kuba.

Sekarang di tangan Arief, yang tak memegang kekuasaan politik apapun, argumen 'total politik' semacam itu mungkin cukup menarik. Tapi bagaimana jika dia berkuasa dan menerapkan dalil bahwa 'kebenaran' bergantung pada posisi ideologi dan politik seseorang? Bagaimana jika dalil ini dipegang oleh seorang penguasa yang tak sebaik Arief?

30 November 1996

Manifesto Sang Pemberontak

REVOLUSI SELALU MELAHIRKAN para pemberontaknya sendiri. Dalam sejarah kita sering melihat bahwa para aktor utama gerakan politik besar menjelma menjadi para pengecam utama gerakan tersebut.

Gerakan komunis, pada awal abad ini, dicirikan oleh janji-janjinya yang mencakup banyak hal. Ia merupakan suatu gerakan yang mengumbar janji-janji yang begitu besar: suatu masyarakat tanpa kelas, suatu komunitas yang sejahtera tanpa penghisapan; atau seperti yang dikemukakan Marx, suatu masyarakat di mana orang-orang bekerja hanya 4 jam di pagi hari, pergi memancing di siang hari, dan menghabiskan senja hingga malam hari dengan membaca puisi. Namun, bersama berjalannya waktu, gerakan ini mulai memperlihatkan berbagai cacatnya: ketika kaum revolusioner menjadi para penguasa, janji-janji besar tersebut diubah menjadi suatu ideologi kaku yang digunakan terutama untuk memberi pembenaran bagi terpeliharanya kekuasaan tersebut. Demikianlah, para pemberontak muncul karena janji-janji palsu itu.

Milovan Djilas merupakan satu dari para pemberontak tersebut. Bersama Tito, Kardelj, dan Rankovich, ia memimpin gerakan komunis di Yugoslavia. Kemudian, ia menjadi Ketua

Parlemen Yugoslavia. Namun pada awal 1950-an, dengan berani dan tegar, ia mulai menolak gerakan yang pernah ia pimpin. Buku *The New Class* ini adalah manifestonya; sebuah pernyataan tentang bagaimana sebenarnya komunisme dalam kenyataannya. Ia mengutuk komunisme dengan menggunakan bahasa dan metode analitisnya sendiri. Ia mengkritik komunisme berdasarkan kosakatanya sendiri.

Dalam buku ini Djilas mengemukakan bahwa revolusi komunis merupakan suatu penipuan sejarah: “Tak ada revolusi lain yang mengumbar begitu banyak janji namun hanya sedikit menepatinya.” Baginya, komunisme pada dasarnya merupakan “suatu bentuk perang sipil laten antara pemerintah dan rakyat”.

Di Prancis sebelum 1789, menurut Djilas, kapitalisme merupakan suatu bentuk hubungan sosial dan ekonomi yang dominan. Revolusi Prancis, yang dipimpin oleh kaum borjuis, dilancarkan untuk menyempurnakan dominasi ini. Karena itu, para penguasanya (yakni kaum borjuis) tidak harus membentuk suatu masyarakat yang sepenuhnya baru. Berbeda halnya dengan Revolusi Rusia 1917. Lenin ingin mengakhiri masyarakat feodal yang ada dan membentuk suatu masyarakat baru, yakni masyarakat tanpa kelas. Karena itu, setelah revolusi, kaum komunis mencoba untuk membentuk suatu sistem yang sepenuhnya baru yang berbeda dari sistem sebelumnya.

Namun dalam proses pembentukan masyarakat baru tersebut suatu kelas sosial baru muncul: “Revolusi itu, yang dilancarkan demi menghapuskan kelas, memunculkan satu kelas baru yang memiliki otoritas penuh. Segala sesuatu yang lain hanya kepura-puraan dan ilusi.” Kelas baru ini berakar dalam birokrasi, yang menguasai kekayaan negara dan memonopoli penggunaan kekuasaan. Dengan demikian, anggota utama kelas baru ini adalah kaum birokrat. Kaum birokrat ini tidak ada yang mengawasi, dan mereka sangat solid. “Tidak ada kelas lain dalam sejarah

yang sedemikian solid dan kukuh dalam mempertahankan kepentingannya dan dalam mengontrol apa yang dimilikinya—kepemilikan kolektif dan monopolistik, serta otoritas totaliter.” Mereka juga “sama eksklusifnya seperti aristokrasi, namun tanpa martabat dan kebanggaan aristokrasi”. Pendek kata, menurut Djilas, mereka menikmati semua kemewahan aristokrasi (rumah mewah, mobil, tamasya, dll.) di atas penderitaan massa yang semakin besar. Kelas baru tersebut menghisap rakyat.

Menurut Djilas, munculnya kelas ini dipersiapkan oleh Lenin. Namun “pemula sebenarnya dari kelas tersebut adalah Stalin”. Dengan melakukan birokratisasi masyarakat, Stalin memperluas dan memperkuat basis kelas ini. Dan pada saat Khrushchev mulai berkuasa, kelas ini telah kehilangan semangat revolusionernya, yang diwarisi dari Lenin; satu-satunya hal yang ia inginkan adalah “hidup dengan damai” dan “membenarkan dirinya sendiri”.

Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa bagi Djilas, sistem Komunis tersebut mengingkari janji-janjinya sendiri dengan menciptakan kelas baru ini, yang tangannya bersimbah dosa.

Meskipun mengutuk komunisme dalam realisasi praktisnya, Djilas tidak mengambil kesimpulan bahwa Marxisme, atau lebih tepatnya sosialisme, harus ditinggalkan sebagai sebuah teori masyarakat dan sebagai sebuah panduan untuk mencapai suatu masyarakat yang ideal. Ia mengatakan bahwa tugas utamanya adalah mengkritik komunisme dalam praktik, dan bukan dalam teori. Ia sepertinya yakin bahwa jika kaum komunis menciptakan suatu sistem demokratis pada masa-masa awal setelah revolusi, janji-janji besar tersebut mungkin tidak se-kadar ilusi. Djilas masih meyakini sosialisme sebagai suatu gagasan, dan berpikir bahwa dengan demokrasi hal itu akan memunculkan suatu masyarakat yang sejahtera. Ia menyebut dirinya sebagai seorang Sosial Demokrat.

Penting untuk diingat bahwa Djilas menulis buku ini bukan sebagai seorang akademisi, melainkan sebagai seorang aktivis yang menyaksikan bahwa gerakan yang pernah turut ia pimpin telah salah arah. Karena itu, buku ini harus dilihat terutama sebagai sebuah kesaksian, sebuah pernyataan kekecewaan, dan bukan sebagai sebuah wacana teoretis. Dengan demikian, menilai pentingnya buku ini berarti melihat keberanian, ketulusan, dan kejujuran sang penulis. Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa *The New Class* merupakan suatu pencapaian besar.

Namun, untuk mengulas buku ini secara memadai, dan untuk menghargai sang penulis secara lebih jujur, kita juga harus mengkritiknya. Di sini kita dapat mengatakan bahwa Djilas tidak dapat menjelaskan secara tepat mengapa revolusi komunis di Rusia tersebut melahirkan suatu kelas baru yang birokratis. Ia terjebak pada metode analitis Marxis. Ia gagal melihat bahwa Marxisme sebagai sebuah teori masyarakat dan perubahan sosial—dengan semua tujuan mulianya—mengandung bibit-bibit despotisme, dan pengejawantahannya niscaya akan menghasilkan suatu sistem yang birokratis.

Marx tidak pernah secara serius mempertimbangkan politik, hukum, dan moralitas. Baginya, semua itu hanya alat bagi para elite kekuasaan untuk memelihara kekuasaan mereka. Semua itu hanya merupakan suatu ekspresi hubungan sosio-ekonomi. Kebenaran tidak pernah hadir pada dirinya sendiri; ia harus dilihat dalam kaitannya dengan kekuasaan. Implikasi logis dari hal ini sederhana: begitu berkuasa, mereka yang dikuasai (yakni kaum proletar) juga tidak akan merasa bersalah untuk menggunakan hukum semata-mata demi memelihara kekuasaan. Kaum proletar hendaknya tidak terintangi oleh moralitas dan permainan politik yang jujur (yakni demokrasi) untuk menyempurnakan tujuan perkembangan sejarah (Lenin, dan terutama Stalin, memahami hal ini dengan baik: mereka

membenarkan teror untuk mencapai tujuan-tujuan mereka). Dalam pengertian ini, kita dapat mengatakan bahwa Marxisme mungkin merupakan salah satu fondasi terbaik bagi suatu kekuasaan yang despotik.

Lebih jauh, bagi Marx, satu-satunya cara untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih manusiawi adalah menghapus hak milik pribadi. Dengan demikian, ia gagal melihat dua faktor penting. Pertama, kepemilikan pribadi atas sarana produksi merupakan dasar masyarakat sipil. Menghapuskan hak milik pribadi berarti menghancurkan masyarakat sipil. Kedua, menghapuskan hak milik pribadi hanya berarti membirokratisasikan kepemilikan. Hal ini memberikan dasar bagi birokrasi untuk hadir di mana-mana, sebagai pemilik yang sebenarnya dan penguasa segala sesuatu.

Karena itu, tidak mengejutkan jika sebuah revolusi yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran Marxis pada akhirnya menghasilkan suatu kelas (baru) yang digambarkan Djilas dalam buku ini: suatu kelas despotik yang kekuasaannya didasarkan pada birokrasi.

3 Februari 1993

Nozick

ANARCHY, STATE, AND UTOPIA karya Nozick terbagi menjadi 3 bagian yang saling terkait. Bagian pertama berusaha menjelaskan bahwa negara minimal adalah adil; ia muncul tanpa melanggar hak-hak siapapun. Bagian kedua berusaha memperlihatkan bahwa negara apapun yang lebih luas ketimbang negara minimal tersebut tidak sah. Bagian ketiga berupaya menjelaskan bahwa negara minimal, berlawanan dengan apa yang diyakini sebagian besar orang, sebenarnya merupakan suatu utopia yang menarik.

Argumen-argumen Nozick yang paling menarik dan kontroversial ada di bagian dua. Argumen-argumen tersebut tajam, bernas, mencerahkan, dan mendalam. Ia sangat kuat ketika mengkritik Rawls dan memperlihatkan bahwa keadilan distributif bukan keadilan samasekali.

Esai ini akan mengulas serangan Nozick terhadap gagasan tentang keadilan distributif tersebut, dan pembelaannya atas apa yang ia sebut teori hak atas keadilan (*entitlement theory of justice*). Saya akan mulai dengan menjabarkan penjelasan Nozick tentang bagaimana negara minimal muncul.

Gagasan-gagasan Nozick di sini disajikan sesederhana mungkin tanpa terlalu banyak mereduksi kompleksitas gagasan-

gagasan tersebut. Hal ini saya harap akan membuat kekuatan gagasan-gagasan tersebut lebih mudah terlihat.

Hak-hak Individu dan Negara Minimal

Kaum anarkis percaya bahwa negara, negara apapun, adalah tidak sah. Individu-individulah yang terpenting—bahkan negara yang hanya berfungsi untuk memberikan perlindungan dasar terhadap agresi dapat dipastikan akan melanggar hak-hak individu.

Nozick, seperti kaum anarkis dan kaum liberal klasik, juga percaya pada supremasi individu dan sakralnya hak-hak individu. Namun ia, tidak seperti kaum anarkis tersebut, menganggap bahwa terdapat satu jenis negara (yakni negara minimal) yang tidak melanggar hak-hak siapapun.

Nozick bertolak dari suatu keadaan hipotetis manusia, yakni keadaan alamiah. Menurut Nozick, dalam keadaan alamiah badan-badan perlindungan pribadi tumbuh subur karena individu-individu perlu melindungi diri mereka dari agresi orang lain. Individu-individu tersebut membayar badan-badan ini untuk melindungi mereka karena bagi mereka melakukan hal itu lebih rasional—mereka dapat menjalani kehidupan mereka tanpa terus-menerus cemas akan keamanan pribadi mereka.

Persaingan bebas di antara berbagai badan tersebut untuk memberikan pelayanan terbaik membuat hanya sedikit badan perlindungan yang tetap bertahan. Badan-badan yang tetap bertahan ini, yakni para pemenang seleksi alamiah, dengan demikian akan memegang monopoli *de facto* atas usaha perlindungan tersebut. Pada tahap ini, karena monopoli kekuasaan untuk memaksa tersebut, badan-badan ini berlaku seperti negara. Dan karena penggabungan dan kompetisi yang semakin besar, pada akhirnya hanya ada satu badan yang tetap bertahan. Badan yang tetap bertahan ini pada dasarnya adalah sebuah negara (sebuah badan yang memiliki monopoli sepenuhnya

atas kekuasaan untuk memaksa). Nozick menyebut badan ini sebagai negara ultraminimal.

Di bawah kekuasaan negara ini, terdapat suatu persoalan. Sebagian besar orang akan mampu membayar bagi perlindungan yang disediakan. Namun beberapa orang terlalu miskin untuk bisa membayar jasa perlindungan tersebut. Dan, karena tidak termasuk anggota, mereka tidak harus mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan badan tersebut (yakni negara ultraminimal itu). Karena itu, mereka secara moral boleh menerapkan prinsip apapun yang mereka anggap tepat, termasuk misalnya prinsip hukuman mata dibalas mata. Keadaan ini tidak dikehendaki karena hal ini membahayakan kehidupan damai anggota negara ultraminimal itu. Karena negara ultraminimal tidak memiliki dasar moral untuk memaksa para non-anggota untuk mematuhi aturan “bersama”, persoalan tersebut terus berlanjut.

Satu-satunya cara untuk memecahkan persoalan ini adalah menerapkan prinsip kompensasi. Dengan prinsip ini, para klien membayari keanggotaan mereka yang tidak bisa membayar keanggotaan sendiri (yang pada gilirannya akan senang menerima keanggotaan bebas ini karena lebih rasional bagi mereka memusatkan energi mereka untuk melakukan sesuatu yang lain ketimbang terus-menerus menjaga keselamatan mereka sendiri). Menurut Nozick, hal ini sedikit mirip dengan mekanisme distributif. Namun, baginya proses ini secara moral sah karena para pemberi tersebut memberikan sebagian milik mereka demi kepentingan diri mereka sendiri (dengan melakukan hal itu, mereka meningkatkan keselamatan mereka sendiri).

Dalam tahap inilah negara ultraminimal itu diubah menjadi negara minimal. Negara minimal adalah negara ultraminimal ditambah sebuah elemen mekanisme distributif. Dan, karena prinsip kompensasi itu secara moral adil, hal itu terjadi tanpa melanggar hak-hak siapapun.

Jadi, dari keadaan alamiah tersebut muncul negara minimal, tanpa desain sebelumnya. Penting diingat bahwa bagi Nozick ini bukanlah proses perkembangan negara yang sebenarnya. Seperti posisi awal (*original position*) Rawls, ia hanyalah suatu sarana teoretis, suatu konstruksi intelektual, yang membantu tujuan Nozick dalam menegaskan bahwa terdapat satu jenis negara yang mungkin muncul secara moral. Dengan menjelaskan hal ini, Nozick memperlihatkan bahwa kaum anarkis salah.

Teori Hak, Keadilan Distributif, dan Tuan Chamberlain

Negara minimal, seperti yang dijelaskan Nozick, berfungsi tidak lebih daripada sekadar melindungi anggotanya dari kekerasan, penipuan dan pencurian, dan memberlakukan perjanjian-perjanjian. Ia adalah negara "penjaga malam" kaum liberal klasik. Pembelaannya atas persoalan mengapa negara ini sah bergerak lebih jauh ketimbang sekadar menggambarkan bagaimana ia terjadi atau bagaimana ia muncul dari keadaan alamiah. Ia mengembangkan konsepsi keadilannya sendiri (yakni teori hak dari keadilan), dan menjadikan konsepsi ini sebagai dasar untuk menilai apakah sebuah negara dapat dibenarkan atau tidak. Ia membedakan gagasannya tentang keadilan tersebut dengan gagasan tentang keadilan distributif. Teori haknya itulah yang memberi inspirasi Nozick untuk berkata, "Tidak ada negara yang *lebih* kuat atau luas ketimbang negara minimal tersebut, yang dianggap sah atau dapat dibenarkan."

Teori hak Nozick tersebut sebenarnya cukup sederhana. Teori itu terdiri atas tiga prinsip. Prinsip pertama dan kedua menyatakan bahwa kepemilikan apapun yang didapatkan dari *perolehan* yang adil (prinsip perolehan awal) atau *pengalihan* yang adil (prinsip pengalihan) pada dirinya sendiri adalah adil. Tidak seorang pun berhak atas suatu kepemilikan kecuali

dengan penerapan kedua prinsip ini. Dengan kata lain, kedua prinsip ini merupakan prosedur yang menjadikan kita sah memiliki suatu barang atau tanah.

Kepemilikan kadang diperoleh melalui paksaan atau penipuan. Dengan demikian, kita masuk pada prinsip ketiga, prinsip perbaikan (*rectification*). Prinsip ini menyatakan bahwa adanya ketidakadilan masa lalu (yakni pelanggaran-pelanggaran sebelumnya terhadap kedua prinsip pertama tersebut) membenarkan suatu jenis kompensasi yang diberikan kepada orang-orang yang dirugikan. Dengan prinsip ini, Nozick memberikan suatu kualifikasi pada seluruh usahanya dalam mempertahankan legitimasi negara minimal tersebut: perbaikan memungkinkan suatu peralihan ke negara yang lebih luas.

Meskipun menghadirkan sosialisme sebagai hukuman terhadap dosa-dosa kita mungkin terlalu berlebihan, ketidakadilan-ketidakadilan masa lalu mungkin sedemikian besar sehingga dalam jangka pendek perlu suatu negara yang lebih luas untuk memperbaiki itu semua.

Teori hak, menurut Nozick, mengandaikan bahwa distribusi kepemilikan bersifat historis. “[Sebuah] distribusi adalah adil tergantung pada bagaimana hal ini terjadi”. Jika sebuah distribusi terjadi tanpa melanggar prinsip perolehan dan pengalihan tersebut, maka distribusi itu adil. Hal ini berarti bahwa satu-satunya distribusi kepemilikan yang adil adalah distribusi yang tak-terpola (tak satu hal pun, atas nama keadilan, yang dapat dilakukan untuk mengubah pola suatu distribusi jika ia telah memenuhi prinsip-prinsip [teori] hak tersebut).

Pada titik inilah Nozick memulai serangannya terhadap gagasan tentang keadilan distributif (yang, bagi Nozick, merupakan gagasan inti negara kesejahteraan—suatu jenis negara yang jauh lebih luas dibanding negara minimal). Menurut

Nozick, bertentangan dengan teori hak, teori keadilan distributif mengabaikan aspek historis dari distribusi. Keadilan distributif hanya menerapkan prinsip waktu kini atau prinsip hasil akhir. “...[A]pa yang perlu diperhatikan, dalam menilai keadilan dari sebuah distribusi, siapa yang akhirnya memiliki apa...”. “...[K]eadilan sebuah distribusi ditentukan oleh bagaimana sesuatu didistribusikan (siapa memiliki apa), dan dinilai berdasarkan prinsip (-prinsip) *struktural* dari distribusi yang adil”. Ungkapan Marx “dari tiap-tiap orang menurut kemampuannya dan bagi masing-masing orang menurut kebutuhannya” adalah sebuah contoh prinsip struktural dari distribusi yang adil ini. Contoh-contoh lain: “bagi tiap-tiap orang menurut kebaikan moralnya”, atau “bagi masing-masing orang menurut IQ dan produktivitasnya”, dan sebagainya.

Di sinilah kesalahan keadilan distributif: Ia “memperlakukan obyek-obyek seolah-olah mereka muncul begitu saja, dari ketiadaan”. Ia memisahkan dua persoalan yang terkait, yakni produksi dan distribusi. Ia tidak pernah bertanya bagaimana sesuatu dibuat. Bagi Nozick, sebagaimana diandaikan oleh teori haknya, “benda-benda ada di dunia telah terkait dengan orang-orang yang mempunyai hak atas mereka”. Mereka yang memperoleh suatu kepemilikan (mobil, gaji, rumah, dll.) melalui suatu perolehan yang adil atau pengalihan yang adil berhak atas kepemilikan tersebut. Dengan demikian, mengambil kepemilikan ini, meski hanya sebagian, tanpa memperhatikan sejarahnya (bagaimana kepemilikan ini terjadi) untuk mendistribusikannya berdasarkan prinsip distribusi apapun adalah tidak sah. Dengan kata lain, pendistribusian kembali (di luar perbaikan) melanggar hak-hak orang-orang yang membuat atau memproduksi sesuatu.

Kesalahan keadilan distributif dan prinsip-prinsipnya tersebut ditarik ke kesimpulan terjauh mereka saat Nozick menjelaskan tentang perpajakan. Untuk sebuah pekerjaan yang ju-

jur, X menerima penghasilan bulanan sebesar D . D ini sama dengan jumlah jam yang dihabiskan X untuk melakukan pekerjaannya. Menarik pajak sejumlah n dari D tersebut dengan demikian seperti mengambil n jam dari X atau, dalam praktik, memaksa X bekerja n jam untuk menyelesaikan tujuan-tujuan (distributif) yang tidak berkenaan dengannya. Karena itu, menurut Nozick, “Pajak penghasilan dari pekerjaan sama dengan kerja paksa.”

Dengan kata lain, perpajakan (dan mekanisme lain dari keadilan distributif) “melibatkan pengambil-alihan tindakan-tindakan orang lain”. Ia membuat beberapa orang lain memiliki sebagian dari (milik) Anda:

Jika orang-orang memaksa Anda melakukan pekerjaan, atau pekerjaan yang tak berupah tertentu, selama suatu periode waktu tertentu, mereka memutuskan apa yang akan Anda lakukan dan tujuan-tujuan dari kerja Anda terlepas dari keputusan-keputusan Anda. Proses ini, di mana mereka mengambil keputusan tersebut dari Anda, menjadikan mereka *pemilik-sebagian* dari Anda; proses ini memberi mereka hak kepemilikan dalam (diri) Anda. [huruf miring dari Nozick]

Bagi Nozick, yang ironis adalah bahwa mereka yang mendukung prinsip-prinsip keadilan distributif tersebut sebagian besar adalah orang-orang yang sama yang berbicara paling keras tentang gagasan kepemilikan-pribadi. Mereka tidak menyadari bahwa, dalam praktik, prinsip-prinsip yang mereka serukan tersebut adalah prinsip-prinsip yang membuat orang menjadi pemilik sebagian dari orang lain.

Selain persoalan perpajakan, Nozick juga menemukan dasar lain untuk menyerang gagasan tentang keadilan distributif itu: untuk mewujudkannya, menurut Nozick, keadilan distributif mengharuskan campur-tangan terus-menerus terhadap kehidup-

an dan kebebasan orang. Mengapa? Untuk menjelaskan hal ini, Nozick mengisahkan cerita tentang Tuan Wilt Chamberlain.

Andaikan bahwa terdapat sebuah distribusi D_1 (yang, menurut standar keadilan distributif, setara, atau adil). Dan andaikan juga bahwa, setelah mengikuti serangkaian latihan Spartan, Chamberlain menjadi seorang pemain bola basket yang sangat hebat. Seperti Mike Jordan, Chamberlain adalah seorang olahragawan yang efisien sekaligus seorang pemain yang menarik. Permainannya dengan demikian sangat ditunggu-tunggu. Hal ini memungkinkan Chamberlain untuk menandatangani sebuah kontrak satu tahun dengan sebuah tim: dalam setiap pertandingan kandang, 25 sen dari harga tiap-tiap tiket masuk menjadi miliknya.

Ketika musim pertandingan mulai, orang-orang dengan senang hati menghadiri pertandingan-pertandingan Chamberlain. Mereka membeli tiket dan dengan demikian menaruh 25 sen ke dalam kotak khusus yang langsung diberikan kepada Chamberlain. Bagi orang-orang ini, permainan menawan Chamberlain layak dihargai seperti itu. Kini, andaikan bahwa satu juta orang melihat pertandingan Chamberlain. Ini berarti bahwa \$250.000 menjadi milik Chamberlain, suatu jumlah yang jauh lebih besar dibanding yang dimiliki sebagian besar orang.

Hasilnya: Distribusi D_1 berubah. Ia menjadi D_2 , yang jelas lebih tidak setara. Apakah D_2 adalah suatu distribusi yang tidak adil? Orang-orang, dalam D_1 yang lebih setara, dengan sukarela memberikan 25 sen kepada Chamberlain sebagai imbalan bisa menyaksikan suatu permainan yang hebat dan menyenangkan (mereka dapat menggunakan uang itu untuk membeli permen, koran, rokok). Bukankah orang-orang tersebut berhak menggunakan uang mereka sesuka mereka?

Perubahan dari D_1 ke D_2 tersebut adalah hasil dari tindakan-tindakan sukarela dan secara moral sah. Dengan demikian, D_2 adalah sebuah distribusi yang adil. Kesimpulan

yang menonjol yang disajikan Nozick di sini adalah bahwa kebebasan mengubah pola. *D1* mungkin dilihat sebagai suatu distribusi terpola yang tercapai melalui mekanisme-mekanisme keadilan distributif. Memberi 25 sen kepada Chamberlain (sebagai ganti melihat permainannya yang hebat) adalah kebebasan yang dijalankan. Konsekuensinya: pola tersebut dibongkar. Kini, bayangkan jika terdapat ratusan Chamberlain (yang menawarkan ratusan jasa berbeda yang bisa dibeli orang-orang). Hasil dari kebebasan yang dijalankan adalah distribusi yang lebih tak-terpola.

Misalkan, pola-pola mungkin didedahkan untuk membuat *D2* lebih setara. Hal ini dapat dilakukan hanya dalam dua cara. Pertama, 10 sen dari 25 sen yang diberikan kepada Chamberlain mungkin dipajaki (pajak 40%), dan diberikan kembali kepada orang-orang tersebut (sehingga mereka sebenarnya hanya mengeluarkan 15 sen). Kedua, melarang orang-orang pergi dan menonton pertandingan tersebut (memaksa Chamberlain bermain tanpa membayarnya bukan merupakan suatu pilihan).

Namun, cara pertama akan berakhir pada suatu situasi yang menggelikan: baik Chamberlain maupun para penggemarnya telah secara sukarela sepakat mengenai syarat-syarat pertukaran mereka; namun pihak ketiga datang, dengan gagasannya tentang kesetaraan, dan memberlakukan suatu syarat-syarat pertukaran baru. Di sini, kesalahan perpajakan berlaku—Chamberlain dipaksa untuk bermain n jam tanpa bayaran. Namun pada dasarnya hal ini tidak memecahkan persoalan: Chamberlain toh masih mendapatkan \$150.000 dari 1 juta penggemar. Di tahun ke-3 ia akan mendapatkan \$450.000 (atau \$150.000 dollar lebih banyak dibanding jumlah yang akan ia peroleh tanpa redistribusi). Dengan demikian, apa yang terjadi hanyalah menunda waktu pola tersebut berubah. Distribusi yang tak setara (atau tak-terpola) akhirnya akan muncul. Sekali lagi, hal ini mungkin diperbaiki, namun untuk melakukan

hal itu perlu campur-tangan terus-menerus dan bahkan lebih besar terhadap syarat-syarat pertukaran antara Chamberlain dan para penggemarnya tersebut. Karena hal inilah Nozick mengatakan bahwa keadilan distributif mengharuskan suatu campur-tangan terus-menerus terhadap kehidupan dan kebebasan orang-orang.

Cara kedua: melarang orang-orang menyaksikan pertandingan yang mereka sukai merupakan contoh yang sangat jelas tentang bagaimana suatu maksud mulia menghasilkan sesuatu yang bodoh dan tak liberal. Ada ribuan cara orang-orang dapat menggunakan uang mereka untuk sesuatu yang mereka sukai (menyaksikan Chamberlain hanya salah satunya). Dengan demikian, demi membuat orang-orang lebih setara, ribuan larangan harus terus-menerus dikeluarkan. Apakah ini merupakan cara praktis dan sah untuk menegakkan keadilan?

Tentang Rawls

Nozick jelas harus mengulas *Theory of Justice* karya Rawls. Hampir tidak mungkin untuk mengkritik gagasan tentang keadilan distributif dan prinsip-prinsip negara kesejahteraan tanpa membahas Rawls. Nozick tidak ingin disalahpahami—baginya, *Theory of Justice* karya Rawls tersebut merupakan suatu pencapaian yang luarbiasa. *Theory of Justice* tersebut merupakan:

Suatu karya yang sangat kuat, mendalam, subtil, menyeluruh, dan sistematis dalam filsafat politik dan moral yang tak ada bandingannya sejak tulisan-tulisan John Stuart Mill. Karya itu adalah sumber gagasan-gagasan yang mencerahkan, yang dipadukan dalam suatu keseluruhan yang menarik. Para filsuf politik sekarang ini harus berkarya di dalam teori Rawls tersebut atau menjelaskan mengapa tidak.

...Bahkan mereka yang tetap ragu setelah bergulat dengan visi Rawls yang sistematis akan belajar banyak dengan mempelajari karya itu secara teliti.

...Dan mustahil menyelesaikan buku itu tanpa suatu visi baru dan bernas tentang apa yang mungkin dilakukan dan disatukan teori moral; tentang betapa *indahny*a suatu teori yang menyeluruh. (huruf miring oleh Nozick)

Namun meskipun merupakan suatu karya besar, bagi Nozick *Theory of Justice* mengandung banyak kesalahan, kontradiksi, dan argumen-argumen yang salah. Pandangan Nozick tentang Rawls: mungkin tidak pernah terjadi sebelumnya seseorang memuji sebuah buku sedemikian tinggi dan pada saat yang sama menyangkal gagasan-gagasan dasarnya secara menyeluruh dan, kadang, secara keras.

Nozick mulai dari posisi awal Rawls. Menurut Rawls, pada posisi awal ini, orang-orang bertemu bersama dan memutuskan, dalam selubung ketidaktahuan bagaimana mereka akan hidup bersama—dan salah satu dari dua prinsip yang muncul dari keputusan ini adalah prinsip perbedaan. Menurut Nozick, karena selubung ketidaktahuan itu, orang-orang dalam posisi ini hanya dapat melihat keadaan akhir distribusi kepemilikan. Tanpa mengetahui apapun tentang sejarah kepemilikan itu (bagaimana kepemilikan ini diproduksi dan/atau dialihkan, atau bagaimana mereka dihakkan pada seseorang), orang-orang tersebut "akan memperlakukan apapun untuk didistribusikan sebagai suatu barang dari surga".

Apakah orang-orang dalam posisi awal tersebut pernah berpikir apakah *mereka* memiliki *hak* untuk memutuskan bagaimana segala sesuatu akan dibagi-bagi? Mungkin mereka menganggap bahwa karena mereka memutuskan pertanyaan ini, mereka pasti berpikir bahwa mereka berhak melakukan hal itu...

Dengan kata lain, Rawls gagal berlaku adil pada mereka yang memproduksi sesuatu. Ia—tepat dari permulaan titik-to-

lak konseptualnya (yakni posisi awal)—secara salah yakin bahwa segala sesuatu sudah ada untuk didistribusikan.

Salah satu alasan utama mengapa Rawls gagal melihat sisi produktif keadilan dapat ditemukan dalam pemahamannya tentang bagaimana orang-orang tertentu membuat atau memproduksi lebih banyak dibanding orang lain. Bagi Rawls, orang-orang tertentu bisa lebih banyak menghasilkan *hanya* karena mereka lebih diberkahi dengan aset-aset alamiah (bakat dan kemampuan). Dan distribusi aset-aset alamiah ini sangat dipengaruhi oleh kontingensi-kontingensi sosial, yang menurut Rawls "sangat arbitrer dari sudut pandang moral". Dan karena itu semua sangat arbitrer, hal ini berarti bahwa kontingensi-kontingensi sosial tersebut tidak relevan secara moral. Karena itu, kemampuan sebagian orang untuk memproduksi lebih banyak juga harus dilihat sebagai tidak relevan secara moral. Dari garis pemikiran ini, tidak mengejutkan jika posisi awal Rawls secara sadar mengabaikan asal-usul distribusi dan sejarah produksi.

Bagi Nozick, pandangan bahwa "*apa yang arbitrer secara moral tidak signifikan*" merupakan suatu pandangan yang salah. "Setiap orang yang ada," ujar Nozick, dalam suatu cara yang khas, "merupakan hasil dari suatu proses di mana satu sel sperma yang berhasil tidak lebih berharga dibanding jutaan yang gagal." Dengan demikian:

Jika tak ada signifikansi moral yang bisa muncul dari apa yang arbitrer, maka tidak ada eksistensi orang tertentu yang memiliki signifikansi moral, karena dari begitu banyak sel sperma tersebut, sel sperma mana yang berhasil membuahi indung telur (yang sejauh ini kita ketahui) adalah arbitrer dari sudut pandang moral.

Selain itu, Nozick melihat bahwa Rawls terlalu jauh dalam menghubungkan distribusi pencapaian-pencapaian manusia

dengan kearbitreran dan kontingensi sosial. Hal ini, menurut Nozick, bertentangan dengan gagasan tentang martabat manusia yang begitu kuat dibela Rawls. Mengapa? Dengan mengaitkan segala sesuatu dengan kontingensi-kontingensi sosial (misalnya, "kebetulan" dan "nasib baik"), dan dengan sepenuhnya abai tentang bagaimana individu-individu berusaha mengembangkan bakat dan kemampuan mereka, Rawls menyajikan suatu gambaran manusia yang sangat reduksionis—segala sesuatu yang berharga pada diri seorang manusia pasti disebabkan oleh faktor-faktor eksternal, bukan oleh bagaimana ia belajar, bagaimana ia berusaha untuk unggul, serta bagaimana ia membuat pilihan-pilihan yang otonom dan tepat. Di sinilah ironi Rawls:

[Teori Rawls] bisa berhasil dalam menghalangi peneguhan pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan otonom seseorang (dan hasil-hasilnya) hanya dengan sepenuhnya mengaitkan *segala sesuatu* yang berharga dari orang tersebut pada berbagai jenis faktor "eksternal". Dengan demikian, melecehkan otonomi dan tanggungjawab seseorang terhadap tindakan-tindakannya merupakan suatu hal yang berbahaya bagi sebuah teori yang sebenarnya ingin menjunjung martabat dan harga-diri makhluk yang otonom; khususnya bagi sebuah teori yang sangat mendasarkan diri (termasuk sebuah teori tentang yang-baik) pada pilihan-pilihan manusia. Patut diragukan bahwa gambaran manusia terlecehkan yang diandaikan dan menjadi dasar teori Rawls tersebut bisa dipadukan dengan pandangan tentang martabat manusia yang ingin diwujudkan dan diejawantahkannya.

Pendek kata, posisi awal Rawls, dengan semua latar belakang konseptual dan premisnya, merupakan suatu konstruksi intelektual yang kontradiktif dan salah. Karena itu, tidak mengherankan jika prinsip-prinsip keadilan yang muncul dari posisi

ini juga salah atau kontradiktif. Untuk memperlihatkan hal ini, Nozick menunjuk pada prinsip perbedaan tersebut.

Menurut prinsip perbedaan, struktur-struktur kelembagaan adalah adil, seperti yang dikemukakan Rawls, "Jika dan hanya jika struktur-struktur itu bekerja sebagai bagian dari suatu skema yang meningkatkan harapan-harapan anggota masyarakat yang paling kurang beruntung." Dikemukakan secara berbeda: syarat-syarat interaksi sosial antara yang mampu dan yang tidak mampu harus dirancang sedemikian rupa sehingga menjadikan yang kurang mampu tersebut setidaknya tidak menjadi lebih buruk.

Menurut Nozick, hal ini mengandaikan bahwa kita harus mencegah satu kelompok masyarakat (orang-orang yang mampu) untuk mencari keuntungan-keuntungan tambahan, jika dengan melakukan hal itu mereka pada saat yang sama tidak serentak memperbaiki kesejahteraan orang-orang lain (mereka yang kurang mampu). Prinsip tersebut dengan demikian melanggar keterpisahan orang-orang. Dan bagi Nozick, yang paling mencolok adalah bahwa prinsip tersebut jelas mengandaikan suatu hubungan di mana sekelompok orang (mereka yang kurang mampu) *memanfaatkan* orang-orang lain (mereka yang mampu) sebagai suatu sumberdaya untuk memperbaiki kesejahteraan mereka. Mereka yang mampu tersebut dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, yang mungkin atau mungkin tidak sesuai dengan tujuannya sendiri.

Demikianlah ironi lain dari Rawls. Rawls jelas menyatakan bahwa salah satu tugas utama *Theory of Justice* adalah menyangkal utilitarianisme, yang salah karena mengabaikan keterpisahan orang-orang. Ia mengatakan bahwa ia menyusun *Theory of Justice* dengan mengikuti suatu tradisi filsafat yang dipelopori oleh Kant, yang doktrin moral utamanya mengakui bahwa tiap-tiap orang adalah makhluk yang otonom, dan karena itu tidak seorang pun boleh dianggap sebagai sarana. Prinsip

perbedaan Rawls tersebut, dengan mengandaikan bahwa sebagian orang adalah sarana bagi tujuan orang lain, merupakan suatu penyangkalan yang jelas terhadap doktrin moral Kantian.

Tentang Kesetaraan

Gagasan utama yang mendorong perkembangan negara kesejahteraan adalah gagasan tentang kesetaraan ekonomi. Gagasan ini, pada masa ketika Nozick menulis *Anarchy, State, and Utopia*, merupakan gagasan yang sangat menonjol. Mulai dari awal tahun-tahun pasca-Perang hingga sekitar akhir 1970-an, pertanyaan politik dan sosial terbesar di negara-negara industri adalah seberapa jauh dan seberapa cepat mereka memberi ruang bagi negara untuk menjadi sarana untuk mencapai kesetaraan ekonomi. Konteks dunia seperti itu harus diingat ketika kita mendengar kritik Nozick terhadap kesetaraan.

Nozick mulai dengan memperlihatkan suatu fakta penting: meskipun dominan, gagasan tentang kesetaraan seringkali hanya diandaikan; ia “jarang *dipertahankan*” (garis miring dari Nozick). Para penulis tentang kesetaraan terbiasa mengatakan bahwa n persen populasi terkaya memiliki N persen dari total kekayaan, sementara m persen mereka yang termiskin hanya memiliki M persen. Karena perbedaan antara N dan M terlalu besar, sesuatu dengan demikian harus dilakukan—dan para penulis tersebut akan segera menjabarkan bagaimana ketimpangan ini harus diubah. Bukannya menyoroti filosofi atau gagasan-gagasan dasar, para penulis tersebut malah lebih memperhatikan hal-hal teknis dari kesetaraan.

Satu dari sedikit gagasan yang mendapatkan banyak perhatian dari kalangan filsuf adalah gagasan Bernard Williams. Dalam mempertahankan kesetaraan, Williams mengatakan bahwa barang-barang vital harus didistribusikan berdasarkan kebutuhan. Perawatan kesehatan adalah salah satunya. Bagi

Williams, dasar yang tepat untuk mendistribusikan perawatan kesehatan adalah keadaan sakit. Namun, karena perawatan medis memerlukan uang, “maka kepemilikan uang yang cukup dalam kenyataan menjadi syarat tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan perawatan kesehatan”. Karena itu, sangat mungkin bahwa penyakit si miskin tidak akan mendapatkan perawatan, meskipun berdasarkan kebutuhan ia amat sangat membutuhkannya. Hal ini, bagi Williams, irasional, karena rasionalitas mengharuskan distribusi perawatan medis berdasarkan keadaan sakit (“Ini adalah kebenaran penting”).

Menurut Nozick, Williams tampak berpendapat bahwa jika sebuah aktivitas memiliki “tujuan internal” (mengobati penyakit dalam kasus perawatan kesehatan), maka “dasar yang paling tepat untuk menjalankan aktivitas tersebut terkait dengan pencapaian yang efektif atas tujuan internal itu”. Menurut Nozick, jika kita mengikuti logika argumen ini, kita juga harus menyimpulkan bahwa dasar paling tepat untuk distribusi jasa pangkas rambut adalah kebutuhan pangkas rambut. Setiap pemangkas rambut harus memangkas rambut siapapun yang datang ke tempatnya tanpa melihat penghasilannya.

“Namun,” tanya Nozick, “mengapa tujuan internal aktivitas tersebut harus diutamakan dibanding, misalnya, tujuan khusus orang itu dalam melakukan aktivitas tersebut?”

Jika seseorang menjadi pemangkas rambut karena ia suka bercakap-cakap dengan beragam orang, dan sebagainya, apakah tidak adil baginya untuk menjalankan layanannya bagi mereka yang paling ingin ia ajak bercakap-cakap? Atau jika ia bekerja sebagai seorang tukang cukur demi mendapatkan uang untuk membayar biaya sekolah, bolehkah ia hanya memotong rambut orang-orang yang membayar atau memberi tip bagus? Mengapa seorang tukang pangkas rambut tidak boleh menggunakan kriteria yang sama dalam menjalankan layanannya sebagaimana orang lain yang aktivitas-aktivitas-

nya tidak memiliki tujuan internal yang melibatkan orang lain? Haruskah seorang tukang kebun menjalankan layannya pada halaman-halaman rumput yang paling membutuhkannya?

Sebagian orang mungkin mengatakan bahwa pangkas rambut dan dokter merupakan aktivitas-aktivitas yang berbeda, dalam arti bahwa yang kedua berkaitan dengan layanan yang jauh lebih penting; kesehatan yang baik lebih penting dibanding rambut pendek dan rapi. Namun bagaimana dengan makanan—haruskah para petani memberikan beras mereka kepada orang-orang yang membutuhkannya?

Menurut Nozick, kesalahan dasar Williams adalah bahwa ia—seperti para pendukung distribusi—“hanya melihat pada persoalan alokasi”. Williams tidak peduli pada persoalan tentang darimana layanan-layanan yang akan dialokasikan tersebut berasal. Karena orang-orang berhak atas tindakan mereka sendiri (dalam hal layanan), karena itu mereka bisa memutuskan kepada siapa dan atas dasar apa mereka memberikan sesuatu. Memaksa mereka untuk melakukan hal yang sebaliknya akan melanggar hak mereka (yakni kerja paksa).

Dokter, tukang kebun, pemangkas rambut, dan profesor melakukan pekerjaan mereka dengan tujuan-tujuan mereka sendiri. Sebagian dari mereka hanya ingin mencari uang, dan sebagian yang lain tidak. Menganggap bahwa tujuan-tujuan internal aktivitas-aktivitas mereka lebih penting dibanding tujuan-tujuan yang mereka pikirkan berarti mengabaikan mereka sebagai manusia yang mandiri.

Karena Nozick percaya bahwa hal yang paling penting dalam diri manusia adalah otonomi dan hak-hak mereka, argumen tentang kesetaraan tersebut dengan demikian bagi dia gagal.

Tentang Kebebasan: Berlin vs Charles Taylor

KAPAN SAYA bisa berkata bahwa saya orang bebas? Jawaban atas pertanyaan sederhana ini bisa mengubah arah sejarah.

Kebebasan pada dasarnya dipahami dalam dua bentuk: negatif dan positif. Konsep kebebasan negatif mengacu pada suatu keadaan di mana kita *bebas dari* paksaan orang lain. Paksaan, misalnya dalam bentuk hukum, di sini hanya diperlukan untuk mencegah tindakan seseorang yang merugikan orang lain.

Konsep kebebasan positif merujuk pada suatu keadaan di mana kita *bebas untuk* menata kehidupan kita, bebas untuk berpartisipasi dalam suatu proses yang akan mengontrol hidup kita. Di sini seorang manusia bebas dianggap sebagai seorang manusia yang *dapat* melakukan hal-hal yang dianggap bernilai untuk dilakukan.

Sekilas, dua konsep kebebasan ini tampaknya tidak jauh berbeda dalam hal konsekuensi-konsekuensi praktisnya. Menurut saya, sampai tingkat tertentu keduanya memang tidak bisa dipisahkan. Namun pada dasarnya keduanya berbeda. Dan perbedaan ini bisa menghasilkan dua manusia berbeda yang

melakukan dua jenis tindakan yang sepenuhnya bertentangan, keduanya atas nama kebebasan.

Dari sejarah pemikiran politik kita tahu bahwa dua konsepsi kebebasan ini bukan merupakan hal baru. Locke, Hobbes, Constant, Mill, Bentham, Tocqueville adalah nama-nama besar yang seringkali dikaitkan dengan konsepsi kebebasan negatif; sementara Hegel, Marx, dan Rousseau dengan kebebasan positif.

Dalam esai pendek ini saya tidak akan mengulas argumen-argumen para pemikir besar dan klasik ini. Di sini saya akan mengkaji dua filsuf kontemporer yang populer (Isaiah Berlin dan Charles Taylor), yang mewakili masing-masing konsepsi tersebut. Saya akan menjelaskan posisi keduanya. Pertama-tama harus saya katakan bahwa konsepsi kebebasan negatif lebih unggul, baik secara moral maupun intelektual. Saya lebih setuju dengan Sir Berlin. Karena itu, esai ini juga bertujuan mempertahankan konsepsi kebebasan negatif dari serangan-serangan yang dilancarkan oleh para pemikir seperti Taylor.

Saya lazimnya dianggap bebas sampai tingkat di mana tidak ada manusia atau kumpulan manusia yang ikut campur dengan aktivitas saya. Kebebasan politik dalam pengertian ini adalah suatu wilayah yang di dalamnya seseorang bisa bertindak tanpa dirintangi orang lain. Jika saya dihalangi orang lain untuk melakukan apa yang ingin saya lakukan, maka sampai tingkat tertentu saya tidak bebas; dan jika wilayah ini dipersempit oleh orang lain melebihi suatu batas minimum, maka saya dapat dianggap telah dikekang, atau mungkin diperbudak....

Kata-kata Isaiah Berlin ini adalah inti dari konsepsi kebebasannya. Kekangan, dalam konteks paragraf ini, bukan meru-

pakan suatu istilah yang melingkupi setiap bentuk ketidakmampuan. Kekangan dan ketidakmampuan untuk melakukan hal-hal tertentu hendaknya tidak dicampuradukkan: “Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mampu melompat di udara lebih dari 10 kaki, ...atau tidak mampu memahami halaman-halaman sulit buku Hegel, akan aneh untuk mengatakan bahwa saya sampai tingkat tersebut dikekang atau diperbudak.”

Saya mungkin tidak mampu membeli roti, atau tamasya keliling dunia mengunjungi kota-kota yang indah, karena saya miskin, namun hal ini tidak niscaya berarti bahwa saya bukan manusia bebas. Hanya ketika saya yakin kemiskinan saya disebabkan oleh kenyataan bahwa “orang lain telah merancang suatu keadaan di mana saya, dan bukan orang lain, terhalangi untuk memiliki uang yang cukup...”, maka saya dapat mengatakan bahwa saya adalah korban pengekangan, dan dengan demikian bukan manusia bebas. Di sini, menurut Berlin, teori-teori ekonomi memainkan suatu peran penting dalam menjelaskan tentang sebab-sebab kemiskinan tersebut.

Bebas berarti memiliki suatu wilayah kehidupan pribadi yang tidak dapat dicampurtangani oleh orang lain. “Semakin luas wilayah di mana saya tidak dicampurtangani, semakin luas kebebasan saya”. Dengan kata lain, kebebasan mensyaratkan suatu wilayah minimum kebebasan pribadi yang samasekali tidak bisa dilanggar, “...karena jika hal itu dilanggar, seorang individu akan merasa ruang geraknya terlalu sempit bahkan untuk perkembangan minimum kemampuan-kemampuan alamiahnya yang memungkinkannya untuk mengejar, dan mencapai, berbagai macam tujuan yang dianggap manusia baik, benar atau sakral.”

Hal ini berarti bahwa suatu pemisahan yang jelas harus diteguhkan antara wilayah kehidupan pribadi dan wilayah otoritas publik. Jika otoritas publik tersebut melanggar wilayah kehidupan pribadi, meski sedikit, maka hal itu akan dianggap

sebagai suatu despotisme, suatu tirani. Agar kebebasan terjaga, pemisahan tersebut harus menjamin paling tidak suatu wilayah minimum kebebasan pribadi. Wilayah pribadi yang dilindungi ini merupakan suatu ruang di mana hakikat manusia dibiarkan berkembang.

Dalam memberikan pembenaran bagi konsepsi kebebasan negatif, Berlin sampai tingkat tertentu tampak mengulangi argumen-argumen Mill, meskipun bukan tanpa perbaikan-perbaikan. Seperti kita tahu, bagi Mill kebebasan merupakan suatu keharusan jika kita tidak ingin menjerumuskan seluruh masyarakat ke dalam lembah mediokritas kolektif. Kebebasan adalah syarat bagi kreativitas. Jika kita tidak membiarkan manusia hidup seperti yang mereka inginkan, kebenaran tidak akan terkuak karena tidak ada pasar bebas gagasan. Tanpa kebebasan pribadi, hal-hal baik dari kehidupan seperti kreativitas, spontanitas, energi moral, dan orisinalitas mandek: tanpa semua ini peradaban tidak bisa maju.

Bagi Berlin, alasan utilitarian ini hanya tak terbantahkan dalam pengertian bahwa jika “dogma menghancurkan semua pemikiran”, tak seorang pun “akan mengatakan bahwa kebenaran atau kebebasan berekspresi bisa berkembang”. Namun, persoalannya, sejarah memperlihatkan bahwa kualitas-kualitas manusia yang sangat dihargai oleh Mill—yaitu kreativitas, cinta kebenaran, integritas—tumbuh dengan sama suburnya dalam komunitas-komunitas yang sangat terdisiplinkan (misalnya kaum Puritan Kalvinis di Skotlandia atau New England, atau dalam disiplin militer), sebagaimana dalam masyarakat-masyarakat yang lebih toleran atau lebih bebas. Dengan kata lain, meskipun argumen utilitarian Mill secara prinsip terdengar mulia, argumen tersebut secara empiris kurang meyakinkan.

Karena itu, diperlukan suatu pembenaran lain yang lebih kuat. Dan di sini Berlin kembali pada argumen Mill yang lain (dan, sampai tingkat tertentu, juga Tocqueville). Bagi Berlin,

alasan terkuat untuk menerima gagasan tentang kebebasan negatif adalah bahwa gagasan ini, jika dipraktikkan, dapat menghindari kejahatan politik terbesar: tirani. Sekalipun rezim politik tersebut tidak demokratis (misalnya monarki), asalkan batas-batas wilayah pribadi tidak dilanggar—sehingga warganegara masih bisa berbicara dan bertindak tanpa campur-tangan dari otoritas—masyarakat tak terancam oleh tirani.

Sebaliknya, bagi Berlin, konsepsi kebebasan positif sangat rentan terhadap godaan-godaan tiranik atau totalitarian. Kebebasan ini mendasarkan konsepsinya pada suatu bentuk kehidupan atau nilai-nilai hidup yang lebih tinggi sebagaimana yang didefinisikan oleh aktor-aktor politik atau intelektual. Begitu bentuk-bentuk kehidupan yang lebih tinggi ini didefinisikan, siapapun dapat dihancurkan, dan rezim totalitarian diteguhkan, atas nama kebebasan.

Nanti, setelah saya menjelaskan kritik Charles Taylor terhadap konsepsi kebebasan negatif tersebut, saya akan menjabarkan lebih jauh pembelaan kebebasan Berlinian ini.

Manusia bisa dipaksa untuk menjadi bebas. Diktum Rousseauian ini adalah inti pembelaan Charles Taylor terhadap kebebasan positif. Terdapat tujuan-tujuan manusia yang lebih tinggi: jika kita tidak mewujudkan tujuan-tujuan (atau nilai-nilai) ini, kita tidak bebas, betapapun besar wilayah kebebasan pribadi yang kita punyai. Kebebasan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan akhir kita samasekali bukan kebebasan. Kebebasan tanpa konsepsi tertentu tentang tujuan-tujuan (yang lebih tinggi) adalah mus-tahil.

Rintangan terhadap kebebasan bisa bersifat eksternal dan internal. "Kita bisa gagal untuk mencapai realisasi diri kita karena berbagai ketakutan, atau kesadaran palsu, serta karena

kekangan eksternal.” Bagi Taylor, apa yang salah dengan kebebasan negatif adalah penolakannya untuk mengakui peran rintangan-rintangan internal. Para filsuf kebebasan negatif, seperti Hobbes dan Bentham, samasekali keliru ketika mereka mengatakan bahwa kita bebas sejauh kita tidak mempunyai rintangan-rintangan eksternal yang menghalangi kehidupan pribadi kita.

Bagi Taylor, keuntungan serta kegagalan terbesar kebebasan negatif dapat ditemukan dalam kesederhanannya. ”Kebebasan negatif memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa kebebasan adalah mampu mengatakan apa yang Anda inginkan, di mana apa yang Anda inginkan dengan mudah dipahami sebagai apa yang bisa diidentifikasi orang tersebut sebagai hasrat-hasratnya.” Keuntungannya: ia bisa memperkuat perjuangan kita menentang ancaman Totalitarian. Bahayanya: ia tidak bisa dipertahankan sebagai suatu pandangan tentang kebebasan, yang bisa menjadikan kita semata-mata mempertahankan Maginot Line. Terhadap dimensi terakhir kebebasan negatif inilah Taylor memusatkan serangannya.

Bagi Taylor, kebebasan negatif bersandar pada konsep kesempatan; sementara kebebasan positif bersandar pada konsep pelaksanaan. Yang pertama adalah suatu pandangan tentang tindakan manusia tanpa inti (apapun yang Anda lakukan, sejauh Anda tidak merugikan orang lain, dianggap sebagai cerminan dari kebebasan anda. Di sini nilai-nilai atau tujuan-tujuan tidak dibedakan). Yang kedua sangat terkait dengan pandangan realisasi-diri, yang membedakan nilai-nilai menurut kepentingan si agen. Mari kita lihat bagaimana Taylor menjelaskan pandangannya tentang poin ini:

Kita tidak bisa mengatakan bahwa seseorang bebas, berdasarkan pandangan realisasi diri, jika ia sepenuhnya tak terejawantahkan, jika, misalnya, ia sepenuhnya tidak sadar akan

potensinya, jika mewujudkan hal ini tidak pernah muncul sebagai suatu pertanyaan baginya, atau jika ia dilumpuhkan oleh ketakutan akan melanggar norma-norma yang telah ia internalisasi namun tidak benar-benar mencerminkan dirinya.

Jika kita menerima gagasan kebebasan Taylorian ini, maka kita secara logis akan menerima pandangan bahwa mampu melakukan apa yang kita inginkan bukan merupakan suatu syarat yang memadai untuk menjadi bebas. Untuk menjadi bebas kita harus tahu tujuan yang kita kejar, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan palsu.

Bagaimana jika kita gagal mengetahui keinginan kita yang “sejati”? Apakah dibenarkan jika seseorang (misalnya saja seorang pemimpin partai), dengan menggunakan otoritas publik, memaksa kita untuk menerima suatu bentuk keinginan tertentu sebagai keinginan sejati kita? Dalam hal ini Taylor kurang jelas. Ia setuju bahwa pada akhirnya si individu sendiri yang akan memutuskan. Namun ia semakin kurang jelas saat mengatakan, “Sang subyek itu sendiri tidak bisa menjadi otoritas terakhir menyangkut pertanyaan apakah ia bebas; karena ia tidak bisa menjadi otoritas terakhir menyangkut persoalan apakah keinginan-keinginannya adalah otentik, apakah keinginan-keinginannya tersebut merintanggi atau tidak merintanggi tujuannya.”

Jadi, jika sang subyek itu sendiri bukan merupakan seseorang yang memutuskan apa keinginannya yang sejati, lalu siapa? Kaum intelektual? Kaum birokrat? Para pemimpin partai? Dan bagaimana mereka akan tahu? Melalui pengetahuan abstrak dan teoretis? Melalui formulasi empiris? Bukankah di sini kita sudah hampir melanggar garis batas totalitarian atau despotik, karena begitu kita menerima gagasan bahwa seorang individu pada dasarnya tidak mampu mengetahui apa yang

mereka inginkan, maka kesempatan bagi seseorang yang kuat dan memiliki kekuasaan besar—serta pengetahuan tentang “tujuan-tujuan sejati”—akan terbuka lebar?

Sekali lagi, di sini Taylor kurang jelas dalam menjelaskan poin-poinnya. Ia tampak menghindari persoalan-persoalan sulit ini. Para filsuf yang mendukung kebebasan negatif tidak harus menjelaskan konsepsi tentang nilai-nilai yang lebih tinggi, atau bagaimana nilai-nilai ini harus diputuskan atau diwujudkan. Nilai-nilai yang lebih tinggi kurang menjadi sorotan dalam skema mereka tentang hal-hal. Persoalan tentang nilai harus diserahkan sepenuhnya pada si individu itu sendiri. Sebaliknya, para filsuf yang membela kebebasan positif, karena mereka mendasarkan gagasan mereka pada tujuan-tujuan yang lebih tinggi, atau pada realisasi-diri “sejati”, harus menjelaskan apa nilai-nilai yang lebih tinggi tersebut, secara teoretis maupun dalam perwujudan praktisnya. Jika mereka gagal melakukan hal itu, mereka sangat mungkin dituduh hanya memberi pernyataan, bukan argumen.

Sebelum kita mengkaji argumen-argumen Berlin terhadap serangan-serangan Taylorian seperti di atas, penting untuk melihat bahwa para filsuf yang mendukung kebebasan negatif tidak menyangkal bahwa terdapat hal-hal baik yang mungkin diwujudkan dalam masyarakat modern dengan berdasarkan pada gagasan positif tentang kebebasan. Gagasan ini merupakan inti dari berbagai tuntutan akan kedaulatan nasional dan pembentukan negara kesejahteraan. “[Tidak] mengakui hal ini,” demikian Berlin mengingatkan kita, “berarti tidak memahami kenyataan-kenyataan dan gagasan-gagasan yang paling vital di zaman kita.”

Namun, apa yang ditentang oleh para filsuf kebebasan tersebut adalah ekstremisme, reduksionisme berlebihan dalam memahami tindakan dan kebebasan manusia, atas nama reali-

sasi-diri, nilai-nilai yang lebih tinggi, atau apapun. Bagi mereka, ekstremisme ini bisa menjadi dasar filosofis kekuasaan yang despotik.

Nah, untuk memahami bagaimana para pemikir kebebasan negatif mengkritik gagasan positif tentang kebebasan, poin yang akan ditekankan dengan kuat adalah tentang kompleksitas tindakan manusia dalam kaitannya dengan kebebasan. Dalam kehidupan kita, kita melakukan begitu banyak tindakan, baik yang besar maupun kecil—mulai dari memberikan suara dalam pemilu dan memilih sekolahan, hingga membaca puisi dan majalah *Playboy*. Tak banyak orang yang dapat membuat tindakan mereka “utuh-padu”. Sebagian besar dari kita, manusia biasa, adalah orang-orang yang tidak konsisten: kita suka membaca otobiografi Mahatma Gandhi dan *War and Peace* Tolstoy, dan pada saat yang bersamaan kita juga suka membeli mobil yang lebih bagus dan membeli sikat gigi elektronik. Dalam kehidupan kita, terdapat begitu banyak kombinasi “tindakan yang tidak koheren”.

Lebih jauh, seperti yang dikemukakan Berlin, selain kompleksitas tindakan ini, manusia juga memiliki kompleksitas tujuan dan keinginan. “Tujuan-tujuan kita banyak,” ungkap Berlin, “dan tidak semua tujuan tersebut pada dasarnya sesuai satu sama lain”. Sebagian dari tujuan tersebut bahkan berbenturan satu sama lain. Dalam hal ini Kant benar ketika ia mengatakan bahwa “dari pohon kemanusiaan yang bengkok, tidak ada hal lurus yang muncul”. Hal ini berarti bahwa dalam pengalaman sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai pilihan di antara berbagai tujuan yang sama-sama penting, atau pandangan-pandangan yang sama-sama benar, dan pewujudan tujuan-tujuan tersebut, meminjam ungkapan Berlin, “niscaya harus mengorbankan tujuan-tujuan yang lain”.

Karena berbagai kompleksitas inilah para filsuf kebebasan negatif menekankan makna terpenting kebebasan untuk me-

milih atau kebebasan pribadi dalam membuat keputusan menyangkut hasrat dan tindakan kita. Menurut Berlin, jika kita tidak menegaskan pentingnya kebebasan untuk memilih, kita akan cenderung percaya bahwa “sebuah formula tunggal tertentu pada dasarnya dapat ditemukan, dan dengannya berbagai macam tujuan manusia dapat diwujudkan secara harmonis”. Keyakinan ini jelas salah—dan karena itu gagasan tentang kebebasan negatif sulit ditolak sebagai filsafat kebebasan.

“Bukankah kebebasan untuk melakukan kejahatan suatu kebebasan? Jika tidak, lalu apa?” Kata-kata Bentham ini memperlihatkan kepada kita kenyataan bahwa para filsuf kebebasan negatif tidak menyangkal bahwa seseorang mungkin membuat suatu pilihan yang salah: bukannya memasukkan anak-anaknya ke universitas-universitas terbaik, ia malah menghabiskan uangnya untuk membeli barang-barang “remeh” (mobil yang lebih bagus, jas-jas yang mahal). Bagi para filsuf ini, persoalan tersebut bukan persoalan kebebasan. Kebebasan hanya mungkin jika kita juga bebas untuk berbuat salah. Kita hendaknya tidak memberikan orang-orang biasa tersebut kebebasan jika kita tidak ingin mereka membuat beberapa keputusan yang salah. Mereka *memang* membuat keputusan-keputusan yang salah, atau mencampuradukkan keinginan-keinginan; meskipun demikian, mereka adalah orang bebas sejauh mereka tidak dipaksa orang lain untuk melakukan hal itu.

Bagaimana Taylor dan “para filsuf positif” yang lain mendamaikan fakta kompleksitas tujuan dan tindakan tersebut dengan gagasan tentang nilai-nilai yang lebih tinggi dan realisasi diri? Pertanyaan sederhana ini sangat susah mereka jawab dan dengan demikian memperlihatkan kelemahan mereka. Seperti telah kita lihat, bagi Berlin dan para filsuf kebebasan negatif yang lain, kenyataan tentang berbagai kompleksitas dan kebebasan tersebut pada dasarnya terdamaikan dalam gagasan tentang kebebasan untuk memilih: apapun kombinasi tujuan

dan tindakan yang kita lakukan, kita dianggap sebagai orang bebas sejauh kita melakukan hal itu tanpa paksaan orang lain. Bagi Taylor, persoalan tersebut jauh lebih problematis, sampai tingkat di mana hampir tidak ada posisi yang cerdas yang bisa diambil.

Ambil contoh tentang seseorang yang memiliki dua keinginan. Kita anggap saja bahwa satu dari keinginan-keinginan ini baik bagi realisasi dirinya, sementara yang lain tidak. Taylor, secara logis, jelas akan mengatakan bahwa orang ini hanya setengah bebas. Sekali lagi, mari kita anggap bahwa gagasan tentang setengah bebas ini masih masuk akal. Namun bagaimana jika seseorang memiliki enam keinginan (harus kita ingat, dalam dunia nyata, siapapun bisa memiliki jumlah keinginan yang tak terbatas). Jika hanya satu dari keenam keinginan itu dianggap sebagai keinginan sejatinya (sekali lagi, mari kita anggap gagasan tentang keinginan sejati tidak bermasalah), apakah masih masuk akal mengatakan bahwa ia $1/6$ bebas? Apa itu $1/6$ bebas— $2/5$, $235/457$, $34/89$ bebas? Dan apa yang akan kita katakan tentang kebebasan dalam sebuah masyarakat dengan jutaan orang dan jumlah keinginan yang tak terbatas?

Berhadapan dengan persoalan ini, satu-satunya cara bagi Taylor untuk menyelamatkan gagasannya adalah dengan membagi manusia menjadi dua diri. Diri yang pertama lebih tinggi, atau rasional, atau diri sejati. Diri yang lain adalah diri empiris, “lebih rendah”, irasional, atau diri yang tak-terkendalikan. Yang pertama adalah diri yang menjadi sumber realisasi diri sejati. Hanya diri pertama inilah yang merupakan wilayah kebebasan sesungguhnya. Diri yang kedua adalah sebuah entitas (dalam kata-kata Berlin) “yang dilingkupi hasrat dan nafsu”, diperbudak oleh keinginan akan kenikmatan sesaat, sumber kekeliruan. Hanya dengan membuat pembedaan seperti ini gagasan tentang realisasi diri “sejati” *à la* Taylor menjadi masuk akal: pembedaan ini memungkinkan kita menyederhanakan

kompleksitas tindakan dan keinginan manusia tersebut menjadi dua sifat yang bertentangan—baik dan buruk, lebih tinggi dan lebih rendah, sejati dan palsu.

Bagi para filsuf kebebasan negatif seperti Berlin, di sinilah letak bahaya terbesarnya. Diri yang sejati dan lebih tinggi tersebut dengan mudah dapat digelembungkan atau diubah menjadi sesuatu yang lebih luas dibanding seorang individu—suatu suku, ras, negara, suatu masyarakat besar, suatu kelas sosial, atau jalannya sejarah. Diri sejati yang lebih luas ini kemudian bisa digunakan untuk memaksakan keinginan kolektif dan organiknya pada para anggotanya yang membangkang. Dengan membebaskan dan memaksakan kehendaknya pada diri yang empiris, diri sejati yang lebih luas tersebut memunculkan kebebasan yang lebih tinggi.

Pembedaan diri seperti itu, menurut Berlin, bisa menjadikan kita:

...mengabaikan keinginan-keinginan nyata manusia atau masyarakat; menggertak, menindas, serta menyiksa mereka atas nama, atau demi diri “sejati” mereka, dengan pengetahuan pasti bahwa apapun tujuan sejati manusia (kebahagiaan, pemenuhan kewajiban, kebijakan, suatu masyarakat yang adil, pemenuhan diri) pasti identik dengan kebebasannya—pilihan bebas dirinya yang “sejati”, meski seringkali terpendam dan tak terungkapkan.

Bagi Berlin, posisi seperti ini merupakan inti semua teori politik tentang realisasi diri (teori Taylor adalah salah satunya). Posisi ini memungkinkan seseorang membuat suatu “imperisonasi besar”, yang cenderung menyamakan “apa yang akan dipilih X jika ia adalah sesuatu yang bukan dirinya, atau paling tidak belum dirinya, dengan apa yang sebenarnya dikejar dan dipilih X”.

Dengan kata lain, posisi ini adalah resep bagi tirani. Dan menurut Berlin, sejarah abad kita telah memperlihatkan bahwa tirani paling kejam dan teror terbesar terhadap kemanusiaan dilakukan ketika diri yang dianggap lebih tinggi dan sejati tersebut memaksakan kehendaknya pada diri empiris yang dianggap penuh dengan hasrat dan nafsu yang lebih rendah. Tepat inilah yang terjadi di Rusia di bawah Stalin dan Jerman di bawah Hitler.

Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa Taylor dan para pemikir kebebasan positif yang lain adalah para pemikir yang tak liberal atau para pendukung despotisme. Apa yang ingin diperlihatkan oleh argumen-argumen Berlin adalah bahwa konsepsi positif tentang kebebasan tersebut tidak dapat dipertahankan sebagai filsafat kebebasan: ia sangat mudah dimanfaatkan oleh seorang despot untuk membangun suatu kerajaan paksaan; ia juga memunculkan suatu kesalahpahaman besar tentang sifat dan problem kebebasan.

Kontrak Sosial: Pedang Rousseau

“Manusia terlahir bebas, dan di mana pun ia terkekang... Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya tidak tahu. Apa yang bisa menjadikan hal ini sah? Saya yakin saya bisa menjawab pertanyaan ini.”

INI ADALAH KALIMAT PEMBUKA *The Social Contract* karya Rousseau. Dengan kalimat-kalimat tersebut Jean-Jacques Rousseau mengajukan pertanyaan politik yang paling radikal dan mengandaikan bahwa semua rezim politik yang ada tidak sah. Kalimat-kalimat tersebut merupakan pertanyaan paling modern di masa Rousseau. Pernyataan itu adalah pedang yang memenggal otoritas kekuasaan tradisional.

Voltaire mengancam Tuhan. Rousseau mendelegitimasi para penguasa. Para *philosophers* (Diderot, Voltaire) menginginkan reformasi, Rousseau menginginkan revolusi. Ia menganjurkan “suatu bentuk asosiasi” di mana tiap-tiap anggotanya sepenuhnya menyerahkan dirinya pada komunitas itu, dan pada saat yang sama hanya menaati dirinya sendiri dan tetap bebas serta otentik—paradoksnya yang terkenal adalah: “Tiap-tiap orang menyerahkan dirinya kepada semua [orang], tidak menyerahkan dirinya kepada siapapun.” Ia menganggap masyarakat sipil

memperbudak individu. “Bentuk asosiasinya”, atau kontrak sosialnya, dengan demikian merupakan suatu penyelamatan politik yang sepenuhnya menyelesaikan konflik antara individu dan masyarakat, atau warganegara yang bebas dan negara. Baginya, hanya dalam asosiasi ini manusia dapat benar-benar mendapatkan kebebasan sipilnya. Di sini manusia diubah dari semata-mata seekor “binatang yang terbatas dan bodoh” menjadi sesosok “makhluk yang cerdas dan bermoral”.

Namun jenis asosiasi baru apa yang ditawarkan Rousseau? Jawaban dari pertanyaan ini sangat ambigu. Saya cenderung berpikir bahwa, seperti yang akan saya tunjukkan nanti, konsekuensi-konsekuensi pemikirannya dalam *Social Contract* cenderung totalitarian. Ia mengganti otoritas tatanan lama dengan sebuah komunitas politik baru yang totalitarian. Memang, seperti yang dikemukakan Robert Nisbet (1973), Rousseau membebaskan manusia dari masyarakat lama dan korup—namun dalam melakukan hal ini ia menempatkan manusia di bawah kungkungan sebuah negara yang sangat kuat dan mungkin tak terbatas. Dengan kata lain, “bentuk asosiasinya” tersebut merupakan suatu format politik di mana seorang raja baru dan modern, tanpa banyak rintangan dari masing-masing warganegara, dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan politik atas nama kehendak umum. Rousseau tidak memberi perlindungan pribadi atau individual terhadap kemahakuasaan kekuasaan politik tersebut. Dalam pengertian ini, bukan tidak berdasar untuk setuju dengan Sir Henry Sumner Maine (1886) bahwa kehendak umum Rousseau sebenarnya “tidak lebih daripada hak ilahiah lama sang raja dalam bentuk baru”.

Tentu saja, bukan tanpa alasan untuk berpikir bahwa dalam beberapa hal *Social Contract* Rousseau memberikan dasar bagi sebuah komunitas politik yang lebih demokratis. Kita dapat menemukan aspek ini dalam argumennya tentang supremasi hukum. Bagi Rousseau, manusia bebas ketika ia mematuhi

hukum, dan bukan manusia. Di sini hukum—dan bukan para elite yang berkuasa—adalah otoritas tertinggi. Dalam *Letter from the Mountain*, yang dikutip oleh Sartori (1958), Rousseau mengatakan, “Nasib kebebasan sama dengan nasib hukum; ia hidup atau binasa bersamanya. Hukum adalah pelaksanaan kehendak umum: hukum berasal dari rakyat, dari semangat rakyat.” Dengan demikian Rousseau telah bergeser dari tradisi hukum kodrat—ia berpindah dari *ius naturale* Grotius ke hukum yang disetujui oleh kehendak umum. Hukum adalah rekaman kehendak-kehendak rakyat; dan karena itu hukum tidak pernah tidak adil, karena rakyat tidak pernah tidak adil kepada diri mereka sendiri. Di sini konsep modern tentang kesetaraan dalam hak-hak hukum—yang merupakan salah satu syarat paling penting sebuah komunitas politik yang demokratis—menemukan pengungkapannya yang paling kuat dan bernas.

Selain itu, Rousseau menghamparkan dasar bagi kedaulatan rakyat (atau lebih tepatnya kedaulatan massa). Kekuasaan politik yang sah baginya merupakan turunan dari keinginan rakyat. Dan keinginan rakyat, seperti hukum, tidak bisa salah. Karena itu, apa yang diperlukan adalah suatu pengungkapan-diri umum (yang dalam konsepsi modern harus dipahami sebagai pemilihan umum atau revolusi) untuk menguak keinginan rakyat yang sebenarnya. Dengan populisme romantik ini, Rousseau, seperti saya katakan di atas, mendelegitimasi raja dan rezim-rezim lama—dan karena itu membantu mempersiapkan basis filosofis bagi revolusi masa depan. Dengan kata lain, Rousseau memberikan pedang kepada massa untuk menghancurkan singgasana raja absolut mereka.

Namun, semua ini tidak menghilangkan kolektivisme romantik dalam *Contract Social*, yang dengan mudah dapat membenarkan kekuasaan sosial dan politik totalitarian. Hal ini dapat ditemukan jika kita mengkaji secara teliti penjelasan

Rousseau tentang konsep dia yang terpenting, yakni kehendak umum. Bagi Rousseau, kehendak umum bukanlah jumlah kehendak individu, atau kehendak mayoritas, atau kehendak semua (*omnes ut singuli*). Ia adalah kehendak intensi umum (*omnes ut universi*), yang hanya dapat disingkapkan jika tiap-tiap individu mengasingkan dirinya dari orang lain (berlaku seperti atom dalam masyarakat) dan menyisihkan semua kepentingan pribadinya. Kehendak umum tersebut adalah suatu kualitas tersembunyi—ia adalah suatu kebenaran Platonik yang memiliki eksistensi obyektifnya sendiri. Setelah kehendak umum itu ditemukan, diejawantahkan, melalui “suara hati yang murni”, ia menjadi berdaulat. Lebih jauh, yang berdaulat ini utuh, tak dapat dihilangkan, dan tidak bisa diwakili oleh organ badan politik apapun. Setiap orang dengan demikian harus sepenuhnya tunduk pada yang berdaulat ini. Dan siapapun yang menolak untuk mematuinya harus dipaksa untuk melakukan hal itu oleh seluruh badan politik—di sini orang tersebut hanya “dipaksa untuk menjadi bebas”, karena pengejawantahan kehendak umum tersebut merupakan satu-satunya penyelamatan politik bagi manusia terhadap kebebasannya.

Kini, kita harus mengajukan beberapa pertanyaan sederhana: bagaimana kita mengetahui kehendak umum itu—jika orang-orang mengungkapkan opini mereka tentang beberapa persoalan umum? Bagaimana kita yakin bahwa hal itu adalah kehendak sejati mereka, dan bukan kehendak para demagog yang meyakinkan orang-orang apa dan bagaimana berpikir? Bagaimana kita tahu bahwa rakyat mengungkapkan kehendak mereka dengan “kesadaran murni” mereka? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, penjelasan-penjelasan Rousseau kurang memadai dan tidak jelas. Kita mungkin dapat menemukan jawaban utamanya dari kalimat penting ini: “Kita selalu menginginkan apa yang baik bagi kita, namun kita tidak selalu mengetahui apa itu.” Jadi, untuk membantu menemukan “hal

yang baik bagi kita” ini Rousseau kemudian menoleh ke pembuat undang-undang, yang akan menemukan hal yang “baik bagi kita” (kehendak umum) tersebut. Lebih jauh, pembuat undang-undang itu juga akan “menciptakan suatu jenis manusia baru, seorang makhluk yang murni politik, tanpa suatu kepentingan dan loyalitas apapun” bagi diri individual dan asosiasi pribadinya selain bagi komunitas politiknya.

Pendek kata, jawaban Rousseau bukan hanya kontradiktif, namun juga malah membenarkan peran sebuah kelompok suatu komunitas politik untuk bertindak seperti penemu sejati kebenaran, yang akan menghancurkan wilayah kehidupan individual dan pribadi, dan menjadikan seluruh rakyat tunduk hanya pada satu entitas politik kolektif. Dengan demikian, Rousseau membuka kemungkinan untuk membenarkan seorang despot dan tiran totalitarian yang mengklaim bahwa mereka adalah perwujudan kehendak umum tersebut, atau bahwa diri merekalah yang tahu apa yang diinginkan rakyat. Despot dan tiran ini mungkin menghancurkan setiap individu yang menentang mereka tanpa rasa bersalah.

Selain itu, Rousseau, seperti yang dikemukakan J.L. Talmon (1955), gagal melihat bahwa sebuah kehendak sangat mungkin tiranik, “sekalipun diinginkan oleh semuanya, dan bahwa akan sama jahatnya bagi yang berdaulat untuk diperintah secara tiranik oleh ‘dirinya sendiri’ ataupun oleh pihak lain”. Dalam kasus ini, setiap individu akan menjadi tiran maupun budak. Rakyat bisa bodoh terhadap diri mereka sendiri, jika bukan terhadap orang-orang lain. Opini rakyat bisa salah, dengan berbagai implikasi kejahatan (misalnya dalam eforia massa, dalam tekanan yang sangat besar, dalam perang, dll.). Stalin, dalam Perang Dunia II, dianggap oleh rakyat Rusia sebagai pahlawan nasional. Hitler, di tahun-tahun pertama Perang Dunia II, dipandang oleh rakyat Jerman sebagai seorang pemimpin yang mengembalikan kebanggaan nasional mereka.

Dan sekarang ini, Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic, para penjagal Serbia, dianggap oleh rakyat Serbia sebagai pelindung kehendak rakyat. Jika sebuah kelompok dari rakyat membenci kelompok yang lain, kehendak umum Rousseau sangat mungkin menjadi suatu sarana bagi para pemimpin despotik untuk melakukan pembantaian massa.

Rousseau tidak bersikap kritis terhadap kekuasaan politik. *Contract Social*-nya terlalu kuat bersandar pada negara (komunitas politik, bangunan politik) sebagai sumber kemajuan sosial dan moral. Penyelamatan politik suatu masyarakat sipil yang korup baginya hanya mungkin jika terjadi “suatu penyerahan absolut dari para individu, dengan semua hak dan kekuatannya, kepada komunitas sebagai suatu keseluruhan”. Keyakinan total dan romantiknya terhadap kolektivitas menghancurkan kemungkinan pengakuan akan eksistensi kehidupan pribadi dan individual. Ia begitu tergetarkan oleh majelis publik Romawi, di mana kemauan publik berkuasa. Baginya, negara harus memaksa setiap individu untuk luluh dalam kemauan publik ini demi kebajikannya sendiri. Di sinilah Rousseau memberikan jalan termudah bagi negara untuk melakukan kontrol totalitarian terhadap seluruh masyarakat.

Dalam hal ini Rousseau jelas sangat berbeda dari para filsuf liberal Inggris. Locke, misalnya, tidak banyak memberi peran kepada negara selain menjamin hak milik dan kehidupan rakyat. Dan Hobbes, dengan kejelasannya yang brilian, menyatakan bahwa satu-satunya tugas yang harus diemban kekuasaan politik adalah menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat. Para filsuf ini tidak banyak memberi kekuasaan kepada negara untuk ikut campur dalam urusan-urusan masyarakat sipil. Pendek kata, tradisi filsafat kebebasan adalah sebuah tradisi skeptisisme terhadap politik. Rousseau, sebaliknya, membuka suatu harapan baru terhadap negara dan politik untuk memainkan peran sebagai penggerak sejarah yang progresif. Pada dirinya

sendiri mungkin tidak ada yang salah dengan harapan ini. Namun, dalam kasus Rousseau, kita tidak dapat menemukan jawaban apapun tentang bagaimana kita harus menetapkan batas bagi kemahakuasaan negara dan politik di wilayah sosial dan politik. Baginya, negara—badan politik tersebut—sepenuhnya berkuasa.

Jean-Jacques Rousseau dengan demikian bukanlah ayah yang tidak sah dari totalitarianisme kiri dan kanan abad ke-19 dan ke-20. Memang, pedangnya menghancurkan para raja, simbol otoritas tradisional—namun pedang itu juga memberi alasan bagi kaum revolusioner populis, atau bagi setiap despot, untuk menjalankan teror dan penindasan atas nama kehendak umum.

Daftar Rujukan

1. Robert Nisbet, *The Social Philosophers—Community and Conflict in Western Thought*, Thomas Cromwell Comp., 1973.
2. J.L. Talmon, *Origins of Totalitarian Democracy*, Secker and Warburg, 1955.
3. Sir Henry Sumner Maine, *Popular Government*, Henry Holt and Comp., 1886.
4. Giovanni Sartori, *Democratic Theory*, Praeger, 1958.
5. Jean-Jacques Rousseau, "The Contract Social", dalam Jean-Jacques Rousseau, *The Basic Political Writings*, diterjemahkan oleh D.A. Cress, Hackett Publishing Comp., 1987.

Membela Kaum Pluralis

DARI PERSPEKTIF TEORETIS, karya Gaventa, *Power and Powerlessness*, menarik karena ia melancarkan tantangan langsung terhadap kaum pluralis: para teoretisi politik yang seringkali disebut sebagai kaum liberal, yang dianggap sebagai para teoretisi terkemuka dalam ilmu politik utama sejak Perang Dunia II.

Dengan mendasarkan rumusan teoretisnya terutama dari Lukes dan Gramsci, Gaventa mengklaim bahwa orang-orang bersikap tidak aktif dalam kondisi ketidaksetaraan yang begitu besar bukan karena mereka menginginkannya. Penerimaan mereka adalah akibat dari hubungan-hubungan kekuasaan: mereka dipaksa untuk tidak aktif. Mereka merasa tak berdaya, cemas, lemah—karena itu mereka tidak melakukan sesuatu yang secara politik signifikan untuk mengubah penderitaan ekonomi mereka.

Bagi Gaventa, seperti halnya bagi Lukes, salah satu kelemahan utama dari kaum pluralis terletak dalam argumen bahwa tidak bertindak berarti kepuasan, atau kurang memiliki kekecewaan terhadap sistem sosial secara umum (orang-orang membutuhkan suatu tingkat kekecewaan tertentu untuk berani menghadapi risiko melakukan pemberontakan). Argumen ini, menurut Gaventa, menjadikan kaum pluralis abai terhadap ke-

nyataan bahwa kekuasaan berfungsi menjaga kekuasaan: elite-elite yang berkuasa berusaha untuk menjaga kekuasaan mereka dengan membuat orang-orang yang mereka kuasai tunduk, dengan menanamkan bentuk-bentuk gagasan tertentu yang tidak kritis dalam pikiran orang-orang yang mereka kuasai. Dengan demikian, kaum pluralis, bagi Gaventa, akan menyalahkan para korban jika mereka bersikap tidak aktif ketika ketidaksetaraan terjadi.

Seberapa berhasil Gaventa dalam menyerang posisi teoretis kaum pluralis? Kelemahan apa yang ada dalam rumusan teoretis Gaventa sendiri jika hal ini digunakan untuk memahami bukan hanya suatu kasus spesifik di Lembah Appalachian melainkan juga suatu masyarakat yang lebih besar dan kompleks?

Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan di atas, kita perlu bersikap adil terhadap kaum pluralis. Penjelasan Gaventa tentang posisi teoretis kaum pluralis diletakkan sedemikian rupa sehingga menjadikan posisi kaum pluralis tersebut tampak lemah.

Secara umum, kaum pluralis mendasarkan teori-teori mereka pada tradisi liberal dalam pemikiran politik.¹ Mereka terutama berutang kepada John Stuart Mill dan Joseph Schumpeter.

Dari John Stuart Mill mereka belajar bahwa manusia mampu memutuskan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Setiap manusia adalah hakim terbaik bagi kepentingannya sendiri. Para politisi mungkin mengajari orang-orang apa yang perlu dilakukan atau apa yang perlu dipikirkan (ini sudah menjadi kebiasaan para politisi). Namun, pada akhirnya, pertimbangan “rasional” orang-orang itulah yang penting: mereka bisa setuju

1 Penjelasan saya tentang kaum pluralis di sini sebagian besar diambil dari Ricci (1971) dan Fox, Furlong, dan Page (1985).

atau tidak setuju dengan para politisi tersebut, bergantung pada kepentingan mereka sendiri. Keputusan orang-orang tersebut mungkin “salah”. Mereka mungkin tertipu. Namun mereka tidak mungkin salah selamanya (mungkin mudah untuk menipu para pemilih sekali atau dua kali, namun mustahil melakukan hal ini selamanya): manusia belajar dari pengalaman mereka.

Dari Joseph Schumpeter, kaum pluralis belajar bahwa apa yang disebut elite berkuasa yang padu itu tidak ada.² Kelompok-kelompok elite bersaing dalam memengaruhi keputusan publik tentang berbagai macam isu sosial. Dalam masyarakat, sumberdaya (sebagai dasar tindakan politik) dan kepentingan (sebagai tujuan aktor-aktor politik) beragam—dan karena itulah terdapat pluralisme elite. Karya Robert A. Dahl tentang dinamika politik lokal di New Haven, Yale (1963), bisa dilihat sebagai suatu usaha yang bagus yang memperkuat gagasan Schumpeterian tentang elite ini.

Selain itu, dari Schumpeter, kaum pluralis belajar bahwa meskipun ekonomi dan politik sangat berkaitan, masing-masing harus dilihat sebagai suatu wilayah yang otonom.³ Gagasan ini membuka jalan bagi kaum pluralis untuk meyakini bahwa jika sebuah sistem secara ekonomi tidak setara, hal itu tidak niscaya berarti bahwa ia juga secara politik represif. Ketidaksetaraan ekonomi pada dasarnya bisa hadir bersama dengan demokrasi politik. Apa yang dibutuhkan sebuah sistem untuk menjadi demokratis, selain persaingan elite untuk merebut hati rakyat, adalah aturan permainan yang adil dan perlindungan terhadap hak-hak politik dasar.

2 Marx, Mosca, dan Michels mengandaikan bahwa elite berkuasa yang padu itu ada, karena keharusan di wilayah produksi, atau karena hukum organisasi yang kompleks, atau karena logika pengelompokan politik.

3 Dalam *Capitalism, Socialism, and Democracy* (1950) karya Schumpeter, kapitalisme dan sosialisme adalah wilayah ekonomi, sedangkan demokrasi adalah wilayah politik. “Politik tidak tergantung ekonomi” dipahami dari argumennya bahwa demokrasi bisa berkembang baik dalam kapitalisme maupun sosialisme. Tidak satu hal pun dalam wilayah ekonomi yang dapat memengaruhi wilayah politik secara deterministik.

Gagasan inilah dasar argumen bahwa tindakan politik tidak niscaya berkaitan dengan hasil-hasil di wilayah ekonomi. Karena itu, kaum pluralis berpendapat bahwa meskipun terdapat tindakan-tindakan politik yang kuat yang mendukung kebijakan-kebijakan yang lebih distributif, hasilnya dalam bentuk berbagai kebijakan tidak niscaya akan mengubah kondisi ketidaksetaraan ekonomi tersebut. Apa yang juga mungkin adalah bahwa meskipun hanya terdapat partisipasi politik yang sangat lemah, kondisi ketidaksetaraan tersebut mungkin berubah.

Semua itu adalah beberapa gagasan dasar yang menjadi sandaran posisi kaum pluralis. Untuk bisa sungguh-sungguh membongkar pandangan kaum pluralis, gagasan-gagasan tersebut harus ditunjukkan sebagai gagasan-gagasan yang salah. Karya Gaventa, jika karya tersebut dipahami sebagai sebuah karya teoretis, bisa dilihat sebagai usaha untuk melakukan hal tersebut.

Pertama, tentang elite-elite yang berkuasa. Dalam bidang yang ia pelajari, elite-elite berkuasa bagi Gaventa terutama berarti para pemimpin lokal dalam organisasi-organisasi lokal (partai, perusahaan, serikat buruh, gereja, sekolah, pemerintah lokal, dll.). Elite-elite tersebut, menurut Gaventa, mungkin tampak beragam “di puncak”. Namun, “dilihat dari bawah”, elite-elite tersebut tampak “pada dasarnya seragam”.

Klaim ini, jika benar, merupakan pukulan berat bagi kaum pluralis. Sayangnya, jika kita mengkaji penjelasan Gaventa secara cermat, sulit untuk tidak melihat bahwa terdapat lubang-lubang besar dan argumen-argumen yang lemah dalam penjelasannya. Bagaimana bisa para pebisnis, kaum liberal, kaum komunis, para aktivis serikat buruh yang bekerja di Clear Fork Valley dilihat sebagai anggota kekuasaan konspirasi yang sama?

Kenyataan bahwa mereka semua tidak mengangkat isu-isu yang, bagi si pengamat, relevan dalam mengubah keadaan ketidaksetaraan tersebut tidak cukup memadai untuk membuat kita menyimpulkan bahwa mereka adalah bagian dari suatu

kekuasaan konspirasi yang sama. Untuk memperlihatkan bahwa temuan-temuannya dalam satu kasus tertentu di wilayah tertentu (jika hal ini benar secara empiris) juga relevan untuk mempelajari kasus-kasus lain di tempat-tempat lain, Gaventa perlu mengembangkan suatu rumusan teoretis yang memberi dasar bagi kita untuk memahami, misalnya, bahwa kepentingan-kepentingan para pebisnis (mereka yang yakin pada usaha yang bebas) dan kaum komunis (mereka yang mendukung penghapusan hak milik) adalah sama.

Gaventa tidak membuat rumusan teoretis ini. Menurut saya, ia tidak melakukannya karena hal itu akan membawa dia pada posisi yang sangat sulit: Ia dapat dengan mudah dianggap abai terhadap sejarah pertarungan-pertarungan politik besar selama abad ke-20.⁴

Dalam sejarah politik AS, pemberlakuan Akta Wagner pada 1935 bukan merupakan dampak dari kesepakatan yang harmonis antara serikat-serikat buruh dan kaum industrialis, melainkan merupakan dampak dari pertarungan yang panjang dan menyakitkan antara keduanya (lihat Goldman, 1956)]. Sebuah teori yang memperlihatkan bahwa kepentingan-kepentingan utama kaum Marxis radikal, para aktivis serikat buruh, dan kaum industrialis pasar bebas pada dasarnya sama dalam memelihara suatu bentuk hubungan kekuasaan tertentu, baik regional maupun nasional, akan memunculkan banyak pertanyaan yang sulit, jika bukan mustahil, untuk dijawab.

Secara empiris, ketika Gaventa mencoba untuk memperlihatkan bahwa para pemimpin lokal di Clear Folk Valley pada dasarnya seragam, ia gagal meyakinkan kita bahwa tidak ada

4 Salah satu pertarungan politik paling penting pada abad ini terjadi di negara-negara kapitalis maju dalam mengusung perjuangan kaum miskin, kaum buruh, dan mereka yang lemah. Hal ini menyebabkan terbentuknya negara kesejahteraan, ekonomi campuran, di hampir semua negara tersebut. Akan lucu jika berkata, misalnya, bahwa dalam pertarungan-pertarungan besar ini kepentingan para pemimpin buruh dan para pemimpin bisnis adalah sama.

jalan lain yang mungkin yang membawa kita pada kesimpulan bahwa mereka, para pemimpin lokal tersebut, pada dasarnya tidak seragam. Pada awal dan pertengahan 1930-an, menurut Gaventa, ada gelombang pasang aktivisme politik di wilayah itu. Kaum liberal utara datang ke lembah itu dan, bersama dengan para pemimpin liberal lokal, berusaha untuk membantu para penambang yang tertindas dengan mengangkat isu-isu tentang hak-hak sipil (misalnya kebebasan berekspresi). Para pemimpin dan aktivis buruh tersebut, lokal dan nasional, terlepas dari konflik-konflik internal mereka yang menyakitkan, berhasil mengusung kepentingan para penambang lokal itu untuk mendapatkan tunjangan pensiun yang lebih baik, gaji yang lebih baik, dll. (bukan tanpa ketidaksepakatan dari para pemimpin perusahaan).

Bagi saya, dan saya yakin juga bagi sebagian besar kaum pluralis, contoh kecil tentang adanya pemimpin-pemimpin yang berbeda dengan berbagai kepentingan yang juga berbeda ini cukup memperlihatkan bahwa tidak ada elite penguasa yang seragam di lembah tersebut. Bagi Gaventa, kita tahu, perbedaan-perbedaan tersebut tidak memadai. Gaventa terlalu banyak menuntut: baginya, apa yang terjadi tampaknya adalah bahwa kecuali jika terdapat seorang pemimpin yang memimpin para penambang untuk memberontak demi membalikkan sistem ekonomi, kita tidak bisa berkata bahwa tidak ada yang disebut sebagai elite berkuasa yang seragam.

Sekarang tentang ketidakaktifan dalam kondisi ketidaksetaraan. Dalam penjelasan di bukunya, Gaventa tidak memberi penjelasan secara khusus jenis tindakan apa yang diperlukan untuk memecahkan persoalan ketidaksetaraan tersebut. Di beberapa bagian buku itu kita mendapatkan kesan bahwa apa yang ia maksud dengan tindakan yang signifikan untuk meng-

ubah kondisi ketidaksetaraan adalah pemberontakan besar-besaran untuk mengganti struktur produksi industrial-kapitalis tersebut.

Apakah memadai jika menyimpulkan bahwa karena jenis pemberontakan tersebut tidak ada, orang-orang dengan demikian tunduk begitu saja dan tidak-aktif? Jawabannya bergantung pada konsepsi kita tentang sebab ketidaksetaraan dan bentuk tindakan yang yang bisa memecahkan masalah itu. Andaikan bahwa seseorang tidak memiliki kebencian Gaventa terhadap kaum kapitalis industri, andaikan bahwa seseorang percaya bahwa kapitalisme industri tidak niscaya jahat dan bukan merupakan sumber ketidaksetaraan di lembah tersebut (keyakinan ini, menurut saya, masih harus dibuktikan secara empiris dalam kasus-kasus tertentu di wilayah itu), keseluruhan struktur argumen Gaventa tentang tindakan dan non-tindakan tersebut akan sangat kurang bisa dipertahankan.

Orang bisa saja percaya bahwa tanpa pemberontakan terhadap keseluruhan struktur kapitalisme industri tersebut, reformasi-reformasi bertahap mungkin dilakukan dalam masyarakat-masyarakat kapitalis, lokal atau nasional. Di sini tindakan-tindakan “sederhana” seperti pemungutan suara, pemilihan para pemimpin lokal, dan penguatan pemerintahan lokal dianggap berkaitan, secara tidak langsung (yakni tidak deterministik), dengan proses reformasi bertahap tersebut.

Gaventa tidak memberikan bukti apapun bahwa orang-orang tidak memilih apa yang mereka anggap sebagai para wakil mereka dalam organisasi-organisasi lokal (apa yang tampaknya diandaikan Gaventa adalah bahwa orang-orang salah memilih karena mereka “ditipu” oleh para elite penguasa). Dalam hal ini, kaum pluralis berargumen bahwa karena orang-orang tersebut benar-benar memberikan suara mereka, dan karena para elite penguasa tidak seragam, sistem politik tersebut tidak mandek karena kepasifan. Mereka mungkin memilih

para pemimpin yang salah, atau menanggapi isu-isu yang salah—namun hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak aktif atau semata-mata tunduk pada kondisi ketidaksetaraan tersebut. Selain itu, hal ini juga tidak berarti bahwa, jika ketidaksetaraan tersebut terus terjadi, tindakan-tindakan politik “sederhana” itu (misalnya pemungutan suara, pemilihan para pemimpin lokal) harus dianggap sebagai tindakan-tindakan “salah” yang didasarkan pada kesadaran yang salah. Seperti telah saya perlihatkan di atas, bagi kaum pluralis, tindakan-tindakan politik tidak niscaya berkaitan dengan hasil-hasil kebijakan di wilayah ekonomi.

Kasus terkuat yang disajikan Gaventa untuk menyangkal kaum pluralis adalah penjelasannya bahwa karena terdapat manipulasi kekuasaan yang begitu besar dan sistematis yang dilakukan praktis oleh semua elite lokal dan nasional, orang-orang di lembah tersebut tidak dapat berpikir atau bertindak “secara tepat” sesuai dengan “kepentingan terbaik” mereka. Kekuasaan berfungsi untuk memanipulasi kekuasaan: rakyat dengan demikian dibiarkan tak berdaya, lemah, tunduk.

Sekali lagi, jika benar, penjelasan ini merupakan suatu pukulan berat bagi kaum pluralis, karena tidak ada pertimbangan “rasional” yang bisa dilakukan dalam kondisi manipulasi kekuasaan yang begitu besar dan sistematis (tidak ada, misalnya, pilihan-pilihan alternatif yang signifikan bagi rakyat untuk berpikir). Namun di sini kita harus sangat berhati-hati. Menuduh seseorang melakukan suatu manipulasi kekuasaan yang begitu besar dan sistematis merupakan suatu hal besar. Bagaimana Gaventa menopang tuduhan ini?

Gaventa percaya bahwa sekolah-sekolah lokal (lembaga yang oleh kaum pluralis dianggap sebagai salah satu lembaga paling penting guna meningkatkan kemampuan manusia dalam memilih apa yang terbaik bagi diri mereka) merupakan salah satu alat kontrol dan manipulasi oleh para elite industri. Namun

sangat aneh bahwa dalam menyajikan salah satu kasusnya yang mungkin terkuat, Gaventa samasekali tidak menjelaskan dengan cara apa kita harus melihat dan memahami proses manipulasi dalam sekolah-sekolah ini. Apa yang ia katakan hanyalah bahwa sekolah-sekolah dikontrol dan dimanipulasi karena sangat sering elite-elite industri mengangkat para guru dan membayar pemeliharaan bangunan-bangunan sekolah. Jika kita setuju dengan jenis argumen simplistik ini, kita harus percaya bahwa pada dasarnya semua profesor di universitas Amerika tidak mampu berpikir kritis terhadap kapitalisme industri atau negara yang didasarkan pada ekonomi kapitalis.

Contoh-contoh lain juga menarik. Para pemimpin liberal yang, seperti telah saya katakan sebelumnya, ingin mendukung perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi di lembah tersebut oleh Gaventa dianggap sebagai bagian dari para elite konspiratif yang memanipulasi rakyat. Alasannya: perjuangan untuk menegakkan kebebasan berekspresi tersebut menyimpangkan perhatian rakyat dari persoalan-persoalan “riil”. Namun bagaimana kita bisa memahami apa itu persoalan-persoalan “riil” rakyat tanpa pertama-tama memberi mereka kebebasan untuk mengungkapkan kehendak mereka? Di sini Gaventa tampak tidak memahami pelajaran besar yang bisa diambil dari sejarah despotisme—persoalan-persoalan “riil” rakyat sangat sering dimanfaatkan oleh para despot untuk memaksa rakyat untuk tidak mengungkapkan kehendak mereka.

Para pemimpin dan aktivis serikat buruh juga dituduh manipulatif, kali ini karena alasan yang berbeda. Gaventa mengakui bahwa sejak 1930-an hingga 1960-an, dengan dibantu oleh para pemimpin serikat buruh, terjadi peningkatan keamanan kerja, upah, tunjangan pensiun, dan sistem kesehatan pekerja. Namun bagi Gaventa ini semua hanyalah “pencapaian-pencapaian pragmatis” yang hanya meningkatkan “kepatuhan buta” para pekerja.

Namun apa itu “pencapaian-pencapaian pragmatis”? Bagi Gaventa hal ini harus dilawankan dengan “pencapaian-pencapaian substantif”. Masalahnya adalah mengapa peningkatan dalam jaminan kesehatan, tunjangan pensiun, upah, dan keamanan kerja tersebut dianggap hanya sebagai sesuatu yang pragmatis, bukan substansial? Apakah merupakan keputusan yang salah bagi para pekerja untuk memilih tunjangan pensiun yang lebih baik dan tempat kerja yang lebih aman? Menurut saya, di sini Gaventa telah bergerak terlalu jauh. Ia terlalu memberi penekanan pada suatu gagasan abstrak (pemberontakan? Penghapusan struktur kapitalis?) sehingga hal-hal yang sangat penting dalam kehidupan para pekerja hanya dilihat sebagai sesuatu yang “pragmatis”, dengan nada peyoratif. Para pemimpin serikat buruh tersebut, ketimbang dituduh melakukan manipulasi, seharusnya dilihat sebagai orang-orang yang berhasil mendukung perjuangan para pekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Dengan menyajikan contoh-contoh ini saya tidak berarti mengatakan bahwa tidak ada manipulasi kekuasaan di lembah tersebut. Apa yang sedang saya kemukakan adalah bahwa Gaventa tampak terlalu mudah melancarkan pukulannya. Itu bukan cara yang baik dalam menyajikan suatu masalah yang kuat. Semua ini menjadikan kita yakin bahwa jika terdapat manipulasi kekuasaan, maka hal itu tidak akan sistematis sebagaimana yang dikatakan Gaventa.

Masalahnya sekarang adalah: kapan kita dapat berkata bahwa manipulasi kekuasaan sedemikian besar sehingga orang-orang menjadi tidak mampu membuat keputusan-keputusan yang baik bagi diri mereka? Kapan kita dapat berkata bahwa karena tingkat manipulasi yang sedemikian besar tersebut, keputusan apapun yang dibuat orang merupakan keputusan yang “salah”?

Saya harus mengakui bahwa saya masih harus mengkaji jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan ini. Namun ada satu hal

yang jelas bagi saya: bagi kaum pluralis, keputusan orang-orang untuk menjadi lebih setia kepada para pemimpin serikat buruh yang membantu mereka mendapatkan upah dan jaminan kesehatan yang lebih baik tersebut, dan kenyataan bahwa pada dasarnya terdapat kelompok elite yang berbeda-beda di lembah tersebut, menunjukkan bahwa posisi teoretis mereka masih harus diperlihatkan sebagai posisi yang salah.

Daftar Rujukan

1. Gaventa, John, *Power and Powerlessness*, University of Illinois Press, 1980.
2. Cox, Furlong, dan Page, *Power in Capitalist Society*, St. Martin Press, 1985.
3. Ricci, David M., *Community Power and Democratic Theory*, Random House, 1971.
4. Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Harper, 1950.
5. Dahl, Robert, *Who Govern?*, Yale University Press, 1961.
6. Goldman, Eric F., *Rendevouz with Destiny*, Vintage Books, 1956.

Huntington: Dari Keteraturan ke Demokrasi

PROFESOR SAMUEL P. HUNTINGTON dari Harvard University merupakan salah satu dari para ilmuwan politik kontemporer yang memiliki pengaruh intelektual yang kuat di bidangnya.

Pada 1968 bukunya yang sangat terkenal, *Political Order in Changing Society* (Yale University Press), diterbitkan. Buku ini sekarang ini dianggap sebagai karya klasik dalam ilmu perbandingan politik, dan sebuah buku penting bagi para pelajar yang ingin mengkaji berbagai persoalan politik yang dihadapi oleh negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin di tahun-tahun awal modernisasi mereka. Dalam buku ini ia mencoba melihat mengapa, bagaimana, dan dalam kondisi apa keteraturan politik bisa dipelihara.

Pada 1991 *The Third Wave* (University of Oklahoma Press) diterbitkan. Dalam buku ini ia menjelaskan bahwa demokrasi terjadi secara bergelombang, dan bahwa dari 1974 dan seterusnya kita menyaksikan gelombang ketiga demokratisasi. Karjanya tersebut dengan demikian dicurahkan terutama untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana gelombang ketiga demokratisasi ini terjadi.

Dalam tulisan ini saya mencoba untuk mengulas *The Third Wave*. Fokus saya adalah posisi Huntington menyangkut beberapa isu utama seperti keteraturan dan kebebasan, atau stabilitas dan demokrasi. Dalam bagian berikutnya dari tulisan ini saya mencoba membandingkan kedua buku itu, dan melihat bagaimana Huntington, dalam *The Third Wave*, mengubah pendirian yang ia pegang dalam *Political Order*.

Untuk memahami gagasan-gagasan Huntington dan pentingnya buku *Political Order*, akan sangat membantu jika kita mulai dengan gagasan-gagasan utama dari teori-teori perkembangan politik pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia II.

Menurut teori-teori ini, modernisasi politik (perkembangan politik) di Dunia Ketiga mengandaikan runtuhnya tatanan tradisional dan terbentuknya tatanan baru (modern), yang, dalam bentuknya yang mendasar, tidak akan jauh berbeda dari masyarakat modern dan demokratis di dunia Barat.

Karena itu, dalam mengkaji perkembangan politik di Dunia Ketiga, para teoretisi perkembangan politik menawarkan beberapa konsep kunci: urbanisasi, kemelek-hurufan, mobilisasi sosial, munculnya media, diferensiasi struktural, dan sekularisasi budaya. Terlepas dari semua perbedaannya, menurut William Liddle, asumsi dasar dari konsep-konsep kunci ini menunjuk pada satu arah: “demokratisasi [Dunia Ketiga] terjadi menurut garis pengalaman Barat”.⁵

Dengan kata lain, bagi teori-teori perkembangan politik tersebut, demokratisasi akan terjadi di negara-negara Dunia Ketiga sebagai akibat langsung dari kemelek-hurufan yang se-

5 William Liddle, *Comparative Political Science and the Third World*, the Ohio State Univ., unpublished paper.

makin meluas, begitu banyaknya orang yang berpindah dari desa ke perkotaan, transformasi budaya politik, spesifikasi pekerjaan dan ketrampilan, banyaknya informasi yang diham-parkan oleh media, dan seterusnya.

Salah satu contohnya kita bisa melihat pada karya Karl Deutsch. Bagi Deutsch, mobilisasi sosial (“sebuah proses di mana bentuk utama komitmen sosial, ekonomi, dan psikologis lama terkikis atau hancur dan orang menjadi siap menerima pola-pola sosialisasi dan perilaku yang baru”) akan mengarah pada demokratisasi. Dengan mengutip Karl Mannheim, ia menyatakan bahwa hancurnya tatanan lama dan masuknya orang-orang ke dalam pola-pola baru keanggotaan kelompok, organisasi dan komitmen yang relatif stabil merupakan proses “demokratisasi yang mendasar”. Baginya, tugas utama ilmu politik “hanya” membuat pengukuran mobilisasi sosial lebih spesifik, dapat dihitung, dan dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Pemenuhan tugas itu akan menjawab pertanyaan tentang “seberapa besar” mobilisasi sosial diperlukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan (demokratisasi). Pertanyaan tentang “bagaimana” dan “mengapa” demokratisasi terjadi, baginya, telah terjawab oleh konsep mobilisasi sosial tersebut.⁶

Namun rantai krisis dan ketidakstabilan yang terjadi pada periode antara 1950-an dan 1960-an di Dunia Ketiga memperlihatkan kelemahan asumsi dasar tersebut. Alih-alih demokrasi, apa yang terjadi di negara-negara Dunia Ketiga adalah kudeta militer dan revolusi sosial, konflik etnis dan pemerintahan yang otoriter. Tentu saja mobilisasi sosial dan urbanisasi terjadi. Namun negara-negara yang mengalami tingkat mobilisasi sosial yang tinggi dan tingkat pengenalan media

6 Karl W. Deutsch, *Social Mobilization and Political Development*, ASPR LV, September 1961.

yang tinggi (misalnya Meksiko, Brasil, dan Argentina) tidak bebas dari krisis politik; bahkan terdapat kecenderungan bahwa negara-negara ini mengalami tingkat ketegangan sosial yang relatif lebih tinggi dan ketidakstabilan yang lebih parah.

Di sini Huntington muncul dengan berbagai penjelasannya. Ia menyatakan bahwa modernisasi menghamparkan pada “orang-orang tradisional bentuk-bentuk kehidupan baru, standar-standar kesenangan baru, serta kemungkinan-kemungkinan kepuasan baru. Pengalaman ini... memunculkan berbagai keinginan dan kebutuhan baru” (hlm. 53). Dan jika munculnya keinginan dan kebutuhan baru ini tidak terpenuhi, orang-orang dengan mudah akan digiring ke dalam politik. Selain itu, modernisasi mengubah keseimbangan antara wilayah-wilayah pedalaman dan perkotaan. Dengan mendorong orang-orang pedalaman masuk ke perkotaan (urbanisasi) misalnya, modernisasi menghamparkan kekuatan-kekuatan sosial yang secara potensial dapat dimobilisasi secara besar-besaran ke dalam permainan politik perkotaan. Dan dengan terus berkembangnya perkotaan, kelas menengah yang kemudian muncul akan menuntut andil yang lebih besar dalam politik nasional, yang pada gilirannya mendorong orang-orang pedesaan untuk mengimbangi hal itu (*the Green Uprising*).

Pendeknya, kita dapat berkata bahwa bagi Huntington, modernisasi menghasilkan partisipasi politik (yang eksklusif). Semua faktor yang inheren dalam modernisasi—mobilisasi sosial, meluasnya kemelek-hurufan, berubahnya hubungan antara kota dan wilayah pedesaan—menghasilkan lebih banyak “manusia-manusia politik” yang sangat siap untuk terlibat dalam permainan politik. Penting di sini untuk melihat bahwa Huntington tidak membedakan “sebab-sebab yang mendasari” partisipasi politik: orang-orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang korup dan para petinggi militer yang merancang kudeta untuk mendapatkan kekuasaan pada

dasarnya sama. Semua sebab partisipasi digeneralisasi dalam konsep-konsep seperti mobilisasi sosial dan urbanisasi (dalam bagian terakhir tulisan ini, saya akan berusaha untuk menjabarkan implikasi logis dari “generalisasi yang berlebihan” atas sebab-sebab partisipasi politik ini).

Kecuali jika disalurkan melalui berbagai lembaga (lembaga-lembaga politik, terutama partai politik), meningkatnya partisipasi politik yang inheren dalam modernisasi akan menyebabkan ketidakstabilan atau kekacauan politik. Dengan mengutip Talcott Parsons, ia mengatakan bahwa institusionalisasi adalah “proses yang dengannya organisasi dan prosedur mendapatkan nilai dan stabilitas” (hlm. 12). Dengan kata lain, kita dapat mengatakan bahwa bagi Huntington partisipasi yang tak tersalurkan sama artinya dengan para penari yang bergerak tanpa irama, pola, dan sekuens—hasilnya hanyalah gerakan semata, bukan tarian, keliaran, bukan peradaban. Tepatnya, kekurangan lembaga inilah yang merupakan penjelasan utama mengapa selama periode antara 1950-an dan 1960-an di Dunia Ketiga terjadi kudeta demi kudeta, revolusi, ketegangan, dan krisis. Agar gagasannya bisa dijalankan secara ilmiah, Huntington mengajukan beberapa konsep untuk mengukur tingkat institusionalisasi sebuah sistem politik; yakni, adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi. Dengan demikian, bagi Huntington, makin dapat diadaptasi, otonom, kompleks, dan koheren lembaga-lembaga dalam sebuah sistem, maka makin stabililah sistem tersebut.

Jadi, kita dapat berkata bahwa konsep-konsep kunci dalam penjelasan Huntington adalah partisipasi politik dan institusionalisasi. Bagi Huntington, hubungan antara tingkat partisipasi politik dan tingkat institusionalisasi politik menentukan tingkat stabilitas politik. Dengan kata lain, ketidakstabilan politik bergantung pada rasio institusionalisasi dibanding partisipasi. Sebuah sistem politik dengan tingkat institusionalisasi yang ren-

dah dan tingkat partisipasi yang tinggi adalah sebuah sistem yang disebut “*praetorian polity*”, yang dicirikan oleh tingkat ketidakstabilan yang tinggi. Sebaliknya, sebuah sistem dengan rasio institusionalisasi yang tinggi dibanding partisipasi disebut sebagai “*civic polity*”, yang dicirikan oleh keteraturan dan stabilitas politik. Di sini penting juga untuk melihat bahwa Huntington menempatkan Uni Soviet pada tingkat tertinggi dari *civic polity* (tipe-partisipan).

Sebagian dari penekanan Huntington yang kuat pada institusi dan institusionalisasi dapat ditemukan dalam penjabarannya tentang hubungan antara lembaga politik dan kepentingan publik. Huntington mendefinisikan kepentingan publik “dalam kaitannya dengan kepentingan konkret pemerintah”. Ia juga mengatakan bahwa kepentingan publik adalah “apapun yang memperkuat institusi pemerintahan”. Di sini dia mengaburkan garis pemisah antara kepentingan publik (tujuan) dan lembaga politik (sarana)—dan ketika dia pada akhirnya berkata bahwa “kepentingan publik adalah kepentingan lembaga publik”, ia pada dasarnya sepenuhnya menghapuskan garis pemisah itu: ia menyamakan kepentingan publik dengan lembaga politik (hlm. 24-25). Ia, misalnya, berkata bahwa “apa yang baik bagi Kepresidenan [AS] adalah baik bagi negeri itu... kekuasaan kepresidenan sama dengan kebaikan masyarakat” (hlm. 26). Contoh lain yang menarik adalah pandangannya bahwa lembaga-lembaga pemerintah hendaknya mendapatkan legitimasi dan otoritas mereka:

bukan dari tingkat di mana mereka mewakili kepentingan rakyat atau suatu kelompok, melainkan dari tingkat di mana mereka memiliki kepentingan-kepentingan yang khas terlepas dari semua kelompok lain. Para politisi seringkali berkata bahwa hal-ihwal “tampak berbeda” setelah mereka mendapatkan suatu jabatan dibanding ketika mereka bersaing untuk mendapatkan jabatan tersebut. Perbedaan da-

lam perspektif inilah yang melegitimasi tuntutan pemegang jabatan tersebut pada warga masyarakatnya. (hlm. 27)

Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa Huntington melihat lembaga bukan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan kehendak dan keinginan tertinggi rakyat. Baginya, lembaga adalah tujuan pada dirinya sendiri. Lembaga adalah kepentingan publik. Karena itu, apapun yang baik bagi pemerintah, bagi partai, bagi kepresidenan, maka hal itu pasti baik bagi negeri itu dan rakyatnya. Seorang ilmuwan politik menyebut cara pandang normatif terhadap lembaga ini sebagai suatu “payung moral yang luas”.⁷

Dalam membaca *Political Order*, orang tidak dapat mengabaikan kesan bahwa Huntington menempatkan keteraturan politik dan pemerintahan yang kuat dan otoritatif sebagai tujuan terpenting perkembangan politik. Lebih jauh, keteraturan politik bagi dia tampak bisa menggantikan modernisasi politik. Dalam hal ini, dia menulis bahwa persoalan utama di Dunia Ketiga “bukanlah kebebasan, melainkan pembentukan tatanan publik yang absah” (hlm. 7). Alasannya:

Orang tentu saja bisa memiliki tatanan keteraturan tanpa kebebasan, namun mereka tidak bisa memiliki kebebasan tanpa tatanan keteraturan (*order*). Otoritas harus ada sebelum ia dapat dibatasi, dan otoritas-lah yang jarang ada di negeri-negeri yang sedang mengalami modernisasi tersebut, di mana pemerintah lemah di hadapan kaum intelektual yang terasing, para kolonel yang sangat ambisius, dan para pelajar yang liar. (hlm. 7-8)

Karena kecenderungan kuat untuk menempatkan keteraturan dan otoritas pada tempat tertinggi dari proses politik

7 William Liddle, Op. Cit.

ini, Huntington melihat bahwa perbedaan antara demokrasi dan kediktatoran kurang penting dibanding perbedaan antara pemerintahan yang lemah dan tidak efisien dengan pemerintahan yang kuat dan otoritatif. Dengan kata lain, bagi Huntington, “Distingsi politik paling penting di antara berbagai negara bukan menyangkut bentuk pemerintahan mereka, melainkan menyangkut tingkat pemerintahan mereka.” (hlm. 1)

Ia menempatkan negara-negara komunis totaliter dalam kotak yang sama dengan demokrasi-demokrasi liberal. Ia bahkan memuji yang pertama itu karena efisiensi dan otoritas mereka.

...satu hal yang dapat dilakukan pemerintahan-pemerintahan komunis adalah memerintah; mereka memperlihatkan otoritas yang efektif.

Tantangan nyata yang diperlihatkan kaum komunis terhadap negara-negara yang sedang mengalami modernisasi bukanlah bahwa mereka sangat baik dalam menumbangkan pemerintahan (sesuatu yang mudah), melainkan bahwa mereka sangat bagus dalam membuat pemerintahan (yang merupakan suatu tugas yang jauh lebih sulit). *Mereka mungkin tidak menyediakan kebebasan, namun mereka menyediakan otoritas*; mereka menciptakan pemerintahan-pemerintahan yang benar-benar bisa memerintah. (hlm. 8; huruf miring ditambahkan)

Dengan kata lain, apa yang dikemukakan Huntington adalah bahwa keteraturan pertama-tama harus ada sebelum segala sesuatu yang lain, bahkan dengan mengorbankan kebebasan, sebagaimana yang terjadi di dunia komunis. Dan meskipun Huntington tidak menulis secara eksplisit dan mendetail tentang apa hubungan antara keteraturan dan pemerintahan yang kuat, penjelasan-penjelasanannya cenderung membawa kita pada kesimpulan bahwa sebuah pemerintahan yang kuat adalah prasyarat mutlak bagi keteraturan politik.

Namun mengapa keteraturan dan otoritas yang kuat harus dilihat sebagai sesuatu yang bertentangan dengan kebebasan? Mengapa keteraturan dan kebebasan harus ditempatkan “secara kronologis” (pertama-tama keteraturan, kemudian kebebasan)? Bagi Huntington, hal itu sangat jelas: jawabannya adalah bahwa di Dunia Ketiga, kebebasan akan mendorong partisipasi politik (yang eksekusif), yang pada gilirannya akan menghasilkan kekacauan politik. Dan karena ia menganggap bahwa ketidakstabilan di Dunia Ketiga disebabkan oleh partisipasi politik yang eksekusif tanpa adanya institusionalisasi yang memadai, kita kemudian cenderung menyimpulkan bahwa bagi Huntington Dunia Ketiga cukup memiliki kebebasan. Pendeknya, mengutip kata-katanya sendiri yang dinukil di atas, bukan kebebasan melainkan “otoritaslah yang jarang ada di negeri-negeri yang sedang mengalami modernisasi tersebut”.

The Third Wave

Dalam *Political Order*, sebagaimana yang dapat dilihat di atas, bentuk pemerintahan tidak dianggap sepenting tingkat pemerintahan. Usaha Huntington dengan demikian terpusat pada pertanyaan mengapa, bagaimana, dan dalam keadaan apa keteraturan politik bisa dicapai. Baginya, persoalan utamanya adalah ketidakstabilan politik; dan jawabannya adalah institusionalisasi politik. Dalam *The Third Wave*, sebaliknya, perhatian utamanya berfokus pada bentuk pemerintahan (demokrasi). Di sini dia mencoba untuk menjelaskan mengapa dan bagaimana demokrasi terjadi. Stabilitas atau ketidakstabilan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi dari berbagai pertarungan politik untuk membangun demokrasi tidak dianggap penting bahkan untuk ditulis dalam sebuah sub-bab. Jadi, di sini kita melihat Huntington yang berbeda, dalam pengertian bahwa perhatian utama yang ia geluti sebelumnya (tingkat pemerintahan) telah ditinggalkan, dan digantikan oleh perhatian pada demokrasi.

Sebelum kita bahas lebih jauh, penting untuk melihat secara singkat apa itu demokrasi bagi dia dalam buku ini. Demokrasi, menurut Huntington, baik pada dirinya sendiri. Ia adalah tujuan pada dirinya sendiri. Ia juga memiliki beberapa “fungsi”: “Ia memiliki konsekuensi-konsekuensi positif bagi kebebasan individu, stabilitas dalam negeri, perdamaian internasional, dan Amerika Serikat” (hlm. xv). Dalam hal stabilitas politik, ia mengatakan bahwa sistem demokratis, dengan memberi suatu ruang bagi oposisi dan ekspresi politik, “jauh lebih kebal terhadap pergolakan revolusioner besar dibanding sistem otoriter” (hlm. 29). Pendek kata, bagi Huntington, demokrasi adalah suatu kebaikan bukan hanya karena hakikatnya sebagai pengejawantahan hasrat tertinggi manusia (kebebasan), melainkan juga karena fungsinya sebagai pra-syarat bagi perdamaian dan stabilitas.

The Third Wave memperlihatkan pada kita bahwa proses demokratisasi memiliki fluktuasi dan gelombangnya sendiri. Sebuah gelombang demokratisasi adalah “sebuah kumpulan transisi” menuju pemerintahan demokratis “yang terjadi dalam suatu periode waktu tertentu...”. (hlm. 15). Bagi Huntington, tiga gelombang telah terjadi di dunia modern. Gelombang pertama dan kedua diikuti oleh apa yang dia sebut sebagai “gelombang pembalikan”, yakni kembalinya sekelompok negara ke dalam rezim-rezim yang tidak demokratis.

Gelombang pertama terjadi antara 1828 dan 1926. Ia bermula ketika pemerintah AS menghapuskan syarat-syarat kepemilikan dan mengakui hak pilih universal orang dewasa bagi 50 persen populasi laki-laki kulit putihnya pada pemilu presiden 1828. Gelombang ini berakhir setelah Perang Dunia I ketika Mussolini, Hitler, Salazar berkuasa dan memperkenalkan bentuk baru otoritarianisme di Eropa.

Gelombang kedua terjadi antara 1943 dan 1962. Gelombang ini bermula ketika Tentara Sekutu mengalahkan Jerman, Italia

dan Jepang. Gelombang ini juga ditandai oleh munculnya negara-negara baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang lepas dari kekuasaan kolonial. Banyak dari negara-negara baru ini mencoba untuk mempraktikkan gagasan-gagasan demokratis dengan membentuk suatu jenis prosedur demokratis. Gelombang pembalikan bermula ketika eksperimen-eksperimen dengan demokrasi di negara-negara baru ini gagal, dan otoritarianisme militer atau birokratis mulai menghantui sebagian besar dari negara-negara itu.

Gelombang ketiga mulai pada April 1974. Gelombang ini bermula, sebagaimana yang dengan cerdas dikemukakan Huntington, ketika sebuah stasiun radio memutar lagu “Grândola Vila Morena” di Lisbon, Portugis. Lagu ini merupakan suatu sinyal untuk memulai suatu gerakan militer yang mengakhiri kediktatoran Portugis. Setelah gerakan di Portugis ini, gerakan-gerakan demokratis di seluruh dunia mendapatkan kekuatannya dan muncul sebagai pemenang. Di Yunani, Karamanlis memperoleh suara mayoritas dari rakyat dan meruntuhkan monarki. Di Spanyol, Juan Carlos dan Suarez memperoleh persetujuan umum untuk membentuk majelis baru. Di Filipina, Ny. Aquino memimpin rakyat menghancurkan rezim Marcos. Di negara-negara Komunis, Gorbachev memperoleh kekuasaan untuk mempersiapkan revolusi yang menguburkan sebagian besar rezim totaliter di Rusia dan Eropa Timur. Singkatnya, menurut Huntington, setelah April 1974, “rezim-rezim demokratis menggantikan rezim-rezim otoriter di sekitar 30 negara di Eropa, Asia, dan Amerika Latin. Dan di negara-negara lain, begitu banyak liberalisasi yang terjadi dalam rezim-rezim otoriter” (hlm. 21).

Mengapa gelombang ketiga ini terjadi? Menurut Huntington, ada lima faktor yang memainkan peran yang penting dalam memunculkan gelombang ketiga tersebut.

Pertama, legitimasi rezim-rezim otoriter yang menurun. Sebagai akibat melambungnya harga minyak pada awal dan

akhir 1970-an, rezim-rezim otoriter menghadapi krisis ekonomi. Dengan sedikit pengecualian, menurut Huntington, kebijakan-kebijakan rezim-rezim tersebut untuk mengatasi krisis ini seringkali menjadikan keadaan ekonomi mereka memburuk; angka inflasi yang tinggi, depresi yang berkepanjangan, dan utang yang semakin besar merupakan contoh-contoh hasil kebijakan mereka. Karena semua inilah legitimasi mereka melemah. Di Filipina, misalnya, 90 persen minyaknya merupakan hasil impor. Ketika krisis minyak terjadi, Marcos terpaksa semakin banyak meminjam dari lembaga-lembaga keuangan internasional. Ia harus menukar lebih banyak sumberdaya-sumberdaya ekonomi negeri itu dengan dollar untuk membeli minyak. Hasilnya: dari 1980 dan seterusnya, pendapatan per kapita di Filipina terus-menerus menurun; dan legitimasi Marcos semakin merosot saat krisis ekonomi ini semakin besar. Pendeknya, ketidakmampuan untuk memecahkan krisis ekonomi ini memperlemah alasan mengapa rakyat harus terus mendukung rezim otoriter.

Kedua, perkembangan ekonomi. Selama 1950-an dan 1960-an, dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya belum pernah terjadi. Sebagai akibatnya, pada 1960-an, misalnya, angka GNP negara-negara berkembang naik rata-rata di atas 5 persen. Pada 1970-an, pertumbuhan ekonomi global ini meningkatkan zona transisi ekonomi, dari level \$300-\$500 sebelum-perang ke kisaran \$500-\$1.000. Pertumbuhan ekonomi ini, menurut Huntington, memiliki korelasi positif dengan pertumbuhan demokrasi dalam dua hal. Di satu sisi hal ini memunculkan:

Sebuah perekonomian baru yang jauh lebih beragam, kompleks, dan saling terkait, yang semakin sulit dikontrol oleh rezim-rezim otoriter. *Perkembangan ekonomi tersebut memunculkan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru*

di luar negara dan suatu kebutuhan fungsional untuk memindahkan pembuatan keputusan. (hlm. 65; huruf miring ditambahkan)

Di sisi lain, hal ini mendorong perluasan kelas menengah: “bagian masyarakat yang semakin besar yang terdiri atas orang-orang bisnis, kaum profesional, para pengusaha, para guru, para pegawai negeri, manajer, teknisi, dan para pendeta” (hlm. 66). Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi menyuburkan benih-benih demokrasi dengan menciptakan dan memperluas masyarakat sipil.

Ketiga, berubahnya peran Gereja Katolik Roma. Pada 1970-an, Paus menjadi lebih eksplisit dalam mengutuk pelanggaran hak-hak asasi manusia. Pada 1979, Yohanes Paulus II secara tersurat menyatakan gereja sebagai pengawal kebebasan. Dengan demikian, di negara-negara di mana gereja Katolik memiliki basis yang kuat (yakni, Polandia, Filipina, Amerika Latin), para pendeta sangat terlibat dalam gerakan-gerakan demokratis. Contoh umum tentang bagaimana gereja memiliki andil yang sangat penting dalam membangun demokrasi bisa dilihat di Filipina pada awal 1980-an dan di Polandia pada pertengahan 1980-an.

Keempat, kebijakan-kebijakan global baru dari negara-negara dan organisasi-organisasi besar. “Pada akhir 1980-an,” tulis Huntington, “sumber-sumber utama kekuasaan dan pengaruh di dunia—Vatikan, EEC, Amerika Serikat, Uni Soviet—sangat aktif mendorong liberalisasi dan demokratisasi” (hlm. 86). Amerika Serikat, misalnya. Pada puncak Perang Dingin pada 1960-an dan 1970-an, Amerika lebih memilih untuk mendukung sebuah rezim otoriter daripada mengutuknya dan, karena itu, melihatnya menjadi sebuah negara komunis di bawah pengaruh Uni Soviet. Namun ketika Carter, dan khususnya Reagan, menjadi presiden, keseluruhan bahasa diplomasi global

Amerika berubah. Carter, Reagan—dan kemudian Gorbachev di Uni Soviet—menjadikan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebagai salah satu agenda dunia.

Terakhir, dampak-dampak demonstrasi. Demokratisasi yang berhasil di sebuah negara mendorong demokratisasi di negara-negara lain. Karena revolusi komunikasi dunia melalui Televisi dan mesin fax, efek-efek ini menjadi lebih kuat dibanding yang terjadi pada dua dekade yang lalu. Efek demonstrasi yang paling dramatis, menurut Huntington, terjadi di negara-negara komunis pada akhir 1980-an ketika kekaisaran Soviet mulai runtuh.

Bagi Huntington, kelima faktor ini sangat penting sebagai “lingkungan” yang mempersiapkan jalan menuju demokrasi. Mereka adalah faktor-faktor yang menjadi latar belakang, yang membantu mendorong para aktor politik memajukan demokrasi. Pendeknya, kelima faktor tersebut merupakan sebab-sebab, namun demokrasi pada dasarnya maju dan berkembang karena adanya orang-orang yang memunculkan sebab-sebab tersebut: para aktor politik, para pembaharu di dalam pemerintahan yang ada, dan para pemimpin publik. Jadi, jika kita menganggap kelima faktor tersebut sebagai dorongan-dorongan sejarah, maka tindakan para aktor tersebut dalam perjuangan mereka mencapai demokrasi bisa dianggap sebagai membuat sejarah menjadi realitas. Tindakan dan interaksi aktor-aktor ini dengan demikian menentukan bagaimana demokrasi berjalan.

Menyangkut hal ini, menurut Huntington, kita bisa mengidentifikasi tiga jenis proses demokratik. Pertama, transformasi. Di sini para aktornya adalah mereka yang berkuasa dalam rezim otoriter. Mereka memainkan peran penting dalam mengakhiri rezim otoriter tersebut dan mengubahnya menjadi sebuah rezim yang demokratis. Dengan kata lain, ini adalah suatu proses dari atas ke bawah. Kasus yang paling penting dari jenis ini terjadi di Uni Soviet, ketika Gorbachev berkuasa.

Proses jenis ini terjadi terutama karena tidak terdapat oposisi yang signifikan di luar rezim tersebut, dan juga karena tidak adanya basis masyarakat sipil yang kuat. Ini juga terjadi karena para pembaharu di dalam rezim tersebut merasa bahwa keberlanjutan kekuasaan mereka hanya bisa terjaga jika mereka berhasil mereformasi sistem otoriter yang ada. Menurut Huntington, pada akhir 1980-an, jenis demokratisasi ini terjadi pada enam belas dari tiga puluh lima negara yang tercakup dalam gelombang ketiga tersebut.

Kedua, penggantian. Di sini, berlawanan dengan proses transformasi tersebut, demokratisasi terjadi karena didorong oleh para pemimpin di luar rezim otoriter tersebut. Para pembaharu di dalam rezim itu lemah atau bahkan tidak ada. Kekuasaan diperoleh para pemimpin oposisi karena rezim tersebut menjadi semakin lemah. Penggantian umumnya terjadi pada rezim yang dianggap sebagai kediktatoran personal, sebagaimana yang terlihat di Filipina (Marcos), Rumania (Ceaucescu) dan Jerman Timur (Honecker).

Ketiga, *transplacement*. Dalam jenis ini, para pembaharu dan kaum oposisi bekerjasama untuk mengakhiri rezim yang ada dan menggantikannya dengan rezim demokratis. Di sini para pembaharu tersebut tidak mampu untuk mentransformasi sistem itu sendiri baik karena terdapat suatu koalisi yang sangat kuat di dalam pemerintahan yang memiliki kepentingan yang berlawanan dengan reformasi maupun karena mereka tidak melihat alasan yang cukup bagus untuk mempertaruhkan posisi yang mereka pegang di hadapan ketidakpastian perubahan. Karena itu, mereka harus dibantu dan didorong oleh tekanan-tekanan yang berasal dari kaum oposisi. Contoh kasus dari jenis ini adalah transisi panjang di Korea Selatan dan Polandia pada pertengahan 1980-an. Selama 1970-an dan 1980-an, menurut Huntington, sebelas negara mengalami jenis demokratisasi seperti ini.

Setelah menjelaskan apa itu gelombang ketiga demokratisasi, mengapa dan bagaimana hal itu terjadi, Huntington menutup bukunya dengan bertanya apakah gelombang ketiga yang sekarang kita alami tersebut akan berlangsung terus atau akan segera diikuti oleh gelombang pembalikan ketiga. Ia mengatakan bahwa bagian terakhir bukunya tidak dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun dari bagian akhir bukunya kita tahu bahwa baginya nasib demokratisasi, perluasan dan stabilitasnya, akan bergantung pada beberapa faktor, dan yang paling penting di antaranya adalah faktor-faktor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kepemimpinan yang mumpuni. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, pertumbuhan ekonomi memunculkan masyarakat sipil. Ia memunculkan orang-orang yang merasa bahwa kebebasan bukan merupakan gantinya roti—dan para pemimpin yang baik adalah mereka yang memahami perasaan ini, dan bekerja keras untuk mewujudkannya. “Pertumbuhan ekonomi,” kata Huntington, “membuat demokrasi menjadi mungkin; kepemimpinan politik menjadikannya nyata” (hlm. 316).

Dengan mengulas *Political Order* dan *The Third Wave* sebagaimana yang kita lakukan di atas, kita bisa melihat bagaimana Huntington telah berubah dalam mendefinisikan persoalan utama proses politik. Dalam buku yang pertama, persoalannya adalah ketidakstabilan politik; dalam buku yang kedua, apa yang ia tulis sepenuhnya tentang proses demokratisasi. Buku yang pertama jelas memiliki andil yang sangat signifikan dalam wacana di bidang perkembangan politik; sementara arti penting buku yang kedua dapat dilihat dari ringkasannya yang cerdas atas banyak karya intelektual sebelumnya yang mengkaji persoalan mengapa dan bagaimana demokratisasi terjadi.

Tentang *Political Order*, kritik kita dapat diringkaskan dalam paragraf berikut:

Kita telah melihat bahwa Huntington tidak membedakan sumber-sumber otoritas. Sebuah pemerintahan yang mendapatkan otoritasnya dari teror dan penindasan yang kejam ditempatkan dalam kotak yang sama dengan pemerintahan yang mendapatkan otoritasnya dari kebebasan. Persoalan teror atau kebebasan dengan demikian kurang penting dibanding persoalan kuat dan efektifnya sebuah pemerintahan. Dengan memuji negara-negara komunis, Huntington menjadikan kita berpikir bahwa tidak masalah jika kebebasan dihancurkan asalkan otoritas yang kuat bisa dibangun. Namun sebagaimana yang terlihat dari runtuhnya negara-negara komunis, otoritas yang kuat tanpa kebebasan bak rumah yang didirikan di atas pasir. Di sini kita juga bisa berkata bahwa sebuah otoritas yang kuat tidak niscaya berarti sebuah pemerintahan yang efektif: birokrasi-birokrasi komunis gagal untuk secara efektif menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang paling dasar dan sederhana bagi warga masyarakatnya.

Huntington juga melakukan hal yang sama menyangkut sumber-sumber partisipasi politik. Semua jenis partisipasi digeneralisasi dalam sebuah istilah yang sangat luas, yakni mobilisasi sosial. Hal ini dengan demikian menyangkal relevansi perbedaan antara para kolonel yang bernafsu akan kekuasaan dan melancarkan kudeta, dan para mahasiswa, kaum intelektual, dan para aktor politik yang lain yang melibatkan diri mereka dalam perjuangan politik karena tuntutan mereka akan kebebasan dan hak-hak asasi manusia. Bagi Huntington, dalam *Political Order*, para kolonel, intelektual, dan mahasiswa tersebut sama: mereka semua adalah instrumen kekacauan politik di Dunia Ketiga.

Dengan mengabaikan sumber-sumber otoritas dan partisipasi, ia juga tampak menutup mata terhadap kemungkinan bahwa

sebuah otoritas yang kuat bisa menyalahgunakan kekuasaannya dan menyebabkan terjadinya ketidakstabilan. Baginya pemerintah adalah kepentingan publik, dan kita mendapatkan kesan dari penjelasan-penjelasanannya bahwa kepentingan publik yang paling utama adalah keteraturan politik. Namun, dalam kenyataannya, sebagaimana yang dikemukakan Mark Kesselman, banyak pemerintahan kuat di Dunia Ketiga, demi untuk melanggengkan kekuasaan hegemonik mereka, “sangat suka *melucuti* lembaga-lembaga yang ada (parlemen, pemilu)”.⁸ Dengan kata lain, pemerintahan yang kuat—dan bukan hanya para kolonel, kaum intelektual yang “terasing”, dan para mahasiswa—juga bisa menjadi faktor penyebab kekacauan politik.

Dengan demikian, Huntington, dalam *Political Order*, sebagaimana yang dikemukakan Mark Kesselman, tidak memberi ruang bagi pembenaran untuk menentang otoritas, meskipun otoritas tersebut korup.⁹ Di sini dia dengan mudah dapat dianggap sebagai seorang pembela otoritas yang korup, seorang konservatif yang lebih memilih “kedamaian dengan penindasan” ketimbang ketidakpastian perubahan yang dimunculkan oleh perjuangan untuk mengejawantahkan kebebasan dan keadilan.

Selain itu, penjelasan-penjelasan Huntington juga mengandaikan bahwa keteraturan politik harus dilihat dalam kaitannya dengan partai politik. Baginya, sebuah otoritas yang kuat hanya bisa diteguhkan jika ia didasarkan pada partai-partai politik yang kuat. Namun di sini Huntington melihat partai politik terutama sebagai instrumen keteraturan politik, bukan instrumen perwakilan atau kontrol. Itulah mengapa ia menganggap bahwa salah satu ukuran kekuatan partai adalah “otonomi”. Sebuah partai politik kuat sampai tingkat di mana ia

8 Mark Kesselman, “Order or Movement? The Literature of Political Development as Ideology”, *World Politics* XXVI, Oktober 1973.

9 Kesselman, *Ibid.*

dapat menolak berbagai pengaruh dari kelompok dan lembaga apapun selain dirinya sendiri. Partai adalah sebuah lembaga yang bukan *oleh* dan *untuk* rakyat; ia adalah lembaga yang ditujukan untuk kestabilan sistem.

Karena itu, baginya, pentingnya partai di Dunia Ketiga hanya terbatas sampai tingkat di mana mereka bisa menampung ledakan partisipasi yang dimunculkan oleh modernisasi. Posisinya dalam hal kebebasan masih sama: tidak ada satu hal pun dalam tulisannya tentang partai-partai politik yang menyebutkan bahwa keberadaan mereka penting sebagai pengejawantahan kebebasan, dan bukan hanya untuk alasan instrumental, stabilitas. Dengan kata lain, bahkan ketika ia berbicara tentang partai-partai politik, ia masih terus menggumamkan filosofi utamanya: “manusia bisa memiliki keteraturan tanpa kebebasan, namun mereka tidak bisa memiliki kebebasan tanpa keteraturan”.

Dalam *The Third Wave* posisinya berubah. Transisi dari kekuasaan totaliter dan otoriter bukannya tanpa ongkos: ketidakstabilan dan ketidakpastian. Sebagaimana yang terlihat dari sejarah di negara-negara bekas komunis belakangan ini, demokratisasi sampai tingkat tertentu selalu disertai oleh kekerasan dan kekacauan politik. Jika Huntington meyakini posisi yang sama, ia akan menulis tentang gelombang ketiga demokratisasi itu dalam nada yang skeptis. Ia akan mengutuk Gorbachev atas tindakan-tindakannya yang menyebabkan merosotnya otoritas pemerintahan yang “kuat”. Ia akan menulis beberapa nasihat bagi para mahasiswa di Cina bagaimana bagaimana melakukan demokratisasi dengan masuk partai (komunis).

Sebaliknya, kita bisa merasa bahwa Huntington menulis *The Third Wave* dengan optimisme yang tinggi dan dengan senang hati. Ia bahkan memberikan saran tentang bagaimana mengakhiri rezim-rezim otoriter, dan berkata: “Jika [nasihat yang penuh nilai] itu menjadikan saya tampak seperti seseorang yang ingin menjadi seorang Machiavelli demokratis, biar sa-

jalah” (hlm. xv). Di sini ia melihat bahwa modernisasi [pertumbuhan ekonomi] bukan lagi merupakan *persoalan* bagi perkembangan politik; hal itu kini dilihat sebagai sebuah *potensi*, yang menjadikan manusia dan organisasi mampu berjuang demi kebebasan. Ia juga melihat, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sistem-sistem demokratik, dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi ekspresi dan oposisi politik, jauh lebih aman dari berbagai ketidakstabilan politik besar.

Dalam pengertian ini, bisa dikatakan bahwa *The Third Wave* merupakan suatu deklarasi tentang bagaimana posisi Huntington sebelumnya telah ditinggalkan.

Pergeseran posisi Huntington tersebut mungkin paling baik dipahami dari perspektif bagaimana sejarah itu sendiri berubah. Pada 1950-an dan 1960-an sejarah kita dicirikan oleh berbagai pergolakan politik besar yang disertai dengan tingkat kekerasan yang tinggi. Prague Spring, Revolusi Budaya, Perang Arab-Israel, Perang Vietnam, Krisis Kuba, pembunuhan massal komunis di Indonesia, dan banyak peristiwa lain yang menggambarkan patologi politik. Di Amerika Serikat sendiri, 1960-an merupakan salah satu dekade yang paling bergejolak: pembunuhan John dan Bob Kennedy, Martin Luther King, dan Malcom X, gerakan orang-orang kulit hitam, dan gerakan mahasiswa anti-perang dan anti-kemapanan.

Semua peristiwa ini memberi kesan bahwa dunia berada dalam kekuasaan anarki, dan bahwa tugas utama seorang pemimpin yang cakap adalah menciptakan suatu jenis keteraturan. Dan, bagi seorang profesor di salah satu lembaga terbaik di dunia, Universitas Harvard, yang secara mendalam membaca filsafat Burke, Niebuhr, dan Madison, tidak ada jawaban lain yang lebih masuk akal bagi persoalan ini selain konservatisme: suatu pemikiran dan kecenderungan politik bahwa memelihara keteraturan, menjaga lembaga yang ada di tengah-tengah berbagai perubahan yang bergejolak secara moral unggul.

Namun sejarah berubah. Pada 1980-an kita melihat kegagalan pemerintahan militer di banyak negara Dunia Ketiga. Selain itu, kita juga melihat “Kegagalan Besar” rezim-rezim sosialis, yang mengakhiri Perang Dingin. Perubahan-perubahan ini memunculkan suatu gelombang baru optimisme—kita sadar: salah satu babak yang paling berbahaya dalam sejarah telah berlalu.

Perubahan-perubahan inilah, menurut saya, yang memengaruhi Huntington sehingga membuatnya kurang skeptis terhadap ketidakpastian kemajuan politik. Ia tidak bisa menahan gelombang optimisme baru tersebut.

Guncangan Besar

DALAM ILMU SOSIAL, perubahan sosial adalah sebuah tema klasik yang selalu menarik untuk dibahas. Bahkan bisa dikatakan justru tema inilah yang mendorong lahirnya sebuah studi baru pada abad ke-19 yang disebut sosiologi. Para pelopor cabang ilmu ini, seperti Ferdinand Tönnies, Emile Durkheim, dan Max Weber, dengan cara masing-masing mencoba merumuskan teori-teori sosial berdasarkan gejala perubahan dalam masyarakat yang mereka amati. Konsep-konsep yang mereka lahirkan, seperti *anomie*, *gemeinschaft*, dan *gesellschaft*, menjadi acuan untuk menggambarkan proses serta akibat dari perubahan besar yang sedang terjadi di Eropa saat itu, yaitu perubahan dari masyarakat pertanian ke masyarakat industri yang didorong oleh perluasan sistem kapitalisme serta oleh serangkaian penemuan teknologi baru, seperti mesin uap, kereta api, dan telegram.

Dalam buku *Guncangan Besar*, Francis Fukuyama mencoba meneruskan tradisi keilmuan semacam itu dengan melihat apa yang terjadi pada paruh kedua abad ke-20 hingga saat ini. Futuris seperti Alvin Toffler telah menggambarkan bahwa setelah era industri, masyarakat modern memasuki era informasi. Beberapa pemikir lain mengatakan bahwa masyarakat semacam

ini adalah masyarakat yang pasca-modern, pasca-industri, dan pasca-kapitalis. Fukuyama tidak menciptakan istilah tersendiri mengenai karakteristik masyarakat yang dibahasnya. Ia pada dasarnya setuju bahwa setelah tahap pertanian dan industri, masyarakat modern memang terus mengalami proses perubahan besar yang memengaruhi setiap dimensi kehidupan manusia, di mana pun mereka berada.

Fokus bahasan Fukuyama di *Guncangan Besar* bukanlah pada perubahan itu sendiri, tetapi lebih pada akibatnya terhadap tatanan masyarakat, yaitu pada himpunan individu-individu yang berhubungan satu dengan yang lain, menurut aturan-aturan yang diterima bersama, baik secara formal (hukum) maupun secara informal (etika, moralitas). Bagi dia, perubahan karakteristik masyarakat di Amerika Serikat mengakibatkan terjadinya guncangan besar, *the great disruption*, yang terjadi sekitar 1960-an dan 1970-an, yang dicirikan oleh meningkatnya secara drastis sejumlah indikator patologi sosial, seperti tingkat kriminalitas, perceraian, dan kehancuran kehidupan rumah-tangga. Dengan cara ini, Fukuyama ingin berkata bahwa pada akhirnya, perubahan besar yang terjadi dalam dunia perdagangan, ilmu, dan teknologi akan membawa dampak yang nyata dan tidak selalu positif terhadap kehidupan yang bersifat “mikro”, misalnya hubungan suami-istri, peranan wanita dalam rumah-tangga, dan perilaku sosial kaum remaja.

Konsep dasar yang ditawarkan oleh Fukuyama dalam *Guncangan Besar* adalah modal sosial. Konsep ini diperkenalkan pertama kali oleh L.I. Hanifan pada awal abad ke-20, dan telah cukup sering digunakan oleh kaum sosiolog dalam berbagai kesempatan. Robert Putnam, misalnya, menggunakan konsep ini untuk menggambarkan dilema demokrasi di Italia dan menurunnya kualitas demokrasi di Amerika Serikat. Namun, “pene-mu” sesungguhnya dari konsep ini adalah seorang pemikir Prancis seabad sebelumnya, Alexis de Tocqueville, yang telah

menulis buku klasik, *Democracy in America* (1840), berdasarkan konsep tentang asosiasi dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Oleh Fukuyama konsep ini dikembangkan lebih jauh dengan memasukkan pemikiran-pemikiran baru yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial mutakhir, seperti teori-teori tentang pilihan rasional dan aksi-aksi kooperatif. Dengan cara ini, pembahasan Fukuyama, walaupun berfokus pada sebuah tema klasik, tidak terasa basi dan membosankan. Malah sebaliknya, tema lama ini menjadi hidup dan menarik perhatian, justru karena kita ingin mengerti bagaimana para pemikir yang ada sekarang melihat sebuah proses yang telah dikupas dan diteliti sejak lahirnya disiplin sosiologi.

Salah satu pendapat Fukuyama yang menarik dibahas lebih lanjut berhubungan dengan kemampuan manusia dalam menghadapi guncangan dan perubahan. Guncangan besar mengakibatkan erosi pada modal sosial. Kepercayaan manusia pada manusia lainnya menipis, kecurigaan dan ketidakjujuran merebak, serta pelanggaran hukum meningkat. Proses kerjasama dalam masyarakat berubah menjadi proses saling memakan dan saling merugikan. Namun, bagi Fukuyama, setelah proses semacam ini akan terjadi proses penataan kembali, dari *disordering* menjadi *reordering of the society*.

Guncangan akan disusul dengan penataan kembali tatanan sosial. Dan hal ini terjadi tidak dalam proses yang dikendalikan oleh otoritas tertentu, seperti pemerintah, korporasi, atau gereja. Daya untuk membangun kembali masyarakat justru terjadi secara alamiah, tidak terpusat, dan dilakukan oleh individu-individu secara spontan. Dalam hal ini Fukuyama mengikuti jejak Friedrich Hayek, filsuf-ekonom Austria yang banyak disebut sebagai pemikir liberal terdepan pada abad ke-20, yang melahirkan konsep *spontaneous order* untuk menggambarkan bagaimana manusia, tanpa diatur siapapun, menciptakan da-

lam masyarakat sistem kerjasama yang menguntungkan semua pihak.

Pada dasarnya, pemikiran semacam ini menaruh harapan dan optimisme besar pada manusia. Manusia dianggap sebagai makhluk yang secara alamiah selalu ingin bekerjasama. Tanpa diminta dan diatur oleh penguasa, pemilik modal, atau pemuka agama sekalipun, manusia akan menciptakan aturan, baik formal maupun informal, di antara mereka sendiri untuk membangun kembali tatanan yang ada.

Pada titik ini kita mungkin tertarik untuk bertanya lebih jauh, apa yang mendorong manusia untuk melakukan hal itu? Apa yang ada di balik dorongan alamiah untuk bekerjasama: kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dan kehormatan, semangat altruisme, ataukah justru kecemasan dan ketakutan? Dalam *Guncangan Besar*, Fukuyama tidak memilih salah satunya—dan hal ini mungkin memang tidak perlu dilakukan. Yang jelas, apapun motivasinya, manusia senantiasa membangun kembali modal sosial setelah terkikis oleh proses perubahan besar, dan dalam banyak hal proses ini dapat menciptakan sebuah masyarakat baru yang lebih baik ketimbang masyarakat sebelumnya.

Yang juga menarik adalah, pada bagian akhir *Guncangan Besar*, Fukuyama membahas proses perubahan, modal sosial, dan hubungannya dengan sistem kapitalisme. Dalam ilmu sosial, pandangan tentang hubungan antara kapitalisme, moralitas, dan kebudayaan secara umum terbagi dalam dua aliran besar. Aliran pertama mengatakan bahwa kapitalisme mengikis moralitas dan merusak tatanan budaya (semakin besar modal ekonomi, semakin kecil modal sosial), sementara aliran yang kedua mengatakan sebaliknya, kapitalisme justru memperkuat moralitas dan memperkaya kebudayaan. Pembagian semacam ini melampaui ideologi kiri atau kanan. Joseph Schumpeter bukannya ekonom kiri, tetapi dalam bukunya yang terkenal, *Capital-*

ism, Socialism, and Democracy (1942), ia berpandangan bahwa kapitalisme mengandung benih yang membahayakan dirinya sendiri sebab semakin ia berkembang, semakin kecil basis legitimasi moral yang ada pada dirinya. Pandangan semacam ini juga dianut oleh kaum kontradiksionis, seperti Daniel Bell, yang tidak termasuk dalam kubu kaum sosialis, lama maupun baru.

Fukuyama menolak simplifikasi satu dimensi dari hubungan modal sosial dan kapitalisme semacam itu. Memang terkesan bahwa ia lebih tertarik ke pendapat kaum pemikir di tradisi kanan. Dalam hal ini, misalnya, Montesquieu berpendapat bahwa kegiatan komersial justru mengajarkan orang pada nilai-nilai tentang kejujuran, kesetiaan pada kontrak, dan penghargaan pada kerja. Namun pada intinya Fukuyama memilih posisi tengah, dengan berkata bahwa kapitalisme dapat secara simultan mengikis dan memperkuat modal sosial. Masalahnya tidak terletak pada hakikat kapitalisme itu sendiri sebagai sebuah sistem pertukaran, tetapi lebih pada dinamika yang berhubungan dengan perubahan dan perkembangan teknologi. Dan dalam hal inilah kita harus melihat dengan lebih jeli, pada kasus seperti apa interaksi antara perubahan teknologi dan kapitalisme mengakibatkan suatu guncangan, dan pada kasus bagaimana ia mendorong terjadinya pembentukan kembali.

Singkatnya, Fukuyama mengajak kita untuk tidak terperangkap pada dogma. Seperti yang ada dalam setiap bukunya, *Guncangan Besar* mengajak kita untuk melihat berbagai hal penting yang terjadi dalam masyarakat dengan kepala dingin, obyektif, dan sistematis. Dan dengan begini, kecemasan maupun harapan yang berlebihan yang biasanya muncul dalam setiap proses transisi masyarakat dapat dihindari.

Jakarta, 31 Maret 2005

Alexis de Tocqueville: Penemu Teori Demokrasi

ABAD KE-19 memiliki ciri khas yang unik dalam sejarah pemikiran. Sejak dimulainya zaman baru eksplorasi ilmu pengetahuan dan zaman pencerahan di abad ke-16, pemikir-pemikir besar yang tampil dengan gagasan-gagasan baru tentang manusia dan masyarakat adalah kaum filsuf, moralis, dan sastrawan. Kecenderungan semacam ini berlangsung hingga akhir abad ke-18, yang melahirkan tokoh-tokoh seperti Voltaire, Rousseau, Adam Smith, Hume, Kant, Montesquieu, dan Locke. Secara politik, abad ini berakhir dengan dua revolusi besar, yaitu Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789), dua peristiwa sejarah yang mengubah dunia dan berhubungan erat dengan arus pemikiran saat itu.

Pada umumnya, tokoh-tokoh dari zaman ini mendasarkan pemikiran mereka pada penelaahan filosofis yang mendalam tentang manusia dan masyarakat serta menjadikan telaah ini sebagai asumsi-asumsi dasar dalam menjelaskan realitas di sekeliling mereka. Untuk itu, tidak jarang mereka harus berkutat dalam dunia epistemologis yang rumit untuk mengerti lebih jauh tentang hakikat manusia, sebab pada umumnya mereka menganggap bahwa manusia dan realitas hanya dapat dimengerti dari apa yang diketahuinya, dari kesadaran dan pengetahuan yang

diperolehnya. Kalau toh tokoh-tokoh ini berbicara mengenai demokrasi, seperti Locke, Hume, dan Rousseau, biasanya mereka berbicara pada tingkat asumsi dan hak-hak dasar, seperti hak-hak alamiah (*natural rights*), manfaat dan hakikat kebebasan, kehendak umum, dan legitimasi serta moralitas hukum yang mengikat masyarakat. Jika mereka membahas sistem ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, seperti Adam Smith, pada umumnya mereka masuk ke wilayah hukum-hukum dasar, peran kebebasan, dan hakikat moralitas ekonomi.

Kaum pemikir di abad ke-19 memang tidak meninggalkan semua ciri khas pemikiran seperti itu. Seperti kata Isaac Newton, dalam dunia pemikiran, seorang tokoh berdiri di pundak tokoh-tokoh pemikir sebelumnya. Tokoh-tokoh pemikir abad ke-19 seperti Hegel, Marx, Spencer, Nietzsche, dan Comte masih berkutat dengan pertanyaan-pertanyaan dari zaman selumnya. Dari sini, sebagian dari mereka, dengan caranya masing-masing, mengembangkan kerangka besar yang melihat manusia sebagai bagian sejarah yang bergerak menurut hukum-hukumnya sendiri. Bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh ini adalah *system builders*, kaum pemikir yang membangun sistem gagasan yang utuh dan menyeluruh yang dapat digunakan untuk menjelaskan setiap segi dari manusia, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan sejarah. Hegel, Comte, dan Marx adalah contoh terbaik dari kecenderungan ini.

Alexis de Tocqueville adalah pemikir besar Prancis yang menjadi bagian dari tradisi abad ke-19. Namun uniknya, ia tidak larut dalam semangat zaman itu untuk membuat sistem besar. Dalam karya-karyanya, tidak kita temukan kutipan-kutipan dari Hegel maupun Comte. Bahkan manakala ia berbicara tentang kelas sosial-ekonomi dan menjelaskan revolusi Prancis, tidak ada referensi satu pun tentang Marx, walaupun ia hidup sezaman dengan pemikir Jerman ini. Dalam menolak arus konstruksi sistem besar seperti itu, Tocqueville tidak kembali ke

zaman sebelumnya, tetapi membuat tradisi baru dalam studi sosial, yang kemudian akan diteruskan oleh tokoh seperti Weber dan Durkheim di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. (Kedua tokoh terakhir ini kemudian disebut sebagai peletak dasar sebuah disiplin baru dalam ilmu pengetahuan, yaitu sosiologi.)

Dengan tradisi baru ini, Tocqueville mulai menjelaskan realitas tidak dengan asumsi-asumsi filosofis, tetapi langsung meneliti aspek-aspek mikro kehidupan pada masyarakat yang diamatinya. Di Amerika, penelitian awal yang dilakukannya justru mengenai sistem penjara di negara-negara bagian New England serta pola kehidupan dan pemerintahan lokal di beberapa *counties* (kabupaten) dan *townships* (kecamatan) yang terpencil. Dia tidak berangkat dari ide-ide besar, dengan metode berpikir deduktif, namun dengan tekun dan kreatif melihat dan mempelajari pola pengelompokan sosial, kebudayaan dan adat kebiasaan lokal serta interaksi ekonomi dari masyarakat yang diamatinya. Dalam mempelajari sebab-musabab revolusi Prancis ia menghabiskan waktunya di beberapa kantor pemerintahan tingkat lokal untuk mempelajari arsip-arsip dari masa lalu yang menyimpan bukti-bukti tertulis tentang perubahan pola kekuasaan, kecenderungan sentralisasi, dan bergesernya karakter kelas sosial dalam masyarakat.

Dari metode studi semacam itulah, selama sembilan bulan di Amerika Serikat (1831-1832), lahir karya besarnya yang pertama *De la démocratie en Amérique* (Demokrasi di Amerika). Setelah itu Tocqueville masih melahirkan beberapa karya lagi, namun yang paling berpengaruh adalah kajiannya tentang Revolusi Prancis, *L'Ancien Régime et la Révolution* (Rezim Lama dan Revolusi Prancis). Pemikiran dalam karya-karya ini, terutama tentang demokrasi, memengaruhi berbagai aliran pemikiran hingga saat ini. Tema-tema kontemporer dalam studi politik dan sosiologi tentang masyarakat sipil, kelembagaan demokrasi, persamaan, pengaruh agama dan kebudayaan dalam

perilaku politik dan sistem pemerintahan tidak mungkin dimerinci akar-akarnya dengan baik tanpa mengkaji kembali pemikiran aristokrat Prancis ini. Bahkan di Amerika Serikat, kaum pemikir dan pembuat kebijakan yang sekarang dianggap paling berpengaruh di Washington DC, yaitu kaum neokonservatif, dalam banyak hal diinspirasi oleh pemikiran Tocqueville tentang hakikat demokrasi serta hubungan antara sistem komersial dan peran agama.

Pemikiran Tocqueville tentang demokrasi bertumpu pada pertanyaan: mengapa demokrasi di Amerika bersifat liberal? Mengapa Amerika berhasil menghindari perangkap anarki di satu pihak, dan pelanggaran kekuasaan aristokrasi di pihak lain, sebagaimana yang terjadi di Prancis? Mengapa demokrasi Amerika berbeda dengan Inggris? Apa yang menjadi keunikan dan kekuatan demokrasi Amerika?

Terhadap pertanyaan semacam itu, Tocqueville mengawali penjelasannya dengan konsep persamaan, *equality*. Di Amerika, dan juga di banyak negeri Eropa, proses industrialisasi dan komersialisasi yang saat itu mulai berlangsung dengan pesat telah mengubah struktur interaksi masyarakat. Feodalisme, sistem sentralisasi kekuasaan, dan aristokrasi sebagai kelas sosial mulai pudar. Sebagai gantinya adalah proses urbanisasi, mobilitas sosial yang tinggi, dan semakin tercerabutnya manusia modern dari kaitan dan akar-akar sosial lama. Dalam rezim lama, manusia dikungkung oleh posisi sosialnya yang tak mungkin berubah. Anak seorang petani juga akan menjadi petani, berikut semua atribut sosialnya. Demikian pula, keturunan seorang aristokrat akan tetap menjadi aristokrat, dengan segala warisan tanah dan pekerja yang menjadi miliknya. Dengan pudarnya sistem ini manusia menjadi individu merdeka, sama dengan individu-individu lainnya, dan terbuka untuk bersaing dalam kehidupan di kota untuk mencari kehidupan

yang lebih baik. Kalau dalam sistem feodal sebelumnya semua anggota masyarakat diikat oleh jejaringan yang sudah baku, dalam sistem baru ini mereka menjadi individu-individu yang bebas memilih: komunalisme berganti menjadi individualisme.

Persamaan inilah yang menjadi dasarnya demokrasi. Bahkan Tocqueville kadang menggunakan kata “persamaan” dan “demokrasi” secara bergantian. Keduanya adalah dua sisi mata-uang yang sama.

Sebagai bagian dari kaum aristokrat Prancis, Tocqueville melihat proses menguatnya demokrasi tidak dengan hitam putih. Dalam uraiannya, kita bisa melihat harapan dan antusiasme, tetapi juga pesimisme, kecemasan, dan ironi terhadap merebaknya demokrasi, persamaan, dan individualisme. Justru di sinilah terletak salah satu daya tarik pemikirannya.

Dalam satu hal, menurut Tocqueville, karena posisi individu sama dengan yang lainnya, dan karena tidak ada lagi yang mampu berkuasa sebagaimana kekuasaan kaum aristokrat sebelumnya, kebutuhan akan kekuasaan negara akan meningkat. Negara, atau pemerintah, akan menjadi sangat dominan, dan cenderung menumbuhkan bentuk tirani baru, yaitu tirani mayoritas.

Dalam hal lain lagi, sistem persamaan dalam konteks masyarakat komersial cenderung membuat individu hanya mencari kebahagiaan sesaat, dan bersaing mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Masyarakat akan berisi manusia-manusia medioker, tanpa keagungan, keberanian dan heroisme, serta tanpa hasrat mencari kejayaan bagi negerinya. Yang penting adalah perdamaian dan kesejahteraan dan sebuah situasi di mana anggota-anggota masyarakat dapat bekerja dengan tenang mencari hidup dan kebahagiaan.

Jadi, walaupun demokrasi dan persamaan adalah gejala universal dan pasti akan menjadi bagian dari masa depan umat manusia, Tocqueville menganggapnya sebagai pedang bermata dua. Dan baginya, keunikan dan kekuatan demokrasi di Ame-

rika adalah karena di negeri baru ini sisi negatif dari proses persarnaan seperti itu dapat dilembutkan oleh tiga faktor, yaitu geografi, lembaga politik dan pemerintahan, serta kebudayaan dan adat-istiadat lokal. Kombinasi ketiga faktor inilah yang tidak ada di Eropa yang juga mengalami proses industrialisasi dan komersialisasi.

Dalam soal geografi, Amerika adalah benua baru yang menjanjikan kecukupan bagi penduduknya. Dari Pantai Timur ke Pantai Barat, penduduk Amerika tidak perlu khawatir akan tekanan lahan yang sempit, mereka bisa berekspansi ke Barat tanpa henti untuk mencari lahan dan penghidupan baru. Selain itu, wilayah ini dipersatukan oleh negara yang sama, tanpa potensi pesaing dari negara-negara tetangganya. Di Eropa, Inggris harus mewaspadaai Prancis, yang harus pula memantau Prusia dan Austria. Italia, Polandia, Spanyol, dan lainnya, harus terus merasa terancam oleh pergerakan politik di tiga negara terbesar dan terkuat ini. Proses sejarah politik di Eropa hanya berputar di persoalan semacam itu: perang dan damai oleh negara-negara hegemon. Di Amerika, persoalan semacam ini bisa dikatakan tidak pernah menjadi bagian dari sejarah mereka, dan karena itu kekhawatiran terhadap perang besar juga bersifat minimal.

Perang adalah sebab utama sentralisasi politik dan ekspansi birokrasi. Karena ancaman perang, masyarakat bergantung pada negara sebagai instrumen utama. Dan untuk itu, negara harus memungut pajak. Untuk memungut pajak, negara harus mengembangkan aparat pemungut pajak dan birokrasi. Demikian seterusnya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa sentralisasi pemerintahan di Prancis berlangsung dengan ekspansif. Di Amerika, karena ketiadaan hal tersebut, sentralisasi berlangsung minimal dan sistem pemerintahan tumbuh dengan mengadaptasi kebutuhan lokal.

Hal itulah yang menjelaskan mengapa kelembagaan politik Amerika bertumpu pada sistem desentralisasi (*federalisme*), di

mana keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan lebih banyak dilakukan di tingkat lokal. Sistem inilah yang mendorong merebaknya semangat partisipatoris dalam masyarakat. Tocqueville mengamati betapa di kota-kota kecil Amerika semangat partisipasi publik begitu tinggi. Mereka terlibat dalam begitu banyak kegiatan sosial dan politik lokal, sebagaimana *mereka juga* terlibat dalam acara-acara keagamaan. Semangat dan keterlibatan semacam ini menjadi *counter-balance* yang positif terhadap kecenderungan negatif yang melekat pada demokrasi dan sistem persamaan.

Dalam soal kebudayaan dan adat-istiadat lokal, Tocqueville melihat sebuah kebetulan sejarah yang menguntungkan Amerika: penduduknya berbicara dalam bahasa yang sama, berimigrasi dari negeri yang relatif sama, dan dengan agama yang sama. Dalam soal agama, imigran-imigran awal Amerika umumnya adalah kaum puritan, dengan kode moral yang mendorong individu untuk bekerja keras, membangun solidaritas, disiplin, dan kemandirian. Nilai-nilai semacam inilah yang hidup dan menjadi sumber motivasi dalam aktivitas lokal, bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun. (Setengah abad setelah Tocqueville, Max Weber mengembangkan analisis semacam ini untuk membahas sistem kapitalisme dan hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan.)

Jadi, singkatnya, demokrasi Amerika adalah contoh dari sebuah sistem politik baru yang dihasilkan oleh proses perubahan masyarakat modern, namun yang di dalam dirinya mengandung unsur-unsur yang memperkuat bangunan demokrasi itu sendiri. Dengan studinya yang pada zaman itu adalah sebuah terobosan baru, Tocqueville memperlihatkan bagaimana sistem demokrasi harus dimengerti, dievaluasi, dan dijadikan model pemerintahan bagi negeri-negeri lainnya.

Penerbitan buku yang memuat bunga rampai pemikiran Tocqueville ini patut disambut baik. Setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki masa transisi dan berada dalam sebuah proses panjang yang sering disebut sebagai masa konsolidasi demokrasi. Kita sudah melangkah cukup jauh, namun satu hal yang masih terasa amat kurang adalah studi dan pemikiran tentang demokrasi itu sendiri sebagai sebuah sistem pemerintahan.

Dalam berbagai diskusi publik, masih terjadi kebingungan dan *convoluted thinking* mengenai esensi dan faktor-faktor yang menentukan kuat-tidaknya sebuah sistem demokrasi. Hal ini terjadi mungkin karena bacaan-bacaan yang menarik dan bermanfaat dalam tema demokrasi dan proses politik memang masih sangat sedikit di negeri kita.

Karena itulah, saya berharap agar buku ini dapat memperkaya khazanah intelektual kita dan mendorong kejelasan berpikir mengenai seluk-beluk sistem demokrasi. Walaupun dilahirkan hampir dua abad lalu, pemikiran Alexis de Tocqueville saat ini masih menarik dan relevan untuk dibaca oleh semua kalangan.

Jakarta, 25 November 2005

Pertimbangkan Kembali Masyarakat:

Tentang Negara, Pasar, dan Masyarakat

Munculnya Negara: Antara Teori Konflik dan Integratif

TIDAK ADA organisasi manusia dalam sejarah kita yang begitu kuat, kompleks, dan berpengaruh sebagaimana negara modern.

Dari segi definisi, menurut Cohen, negara merujuk pada setiap dan semua variasi dalam kekuasaan, struktur otoritas, dan nilai-nilai yang menopang kerangka organisasi masyarakat (Cohen dan Service, 1978: 2). Ia adalah serangkaian tatanan kelembagaan yang mengontrol suatu wilayah tertentu, menerapkan serangkaian peraturan, dan memegang monopoli untuk menggunakan kekuatan paksaan. Tentu saja terdapat beragam definisi yang diberikan oleh ilmuwan-ilmuwan yang berbeda yang berasal dari bidang ilmiah yang berbeda pula. Namun definisi-definisi yang paling disepakati adalah definisi-definisi yang mengandung aspek-aspek seperti teritorialitas, legitimasi, otoritas, legalitas, dan kekuatan untuk memaksa.

Negara memiliki sejarahnya sendiri. Ia berkembang dari waktu ke waktu. Proses penting yang berkembang dalam perjalanan panjang dari masyarakat tanpa negara ke negara-bangsa modern adalah sentralisasi kekuasaan. Perkembangan negara tersebut merupakan dampak langsung dari perkembangan sua-

tu unit sentral yang mengkoordinasi, memerintah, dan mengatur keseluruhan masyarakat.

Mengapa dan bagaimana negara muncul? Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut Service (1975: 36-42), kita pada dasarnya bisa menggunakan dua jenis teori utama, yang masing-masing mengandung beberapa sub-jenis. Pertama adalah teori-teori konflik, kedua adalah teori-teori integratif. Dalam menjelaskan proses pembentukan negara, yang pertama menekankan pentingnya konflik; sedangkan yang kedua menekankan pentingnya integrasi.

Dalam tulisan ini saya mencoba menjabarkan dan mengulas teori-teori tersebut. Dalam bagian akhir tulisan ini saya akan membahas bagaimana kita bisa memanfaatkan kedua teori tersebut agar memiliki suatu perspektif yang lebih luas, dan mungkin lebih bijak, dalam memahami munculnya negara.

Sebelum kita lanjutkan, penting untuk melihat bahwa para pemikir seperti Aristoteles dari Yunani Kuno (384-322 SM) dan Ibn Khaldun dari Tunisia (1332-1406) telah mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas—dan mengajukan argumen-argumen yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dari argumen-argumen yang dikemukakan oleh teori-teori konflik dan integratif tersebut. Khaldun, dalam *Muqadimah: An Introduction to History*, melacak munculnya negara (atau, dalam kata-katanya sendiri, munculnya otoritas raja), dalam hubungan-hubungan yang penuh konflik antara suku-suku pengelana (Badui) yang hidup di padang pasir dan para penduduk tetap yang hidup di tepi sungai, di tanah-tanah subur, dan di kota-kota.

Karena kehidupan yang sulit dan berat di padang pasir, kaum Badui, menurut Khaldun, lebih memiliki keberanian dan keuletan, serta memiliki tubuh yang lebih kuat. Mereka agresif dan terbiasa dengan kekejaman. “Mereka selalu menentang sen-

jata ...dan tidak berhenti di perbatasan wilayah. Mereka bergerak ke wilayah-wilayah yang jauh dan menunjukkan superioritas mereka atas bangsa-bangsa lain...." (Khaldun, 1967: 95, 114). Sebaliknya, orang-orang yang menetap lebih lemah karena kenikmatan mereka. Dan karena mereka telah terbiasa dengan keberlimpahan materi, "keberanian mereka merosot" (Khaldun, 1967: 107). Kelemahan dan keberlimpahan materiil ini selalu memancing agresi kaum Badui. Untuk menghindari agresi ini, menurut Khaldun, orang-orang yang menetap tersebut dengan demikian harus membangun tembok-tembok pengaman, dan membentuk, atau dilindungi oleh, otoritas raja yang kuat yang memegang "superioritas dan kekuasaan untuk memerintah dengan kekuatan" (Khaldun, 1967: 108).

Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa bagi Khaldun, konflik—atau ancaman agresi—merupakan motif dalam proses pembentukan negara (lihat juga Service, 1975: 23-24).

Aristoteles, menurut Jerry Szacki (1979: 9-11), melihat negara sebagai sebuah badan di mana individu-individu bekerjasama untuk mencapai perkembangan sepenuhnya. Negara baginya merupakan suatu kreasi alamiah, dan keberadaannya terus berlanjut "demi kehidupan yang baik". Sebagaimana yang tertulis dalam Szacki (1979: 1), dalam *Politica* Aristoteles menulis:

...ketika beberapa keluarga bersatu, dan perkumpulan tersebut memiliki suatu tujuan yang lebih dari sekadar suplai kebutuhan, masyarakat pertama yang terbentuk adalah desa. Dan bentuk paling alamiah dari desa adalah koloni keluarga.... Ketika beberapa desa bersatu dalam satu komunitas, yang cukup besar untuk berswadaya, negara muncul, bersumber dari kebutuhan hidup dan terus ada demi suatu kehidupan yang baik.

Dengan kata lain, bagi Aristoteles, keberadaan negara didasarkan pada hubungan timbal-balik atau keuntungan bersama

di antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang berbeda (Weissleder dalam Cohen dan Service, 1978). Dengan demikian, kita dapat berkata bahwa bagi pemikir besar dari Yunani ini, keuntungan bersama merupakan daya integratif dalam proses pembentukan negara.

Dari para pemikir “pra-modern” ini, kita telah melihat beberapa poin penting yang membedakan teori-teori konflik dan integratif. Bagi teori-teori konflik, penaklukan, persaingan, perang, pemaksaan, bahkan kejahatan dan perampokan, adalah kata-kata kunci dalam menjelaskan bagaimana negara berkembang. Teori-teori ini selalu bermula dengan asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat ketidaksetaraan akses ke sumberdaya-sumberdaya penting yang mendorong satu kelompok untuk menekan, atau berkonflik dengan, kelompok lain. Karena itu, Morton H. Fried, seorang teoretisi konflik non-Marxis, misalnya menulis bahwa negara adalah sebuah sistem pemerintahan yang tersentralisasi, yang muncul dari suatu sistem ketidaksetaraan yang terinstitusionalisasikan di mana para pemimpin, atau kelompok yang memerintah, memiliki akses khusus ke berbagai sumberdaya yang menopang atau memperkuatnya” (Cohen dan Service, 1978: 3). Poin ini dikemukakan secara lebih jelas dan sangat kuat oleh para teoretisi Marxis. Engels, misalnya, dalam *Origin of the Family, Private Property, and the State*, menyatakan bahwa negara hanyalah suatu organ dari kelas yang berkuasa untuk menghisap mereka yang dikuasai, mereka yang tidak memiliki akses ke sumberdaya-sumberdaya ekonomi (Chang, 1931: 46-48). Bagi Engels, pembentukan negara dengan demikian merupakan suatu dampak yang niscaya dari konflik kelas. Munculnya negara hanyalah suatu tahap dari perkembangan ekonomi (Chang, 1931: 46-47). Demikianlah Engels menulis:

Negara... tidak hadir dari keabadian. Terdapat masyarakat-masyarakat yang tidak memilikinya, yang tidak memiliki

gagasan tentang suatu negara atau kekuasaan publik. Pada tingkat tertentu dari perkembangan ekonomi, yang dapat dipastikan disertai dengan pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas, negara menjadi akibat yang tak terelakkan dari pembagian ini.

Negara, dengan demikian, ...sekadar merupakan produk dari masyarakat pada suatu tahap tertentu dalam evolusinya... (Chang, 1931: 46).

Salah satu contoh lain dari teori konflik dapat kita lihat pada penjelasan Prof. Oppenheimer. Genesis negara, menurut Oppenheimer (1926), bermula dengan penaklukan para petani oleh para penggembala, para pengelana, atau suku-suku pengembara. Demi kepentingannya, sang penakluk tersebut tidak sepenuhnya menghancurkan para petani itu. Ia hanya mengambil surplus, dan “membiarkan rumah dan perlengkapan para petani itu... hingga panen berikutnya” (Oppenheimer, 1926: 65). Dan ketika ada suku-suku pengembara atau pengelana yang lain, para petani itu akan meminta perlindungan dari sang penakluk tersebut. Kemudian, sang penakluk itu menjadi sang penyelamat. Para petani tersebut memberi penghargaan; karena itulah sistem perpajakan, dan hubungan hukum antara si perampok dan yang dirampok, benih pertama hukum publik, muncul. Untuk memelihara keuntungan-keuntungan dari penghisapan ini dan untuk menengahi perselisihan-perselisihan antara berbagai klan atau keluarga di kalangan para petani, sang penakluk/penyelamat tersebut kemudian menganggap memiliki hak untuk mengadili dan memerintah. Proses ini dalam jangka panjang membiakkan benih-benih organisasi politik di mana negara primitif muncul.

Bagi teori-teori integratif, keuntungan-keuntungan bersama sebagaimana yang dikemukakan Aristoteles di atas merupakan salah satu kata kunci. Kata-kata kunci yang lain adalah koordinasi, integrasi, pembagian kerja, fungsionalitas, bagian-bagian

yang terstrukturkan, kompleksitas, dan nilai-nilai. Teori-teori ini mulai dengan asumsi bahwa masyarakat terdiri atas unit-unit yang terintegrasikan, masing-masing unit memiliki fungsinya sendiri untuk melayani tujuan masyarakat sebagai sebuah keseluruhan, yakni memelihara ketertiban, atau menjaga keberadaannya. Jika satu unit berubah, unit-unit yang lain juga akan terdorong untuk berubah; dan karena itulah masyarakat berkembang. Lahirnya negara hanyalah hasil dari berbagai perubahan terus-menerus dalam masyarakat. Teori-teori integratif tersebut pada dasarnya menempatkan konflik, persaingan, pemaksaan, dan perang dalam posisi yang jauh kurang penting. Bagi teori-teori konflik, perkembangan negara mengandaikan penindasan yang semakin kuat dari satu kelompok manusia terhadap kelompok yang lain. Sebaliknya, bagi teori-teori integratif, perkembangan progresif negara menghasilkan emansipasi masyarakat dari subordinasi.

Poin-poin tersebut (kompleksitas, pembagian kerja, emansipasi) sangat jelas diyakini oleh para teoretisi integratif dalam membentuk argumen-argumen mereka. Durkheim, misalnya. Sosiolog Prancis ini menyatakan bahwa terdapat dua jenis masyarakat: mekanis dan organis.

Yang pertama berkaitan dengan komunitas berskala-kecil dan padu, yang memiliki tingkat diferensiasi sosial dan pekerjaan yang rendah. Di sini individu-individu didominasi oleh tirani *kesadaran kolektif*—rangkaiannya keyakinan dan nilai kolektif yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan sosial, misalnya mitos, etika, norma, takhayul, legenda. Individu-individu dipaksa untuk berfungsi, meminjam ungkapan Aristoteles di atas, demi “kebaikan kehidupan komunitas”.

Yang kedua merujuk terutama pada bentuk masyarakat berskala besar yang telah terindustrialisasikan (Giddens, 1986: 2). Di sini individu-individu bekerjasama, bekerja sesuka mereka, tanpa tirani hati nurani kolektif untuk membentuk ma-

syarakat mereka. Bagi Durkheim, negara hanya muncul ketika terjadi pergeseran progresif masyarakat mekanis menjadi masyarakat organis. Begitu hubungan-hubungan antarindividu menjadi lebih kompleks, dan hubungan antarpekerjaan menjadi semakin terbedakan, muncul dorongan untuk jenis masyarakat mekanis menjadi jenis masyarakat organis. Begitu transformasi ini selesai, negara menjadi lembaga utama yang terkait dengan persoalan koordinasi, ketertiban, dan penerapan serta peningkatan hak-hak individu (Giddens, 1986: 3). Dengan demikian, kompleksitas yang semakin meningkat dalam masyarakat dan emansipasi individu merupakan aspek-aspek yang inheren dalam proses pembentukan negara.

Kita telah melihat bahwa dalam menjelaskan fenomena yang sama (yakni munculnya negara), kedua teori itu mengajukan jawaban-jawaban yang berbeda. Kita bisa katakan bahwa apa yang implisit dalam penjelasan-penjelasan tersebut adalah bahwa para teoretisi konflik memiliki sensitivitas yang sangat kuat terhadap “politik”; mereka menganggap bahwa pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan adalah aspek utama masyarakat. Bagi mereka, lembaga yang paling dominan dan kuat dalam masyarakat (negara) hadir bukan karena tindak konsensual atau sukarela dari warganya untuk mencapai kebaikan bersama. Negara adalah hasil dari pertarungan kekuasaan. Sebaliknya, para teoretisi integratif melihat eksistensi negara sebagai “netral”, dalam pengertian bahwa fungsinya hanyalah untuk melayani dan mengkoordinasi keseluruhan masyarakat.

Kedua teori itu tampaknya saling eksklusif. Namun pada titik ini penting untuk melihat bahwa terdapat beberapa penulis yang berpandangan bahwa meninggalkan satu teori untuk meyakini teori yang lain merupakan suatu pilihan yang tidak di-

inginkan. Cohen, misalnya, mengatakan bahwa untuk menjelaskan kasus-kasus empiris yang berbeda, baik teori konflik maupun teori-teori integratif sama-sama diperlukan. Dalam penyelidikan empirisnya, ia mencoba membandingkan pembentukan tiga sistem negara di Chad Basin (Kanem-Borno, Fombina-Yola, Pabir-Biu). Ia menemukan bahwa terdapat dua jalan yang berbeda menuju ke-negara-an (*statehood*) dalam ketiga negara ini (Cohen dan Service, 1978: 141-159). Yang pertama dicirikan oleh hubungan yang sarat konflik antara orang-orang nomad dan para petani. Karena kelangkaan air, orang-orang nomad tersebut bermigrasi ke desa-desa pertanian yang relatif otonom. Para petani lokal tersebut menuntut bayaran, upeti, dan bentuk-bentuk permintaan lain dari orang-orang nomad itu sebagai pendatang baru. Hal ini mendorong pihak yang terakhir ini untuk mengorganisasi diri mereka dan membangun perasaan kebersamaan yang kuat. Dan ketika akhirnya konflik terjadi, kaum nomad tersebut menang dan membentuk sebuah lembaga yang tersentralisasi untuk mendominasi wilayah tersebut.

Yang kedua adalah jalan di mana para petani tersebut menyatukan diri bersama dalam kota-kota bertembok tinggi untuk mempertahankan diri mereka dari serangan yang dilakukan oleh sistem-sistem negara yang berdekatan. Mereka bersatu dalam kota-kota besar yang dikelilingi tembok. Pertanian dalam kota-kota tersebut, menurut Cohen, menjadi semakin intensif saat populasi meningkat. Dan akibatnya:

Para ketua dan para penasihat mereka, keturunan dari para pendiri permukiman tersebut, harus menghabiskan waktu yang lebih banyak lagi untuk menengahi perselisihan dan mengkoordinasi berbagai aktivitas yang berskala lebih besar. Nantinya, kelompok ini membentuk kelas atas para penguasa dan birokrat yang melakukan pernikahan dalam kelas

mereka dan membentuk faksi-faksi politik dasar dari negara. (Cohen dan Service, 1978: 156).

Dengan kata lain, untuk kepentingan semua petanilah beberapa bentuk birokrasi primitif dikembangkan dalam kota-kota tersebut. Bagi Cohen, kasus pertama di atas memperlihatkan bahwa konflik dan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain merupakan dasar pembentukan negara di Borno dan Fombina-Yola; sementara kasus kedua, yang terjadi di Pabir-Biu, memperlihatkan bahwa keuntungan bersama merupakan alasan utama adanya negara.

Apa yang ingin ditunjukkan Cohen di sini adalah bahwa dalam memahami proses pembentukan negara, baik pendekatan konflik maupun integratif diperlukan. Terdapat lebih dari satu jalan menuju pembentukan negara; karena itu, akan kurang meyakinkan jika kita hanya percaya pada satu teori untuk menjelaskan munculnya negara.

Satu contoh lagi bisa dikemukakan tentang betapa pentingnya untuk tidak mengabaikan satu teori dan hanya secara kaku berpegang pada teori yang lain, seseorang bisa melihat bagaimana Wittfogel ditentang oleh Eva dan Robert Hunt. Wittfogel (1957), dengan menggunakan gagasan Marx tentang Masyarakat Asia, menulis bahwa munculnya Negara Timur dan wataknya yang despotik di Timur Dekat dan Asia disebabkan oleh suatu sistem “hidrolik” yang ekstensif. Kebutuhan dasar untuk mengontrol air, mengelola bangunan dan memelihara pusat-pusat air yang besar memungkinkan para pengelola air memiliki kekuasaan untuk mendominasi keseluruhan kehidupan sosial, termasuk militer. Ketika sistem tersebut menjadi semakin luas, para pengelola tersebut berubah menjadi para elite berkuasa yang despotik, yang kemudian membentuk birokrasi yang despotik untuk memelihara keuntungan dan dominasi mereka (Cohen dan Service, 1978: 70).

Saat melakukan penelitian empiris tentang masyarakat irigasi di Cuicatec, Meksiko, Eva dan Robert Hunt menemukan bahwa birokrasi yang tersentralisasi muncul untuk mengatur kompleksitas dalam mendistribusikan air. Di sini argumen Wittfogel tersebut benar. Namun bagi Eva dan Robert Hunt, Wittfogel gagal melihat bahwa birokrasi air tersebut juga berguna untuk meningkatkan produktivitas warga. Mereka menyatakan bahwa dalam masyarakat irigasi, “tanpa pembuatan keputusan yang padu, guncangan dan konflik sosial yang besar akan cenderung melumpuhkan sistem sosio-ekonomi”. Karena itu, “sentralisasi sistem politik mempermudah tingkat produktivitas yang lebih tinggi dengan menekan konflik sosial...”. (Cohen dan Service, 1978: 118).

Dengan kata lain, birokrasi air (aspek penting dari negara) muncul bukan hanya untuk melayani kepentingan para pengelola air, melainkan juga untuk melayani kepentingan sistem tersebut, yakni kepentingan seluruh warga. Dengan demikian, kita bisa berkata bahwa di sini Eva dan Robert Hunt memperlihatkan bahwa baik teori konflik maupun integratif diperlukan untuk memahami realitas yang sama.

Untuk mengakhiri tulisan ini, saya kira relevan jika kita mendengarkan Dahrendorf:

Terdapat problem-problem sosiologis yang penjelasannya bisa didapatkan dari asumsi-asumsi teori integrasi masyarakat; terdapat problem-problem lain yang bisa dijelaskan hanya dengan berdasarkan teori koersi masyarakat; terakhir, terdapat problem-problem yang mana kedua teori tersebut tampak memuaskan. Untuk analisis sosiologis, masyarakat bermuka ganda, dan kedua wajahnya merupakan aspek-aspek dari realitas yang sama (Dahrendorf, 1959: 159).

Masyarakat itu bermuka ganda. Demikian juga negara. Konflik dan integrasi merupakan aspek yang berbeda dari reali-

tas yang sama. Negara merupakan fenomena terlalu kaya, terlalu kompleks untuk dipahami hanya dengan satu penjelasan tunggal. Tentu saja teori-teori konflik dan integratif telah memberi kita banyak pemahaman yang berguna. Namun, mereka terbatas oleh asumsi-asumsi mereka sendiri. Karena itu, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Cohen, Eva dan Robert Hunt di atas, untuk memahami secara lebih baik bagaimana dan mengapa negara berkembang, apa yang kita butuhkan mungkin adalah pendekatan-pendekatan yang bisa secara terbuka dan jelas mencakup aspek-aspek seperti persaingan dan integrasi, koersi dan keuntungan, penaklukan dan konsensus, ketidaksetaraan dan kompleksitas.

Pendekatan Otonomi Negara: Bagaimana Mengkritiknya?

DALAM BAGIAN III buku Przeworski, *The State and The Economy Under Capitalism* (1990), pendekatan yang menekankan pentingnya negara dalam analisis ekonomi politik pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian: pendekatan otonomi relatif dan pendekatan negara sentris. Esai pendek ini hanya akan membahas pendekatan yang pertama.

Sebagaimana yang kita tahu, pendekatan otonomi negara, serta pendekatan negara sentris cukup berhasil dalam “memasukkan kembali negara” ke dalam wacana ilmu sosial, setidaknya sejak akhir 1960-an. Keduanya mampu memberikan dasar-dasar yang lebih konseptual bagi mereka yang ingin menyerang fondasi liberal dari apa yang kadang disebut sebagai teori-teori sosial utama (teori-teori sosial behavioral, fungsionalisme struktural, teori-teori modernisasi). Dengan memperlihatkan bahwa peran negara terutama ada dalam proses-proses sosial, politik, dan ekonomi, kalangan “*statist*” tersebut secara langsung menentang asumsi-asumsi—yang dirumuskan oleh para pelopor pemikiran liberal (Hobbes, Locke, Mill, Hume)—bahwa masing-masing warganegaralah yang menciptakan negara, dan

bahwa yang terakhir ini hanya merupakan pelayan yang mengemban amanat yang pertama.¹⁰

Seberapa jauh kita bisa mengatakan bahwa pendekatan otonomi negara tersebut merupakan suatu pendekatan yang baik dalam menjelaskan hubungan antara proses-proses politik dan ekonomi di masa kapitalisme modern sekarang ini, dalam pengertian bahwa pendekatan tersebut meyakinkan, bisa diterima secara logis dan empiris?

Pada dasarnya inilah pertanyaan yang ingin dijawab oleh Przeworski ketika ia mengemukakan argumen-argumen inti kalangan *statist*. Dalam melakukan hal tersebut, Przeworski melancarkan banyak kritik yang menarik terhadap mereka. Esai pendek ini ingin ikut serta dalam kritik Przeworski tersebut. Esai ini juga bermaksud bergerak sedikit lebih jauh dengan memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang luput dalam kritik-kritik Przeworski itu, dan bahwa kita bisa mengembangkan kritiknya untuk memberi pukulan telak pada para teoretisi otonomi negara.

Menyangkut definisi otonomi negara, Przeworski setuju dengan rumusan Skocpol bahwa negara otonom ketika para pengelolanya “bisa membentuk dan mengejar tujuan-tujuan yang tidak sekadar mencerminkan tuntutan-tuntutan atau kepentingan-kepentingan berbagai kelompok dan kelas sosial

10 Pengaruh langsung dari asumsi-asumsi ini pada ilmu politik pasca-Perang bisa dilihat, misalnya, dalam rumusan sistem politik David Easton. Di sini pemerintah atau negara dilihat hanya sebagai sebuah kotak kosong, yang menunggu untuk diisi oleh berbagai kepentingan dari para partisipan politik yang saling bersaing. Penting untuk melihat bahwa Marx, meskipun ia mencurahkan sebagian besar karyanya untuk mengkritik para pemikir liberal, tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari asumsi-asumsi ini. Negara, bagi Marx, juga sekadar merupakan pelayan, sebuah kotak kosong. Perbedaannya, dari perspektif ini, adalah bahwa kaum liberal klasik tersebut menekankan unit analisis pada tiap-tiap warganegara, sementara Marx dan kaum Marxis pada kelas-kelas sosial.

atau masyarakat”. Negara otonom ketika ia bertindak atas nama kepentingannya sendiri.¹¹

Sebagaimana yang umum diketahui, teori-teori tentang otonomi negara sebagian besar bersandar pada analisis kelas. Marx-lah yang mulai merumuskan persoalan tentang sebuah negara yang otonom. Bagi Marx, sebagaimana yang dijelaskan dengan baik oleh Przeworski, otonomi negara itu “eksepsional”—ia adalah sejenis teka-teki yang tidak cukup cocok untuk dimasukkan ke dalam teori besar Marx. Karena politik tidak lain merupakan suatu cerminan dari hubungan-hubungan ekonomi, negara dapat dipastikan sekadar merupakan alat dari kelas yang paling berkuasa, yakni kaum borjuis. Namun, sebagaimana yang diakui Marx sendiri dalam *the Eighteen Brumaire of Louis Bonaparte*, negara Bonapartis bukan merupakan suatu alat: ia bergerak menghancurkan kepentingan-kepentingan kelas yang dianggap sebagai tuannya.

Dari persoalan yang tak-terpecahkan dalam analisis Marx inilah teori-teori tentang otonomi negara bermula. Bagi Przeworski, dalam perkembangannya sekarang ini, teori-teori tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga kubu: teori abdikasi (*abdication theory*), teori borjuasi lemah, dan teori keseimbangan kelas.

Teori Abdikasi

Teori ini, bagi Przeworski, mengandaikan bahwa kaum borjuis “mampu untuk memerintah secara langsung, namun menganggap bahwa demi kepentingannya sendiri ia tidak melakukannya”. Teori ini menyatakan bahwa biaya untuk merebut, dan menjalankan, kekuasaan terlalu tinggi bagi masing-masing kapitalis,

11 Przeworski memberikan penjelasan konseptual lebih lanjut ketika ia menyatakan bahwa kita harus bisa membedakan dua hal: kemampuan negara untuk merumuskan tujuan-tujuannya sendiri, dan kemampuannya untuk mengejawantahkan tujuan-tujuan ini. Jika negara hanya mampu melakukan yang pertama, dan gagal melakukan yang kedua, maka gagasan tentang otonomi bagi negara seperti itu tidak bermakna. Hanya jika negara bisa melakukan keduanya maka ia bisa disebut otonom.

yang hanya ingin menikmati keuntungan eksploitasi, hak milik pribadi yang aman, dan kehidupan keluarga. Kaum kapitalis menyerahkan kekuasaan mereka demi untuk menikmati perlindungan dari negara (otoriter). Karena itulah muncul otonomi negara.

Teori Borjuasi Lemah

Teori ini (yang umumnya digunakan dalam menjelaskan negara-negara Dunia Ketiga) menganggap bahwa negara otonom karena kaum kapitalis lemah. Kaum kapitalis Dunia Ketiga berbeda dari kaum kapitalis Eropa Barat: yang pertama sangat bergantung pada modal luar negeri; kurang memiliki sumberdaya ideologis dan organisasi; dan terpecah menurut garis sektoral.

Teori Keseimbangan Kelas

Bagi teori ini, kemampuan kaum kapitalis untuk memperoleh kekuasaan bergantung pada kekuatan lawan-lawannya. “Jika lawan-lawannya juga kuat secara politik, ada ruang bagi negara untuk menjadi otonom.” Di sini, menurut Przeworski, otonomi negara merupakan “ekuilibrium teoretis permainan tersebut: tak satu pun kelas ingin merebut kekuasaan karena melihat kemungkinan pembalasan dari lawannya, dan akibatnya adalah negara mendominasi kedua kelas”.

Bagaimana kita mengkritik teori-teori ini? Jika kita mengikuti Przeworski, jawabannya cukup jelas: merumuskan kembali asumsi-asumsi dasar mereka dan—dengan logika deduktif yang ketat dan rujukan-rujukan empiris yang tepat—melihat apakah asumsi-asumsi ini bisa dipertahankan. Metode ini, menurut saya, memungkinkan Przeworski untuk memberikan kritik yang singkat, padat, dan kuat di seluruh bukunya.

Tentang teori abdikasi, Przeworski mengatakan bahwa kita hendaknya tidak meyakini begitu saja asumsi bahwa memang karena kepentingan kaum kapitalis sendirilah kenapa mereka

menyerahkan kekuasaan. “Akankah kepentingan mereka [kaum kapitalis] benar-benar terlayani secara lebih baik jika mereka menarik diri dari usaha merebut kekuasaan politik?” Teori tersebut tidak pernah menjelaskan mengapa negara yang kuat dan otonom akan terus melindungi kaum borjuis setelah ia mendapatkan kekuasaan.

Di sisi lain, Przeworski juga menyatakan bahwa—dengan mengikuti argumen teori dependensi struktural—kaum kapitalis pada dasarnya terlindungi terlepas dari siapa yang berkuasa dalam wilayah politik. Pendeknya, kaum borjuis tidak perlu menyerahkan kekuasaannya untuk menjadi terlindungi. Sangat sedikit contoh dalam sejarah di mana kita bisa melihat negara yang kuat berbalik menentang kaum borjuis.

Tentang teori borjuasi lemah, Przeworski menjelaskan bahwa asumsi dasar bahwa kaum borjuis Eropa Barat itu kuat di masa awal perkembangan kapitalisme adalah salah. “Negara otonom dalam sebagian besar kasus ‘klasik’ sebagaimana di beberapa negara yang kurang maju dan penekanan pada borjuasi yang lemah tersebut tidak memiliki dasar eksplanatoris.” Apa yang bisa dijelaskan oleh kelemahan kaum kapitalis tersebut adalah bahwa “ada ruang kekuasaan untuk diisi, namun bukan bahwa ia terisi dan bagaimana [mengisinya]”.

Tentang teori keseimbangan kelas, Przeworski menyatakan bahwa hubungan antara dinamika kelas dan bentuk-bentuk negara meragukan. Teori ini bersandar pada “lompatan fungsionalis”, yang sangat bisa dipertanyakan. “Apa yang menjamin bahwa ketika borjuasi yang kuat dilawan oleh proletariat revolusioner yang kuat, negara fasis atau negara yang secara fungsional sama akan muncul...? Dan apa yang mencegah kemunculan sebuah negara yang sangat mirip dengan negara fasis sekalipun semua kelas lemah?”

Berbagai kritik Przeworski ini memperlihatkan banyak persoalan besar yang terdapat dalam teori-teori tentang otonomi

negara. Misalnya saja tentang teori borjuasi lemah. Penjelasannya tentang otonomi negara-negara Dunia Ketiga, dan tentang kegagalan munculnya sistem demokratis, bersandar pada suatu kesalahpahaman besar atas sebuah fakta sederhana tentang perkembangan kapitalisme di Eropa Barat. Para teoretisnya cukup mendalam dalam menjelaskan detail-detail kapitalisme di Dunia Ketiga; namun mereka terlihat hampir sepenuhnya tidak memahami apa yang terjadi dengan kapitalisme di Eropa Barat. Przeworski, dengan hanya memperlihatkan sebuah fakta sederhana (bahwa kaum borjuis tidak pernah memerintah secara langsung, kecuali untuk beberapa tahun di Prancis setelah Revolusi), menentang gagasan bahwa kelemahan kaum kapitalis Dunia Ketiga memiliki kaitan dengan kuatnya negara-negara Dunia Ketiga.

Pada dasarnya, jenis kritik seperti ini juga bisa dilancarkan pada isu lain yang dikemukakan oleh teori borjuasi lemah tersebut. Dalam menjelaskan mengapa demokrasi gagal menyertai perkembangan ekonomi kapitalis di Dunia Ketiga, teori tersebut menjelaskan bahwa karena kaum kapitalis lemah, mereka tidak bisa mencapai tujuan mereka dalam membangun sistem politik yang sesuai dengan kepentingan mereka (demokrasi). Sekali lagi, teori tersebut mengandaikan bahwa demokrasi muncul di Eropa Barat karena kaum kapitalis kuat, mampu memaksa rezim lama untuk membangun pemerintahan baru. Jika kita bisa memperlihatkan bahwa asumsi ini tidak benar (sebagaimana yang dilakukan Przeworski), maka penjelasan tentang otoritarianisme yang terus-menerus muncul di sebagian besar negara Dunia Ketiga menjadi sangat kurang meyakinkan. Kaum kapitalis Dunia Ketiga memang lemah, namun demikian juga kaum kapitalis Eropa di abad terakhir—di Eropa Barat demokrasi berkembang, sementara di Dunia Ketiga tidak, sehingga penjelasan kita seharusnya melampaui kuat/lemahnya kaum borjuis.

Kritik yang paling keras terhadap teori ini, yang tidak disebutkan oleh Przeworski, bisa dikemukakan ketika kita melihat berbagai fakta yang belakangan ini berkembang di beberapa negara Dunia Ketiga. Lihat misalnya apa yang terjadi pada Korea Selatan. Hingga pertengahan 1980-an, negara ini merupakan contoh yang sangat jelas dari sebuah negara dengan kaum kapitalis yang sangat lemah (yakni bergantung); untuk akses ekonominya mereka bergantung pada negara militer-otoritarian, dan pada modal asing untuk pembentukan modal (selain Meksiko, Korea Selatan pada pertengahan 1980-an merupakan negara Dunia Ketiga dengan utang paling banyak). Namun, pada 1986/87 perlahan terjadi perubahan: demokratisasi berkembang.

Apa yang tercakup dalam proses ini adalah suatu transformasi negara dari negara yang sangat otonom (negara militer-otoritarian) menjadi sesuatu yang kurang mampu bertindak atas namanya sendiri terlepas dari apapun kepentingan rakyat—dan transformasi ini terjadi ketika kondisi dasar kaum borjuis tetap tidak berubah: ia “lemah” pada akhir 1980-an, sebagaimana pada akhir 1970-an, dan awal 1980-an.

Fakta ini merupakan suatu pukulan yang telak terhadap teori borjuis lemah tersebut: jika kita meyakini argumen-argumennya, kita jelas akan gagal untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di Korea Selatan, dan di banyak negara, bukan hanya di Dunia Ketiga, yang sekarang ini mengalami proses perubahan rezim.

Teori keseimbangan kelas juga akan mengalami kesulitan untuk menjawab berbagai pertanyaan Przeworskian. Mengapa, misalnya, sebuah negara yang demokratis gagal dibangun jika baik kaum kapitalis maupun kaum pekerja kuat? Berbagai fakta perkembangan negara kesejahteraan pasca-Perang Dunia II di Skandinavia, Jerman (Barat), dan Britania memperlihatkan bahwa kompromi (Keynesian) antara kedua pihak yang kuat

dan saling bersaing ini mungkin terjadi, tanpa menyeret sistem politik ke dalam fasisme. Teori tersebut gagal di hadapan fenomena politik dan ekonomi yang paling penting dalam kehidupan Eropa modern (yakni: pembentukan negara kesejahteraan melalui mekanisme-mekanisme demokratis).

Dengan demikian, Przeworski secara tidak langsung membuat kita melihat persoalan teoretis utama dari teori keseimbangan kelas ini. Persoalan ini bisa dilihat secara langsung dari kesalahan Marx ketika ia merumuskan hubungan kepentingan kelas dan kepentingan politik. Marx salah ketika ia mengatakan bahwa kepentingan kaum kapitalis di wilayah politik adalah pembentukan demokrasi, sementara kepentingan kaum pekerja adalah pembentukan kediktatoran proletariat.¹² Di sini Marx samasekali tidak memberi ruang bagi kaum kapitalis dan kaum pekerja untuk berkompromi—hubungan mereka didefinisikan sebagai suatu hubungan *zero-sum*. Di sini Marx disangkal oleh bukti-bukti sejarah; namun para teoretisi keseimbangan kelas tersebut menolak untuk mengakui bukti-bukti ini. Secara tak sadar, mereka mengulangi kesalahan Marx, dan memperluasnya untuk menjelaskan bahwa dalam keadaan di mana kedua kelas tersebut kuat, fasisme niscaya akan diteguhkan sebagai suatu jenis kompromi, suatu jenis keseimbangan antara hubungan kuat-kuat. Saya akan menjabarkan secara lebih luas persoalan analisis kelas ini nanti, saat saya mencoba memperlihatkan bahwa kritik Przeworski terhadap pendekatan otonomi negara pada dasarnya bisa dikembangkan lebih jauh untuk mempertanyakan argumen teoretis utama yang mendasari pendekatan itu.

12 Ketika Marx mendukung gagasan tentang partisipasi kaum pekerja dalam parlemen Inggris, dukungannya tersebut bersyarat. Ia berkata bahwa partisipasi tersebut hendaknya merupakan partisipasi sementara, sampai kaum pekerja menjadi cukup kuat untuk menggantikan “parlemen borjuis” dan demokrasi tersebut dengan kediktatoran proletariat (lihat McLellan, ed., *Karl Marx: Collected Writings*, 1987, Oxford University Press).

Teori abdikasi mungkin merupakan teori yang paling kurang bisa dipertahankan. Jika kita meyakini argumen-argumen teori dependensi struktural yang disebutkan Przeworski, persoalan tentang penyerahan (*abdication*) menjadi hampir tidak relevan dalam pembahasan isu otonomi negara. Negara, karena ia membutuhkan modal yang diberikan oleh kaum borjuis, tidak akan pernah mampu menghancurkan kepentingan utama pihak yang terakhir ini—yakni, untuk mengakumulasi modal. Juga merupakan kepentingan negara untuk tidak menghancurkannya. Jadi, apakah kaum kapitalis mengundurkan diri atau tidak, kepentingan utama mereka akan tetap terlindungi. Penyerahan dan otonomi negara dengan demikian merupakan dua hal yang tidak saling terkait. Tidak ada argumen yang mungkin bisa diberikan oleh teori ini untuk menjelaskan suatu fenomena yang sangat mungkin terjadi: kaum borjuis berpartisipasi dalam permainan kekuasaan, yang menjadikan negara kurang otonom, dan, pada saat yang sama, tidak menciptakan sebuah keadaan di mana proses akumulasi modal pribadi menjadi sangat terancam.

Sebagaimana yang telah kita lihat sebelumnya, Przeworski sangat sadar bahwa fondasi teoretis pendekatan otonomi negara didasarkan pada analisis kelas Marxian. Ketiga kubu dalam pendekatan itu percaya pada asumsi-asumsi Marxian yang sama tentang kelas dan kepentingan kelas; mereka berbeda hanya dalam menjelaskan tindakan nyata sebuah kelas tertentu dan akibat-akibat dari suatu hubungan tertentu di antara kelas-kelas sosial.

Setelah menyadari hal ini, sangat aneh mengapa Przeworski, dalam usahanya untuk mengkritik teori-teori tentang otonomi negara, tidak secara langsung menyerang fondasi teori-teori tersebut. Memang, ketika ia mengkritik teori keseimbangan

kelas, sebagaimana yang telah kita lihat di atas, ia membawa kita menentang teori tersebut dan metode analisis kelas dalam memahami otonomi negara, atau dalam memahami negara sebagai sebuah entitas politik secara umum. Namun kritiknya tidak memberi kita dasar yang lebih kuat yang dibutuhkan untuk melancarkan serangan langsung pada struktur konseptual yang paling dalam dari teori-teori tersebut.

Apa yang perlu kita lakukan adalah mempertanyakan analisis kelas itu sendiri sebagai serangkaian asumsi dan suatu penjelasan tentang hubungan-hubungan manusia dalam sebuah sistem ekonomi tertentu. Kita harus bertanya apakah analisis kelas tersebut menjadikan kita mengajukan pertanyaan yang salah dan membuat kita salah memahami berbagai persoalan dari proses-proses politik dalam kapitalisme kontemporer. Bagaimanapun, Marx merumuskan analisis kelasnya ketika kapitalisme masih ada di masa awalnya.

Jika kita dapat menyangkal analisis kelas ini, konsep otonomi negara itu sendiri mungkin akan menjadi tidak bermakna. Di sini saya cenderung mengatakan bahwa kita bisa melakukannya.

Kapitalisme telah banyak berubah sejak Marx merumuskan gagasan-gagasannya. Kepemilikan sarana-sarana produksi sekarang ini menjadi jauh lebih rumit. Sekarang ini sangat umum bahwa, karena berbagai inovasi finansial seperti obligasi dan saham, ribuan pekerja dan pensiunan menjadi pemilik sebuah perusahaan pribadi. Meskipun sekarang ini hampir tidak ada sebuah perusahaan swasta besar yang dimiliki oleh dua atau tiga “kapitalis”, makna kepemilikan itu sendiri telah berubah. Mereka yang memiliki perusahaan tersebut tidak lagi penting: yang paling penting adalah siapa yang menjalankannya (para manajer, para MBA, para pekerja ahli).

Gagasan tentang pekerja sekarang ini juga menjadi lebih rumit. Kita harus membedakan antara pekerja terampil dan

tak-terampil. Juga akan menyesatkan jika kita tidak membedakan antara mereka yang bekerja di sektor manufaktur dan di sektor jasa, dan mereka yang bekerja di sektor swasta dan publik.

Dengan demikian, melihat berbagai perubahan ini,¹³ akan menyesatkan jika kita terus meyakini gagasan-gagasan lama Karl Marx. Sekarang ini, sangat sulit untuk mendefinisikan posisi kelas dan hubungannya dengan “kepentingan obyektif”. Ambil contoh kaum borjuis. Siapa mereka? Mengapa kita tidak bisa mengatakan bahwa jutaan pekerja yang memiliki saham adalah kaum kapitalis? Mengapa seorang Rockefeller dalam kapitalisme 1990-an dianggap seorang borjuis jika ia hanya memiliki sebagian saham dari beberapa perusahaan besar namun tidak mengelola bisnis harian mereka?

Sekarang tentang “kepentingan obyektif”. Sekarang ini menjadi semakin umum di banyak negara maju fenomena bahwa kaum “kapitalis” dan kaum pekerja tak-terampil mereka memiliki kepentingan yang sama: keduanya hanya bisa bersandar pada proses-proses politik di parlemen (demokrasi) untuk mendapatkan perlindungan terhadap persaingan internasional.

Karena berbagai perubahan ini, analisis kelas Marxian hanya akan menyesatkan kita dalam memahami hubungan antara proses-proses politik dan ekonomi. Ambil contoh persoalan tentang penyerahan kekuasaan (*abdication*), misalnya. Dalam kapitalisme modern sekarang ini, sangat sulit dipahami kaum kapitalis sebagai sebuah kelas (untuk sementara lupakan bahwa “kelas” di sini merupakan istilah yang sangat problematis) menyerahkan kekuasaan: karena diversifikasi aktivitas ekonomi, selalu akan ada orang-orang yang perlu berpartisipasi dalam

13 Sebenarnya ada lebih banyak hal yang bisa kita katakan tentang hal ini, misalnya, globalisasi perusahaan-perusahaan swasta, internasionalisasi perekonomian nasional.

proses-proses politik demi untuk memajukan kepentingan-kepentingan perusahaan mereka, dan selalu akan ada orang-orang yang, karena mereka bisa lebih bersandar pada kreativitas ekonomi mereka, melihat proses politik semata-mata sebagai gangguan.

Atau cermati masalah keseimbangan kelas. Apakah memang yang terjadi adalah bahwa hanya kaum kapitalis yang tertarik pada demokrasi, sementara kaum pekerja pada sesuatu yang lain? (sekali lagi, untuk sementara mari kita lupakan bahwa “kaum kapitalis” dan “kaum pekerja” sekarang ini tidak lagi mudah didefinisikan). Dalam banyak kasus, sekarang ini, sebagaimana yang telah kita lihat di atas, kaum kapitalis dan kaum pekerja tak-terampil memiliki kepentingan besar dalam demokrasi. Perkembangan negara-negara kesejahteraan juga memberikan suatu bukti yang meyakinkan bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan sesuatu yang menyatukan kaum borjuis dan kaum pekerja dalam kepentingan bersama, yakni: menjaga kedamaian sosial.

Karena itu, sekarang ini cukup memadai untuk memperlihatkan bagaimana analisis kelas tidak lagi bisa dipertahankan tanpa mempertaruhkan akal sehat kita dalam memahami hubungan antara proses politik dan ekonomi dalam kapitalisme modern. Dan, sebagaimana yang diandaikan Przeworski, tanpa analisis kelas pendekatan otonomi negara menjadi rumah kartu tanpa fondasi (teoretis). Ia menjadi tak meyakinkan dan karena itu harus ditinggalkan.

Pertimbangkan Kembali Masyarakat

NEGARA ITU OTONOM—ini adalah argumen teoretis yang paling penting dari para teoretisi yang menegaskan pentingnya negara. Bagi mereka, kaum Marxis dan Liberal-Pluralis salah: negara bukanlah alat kelas yang berkuasa, dan juga bukan suatu mesin yang netral. Negara merupakan suatu lembaga organik, dan pada dirinya sendiri merupakan aktor. Dengan demikian, menurut Stephen Krasner, negara "tidak bisa dipahami sebagai suatu cerminan dari karakteristik atau preferensi sosial".¹⁴

Argumen ini tidak begitu meyakinkan, karena tiga alasan. Pertama, seringkali mustahil untuk menentukan apa itu kepentingan negara.

Untuk memahami poin ini, mari kita cermati contoh sederhana berikut ini. Di Indonesia, pertarungan politik paling penting sekarang ini terjadi "di dalam" negara, yakni antara kaum teknokrat dan kalangan nasionalis-ekonomi. Yang pertama ingin menjadikan perekonomian negeri itu lebih liberal, sementara yang kedua ingin menjadikannya lebih protektif dan populis. Orang-orang dari kedua kelompok tersebut menempati

¹⁴ Stephen Krasner, 1984, "Approaches to the State: Alternative Conceptions and Historical Dynamics", *Comparative Politics* 16, hlm. 225.

jabatan-jabatan penting dalam berbagai lembaga pemerintahan (bank sentral, menteri perekonomian, komisi perencanaan industri, militer, sekretariat negara, parlemen, dan sebagainya).

Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi kita untuk mengatakan secara *a priori* apa itu kepentingan negara Orde Baru. Arah kebijakan-kebijakan pemerintah diperselisihkan oleh kelompok-kelompok yang saling bersaing tersebut (dan karena itulah mengapa kebijakan-kebijakan itu seringkali tidak koheren).

Sebagian teoretisi yang menegaskan pentingnya negara, dalam menganalisis negara Orde Baru, menyatakan bahwa terlepas dari konflik antara kalangan teknokrat dan nasionalis tersebut, kepentingan utama negara masih bisa dilihat dengan jelas, yakni mengakumulasi modal demi untuk menjaga legitimasinya.¹⁵ Namun pandangan ini agak bodoh dan abstrak karena ia tidak memahami berbagai perbedaan besar antara kebijakan-kebijakan pasar bebas dan kebijakan-kebijakan nasionalistik.¹⁶

Konsep "otonomi negara" hanya bisa dipahami jika ia terkait dengan tujuan-tujuan atau kepentingan-kepentingan tertentu negara. Dengan demikian, karena mendefinisikan kepentingan negara merupakan suatu hal yang mustahil, argumen inti dari para teoretisi yang mengagungkan negara tersebut jadi membingungkan.

Alasan kedua secara langsung terkait dengan alasan pertama: Konsep tentang "otonomi" tersebut melihat negara seba-

15 Lihat, misalnya, Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Monash University, Australia, 1990; dan Richard Robinson, *Indonesia, The Rise of Capital*, Allen & Unwin, 1986.

16 Tentu saja, keduanya bisa dilihat sebagai kebijakan-kebijakan untuk akumulasi modal. Namun konsekuensi mereka sangat berbeda: yang pertama, dalam jangka panjang, akan memperlemah negara; sementara yang terakhir akan memperkuatnya. Mengatakan bahwa kedua kebijakan ini pada dasarnya sama (seperti yang dilakukan oleh para teoretisi negara tersebut) sama dengan mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara kapitalisme dan etatisme ekonomi.

gai "aktor yang padu, yang mempunyai suatu rasionalitas yang unik dan universalistik, serta mempunyai fungsi-fungsi yang jelas".¹⁷ Pandangan tentang negara ini sebagian dipengaruhi oleh Hegel (yang melihat negara sebagai suatu badan organik, suatu kekuatan utuh-padu yang universal), dan sebagian dipengaruhi oleh Weber (yang menganggap bahwa birokrasi rasional-legal merupakan inti dari negara modern). Pandangan tentang negara yang utuh-padu inilah yang menjadikan mengapa para teoretisi yang mengagungkan negara—seperti yang dikatakan Almond¹⁸—jarang menegaskan apa yang mereka maksudkan dengan "negara" dalam definisi yang ketat.

200 tahun yang lalu, ketika Louis XIV bisa mengatakan "*l'Etat c'est Moi*", atau ketika Frederick II bisa menganggap dirinya sebagai "*der erste Diener des Staates*", mungkin tidak mustahil untuk melihat negara sebagai entitas yang mempunyai inti, suatu organisme utuh yang dipimpin satu orang. Sekarang ini negara telah berkembang menjadi sangat kompleks. Negara modern, seperti yang dikemukakan Schmitter, "merupakan kumpulan agensi yang tak berbentuk, dengan batas-batas yang sangat tidak jelas, serta menjalankan berbagai macam fungsi yang sangat kabur".¹⁹ Kekuasaannya tidak lagi bergantung hanya pada satu orang atau lembaga, dan tindakan-tindakannya seringkali tidak sistematis (yang mencerminkan kenyataan bahwa bermacam aktor politik bersaing untuk memengaruhi arahnya).

Alasan ketiga: Argumen para teoretisi yang menegaskan pentingnya negara tersebut gagal memahami perubahan politik. Drama besar transformasi politik terjadi di wilayah "masyarakat". Negara Soviet runtuh bukan karena "preferensi-preferensi"-nya

17 Adam Przeworski, 1990, *The State and the Economy under Capitalism*, Harwood Publisher, hlm. 65.

18 Lihat Gabriel Almond, 1998, "The Return to the State", *APSR* 82.

19 Philippe C. Schmitter, 1986, "Neo-Corporatism and the State", dalam Wyn Grant (ed.), *Political Economy of Corporatism*, McMillan, hlm. 3.

berubah. Korea Selatan menjadi demokratis bukan karena negara Korea tiba-tiba menganggap ada "kepentingan" baru yang lebih baik dan lebih sesuai dengan masyarakat kelas menengah yang sedang muncul. Untuk memahami transformasi politik kita perlu melihat lebih mendalam pada faktor-faktor seperti perubahan teknologi, pertumbuhan atau kemerosotan ekonomi, munculnya gagasan-gagasan politik baru (atau kembali bangkitnya gagasan-gagasan politik lama), serta berubahnya struktur kelas.

Argumen tentang "otonomi negara" tersebut dikemukakan karena para teoretisi negara itu menganggap bahwa baik Marxisme maupun pluralisme-liberal bersifat reduksionistik. Namun ternyata pandangan mereka juga demikian halnya. Konsep tentang "otonomi" tersebut menyebabkan kita mengabaikan berbagai faktor yang perlu kita ketahui jika kita ingin memahami perubahan politik.

Ketiga kelemahan argumen inti para teoretisi yang mengagungkan negara ini cukup memadai untuk menyangkal fokus penyelidikan yang mereka lakukan. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah mempertimbangkan kembali masyarakat. Semakin banyak buku yang membahas pokok persoalan ini. Dalam memahami perubahan politik di negara-negara bekas komunis, misalnya, konsep tentang "masyarakat sipil" sekarang sangat umum diterima. Dalam menjelaskan mengapa sebagian negara Asia Timur bergerak ke arah demokrasi, sedangkan sebagian yang lain tidak, konsep tentang "kelas menengah" dan "perpecahan sosial" sekarang ini kembali dilirik. Saya menganggap pergeseran orientasi penyelidikan ini merupakan suatu hal yang lebih baik.

Struktur dan Aktor: Mengapa Politik Orde Baru Bertahan?

PRESIDEN SOEHARTO telah berkuasa selama lebih dari 28 tahun. Rezim Orde Baru (Orba) yang ia pimpin tidak mengalami perubahan apapun yang signifikan sejak konsolidasi awalnya pada akhir 1960-an.²⁰ Stabilitas politik ini sangat mengejutkan karena, di wilayah sosial dan ekonomi, Indonesia mengalami suatu perubahan yang sangat besar sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan reformasi sosial yang cepat.²¹ Tidak seperti Thai-

20 Para pelajar politik Indonesia sejak akhir 1970-an mencirikan Orba sebagai sebuah rezim militer-birokratis, rezim pembangunan-otoriter, atau rezim neo-patrimonial (lihat King 1982; McVey 1982). Pada dasarnya konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang rezim Orba ini menjelaskan hal yang sama: a) Pusat kekuasaan ada di tangan Soeharto yang, dengan dibantu para teknokrat dan militer, memberlakukan suatu sistem yang sangat mencekik masyarakat Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan caranya sendiri; b) Soeharto memerintah secara personal, dan dikelilingi oleh lingkaran-lingkaran klien yang diangkat berdasarkan hubungan patrimonial; c) Partai-partai politik diciptakan bukan untuk melayani kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan rezim itu sendiri.

21 Selama lebih dari 20 tahun, pertumbuhan GDP negara ini tidak kurang dari 7%. Akibatnya, GDP Indonesia naik setidaknya lima kali lipat. Di wilayah reformasi sosial, kisah sukses bisa dilihat dalam kenyataan bahwa sebagian besar populasi kaum muda telah mengenyam pendidikan dasar universal; program keluarga berencana yang berjalan baik berhasil mengurangi angka kesuburan di Indonesia; swasembada dalam produksi beras tercapai pada 1989 (pada awal 1970-an negara ini adalah pengeksport beras terbesar di dunia). (Untuk ulasan terbaik tentang kisah sukses Indonesia dalam masalah-masalah ini, lihat Booth 1992).

land dan Korea Selatan, dan sampai tingkat tertentu Taiwan, yang mengalami pertumbuhan ekonomi dan demokratisasi politik yang berhasil, Orba Soeharto tampak sangat kuat dalam menahan tekanan apapun ke arah perubahan politik.

Memang, sebagian pihak akan menyatakan bahwa, bersamaan dengan keberhasilan ekonomi, terdapat beberapa perubahan politik dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia. Soeharto kini memanfaatkan peran para elite sipilnya, dan bukannya para elite militer, dalam memobilisasi dukungan bagi pemerintah. Para pemimpin Islam, yang pernah dianggap sebagai salah satu musuh utama rezim tersebut, kini diberi kesempatan yang lebih luas di panggung politik nasional. Pers diizinkan untuk memiliki kebebasan yang lebih besar untuk mengkritik para elite kekuasaan, termasuk anak-anak Soeharto yang sangat kuat. Para aktivis buruh dan mahasiswa diizinkan untuk menggelar berbagai demonstrasi politik asal tidak menyerukan konfrontasi langsung dengan pemerintah.

Namun semua hal baru dalam politik Orba ini tidak meyakinkan kita bahwa prinsip-prinsip dasar otoritarianisme telah ditinggalkan: prinsip-prinsip dasar politik, yang diteguhkan pada akhir 1960-an, tetap tidak berubah; hubungan-hubungan kekuasaan antara Soeharto, para perwira militernya, para teknokratnya, dan “para wakil” rakyat kurang lebih tetap sama. Seorang intelektual terkemuka Indonesia menyebut berbagai gelombang baru dalam politik Orba ini sebagai “demokratisasi pinjaman” (Budiman, 1992). Hal ini berarti bahwa berbagai gelombang baru tersebut hanya dibolehkan berkembang oleh para penguasa sejauh kepentingan utama mereka tidak tersentuh. Namun begitu mereka melihat bahwa kepentingan-kepentingan mereka terancam, mereka bisa dengan mudah menumpas berbagai gelombang ini, membungkam semua suara yang menyimpang, memberangus pers, dan menahan para mahasiswa. Pendeknya, tidak ada yang benar-benar berubah ke-

cuali bahwa sekarang ini rezim otoriter tersebut sedang tersenyum.

Bagaimana kita menjelaskan terus bertahannya otoritarianisme Orba ini? Mengapa Orba berhasil melawan berbagai reformasi yang mendasar, seperti penghapusan berbagai larangan bagi orang-orang untuk mengadakan diskusi dan organisasi politik, perubahan dalam aturan-aturan pemilu, restrukturisasi politik kepartaian, dan sebagainya? Di kalangan mereka yang mempelajari politik Indonesia, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini pada dasarnya bisa dibedakan menjadi dua kelompok. Di satu sisi, orang-orang yang memberikan penjelasan-penjelasan struktural. Mereka menekankan berbagai variabel struktural (ekonomi, sosial, budaya), baik dalam negeri maupun internasional, sebagai faktor-faktor yang menghalangi berkembangnya demokratisasi dalam rezim Orba tersebut. Bagi mereka, pilihan-pilihan para aktor politik dan tindakan-tindakan mereka yang diniatkan atau tidak diniatkan merupakan sesuatu yang tidak relevan (Mackie 1990; Young 1990; Robinson 1990; Budiman 1991). Di sisi lain, ada orang-orang yang menekankan peran para aktor (preferensi, pilihan, dan tindakan mereka) dalam membentuk arena politik Orba. Terus bertahannya politik Orba dianggap sebagai akibat dari tindakan-tindakan sadar para pemimpin strategisnya (Liddle 1991 dan 1992).²²

Saya di sini ingin menyatakan bahwa hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ter-

22 Pembagian kelompok teori menjadi teori struktural dan teori yang berorientasi-aktor ini langsung didasarkan pada perbedaan dalam teori-teori transisi demokratis yang bisa ditemukan dalam kepustakaan perbandingan politik belakangan ini (lihat Perez-Diaz 1993, hlm. 26-29). Sampai tingkat tertentu Kitschelt (1992) juga menjelaskan perbedaan yang sama ketika dia menulis tentang teori-teori perubahan rezim. Penjelasan *process-driven*-nya harus dipahami sebagai penjelasan yang berorientasi-aktor. Kita bisa melihatungkapannya ketika ia mengulas Di Palma: "Bukan kondisi-kondisi struktural, melainkan tindakan-tindakan manusia yang mencapai konsolidasi demokrasi..." (hlm. 1032). Di sini faktor struktural dan tindakan manusia ditempatkan dalam posisi teoretis yang berbeda.

sebut secara teoretis eklektik, dalam pengertian sebagaimana dikatakan Kitschel (1992) bahwa kita hendaknya memadukan pendekatan struktur dan pendekatan *process-driven* dalam menjelaskan perubahan rezim. Namun sebelum saya masuk ke dalam detail-detail penjelasan teoretis eklektik ini, kita harus mengakui bahwa baik teori struktural maupun teori yang berorientasi aktor telah memberi kita berbagai wawasan yang menarik tentang terus bertahannya rezim Orba. Mari kita lihat contoh-contoh gagasan mereka.

Variabel-variabel yang paling sering ditekankan oleh kalangan struktural adalah lemahnya kelas menengah, atau ketergantungan kaum borjuis domestik pada negara dalam mengakumulasi modal. Bagi mereka, 25 tahun pembangunan kapitalis di bawah Orba telah menciptakan suatu keadaan di mana kelas menengah tidak mampu menyatukan diri mereka dalam sebuah kekuatan politik yang kuat untuk menuntut perubahan (Tanter & Young, ed., 1990; Heryanto 1990). Kelas menengah tersebut sangat terpecah-pecah sebagai akibat dari cara pemerintah mengorganisasi perekonomian: orang-orang Cina minoritas mengontrol sebagian besar sektor-sektor ekonomi penting, dan kelas menengah pribumi terpecah-pecah menurut garis regional, keagamaan, dan patrimonial.

Variabel yang paling sering ditekankan oleh para teoretisi yang berorientasi aktor adalah kemampuan Soeharto sebagai politisi dalam memecah-belah para calon lawannya dan memberi imbalan untuk menjaga kesetiaan para pendukungnya. Di sini tindakan-tindakan sadar Soeharto pada beberapa tahun terakhir, misalnya dalam menjaga keseimbangan antara militer, kekuatan politik Islam, dan para pemimpin sipil dalam pemerintahannya, dianggap sebagai ketrampilan seorang politisi ulung dalam menjaga pusat kekuasaan di tangannya. Stabilitas politik yang dinikmati rezim tersebut dilihat sebagai dampak

langsung dari langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh Soeharto dan orang-orangnya.²³

Kebutuhan untuk menjadi eklektik muncul karena masing-masing orientasi teoretis ini tidak memadai untuk menjelaskan persoalan persistensi (atau perubahan, jika ada) dalam politik Orba. Kelemahan utama kalangan strukturalis adalah bahwa mereka sangat deterministik dalam melihat hubungan antara struktur dan tindakan politik. Bagi mereka tindakan-tindakan politik hanya merupakan akibat dari variabel-variabel struktural (posisi ekonomi kelas menengah, atau konfigurasi kekuatan-kekuatan sosio-ekonomi, atau tingkat otonomi negara *vis a vis* masyarakat, dll.). Sejarah, bagi kalangan strukturalis, tidak dibuat oleh manusia, melainkan oleh kekuatan-kekuatan impersonal.

Meskipun benar bahwa faktor-faktor struktural penting (dan mungkin sangat penting), namun akan salah jika kita tidak memberi ruang bagi tindakan, bagi variabel-variabel kontingen yang dihiparkankan oleh pilihan-pilihan yang dibuat oleh para aktor strategis, bagi langkah-langkah politik yang diniatkan maupun tidak diniatkan. Sebagai contoh, tidak ada hambatan struktural bagi Soeharto untuk memilih Jenderal Try Sutrisno dan Prof. Habibie sebagai bawahan terdekatnya dalam jajaran kekuasaan tertinggi (ia dapat memilih beberapa jenderal atau profesor lain). Pilihan ini dibuat sepenuhnya berdasarkan pertimbangannya sendiri (dampak dari pilihan ini sangat penting dalam menjaga stabilitas rezim tersebut karena hal ini memuaskan tuntutan kalangan militer maupun elemen-elemen penting dalam komunitas politik Islam).

23 Contoh terbaik dari teoretisi berorientasi-aktor ini adalah Liddle (1991). Dalam sebagian besar karya-karya terbarunya tentang politik Orba setelah krisis minyak, peran kepemimpinan, kecerdikan Soeharto, dan langkah para pemimpin Islam serta langkah-tandingan dari para elite militer dianggap sebagai faktor-faktor yang paling penting yang perlu kita pelajari untuk memahami politik Orba di tahun-tahun belakangan ini.

Selain itu, dalam beberapa contoh sejarah kita tahu bahwa faktor-faktor struktural bisa diubah oleh tindakan-tindakan sadar para aktor politik. Proses demokratisasi di Korea Selatan dan Thailand pada akhir 1980-an dan awal 1990-an memperlihatkan bagaimana “kelas menengah yang lemah” mampu disatukan sebagai sebuah kekuatan yang kuat, dipimpin oleh para politisi yang cerdas dan para mahasiswa yang berani, untuk melengserkan rezim militer otoriter yang secara ekonomi berhasil. Karena itu, di Indonesia, kenyataan bahwa kelas menengah “lemah” dan terpecah, misalnya, tidak bisa diambil begitu saja sebagai satu-satunya faktor penting yang menjelaskan kegagalan untuk mengubah rezim politik yang ada. Terdapat para pemimpin (sipil dan militer) yang mungkin bisa dianggap sebagai para pembaharu (misalnya, Petisi 50, Abdurrahman Wahid, Arief Budiman), namun kegagalan mereka sejauh ini dalam menggalang dukungan luas di kalangan kelas menengah untuk mereformasi sistem mungkin harus dicari sebabnya dalam cara mereka berkomunikasi dengan audiens yang lebih luas, atau dalam cara mereka mendefinisikan kepentingan rakyat, atau dalam pilihan yang mereka buat dalam memilih sekutu.

Di sisi lain, para teoretisi yang berorientasi-aktor gagal melihat bahwa, sebagaimana dikemukakan Marx, “Manusia membuat sejarah mereka, namun mereka tidak membuatnya persis sebagaimana mereka inginkan.”²⁴ Preferensi dan kepentingan para aktor politik dibentuk oleh lingkungan sosio-ekonomi di mana mereka berinteraksi satu sama lain. Tindakan-tindakan mereka terbatas oleh lingkungan-lingkungan ini. Tentu saja mereka memiliki suatu tingkat kebebasan untuk bertindak, atau mengubah lingkungan. Namun melihat tindakan-tindakan ini tanpa memahami lingkungannya (misalnya, struktur sosio-ekonomi, hubungan ekonomi internasional, lembaga

24 Kata-kata Marx ini ada dalam *The 18th Brumaire* (dalam McLellan, ed., *Karl Marx: Selected Writings*, 1977, hlm. 300).

politik) berarti hanya mengulangi kesalahan para sejarawan “klasik”, yang berpandangan bahwa sejarah hanya hasil tindakan orang-orang besar.

Soeharto mungkin dinilai sejarah sebagai salah satu dari orang-orang besar tersebut (karena alasan yang baik, atau buruk, atau keduanya). Tindakan-tindakannya untuk memelihara sistem tersebut sangat diperkuat oleh kenyataan bahwa perekonomian telah berhasil dijalankan oleh para teknokratnya (karena itu ia memiliki lebih banyak uang untuk membeli kesetiaan). Selain itu, UUD 1945 memberinya berbagai kemungkinan kelembagaan yang bisa ia manfaatkan untuk menciptakan berbagai rintangan yang sangat kompleks bagi kaum oposisi. Ini hanya dua contoh (kita bisa mengemukakan lebih banyak) yang mungkin meyakinkan kita bahwa untuk memahami tindakan-tindakan para aktor politik penting (dalam kasus ini, Presiden Soeharto), kita juga perlu melihat pada faktor-faktor struktural atau kelembagaan—suatu hal yang tampaknya gagal dilakukan oleh para teoretisi yang berorientasi aktor.

Pada titik ini, kita sekarang bisa masuk ke dalam masalah eklektisisme teoretis untuk memahami secara lebih baik politik Orba. Argumen utama kami, yang diambil dari Huntington (1991), adalah bahwa stabilisasi politik maupun demokratisasi politik merupakan fenomena yang kompleks. Mereka disebabkan oleh banyak kekuatan. Sebagian dari sebab ini dihasilkan oleh faktor-faktor struktural, sebagian yang lain tidak. Karena kompleksitas ini, kerangka teoretis kita pada dasarnya bersifat “eksplanatoris”, dan tujuan kita adalah mencapai suatu deskripsi yang menyeluruh, jika perlu dengan mengorbankan sofistikasi analitis (Huntington, *idem*, hlm. xiii-xiv).²⁵

25 Pilihan antara kekomprensifan dan sofistikasi analitis ini dilihat Huntington sebagai sesuatu yang tidak terelakkan. Ia menyatakan bahwa kompleksitas realitas-lah yang mendorong para teoretisi politik pada pertukaran ini. Kitschelt juga menyinggung persoalan ini (1992, hlm. 1034). Ia mengkritik Huntington karena dianggap tidak bisa ke luar dari pilihan ini. Namun ia tidak menjelaskan bagaimana ini terjadi pada Huntington.

Karena itu, dalam memahami persistensi politik Orba, kita tidak harus memilih apakah hanya menggunakan variabel-variabel struktural atau non-struktural saja. Kita harus menggunakan keduanya. Kita menganalisis lembaga-lembaga politik Orba, jenis rezimnya, pembangunan ekonominya, struktur kelasnya, dan sebagainya, serta bagaimana mereka terkait satu sama lain, untuk memberi penjelasan-penjelasan struktural bagi persoalan yang sedang kita pelajari.

Dalam menjelaskan bagaimana para aktor membentuk bentuk politik yang sedang kita kaji, kita menganalisis bagaimana kepentingan-kepentingan dan tindakan-tindakan para aktor tersebut dibentuk dan ditentukan oleh faktor-faktor struktural (jenis rezim, struktur kelas, logika pembangunan ekonomi, dll.). Determinisme harus dihindari di sini: struktur ekonomi, misalnya, mungkin tidak memberi pilihan lain bagi para politisi kecuali mengikuti arahnya; namun para politisi yang mumpuni bisa melepaskan diri dari berbagai rintangan struktural dan menciptakan sejarah.

Revolusi Cina

REVOLUSI CINA merupakan salah satu peristiwa besar di abad ke-20. Baik atau buruk, Revolusi Cina, serta Revolusi Oktober di Rusia, menandai sebuah periode dalam sejarah modern kita, saat perpaduan komunisme dan nasionalisme menjadi kekuatan pendorong terbesar bagi perubahan sosial.

Dalam esai pendek ini saya akan membahas mengapa Revolusi Cina terjadi. Saya juga akan mencoba untuk melihat mengapa kaum Komunis muncul sebagai pemenang dalam revolusi tersebut.

Menurut Lucien Bianco, sebab utama revolusi tersebut tertanam dalam realitas sosial Cina pra-1949: masalah kaum petani. Karena hubungan-hubungan struktural di pedesaan (yakni penghisapan oleh kelas atas, pajak yang terlalu besar oleh negara feodal, dll.) kaum petani dipaksa untuk memikul bagian terberat dari pembagian kerja dan pembagian sosial. Karena itu, dalam sebagian besar sejarah Cina modern, kaum petani menderita. Pemerintahan nasionalis/militer yang berkuasa setelah negara feodal tersebut runtuh pada 1912 gagal memecahkan persoalan ini. Persoalan sosial yang mendasar tersebut tetap tak terpecahkan: karena itu, revolusi sosial merupakan satu-satunya pilihan bagi kaum petani untuk memecahkan persoalan mereka.

Bagi Bianco, imperialisme dan strategi Tentara Merah juga memainkan peran penting. Imperialisme Jepang membangkitkan nasionalisme Cina, suatu perasaan solidaritas kuat yang didasarkan pada kecintaan pada tanahair, yang dimanfaatkan oleh kaum Komunis dengan sangat baik untuk mendukung perjuangan revolusioner mereka. Strategi Tentara Merah dalam perang gerilya terbukti merupakan suatu faktor yang menentukan baik dalam memobilisasi rakyat, terutama di pedesaan, untuk melawan invasi tersebut, maupun dalam menaklukkan pasukan militer Guomintang dalam Perang Saudara setelah Jepang kalah.

Ringkasnya, kita dapat mengatakan bahwa bagi Bianco, sebab utama revolusi tersebut adalah struktur sosial yang tertanam di wilayah-wilayah pedesaan. Namun juga diperlukan faktor-faktor lain untuk mendorong, membentuk, dan mentransformasikan sebab sosial ini menjadi perjuangan revolusioner dan kemenangan kaum Komunis—dan faktor-faktor ini adalah imperialisme dan strategi Tentara Merah.

Seperti halnya setiap peristiwa besar dalam sejarah modern kita, Revolusi Cina merupakan sebuah peristiwa yang kompleks. Tidak ada satu sebab tunggal yang bisa dianggap sepenuhnya bertanggungjawab terhadap terjadinya Revolusi tersebut. Namun, untuk tujuan analisis kita, kita perlu menyederhanakan peristiwa besar dan rumit tersebut dan mencari dua atau tiga faktor untuk diberi penekanan. Dalam hal ini, saya cenderung menyetujui sebagian besar dari argumen utama Bianco. Namun, sebagaimana yang akan saya jabarkan di bawah, saya akan melihat sebab revolusi tersebut dan dampak-dampaknya dari sudut pandang yang sedikit berbeda (yakni kegagalan Guomintang), dan akan memberi penekanan pada peran imperialisme dan kepemimpinan. Dengan kata lain, bukan hanya struktur sosial, melainkan juga gagasan dan pilihan, yang dianggap penting dalam memahami Revolusi tersebut dan dampak-dampaknya.

Jika kita membaca buku Bianco itu secara cermat, khususnya pada bab empat dan lima, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa Guomintang sejak awal telah ditakdirkan gagal dalam memecahkan persoalan sosial yang mendasar tersebut karena tujuan utamanya adalah revolusi nasional (kesatuan dan kemerdekaan) dan reformasi sosial. Baginya, kontradiksi di sektor rural-agrikultural terlalu besar: hanya revolusi sosial yang dapat membebaskan kaum petani dari penderitaan mereka yang semakin besar. “Jalan tengah” tidak akan berhasil. Karena itu, alasan mengapa persoalan sosial yang mendasar tersebut tetap tak terjawab, dan kemudian melapangkan jalan bagi revolusi, bersifat struktural.

Terdapat beberapa kebenaran dalam penjelasan struktural ini. Namun, menurut saya, terlalu menekankan penjelasan struktural ini cenderung mengabaikan beberapa faktor yang juga sangat penting. Faktor-faktor ini adalah faktor-faktor politik dan kepemimpinan.

Pertama, faktor-faktor politik. Chiang Kai-shek, dalam obsesinya untuk menyatukan negeri tersebut dalam waktu singkat setelah Ekspedisi Utara, harus banyak berkompromi dengan para pemimpin militer (Hsu, 1990: 572). Ia kemudian harus bergantung pada kekuatan para pemimpin militer ini sebagai basis kekuasaan Guomintang. Hal ini menjadikan dia tawanan kepentingan para pemimpin militer tersebut. Selain para pemimpin militer ini, Chiang juga mendasarkan rezimnya pada dukungan para saudagar dan bisnis-bisnis besar.

Aliansi politik ini menghalangi Guomintang untuk secara efektif memecahkan persoalan petani tersebut. Para pemimpin militer tersebut enggan melihat reformasi radikal di pedesaan yang pada akhirnya hanya akan membahayakan kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Akibatnya: Guomintang tidak bisa menjalankan reformasi tanah (redistribusi tanah), yang mungkin bisa merupakan suatu pemecahan yang baik bagi

persoalan sosial di pedesaan ini. Dalam hal ini, novelis Pearl S. Buck, yang lahir di Cina dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana hingga 1933, berkata:

Pemerintahan nasionalis tersebut tampak tidak dapat melakukan suatu reformasi nyata dalam hal distribusi tanah dan semua usaha lain karena itu hanya bersifat memperbaiki. Pada pertengahan 1935, jelas bahwa bahaya terbesar bagi keberlanjutannya adalah pengabaian akan reformasi tanah. Ia telah menjadi sebuah pemerintahan dari dan bagi kelas pemilik tanah dan melawan kaum petani. (Buck, 1970: 292)

Benar bahwa Guomintang membuat beberapa kemajuan. Hsu (1990: 565-570) melihat bahwa terjadi beberapa perbaikan khususnya dalam bidang finansial, pendidikan, pembangunan industri, dan transportasi. Di bidang transportasi, misalnya, pada 1936 jaringan jalan raya menghampar sepanjang 115.703 km, dibanding hanya 1.000 km pada 1921; dan dalam periode 1929-32, sistem jalan kereta api hampir berlipat dua. Namun hampir semua kemajuan ini segera tertelan oleh, dan menguap karena, luasnya wilayah Cina dan besarnya persoalannya. Untuk memberi contoh betapa sulitnya bagi suatu pemerintahan untuk memodernisasi Cina, Profesor R.H. Tawney pada 1932 berkata bahwa meskipun 10.000 mil jalan kereta api dibangun setiap tahun di Cina, negeri itu sedemikian luas sehingga memerlukan 180 tahun sebelum Cina memiliki sebuah jaringan jalan kereta api yang memadai sebagaimana Britania (Buck, 1970: 300).

Keluasan wilayah-wilayah Cina dan besarnya masalah-masalahnya mungkin merupakan petunjuk terbaik bahwa Chiang, alih-alih berkonsentrasi pada reformasi finansial dan pembangunan militer, pertama-tama harus berkonsentrasi pada pe-

mecahan persoalan-persoalan utama di wilayah pedesaan (di mana lebih dari 80% orang hidup di sana). Sebagaimana dikemukakan oleh Buck di atas, tanpa perbaikan dalam kehidupan kaum petani (melalui reformasi tanah, misalnya), setiap langkah untuk memodernisasi negeri itu hanya bersifat perbaikan. Namun, karena berbagai rintangan politiknya, Chiang tidak melakukan apa yang harus ia lakukan: tepat sebelum Jepang datang, menjadi jelas bahwa cepat atau lambat para petani dapat dipastikan akan menerima perjuangan Komunis untuk melakukan revolusi melawan Guomintang.

Kedua, kepemimpinan. Jika kita membebaskan diri dari determinisme politik, sangat mungkin untuk berspekulasi bahwa bahkan di bawah rintangan politik yang besar, sebuah kepemimpinan yang cerdas, berani, dan berpandangan luas bisa melindungi Guomintang dan memimpinnya untuk menghadapi para penantanginya. Namun, sayangnya, Chiang Khaisek tidak dapat menyediakan kepemimpinan seperti itu. Ia adalah seorang prajurit dan hanya memiliki pendidikan seorang prajurit. “Hingga tahun-tahun terakhir rezimnya,” tulis Pearl S. Buck, “di hatinya ia tetap seorang prajurit dan belanja kebutuhan militer selalu merupakan sesuatu yang utama. Dan tidak seperti Mao Zedong, Chiang bukan seorang intelektual, juga bukan seorang teoretisi” (1970: 286).

Mungkin Chiang memiliki kualitas untuk menjadi seorang komandan militer yang bagus: keberanian, ketulusan, asketisme. Namun kualitas-kualitas ini tidak memadai untuk menjadi seorang pemimpin yang tantangannya bukan hanya tantangan militer, melainkan juga tantangan politik dan sosial. Menjadi seorang pemimpin yang baik di tahun 1928-1937 yang begitu pelik berarti menjadi seperti Pemimpin Mao di masa Yanan: seorang komandan militer yang hebat, dan pada saat yang sama juga seorang intelektual yang berpandangan jauh, seorang politisi yang lentur, kawan yang bisa dipercaya, dan seorang

ahli strategi yang selalu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.

Selain itu, Chiang tampak tertekan karena wataknya yang penuh kecurigaan. Ia tidak mempercayai siapapun kecuali keluarganya sendiri dan beberapa koleganya, dan karena itu banyak menyingkirkan dari kepemimpinannya orang-orang yang cakap dan baik—antara lain Hu Hanmin, Wang Jingwei, Li Zongren, dan K.C. Wu; (Pearl S. Buck mencatat bahwa pada 1951 Chiang menjadi orang yang terasing tanpa sahabat).

Pendeknya, kepemimpinan Chiang tidak sesuai dengan masanya dan tantangan-tantangannya. Faktor ini, dan rintangan-rintangan politik yang telah disebutkan di atas, memiliki andil dalam kegagalan Guomintang dalam memecahkan persoalan sosial yang mendasar tersebut. Dan karena itu, sebelum krisis yang diumumkan oleh invasi Jepang, benih-benih revolusi telah tertanam.

Dengan datangnya Jepang, dan dengan segala kekejaman dan kekejiannya, benih-benih revolusi tersebut bersemi dan mendapatkan bentuk. Di sisi lain, dampak langsung dari imperialisme Jepang ini, menurut Maurice Meisner, tentu saja adalah penghancuran fondasi Guomintang:

Invasi Jepang tersebut meruntuhkan fondasi rezim Guomintang, karena kaum Nasionalis tersingkir dari kota-kota besar yang menjadi sumber dukungan finansial dan politik utama mereka. Bagi Guomintang, dampak peperangan tersebut adalah kekacauan ekonomi dan korupsi birokratis yang begitu besar—dan, akhirnya, demoralisasi total (Meisner, 1986: 37).

Di sisi lain, perang tersebut membuka jalan bagi kaum Komunis untuk memperkuat posisinya. Sekali lagi, kesalahan Chiang merupakan bagian dari alasannya. Setelah kalah dalam peperangan di Wuhan, Chiang pada Oktober 1938 memutuskan

untuk menarik diri ke pedalaman selatan, Chongqing. Namun, seperti yang dikemukakan Bianco, dalam melakukan hal itu Chiang gagal melakukan satu hal yang sangat penting “yang akan menjadikan strategi perang lokalnya sangat efektif—yakni melakukan perang gerilya di belakang garis-garis pertahanan Jepang” (1971: 149).

Kesalahan ini menjadikan wilayah-wilayah luas di timur dan utara berada dalam kekuasaan pasukan gerilya Tentara Merah: mereka adalah satu-satunya pihak yang tersisa yang mencoba memerangi Jepang. Hal ini juga menjadikan kaum Komunis satu-satunya sahabat bagi rakyat yang bisa dimintai perlindungan ketika mereka disiksa oleh orang-orang Jepang atau para bandit lokal. Pendeknya, kesalahan Chiang untuk tidak melancarkan perang gerilya yang terkoordinasi memungkinkan kaum Komunis untuk menjadi sahabat-pelindung di hati rakyat. Dengan kata lain, invasi tersebut menjadikan kaum Komunis sebagai pahlawan nasional. Merekalah para patriot, dan karena itu dengan mudah merebut hati rakyat (setelah Jepang pergi, kesalahan ini secara militer sangat penting bagi Tentara Merah: pada 1945 wilayah-wilayah luas di utara dan timur berada dalam kontrol kaum Komunis).

Selain itu, kita tidak boleh lupa bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Chalmer Johnson, invasi tersebut membangkitkan nasionalisme kaum petani, “suatu nasionalisme massa yang sangat berbeda dari nasionalisme kaum intelektual”. Nasionalisme kaum intelektual pada dasarnya bersifat borjuis; sebaliknya, nasionalisme kaum petani lebih primitif dan kuat, yakni “nasionalisme keputus-asaan” (Bianco, 1971: 154). Sebagai satu-satunya sahabat yang tersisa di wilayah-wilayah pedalaman di belakang garis-garis pertahanan Jepang, kaum Komunis memiliki kesempatan untuk mengubah “keputusasaan” ini menjadi sebuah gerakan revolusioner. Hasilnya: semakin banyak orang yang bergabung dengan gerakan perlawanan di bawah bendera

komunisme tersebut (Tentara Merah). Pada 1937, menurut Bianco, terdapat 80.000 orang dalam Tentara Merah; namun pada 1945 terdapat 900.000 orang ditambah pasukan milisi yang terdiri atas 2,2 juta orang (1971: 150).

Terlepas dari kesalahan Chiang tersebut, perbaikan besar posisi kaum Komunis selama invasi tersebut hendaknya juga dilihat sebagai akibat dari strategi Mao dan Tentara Merah. Di sini kita dapat berkata bahwa sebagian besar fondasi faktor ini dibentuk selama periode Yanan. Setelah mempelajari kesalahan-kesalahan di Jianxi, Mao merangkul siapa saja yang bersedia untuk ikut dalam “kesadaran proletariat”, terlepas dari apapun kelas sosialnya (lihat Meisner 1986: 46-46).

Hal ini berarti bahwa Mao mencoba—dan berhasil—merangkul para petani yang terampil dan juga kaum borjuis dalam perjuangan revolusionernya; dan dengan demikian secara substansial menambah kekuatan strategisnya. Dalam periode ini Mao juga memperkenalkan metode-metode ekonomi seperti swasembada, swakarya, dan inisiatif lokal; dan mendorong gaya hidup yang didasarkan pada nilai-nilai seperti egalitarianisme, asketisme, kerja keras, dan disiplin diri.

Pendeknya, “warisan-warisan Yanan” membuat kaum Komunis lebih dekat dengan rakyat, dan pada saat yang bersamaan memberi inspirasi pada rakyat untuk berpikir bahwa satu-satunya harapan bagi masa depan Cina terletak pada apa yang sedang dibangun Mao.

Sulit dikatakan apakah kesalahan Chiang atau kreativitas Mao yang pada akhirnya paling punya andil bagi kemajuan pesat posisi kaum Komunis selama periode imperialisisme Jepang. Menekankan yang pertama mengandaikan bahwa kita hanya melihat sejarah dari kegagalan mereka yang kalah; dan sebaliknya, menggaris-bawahi yang kedua cenderung menjadikan kita membesar-besarkan superioritas para pemenang dalam proses sejarah yang tidak pasti dan kompleks. Namun mungkin ada

satu hal yang jelas bisa dikemukakan: karena kedua faktor ini, pada bulan-bulan pertama setelah Jepang dikalahkan kemenangan kaum Komunis telah di depan mata.

18 Januari 1993

Memperkuat Negara

FRANCIS FUKUYAMA telah mengukir namanya sebagai seorang pemikir ilmu sosial yang berpengaruh. Bukunya yang terkenal, *The End of History and the Last Man* (1992), adalah sebuah sintesis kreatif untuk menjelaskan arah perputaran sejarah pasca-komunisme. Dari segi substansi pemikiran, apa yang dikatakan oleh Fukuyama memang bukan suatu hal yang orisinal, sebab pendapat tentang “sejarah yang berakhir” telah diawali oleh Hegel, sebagaimana ditafsirkan oleh Alexandre Kojève. Kekuatan Fukuyama lebih terletak pada kemampuannya menjelaskan dan menghubungkan tokoh-tokoh besar yang ada dalam sejarah, seperti Plato, Hobbes, Locke, Hegel, dan Marx dalam satu kesinambungan pemikiran dan mengaitkannya dengan pergolakan sejarah di pengujung abad ke-20.

Di tengah kecenderungan fragmentasi pengetahuan dan spesialisasi ilmu, kemampuan sintesis semacam itu memiliki daya tarik tersendiri. Apalagi memang, dengan runtuhnya komunisme, orang tergerak untuk kembali melihat sejarah sebagai sebuah proses perubahan besar yang menyeret nasib manusia. Fukuyama mencoba memenuhi hasrat semacam itu dan mengantarkan kita kembali ke persoalan-persoalan dasar dalam sejarah serta jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh pemi-

kir-pemikir besar di masa lalu. Singkatnya, lewat *The End of History*, ia telah memberi sumbangan penting dalam membantu kita memetakan masa depan, dengan mengacu pada elemen-elemen dasar manusia, seperti kehendak untuk bebas, sebagai motor penggerak perubahan.

Setelah *The End of History*, Fukuyama terus menulis. Dalam *Trust* (1995), ia mencoba menggunakan konsep modal sosial, *social capital*, untuk memahami lebih jauh persoalan dan keberhasilan pembangunan ekonomi di berbagai negara. Sementara itu, lewat *The Great Disruption* (1999) dan *Our Post Human Future* (2002), ia mengajak kita memahami bagaimana proses perubahan sosial dan perkembangan teknologi memengaruhi nasib dan masa depan manusia. Karya-karya ini membuktikan minat Fukuyama yang luas dan kemampuannya yang mengagumkan untuk menyerap hasil-hasil mutakhir perkembangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu.

Buku *Memperkuat Negara* agak berbeda dari karya-karya Fukuyama sebelumnya. Buku ini lebih merupakan eksplorasi awal penulisnya mengenai sebuah tema klasik, yang telah menjadi bahan tulisan dari berbagai filsuf dan ilmuwan politik di masa lalu. Tidak seperti dalam *The End of History*, dalam buku ini Fukuyama tidak memasuki wilayah filosofis tentang negara. Ia bahkan tidak membahas secara khusus berbagai teori tentang negara yang menjadi perdebatan ramai di kalangan ilmuwan sosial pada 1970-an dan 1980-an.

Sumbangan Fukuyama lewat *Memperkuat Negara* terletak pada kejernihan berpikirnya dalam melakukan konseptualisasi peran negara, di tengah berbagai kebingungan dalam memahami pergolakan peristiwa pada awal abad ke-21, khususnya setelah peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat serta terus berlanjutnya berbagai peristiwa menyedihkan, seperti perang sipil, bencana kelaparan, dan merebaknya penyakit AIDS di berbagai belahan dunia. Dalam melakukan semua ini, ciri khas tulisan

Fukuyama bisa langsung terbaca: jelas, mutakhir, dan mampu merangkum substansi persoalan secara sederhana dari berbagai isu dan peristiwa yang kompleks.

Bagi Fukuyama, aksi-aksi terorisme, penyebaran penyakit, bertahannya tingkat kemiskinan, serta merebaknya perang sipil bukanlah hal-ikhwal yang berdiri sendiri. Peristiwa-peristiwa itu merupakan gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal menjalankan perannya. Menurutnya, gejala kegagalan semacam itulah yang menjadi ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad ke-21.

Sebagai jawaban terhadap kegagalan ini, Fukuyama berpendapat bahwa sudah saatnya kita memperkuat peran negara, dengan terlebih dahulu memahami perannya dalam masyarakat. Lebih jauh lagi, ia berkata bahwa pandangan kaum pro-pasar pada 1980-an mungkin agak simplistik. Waktu itu, sebagai reaksi atas merebaknya berbagai bentuk statisme, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara sedang berkembang, kaum liberal menyodorkan alternatif deregulasi, debirokratisasi, privatisasi, dan semacamnya. Alternatif semacam ini menjadi penggerak perubahan ekonomi, yaitu dengan memangkas intervensi ekonomi negara ke tingkat yang minimal. Dalam beberapa hal, alternatif ini membawa hasil-hasil yang menggembirakan: pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan integrasi pasar.

Namun dalam beberapa hal lain, ia justru membawa problematika baru: berkurangnya peran negara dalam ekonomi juga terkait dengan merosotnya kapasitas negara untuk melaksanakan fungsinya yang memang perlu. Hal terakhir ini dapat menyebabkan gejala yang telah saya singgung di atas tadi, yaitu gejala kegagalan negara, dengan akibat yang menyedihkan.

Sepintas lalu, pendapat seperti ini, yang dilontarkan oleh penulis *The End of History*, terkesan aneh dan menentang tesisnya sendiri di masa sebelumnya. Semula Fukuyama berkata bahwa setelah runtoknya sistem komunis, paham liberalisme tidak lagi memiliki pesaing yang serius—dan ia mengatakan hal ini tidak dengan kesedihan dan penyesalan. Sekarang, dengan menyatakan bahwa negara harus diperkuat, kita mungkin bertanya: adakah Fukuyama sudah melupakan samasekali bukannya yang terdahulu? Apakah dia sekarang sudah menjadi pendukung statisme, bahkan sosialisme?

Bagi sebagian orang, semua itu mungkin sudah cukup untuk sampai pada kesimpulan bahwa pendulum sejarah kini telah bergerak, dari deregulasi ke rebirokratisasi, dari liberalisme pada 1980-an ke statisme baru pada awal abad ke-21.

Tapi betulkah? Sebelum terburu-buru sampai pada kesimpulan sebesar itu, kita harus menyimak apa yang sesungguhnya dikatakan Fukuyama tentang peran negara. Sumbangan terpenting buku ini justru terletak pada konseptualisasinya yang jelas, singkat, dan sederhana menyangkut masalah besar ini. Dalam banyak hal, masalah inilah yang sering menjadi inti perdebatan seru di berbagai kalangan, namun yang anehnya jarang diuraikan secara jelas dan akurat.

Bagi Fukuyama, sebagaimana diuraikan dalam *Memperkuat Negara*, peran negara harus dipahami dalam dua dimensi, yaitu cakupan (*scope*) maupun kekuatan atau kapasitas (*strength*). Kedua hal ini merupakan alat analisis buat kita untuk membedah apa yang sesungguhnya dimaksud dengan peran negara, serta peran seperti apa yang kita anggap ideal untuk dilakukannya.

Suatu negara yang kuat ditandai oleh kemampuannya menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang dilahirkannya ditaati oleh masyarakat, tanpa harus menebarkan ancaman, paksaan, dan kecemasan yang berlebihan. Elemen dasar yang ada pada

negara yang kuat adalah otoritas yang efektif dan terlembaga. Jika terjadi pelanggaran atau penentangan terhadap otoritas ini, ia mampu mengatasinya, kalau perlu dengan alat-alat pemaksa yang secara sah dikuasainya. Hanya dengan kekuatan semacam inilah negara mampu menjaga keamanan, ketertiban, kebebasan, serta—jika bersifat intervensionis—mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Jika negara tidak mampu menjaga otoritas semacam ini, ia disebut sebagai negara lemah.

Baik negara yang kuat maupun yang lemah memiliki cakupan peranan yang berbeda, dan tidak otomatis berhubungan. Cakupan itu ditentukan dari seberapa jauh negara tersebut melakukan atau tidak melakukan kegiatan publik tertentu, seperti pembentukan sistem pertahanan dan peradilan, memungut pajak, melakukan intervensi dan regulasi ekonomi, membangun infrastruktur, dan sebagainya.

Negara minimal adalah negara yang hanya membatasi cakupan kegiatannya pada hal-hal yang bersifat elementer, seperti pembentukan sistem pertahanan dan peradilan, penyediaan sarana infrastruktur dan pencetakan matauang. Sebaliknya, negara yang dirigis atau intervensionis ditandai oleh cakupan kegiatan yang ekspansif dan ambisius, seperti pemicuan unit-unit bisnis, penguasaan dan pengelolaan langsung sumber-sumber ekonomi, penjaminan asuransi sosial, penciptaan regulasi yang berlebihan atas segala kegiatan masyarakat, dan sebagainya.

Dimensi kedua peranan negara itulah yang sering menjadi sumber perdebatan antara kaum liberal dan kaum statis. Yang satu ingin agar negara hanya membatasi pada kegiatan-kegiatan publik yang bersifat elementer, yang satu lagi ingin agar negara melakukan ekspansi kegiatan sejauh mungkin—walaupun mungkin tidak lagi bersifat total, sebagaimana yang ada pada sistem komunis.

Dalam *Memperkuat Negara*, Fukuyama tidak membahas terlalu jauh substansi dan kekuatan masing-masing pilihan ini. Ia mengajak kita untuk lebih banyak memperhatikan masalah penguatan kapasitas dan otoritas negara dalam melakukan perannya. Ia mengingatkan kita bahwa pada abad ke-20 banyak negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin melakukan ekspansi kegiatan ekonomi besar-besaran, tanpa daya dukung kelembagaan yang memadai. Mereka sangat ambisius ingin mengatur begitu banyak aspek kehidupan, tetapi kemampuan pemerintahan mereka begitu lemah, baik karena ketidakmampuan administratif maupun karena perilaku korupsi dan semacamnya. Akibatnya adalah kegagalan dan bencana kemanusiaan yang menyedihkan.

Buat saya, justru dengan cara ini Fukuyama sebenarnya memberikan landasan konseptual yang lebih luas terhadap aspirasi kaum liberal. Kebijakan ekonomi pro-pasar harus terus dilakukan bersamaan dengan penguatan negara, bukan pada cakupan kegiatannya, tetapi lebih pada kemampuannya dalam memainkan peran sebagai lembaga pengatur dan satu-satunya pemegang kekuasaan pemaksa dalam masyarakat.

Dengan cara pandang semacam ini, kalau kita tarik pada tingkat *grand theory*, Fukuyama sebenarnya ingin mempertautkan dua tradisi besar: Machiavelli, Hobbes, dan Hegel di satu pihak, serta Adam Smith, Locke, dan Kant di pihak lain. Yang pertama mewakili tradisi pemikiran tentang negara, kekuasaan, dan otoritas, dan yang kedua adalah tokoh-tokoh terdepan dalam gagasan tentang kebebasan, otonomi individu, dan moralitas. Kedua tradisi ini, walaupun bisa dibahas secara terpisah, sebenarnya terkait dan saling memperkuat. Kebebasan dan kesejahteraan ekonomi tidak mungkin tercapai tanpa hadirnya negara yang mampu menjalankan perannya secara efektif. Sebaliknya, negara yang kuat tanpa menjamin kebebasan dan kesejahteraan warganya tidak akan mampu bertahan lama.

Memperkuat Negara tentu tidak bermaksud bicara terlalu jauh mengenai ide-ide besar demikian. Tetapi sebagai sebuah upaya untuk mengerti dengan lebih jelas masalah negara, perannya, serta berbagai persoalan yang ada di awal abad ke-21, buku tersebut dapat menjadi bahan pengantar yang bermanfaat.

Jakarta, 1 Oktober 2005

Pedang Saleh Afiff:

Tentang Isu-isu Ekonomi-Politik

Teori Konspirasi dan Krisis Moneter

(Bersama M. Chatib Basri)

SAAT KERUSUHAN SOSIAL merebak tahun lalu, kita mendengar munculnya banyak spekulasi yang mencoba menggambarkan adanya tangan-tangan tersembunyi yang ingin memojokkan kelompok tertentu atau ingin menjatuhkan pemerintah. Spekulasi ini bersumber pada sebuah teori yang sederhananya dapat disebut sebagai teori konspirasi.

Kini, dalam menjelaskan gejala terpuruknya rupiah secara fantastis, teori semacam itu muncul lagi, mungkin dengan popularitas yang makin meningkat. Peristiwa yang ingin dijelaskan berlainan, tetapi karakteristik penjelasannya sama saja. Dalam hal ini gejala yang *obvious*, yaitu kerusuhan sosial dan krisis moneter, dianggap bersumber dari sesuatu yang samasekali berbeda, remang-remang, dan bersifat politik. Adanya unsur politik ini diyakini sebagai indikasi yang menunjukkan keterkaitan antara gejala yang ingin dijelaskan, *explanandum*, dan pergesekan kekuasaan di tingkat elite.

Salah satu contoh teori konspirasi demikian bisa dilihat pada tulisan Kwik Kian Gie di harian *Kompas* edisi 26 Januari yang berjudul “Utang Swasta atau Politik?” Di sini Kwik me-

nyanggah penjelasan konvensional yang menyatakan bahwa merosotnya nilai rupiah disebabkan oleh pemburuan dollar untuk membayar utang swasta yang sudah atau akan jatuh tempo dalam waktu dekat ini. Buat dia, dengan nilai dollar yang melonjak drastis, kaum swasta kita sudah tidak mampu dan tidak mau membayar utang mereka. Jadi, tidak benar kalau mereka sekarang memburu dollar. Dan karena itu tidak benar pula jika dikatakan bahwa besarnya jumlah utang swasta yang bermasalah berkorelasi langsung dengan proporsi jatuhnya rupiah.

Lalu, faktor apa yang menjatuhkan rupiah? Bagi Kwik, faktor ini harus dicari pada *political invisible hands*. “...Saya mulai curiga,” tulisnya, “bahwa ada tangan jahil yang memang mau merusak ekonomi Indonesia dengan tujuan politik... Hanya apa sasarannya, dan siapa pelakunya, itulah yang samasekali gelap buat saya.”

Selain pada Kwik, contoh lain dari teori konspirasi dapat pula dilihat pada penjelasan Anggito Abimanyu. Doktor ilmu ekonomi dari Universitas Gadjah Mada ini, dalam sebuah wawancara di harian *Republika* edisi 24 Januari (“Soal Permainan Politik di Balik Krisis Rupiah, Mereka Penghianat”), berbicara sedikit lebih terperinci ketimbang Kwik. Ia berpendapat bahwa aktor-aktor di balik krisis rupiah adalah “sekelompok konglomerat yang ‘sengaja memperlakukan rupiah untuk tujuan politik’”.

Siapa mereka itu? “Mereka... berasal dari para pengusaha domestik yang selama ini mendapat kemudahan dan perlindungan pemerintah.” Mereka, menurut Abimanyu, tidak bekerja sendiri, tetapi sudah menjalin semacam jaringan kerjasama dengan para *fund managers* di luar negeri.

Tujuan para konspirator itu, bagi Abimanyu, sudah terang-benderang. Mereka “sedang memaksakan kehendaknya untuk mencalonkan seseorang untuk menjadi wakil presiden, bahkan kalau bisa calonnya bisa masuk menjadi presiden”. Buktinya?

Kalau teori konspirasi seperti itu benar, dalam banyak hal krisis moneter yang kini kita alami tidak lagi membingungkan,

setidaknya secara konseptual. Masalahnya sudah jelas, dan untuk menyelesaikannya kita tinggal mencari para konspirator tersebut, cekal mereka, adili mereka. Selesai. Dan untuk itu pemerintah tentu tidak perlu minta bantuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan tidak perlu pula repot-repot melakukan reformasi ekonomi.

Tapi tentu saja akal sehat mengharuskan kita untuk bertanya: betulkah teori konspirasi itu? Sampai seberapa jauh “proposisi” yang dikandungnya memang bisa dianggap sebagai kebenaran?

Dalam soal pembuktian, kalau kita telusuri lebih jauh tulisan Kwik dan pendapat Abimanyu dalam wawancara itu, akan terlihat celah yang menganga lebar. Penjelasan mereka memang “maut”, tapi sayangnya ia disertai oleh pembuktian yang nyaris nihil dan sangat bersifat sporadis.

Abimanyu, misalnya, begitu saja mengatakan bahwa ada “sekelompok konglomerat” yang bermain di belakang kemelut rupiah. Tapi, siapa mereka sebenarnya, kapan mereka melakukan semua itu, dengan apa, bagaimana, di mana? Darimana ia tahu bahwa saat ini ada megaprojek politik dari sejumlah pengusaha domestik yang berkerjasama dengan para *fund managers* global? Terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, Abimanyu tidak memberi jawaban sedikit pun.

Pada Kwik kita tahu bahwa di salah satu bagian tulisannya ia telah terlebih dahulu mengakui bahwa ia sebenarnya masih tidak mengerti siapa dan apa tujuan para konspirator itu. Dia, dalam kata-katanya sendiri, masih berada dalam “gelap”. Dan, dengan cara ini Kwik sesungguhnya sudah menutup kemungkinan bagi kita untuk bertanya lebih jauh tentang bukti-bukti yang dia miliki.

Jadi, ibarat seorang penulis novel detektif, Kwik meminta para pembacanya mereka-reka sendiri berbagai fakta yang bisa dimasukkan ke dalam konstruksi teori konspirasi dia.

Ditinjau dari segi asumsi dasar, kualitas serta status penjelasan Kwik dan Abimanyu juga tidak jauh berbeda. Dalam hal ini yang paling menarik untuk kita perhatikan adalah teori Kwik.

Seperti yang terbaca dalam tulisannya, Kwik menjelaskan bahwa dalam melakukan aksinya, cara yang digunakan oleh sang Konspirator adalah dengan menjadi *price leader* bagi dollar di pasar valas di Jakarta dan Singapura. Dengan dana hipotetis sekitar 100 juta dollar, si “penggoyang politik” ini merontokkan nilai rupiah dengan mengontak agennya di sebuah bank Singapura untuk membeli dollar dengan nilai lebih tinggi daripada harga pasar.

Katakanlah harga di pasar Rp13.000 per satu dollar. Dengan berani sang Konspirator memberi sinyal bahwa ia akan membeli dollar seharga Rp14.000. “Harga ini,” tulis Kwik, “kemudian diteruskan ke Reuters. Reuters meneruskannya ke seluruh dunia, sehingga semua pedagang valas di dunia melihat di monitornya bahwa kurs dollar sudah melonjak dari Rp13.000 menjadi Rp14.000.” Jika sudah begini, sang Konspirator telah berhasil menciptakan kondisi keseimbangan pasar yang baru, dan orang pun ramai-ramai akan mengikutinya. Hal semacam itu, menurut Kwik, bisa dilakukan berkali-kali dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum jumlah dollar yang hipotetis tadi terkuras habis.

Dengan model penjelasan begini, memang terlihat kejelian Kwik dalam memahami bagaimana mekanisme pasar uang dan aktor-aktor di dalamnya bekerja. Namun, kita harus ingat bahwa model demikian hanya bisa masuk akal jika dua asumsi terpenuhi.

Yang pertama: volume pasar uang relatif kecil. Jika volume pasar uang relatif kecil, sang Konspirator memang bisa memengaruhi pasar dengan basis modal yang tak terlalu besar. Kalau volume pasar relatif besar, modal yang dibutuhkan ber-

jumlah terlalu fantastis sehingga akan sulit dibayangkan bahwa ada pengusaha domestik kita yang mampu melakukannya dalam kondisi seperti sekarang.

Yang kedua: ketidaknormalan kondisi pasar. Dalam hal ini para pelaku pasar bersedia membeli dollar—bukan hanya menjual—pada harga lebih tinggi sebagaimana yang “diminta” oleh sang Konspirator karena adanya kondisi ketidakpastian yang relatif besar. Dalam kondisi ketidakpastian, bila para pelaku pasar mengambil sikap *risk averse*, mereka memang akan cenderung mengikuti begitu saja tindakan para pelaku lainnya. Dan ini tidak mungkin terjadi terus-menerus, terbukti dengan *swap rate* yang menjadi negatif ketika kurs dollar mencapai Rp16.000.

Katakanlah kedua asumsi demikian memang terpenuhi, pertanyaan yang harus segera dijawab adalah apakah kita serta-merta bisa mengambil kesimpulan bahwa motif di balik semua itu adalah motif politik?

Dalam kondisi pasar uang yang volumenya relatif kecil, seperti yang juga ditekankan oleh Kwik, sang Konspirator tidak perlu meletakkan seluruh asetnya untuk memengaruhi pasar. Jika harga telah mencapai titik keseimbangan baru yang dia inginkan, misalnya Rp14.000, nilai aset dia akan meningkat karena menguatnya dollar. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa kerugian yang diderita oleh sang Konspirator justru akan berjumlah lebih kecil ketimbang keuntungan yang diperolehnya. Artinya, ia, dengan berbuat sedemikian rupa untuk menurunkan rupiah, akan memperoleh keuntungan ekonomi yang riil.

Jika memang demikian, motif para pelaku yang ingin merusak nilai rupiah menjadi sangat jelas, yaitu sekadar mencari keuntungan ekonomi. Dengan kata lain, dalam model penjelasan Kwik, sang Konspirator—kalau ia betul-betul ada—sesungguhnya tidak harus bermotif politik. Jika ia bermotif politik, penjelasan yang diberikan haruslah spesifik Indonesia, lalu pertanyaan yang harus dijawab adalah mengapa pola yang sama—walaupun

relatif sedikit lebih ringan—terjadi juga di Korea, Thailand, Malaysia bahkan sempat menyentuh Hong Kong dan Amerika Serikat sendiri.

Karena itu pula kita harus kembali lagi pada persoalan pembuktian. Model penjelasan Kwik tidak dengan sendirinya menggambarkan bahwa sang Konspirator memang bertujuan politik dan ingin menjatuhkan pemerintah. Tanpa bukti-bukti yang meyakinkan, dibutuhkan semacam *leap of faith* yang cukup dahsyat untuk mengambil kesimpulan seperti itu.

Di samping berbagai kelemahannya, teori konspirasi seperti yang terdapat pada tulisan Kwik dan wawancara Abimanyu memang memiliki daya tarik tersendiri. Dalam situasi krisis yang membingungkan, teori ini menawarkan sebuah kepastian dan kesederhanaan berpikir.

Apalagi, sejak tahun-tahun terakhir ini, kita agaknya tidak lagi mampu dan mau melihat bahwa masih banyak persoalan yang tidak harus bersangkut-paut dengan politik dan motif kekuasaan. Kita, dengan kata lain, sedang terjebak dalam sebuah situasi yang digambarkan dengan baik oleh sebuah film yang pernah populer beberapa tahun lalu.

Dalam *Forrest Gump*, film itu, Forrest si Lugu memutuskan untuk berlari selama tiga tahun. Para wartawan pun bertanya kepada Forrest, “Apakah Anda berlari untuk perdamaian? Apakah Anda sedang mengejar suatu rekor?” Segala macam pertanyaan dilontarkan kepada Forrest: tak seorang pun percaya bahwa ia berlari sekadar karena ia ingin berlari.

Seperti para wartawan itu, kita saat ini terlalu mudah untuk berwasangka terhadap berbagai macam hal. Akibatnya: segala macam gejala yang muncul dalam masyarakat dengan cepat kita masukkan dalam format skenario teori konspirasi, termasuk gejala krisis moneter yang saat ini kita hadapi.

Blok Cepu, Mission Accomplished

KESEPAKATAN BLOK CEPU adalah sebuah prestasi tersendiri dalam sejarah perminyakan Indonesia. Seharusnya kita merayakannya, kemudian memikirkan bagaimana potensi penghasilan tambahan yang cukup besar bagi negara dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Sayangnya, sudah menjadi kebiasaan kita belakangan ini untuk melihat sisi negatif dari semua hal dan membesar-besarkan kemungkinan buruk yang bisa terjadi di masa depan. Kita menjadi bangsa yang pesimistis, perengek sekaligus cerewet, dengan horizon yang tak lebih jauh dari apa yang tampak di depan hidung.

Itulah kesan yang saya peroleh dari kalangan yang menentang kesepakatan Blok Cepu. Mereka memakai argumen-argumen nasionalisme yang sudah usang, dan mengajak kita untuk kembali lagi ke suasana 1950-an dan 1960-an. Tokoh seperti Kwik Kian Gie bahkan pernah berkata: kita harus menunjuk Pertamina sebagai operator Blok Cepu, berapapun ongkosnya. Kita seolah-olah berada dalam dunia hitam-putih. Yang satu adalah simbol segala kebaikan dan sikap pro-rakyat, sementara yang satunya lagi merupakan simbol segala kebu-

rukan dan anti-rakyat. Perusahaan asing pasti merugikan kita, sementara perusahaan negara pasti sebaliknya.

Kita hanya bisa mengurut dada terhadap argumen semacam itu. Zaman terus berubah dengan cepat, tapi pikiran sebagian orang ternyata senantiasa berjalan di tempat. Prof. Clifford Geertz mungkin harus meneliti sekali lagi di Indonesia, dan menulis buku berjudul *The Involution of Mind in Jakarta*.

Saya ingin mengingatkan, salah satu soal fundamental ekonomi Indonesia berhubungan dengan minyak bumi. Pada 1970-an dan pertengahan 1980-an, harga minyak membubung tinggi dan kita bersorak kegirangan karena adanya bonanza minyak. Hasilnya, antara lain, adalah puluhan ribu SD inpres, puskesmas, jalan raya, dan tambahan ribuan guru.

Sejak dua tahun lalu harga minyak meroket lagi, bahkan mencapai rekor pada akhir tahun lalu. Tapi kita justru menjerit. *No bonanza, only pain and desperation*. Anggaran tercekik, subsidi harus dipangkas, beban hidup masyarakat bertambah.

Mengapa? Jawabnya sederhana. Pada zaman Pak Harto, produksi minyak kita jauh di atas tingkat kebutuhan domestik. Pada 1977, misalnya, Indonesia memproduksi 1,6 juta barel per hari, sementara kebutuhan domestik hanya sekitar 0,25 juta setiap hari. Selisih itulah yang kita nikmati dan menjadi penggerak pembangunan ekonomi pada zaman Orde Baru, terutama dari awal 1970-an hingga pertengahan 1980-an. Sekarang selisih demikian sudah menguap, malah kita sudah tekor. Kebutuhan domestik terus bertambah, sementara produksi minyak cenderung konstan, bahkan sejak 1998 terus mengalami penurunan. Dalam posisi seperti ini, melambungnya harga minyak jelas bukan lagi rahmat, tetapi tohokan yang tepat di ulu hati.

Kondisi seperti itu yang mendorong pemerintah segera menghidupkan kembali proses perundingan Blok Cepu yang telah terbengkalai selama lebih dari lima tahun. Jika dikelola

dengan baik, blok ini mampu memompa minyak dalam jumlah yang cukup fantastis, yaitu sekitar 20 persen kapasitas produksi nasional. Dengan ini kita akan bisa kembali menjadi *net exporter*, dan menggunakan hasilnya demi kemakmuran rakyat.

Dari perhitungan kasar, nilai produksi yang dapat diperoleh dalam sepuluh tahun pertama bisa mencapai Rp200-300 triliun, atau sekitar Rp25 triliun per tahun. Berapa sekolah, rumah sakit, dan fasilitas publik yang dapat dibangun dengan duit sebanyak itu setiap tahun?

Karena itu, setiap pemerintahan yang bertanggungjawab harus mengupayakan agar perundingan ini sukses dan tidak bertele-tele. Jika gagal, kita harus menunggu lagi hingga 2010, yaitu berakhirnya masa kontrak Exxon, dan baru bisa menikmati hasil dari Blok Cepu paling cepat pada 2012. Itu pun jika kita menang dalam perkara ini di pengadilan arbitrase internasional.

Pada saat memulai negosiasi dengan pihak Exxon, tim negosiasi dihadapkan pada banyak persoalan. Tapi dari semuanya, hanya tiga persoalan yang fundamental, yaitu *participating interests* (PI), pembagian hasil (PH), dan *operatorship*. Dari ketiganya, dua faktor pertamalah yang paling berpengaruh terhadap jumlah dana yang diterima oleh negara atau pihak Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina.

Perundingan tidak bermula dari kertas kosong yang putih bersih. Sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih, telah ada kesepakatan awal dalam dokumen *head of agreement* (HOA) yang telah diparaf antara pihak Exxon dan Pertamina. Dalam dokumen ini telah diatur, antara lain, pembagian PI masing-masing pihak, yaitu Exxon 50 persen, Pertamina 50 persen, dan dengan pembagian hasil 60:40. Dengan ini, jika produksi telah dimulai, pembagian hasil di ujungnya adalah pemerintah pusat 60 persen, Pertamina 20 persen (50 persen

x 40), Exxon 20 persen. Artinya, pihak Indonesia akan memperoleh 80 persen perolehan di Blok Cepu dan sisanya buat Exxon (20 persen).

Tanggungjawab yang dibebankan kepada tim negosiasi adalah penyelesaian perundingan secepat-cepatnya dengan hasil yang maksimal buat negara. Karena itu harus dicari jalan agar hasil perundingan sekarang jauh lebih baik ketimbang hasil negosiasi sebelumnya yang dituangkan dalam HOA. Dan sebagaimana umumnya setiap proses negosiasi, yang terjadi adalah proses tawar-menawar, ulur-mengulur, bahkan gertak-menggertak.

Setelah proses negosiasi yang alot selama kurang lebih setahun, hasil perundingan ini sudah kita ketahui bersama. Dalam komposisi PI kini pemerintah daerah memperoleh 10 persen yang didapat secara proporsional dari Exxon dan Pertamina. Yang drastis adalah pada pola pembagian hasil: sistem *adjusted split* diperkenalkan. Dengan sistem itu, pihak Indonesia secara keseluruhan memperoleh hasil yang jauh lebih besar ketimbang sebelumnya, yaitu 93,25 persen pada harga minyak saat ini. Kalau toh harga minyak melorot ke tingkat sangat rendah, katakanlah US\$30 per barel, kita masih menikmati porsi yang besar, yaitu 86,5 persen. Artinya, perolehan Exxon dapat kita turunkan lumayan drastis, dari 20 persen menjadi 6,7-13,5 persen. Itu sebabnya seorang kawan saya yang ahli perminyakan berkata, kesepakatan akhir Blok Cepu adalah salah satu *deal* terbaik yang pernah ada dalam dunia energi di Indonesia.

Tentu, setelah meraih sukses besar pada dua isu sekaligus (PI dan PH), kita tidak mungkin seenaknya menuntut dengan mutlak pada isu penting lainnya, yaitu *operatorship*. Kompromi harus dilakukan, sejauh masih dalam batas yang wajar dan mendukung tujuan besar kita untuk kembali menjadi *net exporter* dan menggunakan hasilnya demi kesejahteraan rakyat.

Pemahaman seperti itulah yang pada akhirnya menelurkan konsep *joint operatorship*, yang membagi kewenangan operasi secara bertingkat, dengan perwakilan masing masing pemilik PI secara proporsional dalam menentukan kebijakan besar di lapangan. Dalam praktiknya, Exxon yang akan bertindak sebagai manajer umum, namun dalam melakukan aktivitasnya ia harus menyertakan Pertamina.

Dengan semua itu, Pertamina memiliki peluang emas untuk meningkatkan kinerjanya. Perusahaan berpelat merah ini akan memperoleh tambahan pendapatan yang besar (perolehan buat Exxon persis sama dengan perolehan buat Pertamina). Perusahaan ini juga mendapat rekan kerja kelas dunia dengan kemampuan teknologi dan finansial yang sulit ditandingi oleh siapapun saat ini (Exxon adalah perusahaan dunia terbesar). Singkatnya, Pertamina saat ini memperoleh momentum untuk tumbuh lebih baik dengan memanfaatkan peluang yang sekarang terbuka.

Sebagai seorang yang pernah terlibat dalam tim negosiasi, saya merasa bangga bahwa perundingan yang melelahkan itu berakhir dengan baik dan memuaskan kita. Lima tahun lebih sumberdaya alam kita di Blok Cepu disandera oleh ketidakpastian dan kekeburan prioritas. Kini semua itu telah menjadi bagian dari masa lalu. Pada akhirnya kita bisa berkata bahwa kita masih memiliki akal sehat. *Mission accomplished*.

Terus terang, saya agak kesulitan dalam mengikuti alur berpikir orang-orang yang mengkritik hasil perundingan itu. Sebagian dari mereka hanya melihat pada satu isu, yaitu *operatorship*, tanpa mau mengerti sedikit pun tentang konteks persoalan besar yang melibatkan isu-isu penting lainnya. Sebagian lainnya hanya berkutat pada isu yang sebenarnya agak diputarbalikkan, yaitu *cost recovery*. Seolah-olah dalam soal ini hanya pihak Exxon yang menentukan biaya operasi dan pasti akan terjadi kerugian negara dalam jumlah yang fantastis.

Mereka tidak pernah mau mengerti bahwa soalnya tidak semudah itu. Dalam operasi, Pertamina akan terlibat aktif. Pengawasan biaya pun akan dilakukan berlapis-lapis.

Adanya suara-suara nasionalisme sempit dengan sejumlah tuduhan miring mengingatkan saya pada sebuah ungkapan dari Dr Samuel Johnson: *nationalism is the last refuge of scoundrels*. Saya hanya bisa berkata bahwa Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar hanya dengan membuka diri, memanfaatkan kesempatan yang dibuka oleh zaman ini, serta secara kreatif belajar dari mereka yang sudah terlebih dahulu menjadi bangsa yang maju.

Masalahnya bukan terletak pada kebanggaan atau kepercayaan terhadap satu atau beberapa perusahaan milik negara. Soalnya lebih terletak pada pilihan prioritas dan keberanian untuk memilih. Lewat negosiasi Blok Cepu, pemerintah telah menetapkan dan memilih prioritas. Hasil yang diharapkan pada akhirnya adalah percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jika ini terjadi, di situlah letak kebanggaan kita yang sesungguhnya sebagai sebuah bangsa.

27 Maret 2006

Kaum Intelektual, BBM, dan Iklan Freedom Institute

(Tanggapan atas Tanggapan)

TAK TERDUGA, iklan yang dipasang Freedom Institute (*Kompas*, 26/2/2005) ditanggapi berbagai pihak dengan antusias, setuju maupun tidak. Bahkan berbagai komentar yang ada, baik di *Kompas* maupun dalam *talkshow* televisi dan milis internet, mungkin sama serunya dengan diskusi tentang penghapusan subsidi BBM itu sendiri.

Effendi Gazali benar, iklan itu adalah sebuah *breakthrough* (“Maaf, Tak Mampu Beriklan”, *Kompas*, 2/3/2005). Dalam sejarah Indonesia, belum pernah terjadi sejumlah intelektual, pengusaha, profesional, dan aktivis bersatu mendukung sebuah kebijakan dan mengiklankannya sehalaman penuh. Sesuatu yang baru, apalagi dengan isu yang hangat dan aktual, tentu mengundang pro dan kontra. Hal ini dapat dipahami dan harus disambut dengan tangan terbuka.

Mengenai isinya, berbagai komentar menyinggung tiga hal: substansi argumen penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM), bentuk, dan tokoh yang menyampaikan (iklan dan peran intelektual).

Saya akan menanggapinya satu per satu, namun sebelumnya saya ingin mengatakan satu hal.

Freedom Institute dan 36 tokoh yang namanya tercantum sebagai pendukung iklan itu tidak dikendalikan pemerintah. Selain membujuk masyarakat, kami justru ingin meyakinkan dan mendorong pemerintah untuk segera dan tidak ragu mengambil kebijakan yang tepat demi masa depan bersama yang lebih baik.

Pemimpin kadang dihadapkan pada aneka pilihan yang dilematis. Kebijakan yang harus dilakukan perlu dan baik, namun tidak populer. Dalam situasi semacam ini kami memilih peran sebagai *push factor*, betapapun terbatasnya, demi meyakinkan dan secara tidak langsung membesarkan hati pemerintah untuk segera mengambil keputusan dan menghadapi konsekuensinya.

To govern is to choose, kata Charles de Gaulle. Kini pemerintah sudah mengambil keputusan, dan saya mengangkat topi atas keberanian semacam ini.

Argumen Moral-Ekonomi

Substansi argumen yang ada dalam iklan itu pada dasarnya bersifat konvensional. Tidak ada yang baru di dalamnya. Aspek moralnya telah ditulis dengan baik oleh Franz Magnis-Suseno (“Jangan Tunda Pencabutan Subsidi BBM”, *Kompas*, 14/1/2005) dan penjelasan teknis-ekonomisnya dibahas berkali-kali oleh M. Chatib Basri dan Anggito Abimanyu di harian ini.

Pada intinya, argumen kami mulai dengan sebuah fakta: sebagai konsekuensi dari harga minyak dunia yang terus melambung, subsidi terus membengkak, jauh melebihi rencana semula yang “hanya” Rp19 triliun. Tanpa pengurangan, subsidi bisa melewati angka Rp70 triliun tahun ini (atau hampir setara dengan Rp200 miliar per hari). Dengan pengurangan rata-rata 29 persen sekalipun, sebagaimana sudah diputuskan pemerin-

tah, negara masih mengeluarkan Rp100 miliar lebih per hari, atau Rp39,8 triliun setahun, untuk menyangga harga BBM.

Bagi kami, subsidi pada tingkat tertentu tetap perlu, terutama terhadap mereka yang membutuhkan uluran tangan. Namun, apakah dana subsidi BBM yang demikian besar benar-benar tepat dan perlu? Apakah negara sanggup terus menanggungnya? Apakah subsidi mendorong perilaku ekonomi yang hemat dan rasional?

Ternyata tidak. Memang, ada beberapa penanggap yang mengkritik angka dan hasil penelitian LPEM-FEUI yang ada dalam iklan itu. Ini masalah serius. Salah satu argumen kami bersandar pada hasil penelitian empiris yang menunjukkan, subsidi BBM lebih menguntungkan mereka yang relatif lebih mampu dan kaum yang paling miskin justru kurang menikmatinya.

Jika para pengkritik tersebut bisa memperlihatkan kekeliruan penelitian ini, sanggahan mereka akan lebih kuat. Sayangnya, berbagai tanggapan yang ada hanya berkisar pada tingkat abstraksi dan dugaan bahwa penelitian itu menyesatkan. Jika memang keliru, mana buktinya? Apakah ada penelitian alternatif yang menunjukkan bahwa faktanya justru berbeda dan berlawanan?

Selain itu, beberapa penanggap juga mengingatkan, persoalan di negeri ini begitu banyak dan beragam, mulai dari korupsi, inkompetensi, dan pemborosan lainnya. Bahkan dana kompensasi yang diusulkan pemerintah sebesar Rp17,8 triliun mungkin tidak akan luput dari penyalahgunaan dan prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Menurut mereka, kami seharusnya juga peduli dan memerhatikan hal-hal seperti itu.

Saya setuju dan bersimpati dengan pendapat demikian. Namun, Prof. Widjojo Nitisastro benar saat ia berkata sekian tahun lalu bahwa di Indonesia hal-hal yang baik hanya dapat dilakukan *one step at a time*. Semua persoalan negeri kita harus dihadapi dan diselesaikan. Namun, yang kini bisa dilakukan,

lakukan dulu. Setelah itu, kita dorong lagi pemerintah untuk melakukan hal-hal baik lainnya.

Kaum Intelektual

Kami jelas berpihak, namun lebih pada gagasan dan kebijakan tertentu yang kami anggap baik. Masalah pemihakan semacam ini memang menjadi tema klasik yang kadang membingungkan di kalangan intelektual.

Namun, persoalannya sebenarnya sederhana. Semua tergantung substansi pemihakan sendiri, bukan pada wadah atau bentuk pengungkapan. Gagasan atau kebijakan pemerintah bisa benar, bisa salah. Demikian pula gagasan seorang ilmuwan, aktivis, atau mereka yang mengklaim diri sebagai pejuang kaum tertindas. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa merekalah pemegang kebenaran terakhir. Hal inilah yang harus diperhatikan Abd Rohim Ghazali (Menyoal “Iklan Layanan Pemerintah”, 2/3/2005) dan Agus Surono (“BBM dan Iklan Freedom Institute”, 1/3/2005).

Jika memang kebijakan pengurangan subsidi baik bagi ekonomi Indonesia, mengapa kita harus ribut soal posisi profesi dan peran kaum intelektual? Mengapa untuk menjadi intelektual harus dalam posisi yang senantiasa berseberangan dengan pihak yang memegang kekuasaan?

Condy Rice dan Henry Kissinger: keduanya adalah bagian dari kaum intelektual dan, sebagai menteri luar negeri adikuasa, bahkan menyatu dengan kekuasaan sendiri. Kita tentu boleh menentang ide atau kebijakan mereka. Namun, agak aneh jika kita mempersoalkan bahwa mereka adalah cendekiawan yang berselingkuh. Mereka yakin pada ide-ide tertentu, dan berusaha menggunakan apa yang ada di sekitarnya, termasuk kekuasaan, untuk mewujudkannya.

Sederet nama besar dalam sejarah kita juga melakukan hal yang sama. Bahkan Indonesia didirikan oleh kaum intelektual

yang “berselingkuh” dengan kekuasaan: Soekarno, Hatta, dan Sutan Sjahrir. Mereka percaya pada ide-ide tertentu tentang sebuah negeri yang ideal dan mengabdikan hidup mereka untuk mewujudkannya, jika perlu dengan menjadi presiden dan perdana menteri.

Iklan

Effendi Gazali adalah seorang ahli komunikasi. Menurut dia, iklan Freedom Institute adalah “bentuk komunikasi politik yang tidak strategis bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya”. Selain itu, “iklan itu juga menunjukkan ‘compang-camping’-nya ruang publik kita”.

Soal strategis dan efektif atau tidak, saya tidak memiliki kapasitas profesional untuk menilai iklan itu. Namun, jika begitu banyak yang menanggapi, termasuk Effendi sendiri (tulisannya menggunakan judul yang cerdas dan memikat), buat saya *it is not bad at all*. Bukankah tujuan iklan, salah satunya, memang untuk mencari, dan mencuri perhatian?

Namun, adakah pemaksaan di sana? Apakah Effendi sendiri terpaksa atau harus membaca dan memercayai iklan itu? Apakah pada dirinya format penyampaian pendapat dalam bentuk iklan mengandung unsur ketidakadilan dan pemaksaan, dan karena itu membuat ruang publik kita compang-camping? Kalau betul, apa argumennya?

Setahu saya, di harian *Kompas* tidak ada kebijakan redaksi yang hanya memajukan pendapat tertentu. Pengkritik maupun pendukung kebijakan subsidi BBM mendapat tempat sama. Yang penting, prinsip bahwa semua mendapat perlakuan sama, termasuk mengiklankan pendapat tentang satu atau beberapa isu publik.

Dalam hal yang terakhir ini saya percaya, jika kaum penentang pengurangan subsidi BBM dapat mengorganisasikan diri, menggalang dana, dan benar-benar meyakini kebenaran ga-

gasan mereka, harian *Kompas* pasti tidak akan keberatan jika mereka ingin memasang iklan, dua halaman penuh sekalipun.

Di negeri-negeri demokratis lainnya, hal demikian lazim terjadi. *The Washington Post* dan *The New York Times*, dua koran paling berpengaruh di AS, sering memuat perdebatan soal kebijakan dalam bentuk iklan yang dipasang oleh tokoh maupun organisasi dari segala kalangan, seperti pengusaha, pengacara, ilmuwan, aktivis dan semacamnya.

Tidak seperti iklan sampo, iklan semacam itu disajikan tidak dalam warna-warni menyala, dilengkapi potret wanita cantik. Namun, seperti iklan sampo, ia ingin menyampaikan sesuatu, mencuri perhatian, dan mengajak orang untuk percaya pada pesan yang disampaikan.

Akhirnya, semua terpulang pada sidang pembaca. Mereka harus berpikir sendiri dan menimbang-nimbang. *Take it or leave it*. Dalam hal inilah, iklan yang mengandung isu kebijakan dan gagasan yang kuat dapat menjadi instrumen demokrasi dan pendidikan politik yang sehat.

3 Maret 2005

Pedang Saleh Afiff

AKHIRNYA YANG DITUNGGU datang juga: Prof. Saleh Afiff menyerukan perlunya penghapusan monopoli, termasuk monopoli yang mengatur tata niaga sejumlah komoditas. “Seharusnya memang deregulasi dilakukan,” kata Afiff. “Demikian pula monopoli Bulog sebaiknya dibebaskan,” tegasnya (*Kompas*, 21/8/1997).

Kalau kita simak baik-baik implikasi pernyataan Prof. Saleh Afiff itu, maka sasaran deregulasi ini bisa mencakup sangat banyak tata niaga dan praktik favoritisme, yang selama ini telah melahirkan tingkah laku pengejaran rente ekonomi, menjadi sumber kolusi, serta merugikan rakyat banyak. Salah satu sasaran yang disebut langsung oleh Menko Ekku Wasbang ini adalah monopoli Bulog.

Kalau tokoh yang mengatakan pernyataan demikian adalah Dr Sjahrir, atau Dr Mari Pangestu, atau Kwik Kian Gie, tentu saja kita semua tidak perlu heran. Tapi berbeda halnya jika yang mengatakannya adalah Saleh Afiff. Ia adalah seorang tokoh senior di dalam pemerintahan, seorang perumus kebijakan dengan posisi sebagai menteri koordinator. Belum lagi kalau kita ingat bahwa ia adalah *the last direct link* dari “Kelompok Prof. Widjojo Nitisastro” yang masih berada dalam pemerintahan sekarang ini. Selain itu, selama berkecimpung dalam

dunia perumusan kebijakan ekonomi, ia dikenal sebagai seorang pendiam yang sangat jarang memberi pernyataan, apalagi pernyataan yang tegas dan blak-blakan.

Karena itulah, jika dunia kebijakan ekonomi bisa diibaratkan sebagai dunia persilatan ala Kho Ping Hoo, maka seruan “*deregulation for (almost) all!*” dari Saleh Afiff itu bisa saja ditafsirkan sebagai pernyataan “perang”. Ia sudah mengeluarkan pedang dari sarungnya. Pedangnya memang belum ia sabetkan ke kiri dan ke kanan (seruannya masih sebatas retorika, belum aksi). Tapi kita tahu bahwa paling tidak tokoh kita ini sudah menyiapkan kuda-kuda.

Jawaban

Mengapa Saleh Afiff mengeluarkan pernyataan demikian sekarang? Jawaban terhadap pertanyaan ini barangkali sudah terlalu jelas. Akibat merosotnya nilai rupiah belakangan ini, dunia perekonomian kita mengalami pukulan berat. Nasib kita memang masih cukup jauh dari nasib buruk sebagaimana yang dialami Meksiko pada akhir 1994 silam. Tapi dalam jangka panjang kemungkinan ke arah sana masih tetap terbuka, jika langkah-langkah penting dan besar untuk menyehatkan kinerja ekonomi kita secara keseluruhan tidak dilakukan.

Saleh Afiff tentu sangat mengerti bahwa tekanan drastis terhadap rupiah tidak dapat dilihat sebagai gejala yang berdiri sendiri, apalagi sebagai gejala yang diakibatkan hanya oleh segelintir spekulasi. Buat kaum ekonom seperti dia, tingkah-laku penjual dan pembeli (barang, jasa, atau uang) sebenarnya dapat dianggap sebagai rambu-rambu pasar, *market signals*. Tingkah-laku demikian adalah reaksi rasional terhadap berbagai parameter ekonomi yang kompleks. Dan hingga sekarang, jika himpunan reaksi rasional ini pada suatu waktu mendadak menghasilkan peristiwa “irasional” dalam bentuk krisis matauang misalnya, maka teori-teori ekonomi yang ada belum memiliki perangkat

memadai untuk menjelaskannya secara sangat meyakinkan, apalagi memberi jalan ke luar yang pasti dan mendasar.

Tentang hal yang terakhir ini, bisa dikatakan bahwa semua jalan ke luar yang ada pada dasarnya bersifat temporer, *ad hoc*. Katakanlah jika yang dilakukan adalah metode pengetatan rupiah melalui operasi moneter pemerintah. Dalam jangka pendek, metode ini memang bisa terbukti keampuhannya. Tapi kalau digunakan tanpa pembatasan waktu yang jelas, maka ia pasti akan melahirkan apa yang oleh Prof. Paul Krugman, ekonom MIT yang andal dan berlidah tajam itu, disebut sebagai lingkaran setan Meksiko. Dengan kata lain, metode ini memang bisa menyembuhkan sebuah penyakit (rupiah menjadi langka, nilainya menguat), tapi pada gilirannya ia juga akan melahirkan penyakit lain lagi yang tidak kurang berbahayanya (kelesuan investasi berkepanjangan).

Karena itu, dalam berhadapan dengan bayang-bayang sebuah krisis, langkah-langkah paling arif yang dapat kita ambil adalah melakukan peninjauan ulang terhadap “tubuh” sistem ekonomi kita secara menyeluruh. Tubuh inilah yang kita perkuat, kita buat lebih efisien, lebih kompetitif. Dalam jangka panjang, jika hal ini berhasil dilakukan, maka berbagai penyakit ekonomi yang seketika dapat menyerang kita tidak akan gampang membuat kita sempoyongan. Atau kalau toh krisis terjadi, dampaknya sangat minimal dan berjangka pendek.

Dari sudut pandang seperti inilah kita dapat memahami lebih jauh seruan Saleh Afiff itu. Ia ingin agar tubuh ekonomi kita diperkukuh. Dan untuk itu, dalam situasi kita sekarang, hanya tersisa hampir satu-satunya cara, yaitu deregulasi lebih jauh dan lebih tuntas, tanpa pandang bulu.

Mungkinkah?

Bisakah seruan Saleh Afiff menjadi tindakan konkret? Mungkinkah pedang dia bukan cuma dihunus, tapi juga digunakan

untuk membatat semak-semak kepentingan yang sudah terlalu jalin-menjalin dalam sistem ekonomi kita? Inilah pertanyaan terbesar yang jawabannya masih menggantung di langit.

Di depan Saleh Afiif dan kawan-kawannya, kaum teknokrat yang sealiran, terbentang banyak rintangan, dari bawah, dan terutama dari atas. Belum lagi kalau kita ingat bahwa sejak beberapa tahun terakhir ini dorongan reformasi ekonomi se-pertinya memang sedang mati angin, digantikan oleh langkah-langkah serta ilusi-ilusi “dirigisme lama dengan wajah baru”. Dalam soal pengentasan kemiskinan, misalnya, pendapat yang kini dominan dalam pusat-pusat kekuasaan adalah pandangan yang pada dasarnya justru sejak lama merupakan bagian dari persoalan ekonomi kita. Pandangan ini bersumber pada asumsi bahwa hanya negaralah, dan bukan sistem pasar bebas, yang dapat menolong rakyat kecil ke luar dari kemiskinannya.

Kita masih bisa memberi banyak contoh lagi dari maraknya dirigisme seperti itu, walau dalam bentuk yang agak berbeda, dalam dunia industri, perburuhan, pertanian. Yang jelas, semua ini adalah persoalan mendasar yang harus dihadapi jika program deregulasi memang ingin dijalankan sungguh-sungguh.

Walau memang banyak rintangannya, kita sebenarnya masih tetap bisa berharap. Prof. Sadli pernah berkata bahwa bagi kaum teknokrat di republik kita, krisis ekonomi adalah semacam berkah tersembunyi, *blessing in disguise*. Kalau ekonomi sedang stabil dan kemakmuran meningkat, kaum penguasa politik biasanya tidak begitu peduli dengan masalah efisiensi dan kaidah-kaidah ekonomi. Tapi jika dunia ekonomi mengalami krisis, maka mereka menjadi lebih sadar, berubah, dan kaum teknokrat mulai mendapat angin untuk melakukan reformasi.

“Hukum Sadli” ini pernah terbukti kebenarannya sewaktu kita mengalami turunnya harga minyak pada awal dan pertengahan 1980-an. Akibat krisis ekonomi pada saat itu, kaum teknokrat, dipimpin oleh Prof. Widjojo, mendapat peluang cu-

kup besar untuk menjadi motor reformasi-deregulasi, dan selama beberapa tahun mereka menjalankan peran ini dengan cukup baik.

Harapan kita semua adalah: mudah-mudahan “hukum Sadli” itu berlaku pula dalam waktu dekat ini, yaitu pada saat dampak buruk krisis rupiah semakin kita rasakan.

28 Agustus 1997

Profesor Widjojo

PROFESOR WIDJOJO NITISASTRO turun gunung sekali lagi. Baru-baru ini tak kurang dari Presiden Soeharto yang memberikan mandat khusus buatnya untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan” agar krisis matauang kita dapat diakhiri. Sambil bergurau, Bill Liddle, guru besar ilmu politik dari Ohio, berkata bahwa pemberian mandat dari Pak Harto kepada arsitek ekonomi Orde Baru itu bisa diandaikan sebagai sebuah “supersemar ekonomi”.

Sebenarnya turun gunungnya Profesor Widjojo saat ini bukan hal yang terlalu mengejutkan. Sejak awal, dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru memang mengikuti sebuah dalil yang ingin saya sebut sebagai *Sadli's Law*: setiap kali krisis besar terjadi, peran kaum teknokrat diperkuat. Pemerintah membutuhkan keahlian dan pengaruh mereka untuk menyelesaikan krisis. Dan hingga saat ini di kalangan kaum teknokrat, Profesor Widjojolah yang dipandang sebagai “kepala suku”. Jadi, logis saja jika dia kemudian mendapat mandat kepemimpinan untuk menanggulangi krisis rupiah yang terjadi tiga bulan belakangan ini.

Pertanyaan kita sekarang tentu saja adalah: bisakah sejarah terus berulang? Kalau dulu Profesor Widjojo berhasil mengatasi krisis setiap kali diminta, apakah saat ini akan demikian pula?

Setelah menghentikan laju hiperinflasi pada akhir 1960-an, menyelesaikan kemelut Pertamina pada pertengahan 1970-an, serta mengatasi dampak buruk krisis minyak dan resesi ekonomi pada pertengahan 1980-an, mampukah dia sukses lagi pada pengujung 1990-an ini?

Lebih jauh lagi, bisa ditebak bahwa IMF dan Bank Dunia, selain memberikan bantuan langsung untuk mengangkat nilai rupiah, kemungkinan besar juga akan mengusulkan agar kebijakan deregulasi sungguh-sungguh diterapkan, seperti yang sudah terjadi berkali-kali. Apakah Profesor Widjojo memang sanggup memenuhi permintaan seperti ini?

Saat ini tentu terlalu cepat untuk bisa menjawab dengan pasti pertanyaan demikian. Dalam satu hal kita harus ingat bahwa kelompok inti Profesor Widjojo—seperti Ali Wardhana, Sumarlin, Emil Salim, Sadli, dan Radius Prawiro—sudah cukup lama tergeser dari panggung kekuasaan. Dulu kelompok ini bisa membentuk tim kerja yang sangat solid dan kompak. Tanpa tim semacam ini, apakah Profesor Widjojo masih bisa berbuat banyak seperti dulu? Lagi pula, dalam situasi kabinet yang sangat tak terkoordinasi seperti sekarang, apakah dia akan mendapat dukungan internal yang memadai untuk melahirkan kebijakan yang konsisten?

Selain semua itu, persoalan lain yang dihadapi Profesor Widjojo adalah masalah politik. Pada 1990-an ini, tingkat militansi masyarakat dan tingkat pergesekan di kalangan elite cenderung meningkat. Segala hal sekarang dapat ditafsirkan sebagai langkah-langkah *politicking*, baik di kalangan masyarakat luas maupun di kalangan para elite.

Dengan kata lain, berbeda dari saat yang lalu, kebijakan ekonomi yang drastis agak lebih sulit dilahirkan dalam kondisi politik kita saat ini. Setiap kebijakan pasti mengandung ongkos politik dan melahirkan biaya sosial. Artinya, setiap kebijakan dalam jangka panjang yang akan mendorong efisiensi dan

meningkatkan ekspor, misalnya, akan ditentang secara luas jika dalam jangka pendek dianggap dapat menyusahkan sebagian kelompok masyarakat. Dalam hal terakhir ini bukan tak mungkin Profesor Widjojo dituding sebagai kaki tangan IMF dan Bank Dunia, yang hanya membebek, mengikuti perintah Amerika dan merugikan kepentingan nasional.

Karena itu, buat saya, untuk bisa sepenuhnya berhasil, Profesor Widjojo harus menangani dimensi politik ini dengan ekstra hati-hati. Saya berharap, pendekatan kaum teknokrat saat menelurkan kebijakan deregulasi pada 1980-an dapat ditinggalkan. Seperti kita ketahui, rangkaian kebijakan deregulasi saat itu memang merupakan inovasi yang sangat baik dan berdampak sangat positif bagi dunia perekonomian kita secara umum. Tapi sayang, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan deregulasi sangat bersifat tertutup. Kaum teknokrat sepertinya lebih senang bekerja di belakang layar dan tak begitu peduli mencari dukungan publik.

Akibatnya, kebijakan mereka bukan saja tak terlalu menyentuh hati masyarakat, melainkan juga peran mereka banyak disalahpahami. Karena akibat seperti inilah, antara lain, dorongan terhadap deregulasi cenderung melemah pada awal hingga pertengahan 1990-an. Bahkan bukan itu saja: sebagian dari mereka pun, termasuk Profesor Widjojo, tergeser dari panggung kebijakan publik.

Dengan demikian, bagi saya, jika langkah-langkah Profesor Widjojo saat ini memang ingin ditujukan untuk menciptakan dampak yang jauh dan mendalam, pendekatan kebijakan yang digunakan haruslah pendekatan terbuka. Dengan pendekatan seperti ini masyarakat akan merasa dihargai, sebab kebijakan-kebijakan penting yang melibatkan hidup mereka terlebih dulu dibicarakan dan didiskusikan secara luas. Jika sudah begini, dukungan bagi kaum teknokrat pun tak lagi semata-mata dari “atas”, juga dari masyarakat umum.

Sebagai ekonom, Profesor Widjojo memang memiliki kemampuan dan intuisi yang tak perlu diragukan. Namun karena perjalanan waktu dan perubahan masyarakat, tantangan dia sekarang bukan lagi terutama bersifat ekonomi, melainkan politik. Artinya, untuk mengulangi sejarah keberhasilannya, Profesor Widjojo harus berperan lebih sebagai teknopol (teknokrat-politikus).

Memang peran ini agak lebih rumit ketimbang peranan teknokrat sebagaimana biasanya. Dan karena itu pula kita bisa berkata bahwa justru sekarang inilah Profesor Widjojo mungkin bertemu dengan salah satu tantangan terbesar dalam kariernya.

18 Oktober 1997

Soedradjad, Bravo

PROFESOR ROSS H. MCLEOD baru-baru ini melancarkan kritik tajam dan mendasar terhadap Bank Indonesia (BI), sebagai pengelola tertinggi sistem moneter kita. Seperti yang dapat kita baca secara luas di berbagai media massa, ekonom Australia yang mengaku pengikut Milton Friedman ini berpendapat bahwa tindakan BI selama beberapa tahun ini, dalam mencegah tingginya tingkat inflasi, tak relevan dan salah arah.

McLeod, antara lain, menganggap bahwa BI tak perlu terlalu pusing memikirkan dan membatasi ekspansi jenis uang (M_1 dan M_2) yang tak langsung memengaruhi inflasi, misalnya ekspansi kredit perbankan, seperti yang selama ini BI lakukan. Faktor yang berdampak kuat terhadap inflasi, menurutnya, adalah peredaran uang primer (M_0 , yaitu lembaran bergambar Pak Harto yang ada di dompet Anda). Faktor inilah yang harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh BI.

Selain itu, berbeda dengan pandangan umum yang dianut masyarakat selama ini, termasuk oleh para perumus di BI, McLeod berpendapat bahwa dunia perbankan kita (seluruh bank minus BI) tak bertanggungjawab terhadap tingkat inflasi. Alasannya sederhana: pencetak uang primer bukan mereka, melainkan BI. Dunia perbankan kita, dengan kata lain, tak ber-

pengaruh apapun terhadap jumlah uang beredar. Bank hanya menjalankan fungsi intermediasi dan relokasi uang, dari satu pihak ke pihak lain, dari penabung ke peminjam. Implikasi semua ini: biarkan dunia perbankan bertindak sendiri dan lanjutkan liberalisasi perbankan yang selama ini terseok-seok.

Terhadap kritik tajam dan terbuka semacam ini, apa yang BI lakukan? Apakah Prof. Soedradjad Djiwandono, Gubernur BI yang juga ekonom, kemudian tersinggung dan merasa dipermalukan? Apakah McLeod lalu dianggap orang asing yang hanya ingin menyebarkan paham liberalisme gontok-gontokan di negeri kita? Apakah McLeod dituding tak mengerti SMP (Sistem Moneter Pancasila)?

Ternyata, seperti yang diuraikan secara rinci di *Kompas*, 22 Januari lalu, Soedradjad meninjau kritik dan argumen McLeod dengan dingin, sistematis, penuh percaya diri. Dalam satu hal, dia berkata bahwa sebenarnya pendapat McLeod agar BI memperhatikan perkembangan uang primer “memang beralasan”. Dia dan McLeod, dalam soal ini, tak banyak berbeda.

Dalam hal lain, menurutnya, McLeod terlalu sederhana dalam melihat hubungan uang primer dan jenis uang lainnya. Karena deregulasi dan globalisasi di sektor keuangan, maka hubungan ini sudah menjadi lebih rumit. Kini telah terjadi *decoupling* antara M2, M1, dan MO. Karena itu, pengendalian inflasi tak dapat dilakukan dengan mengatur uang primer saja. Faktor lain, seperti pinjaman bank, juga harus diperhatikan. Artinya, apa yang BI lakukan selama ini sebenarnya tak terlalu keliru.

Soedradjad tentu tak membahas sesingkat dan sesederhana sebagaimana yang dapat saya sampaikan di sini. Tapi yang penting bagi saya, terlepas dari benar-salahnya atau kuat-lemahnya argumen yang disampaikan, Gubernur BI ini telah memberi contoh langsung tentang praktik pemerintahan *by persuasion* yang terbuka, besar hati, dan berlandaskan argumen yang

masuk akal. Buat dunia pemerintahan sekarang, contoh langsung seperti yang diberikan Soedradjad agaknya sudah makin langka, dan karena itu makin “mahal”.

Kelangkaan demikian, misalnya, dapat dilihat dalam kontroversi pengelolaan sumber alam kita akhir-akhir ini. Seperti yang kita tahu, tokoh seperti Kwik Kian Gie dan Amien Rais saat ini sibuk mempertanyakan kecilnya keuntungan (10%-20%) yang kita peroleh dari hasil penambangan sumber alam kita, baik di Irian maupun di Kalimantan. Sebaliknya, pihak asing yang mengelola sumber tersebut, seperti perusahaan Freeport, mengeruk untung luarbiasa (sekitar 80%). Antara lain karena hal inilah maka Amien Rais berkata bahwa kini terjadi “kezaliman ekonomi” di negeri kita.

Bagi pejabat-pejabat tertinggi yang terkait dengan urusan pertambangan, seperti Menteri Pertambangan dan Energi (Pak Sudjana sekarang, dan Pak Ginandjar sebelumnya), persoalannya tentu tak sesederhana tudingan Kwik-Amien. Mereka pasti mengerti persoalan sebenarnya. Tapi di manakah suara mereka sekarang? Di manakah penjelasan mereka tentang soal yang melibatkan duit triliunan rupiah ini? Kenapa mereka diam? Kalau tudingan Kwik-Amien keliru, di mana letak kekeliruannya? Kenapa “cuma” Fachry Ali, Bondan Winarno, dan Dr Sjahrir, yang notabene tak memiliki kaitan tanggungjawab apapun terhadap kebijakan dunia pertambangan kita, yang bicara menanggapi tudingan tadi?

Kita masih bisa menambah lebih banyak lagi contoh semacam ini. Misalnya, dalam konteks yang agak berbeda, kita bisa melihat diamnya pimpinan Golkar terhadap kritik bahwa pemilihan calon legislatif (caleg) mereka sangat berbau nepotisme. Yang jelas, saat ini sudah sangat jarang kita saksikan para pemimpin dari kalangan pemerintahan yang menyambut kritikan dan kontroversi secara *head on*, seperti yang dilakukan Soedradjad.

Entah kenapa, banyak pimpinan pemerintah rupanya berpikir bahwa “diam” adalah manifestasi kebijakan terbaik. *A silent government is the best government*. Malah anehnya, kalau toh mereka bicara, yang biasanya mereka sampaikan justru hal-hal *trivial* yang paling tak ingin kita dengar.

Dan karena itu pula, terhadap tokoh seperti Soedradjad kita harus katakan: “Jalan terus, Bung! Penuhilah dahaga masyarakat akan pemimpin yang terbuka, bersedia beradu argumen, dan penuh percaya diri...”

15 Februari 1997

Friedman

BARU-BARU INI kolomnis ternama Harian *The New York Times*, Thomas L. Friedman menulis seri artikel tentang Indonesia (10, 14, 17, 21, dan 25 Juli lalu). Selama lima tahun bermukim di Amerika Serikat, baru kali ini saya membaca berturut-turut artikel tentang Indonesia di media populer yang isinya cukup mendalam dan jernih itu.

Apa yang dikatakan Friedman dalam seri tulisan itu? Pada dasarnya, Friedman menjelaskan bahwa pandangan sebagian politisi Amerika Serikat di Kongres, yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negeri paria—sejajar dengan Myanmar atau Irak—adalah pandangan yang ‘keliru’ dan ‘bodoh’.

Indonesia, menurut Friedman, adalah sebuah negeri besar dan kompleks yang selama ini telah memainkan peranan politik luar negerinya dengan konstruktif. Ia mengutip Menteri Luar Negeri Ali Alatas, bintang seri artikel ini, untuk menjelaskan: jika Amerika Serikat salah langkah dengan terus-menerus mendesak Indonesia karena satu persoalan saja, misalnya kasus Timor Timur, akibatnya bisa sangat buruk, sebab bukan tak mungkin akan terjadi semacam *nationalist backlash*. Hal ini, kalau terjadi, akan merugikan bukan saja kepentingan pem-

bangunan Indonesia, melainkan juga menghambat pelaksanaan strategi diplomasi Amerika Serikat di Asia.

Di Asia, gejala politik yang paling besar dampak globalnya adalah bangkitnya Cina secara ekonomi dan militer. Untuk mengimbangi potensi dominasi Cina dalam tahun-tahun mendatang, Amerika Serikat tak mungkin hanya bersandar pada Jepang. Negeri Matahari Terbit ini mungkin akan menjadi persoalan tersendiri bagi strategi diplomasi Amerika Serikat. Karena itu, buat Friedman, posisi Indonesia menjadi sangat penting untuk mengimbangi bangkitnya kekuatan Cina.

Selain itu, Indonesia sudah memainkan peranan *big brother* dengan sangat positif di kawasan Asia Tenggara sejak akhir 1960-an. Karena peranan semacam inilah stabilitas politik ASEAN dapat terjamin, dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat dapat berlangsung di kawasan ini.

Jadi, singkatnya, kesimpulan Friedman dapat dengan mudah kita tebak: ia menganjurkan Amerika Serikat dapat lebih luas serta realistis dalam memandang hubungannya dengan Indonesia. "Indonesia," demikian Friedman mengutip Ali Alatas, "adalah sahabat Amerika, bukan musuh."

Selain topik politik luar negeri, kondisi domestik Indonesia tak luput dari perhatian Friedman. Ia memuji keberhasilan ekonomi Indonesia sebagai salah satu negeri yang muncul sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Namun tak lupa ia menyinggung persoalan dasar yang ada, seperti masalah lingkungan hidup dan tingkat korupsi yang sudah sangat kronis.

Buat Indonesia, makna apa yang bisa ditarik dari hadirnya tulisan seperti yang disajikan Friedman? Walaupun di sana-sini menyentil dengan tajam (seperti dalam soal korupsi), secara keseluruhan tulisan Friedman bermakna positif bagi kita. Indonesia yang ditampilkannya bukanlah negeri yang hanya dapat dipandang dari satu segi. Ia menghadirkan Indonesia dalam

kompleksitasnya, betapapun tempat yang digunakannya—dalam bentuk kolom—sangat terbatas.

Bobot seri artikel ini tak dapat dianggap ringan karena adanya dua hal. Pertama, artikel itu dimuat di harian paling besar dan berpengaruh di panggung opini Amerika Serikat. Koran ini menjadi santapan pagi kaum politisi di Washington, D.C, dan elite bisnis di New York. Ia adalah sebuah institusi yang menjadi salah satu jendela bagi publik Amerika Serikat untuk mengenal dunia luar.

Kedua, penulisnya adalah seorang kolumnis pemenang Hadiah Pulitzer, yang selama ini dikenal sebagai penulis masalah politik luar negeri yang berimbang, tajam, dan cerdas. William Safire adalah seorang kolumnis partisan *par excellence*, sedangkan Friedman adalah tipe penulis yang selalu menegedepankan akal sehat dan mencoba menimbang-nimbang berbagai sudut pandang secara obyektif.

Karena itu, dalam konteks hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang belakangan ini cenderung agak menghangat, seri artikel ini mungkin bisa dianggap sebagai angin segar. Di samping itu, tulisan tersebut dapat dilihat sebagai pengimbang berita-berita miring di seputar kasus Lippogate yang selama ini sudah cenderung “overdosis” di Washington, D.C.

Selain semua itu, pelajaran yang perlu kita renungkan: publik dan media massa Amerika Serikat sangat terbuka pada argumen-argumen dingin dan masuk akal. Seringkali realitas politik Indonesia mendapat kecaman pedas dari berbagai jurusan, misalnya dari para aktivis lingkungan, pejuang hak asasi, dan pembela kaum buruh. Terhadap kecaman semacam ini, biasanya reaksi kita sangat emosional dan berbau “jingoisme” (*right or wrong it's my country*). Reaksi semacam ini, dalam percaturan opini publik di Amerika Serikat atau Eropa justru sangat tak efektif dan merugikan diri.

Hal yang perlu kita lakukan terhadap berbagai kritik atas realitas negeri kita adalah memberi tanggapan dengan argumen rasional, tanpa emosi yang berlebihan. Friedman, melalui seri artikelnya, telah memberi contoh yang baik. Melalui tanggapan semacam ini, kita menyentuh hal yang paling berharga dan paling penting dalam masyarakat Amerika Serikat, yaitu akal sehat mereka.

2 Agustus 1997

George Soros

SETELAH KOMUNISME, kini persoalan terbesar bagi umat manusia adalah kapitalisme. Doktrin *laissez-faire* (liberalisme) kini merajalela: manusia makin menjadi individualis-egois, mengejar kepentingan diri sendiri tanpa mampu bersimpati pada, dan bekerjasama dengan, manusia lainnya. Peradaban pun berada dalam situasi lampu merah.

Di Amerika, ancaman dan ramalan semacam ini mungkin hanya dipandang sebelah mata jika disampaikan tokoh seperti Ralph Nader, aktivis gerakan konsumen, atau Pendeta Jesse Jackson. Tapi bagaimana jika disampaikan George Soros?

Tokoh kelahiran Hungaria ini pada awalnya hanya seorang imigran yang terusir dari negerinya karena ekspansi Naziisme Hitler. Di New York, ia kemudian bertaruh nasib di bursa uang, dan sukses. Bahkan ia menjadi semacam legenda: dalam sehari ia kabarnya pernah mengeruk untung hingga Rp2 triliun lebih. Setelah menjadi superkaya—karena dorongan ide besar yang pernah dipelajarinya, antara lain, dari filsuf Karl Popper—ia kemudian menggunakan sebagian hartanya untuk membantu gerakan demokratisasi di Eropa Timur.

Soros, singkatnya, adalah ikon kapitalisme itu sendiri, sebuah simbol tentang kemungkinan baik yang dapat ditumbuhkan

oleh persamaan kesempatan dan kebebasan ekonomi. Karena itu pula pandangan menakutkan tentang liberalisme yang disampaikan mungkin akan mengundang perhatian cukup serius, bahkan lebih dari semestinya. Tapi sejauh mana sebenarnya kebenaran pandangan kelabu seperti itu? Argumen Soros, sebagaimana yang ditulisnya di *Atlantic Monthly* baru-baru ini, kalau disingkat, berbunyi seperti ini. Ideologi totalitarian, yaitu fasisme dan komunisme, dulunya adalah musuh terbesar masyarakat terbuka. Kapitalisme, yang kini dominan, bertumpu pada doktrin liberal yang pada dasarnya memiliki persamaan dengan ideologi totalitarian. Mirip dengan para pendukung fasisme dan komunisme, kaum liberal menganggap merekalah pembawa kebenaran terakhir, dan klaim seperti ini didasarkan pada otoritas keilmuan, khususnya ilmu ekonomi.

Klaim terhadap kebenaran terakhir semacam ini akan menyumbat saluran perkembangan masyarakat terbuka. Lebih jauh lagi, ilmu ekonomi yang mendasarinya adalah ilmu yang secara inheren lemah karena bersandar pada asumsi yang sangat simplistis tentang perilaku manusia. Misalnya, manusia adalah makhluk rasional: harga adalah ukuran tertinggi dari nilai suatu barang, jasa, bahkan manusia. Bagi Soros, jika sebuah doktrin yang didasarkan pada ilmu simplistis ini menjadi dominan, ia akan mendorong munculnya peradaban yang kerosop, yaitu sebuah peradaban yang ditandai oleh individualisme berlebihan, pendewaan terhadap kompetisi dan efisiensi, serta pada akhirnya instabilitas dan kehancuran.

Buat saya, argumen semacam ini mengaburkan beberapa hal penting tentang liberalisme dan perkembangan kapitalisme. Dalam satu hal, kecemasan bahwa praktik *laissez-faire* telah merajalela hanyalah bersumber pada ilusi dari orang-orang seperti Soros. Selain Hong Kong, negeri yang paling liberal dalam soal ekonomi saat ini adalah Amerika. Dan di negeri ini se-

pertiga dari total pendapatan nasional jatuh ke tangan pemerintah. Artinya, 30% dari seluruh pendapatan rakyat dialokasikan oleh tangan-tangan politik dan birokrasi, bukan oleh *invisible hands*-nya Adam Smith. Para pemimpin Amerika, dari Reagan hingga Clinton, memang telah berusaha mengubah kenyataan ini. Tapi hingga kini perubahan mendasar belum juga terjadi. Jika di negeri paling liberal saja faktanya seperti ini, bagaimana pula di negeri lain?

Dalam hal lain, yang bagi saya lebih fundamental adalah kekeliruan Soros dalam memandang paham liberal. Liberalisme adalah lawan dari ideologi totalitarian. Sejak awal klaim paham ini didasarkan pada skeptisisme dan argumen tentang kebebasan, bukan pada otoritas ilmu dan pendewaan efisiensi.

Bagi kaum liberal, problem politik terbesar adalah tirani kekuasaan, sebuah kondisi di mana penguasa (pemerintah) memaksakan kehendaknya terhadap rakyat. Karena itu, menurut mereka, kekuasaan pemerintah harus terbatas. Pembatasan ini, selain dalam politik, harus dilakukan sejauh mungkin dalam bidang ekonomi: penguasa politik yang menguasai terlalu banyak sumber ekonomi akan mudah berubah sosok menjadi tiran. Dengan demikian, buat kaum liberal, pembatasan peran ekonomi pemerintah (artinya: perluasan mekanisme pasar) harus dilakukan agar kebebasan rakyat dapat terjamin.

Sebagai orang yang skeptis, kaum liberal tak gampang percaya pada slogan kaum penguasa yang menganggap dirinya sebagai pembela kaum lemah. Kekuasaan punya kepentingan sendiri, yang tak selalu seiring dengan kepentingan rakyat. Lebih jauh lagi, tak seorang pun, termasuk kaum teknokrat yang bekerja bagi pemerintah, yang memiliki pengetahuan lengkap terhadap kompleksitas dunia ekonomi. Karena itu, seperti kata Friedrich Hayek, alternatif terbaik yang dapat dilakukan adalah membiarkan tiap individu untuk melakukan hal yang dianggapnya baik. Artinya, mekanisme pasar bebas, walau bukan pilihan

ideal, adalah pilihan *the lesser evil* dalam keterbatasan pengetahuan manusia.

Apakah paham ini mendorong individualisme? Memang buat kaum liberal, manusia ideal adalah manusia individualis, dalam pengertian manusia independen, yang mau dan mampu bertanggungjawab bagi diri serta tindakannya. Kalau ia berbuat baik, hal ini terjadi bukan karena ia dipaksa oleh otoritas di luar dirinya, melainkan karena didorong nuraninya sendiri. Singkatnya, ia, dalam bentuknya yang ideal, adalah manusia seperti George Soros, yang membantu gerakan demokratisasi dari kesadaran dirinya sendiri.

22 Maret 1997

Alan Greenspan, Sang Maestro di Balik Dollar

SELAMA HAMPIR 20 TAHUN menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral AS (The Fed), Alan Greenspan kerap disebut sebagai “*a rock-star central-banker*”. Oleh kaum investor dan para pelaku pasar, kadang dia dianggap sebagai manusia setengah dewa. Bob Woodward, jurnalis kawakan itu, menyebutnya sebagai Sang Maestro.

Munculnya Greenspan sebagai ikon ekonomi AS bukan tanpa sebab. Dalam situasi yang ideal sekalipun, mengatur kondisi moneter sebuah negeri yang besar dan kompleks seperti AS bukanlah sesuatu yang mudah.

The Fed harus selalu membaca dengan tepat kapan peredaran uang harus dikucurkan, kapan harus diketatkan, lewat instrumen yang mereka miliki. Karena uang adalah darahnya sistem ekonomi modern, kekeliruan langkah The Fed akan berakibat fatal. Depresi Besar di AS pada 1930-an, seperti kata Milton Friedman, adalah akibat dari kesalahan semacam itu.

Karena itu, siapapun yang memimpin bank sentral AS mengemban tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Apalagi dalam tiga dekade terakhir ini, di mana inovasi, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan instrumen finansial telah membuat

roda perekonomian dan perputaran uang bergerak semakin cepat dan mengubah banyak asumsi-asumsi ekonomi yang baku.

Tantangan dan perubahan seperti itulah yang harus dihadapi oleh Greenspan saat diangkat oleh Presiden Reagan untuk memimpin The Fed. Hanya beberapa minggu setelah pengangkatannya pada akhir 1987, ia harus berhadapan dengan peristiwa *Black Monday*, yang merontokkan saham di bursa New York sebesar 20 persen dalam sehari. Setelah itu berbagai peristiwa terjadi susul-menyusul: krisis asuransi dan perbankan, membengkaknya defisit, ancaman inflasi, ancaman resesi, runtuhnya sistem komunisme, krisis Meksiko, krisis moneter di Asia, *default* di Rusia, dan sebagainya. Tetapi, semua peristiwa dan gejala ekonomi itu ternyata tidak membawa gejala besar yang merontokkan ekonomi AS.

Malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi pada pertengahan awal 1990-an hingga 2003 mencapai rekor yang hanya tertandingi oleh angka pertumbuhan pada awal 1960-an. Alan Greenspan dianggap berhasil menciptakan sebuah kondisi moneter yang stabil dan *predictable*, yang memungkinkan terjadinya pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Sebagian pengagumnya bahkan memberinya julukan sebagai *the greatest central banker of all time*.

Para pengkritiknya, seperti Paul Krugman, mungkin benar dalam beberapa hal mengenai ketidakmampuan Greenspan dalam mencegah Presiden George W. Bush menggelembungkan defisit anggaran, atau dalam meramalkan terjadinya *bubble* di sektor perumahan sekian tahun lalu, yang menyebabkan terjadinya krisis di AS sekarang ini. Namun, kalau toh hal-hal ini adalah sebuah kesalahan yang layak ditimpakan kepadanya, ia tak mengaburkan begitu banyak langkah-langkah Greenspan yang dianggap tepat dan konstruktif selama 18 tahun kepemimpinannya.

Kini, setelah mundur awal tahun lalu, Alan Greenspan menceritakan semua pengalamannya dalam buku setebal 531 halaman, *The Age of Turbulence*. Sekarang Greenspan mampu

berbicara dengan lancar, menarik, tanpa kalimat yang kabur dan elusif sebagaimana yang menjadi ciri khasnya selama ini.

Salah satu bagian yang paling menarik adalah pengalamannya dalam berhubungan dengan presiden (Reagan, Bush, Clinton, Bush Jr) serta kaum politisi lainnya di kabinet atau di Kongres. Kaum politisi ingin terus membengkakkan anggaran dan sering kurang sabar menerima langkah pengetatan uang. Di sini kita bisa melihat bagaimana Greenspan harus mampu “berpolitik”, membujuk, dan memengaruhi kaum politisi untuk tidak mengabaikan prinsip-prinsip *sound money* demi kepentingan jangka pendek.

Barangkali di situlah terletak salah satu kunci suksesnya. Ia bukan hanya seorang analis yang tekun, tetapi juga seorang aktor yang mampu meraba suhu politik dan mengenal dengan baik lekak-lekuk politik yang harus dilaluinya.

Mozart dan Matematika

Pada bagian awal *The Age of Turbulence* Greenspan menulis semacam memoar. Bagian itu enak dan menarik dibaca, sebab ia memperlihatkan dimensi manusia di balik peristiwa-peristiwa besar ekonomi dan interaksi politik, *the human face behind history*.

Ia lahir di Manhattan, New York, pada 1926 dari keluarga Yahudi sekular dengan ekonomi pas-pasan. Cinta pertamanya adalah musik. Ia fanatik pada Mozart. Pada usia remaja, keahliannya bermain saksofon membawanya dalam dunia pertunjukan profesional. Ia kemudian sadar, bakat musiknya tidak akan mampu membawanya ke tingkat maestro. Ia lalu banting setir, belajar ekonomi dan bisnis di New York University (NYU) dan kemudian melanjutkan ke tingkat doktoral di Columbia University.

Kebetulan sejak kecil, sebagai anak yang introvert, Alan Greenspan memang senang pada angka-angka dan merasa begitu gampang menelusuri dalil-dalil matematika (hingga masa tuanya, kebiasaan Greenspan untuk mengisi waktu luang dan

mengendurkan saraf adalah dengan mengerjakan soal-soal kalkulus). Bakat seperti ini kemudian terbukti sangat membantunya dalam melakukan studi ekonomi yang saat itu, karena pengaruh Keynes, memang sedang mengadopsi matematika sebagai alat analisis yang semakin penting.

Di universitas, salah satu tokoh yang berpengaruh dalam formasi pemikirannya adalah Arthur Burns, pengkritik Keynes yang kemudian menjadi gubernur bank sentral pada 1970-an. Lewat Burns, Greenspan, yang memang sudah tertarik dengan pemikiran kaum liberal klasik (Adam Smith, John Locke, dan David Hume) dan karya Schumpeter tentang inovasi dan kewirausahaan, menemukan tokoh yang memberinya dasar-dasar untuk memahami dengan lebih baik bekerjanya sistem ekonomi pasar modern. Di luar dunia universitas, Greenspan bergaul dalam komunitas Ayn Rand, novelis dan filsuf Rusia yang melarikan diri dari sistem komunisme. Ia adalah pemimpin kaum libertarian garis keras. Greenspan tidak belajar ekonomi dari Rand, tetapi dari pemikir wanita inilah Greenspan tumbuh secara intelektual dan kemudian mengerti bahwa sistem ekonomi pasar atau kapitalisme dapat pula dibela secara moral, bukan hanya dari sudut bisnis atau efisiensi semata.

Dengan pengaruh semacam itu, tidak heran jika sampai sekarang pun Alan Greenspan dengan bangga berkata bahwa dirinya adalah *a life-long libertarian republican*.

Dengan keyakinan yang kental pada gagasan libertarian, sangat mudah bagi Greenspan untuk terjebak menjadi *a fighting banker* yang terobsesi oleh ideologi dan ide-ide besar. Namun, salah satu kelebihan Greenspan adalah kemampuannya untuk lebih mengedepankan akal sehat, mempelajari fakta-fakta yang ada, dan lebih mengutamakan moderasi dan sikap yang prudensial. Ide memberi potret besar, namun realitas yang terus berubah seringkali menuntut langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kompromi.

Selain menulis pengalaman hidup dan perjalanan kariernya, di paruh kedua buku ini Greenspan juga menulis esai-esai dengan beragam topik, dari perubahan ekonomi di Cina, India, Rusia, hingga masalah umum, seperti globalisasi, krisis energi, dan pemerataan ekonomi. Ia melihat berbagai masalah dan kecenderungan ekonomi dari sebuah posisi unik di puncak hierarki kekuasaan moneter. Dalam hal ini ia memainkan peran sebagai pelaku dan saksi sejarah sekaligus.

Bagi pembacanya, hal itu mendatangkan keasyikan tersendiri. Kita seperti masuk dalam dunia Greenspan, dan dari sana mengamati bagaimana seseorang yang memegang kekuasaan begitu besar mempelajari dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan orang banyak.

Dalam salah satu bagian buku ini, Alan Greenspan juga menjelaskan bahwa pada akhirnya dinamika perekonomian dan perputaran uang hanyalah satu sisi dari interaksi manusia, dan karena itu ia mencerminkan karakter dan sifat manusia itu sendiri yang bertindak atas dasar harapan dan kecemasannya, rasionalitas, maupun irasionalitasnya.

Karena itu, orang yang berada di posisinya selain harus menguasai berbagai permasalahan teknis ekonomi dan finansial, juga harus memahami dengan baik sifat dan karakter manusia. Terutama dalam situasi kritis di mana pasar terguncang dan fluktuasi ekonomi bergerak secara tak terduga, justru pemahaman seperti itulah yang sangat bermanfaat dalam membimbingnya mengambil keputusan-keputusan penting.

Dengan semua itu kita menjadi cukup mafhum mengapa ia begitu disegani oleh kawan dan lawan. Barangkali, kalau konsep *Platonic Guardian* memang tidak berlebihan, pada Alan Greenspan-lah kita menemukan perwujudannya yang hampir sempurna.

Norman Borlaug, Pemberi Makan Dunia

SIAPA MANUSIA yang paling berjasa di abad ke-20? Kita bisa menjawabnya dengan menyebut sederetan pemimpin besar seperti Roosevelt dan Churchill, atau ilmuwan besar seperti Einstein dan industrialis raksasa seperti Henry Ford. Selain nama-nama besar ini, Norman Borlaug patut menjadi favorit.

Akan tetapi, siapa yang kini masih mengenal Norman Borlaug? Siapa yang tahu bahwa pada 1970 ia mendapat Hadiah Nobel untuk Perdamaian atas jasanya memberi makan kepada jutaan manusia, mencegah kelaparan massal, dan karena itu memungkinkan perdamaian yang lebih abadi? Siapa yang masih ingat bahwa di tahun 1960-an ia mengawali Revolusi Hijau, sebuah peningkatan produktivitas pertanian yang dahsyat dan memengaruhi perkembangan banyak negara, termasuk negara kita?

Leon Hasser baru-baru ini menerbitkan buku yang bertutur tentang Norman Borlaug, *The Man Who Fed the World*. Hasser mengenal Borlaug di Pakistan pada awal 1960-an saat ia masih bertugas sebagai staf Kedubes AS yang membidangi bantuan dan peningkatan pertanian.

Dalam buku ini digambarkan bagaimana Norman Borlaug yang lahir pada 1914 dari keluarga petani miskin di Cresco, Iowa, melewati masa kecilnya dengan pendidikan yang sederhana tetapi penuh dengan keakraban yang khas kaum petani migran di *frontier* Amerika. Setelah selesai sekolah dasar dan menengah di daerah kecil itu, Borlaug meneruskan pendidikannya ke University of Minnesota. Ia adalah generasi pertama dari keluarga Borlaug yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat setinggi itu.

Di University of Minnesota inilah ia secara kebetulan sempat menghadiri ceramah Prof. E.C. Stakman, Ketua Jurusan Patologi Tanaman, yang memiliki reputasi dunia di bidangnya. Ceramah itu mengubah hidup Norman Borlaug—dan sebagian sejarah abad ke-20 ikut pula berubah bersamanya. Setelah ceramah ini, Borlaug bertekad untuk menjadi ahli pertanian dan belajar di bawah bimbingan Prof. Stakman.

Revolusi Hijau

Setelah merampungkan studi doktoralnya, Borlaug menerima tawaran Prof. Stakman untuk membantu pengembangan pertanian di Meksiko yang saat itu sedang mengalami krisis pangan. Program ini dibiayai sepenuhnya oleh The Rockefeller Foundation. Selama 20 tahun Norman Borlaug tinggal di Meksiko, melakukan riset dan pengembangan tanaman gandum. Dari hari ke hari, dengan ketekunan yang luarbiasa, ia dan tim yang dipimpinnnya menyilang dan mempelajari pertumbuhan ribuan varietas gandum untuk mencari bibit-bibit baru dengan sifat yang lebih tahan hama dan lebih produktif.

Pada intinya, terobosan Norman Borlaug terletak pada beberapa hal. Ia menemukan metode yang lebih efektif untuk melakukan persilangan varietas dalam jumlah yang massal serta menyempurnakan metode *shuttle-breeding*.

Namun yang tidak kurang pentingnya juga adalah temuan bibit gandum dengan batang yang jauh lebih pendek, yang meru-

pakan penyilangan yang berhasil dari bibit yang berasal dari Jepang, Norin-10. Dengan batang yang lebih pendek, varietas ini menghasilkan butir gandum lebih banyak serta lebih tahan terhadap terpaan angin dan lebih responsif terhadap aplikasi pupuk.

Dengan metode baru dan varietas unggulan itulah ia memulai Revolusi Hijau. Pada akhir 1950-an Meksiko sudah terlepas dari ancaman kelaparan dan mencapai tahap swasembada pangan. Sukses itu mulai mengharumkan nama Norman Borlaug. Kebetulan pada periode itu beberapa negara lainnya, seperti India dan Pakistan, juga mengalami krisis pangan. Suasana dunia pada 1960-an memang agak kelabu. *The Population Bomb*, buku populer yang ditulis Paul Ehrlich pada periode itu, memaparkan, krisis pangan di India hanyalah bagian proses sejarah yang lebih besar. Dunia tidak mampu lagi menanggung jumlah penduduk yang terus membengkak, sehingga secara alamiah puluhan bahkan mungkin ratusan juta jiwa akan terkena seleksi alam (artinya, mati kelaparan). Borlaug tidak larut dalam pesimisme semacam itu.

Kebetulan pada 1961, ia diundang ke India oleh M.S. Swaminathan, penasihat Menteri Pertanian India. Waktu itu, nasib India masih tertolong oleh kiriman jutaan ton gandum dari AS. Namun, bantuan ini tidak mungkin berlangsung selama-lamanya.

Borlaug dan Swaminathan menyadari hal itu, tetapi pada tahun-tahun pertama birokrasi India tidak memberi mereka ruang gerak yang memadai. Barulah pada 1965, setelah meletusnya perang India-Pakistan, upaya yang sungguh-sungguh untuk mengawali Revolusi Hijau di India dapat dimulai. Ribuan ton bibit baru dari Meksiko disebar dengan luas. Selain itu, Borlaug juga berhasil membujuk pemerintahan India agar mengubah kebijakan pertanian dengan menyesuaikan harga gandum petani, menyebarkan pupuk dengan lebih agresif serta memperluas jaringan kredit petani.

Dengan semua itu, India akhirnya dapat melepaskan diri dari jepitan nasib buruk. Pada awal 1970-an negeri kedua terpadat di dunia ini berhasil mencapai swasembada pangan. Setelah itu, India tidak lagi pernah mengalami ancaman kelaparan massal sebagaimana yang sering terjadi sebelumnya, walaupun penduduknya telah meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk pada periode itu, yaitu dari 450 juta jiwa menjadi hampir satu miliar jiwa. Keberhasilan berswasembada malah tercapai dua tahun sebelumnya oleh Pakistan (1968).

Setelah India dan Pakistan, Revolusi Hijau kemudian merambah ke berbagai negeri lainnya—dan tidak hanya dengan tanaman gandum. Dengan contoh keberhasilan di Meksiko, The Rockefeller Foundation dan The Ford Foundation mengambil inisiatif mendirikan IRRI (International Rice Research Institute) di Los Banos, Filipina. Lembaga riset ini kemudian menghasilkan varietas-varietas padi baru yang juga lebih pendek, lebih tahan hama, serta dengan produktivitas yang jauh lebih tinggi dari varietas yang sebelumnya telah ada.

Lembaga inilah yang menjadi ujung tombak swasembada pangan di Asia, termasuk di Indonesia pada awal dan pertengahan tahun 1980-an. Di negeri kita, katalis Revolusi Hijau adalah para insinyur pertanian lulusan berbagai universitas, terutama Institut Pertanian Bogor, yang tumbuh berkembang karena dimungkinkan oleh sukses ekonomi pemerintahan Orde Baru.

Nobel Perdamaian

Karena Revolusi Hijau, dunia tidak lagi terancam oleh bahaya kelaparan permanen, kecuali oleh penyebab-penyebab yang bersifat *ad hoc* dan temporer, seperti terjadinya konflik bersenjata, musim yang ekstrem dan semacamnya. Belum pernah dalam sejarah manusia ketahanan pangan yang demikian dapat dicapai.

Untuk upayanya ini, Borlaug memperoleh Hadial Nobel pada 1970. Itulah pertama kalinya seorang ahli pertanian memperoleh hadiah dalam kategori perdamaian (biasanya hadiah ini diberikan kepada para politisi, aktivis lembaga perdamaian, pahlawan perang, dan pemimpin dunia). Panitia hadiah paling bergengsi ini beranggapan bahwa dengan mengatasi ancaman kelaparan, Borlaug telah membantu meletakkan dasar-dasar perdamaian dunia yang lebih langgeng.

Namun, bagaimana di masa depan? Saat ini penduduk dunia sudah mencapai lebih 6,4 miliar jiwa. Diramalkan jumlah ini akan terus meningkat hingga mencapai angka yang stabil pada jumlah sekitar 10 miliar jiwa pada tahun 2050. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan kalori manusia sebanyak itu? Revolusi Hijau telah sukses di tahun 1960-1980, tetapi bagaimana selanjutnya? Bagaimana mematahkan ramalan Malthus, sekali dan selama-lamanya?

Buat Borlaug, semua itu mengharuskan kita untuk terus mengembangkan penelitian dan mengawasi kemungkinan merebaknya wabah baru pada beberapa tanaman yang merupakan sumber pangan utama, yaitu gandum, padi, jagung. Baginya, kunci semua harapan umat manusia tergantung pada ilmu pengetahuan (khususnya bioteknologi) dan sikap yang terus-menerus aktif dalam dunia penelitian dan pengembangan tanaman pangan. Musuh terbesar umat manusia adalah bencana kelaparan.

Kita harus terus waspada dan mencari cara untuk mengalahkannya. Norman Borlaug dapat menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang berada di garis terdepan penelitian dan pengembangan pertanian.

22 Otober 2006

Indonesia 1995: Pertarungan Kekuasaan dan Kebijakan

(Bersama R. William Liddle)

Ekonomi

Ekonomi Indonesia pada 1995 memperlihatkan beragam tanda. Pada sisi yang positif, pertumbuhan ekonomi yang cepat terus berlanjut, dengan pertumbuhan GDP 7,4%, melampaui perkiraan awal pemerintah, yakni 7,1%. Pada 1994, ketika angka GDP itu 6,9%, ada peringatan bahwa perekonomian terlalu cepat tumbuh, namun pada akhir tahun tersebut indikator-indikator harga memperlihatkan bahwa angka inflasi bisa dibendung di bawah level dua digit. Dalam hal investasi asing pada 1995, dari Januari hingga Juli saja jumlah investasi yang disepakati mencapai \$27,2 miliar, dibandingkan \$23,7 miliar selama 1994.²⁶ Hal ini sangat mengesankan jika kita melihat bahwa krisis peso Meksiko menyebabkan para investor asing lebih berhati-hati dalam menghadapi perekonomian-perekonomian negara berkembang.

26 Ketika ke-823 proyek investasi yang disepakati pada 1994 diwujudkan sepenuhnya (yang mungkin memerlukan waktu satu atau dua tahun), hal itu akan memberikan pekerjaan bagi 623.000 orang. *Far Eastern Economic Review*, 18 Mei, 1995, hlm. 56.

Tanda lain yang bagus adalah bahwa proses reformasi ekonomi, yang dimulai pada 1983, terus berlanjut. Paket reformasi terakhir, yang diumumkan pada Juni 1994, bertujuan untuk merombak aturan-aturan investasi “anti-asing” yang telah usang. Beberapa waktu kemudian, beberapa ekonom negeri ini yang pro-pasar mulai memperingatkan tentang meluasnya “kelelahan deregulasi” di kalangan pembuat kebijakan, namun pada Mei 1995, langkah-langkah baru yang substansial dijalankan dengan memotong cukai 6.030 item (64% dari jumlah total di mana cukai dikumpulkan) dan merancang rencana untuk mencapai tingkat yang lebih rendah pada tahun 2000. Pada November, PT Telkom (perusahaan telekomunikasi negara) sebagian diprivatisasi, mengikuti langkah yang sama yang sebelumnya diambil oleh PT Timah (tambang timah) dan PT Indosat (satelit komunikasi). Tujuannya adalah untuk mengubah struktur insentif perusahaan-perusahaan besar negara dan memberikan uang tunai pemerintah untuk mengurangi hutang-hutangnya yang semakin besar.

Pada sisi yang negatif, terdapat beberapa indikator yang memperlihatkan ancaman yang semakin besar terhadap catatan keberhasilan ekonomi negara ini. Angka defisit sekarang ini melonjak dari \$3,4 miliar pada 1994 menjadi \$6,5 miliar pada akhir 1995. Lonjakan yang hampir berlipat dua ini sebagian disebabkan oleh impor barang-barang modal yang melambung (karena peningkatan pesat investasi asing), dari \$39,5 miliar pada 1994 menjadi \$45,2 miliar. Sebab yang lain adalah bahwa ekspor negeri ini, khususnya ekspor non-minyak, tidak seberhasil sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari-Agustus 1993, ekspor meningkat 23,84%, sementara selama periode yang sama pada 1995, pertumbuhan hanya 14,06%.

Faktor pertumbuhan ekspor yang melambat inilah yang harus paling diperhatikan negeri ini. Hingga awal 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong terutama oleh eks-

por minyak, namun dengan merosotnya harga minyak dan penyesuaian kembali matauang dunia, pemerintah pada 1983 mulai melakukan deregulasi. Dalam 10 tahun berikutnya, perekonomian tumbuh terus-menerus dengan angka yang mengesankan, di mana ekspor non-minyak berada di depan. Hal ini tidak hanya menyediakan cadangan dana untuk membayar impor barang-barang modal yang diperlukan untuk membangun industri-industri modern, namun apa yang lebih penting: hal itu mengubah struktur ekonomi negara itu dari perekonomian yang bergantung pada minyak menjadi perekonomian yang lebih beragam dan berorientasi ke luar, sebagaimana perekonomian macam-macam Asia. Jadi, jika angka pertumbuhan 1995 yang melambat terus terjadi, hal itu jelas membahayakan keberhasilan negeri itu yang cukup mengesankan. Profesor Sumitro Djojohadikusumo, ekonom Indonesia paling terkemuka, baru-baru ini memperingatkan bahwa jika tindakan perbaikan tidak diambil, Indonesia bisa seperti Meksiko.

Selain pertumbuhan ekspor yang melambat, tanda negatif lain adalah terus berlanjutnya apa yang seringkali disebut oleh para ekonom Indonesia sebagai *ekonomi biaya tinggi*. Benar bahwa paket deregulasi ekonomi tersebut cukup berjangkauan luas, namun jika dikaji lebih cermat, tampak jelas bahwa paket ini sejauh ini sebagian besar hanya menyentuh bagian “termudah” dari perekonomian, yakni sektor moneter. Sektor-sektor “riil” yang secara langsung terkait dengan persaingan, produksi, dan biaya tetap berada dalam cengkeraman regulasi, kartel, monopoli, restriksi, dan favoritisme pemerintah. Pada Juni, Bank Dunia menerbitkan sebuah laporan yang dengan keras memperingatkan berbagai dampak buruk dari berbagai penyimpangan ini pada daya saing ekonomi negeri ini. Namun, selama 1995 tidak ada tanda yang meyakinkan bahwa pemerintah bersiap untuk melucuti lembaga-lembaga dan praktik-praktik di jantung perekonomian berbiaya tinggi tersebut.

Terus bertahannya ekonomi riil yang sangat menyimpang ini, di satu sisi, dan di sisi lain: 10 tahun rangkaian paket deregulasi—serta dijalankannya manajemen makro-ekonomi yang baik di era Soeharto tersebut—tampak mencerminkan ambivalensi Soeharto sendiri dalam hal perlunya meliberalkan perekonomian lebih jauh dan pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan atas pembuatan kebijakan ekonomi di dalam pemerintahannya. Soeharto tampak menyadari bahwa liberalisasi merupakan kecenderungan global, dan bahwa tidak ada jalan masa depan lain bagi negeri itu kecuali mengikuti kecenderungan ini. Hal ini tercermin dalam pertemuan APEC di Bogor pada November 1994, di mana Soeharto mengejutkan banyak orang dengan sepenuhnya mendukung pembentukan suatu wilayah perdagangan bebas Pasifik pada 2015 dan menyatakan bahwa Indonesia segera akan mengarah ke tujuan ini. Tak diragukan, setelah pertemuan Bogor tersebut, Soeharto dengan segera menjadi pelopor perdagangan bebas dunia. Pada saat yang sama, bukan menjadi rahasia bahwa banyak dari penyimpangan-penyimpangan tersebut—dalam bentuk monopoli, kartel, dan lisensi atau izin khusus—sebenarnya disebabkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh anak-anaknya dan sanak keluarganya atau oleh konglomerat-konglomerat bisnis yang pemiliknya telah lama memiliki hubungan dekat dengannya. Pada awal tahun itu, Soeharto membuat suatu keputusan yang secara ekonomi bagus dengan menolak permintaan perlindungan bea 40% dari konsorsium Chandra Asri, suatu proyek *olefin* \$1,2 miliar yang sebagian dimiliki oleh salah seorang anaknya dan Prajogo Pangestu, seorang pengusaha Cina-Indonesia yang memiliki hubungan dekat dengannya. Namun, keseluruhan struktur proteksi tersebut tetap utuh.

Sebagian karena alasan ini, pertarungan untuk memperebutkan pembuatan kebijakan ekonomi di dalam pemerintahannya terus berlanjut—sebuah pertarungan yang sejak 1993

menunjukkan suatu indikasi bahwa keseimbangan kekuasaan semakin mengarah kepada kubu nasionalis dan pro-dirigis. Selama 10 tahun setelah deregulasi pertama pada 1983, para teknokrat pro-pasar berada dalam posisi dominan dalam proses pembuatan kebijakan aktual. Kekalahan simbolis mereka terjadi ketika Soeharto, saat membentuk kabinet keenamnya pada 1993, menjadikan Ginandjar Kartasasmita—seorang insinyur yang sangat kritis terhadap para teknokrat tersebut—kepala Dewan Perencanaan Nasional, sebuah jabatan yang selama lebih dari satu dekade berada dalam kendali Widjojo Nitisastro, ketua para teknokrat tersebut. Selain itu, Soeharto juga menyerahi dua kolega dekat B. J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi dan seorang nasionalis ekonomi terkemuka, dengan jabatan menteri Perdagangan dan Transportasi. Habibie juga merupakan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang kontroversial itu.

Namun, pada akhir 1995, terdapat indikasi, meskipun sangat tentatif, bahwa pendulum tersebut berbalik arah. Pada Desember, Soeharto menggabungkan Kementerian Industri dan Perdagangan, dan mengangkat mantan Menteri Industri Tungky Ariwibowo, seorang pendukung deregulasi, untuk mengetuai kementerian super tersebut. Hal ini berarti bahwa S. B. Joedono, seorang kolega dekat Habibie, pada dasarnya dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Hal ini sangat mengejutkan, karena ini adalah kali pertama dalam 30 tahun kekuasaan Soeharto seorang menteri dipecat di tengah-tengah masa jabatannya. Apakah Soeharto, di pengujung tahun itu, menyimpulkan bahwa pembuatan keputusan ekonomi yang penting tidak boleh berada dalam tangan mereka yang tidak mendukung liberalisasi?

Terlalu dini untuk berkata bahwa dominasi para teknokrat pro-pasar akan dipulihkan pada 1996. Kelemahan utama mereka adalah ketidakmampuan mereka untuk menggunakan

forum-forum publik dan media massa untuk meyakinkan orang tentang kebaikan liberalisasi. Sejarah mungkin berada di pihak mereka dalam bentuk suatu kecenderungan liberalisasi global, yang juga memiliki para pendukungnya di Indonesia, namun mereka tampak puas untuk bergerak di belakang layar, dan sangat bergantung pada Soeharto yang ambivalensinya seringkali mengejutkan mereka. Mereka adalah para ekonom yang mumpuni, namun mereka politisi amatir. Sebaliknya, musuh-musuh mereka sangat baik dalam seni persuasi politik. Pandangan-pandangan Habibie terus-menerus dipromosikan dan dipertahankan di koran nasional ICMI, *Republika*. Selain itu, melalui ICMI, Habibie terus memperluas basis kekuasaan yang dengannya dukungan publik bagi program-program diringisnya memuncak.

Sekarang ini tampak bahwa satu-satunya kepastian adalah berlanjutnya pertarungan untuk memperebutkan kekuasaan itu sendiri; hasilnya masih belum pasti. Harapan terbesar bagi para teknokrat, ironisnya, mungkin adalah semakin merosotnya angka pertumbuhan ekspor. Jika hal ini terjadi, Soeharto mungkin memutuskan bahwa ia tidak memiliki pilihan lain kecuali memberi mereka pengaruh yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Masa yang sulit memunculkan kebijakan yang bagus, sebuah aforisme yang terbukti benar pada 1983, mungkin juga memandu pilihan pada 1996.

Politik

Presiden Soeharto, sebagaimana biasa, merupakan pusat dari sebagian besar peristiwa politik pada 1995. Apa yang mungkin paling mengejutkan adalah tentangan di pengadilan terhadap larangan presiden pada 1994 atas mingguan berita terkemuka, *Tempo*, yang dibredel karena laporan kritisnya tentang kontroversi di seputar pembelian pemerintah atas beberapa kapal perang usang Jerman Timur. Goenawan Mohamad, ketua

editor *Tempo* dan intelektual liberal terkemuka, mendatangi pengadilan untuk menentang hak pemerintah untuk melarang majalahnya. Ia adalah yang pertama melakukan hal tersebut, meskipun Soeharto telah menutup banyak publikasi sebelumnya. Goenawan tidak berpikir bahwa dia mungkin menang; ia bergerak untuk membuat suatu langkah simbolik dan membuktikan bahwa penindasan bisa ditentang. Yang mengejutkan, pengadilan tinggi pada Mei dan pengadilan banding pada November menetapkan bahwa pelarangan tersebut ilegal dan memerintahkan Menteri Informasi untuk memulihkan izin penerbitan *Tempo*. Namun masih ada dua rintangan besar: *Tempo* harus menang dalam pengadilan di Mahkamah Agung dan keputusan tersebut harus diterapkan oleh pemerintah. Namun, kemenangan Goenawan tersebut, yang diberitakan secara luas di media nasional, memperlihatkan kemauan pengadilan Indonesia untuk menjadi lebih independen *vis-à-vis* eksekutif yang dominan serta ketidaksetujuan publik yang semakin meningkat atas tindakan pemerintah yang sewenang-wenang.

Perkembangan lain yang tidak lazim, pada paruh kedua tahun tersebut, adalah munculnya beberapa organisasi baru kuasi-politik yang dicirikan oleh ambisi yang besar dan retorika nasionalis yang tajam. Salah satu organisasi ini, Persatuan Cendekiawan Pembangunan Pancasila (PCPP), sangat menarik perhatian media. PCPP dipimpin oleh para mantan pejabat penting, pensiunan jenderal, dan tokoh publik terkemuka, seperti Kharis Suhud (mantan jubiir Parlemen), R. Suprpto (mantan gubernur Jakarta), dan Bambang Triantoro (mantan ketua staf sosial dan politik tentara). Pada saat kelahirannya, PCPP mendapatkan dukungan dari beberapa pejabat tinggi di dalam pemerintahan, termasuk Menteri Pertahanan dan Keamanan, Jenderal Edi Sudradjat, dan Menteri Lingkungan, Sarwono Kusumaatmadja, yang juga mantan sekretaris jenderal Golkar, partai yang sedang berkuasa. Menurut para pendirinya, PCPP

dibentuk untuk menyegarkan kembali semangat persatuan nasional di hadapan munculnya kecenderungan yang semakin besar ke arah sektarianisme (yakni, Islam) dalam kehidupan politik nasional. Tentu saja, target kebenciannya adalah ICMI pimpinan Habibie.

Terlepas dari kedudukan para pendirinya dan dukungan dari beberapa pejabat birokrasi dan militer, tampak mustahil bahwa PCPP dan organisasi-organisasi yang serupa akan memiliki dampak yang penting dalam beberapa tahun ke depan. Sebagian besar pendirinya mendapatkan pengalaman politik mereka dalam birokrasi, bukan masyarakat, dan mereka tidak banyak memiliki kemampuan untuk membentuk organisasi di luar kerangka negara. Selain itu, para pejabat pemerintah yang mendukung mereka telah kehilangan pengaruh di dalam pemerintahan. Menteri Pertahanan, Sudradjat, misalnya, tidak memiliki kekuasaan yang pernah ia miliki saat menjabat sebagai ketua staf tentara. Seorang pengamat yang mengamati perubahan lanskap politik baru akan sangat terbantu dengan melihat pada hubungan yang berubah antara Soeharto dan militer, dan tumbuhnya gerakan Islam yang dipelopori oleh ICMI.

Di dalam militer, berbagai peristiwa penting terjadi baik di awal dan akhir tahun tersebut. Jenderal Wismoyo digantikan oleh Jenderal Hartono sebagai kepala staf tentara pada Februari. Sebagai kerabat dekat Soeharto karena pernikahan dan perwira yang mumpuni, Wismoyo telah lama berada di posisi yang strategis di angkatan bersenjata dan jelas dipersiapkan untuk mengganti Jenderal Feisal Tanjung sebagai komandan angkatan bersenjata sebelum masa Pemilu 1997-98 yang sensitif. Wismoyo merupakan figur utama dalam strategi Soeharto untuk mengurangi pengaruh orang kuat yang telah lama berkuasa di militer, Jenderal L. B. Moerdani, komandan angkatan bersenjata dari 1983-88 dan Menteri Pertahanan dari 1988-93. Telah diperkirakan bahwa setelah dua tahun menjabat sebagai

kepala staf tentara, Wismoyo akan diangkat sebagai komandan angkatan bersenjata, jabatan paling berpengaruh kedua di negara ini. Penggantiannya yang terjadi tiba-tiba, karena alasan-alasan yang dikabarkan bersifat personal dan politis, sangat mengejutkan sebagian besar pengamat.

Jenderal Hartono, kepala staf tentara tersebut, merupakan seorang perwira karier dengan latar belakang santri. Ia dikenal memiliki hubungan dekat dengan banyak kiai berpengaruh, dan berhasil meyakinkan mereka untuk secara terbuka mendukung Soeharto untuk masa jabatan presiden 1998-2003. Jenderal Hartono—bersama dengan Jenderal Tanjung, komandan angkatan bersenjata yang santun—dianggap oleh banyak pengamat memimpin faksi para perwira “hijau” (warna yang dihubungkan dengan Islam) yang mendukung, atau tidak memusuhi, kebangkitan kembali Islam belakangan ini. Pengangkatan Hartono tersebut dengan demikian tampak mengukuhkan hubungan antara basis politik Soeharto yang paling kuat dan lama—yakni angkatan bersenjata—dengan para pendukung terbarunya, yakni para birokrat, politisi, dan Intelektual Islam yang terkait dengan ICMI Habibie.

Pada Desember, Soeharto mempromosikan menantunya, Brigjen Prabowo Subianto, menjadi komandan Kopassus, Komando Pasukan Khusus, yang memainkan peran kunci dalam pendirian pemerintahan Orde Baru Soeharto pada akhir 1960-an. Prabowo adalah anak seorang ekonom, Sumitro, dan menikah dengan Siti Hedyati (Titiiek) Soeharto, yang akhir-akhir ini sering diberitakan sebagai pengusaha perempuan yang sangat menjanjikan. Secara umum, promosi Prabowo tersebut diberitakan secara baik oleh media besar, yang menggambarkan dia sebagai komandan pasukan yang sangat cerdas dan perhatian dengan kepribadian yang rendah hati. Ia diberitakan sebagai seorang *polyglot*, yang fasih berbahasa Inggris, Jerman, Belanda, dan Prancis, yang menghabiskan waktu luangnya untuk mem-

baca berbagai macam buku.²⁷ Reputasi awalnya yang penuh kekerasan selama bertugas di Timor Timur tidak disebutkan.

Sebagai komandan Kopassus, Prabowo telah menjadi pemain utama dalam politik militer, meskipun dia masih beberapa tingkat di bawah para pemimpin puncak angkatan bersenjata. Banyak pengamat di Jakarta melihat ia naik relatif cepat ke posisi komandan angkatan bersenjata. Ia bahkan dilihat sebagai penyelamat Soeharto, seorang perwira yang dapat dengan kuat memegang kendali generasi para perwira pasca-Moerdani dan memberikan dukungannya kepada presiden setelah 1998. Penilaian ini sebagian tentu saja didasarkan pada hubungan keluarganya dengan Soeharto. Namun hal ini juga didasarkan pada reputasi kepemimpinannya yang semakin meningkat di dalam angkatan bersenjata, terutama di kalangan para perwira muda, dan juga karena ketrampilan politiknya yang luas. Di kalangan-kalangan Islam yang terkait dengan ICMI, misalnya, Prabowo dianggap sebagai sekutu. Meskipun penilaian ini mungkin benar, harus diingat bahwa pujian seperti ini akhir-akhir ini juga dilimpahkan kepada Wismoyo dan para perwira lain sebelumnya.

Dengan keberadaan Hartono dan Prabowo dalam posisi yang kuat, tidak diragukan bahwa Soeharto kini sepenuhnya memegang kendali lembaga yang paling penting di negeri ini. Ia sangat mungkin akan menggunakan kendali ini untuk menjamin pemilihan kembali dirinya dan memilih wakil presiden yang sepadan pada 1998. Tekanan yang kuat dari berbagai kekuatan politik dalam masyarakat dapat mengubah keadaan ini, namun pada 1995 tidak banyak terdapat tanda-tanda tekanan dari bawah. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) telah

27 *Republika*, 21 November 1995, hlm. 1, dan M. Amien Rais, "Prabowo", *Republika*, 30 November 1995, hlm. 1; *Kompas*, 4 Desember 1995, hlm. 1, dan 5 Desember 1995, hlm. 1; *Gatra*, 25 November 1995, hlm. 22-24, 30; *Forum Keadilan*, 18 Desember 1995, hlm. 94-98.

terpecah-belah sejak kerusuhan Medan pada 1994. Abdurrahman Wahid dari NU dan Megawati Soekarnoputri dari PDI, dua penentang Soeharto yang kuat, terus-menerus dihantam keras oleh pemerintah sepanjang tahun. Kekuatan politik yang paling kuat pada 1995 pada dasarnya adalah justru kekuatan yang sangat mendukung Soeharto: orang-orang Islam di ICMI.

Dalam kongres kedua ICMI pada Desember, Menteri Habibie terpilih kembali sebagai ketua untuk masa jabatan lima tahun kedua. Ketika ia terpilih pertama kali pada 1990 untuk memimpin organisasi intelektual muslim tersebut, Habibie—seorang insinyur lulusan Jerman yang hidup di luar negeri selama bertahun-tahun—adalah seorang politisi naif yang modal politiknya hanya kepercayaan Soeharto kepadanya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia telah membangun ketrampilan politik yang sangat bagus. Kemenangan mutakhirnya, misalnya, adalah penerbangan pertama *Gatotkoco*—sebuah pesawat berkapasitas 70 orang yang dibuat oleh perusahaan pesawat terbang milik negara yang ia pimpin—yang disiarkan secara nasional.²⁸ Dukungan ICMI paling kuat adalah di dalam birokrasi negara dan di kalangan kelas menengah, kaum profesional, dan para pengusaha Muslim yang ingin memiliki akses ke negara. Dalam beberapa tahun terakhir, ICMI memperluas basisnya dengan merangkul banyak kelompok, dan organisasi ini mengalami banyak kemajuan pada 1995. Indikator penting bagi perkembangan masa depan ICMI adalah pemilihan Adi Sasono sebagai sekretaris jenderalanya. Sasono adalah aktivis LSM yang telah lama malang-melintang dan seseorang yang meyakini teori dependensia—pernah menerjemahkan *Development of Underdevelopment* karya Andre Gunder Frank ke dalam bahasa Indonesia—yang ingin memperluas basis dukungan massa ICMI

28 Hari penerbangan tersebut, yakni 10 Agustus, diberi nama Hari Teknologi dan dijadikan hari libur nasional.

secara besar-besaran selama lima tahun berikutnya. Isu yang ia angkat adalah *ekonomi kerakyatan* yang sangat populis—sebuah frase yang memiliki gaung sejarah yang sangat kuat dari masa Indonesia pra-Soeharto. Hal ini juga mencerminkan kebencian umum yang semakin besar dan tersebar luas terhadap apa yang dianggap sebagai ketidakadilan ekonomi dan dominasi ekonomi oleh sejumlah kecil perusahaan besar, yakni apa yang disebut “konglomerat”, yang sebagian besar dimiliki oleh orang-orang Cina-Indonesia.

Hubungan Internasional

Menteri Luar Negeri Ali Alatas pernah menganggap persoalan Timor Timur sebagai “sebuah kerikil dalam sepatu Indonesia”. Pada 1995, tahun ketika Presiden Soeharto melanjutkan usahanya untuk mengangkat profil internasional negaranya, kerikil tersebut dapat dipastikan terasa seperti sebuah batu besar. Pada September, sebuah insiden kecil di sebuah kota di sebelah barat Dili, ibukota Timor Timur, memicu kerusuhan selama seminggu antara orang-orang Katolik Timor Timur dan orang-orang Muslim non-Timor dan, dalam skala yang lebih kecil, orang-orang Protestan. Insiden tersebut membuat banyak orang Islam Indonesia marah. Para mahasiswa melakukan protes di jalan-jalan Jakarta, para pemimpin keagamaan membuat petisi ke Parlemen, dan para intelektual menulis kolom yang menyerukan perlunya tindakan keras terhadap gerakan kemerdekaan Timor Timur. Bagi banyak orang Islam, isu Timor Timur tersebut dalam waktu singkat diubah dari masalah hubungan internasional dengan prioritas rendah, suatu masalah yang harus diselesaikan Menteri Luar Negeri, menjadi suatu ancaman yang signifikan terhadap *umat*.

Kaum muda Timor Timur pro-kemerdekaan juga menggunakan sebuah strategi baru. Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka umumnya mengorganisasi berbagai demonstrasi di

Timor Timur sendiri, yang salah satu akibatnya adalah pembantaian Santa Cruz pada November 1991. Namun, pada paruh kedua 1995, mereka memindahkan tempat utama mereka ke Jakarta. Lagi dan lagi, 5 sampai 15 anak muda Timor Timur meminta suaka di kedutaan-kedutaan asing. Sasaran mereka jelas: untuk menjaga perhatian internasional tetap terfokus pada perjuangan mereka sambil meminimalkan risiko konfrontasi dengan militer Indonesia. Insiden terbesar terjadi pada November ketika sekitar seratus orang Timor Timur, bersama dengan beberapa mahasiswa Indonesia, mendatangi kedutaan Belanda dan Rusia, meminta dukungan bagi referendum kemerdekaan. Sebagai tanggapan, pemerintah memobilisasi orang-orang Timor Timur yang pro-Indonesia untuk menggelar demonstrasi tandingan. Bentrokan terjadi antara kedua pihak, dan duta besar Belanda sedikit terluka dalam huru-hara itu. Presiden Soeharto, mungkin karena memikirkan ambisi internasionalnya yang lebih tinggi, mengirimkan permintaan maaf pribadinya kepada duta besar tersebut.

Ketegangan yang meningkat yang disebabkan oleh perpaduan antara agitasi yang semakin besar di Jakarta dan reaksi kemarahan banyak orang Islam Indonesia ini memperlihatkan bahwa Indonesia mungkin merasakan tekanan yang semakin besar untuk mencari pemecahan yang paling tepat atas masalah Timor Timur tersebut. Selama tahun ini tidak ada tanda bahwa pemerintah akan bergeser dari sikap kerasnya, namun Soeharto mungkin mulai merasa bahwa otonomi, jika bukan referendum kemerdekaan, merupakan jalan terbaik untuk mengeluarkan kerikil yang sangat mengganggu tersebut dari dalam sepatunya.

Dampak sampingan penting dari intensifikasi persoalan Timor Timur ini adalah penolakan Australia terhadap calon duta besar Indonesia, Jenderal H. B. L. Mantiri, yang secara terbuka membela penanganan pemerintahnya atas pembantaian

Santa Cruz. Sebaliknya, hubungan Indonesia-Amerika semakin membaik dengan diterimanya Presiden Soeharto di Gedung Putih pada Oktober. Kebutuhan Soeharto akan pengakuan yang semakin besar sebagai seorang pemimpin Asia dan dunia berkembang sesuai dengan hasrat Clinton akan hubungan perdagangan yang lebih terbuka. Sebagaimana yang dituliskan *New York Times* dalam kepala-beritanya yang provokatif: “Politik Riil: Mengapa Soeharto Diterima dan Castro Ditolak”.²⁹

Februari 1996

29 *New York Times*, 31 Oktober 1995, hlm. A3.

Indonesia 1996: Tekanan dari Atas dan Bawah

(Bersama William R. Liddle)

Politik Domestik

Selama masa 1996, inisiatif politik dalam negeri berada di tangan Presiden Soeharto, yang memerintah Indonesia selama tiga dekade lebih. Namun, dalam bulan-bulan terakhir inisiatif politik tersebut berubah dengan cepat. Inisiatif tersebut tidak bergeser ke tangan lawan-lawan politiknya, melainkan bergeser ke kekuatan-kekuatan sosial yang memiliki akar yang kuat, yang kurang bisa dikontrol olehnya maupun oleh para elite politik yang lain. Pada 29 Mei 1997, pemerintah Orde Baru akan menyelenggarakan pemilu parlementer lima tahunan yang keenam. Pemilu pertama, pada 1971, partai negara, Golkar (Golongan Karya) memperoleh mayoritas suara, yakni 63%.³⁰ Dalam dua pemilu terakhir, pada 1987 dan 1992, Golkar berturut-turut mendapatkan 73% dan 68% suara. Pada Maret 1998, kurang dari 10 bulan setelah Pemilu 1997, MPR akan mengadakan per-

30 Tabel hasil-hasil kelima pemilu Orde Baru tersebut bisa dilihat dalam R. William Liddle, "The Islamic Turn in Indonesia: A Political Explanation," *Journal of Asian Studies*, 55:3 (Agustus 1996), hlm. 626.

temuan untuk mengangkat presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 1998-2003. MPR terdiri atas 1.000 anggota: 425 anggota Parlemen yang dipilih dan 75 anggota Parlemen yang diangkat, ditambah 500 anggota tambahan yang diangkat melalui berbagai proses yang dikontrol oleh Soeharto.

Dalam persiapan untuk Pemilu 1997, obsesi Soeharto—yang seringkali diungkapkan oleh para pembantu politiknya—adalah mendapatkan kembali 5% suara yang hilang dari suara Golkar selama 1987 hingga 1992. Apa yang menjadi persoalan bagi Soeharto bukanlah terus memerintah atau memegang kontrol yang efektif atas Parlemen dan MPR—suatu hal yang sudah dapat dipastikan akan terjadi, meskipun suara Golkar merosot di bawah 50%, mengingat besarnya jumlah anggota MPR yang diangkat. Apa yang menjadi persoalan adalah memelihara keyakinan—baik di kalangan rakyat Indonesia maupun pihak-pihak asing yang berkepentingan seperti para investor dan negara-negara pemberi bantuan—bahwa rezim Orde Baru dan Soeharto yang berusia 75 tahun masih memegang kendali atas negeri itu. Meninggalnya istrinya yang berusia 48 tahun dan usianya sendiri yang semakin lanjut—ia dibawa ke rumah sakit di Jerman untuk menjalani tes jantung dan ginjal pada bulan Juli³¹—semakin membulatkan tekad Soeharto untuk terus memerintah dan membuktikan bahwa dia-lah yang memegang kendali.

Ancaman utama yang muncul pada tahun-tahun belakangan ini berasal dari PDI (Partai Demokrasi Indonesia), salah satu dari dua partai politik yang diizinkan untuk bersaing dengan Golkar. PDI adalah hasil penggabungan—yang dipaksakan oleh pemerintah pada 1974—dari 3 partai nasionalis dan 2 partai Kristen yang bisa terus bertahan selama perseteruan politik pada 1950-an dan 1960-an, sebelum Orde Baru berkuasa pada

31 Ia diberi surat keterangan bebas dari segala penyakit. Lihat *Gatra* 2:36 (20 Juli 1996), hlm. 21-28.

1966. Yang terbesar dan terpenting dari partai-partai yang kemudian bergabung menjadi PDI itu adalah PNI (Partai Nasional Indonesia), yang pernah sangat menonjol karena hubungannya yang dekat dengan Soekarno, pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia pra-PD II yang kharismatik dan flamboyan, serta presiden pertama Indonesia dari 1945 hingga 1967. Para pemimpin PNI yang beraliran kiri dan pro-Soekarno disingkirkan pada akhir 1960-an, dan hanya menyisakan sekelompok kecil kaum konservatif dan oportunist yang bersedia menerima syarat-syarat partisipasi yang sangat merendahkan yang ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru. Dalam Pemilu 1977 dan 1982, partai non-pemerintah yang lain, PPP (Partai Persatuan Pembangunan), suatu gabungan karena paksaan dari 4 partai Islam pra-Orde Baru, dilihat sebagai ancaman terbesar terhadap dominasi Golkar. Namun pada 1984, PPP tiba-tiba menjadi macan kertas ketika konstituen terbesarnya, NU (Nahdlatul Ulama), tidak lagi terlibat dalam politik partisan demi untuk menjalankan strategi politik yang lebih fleksibel di belakang layar. Antara 1982 dan 1987, suara PPP merosot dari 28% menjadi 16%.

Dipimpin oleh elemen PNI, PDI pada 1987 dan terutama pada 1992 muncul sebagai oposisi utama terhadap Golkar dan pemerintah. Di bawah kepemimpinan Soerjadi, yang ironisnya dipilih sebagai pemimpin partai oleh pemerintah, PDI mulai menampilkan dirinya sebagai partai populis yang mengecam otoritarianisme, peran politik tentara, kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin, dan bahkan pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden. Pada 1987 PDI memperoleh 11% suara, dan pada 1992 meningkat menjadi 15%, hampir melebihi PPP sebagai partai kedua terbesar. Pada 1993, Megawati Soekarnoputri, anak perempuan Presiden Soekarno dan anggota Parlemen, terpilih menjadi ketua PDI yang baru—bertentangan dengan kemauan Presiden Soeharto, yang mengerahkan kekuatan politik dan bersenjatanya untuk menggagalkan pemi-

lihan tersebut. Pada awal 1996, menjadi jelas bahwa suatu (gerakan) oposisi anti-Soeharto mulai terbentuk, dengan PDI Megawati sebagai unsur utamanya. Tokoh-tokoh oposisi utama antara lain Abdurrahman Wahid, ketua organisasi Islam tradisional (NU) yang memiliki anggota 30 juta; Mughtar Pakpahan, ketua SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia); dan Goenawan Mohamad, ketua KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu), sebuah organisasi yang dibentuk pada 1995 berdasarkan NAMFREL dari Filipina, yang memainkan suatu peran yang sangat penting dalam menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos pada 1986.

Strategi (tidak ada bukti tentang koordinasi yang ketat) para pemimpin oposisi tersebut adalah mengambil keuntungan dari potensi suara yang didapatkan Megawati sebagai anak perempuan bapaknya. Meskipun Soekarno yang kharismatik wafat lebih dari seperempat abad yang lalu, kenangan akan dirinya masih umum didengarkan. Para pemuda Indonesia, yang tidak memiliki kenangan nyata tentang tahun-tahun Soekarno dan kini merupakan mayoritas pemilih, membayangkan dirinya sebagai sosok yang lebih berprinsip dan lebih berkomitmen terhadap kepentingan rakyat dan nasional ketimbang Soeharto dan para pemimpin Orde Baru lainnya. Bahkan orang-orang yang lebih tua cenderung mengagung-agungkan kontribusi positif Soekarno bagi bangsa Indonesia dan melupakan kemerosotan ekonomi, kekacauan politik, dan kegagalan-kegagalan kebijakan luar negeri di awal 1960-an.

Para pemimpin oposisi tersebut berharap bahwa kenangan-kenangan positif tersebut akan berubah menjadi jumlah suara yang substansial bagi PDI Megawati. Partai ini telah meneguhkan dirinya dalam dua pemilu sebelumnya sebagai partai protes, dan partai ini kini untuk pertama kali dalam sejarah Orde Baru memiliki seorang pemimpin yang sangat mungkin menarik suara para pemilih awam, terutama di Jawa Timur

dan Tengah yang berpenduduk padat. Dukungan Abdurrahman Wahid, pemimpin NU—sebagai partai politik yang independen, NU memenangkan 18% suara pada 1955 (satu-satunya masa di mana ada pemilu yang bebas di Indonesia) dan 1971—mungkin akan menghisap jutaan pemilih dari PPP dan Golkar. Muchtar Pakpahan yang dekat dengan PDI, yang memakai peci seperti Soekarno, dan para aktivis buruh yang lain bisa memobilisasi puluhan ribu buruh yang kecewa, khususnya di wilayah-wilayah industri baru di Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Medan. Terakhir, KIPP Goenawan Mohamad secara independen akan memantau—dengan publisitas internasional seluas mungkin—kampanye-kampanye dan penghitungan suara partai itu, dan dengan demikian mengurangi kemungkinan pemerintah menggunakan trik-trik kotor.

Presiden Soeharto tampak sangat sadar akan strategi itu. Selama 1995 dan 1996, ia menolak untuk bertemu dengan Abdurrahman Wahid dan secara diam-diam menyokong oposisi terhadap kepemimpinan Abdurrahman dalam NU. SBSI Muchtar Pakpahan tidak pernah diberi status legal oleh pemerintah, dan Muchtar sendiri dipenjara pada 1994 karena diduga menggerakkan kerusuhan buruh di Medan, meskipun ia pada 1995 kemudian dibebaskan oleh seorang hakim Mahkamah Agung yang bersimpati padanya. Sebaliknya, para pemimpin KIPP diabaikan sebagai para pemain yang tidak penting dan diancam akan ditangkap jika mereka mencampuri proses pemilu. Namun Megawati, karena peran pentingnya dalam strategi oposisi tersebut, menjadi sasaran utama kebencian pemerintah. Pada Juni 1996, faksi Soerjadi, yang sebelumnya diremehkan oleh Soeharto, kembali berkuasa di PDI. Sebuah kongres luarbiasa PDI digelar di Medan, kali ini di bawah kontrol ketat para perwira tentara, dan Megawati disingkirkan, diganti oleh Soerjadi. Megawati dan para pendukungnya menolak menerima keputusan ini, dan mempertahankan kendali mereka atas kantor

pusat partai di Jakarta serta mengajukan sebuah gugatan terhadap pemerintah karena melakukan campur-tangan ilegal dalam persoalan-persoalan internal partai.

Selama berminggu-minggu para pengikut Megawati di PDI dan tokoh-tokoh oposisi yang lain mengancam pemerintah melalui berbagai mimbar bebas yang digelar di halaman kantor pusat partai itu. Pada 27 Juli, pemerintah sudah tidak dapat menahan diri lagi.³² Di saat fajar, sebuah pasukan yang mungkin terdiri atas para tentara berpakaian preman, para anggota sebuah organisasi kepemudaan kuasi-kriminal, dan para anggota faksi Soerjadi dengan paksa mengambil-alih kantor pusat partai itu. Hal ini memunculkan reaksi dari para pengikut Megawati, para aktivis oposisi yang berkumpul untuk melakukan mimbar bebas, dan warga miskin serta kelas buruh Jakarta yang berada di sekitar tempat itu yang mendapatkan kesempatan untuk mengungkapkan kemarahan mereka terhadap pemerintah. Banyak mobil dan bangunan di sekitar tempat itu yang dijajah dan dibakar dalam suatu kerusuhan besar yang belum pernah terjadi di Jakarta sejak kerusuhan Malari pada Januari 1974. Selama beberapa jam keadaan kacau-balau, dan menurut angka-angka yang dikeluarkan pada Agustus 1996 oleh Komnas HAM, ada 5 orang yang tewas, 74 hilang, dan 149 terluka.³³

Tanggung-jawab utama atas penjarahan dan pembakaran pada 27 Juli tersebut, yang kemudian disebut sebagai Sabtu Kelabu, mungkin ada pada para penduduk anonim yang tinggal di perkampungan-perkampungan kumuh di sekitar kantor PDI. Namun, para pejabat pemerintah dengan segera menuduh sebuah kelompok oposisi kecil berhaluan kiri, PRD (Partai Rakyat Demokratik), sebagai pihak yang melakukan kerusuhan dan

32 Ringkasan yang akurat tentang peristiwa 27 Juli diberikan oleh Sidney Jones, "Human Rights in Indonesia," kesaksian di depan Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on East Asia and Pacific Affairs, September 18, 1996.

33 Jumlah orang yang hilang kemudian berkurang menjadi 30, setelah adanya tekanan dari Sekretariat Negara. *Gatra* 2: 48 (12 Oktober 1996), hlm. 38.

para perancang kerusuhan itu. Gaya dan retorika organisasi para pemimpin PRD selama minggu-minggu mimbar bebas dianggap sangat mirip dengan gaya dan retorika Partai Komunis yang lama dilarang, sehingga menjadikan mereka kambing hitam dan sasaran represi. Beberapa pemimpin PRD ditangkap dan dituduh melakukan subversi, sebagaimana Muchtar Pakpahan. Dalam pemeriksaan para pemimpin PRD tersebut, menjadi jelas bahwa perhatian utama pemerintah bukan pada apa yang terjadi pada 27 Juli, melainkan pada berbagai keberhasilan yang dicapai oleh afiliasi-afiliasi kecil organisasi buruh dan pemuda tersebut dalam memobilisasi para buruh untuk melakukan pemogokan dan demonstrasi di beberapa kota.³⁴ Kerusuhan buruh kini dilihat—dan mungkin benar—sebagai suatu titik yang secara politik sangat rawan, baik di dalam negeri karena semakin banyaknya jumlah buruh yang marah dan secara politik bisa dimobilisasi, maupun di kancah internasional karena perhatian yang semakin besar yang kini dicurahkan di Amerika Serikat dan di negara-negara lain terhadap upah yang rendah dan kondisi kerja yang memprihatinkan, terutama di pabrik-pabrik yang berorientasi ekspor.

Penyingkiran Megawati tersebut, dilihat dalam konteks pemilu parlemen 1997 dan sidang MPR 1998, jelas merupakan suatu kemenangan bagi Soeharto. Abdurrahman Wahid secara implisit juga mengakui hal itu ketika ia mendesak Megawati beberapa hari setelah Sabtu Kelabu itu untuk menghentikan gugatan hukumnya terhadap pemerintah. Abdurrahman juga melakukan perdamaian pribadi dengan bertemu dengan Soeharto pada November di sebuah pesantren di Jawa Timur, yang hampir pasti berarti bahwa dia sekarang tidak akan menghalangi para anggota NU untuk memilih Golkar tahun depan.

34 *Forum Keadilan* 5:9 (12 Agustus 1996), hlm. 12-20, untuk mobilisasi para buruh yang dilakukan PRD; *Forum Keadilan* 5:19 (30 Desember 1996), untuk pengadilan tersebut.

Namun meskipun Soeharto jelas masih tetap merupakan penguasa politik Indonesia, cengkeraman kekuasaannya semakin lemah karena usianya. Dan selama tahun itu muncul banyak tanda bahwa perlawanan dan tuntutan yang sangat kuat semakin mengakar dalam masyarakat, dan hanya menunggu kesempatan longgarnya represi otoriter untuk meledak ke permukaan. Tanda-tanda ini antara lain berbagai demonstrasi, kerusuhan, dan penculikan di Ujung Pandang, Irian Jaya, Timor Timor, dan di tempat lain, dan tentu saja kekerasan massa setelah pengambilalihan kantor pusat PDI di Jakarta.

Mungkin kerusuhan yang paling banyak menimbulkan masalah terjadi di Situbondo, Jawa Timur, pada Oktober, dan di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Desember. Dalam kedua kasus tersebut, orang-orang Islam yang marah karena perilaku otoritas—keputusan pengadilan di Situbondo, kekejaman polisi di Tasikmalaya—mengamuk dengan melakukan penjarahan dan pembakaran. Lima orang tewas di Situbondo dan empat orang di Tasikmalaya. Dalam kedua kasus tersebut, target-target utama kemarahan itu—gereja-gereja Kristen di Situbondo, dan gereja-gereja serta bangunan-bangunan orang-orang Cina di Tasikmalaya—tidak ada hubungannya dengan berbagai insiden yang awalnya memicu protes massa itu, yakni perselisihan-perselisihan yang hanya melibatkan orang-orang Islam di kedua belah pihak. Para pengamat Indonesia dan asing memberikan banyak penjelasan terhadap peristiwa ini, termasuk rangkaian teori konspirasi yang lazim yang terkait dengan para pejabat tinggi pemerintah. Orang-orang Kristen melihat hubungan peristiwa itu dengan semakin besarnya kesalehan dan militansi Islam selama dekade terakhir. Namun, sebagian besar pemimpin dan intelektual Islam, dan juga banyak pengamat lain, mengklaim bahwa persoalan utama atau yang mendasari peristiwa-peristiwa itu bukanlah kebencian keagamaan melainkan kesenjangan ekonomi yang semakin besar. Kaum kaya sebagian besar

adalah warga Cina-Indonesia dan Kristen, dan dengan demikian menjadi sasaran kebencian kaum miskin, yang sebagian besar orang Islam. Meskipun populer, penjelasan ini kurang meyakinkan. Sebagaimana yang ditulis orang seorang pemikir skeptis: “Kesenjangan terbesar ada di Jakarta dan Surabaya, bukan Tasikmalaya dan Situbondo.... Selain itu, dalam kenyataan tidak ada peningkatan kesenjangan, paling tidak sebagaimana diukur melalui Indeks Gini, dalam 20 tahun terakhir.”³⁵

Ekonomi

Pada 1996, perekonomian tumbuh kira-kira sekitar 7,5%, lebih rendah dibanding angka pertumbuhan pada 1995, yakni 8,07%, namun masih sangat bagus, bahkan jika dilihat dari standar Asia Timur. Pertumbuhan tersebut didorong oleh investasi dalam negeri dan asing yang tinggi, dan hal ini adalah hasil dari serangkaian kebijakan liberalisasi perbankan dan perdagangan yang dijalankan oleh pemerintah sejak akhir 1980-an. Inflasi menurun dari 7,9% menjadi sekitar 7,4%.³⁶

Kebijakan ekonomi pemerintah yang paling penting adalah mendukung pembuatan “mobil nasional”. Sebuah keputusan presiden yang dikeluarkan pada Maret menjadikan Kia-Timor Motors—yang dimiliki bersama oleh anak Soeharto, Hutomo Mandala Putera (Tommy), dan Kia Motors Korea Selatan—bebas bea impor dan pajak selama tiga tahun, asalkan perusahaan tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan muatan lokal. Tujuan pembebasan tersebut adalah untuk memungkinkan perusahaan tersebut memproduksi mobil sedan berkualitas tinggi dengan harga yang relatif rendah. Namun, segera menjadi jelas bahwa Kia-Timor Motors tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan muatan lokal tersebut, dan pada bulan Juni keluar

35 Rizal Mallarangeng, "Teori dan Kerusuhan di Dua Kota," *Gatra* 3:8 (11 Januari 1997), hlm. 29.

36 Semua angka berasal dari *Kompas*, 30 Desember 1996, hlm. 17.

keputusan presiden yang memberi keleluasaan bagi perusahaan tersebut untuk mengimpor 45.000 mobil bebas pajak. Hal ini menunjukkan dominasi keluarga Soeharto yang semakin besar, bukan saja dalam memenangkan kontrak-kontrak besar, melainkan juga dalam memengaruhi proses pembuatan kebijakan, yang seringkali dengan akibat memperlemah peran menteri-menteri Soeharto sendiri. Tommy hanya salah satu dari 6 anak Soeharto, yang semuanya sangat sibuk membangun berbagai kerajaan bisnis. Beberapa menteri dikenal sangat kritis terhadap penetrasi bisnis yang semakin besar dari keluarga tersebut, namun tampak tidak banyak memiliki kekuasaan untuk menentukan proses kebijakan. Sebagai contoh, Menteri Perdagangan dan Industri Tungki Ariwibowo selama bertahun-tahun disanjung sebagai pendukung kebijakan-kebijakan pro-pasar, namun karena pembelaan publiknya terhadap proyek mobil tersebut, ia kini umum dikenal sebagai boneka Tommy.

Proyek mobil nasional tersebut juga mengikis harapan bahwa Soeharto akan menjadi pelopor utama perdagangan bebas Asia, sebagaimana yang ia janjikan sendiri dalam konferensi APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) di Bogor dua tahun lalu. Selain itu, kebijakan tersebut secara langsung bertentangan dengan aturan *the most-favored-nation* dari WTO (*World Trade Organization*) di mana Indonesia menjadi anggotanya. Lebih jauh, proyek tersebut merupakan contoh dari terus berlanjutnya kekuasaan pemikiran ekonomi nasionalis dan dirigis di puncak pemerintahan Indonesia, terlepas dari hampir satu dekade pengalaman positif dengan liberalisasi. Contoh penting yang lain adalah pembalikan keputusan pada 1995 untuk tidak melindungi Chandra Asri, sebuah perusahaan yang sebagian dimiliki oleh kroni Soeharto. Pada pertengahan 1995, pemerintah menolak permintaan Chandra Asri akan perlindungan bea 40% untuk impor barang-barang modal bagi sebuah mega proyek yang bernilai \$1,3 miliar. Namun, pada Januari tahun

ini perusahaan tersebut secara diam-diam diberi perlindungan bea 25% hingga 2003.

Pemerintah juga berusaha untuk memainkan peran sesosok Santa Claus populis pada 1996, dengan memilin tangan kaum kaya dan menyalurkan sumberdaya-sumberdaya negara ke dalam berbagai proyek untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Program Kemitraan, yang dicanangkan pada Desember, membebaskan pajak 2% pada individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang memiliki pendapatan lebih dari \$45.000 setahun. Uang tersebut akan dikumpulkan oleh sebuah yayasan pribadi yang diketuai oleh Soeharto sendiri, dan disebarluaskan kepada hampir 12 juta keluarga yang kurang mampu, yang masing-masing akan menerima sekitar \$8. Banyak pengamat berkomentar bahwa program baru tersebut akan tidak efektif sebagai langkah untuk memerangi kemiskinan, dan secara substansial akan menambah jumlah pengeluaran *off-budget* yang telah sangat besar, tanpa ada pertanggungjawaban politik.

Dari berbagai peristiwa ini, kami menyimpulkan bahwa 1996 adalah tahun di mana pergeseran dari liberalisasi ekonomi ke intervensi negara menjadi semakin jelas. Tentu saja ini tidak berarti bahwa prinsip-prinsip dasar manajemen makro-ekonomi yang bijaksana telah ditinggalkan atau bahwa pemerintah tidak lagi ingin mengadopsi kebijakan-kebijakan yang menjadikan perekonomian lebih efisien. Namun, dilihat baik dari jumlah maupun dari besarnya, sejak 1983 tidak pernah ada suatu masa di mana begitu banyak kebijakan nasionalis dan dirigis penting diadopsi hampir secara bersamaan. Apa yang menjelaskan pergeseran ini, dan mengapa hal ini menjadi semakin kuat tahun ini? Kekuatan dasar perekonomian Indonesia dan kekuatan eksponnya yang terus bertahan jelas merupakan sebab-sebab penting. Masa yang baik memunculkan kebijakan yang buruk—sebagaimana yang umum dikatakan para teknokrat—berarti bahwa

hanya keadaan ekonomi yang sulit yang memaksa pemerintah mengencangkan sabuknya. Faktor lain yang penting adalah kampanye pemilu yang akan datang, ketika Soeharto tampak ingin memiliki daya tarik populis bagi banyak pemilih.

Mungkin juga ada sebab politik yang lebih luas bagi percepatan kebijakan ini. Di puncak liberalisasi (sekitar 1986-88), orang-orang yang paling dipercaya Soeharto untuk menjalankan negeri ini adalah Jenderal L. B. Moerdani di bidang militer dan masalah-masalah politik, dan tim teknokrat yang dipimpin oleh Profesor Widjojo Nitisastro untuk masalah-masalah ekonomi. Moerdani memberikan semacam payung keamanan bagi para teknokrat ini. Dia sendiri memiliki kedekatan pribadi dengan para teknokrat ini, dan memiliki ide-ide yang sama dengan mereka dalam hal pembangunan. Namun, pada awal 1990-an, Soeharto menghancurkan aliansi ini. Moerdani disingkirkan dan digantikan oleh pejabat yang kurang asertif dan tidak banyak memiliki pendapat-pendapat yang kuat tentang masalah-masalah non-militer. Pada saat yang sama, presiden semakin sering mendengarkan gagasan-gagasan ekonomi nasionalis dan proteksionis Ginandjar Kartasasmita, kini kepala Bappenas, dan Menteri Riset dan Teknologi B. J. Habibie, yang mengepalari industri pesawat terbang dan industri-industri lain yang strategis milik negara. Ginandjar dan Habibie sekarang ini tampak sangat kuat dan mungkin tetap berpengaruh selama beberapa tahun ke depan, selama Soeharto masih berkuasa.

Hubungan Internasional

Posisi internasional Indonesia mengalami pukulan di tiga wilayah pada 1996. Pertama, baik Amerika Serikat dan Jepang mempersoalkan Indonesia di WTO dalam hal mobil nasional tersebut. Kedua negara tersebut telah menunggu beberapa bulan sebelum mempersoalkan Indonesia di WTO, dan tindakan tersebut diharapkan tidak memengaruhi hubungan mereka de-

ngan Indonesia. Meskipun demikian, reputasi pemerintahan Soeharto dalam hal komitmen yang kuat terhadap perdagangan bebas rusak. Apa yang lebih penting, paling tidak dalam kaitannya dengan pandangan tentang Indonesia yang dimiliki orang Amerika, adalah “*Indo-gate*”: skandal uang ratusan ribu dollar yang bermasalah, jika bukan ilegal, untuk membantu kampanye presiden Clinton oleh individu-individu yang memiliki hubungan dengan perusahaan-perusahaan Lippo Group yang berbasis di Indonesia. John Huang, mantan pejabat Lippo, dianggap terlibat dalam pengumpulan dana ilegal bagi Komite Nasional Demokratik pada saat bekerja di Departemen Perdagangan AS. Bos Lippo, Mochtar Riady, dituduh secara kotor berusaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah AS terhadap Cina, Vietnam, dan Indonesia. Persoalan ini mendapat lebih banyak publikasi di media AS ketimbang di Indonesia, di mana hubungan dekat antara para pengusaha dan pejabat pemerintah adalah sesuatu yang jamak, dan di mana Riady hanya merupakan salah satu dari banyak pengusaha Cina-Indonesia yang berhasil dan memiliki koneksi yang kuat.

Terakhir, Komite Hadiah Nobel mengejutkan dunia dengan menganugerahkan Hadiah Perdamaianya kepada Uskup Katolik Timor Timur, Carlos Filipe Ximenes Belo, dan pejuang kebebasan Timor Timur yang diasingkan, Jose Ramos Horta. Para pejabat pemerintah Indonesia terkejut dan marah, terutama pada pilihan atas Horta, yang mereka cap sebagai seorang oportunistis dan petualang politik. Belo, yang dielu-elukan di Timor Timur, diperlakukan secara lebih hormat baik oleh pemerintah maupun oleh media, yang umumnya bersikap bingung dan gamang terhadap hadiah tersebut. Y. B. Mangunwijaya, yang dikenal sebagai Romo Mangun, adalah seorang aktivis sosial terkemuka Indonesia dan sekaligus pendeta Katolik. Seperti Presiden Soeharto, dia juga seorang nasionalis Indonesia yang kuat dan mantan pejuang kemerdekaan anti-Belanda. Namun

reaksinya terhadap hadiah Komite Nobel tersebut sangat berbeda dari sang presiden dan sebagian besar orang Indonesia yang berbicara di depan publik. “Semua ini merupakan hasil akhir dari sebuah strategi tragis yang dijalankan selama 21 tahun,” tulis Romo Mangun. “Pembukaan UUD 1945 mengatakan bahwa ‘kemerdekaan adalah hak semua bangsa’... Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. Ia juga harus memiliki jiwa yang besar.”³⁷

Februari 1997

37 Y. B. Mangunwijaya, “Relung-Relung Renurig Oslo”, tidak diterbitkan, 15 Januari 1997 (tersedia di Internet di: apakabar.clark.net).

Demokrasi dan Kapitalisme: Kasus Asia Timur dan Asia Tenggara

MENGAPA DEMOKRATISASI TERJADI? Negara-negara Asia Timur dan Tenggara mungkin memberi kita beberapa pelajaran untuk menjawab pertanyaan ini.

Untuk tujuan saya di sini, tiga negara bisa dianggap penting: Korea Selatan, Indonesia, dan Thailand. Pembangunan kapitalis³⁸ sangat berhasil selama sekitar dua dekade di ketiga negara ini. Rezim-rezim militer memainkan peran yang penting dalam sebagian besar sejarah modern mereka.

Korea Selatan dan Thailand sekarang ini demokratis. Indonesia, meskipun keterbukaan politik telah sering disuarakan selama hampir satu dekade, tidak mengalami gerakan politik yang riil ke arah demokrasi. Indonesia, dalam perbandingan ini, dengan demikian bisa dianggap sebagai kasus kontrol, yang sangat berguna bagi kita untuk memahami mengapa sebuah perekonomian kapitalis yang berhasil gagal melakukan demokratisasi.

³⁸ Di sini 'pembangunan kapitalis' tidak berarti bahwa pemerintah tidak memainkan peran dalam perkembangan ekonomi. Hal ini berarti bahwa mekanisme pertukaran dasar dalam ekonomi diorganisasi terutama berdasarkan hukum permintaan dan penawaran, dan pada saat yang sama hak milik pribadi diakui. Kecuali Hong Kong, semua perekonomian yang berhasil di Asia memperlihatkan bahwa pembangunan kapitalis yang cepat terjadi meskipun pemerintah tetap memegang peran yang signifikan. Dari tiga negara yang dibahas di sini, pemerintah Thailand merupakan pemerintah yang paling kurang intervensionis.

Argumen saya di sini adalah bahwa kapitalisme merupakan syarat yang diperlukan bagi demokrasi. Namun, ia bukan syarat yang memadai, karena demokratisasi memerlukan lebih dari sekadar infrastruktur sosio-ekonomi.

Ulasan Teoretis: Kapitalisme dan Demokrasi

Banyak masyarakat kapitalis yang bukan merupakan demokrasi. Semua demokrasi adalah kapitalis. Tidak satu pun masyarakat sosialis yang pernah memiliki demokrasi.³⁹

Fakta-fakta sederhana ini mungkin merupakan pernyataan empiris terkuat yang bisa diberikan seseorang untuk memperlihatkan bagaimana kapitalisme dan demokrasi berhubungan secara positif. Namun, untuk yakin, diperlukan lebih dari sekadar eksposisi faktual: hubungan antara kapitalisme dan demokrasi perlu diteguhkan dalam teori.⁴⁰

Dalam hal ini, tiga kelompok argumen dari para teoretisi kapitalisme, seperti F. A. Hayek, Milton Friedman, Joseph Schumpeter, Peter Berger, dan Max Weber, merupakan argumen-argumen yang paling menarik. Kelompok-kelompok argumen ini tentu saja saling terkait, namun perbedaan konseptual diperlukan untuk memperlihatkan kekuatan masing-masing.

Argumen pertama bertolak dari premis bahwa negara modern (otoriter atau tidak) merupakan “pengumpulan kekuasaan terbesar dalam sejarah manusia”.⁴¹ Argumen ini menyatakan

39 Negara-negara Skandinavia yang demokratis tidak dianggap sosialis, dalam pengertian bahwa meskipun pemerintahan mereka memainkan suatu peran yang jauh lebih besar di bidang ekonomi dibanding pemerintahan AS, hubungan-hubungan ekonomi dasar mereka pada umumnya tetap kapitalis. Volvo, misalnya, adalah perusahaan swasta terbesar di Swedia; ia menerima peraturan-peraturan tentang buruh yang ditetapkan oleh partai sosialis yang berkuasa, namun ini tidak berarti bahwa Volvo dengan demikian menjadi sebuah perusahaan sosialis, tanpa motif keuntungan.

40 Di sini, pertanyaan yang harus dijawab adalah: Mengapa sebuah perekonomian pasar bebas mendorong kebebasan berbicara? Mengapa lembaga hak milik pribadi menyediakan “ruang” bagi masyarakat untuk melawan sentralisasi kekuasaan dalam satu badan?

41 Peter Berger, *The Capitalist Revolution*, Basic Book, 1986, hlm. 79.

bahwa karena kekuasaannya yang begitu besar, negara modern cenderung semakin memperluas dirinya ke dalam masyarakat, kecuali jika ia dibatasi oleh pembatasan-pembatasan institusional.

Sebuah perekonomian kapitalis, pun yang tunduk pada beragam regulasi, menciptakan zona sosialnya sendiri yang menghadapi negara sebagai suatu realitas yang relatif independen.⁴² Apapun kontrol negara yang lain, hal itu tidak sepenuhnya mengontrol zona ini, yang “*ipso facto* membatasi kekuasaan negara”.⁴³ Dengan kata lain, zona ini mempermudah pemberian batas-batas terhadap kecenderungan inheren negara modern untuk semakin memperluas kekuasaannya ke dalam masyarakat. Karena itu—karena demokrasi pada dasarnya merupakan sebuah sistem yang membatasi kekuasaan negara—kapitalisme mendorong perkembangan demokrasi.

Sosialisme, sebaliknya, sangat memperkuat kekuasaan negara modern yang sudah kuat dengan membiarkannya menjadi pengontrol sebagian besar perekonomian. Ia tidak mendedahkan pemisahan (ekonomi) dasar antara negara dan masyarakat, yang tanpanya tindakan politik yang independen dari yang terakhir ini menjadi mustahil. Semakin besar negara diberi kontrol terhadap perekonomian, semakin kecil kemungkinan demokrasi untuk berjalan, hingga hal ini mencapai titik tertentu di mana demokrasi akan menjadi samasekali mustahil. Jadi, sebagaimana yang dengan tepat dikemukakan Hayek, semakin Anda mensosialiskan keseluruhan perekonomian, maka Anda akan semakin dekat pada “jalan perbudakan”.⁴⁴

42 Dalam zona ini, seseorang memberikan dan mendapatkan nilai-nilai (barang dan jasa) yang ia anggap penting di luar kontrol negara. Perlu kita ingat, aktivitas pertukaran bebas ini merupakan salah satu dasar paling penting dari masyarakat sipil. Tidak ada masyarakat sipil yang bisa berjalan jika para anggotanya bergantung pada pemberian dan keputusan negara, atau harus bekerja untuk negara, mengejar kariernya untuk negara, dst.

43 Peter Berger, *ibid.*

44 Friedrich A. Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago, 1944.

Argumen kedua menjelaskan bahwa dari rahim kapitalisme kaum borjuis terlahir, dan menuntut hal-hal tertentu untuk berkembang, seperti legalitas dan usaha individu otonom. Tuntutan-tuntutan ini (dalam kata-kata Schumpeter, “skema hal-ihwal [kaum] borjuis”), jika kaum borjuis tersebut menjadi lebih besar dan lebih kuat sebagai sebuah kelompok, akan menghamparkan batas-batas pada negara menyangkut apa yang bisa dan tidak bisa ia lakukan. Schumpeter mengemukakannya sebagai berikut:

Skema hal-ihwal [kaum] borjuis membatasi wilayah politik dengan membatasi wilayah otoritas publik; pemecahannya ada dalam ideal negara yang ramping yang hadir terutama untuk menjamin legalitas borjuis dan memberikan kerangka yang kuat bagi usaha individu yang otonom di semua bidang.⁴⁵

Kapitalisme dengan demikian mendorong demokrasi dengan melahirkan kaum borjuis. Marx, dalam *18th Brumaire*, menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu (yakni krisis), kaum borjuis akan menyerahkan dirinya kepada Leviathan, sebuah negara Bonapartis, untuk bertahan hidup. “Untuk menyelamatkan hartanya, ia harus mengorbankan mahkotanya.”⁴⁶ Schumpeter, tentu saja, tidak menyangkal hal ini. Namun, baginya, di masa “normal”, skema hal-ihwal borjuis tersebut akan memunculkan dorongan ke arah demokratisasi.

45 Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Harper & Row, 1962, hlm. 297.

46 Karl Marx, “The 18th Brumaire of Louis Bonaparte”, dalam *Marx and Engels: Basic Writing on Politics and Philosophy*, ed. Lewis S. Feuer, Fontana, 1969, hlm. 373. Kutipan ini merupakan salah satu sumber intelektual paling penting bagi para pemikir kiri baru yang menulis tentang kapitalisme dan dunia berkembang dari 1960-an hingga awal 1980-an. O’Donnel, misalnya, menjelaskan bahwa karena tekanan-tekanan populis yang dihamparkan dalam proses penguatan industri, kaum borjuis menyerahkan dirinya ke dalam kerangka otoritarianisme birokratis. Ia melakukan hal tersebut untuk menjamin bahwa stabilitas akumulasi modal tidak terancam. Di sini apa yang dilakukan O’Donnel hanyalah menyesuaikan Marxisme lama agar cocok dengan konteks dunia berkembang abad ke-20.

Penting untuk dicatat bahwa para teoretisi demokratisasi belakangan ini tidak banyak bicara tentang kaum borjuis lagi. Sebaliknya, mereka menggantinya dengan jenis orang-orang baru dengan istilah baru: kelas menengah, masyarakat sipil. Bagaimanapun, ini bukan suatu penyimpangan konseptual yang substansial dari Schumpeter. Hal itu hanya merupakan suatu perluasan konsep kaum borjuis, dari penekanan semata-mata pada kepemilikan sarana produksi ke sesuatu yang lain (misalnya, jumlah penghasilan, tingkat pendidikan, kepemilikan barang-barang tertentu, dll.). Hal-hal yang lain sama: kelas menengah tersebut menuntut hal-hal yang sama sebagaimana yang diinginkan oleh kaum borjuis Schumpeter.

Argumen ketiga menyatakan bahwa kapitalisme bekerja secara lebih baik dalam sebuah lingkungan politik yang rasional dan dapat diprediksikan. Ia menghendaki administrasi rasional-legal. Pemerintahan non-demokratis, dalam jangka panjang, dalam istilah Weber, akan merusak “dasar kalkulabilitas” yang sangat penting bagi kapitalisme.⁴⁷

Pemerintahan otoriter mungkin memberikan rasionalitas dan kepastian (kadang lebih baik ketimbang yang diberikan sebuah pemerintahan demokratis), yang membantu mengembangkan kapitalisme. Namun, sampai titik ketika kapitalisme menjadi semakin kuat, logika rasionalitas, kepastian, legalitas tersebut akan menciptakan dinamikanya sendiri yang akan meruntuhkan cengkeraman otoritarianisme. Sebuah rezim otoriter yang mengakui supremasi hukum,⁴⁸ yang tidak mengubah

47 Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, The Free Press, 1964, hlm. 357.

48 “Rezim otoriter yang mengakui supremasi hukum bukan merupakan suatu oksimoron”. Singapura adalah contoh yang baik. Jika ia melarang sebuah surat kabar, misalnya, ia melakukannya melalui proses hukum. Hukum tersebut (yang menempatkan keamanan nasional di atas kebebasan individu) mungkin tidak demokratis, namun itu di luar persoalan. Bandingkan ini dengan Soeharto dari Indonesia, yang memiliki kebiasaan melarang pers *tanpa pengadilan*. Keduanya otoriter. Namun kita tidak memahami persoalan jika kita menyamakan begitu saja Lee dari Singapura dengan Soeharto dari Indonesia.

aturan-aturan dasarnya setiap hari, yang mengizinkan diskusi-diskusi rasional tentang isu-isu ekonomi penting, hanya perlu satu langkah kecil menuju demokratisasi.

Diperlukan Lebih dari Sekadar Kapitalisme

Argumen-argumen di atas bersifat struktural (secara ekonomi deterministik). Gagasan dasar mereka adalah bahwa kapitalisme perlu bagi demokrasi; kapitalisme memberikan prasyarat-prasyarat sosio-ekonomi bagi kebebasan politik untuk berkembang.

Demokratisasi, sebagai sebuah hasil politik, terjadi di tempat, waktu, dan situasi tertentu. Ia merupakan suatu proses (seringkali panjang dan menyakitkan) yang dengannya prasyarat-prasyarat struktural diaktualisasikan menjadi realitas politik. Dengan demikian, diperlukan lebih dari sekadar faktor-faktor struktural bagi berkembangnya demokratisasi.⁴⁹ Hayek, Weber, Schumpeter: Argumen-argumen mereka dengan demikian harus disertai oleh argumen-argumen yang lebih menjelaskan tentang proses-proses demokratisasi tertentu di tempat, waktu, dan situasi tertentu.

Dalam hal ini, argumen-argumen kaum “transisionis” (misalnya, Juan Linz, Huntington) mengisi gap tersebut. Bagi mereka, demokratisasi, sebagai sebuah proses, melibatkan lebih banyak faktor seperti strategi, tindakan, para pemimpin, pilihan, keberuntungan.

Kelemahan utama kaum transisionis telah umum dikenal: mereka cenderung berbicara tentang terlalu banyak faktor. Ketika kita membaca karya-karya beberapa transisionis, akan sangat beruntung jika kita tidak tersesat dalam “belantara faktor”. Untuk menghindari hal ini, secara konseptual kita perlu memilih hanya dua atau tiga faktor dalam penjelasan kita.

⁴⁹ Ini menjelaskan mengapa terdapat masyarakat-masyarakat kapitalis maju yang non-demokratis.

Di sini faktor-faktor yang saya yakin merupakan faktor-faktor yang paling penting dalam menjelaskan demokratisasi adalah kepemimpinan, lembaga politik (sistem kepartaian, parlemen), dan persoalan-persoalan sosial (termasuk perang dan perpecahan sosial).

Kepemimpinan karena proses mengubah sistem politik, pada puncaknya, selalu diikuti oleh berbagai jenis krisis—dan periode krisis, sebagaimana ditegaskan Ralf Dahrendorf, adalah periode di mana para pemimpin lebih penting ketimbang ketika berada dalam masa normal.

Lembaga-lembaga politik karena realitas kekuasaan terejawantah dalam (atau tersalurkan melalui) jabatan eksekutif, militer, dan partai-partai.⁵⁰

Persoalan-persoalan sosial karena sebuah bangsa yang begitu terpecah-belah dalam hal-hal yang fundamental memberi kesempatan bagi para demagog dan elite-elite politik konservatif untuk mengarahkan kepentingan rakyat ke tujuan-tujuan tertentu yang tidak kondusif bagi demokrasi.

Bersama kapitalisme, perpaduan ketiga faktor ini sangat mungkin akan menentukan apakah demokrasi akan berkembang atau tidak.

Tingkat Satu: Peran Kapitalisme

Demokratisasi terjadi di Korea Selatan pada akhir 1980-an, di Thailand pada awal 1990-an. Bagaimana kita menghubungkan hal ini dengan kapitalisme dalam suatu cara sebagaimana yang diandaikan oleh teori di atas?

Pertama-tama kita dapat menyatakan bahwa ketika Park Chung-hee dan para pelaku kudeta Thailand merebut kekuasaan, mereka tidak menundukkan semua bagian masyarakat di

50 Ralf Dahrendorf, *Transitions: Politics, Economics, and Liberty*, The Washington Quarterly, Summer 1990, hlm. 140.

bawah kontrol negara, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh kaum revolusioner Marxis. Mereka memperkuat negara melalui sarana-sarana otoriter, namun kontrol mereka samasekali tidak total.

Sistem yang mereka ciptakan, meminjam istilah Robert Scalapino yang menarik, adalah sistem otoritarian pluralis.⁵¹ Mereka menerapkan peraturan-peraturan yang sangat keras untuk menjaga persatuan dan memobilisasi dukungan, namun mereka tidak sepenuhnya membunuh pluralisme sosial. Dan yang paling penting: mereka membiarkan sebagian besar perekonomian kapitalistik.

Fakta-fakta ini penting dalam kaitannya dengan perkembangan demokrasi berikutnya. Di Cina dan Vietnam di bawah kaum sosialis (sebelum reformasi ekonomi), kontrol negara total. Dengan mensosialiskan seluruh perekonomian, mereka menempatkan baik politik maupun ekonomi dalam satu tangan. Karena itu, dalam kata-kata Bergerian, mereka sangat menggelembungkan kekuasaan negara, dan dengan demikian mengikis kemungkinan berkembangnya kekuatan-kekuatan tandingan, yang sangat penting bagi demokratisasi. Apa yang terjadi pada rakyat Cina dan Vietnam di bawah kekuasaan komunis adalah “ketidak-bebasan” sepenuhnya. Di Korea Selatan dan Thailand bukan itu yang terjadi. Kapitalisme, sebagaimana yang diperlihatkan oleh teori kita di atas, memelihara zona-zona sosial yang di dalamnya interaksi-interaksi yang otonom di antara berbagai orang dimungkinkan. Individu-individu membentuk perusahaan-perusahaan bisnis, melakukan perjalanan ke luar negeri, mengembangkan karier, mengundang para ahli asing, bekerja untuk perusahaan-perusahaan internasional: semua ini bisa dilakukan tanpa terlalu banyak campur-tangan negara.

51 Robert Scalapino, *The Politics of Development: Perspectives on Twentieth-Century Asia*, Cambridge, 1989.

Mereka mungkin tidak bisa mengkritik otoritas, namun mereka (atau setidaknya sebagian besar dari mereka) bebas melakukan hal-hal yang lain. Untuk berhasil dalam kehidupan mereka, mereka tidak harus menjadi pelayan negara sebagaimana yang terjadi pada rakyat Cina dan Vietnam.

Dengan kebebasan yang relatif cukup di wilayah ekonomi dan sosial, dapat dikatakan bahwa akan lebih mudah bagi Korea Selatan dan Thailand untuk menjadi demokratis. Kebebasan, sebagaimana yang dikemukakan Milton Friedman, dalam jangka panjang tidak mungkin dipilah-pilah. Begitu kita memiliki kebebasan di wilayah ekonomi, kita cenderung mencari jalan untuk meraih kebebasan di wilayah politik.

Selain fakta tentang sistem otoriter-pluralis ini, kita juga bisa menyatakan bahwa para jenderal di Korea Selatan dan Thailand tidak secara pasif membiarkan kapitalisme berjalan; mereka mendorongnya untuk berkembang sampai tingkat yang tak terbayangkan pada 1960-an dan awal 1970-an. Keberhasilan besar Korea Selatan dan Thailand sekarang ini telah umum dikenal. Dari 1965 hingga 1970, rata-rata pertumbuhan GDP di Korea Selatan adalah 9,5%, Thailand 7,2% (dari 1980 hingga 1987 pertumbuhan tersebut adalah 8,6% dan 5,6%).⁵² Bersama dengan kemajuan ini, struktur dasar perekonomian mereka berubah. Pertanian semakin kurang memiliki andil terhadap total produksi domestik mereka. Industri-industri manufaktur dan sektor jasa tumbuh lebih kuat dan menyerap para pekerja lebih banyak ketimbang yang terjadi dua dekade yang lalu.

Pada akhir 1980-an, GNP per kapita Korea Selatan hampir mencapai \$3.000, dan Thailand sedikit kurang dari \$1.000. Kemajuan pembangunan kapitalis ini dapat dipastikan memperkuat posisi kaum kapitalis. Hal ini sangat jelas di Thailand:

52 World Bank, *World Development Report*, dikutip dalam James W. Morley, ed., *Driven by Growth: Political Change in the Asia-Pacific Region*, East Gate Books, 1993, hlm. 6.

pada 1963 tidak ada satu pun pengusaha di kabinet; namun pada 1969 proporsi para pengusaha di kabinet adalah 4%, pada 1974 9,7%, dan pada 1986 (dalam kabinet kelima Jenderal Prem) 47,7%.⁵³

Selain itu, pembangunan kapitalis ini dengan cepat memperluas kelas menengah (yang, sebagaimana dijelaskan Schumpeter di atas, seringkali membutuhkan suatu “skema hal-ihwal” yang tidak cocok dalam sistem otoriter apapun). Sebuah survei pada 1987 mencatat bahwa sekitar 65% rakyat Korea Selatan menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelas menengah.⁵⁴ Di Bangkok, Thailand, terdapat 1.800.000 orang yang bisa dianggap sebagai kelas menengah (31% dari populasi kota itu, 1986).⁵⁵

Sekali lagi, Thailand merupakan contoh yang paling jelas dari konsekuensi politik perluasan kelas menengah ini. Pada Februari 1991, dipimpin oleh Jenderal Suchinda, militer memaksa Perdana Menteri Chatichai untuk turun, dan sekali lagi memperluas apa yang dalam sejarah negeri itu umum dikenal sebagai lingkaran politik yang keji. Kudeta Suchinda tersebut mengakhiri satu dekade rezim semi-demokratis dan (ketika pada April 1992 ia akhirnya menjadi perdana menteri dan menempatkan iparnya sebagai pemimpin militer) menggantinya dengan sebuah pemerintahan yang lebih otoriter yang dijalankan oleh suatu elite kekuasaan yang lebih seragam.

Pada April-Mei 1992 sesuatu yang baru terjadi dalam politik Thailand: rakyat (yang selama berdekade-dekade dianggap pasif, apolitis) turun ke jalan-jalan Bangkok memprotes Suchinda dan menuntut demokrasi. Militer menghantam, namun akhir-

53 Anek Laothamatas, "Business and Politics in Thailand", *Asian Survey*, April 1988, hlm. 454.

54 Sung-joo Han dan Yung-chul Park, "South Korea: Democratization at last", dalam James W. Morley, *Driven by Growth*, hlm. 185.

55 Sukhumbhan Paribatra, "State and Society in Thailand", *Asian Survey*, September 1993, hlm. 884.

nya, setelah 3 hari terjadi kekerasan, para demonstran tersebut menang dan Suchida turun tahta, yang membuka jalan bagi demokratisasi sebenarnya.

Siapa orang-orang yang melawan para pelaku kudeta militer dari jalan-jalan Bangkok tersebut? Menurut sebuah survei, 60% dari orang-orang itu bergelar sarjana muda, 50% bekerja di perusahaan-perusahaan swasta, 50% berpenghasilan sebulan di atas 10.000 baht.⁵⁶ Pendeknya, mereka adalah para anggota kelas menengah.⁵⁷

Di Korea Selatan, sebagaimana yang dikemukakan Hee-min Kim, kelas menengah merupakan kelompok terakhir yang bergabung dengan koalisi anti-pemerintahan otoriter.⁵⁸ Koalisi tersebut terdiri atas para mahasiswa radikal, para pekerja, dan para politisi (dua Kim) yang memelopori gerakan demokratis. Namun, salah satu alasan penting mengapa Jenderal Chun Doo-hwan tidak sepenuhnya menumpas gerakan ini sejak permulaan, kecuali dalam persoalan Kwanju, adalah kecemasan akan munculnya reaksi luas dari kalangan kelas menengah yang menentang tindakan seperti itu. Dan pada titik kritis transisi demokratis tersebut, kelas menengah-lah yang mendukung koalisi Kim Young-sam dan Roh Tae-woo untuk memenangkan pemilu.

Demikianlah kelas menengah di Thailand dan Korea Selatan membantu mendorong demokrasi berkembang. Karena itu, pada titik ini, kita bisa melihat dalam bentuk yang lebih langsung bahwa kapitalisme (rahimnya sangat subur untuk melahirkan kelas menengah) berhubungan dengan demokrasi.

56 Sukhumbhan Paribatra, "State and Society in Thailand", *ibid.*, hlm. 889. Paribatra melihat bahwa di kalangan para pemimpin gerakan Bangkok, banyak di antaranya adalah para pemimpin revolusi mahasiswa 1973, yang pada 1980-an mulai membangun perusahaan-perusahaan swasta atau bekerja di sektor swasta.

57 Mereka bisa dibandingkan dengan para demonstran Makati di Filipina yang, dari jalan-jalan Manila, membantu melengserkan Presiden Marcos pada Februari 1986.

58 Hee-min Kim, "A Theory of Government-Driven Democratization: The Case of Korea", *World Affairs*, Winter 1994, hlm. 138.

Sebagian pengamat mungkin menyatakan bahwa kadang kelas menengah, untuk menjaga stabilitas, memilih untuk berdiri di belakang seorang penguasa yang otoriter, paling tidak untuk jangka pendek. Hal ini mungkin benar, dan hal ini membawa kita kembali pada perbedaan antara Marx dan Schumpeter tersebut. Karena kita telah mengulas hal ini di atas, kita tidak perlu mengulang lagi di sini.

Apa yang bisa kita katakan di sini adalah bahwa meskipun hal itu benar, sebuah sistem otoriter yang menerima sebagian nilai dan standar kelas menengah sebagai imbalan dukungan politik jauh lebih mudah untuk terdemokratiskan nantinya dibanding suatu sistem yang didasarkan pada gagasan ambisius dan pseudo-ilmiah dari segelintir elite neurotik yang hanya memikirkan dukungan terhadap polisi rahasia, partai, dan aparat birokratis mereka. Bayangkanlah perbedaan antara Singapura di bawah Lee Kuan Yew dan Uni Soviet di bawah Stalin (lupakan sejenak perbedaan-perbedaan dalam hal ekonomi).

Tingkat Dua: Peran Faktor-faktor Lain

Sebelum kita bergerak lebih jauh, menarik untuk melihat kasus Indonesia. Soeharto, seperti Park Chung-hee, Chun Doo-hwan, dan para jenderal Thailand, tidak bertindak sebagaimana kaum Marxis ketika ia merebut kekuasaan pada akhir 1960-an. Sampai tingkat tertentu, konsep “otoriter-pluralis” juga bisa diterapkan pada rezim yang ia bangun. Dan, sebagai hasil dari pembangunan kapitalis yang berhasil, kelas menengah negeri itu juga berkembang dengan cepat.

Dengan demikian, prasyarat-prasyarat struktural bagi demokratisasi ada di sana. Namun Jakarta belum pernah mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar janji-palsu *keterbukaan*. Di sini argumen kita berlaku: kita perlu lebih dari sekadar penjelasan struktural untuk memahami sepenuhnya proses demokratisasi.

Seorang strukturalis yang keras kepala dapat dipastikan akan mengemukakan dua argumen. Pertama, pembangunan kapitalis di Indonesia bagaimanapun tidak sangat berhasil sebagaimana di Korea Selatan dan Thailand. GNP per kapita negeri ini hanya sekitar 3/5 GNP Thailand dan 1/5 GNP Korea Selatan. Indonesia masih harus mencapai suatu tingkat kemakmuran agar kebebasan menjadi suatu pilihan yang lebih realistis.

Kedua, demokratisasi yang sebenarnya mungkin belum terjadi, namun jelas salah jika mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada tekanan ke arah itu. Sebagaimana yang dikemukakan Andrew MacIntyre, karena pembangunan kapitalisnya yang cepat, kaum borjuis negeri itu menjadi lebih kuat dan semakin ingin menentang kebijakan pemerintah. Juga terdapat kompetisi (internal) yang lebih besar di kalangan elite dalam proses pembuatan keputusan.⁵⁹ Kelas menengah sekarang ini lebih asertif dan atmosfer perdebatan publik lebih baik dibanding sepuluh tahun yang lalu. Pendeknya, kapitalisme yang semakin luas tersebut telah memunculkan berbagai tekanan ke arah demokratisasi. Bersama waktu, tekanan-tekanan ini hanya mungkin menjadi lebih besar.

Argumen-argumen ini masuk akal, dan semua ini sangat memperkuat posisi sang strukturalis yang keras kepala tersebut.

Namun, untuk memperlihatkan bahwa posisi eklektik kita lebih baik dan lebih kaya, kita harus menjabarkan kasus-kasus khusus di mana faktor-faktor seperti kepemimpinan, lembaga politik, dan persoalan-persoalan sosial penting.

Dalam hal ini, mari kita kembali ke Thailand dan Korea Selatan. Di Thailand, terdapat para pemimpin oposisi seperti Chamlong Srimuang dari Palang Dharma (yang dulunya adalah gubernur Bangkok) yang bersedia untuk berada di pinggiran

59 Andrew MacIntyre, *Business and Politics in Indonesia*, Allen & Unwin, 1990.

mempertaruhkan hidup mereka demi memperjuangkan kebebasan. Pada saat genting ketika Jenderal Suchinda nyaris menang, Chamlong turun ke jalan, hampir sendirian, menuntut bahwa ia tidak akan makan apapun kecuali jika demokrasi dipulihkan. Tindakan Chamlong yang berani dan ala Gandhi ini membangunkan kelas menengah Bangkok, yang kemudian melengserkan Suchinda.

Di Korea Selatan, kita memiliki Roh Tae-woo dan dua Kim. Kim Dae-jung dan Kim Young-sam, sejak era Park Chung-hee, merupakan simbol dan panji oposisi. Keduanya terus menjaga api perubahan bahkan di masa-masa paling sulit di bawah pemerintahan otoriter. Jenderal Roh Tae-woo, bagian dari kekuasaan yang kemudian menjadi seorang reformis, berhasil memimpin negerinya sepanjang jalan sempit transisi: di satu sisi, dia memberi jaminan stabilitas pada militer, sehingga reaksi keras terhadap para demonstran bisa sangat dikurangi; di sisi lain, ia menerima tuntutan-tuntutan dasar koalisi anti-pemerintahan otoriter tersebut (dengan menawarkan “delapan poin kompromi”) yang menjadi pembukaan terbesar demokratisasi. Roh, dengan kata lain, membuka kemungkinan bagi suatu jenis perubahan yang disebut Profesor Huntington sebagai “*transplacement*”.⁶⁰

Di akhir *The Third Wave*, Huntington menulis: “Pembangunan ekonomi memungkinkan demokrasi; kepemimpinan politik menjadikannya nyata.” Roh Tae-woo, dua Kim, Chamlong Srimuang: tindakan-tindakan mereka merupakan salah satu contoh bagaimana kepemimpinan penting. Mereka membantu mengubah prasyarat-prasyarat sosio-ekonomi menjadi realitas politik.

Dalam hal lembaga-lembaga politik, kita bisa melihat bahwa di Thailand militer, sebagai sebuah lembaga politik kunci,

60 Samuel P. Huntington, *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Oklahoma Press, 1991.

terbagi ke dalam dua faksi, yakni Kelompok 5 dan Kelompok 7. Perpecahan ini memperlemah cengkeraman otoritarianisme dan membuka ruang bagi berbagai gerakan dan gerakan tandingan di kalangan elite berkuasa yang mengundang reaksi dari orang-orang luar untuk bergabung, dan dengan demikian memperluas arena partisipasi politik.

Selain perpecahan militer ini, kita memiliki faktor kelembagaan lain yang penting, Kerajaan dan Rajanya yang bijak dan kharismatik. Bersama Juan Carlos I dari Spanyol, Raja Bhumibol mungkin bisa disebut sebagai contoh terbaik dalam sejarah politik abad ke-20 tentang bagaimana sebuah lembaga lama bisa memainkan peran konstruktif dalam membantu negerinya menghadapi pergolakan politik besar. Raja Bhumibol membantu negeri itu untuk tidak tenggelam ke dalam titik-titik ekstrem; ia dengan demikian memberikan suatu kerangka stabilitas yang mungkin berfungsi sebagai dasar bagi terobosan politik penting, yang benar-benar ia lakukan pada April-Mei 1992.

Di Korea Selatan, dengan matinya Park Chung-hee pada 1979, legitimasi koalisi yang berkuasa merosot. Militer ternyata tidak solid dan kuat di bawah Chun Doo-hwan. Chun memang mampu membubarkan partai-partai politik dan membubarkan para pemimpinnya. Namun sebagai gantinya ia harus memberikan semacam kompromi, yakni bahwa ia hanya akan berada di tampuk kekuasaan selama 7 tahun, dan bahwa di akhir masa jabatannya ia akan memastikan bahwa pemilu yang bebas dilaksanakan untuk memilih pemimpin negeri itu berikutnya. Sebagaimana yang kemudian terjadi, pemilu yang bebas memang dilaksanakan; Roh Tae-woo memenangkan pemilu itu, dan kemudian, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, memimpin negeri itu masuk ke dalam demokrasi.

Dengan membandingkan Thailand dan Korea Selatan dengan Indonesia, penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor kepemimpinan dan kelembagaan dalam yang pertama hampir

tidak ada dalam kasus yang kedua. Militer sebagai sebuah lembaga tetap solid, padu di bawah satu orang.⁶¹ Terutama karena hal ini, Soeharto, tidak seperti Chun Doo-hwan, tidak pernah terpaksa untuk menerima pembatasan apapun terhadap kekuasaannya.

Indonesia masih menunggu munculnya seorang pemimpin seperti Roh Tae-woo. Hingga dua atau tiga tahun yang lalu sebagian orang berharap bahwa figur-figur kuat seperti Benny Moerdani, atau Eddy Soedradjat, atau Rudini, akan menjadi seorang pembaharu dan, dari dalam, mengikis kekuasaan Soeharto dan, dengan bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan demokratis di luar pemerintah, menggiring negeri itu menuju jalan “*transplacement*”. Sekarang kita sadar bahwa harapan tersebut hanyalah ilusi.

Selain itu, Indonesia mengalami satu hal yang tidak dialami oleh Thailand maupun Korea Selatan: perpecahan masyarakat yang mendalam berdasarkan garis primordial. Inilah faktor problem sosial yang menjadikan demokratisasi, meskipun bukannya tidak mungkin, agak sulit berjalan maju. Persoalan ini terlalu sering ditulis, dan karena itu tidak perlu diulangi di sini.

Tentu saja kita bisa menyebut berbagai tindakan, peristiwa, dan kejadian lain yang lebih banyak untuk menjelaskan demokratisasi. Namun, pada titik ini, apa yang telah dijabarkan di atas mungkin memadai dalam mendukung argumen eklektik kita.

61 Memang militer pernah terpecah ke dalam dua atau tiga faksi yang berseberangan (1974, 1988-9). Namun ketika perpecahan tersebut mulai membahayakan kekuasaannya, Soeharto melakukan tindakan-tindakan tegas dan memulihkan kesatuan tulang-punggung politiknya tersebut.

Max Weber dan Kapitalisme

ARGUMEN-ARGUMEN utama Weber tentang kapitalisme dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk menyingkap asal-usul serta persoalan utama kapitalisme. Meskipun ia lebih banyak memfokuskan usahanya untuk menjelaskan asal-usul kapitalisme, argumen-argumennya tentang transformasi kapitalisme menjadi suatu sangkar besi tidak kurang pentingnya.

Menyangkut asal-usul kapitalisme, apa yang ingin dilakukan Weber adalah membalikkan argumen-argumen Karl Marx. Marx ingin menjelaskan perkembangan kapitalisme (dan sejarah) dari sudut pandang materialis. Bagi Marx, kapitalisme terutama adalah suatu sistem ekonomi, dan kelahirannya merupakan hasil dari transformasi dalam bentuk dan hubungan produksi. Meskipun paragraf terakhir dari buku Weber *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* merupakan suatu jenis apologi (ia tidak ingin dipahami sebagai orang yang sepenuhnya membalikkan posisi Marx), implikasi dari argumen-argumen Weber sepenuhnya membalikkan perspektif materialis Marx.

Etika Protestan-lah, yakni suatu “rasionalitas khusus” dari sekelompok orang di Eropa dan Amerika, yang melahirkan suatu sistem usaha bebas dalam bentuknya yang modern (kapitalisme). Untuk memahami hal ini, kita harus melihat bahwa bagi

Weber kapitalisme lebih dari sekadar suatu sistem usaha bebas di mana semangat untuk memperoleh keuntungan merupakan kekuatan pendorongnya. Dalam peradaban-peradaban kuno pertukaran bebas barang dan jasa telah terjadi. Memang, dalam sebagian besar sejarah tertulis manusia, usaha untuk memperoleh keuntungan demi keuntungan itu sendiri dapat dilihat. Apa yang baru di Eropa setelah revolusi Protestan adalah suatu sistem usaha bebas yang dijalankan melalui mekanisme-mekanisme rasional (pembukuan dengan entri ganda, organisasi yang impersonal, dan sebagainya) dan melalui suatu bentuk tindakan manusia yang bersumber dari semangat ilahiah (asketisme). Kapitalisme menjadi suatu sistem, suatu bentuk modern dari interaksi ekonomi, hanya jika ia dijalankan dengan mekanisme-mekanisme rasional dan asketisme ini. Dan etika Protestanlah yang melahirkan mekanisme rasional dan asketisme tersebut.

Hinduisme, Buddhisme, Konfusianisme, Katolisisme, Islamisme: agama-agama ini telah ada ratusan atau ribuan tahun sebelum lahirnya Protestanisme. Namun, hanya yang terakhir ini yang mampu ‘menemukan’ cara baru dalam beribadah kepada Tuhannya. Tidak seperti para penganut agama lain yang menganggap bahwa mencari keuntungan merupakan sesuatu yang “rendah”, tak terhormat, dan tak layak dilakukan oleh orang-orang yang bermartabat, umat Protestan percaya bahwa mencapai keberhasilan dalam urusan-urusan duniawi (yakni menjalankan usaha ekonomi) merupakan cermin dari terwujudnya kehendak Tuhan. Dengan demikian, menabung, bekerja keras, hemat, dan menahan diri untuk tidak hanyut dalam sungai kesenangan dianggap sebagai bentuk-bentuk ibadah keagamaan.

“Sekularisasi” semangat ilahiah ini, bagi Weber, mempunyai dampak yang revolusioner. Ia membalikkan tradisi keyakinan manusia yang telah berusia ribuan tahun bahwa perdagangan, usaha ekonomi tidak layak ditekuni secara serius. Ia memberi

suatu pembenaran ilahiah bagi urusan-urusan duniawi, yakni mencari uang dan bekerja keras untuk mendapatkan uang. Dengan demikian, ia membangkitkan energi umat Protestan untuk membuat mekanisme-mekanisme rasional untuk mencapai tujuan-tujuan usaha ekonomi yang dibenarkan tersebut. Melalui usaha untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi inilah kapitalisme sebagai suatu sistem produksi baru muncul.

Dalam rumusannya yang paling sederhana, inilah inti dari gagasan Weber. Dengan memahami kapitalisme dalam cara ini, Weber mampu menjelaskan mengapa, misalnya, Cina gagal berpindah dari sistem ekonomi feodal ke sistem ekonomi modern (kapitalisme), meski ia mempunyai tradisi perdagangan (antarbenua) yang begitu panjang (yakni, perdagangan sutra). Gagasan ini, secara sederhana dan jelas, juga memberi Weber perspektif baru tentang pentingnya agama, etika, serta suatu bentuk rasionalitas dalam proses perubahan ekonomi dan dalam pembentukan dunia modern.

Dengan memahami asal-usul kapitalisme dengan cara itu, Weber dapat dengan mudah menelusuri apa yang dianggap persoalan utama kapitalisme. Kapitalisme, setelah kemunculannya, tumbuh seperti suatu mesin otomatis. Ia menjadi impersonal, dan mampu berjalan sendiri—ia tidak lagi membutuhkan “ibu”-nya (yakni semangat keagamaan). Bagi Weber, permasalahannya adalah bahwa tanpa ibunya, kapitalisme semata-mata menjadi suatu sistem ekonomi, dan tidak lagi mempunyai dasar etis atau spiritual atau moral.

Ketika pemisahan kapitalisme dan “rasionalitas khusus” itu terjadi, maka kapitalisme menjadi suatu sangkar besi. Tidak seperti umat Protestan awal yang bekerja keras demi untuk memenuhi kehendak Tuhan, orang-orang dalam tahap kapitalisme selanjutnya harus bekerja keras hanya demi hidup, demi menjalankan produksi ekonomi. Orang-orang tidak lagi menjadi religius—mereka menjadi utilitarian dan teknis. “Kalangan

Puritan mau bekerja karena panggilan; kita terpaksa melakukan hal itu.” Dalam keadaan seperti ini, hidup dalam kapitalisme menjadi tidak lagi memiliki makna. Sistem itu menjadi berjalan sendiri, dengan suatu “kekuatan yang tak dapat ditahan”.

Tidak seperti Marx, yang menganggap persoalan utama kapitalisme adalah adanya penindasan oleh satu kelas atas kelas yang lainnya, Weber melihat persoalan kapitalisme terutama adalah persoalan moral. Kapitalisme mempunyai asal-usulnya dalam wilayah moral; demikian juga persoalannya. Tentu saja, dengan melihat pengetahuan yang sekarang kita miliki tentang kapitalisme modern, mudah untuk menunjukkan bahwa gagasan Weber tersebut tidak lagi meyakinkan. Kita dapat memperlihatkan bahwa pertumbuhan kapitalisme yang tercepat dalam sejarah sekarang ini terjadi justru di “negeri-negeri Konfusian” (yang oleh Weber dianggap mustahil). Kita juga dapat menunjukkan bahwa perkembangan kapitalisme di negeri-negeri ini kurang ada kaitannya dengan suatu bentuk etika keagamaan (Konfusianisme), dan lebih berkaitan dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah mereka, atau dengan kreativitas kelas pebisnis mereka, atau dengan berbagai kesempatan yang diamparkan oleh struktur geopolitik pasca-Perang Dunia II. Dan ketika kita telah menyangkal gagasan Weber tentang asal-usul kapitalisme, menjadi lebih mudah untuk mengkritik penjelasannya tentang persoalan utama kapitalisme.

Namun pembahasan ini akan membawa kita terlalu jauh masuk ke dalam suatu persoalan yang menarik, yang memerlukan usaha yang lebih banyak ketimbang yang tersaji dalam esai ini. Di sini cukup dikatakan bahwa usaha Weber untuk menjelaskan kapitalisme tetap merupakan suatu karya klasik, suatu karya besar yang membantu kita lebih memahami kekuatan ekonomi yang dampaknya dalam kehidupan manusia tidak tertandingi oleh kekuatan lain apapun yang kita ketahui.

Nabi yang Gagal

SESOSOK HANTU menggerayangi dunia—hantu kapitalisme. Mulai dari Tanzania dan Rusia hingga Meksiko, India, dan Warsawa “mekanisme pasar” dan “efisiensi” sekarang ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan sosial dan ekonomi. Di banyak negara komunis, sebagaimana yang kita lihat pada akhir 1980-an, Marxisme ditolak bukan saja oleh kaum intelektual, melainkan oleh masyarakat pada umumnya. Apa yang salah dengan Marx dan Marxisme?

Tak diragukan, Marx adalah seorang teoretisi sosial paling besar yang pernah muncul di dunia: jutaan orang mengorbankan hidupnya untuk mewujudkan pandangan-pandangan dan ramalan-ramalannya; berbagai negara terlibat dalam perang untuk membela atau menyangkal gagasan-gagasannya.

Bagi banyak pengikut dogmatisnya, Marx hanya bisa dibandingkan bukan dengan pemikir-pemikir sosial lain, melainkan dengan Muhammad, Yesus, dan Buddha Gautama: pengetahuan yang disingkapkan oleh Marx adalah benar, terlepas dari masa, konteks dan fakta-fakta.

Marx membuka sebuah cara baru untuk memahami masyarakat baru dan ekonomi baru (yakni, masyarakat borjuis dan ekonomi industri-kapitalis) yang mulai muncul pada abad ke-

17. Ia mengklaim memberikan suatu pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana sejarah berkembang, serta bagaimana masyarakat mendapatkan bentuknya. Ia menyajikan suatu sistem pengetahuan, yang ia dan para pengikutnya klaim sebagai pengetahuan yang ilmiah, yang bisa meramalkan arah sejarah.

Selain itu, Marx, dalam ungkapan Joseph Schumpeter, menyajikan sebuah “panduan bagi berbagai tujuan yang membutuhkan suatu rencana penyelamatan dan petunjuk tentang kejahatan yang darinya umat manusia, atau sekelompok manusia yang terpilih, terselamatkan”.

Esai pendek ini akan menjabarkan inti dari gagasan-gagasan sosiologis dan ekonomi Marx. Saya akan memperlihatkan berbagai kelemahan utama dari gagasan-gagasan ini—berbagai kelemahan yang menjelaskan mengapa Marxisme, jika ia mau diwujudkan dalam kenyataan, bukan saja secara ekonomi tidak dapat dijalankan, namun juga secara politik dan sosial berbahaya.

Berlawanan dengan kalangan Marxis yang kaku, Marxisme bukan merupakan suatu gagasan yang misterius yang bisa sepenuhnya dipahami oleh seseorang. Inti gagasan-gagasan sosiologis dan ekonomi Marx sebenarnya cukup sederhana.

Bagi Marx, kapitalisme, sebagaimana yang ia lihat pada pertengahan abad ke-19, sedang mengalami suatu proses penghancuran-diri. *Manifesto*-nya (bersama Engels) dengan gamblang menjelaskan bahwa proses penghancuran-diri ini akan diikuti oleh bangkitnya kelas yang tertindas (kaum proletariat) sebagai kelas yang dominan—kapitalisme digantikan oleh komunisme. Proses hancurnya kaum borjuis hanya menunggu waktu. Kemenangan kaum proletar dan munculnya komunisme tak dapat dielakkan.

Dari *Manifesto* dan *Capital* kita dapat melihat bahwa bagi Marx, terdapat dua gambaran dari dialektika penghancuran-

diri kapitalis ini. Pertama bersifat sosiologis, kedua bersifat ekonomi.

Dari perspektif sosiologisnya, Marx menjelaskan bahwa fondasi suatu masyarakat bersifat materiil (sarana dan hubungan produksi). Jika fondasi ini berubah, maka bentuk masyarakat juga berubah. Dan perubahan ini hanya bisa terjadi jika masyarakat lama tersebut telah “hamil”—masyarakat baru tersebut hanya bisa dilahirkan dari rahim masyarakat lama itu.

Basis materiil dari masyarakat kapitalis tersebut memunculkan dua, dan hanya dua, kelas yang saling bertentangan: kelas borjuis (yang menguasai alat-alat produksi) dan kelas pekerja (yang bekerja sebagai buruh upahan). Karena kaum borjuis pada dasarnya eksploitatif, antagonisme ini memunculkan suatu proses yang khas: proletariatisasi kaum pekerja. Di sini kaum pekerja tersebut mendapatkan kesadaran kelas mereka yang membuka pikiran mereka tentang penderitaan yang mereka alami dan cara untuk sepenuhnya mengatasi penderitaan ini.

Ketika proses proletariatisasi ini sempurna, kaum pekerja hanya perlu menyatukan diri mereka (yang, bagi Marx, bagaimanapun juga akan terjadi dengan sendirinya) untuk menghancurkan sistem kapitalis tersebut dan membangun sebuah masyarakat baru tanpa kelas, sebuah masyarakat tanpa penindasan, sebuah masyarakat di mana orang-orang hanya perlu bekerja empat jam di pagi hari, memancing di sore hari, dan membaca puisi di malam hari.

Mengapa kaum borjuis niscaya eksploitatif? Mengapa sistem kapitalis tidak dapat meningkatkan kesejahteraan kaum pekerja untuk membendung proses proletariatisasi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini kita harus melihat penjelasan-penjelasan ekonomi Marx, yang sebagian besar ditulis dalam *Capital*.

Inti dari teori ekonomi Marx pada dasarnya bersandar pada teori tentang nilai lebih dan menurunnya angka keuntungan. Dalam sebuah sistem akumulasi modal yang kompetitif, sang kapitalis hanya dapat mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri jika ia terus menekan upah para pekerjanya. Upah kaum pekerja hanya bisa untuk menyambung hidup. Ini merupakan “nilai” sejatinya. Sebagai ganti upah ini, si pekerja memberikan kepada si kapitalis nilai yang ia hasilkan dalam kerja sehari penuh, yang melebihi nilai sejatinya.

Jadi, hanya dengan menekan biaya tenaga kerja-lah kaum kapitalis bisa mengakumulasi modal yang semakin besar. Inilah yang bersifat eksploitatif.

Karena setiap kapitalis melakukan hal yang sama (terus-menerus menekan upah pekerja), maka persaingan untuk mendapatkan keuntungan mengharuskan diperkenalkannya mesin penghemat tenaga kerja demi untuk semakin memangkas biaya produksi. Proses ini pada dasarnya akan mempersempit basis pengumpulan keuntungan sang kapitalis, karena pekerja, dan hanya pekerja, yang tingkat gajinya menentukan angka keuntungan yang didapatkan sang kapitalis.

Proses ini bisa berlanjut karena kompetisi adalah hidup dan darah sistem kapitalis. Angka keuntungan yang menurun membuat kehidupan si pekerja menjadi semakin sulit. Karena itulah proses proletarianisasi tak terelakkan. Proses menurunnya angka keuntungan tersebut berakhir dengan suatu malapetaka, sebuah revolusi besar, ketika “para penjarah dijarah”.

Tentu saja terdapat banyak hal lain dalam penjelasan ekonomi Marx yang menarik untuk ditelusuri. Teorinya tentang nilai komoditas dan deskripsinya tentang proses sentralisasi dalam sebuah sistem kapitalis yang kompetitif sangat penting untuk sepenuhnya memahami mengapa ia menganggap kapitalisme tidak mungkin bertahan. Namun, pada dasarnya gagasan-gagasannya yang paling penting adalah yang telah kita

jabarkan di atas. Kita akan memahami Marx sang ekonom jika kita memahami sepenuhnya teori nilai lebih dan teori menu-runnya angka keuntungan tersebut.

Apa kelemahan-kelemahan gagasan-gagasan Marx?

Gagasan-gagasan sosiologis Marx terlalu deterministik: baginya, wilayah gagasan, budaya, kesadaran tidak penting. Dalam *Preface* ia menulis, “Bukan kesadaran manusia yang menentukan keberadaan mereka, namun, sebaliknya, keberadaan sosial mereka [bentuk dan hubungan-hubungan produksi] yang menentukan kesadaran mereka.”

Dari banyak kasus sejarah kita tahu bahwa dalil ini salah. Nasionalisme (yang merupakan suatu kecenderungan mental dalam wilayah budaya), misalnya, penting. Berbagai gelombang nasionalisme di Eropa, misalnya, menjelaskan mengapa para pekerja di Jerman mendukung Hitler dalam melancarkan perang melawan Uni Soviet (“kekaisaran ilahiah kaum pekerja”). Nasionalisme juga menjelaskan mengapa partai buruh dan sosialis di Eropa sangat menentang internasionalisasi revolusi ala Trotsky.

Selain itu, cita-cita pekerja, tidak ditentukan oleh “keberadaan sosial” mereka. Jika Marx benar, apa yang diimpikan pekerja tidak lain adalah menjadi seorang pemilik, seorang borjuis, besar atau kecil. Bagi Marx, seorang pekerja yang “sadar” harus memimpikan sebuah revolusi besar. Apa yang terjadi adalah, jika kita bertanya kepada si pekerja, apa yang ia impikan adalah bagian (managerial dan material) yang lebih baik di tempat kerjanya. Ia ingin menjadi bangga atas apa yang ia lakukan. Kenyataan bahwa sebagian besar pekerja di negara-negara kapitalis maju sekarang ini adalah pemilik bersama (yakni, kaum kapitalis) menunjukkan bahwa apa yang terjadi bukan proletarianisasi melainkan borjuisasi pekerja.

Dengan kata lain, kenyataan ini mengikis “kekuatan obyektif” yang sangat penting dalam mendorong revolusi. Kapitalisme tidak runtuh karena kaum pekerja berpikir bahwa lebih baik menjadi seorang kapitalis ketimbang seorang agen revolusi.

Tentang teori ekonomi Marx, sebelum kita bergerak lebih jauh, penting untuk mengingat bahwa gagasan-gagasan Marx dipengaruhi oleh para ahli ekonomi utama pada masanya. Teori nilainya bersumber dari teori Ricardo. Kelemahan-kelemahannya dengan demikian tidak semata-mata miliknya, melainkan juga kelemahan-kelemahan Ricardo. Harus dikemukakan di sini bahwa pada masa Marx, tidak ada ahli ekonomi, termasuk Ricardo, yang sepenuhnya memahami sistem ekonomi baru yang mulai menunjukkan kekuatannya tersebut.

Teori tentang nilai lebih tersebut didasarkan pada asumsi bahwa nilai (nilai tenaga kerja) adalah apa yang penting jika kita menghitung harga sebuah komoditas. Masalahnya adalah apa itu nilai? Marx, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Heilbroner dan Joseph Schumpeter, tidak pernah menulis secara benar-benar jelas apa yang ia maksud dengan nilai. Mungkin ia memaksudkan sesuatu yang selain harga, yang ditentukan bukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan melainkan oleh adanya kekuasaan. Satu hal yang sangat jelas: bagi Marx, nilai tenaga kerja dihitung hanya melalui jam yang dihabiskan di tempat kerja. Ini merupakan ilmu ekonomi yang sangat buruk, karena sebagaimana yang kita ketahui dalam ekonomi modern, jumlah jam kerja mungkin merupakan faktor yang paling kurang penting dalam menentukan gaji seorang pekerja. Apa yang lebih penting adalah pendidikan profesional, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman si pekerja. Skala produksi dan pasar juga sangat penting, jauh lebih penting ketimbang jumlah jam kerja dalam menentukan seberapa banyak uang yang bisa dibawa kembali si pekerja ke keluarganya.

Marx berpikir bahwa keuntungan hanya bisa diperoleh dengan mengorbankan pekerja. Ia gagal melihat bahwa banyak faktor lain jauh lebih penting. Diperkenalkannya teknologi baru dalam produksi dapat mengurangi biaya produksi, dan dengan demikian meningkatkan upah pekerja. Pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya alam baru dan pasar baru bisa memperluas operasi produksi, yang akhirnya juga bisa meningkatkan upah pekerja. Semua faktor ini memainkan suatu peran penting dalam menjelaskan mengapa kapitalisme, sejak masa Marx, telah meningkatkan kekayaan dunia secara luarbiasa sampai tingkat yang mungkin tak terbayangkan oleh orang-orang di masa Marx.

Dengan kata lain, proses menurunnya laba gagal terwujud karena Marx tidak memahami proses kerja kapitalisme. Bagi Marx, ekonomi kapitalis pada dasarnya tidak berubah. Namun, dalam kenyataannya, kapitalisme merupakan suatu sistem yang paling dinamis yang pernah ada di dunia. Kemajuan dalam sistem ini, sebagaimana yang ditulis Schumpeter, terjadi bukan karena penghisapan kaum pekerja, melainkan karena komitmen dan keberanian untuk berusaha, terus ditemukannya metode-metode produksi baru, berbagai kesempatan komersial baru, persaingan bebas dan terus-menerus yang memaksa manusia untuk melakukan yang terbaik, dan teknik-teknik baru dalam organisasi-organisasi kerja.

Gagasan-gagasan utama Marx bukan hanya cacat, melainkan juga berbahaya jika kita menerjemahkannya ke dalam tindakan politik. Marxisme bukan hanya menghasilkan ekonomi yang tidak dapat dijalankan, melainkan juga sebuah negara totaliter.

Untuk menghamparkan dasar bagi masyarakat komunis, kepemilikan pribadi atas sarana-sarana produksi harus dihapuskan. Kepemilikan pribadi merupakan sumber semua kejahatan-

an—inilah dasar kapitalisme, inilah sumber penghisapan. Marxisme, dalam bentuknya yang lebih sederhana sebagai panduan tindakan politik, adalah resep untuk penghapusan hak milik (pribadi).

Marx tidak pernah memberi tahu kita apa yang harus dilakukan setelah kepemilikan pribadi dihapuskan. Ia mengatakan bahwa untuk sementara harus ada kediktatoran proletariat, sebelum masyarakat komunis terbentuk. Marx tidak menjelekkan negara atau pemerintahan seperti apa yang harus dibentuk dalam masyarakat tersebut untuk mengatur berbagai perselisihan di antara warganya—ia bahkan mengatakan bahwa tidak ada negara dalam masyarakat komunis, dan tidak perlu ada peraturan dan pemerintahan karena tidak akan ada lagi konflik. Di sini eskatologi Marxis sama utopisnya sebagaimana utopia-utopia lain yang pernah ada di dunia.

Mengapa menghapuskan kepemilikan pribadi berbahaya? Sebagaimana yang dijelaskan Hegel, Locke, dan Hume, kepemilikan pribadi (terutama atas sarana-sarana produksi) merupakan salah satu dasar masyarakat sipil yang paling penting. Hal itu memberi manusia, menurut Hume, suatu standar keadilan—“milikku” dan “milikmu” menentukan lingkup tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Persoalan hak-hak (politik) hanya bisa dipecahkan setelah orang-orang menyetujui apa yang merupakan “milikku” dan “milikmu” dalam masyarakat.

Selain itu, kepemilikan pribadi memberikan kemungkinan bagi manusia untuk hidup secara mandiri: hidup tanpa bergantung pada otoritas-otoritas politik, yakni negara. Hak milik pribadi dengan demikian memungkinkan pemisahan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik, yang merupakan syarat penting bagi suatu masyarakat yang demokratis.

Jadi, jika kita menghapuskan hak milik pribadi atas sarana-sarana produksi, kita menghancurkan dasar demokrasi.

Dalam masyarakat modern, komunis atau kapitalis, tidak ada jalan ketiga kepemilikan: Anda memberikan hak kepada warganegara untuk memiliki bisnis mereka sendiri, atau Anda memberikan wewenang kepada negara untuk mengontrol semua hal. Kerjasama para pekerja hanya mungkin terjadi dalam sebuah unit kecil dari suatu masyarakat yang tertutup, bukan dalam sebuah masyarakat modern yang terbuka.

Dan begitu negara mengontrol sarana-sarana produksi, maka berkuasalah para birokrat. Milovan Djilas beberapa dekade yang lalu dengan tepat menjelaskan proses transformasi komunisme menjadi birokratisme ini. Segala sesuatu akan bergantung pada sang birokrat, mulai dari produksi ekonomi hingga pendidikan politik. Sang birokrat tersebut akan menjadi kelas baru, kelas penindas.

Karena tidak ada pemisahan antara kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi, masyarakat tidak memiliki dasar untuk melawan kontrol total dari negara. Inilah yang menjelaskan mengapa negara Soviet, dengan semua kebohongan, kemunafikan, dan penindasannya, bisa bertahan selama lebih dari tujuh dekade.

Daftar Rujukan

1. McLellan, David (ed.), *Karl Marx: Selected Writings*, Oxford (1987).
2. Schumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, Harper (1947).
3. Heilbroner, Robert, *The Worldly Philosophers*, Touchstone (1986).
4. Hume, David, *A Treatise of Human Nature*, Oxford, 2nd edition (1978).
5. Djilas, Milovan, *The New Class*, Praeger, New York (1957).

Roti sebagai Senjata

“KEKUASAAN,” kata E. H. Carr, “adalah satu dan tak-terbagi” (1946: 132). Kekuasaan ekonomi dan kekuatan militer hanya merupakan dua pengejawantahan yang berbeda dari hal yang sama: mereka adalah elemen-elemen dari kekuasaan politik. Roti dan peluru melayani tujuan yang sama, yakni—dalam rumusan Dahlian—membuat negara-negara lain melakukan satu hal yang jika tidak demikian tidak akan mereka lakukan.

Penerapan kekuasaan ekonomi sebagai sebuah instrumen politik pada dasarnya dapat dilakukan dalam bentuk ganjaran dan hukuman. Dalam hal ganjaran, kekuasaan ekonomi dijalankan misalnya dengan memberikan bantuan luar negeri atau bantuan keuangan bagi negara tertentu. Marshall Plan merupakan sebuah contoh yang berhasil. Dalam hal hukuman, kekuasaan ekonomi dapat dijalankan dengan melancarkan embargo perdagangan atau sanksi ekonomi. Dalam hal ini, negara yang menjadi sasaran hukuman diasingkan dari wilayah perdagangan tertentu, atau dari perdagangan dunia pada umumnya.

Penerapan kekuasaan ekonomi, dalam bentuk sanksi, lebih sering dijalankan dibanding penerapan kekuatan militer sejak 1945 (Pollins 1990). Negara-negara besar cenderung menggu-

nakan cara-cara ekonomi dalam memecahkan berbagai perse-
lisihan dan dalam menjalankan pengaruhnya. Kecenderungan
ini menarik, karena keefektivan kekuatan ekonomi masih di-
pertanyakan. Roti semakin sering dipakai sebagai sarana, na-
mun pada saat yang sama pengaruhnya dalam mencapai suatu
tujuan kebijakan luar negeri tidak begitu meyakinkan.

Tentu saja penerapan kekuasaan ekonomi tidak bisa selalu
dilihat dari perspektif utilitarian. Sebagaimana yang dikemu-
kakan Baldwin (1985), sanksi ekonomi pada dasarnya meru-
pakan suatu tindakan simbolik. Menjalankan kekuasaan eko-
nomi berarti memperlihatkan kekuatan, kehendak politik, dan
keberanian negara tertentu. Di sini hukuman dilihat sebagai
suatu pengasingan simbolik: sebuah negara yang diasingkan
dari komunitas dunia dianggap sebagai negara yang rendah
oleh banyak negara lain. Keefektivannya dengan demikian tidak
dapat diukur hanya dengan semata-mata melihat apakah nega-
ra yang menjadi sasaran secara langsung mengubah kebijakan-
kebijakannya.

Namun, pertanyaan tentang keefektivan dalam pengertian
utilitarian tidak dapat dihindari. Meskipun Hufbauer dan
Schott (1980) memperlihatkan bahwa terdapat beberapa contoh
di mana sanksi tersebut berhasil,⁶² kita masih harus melihat
penjelasan yang lebih meyakinkan bahwa penerapan kekuasaan
ekonomi ini merupakan suatu sarana yang efektif untuk mem-
buat sebuah negara melakukan suatu hal yang jika tidak ada
sanksi tersebut tidak akan ia lakukan.

Dengan munculnya perekonomian global, persoalan ten-
tang keefektivan sanksi ini semakin menjadi problematis. Ke-
kuatan ekonomi sekarang ini lebih tersebar. Banyak pemain

62 Hufbauer dan Schott menjelaskan bahwa dari 103 kasus sanksi ekonomi antara 1914 dan 1984, hanya sepertiga lebih sedikit dari kasus-kasus tersebut yang memperlihatkan bahwa sanksi ekonomi cukup berpengaruh dalam mewujudkan suatu tujuan ke-
bijakan luar negeri.

(negara dan non-negara) kini muncul dalam perekonomian dunia. Faktor-faktor produksi dunia (yakni modal dan teknologi), misalnya, tidak dikendalikan hanya oleh dua atau tiga negara. Pada saat yang sama, pasar semakin meluas: Asia Timur dan Tenggara, termasuk Cina, sekarang ini bergabung dengan Eropa Barat dan Amerika Utara dalam menyediakan pasar yang sangat besar bagi berbagai jenis barang.

Dalam keadaan seperti itu, sanksi ekonomi yang dibebankan oleh negara A pada negara B tidak akan banyak berguna: negara yang menjadi sasaran tersebut bisa memperoleh investor dan produsen dari negara C dan D. Sanksi tersebut hanya bisa berhasil jika negara A sepenuhnya mengontrol berbagai jenis barang (misalnya minyak dan peralatan-peralatan berteknologi tinggi) yang sangat diperlukan oleh negara B. Namun sekarang ini, apakah memang ada sebuah negara yang sepenuhnya mengontrol berbagai jenis barang tersebut? Apakah ada suatu jenis barang yang tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang lain, suatu barang yang tanpanya sebuah negara akan mengalami gejolak dan penderitaan besar?

Tersebar luasnya aset-aset dan investasi-investasi ekonomi semakin memperumit persoalan ini. Memberlakukan sanksi terhadap Haiti memang mudah—Haiti adalah negara yang relatif kecil dan miskin. Namun bagaimana dengan Hong Kong? Malaysia? Korea Selatan? Singapura? Menjatuhkan sanksi pada salah satu negara ini berarti membunuh bisnis banyak perusahaan besar dari berbagai penjuru dunia yang beroperasi di sana. Dengan kata lain, pertaruhanannya terlalu besar. Selain itu, sangat tidak mungkin bahwa bisnis-bisnis besar ini tidak akan berusaha melakukan sesuatu demi untuk melindungi aset, investasi, dan pasar mereka: mereka tidak mungkin begitu saja meninggalkan negara itu, dan apa yang sangat mungkin mereka lakukan adalah memastikan bahwa sanksi tersebut tidak akan dijatuhkan.

Selain berbagai persoalan ini, kita juga dihadapkan pada dilema moral yang sangat sulit. Ambil contoh Cina. Cina sekarang ini memiliki perekonomian yang paling cepat berkembang di dunia. Secara ekonomi, ia merupakan satu-satunya negara yang berhasil berpindah dari sosialisme ke kapitalisme. Jika keberhasilan ini berlanjut sepuluh tahun berikutnya, kelas menengahnya akan memiliki basis yang kuat untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang demokratis. Nah, jika kemudian di Cina terjadi Tiananmen Bagian II, apakah kita harus menjatuhkan sanksi ekonomi pada negara ini, suatu hal yang sangat mungkin akan mengancam keberhasilan ekonomi yang diperoleh dalam dua dekade terakhir? Menghalangi perluasan pasar yang baru muncul berarti menghancurkan benih-benih demokrasi: apakah kita ingin Cina kembali lagi ke masa lalunya, kini dengan 1,2 miliar orang?

Jadi, meskipun penggunaan kekuatan ekonomi menjadi semakin problematis, mengapa negara-negara besar masih saja bersandar pada kekuatan ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita mungkin harus ke luar dari masalah keefektivan. Kekuatan militer dilihat sebagai sesuatu yang sangat mahal dan sangat berbahaya untuk dijalankan di zaman nuklir ini (Baldwin 1985). Kekuatan ekonomi mungkin kurang efektif, namun kekuatan militer terlalu berbahaya. Selain itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Richard Rosencrance (1986), dengan keadaan perekonomian dunia yang semakin saling bergantung satu sama lain, sebuah negara bisa sangat kuat dan berpengaruh di panggung dunia dengan hanya menggunakan sarana-sarana ekonomi. Bagi Rosencrance, sebuah dunia yang saling bergantung juga merupakan sebuah dunia yang sangat kompetitif—membiayai penggunaan kekuatan militer bukan merupakan investasi yang baik jika ingin berhasil dalam kompetisi ini.

Terakhir, TV menguburkan harapan untuk tidak bergantung pada kekuatan ekonomi sebagai satu-satunya pilihan yang

mungkin dilakukan. Hingga tahun-tahun pertama abad ke-20, “darah”, “penghancuran”, dan “korban peperangan” hanya merupakan rumusan abstrak tentang penderitaan manusia dalam kepala sebagian besar orang. Namun sejak Vietnam, TV mengubah abstraksi penderitaan manusia ini menjadi realitas. Dari kamar mereka, orang-orang kini melihat dengan mata sendiri betapa mengerikan dan menjijikkan kehancuran yang disebabkan oleh kekuatan militer.

Dengan demikian penggunaan kekuatan militer dalam keadaan seperti ini merupakan sesuatu yang kurang sah. Menjadi semakin jelas bahwa masyarakat tidak akan pernah membiarkan para politisi negeri mereka untuk menjalankan kekuatan militer tanpa pertaruhan modal politik yang sangat besar. Karena itu, kekuatan ekonomi menjadi pilihan yang lebih mudah: dampaknya kurang dramatis untuk ditangkap kamera TV.

Rujukan:

1. Baldwin, David A. (1985), *Economic Statecraft*, Princeton University Press.
2. Carr, E. H. (1946), *The Twenty Years of Crisis, 1919-1939*, Macmillan.
3. Pollins, Brian M. (1990), *Cannon and Capital*, Draft.
4. Rosencrance, Richard (1986), *The Rise of the Trading States*, Basic Books.
5. Hufbauer, Gary C., and Jeffrey Scott (1985), *Economic Sanctions Reconsidered*, Institute for International Economics.

Anggur Lama dalam Botol Baru

PERDEBATAN DALAM KEPUSTAKAAN ekonomi politik, dari sudut pandang tertentu, mirip dengan perdebatan lama antara realisme dan idealisme.

Perdebatan lama tersebut mencoba untuk memecahkan persoalan-persoalan seperti: apa watak dasar hubungan antar-negara? Siapa aktor utama dalam politik dunia? Apa yang harus dilakukan negara-negara?

Realisme, dalam upayanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, “menekankan keutamaan negara dan keamanan nasional” (Gilpin, 1987: 42). Kalangan realis, mulai dari Thucydides hingga Pangeran Henry de Rohan, mulai dari Matternich hingga Henry Kissinger, selalu percaya bahwa “sistem internasional itu anarkis, tanpa otoritas menyeluruh yang memberikan keamanan dan keteraturan” (Zakaria, 1993). Dalam keadaan anarkis ini, masing-masing negara—aktor utama—dengan demikian harus bersandar pada dirinya sendiri untuk bertahan dan berkembang. Kepentingan negara merupakan sesuatu yang utama dan konstan; musuh dan sahabat hanya bersifat sementara. Akumulasi kekuasaan adalah kepentingan obyektif negara.

Sebaliknya, idealisme, melihat negara sebagai pengejawantahan ideal-ideal moral. Hubungan antarnegara dengan de-

mikian harus mencerminkan ideal-ideal ini. Dunia sangat mungkin disempurnakan. Apa yang harus dilakukan negara adalah—dalam bahasa Kantian—mencari landasan utama yang menjadi tumpuan di mana “perdamaian terus-menerus” (*perpetual peace*) bisa diwujudkan. Idealisme percaya bahwa, pada akhirnya, negara hanyalah serangkaian lembaga yang menyediakan mekanisme-mekanisme yang dibutuhkan manusia untuk mewujudkan kemanusiaan mereka (Fukuyama, 1992). Komunitas dunia dan hukum internasional diyakini oleh kaum idealis mampu mengarahkan jalannya politik dunia.

Dalam perdebatan “baru” di wilayah ekonomi politik tersebut, kaum merkantilis dan, sampai tingkat tertentu, kaum Marxis, bisa dianggap sebagai kaum realis dalam selubung baru. Memang, merkantilisme, tidak seperti Marxisme dan liberalisme, bukan merupakan suatu kumpulan teori ekonomi dan politik yang koheren dan sistematis. Ia (hanya) “serangkaian tema atau sikap” (Gilpin, 1987: 31). Meskipun demikian, kita bisa melihat bahwa terdapat beberapa gagasan utama yang pada dasarnya bisa disebut merkantilis. Inti gagasan-gagasan ini adalah keyakinan bahwa aktivitas ekonomi harus digunakan untuk meningkatkan kekuasaan, kekayaan, dan keamanan negara.

Bagi kaum merkantilis, hubungan internasional hanyalah sebuah tahap di mana berbagai negara atau bangsa bersaing demi mendapatkan sumberdaya untuk bertahan hidup, menjadi kaya, kuat, dan besar. Proteksionisme, misalnya, dilihat sebagai suatu alat yang sah untuk memperkuat negara. Negara harus menjual sebanyak mungkin barang ke dunia luar—dan pada saat yang sama ia harus mencoba semaksimal mungkin untuk mengurangi impor. Jelas bahwa seperti kaum realis, negara bagi kaum merkantilis merupakan pemain utama: kelangsungan hidup dan kekayaannya harus menjadi perhatian utama dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Karena itu, di sini

kita dapat melihat bahwa merkantilisme, sebagaimana yang ditulis Gilpin, “didasarkan pada doktrin realis tentang hubungan internasional” (1987: 42).

Marxisme tentu saja merupakan doktrin yang lebih sistematis dan menyeluruh dibanding merkantilisme. Marxisme adalah sebuah cara pandang, sebuah teori besar, yang memuat suatu posisi filosofis yang jelas tentang hubungan bukan saja antar-negara, melainkan juga antara manusia dan masyarakat. Selain itu, Marxisme, tidak seperti merkantilisme dan realisme politik, memiliki semacam kesulitan dalam melihat negara sebagai sebuah badan yang otonom dalam sepak-terjangnya di kancah internasional. Bagi kaum Marxis, secara teoretis kelas sosial merupakan aktor utama, dan negara hanyalah alat kelas borjuis untuk mengejawantahkan kepentingannya.

Namun, setelah Lenin, Marxisme menambahkan berbagai sarana analitis yang sangat kuat pada tradisi intelektualnya, yakni teori imperialisme dan negara.⁶³ Di sini perdagangan internasional dilihat hanya sebagai tahap di mana negara-negara kapitalis bersaing untuk memperluas pasar dan menaklukkan pemain-pemain yang kurang kuat (Heilbroner, 1986). Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan kancah yang penuh tipu muslihat di mana kekuasaan adalah matauang yang sebenarnya. Pertempuran kelas di dalam negeri diubah menjadi pertempuran internasional di antara berbagai negara demi mendapatkan kekuasaan dan kekayaan: negara (kapitalis), dan bukannya kelas-kelas sosial, telah menjadi pemain utama dan unit analisis. Dengan demikian, di sini kita bisa berkata bahwa kaum Marxis-Leninis, seperti kaum merkantilis, menerima doktrin lama kaum realis.

Liberalisme, tidak seperti merkantilisme dan Marxisme, datang dari arah yang berbeda. Sebuah doktrin huma-

63 Tentang tradisi intelektual Marxisme yang begitu panjang, mungkin buku terbaik yang bisa dibaca adalah trilogi Kolakowski, *Main Currents of Marxism* (1986).

nistik, liberalisme percaya bahwa manusia itu rasional: mereka tahu apa yang baik bagi diri mereka sendiri. Sebagai sebuah doktrin ekonomi, ia percaya bahwa pasar, jika dibiarkan bebas, akan menguntungkan semua pihak. Mulai dari Smith, Hayek, hingga Friedman, kaum liberal percaya bahwa perdagangan bebas merupakan satu-satunya jalan bagi dunia untuk meningkatkan kekayaannya. Sebagaimana yang dikemukakan Hayek (1988: 38-45), pasar, melalui mekanisme harga yang “rasional”, tahu bagaimana mengalokasikan sumberdaya-sumberdaya yang langka dengan cara yang paling efisien. Negara dilihat sebagai keburukan yang diperlukan. Negara akan membahayakan kepentingan semua pihak jika ia mencoba untuk mengatur pasar terlalu jauh. Bagi kaum liberal, aktor-aktor utama dalam perdagangan internasional bukan negara melainkan para produsen dan konsumen.

Seperti idealisme politik dalam politik internasional, liberalisme didasarkan pada beberapa asumsi moral, yang mengatasi dunia praktis atau “riil”, dan yang, sebagaimana dikemukakan Gilpin (1987: 27), tidak bisa diverifikasi secara empiris. Bagi kaum liberal, rasionalitas manusia mengandaikan bahwa manusia tahu bagaimana memaksimalkan keuntungan mereka, dan bagaimana membuat keputusan-keputusan yang baik—apa yang diperlukan manusia adalah suatu keadaan yang damai dan masuk akal untuk mengejawantahkan kemampuan alamiah ini. Seperti kaum idealis, kaum liberal juga percaya bahwa lembaga-lembaga dunia seperti IMF dan GATT mampu membantu memajukan dunia ke tingkat yang lebih kaya dan sehat.

Jadi, kita telah melihat bahwa, sampai tingkat tertentu, perbedaan antara merkantilisme dan Marxisme di satu sisi, dan liberalisme di sisi lain, mencerminkan perbedaan antara realisme dan idealisme. Tampak bahwa asumsi-asumsi dasar teori-teori ekonomi politik internasional tidak bergerak terlalu

jauh dari asumsi-asumsi dasar realisme dan idealisme. Dengan demikian, dalam hal ini kita bisa berkata bahwa perdebatan dalam kepustakaan ekonomi politik hanya mengulangi permainan lama “pada lapangan permainan baru”.

Meskipun demikian, tidak benar jika kita berkata bahwa perdebatan “baru” di wilayah ekonomi politik tersebut tidak memberi kita banyak pemahaman yang bermanfaat tentang dunia. Kita banyak belajar tentang dunia dari perdebatan yang terus-menerus terjadi di antara berbagai aliran pemikiran di bidang ini. Kaum liberal, misalnya, dalam usaha mereka untuk meyakinkan kita tentang manfaat-manfaat perdagangan bebas, memperlihatkan bagaimana di dunia baru tersebut negara menjadi semakin tidak relevan. Kenichi Ohmae (1990), misalnya, menyatakan bahwa dunia kini menjadi “tidak terbatas” (dalam hal keuangan dan produksi), dan karena itu sulit untuk tidak percaya bahwa kemampuan negara untuk menjalankan kebijakan telah sangat terkikis.

Di sisi lain, Marxisme memperlihatkan suatu kenyataan yang menarik bahwa, sebagaimana yang dijelaskan Giovanni Arrighi (1991), ketika perdagangan internasional menjadi semakin terglobalkan, ketidaksetaraan pendapatan dunia meningkat. Para aktor (swasta) global gagal untuk memperbaiki kehidupan negara-negara miskin. Arrighi memperlihatkan pada kita bahwa persoalan keadilan dan kesetaraan menjadi semakin rumit dipahami, apalagi dipecahkan, ketika kompleksitas perdagangan dunia meningkat.

Demikianlah, kita diberi berbagai pemahaman baru tentang bagaimana dunia (baru) berjalan. Perbedaan dalam asumsi-asumsi dasar merkantilisme, Marxisme, dan liberalisme tentu saja tetap tidak berubah. Namun dalam usaha mereka untuk menajamkan argumen-argumen mereka, kita disodori berbagai fakta, perspektif, dan nuansa baru yang memperkaya pemahaman dan pandangan kita.

Daftar Rujukan

1. Gilpin, Robert (1987), *The Political Economy of International Relations*, Princeton Univ. Press.
2. Zakaria, Fareed (1993), "Is Realism Finished?", *The National Interest*, Spring 1993.
3. Heilbroner, Robert (1986), *The Worldly Philosopher: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers*, Simon and Schuster.
4. Fukuyama, Francis (1992), *The End of History and The Last Man*, The Free Press.
5. Hayek, Friedrich (1988), *The Fatal Conceit*, edited by W.W. Bartley III, The Univ. of Chicago Press.
6. Arrighi, Giovanni (1991), "World Income Inequalities and the Future of Socialism", *New Left Review*, Sept/Oct 1991.
6. Ohmae, Kenichi (1990), *Borderless World: Power and Strategy in the Interlink Economy*, HarperCollins Publisher.

Reformasi Ekonomi di Cina dan Uni Soviet: Sebuah Perbandingan

SEKARANG INI kita telah tahu hasil reformasi ekonomi Gorbachev dan Deng Xiaoping. Perestroika, meminjam kata-kata Anders Aslund, “merupakan suatu kegagalan ekonomi yang menyedihkan” (1991: 1). Ia malah semakin menjerumuskan perekonomian Soviet ke dalam krisis, dan kemudian memiliki andil terhadap lengsernya penggagasnya, Gorbachev. Sebaliknya, reformasi di Cina telah menjadikannya salah satu negeri dengan perekonomian yang paling cepat tumbuh di dunia, tanpa inflasi tinggi yang lazimnya mengancam sebuah perekonomian yang tumbuh dengan cepat (*The Economist*, 07/02/1993). Tahun lalu, sementara Gorbachev tersingkirkan dan perekonomian Soviet (kini Rusia) tenggelam dalam lautan masalah yang lebih dalam, perekonomian Cina tumbuh 12%, sebuah angka pertumbuhan yang melampaui Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan.

Dengan kata lain, sementara reformasi ekonomi Gorbachev gagal, reformasi Deng Xiaoping, sebagaimana dikemukakan sejarawan Paul Kennedy, “mungkin suatu hari dilihat dengan cara para sejarawan melihat Prancisnya Colbert, atau tahap-

tahap awal berkuasanya Frederick The Great, atau Jepang pada dekade-dekade pasca-Restorasi Meiji” (1987: 448).

Tulisan ini akan membahas mengapa perbedaan yang mencolok ini terjadi. Agar pembahasan ini tetap fokus, saya hanya akan melihat jalannya reformasi ekonomi tersebut dari tiga sektor khusus: pertanian, industri dan perdagangan, dan keuangan (harga). Dengan membandingkan reformasi di sektor-sektor ini kita mungkin dapat lebih memahami mengapa Gorbachev gagal dan Uni Soviet runtuh, sedangkan Deng di Cina, dari sudut pandang ekonomi, sampai sejauh ini sangat berhasil.

Sebelum membahas reformasi ekonomi di Cina dan Uni Soviet, saya akan menjabarkan model ekonomi Stalinis, yang merupakan target utama untuk direformasi di kedua negara tersebut. Pada bagian terakhir saya akan membahas beberapa penjelasan sosio-politik terhadap reformasi tersebut. Dalam melakukan hal tersebut saya mengandaikan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah reformasi ekonomi bukan hanya bersandar pada reformasi itu sendiri sebagai serangkaian program ekonomi yang konsisten dan berorientasi ke depan, melainkan juga pada beberapa faktor sosio-politik yang membantu, atau merintang, para pembaharu untuk menjalankan program-program yang tepat.

Dua Model Ekonomi

Perekonomian Soviet dan Cina memiliki beberapa ciri dasar yang sama. Ajaran-ajaran dasar Marxisme merupakan fondasi kedua perekonomian tersebut. Dalam kedua perekonomian tersebut, alat-alat produksi dimiliki dan dijalankan oleh publik (yakni negara), dan harga “diatur secara sosial” oleh para perencana pusat. Tentu saja terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan antara kedua perekonomian tersebut, sebagaimana yang akan saya perlihatkan nanti. Namun pada titik

ini kita bisa mengatakan bahwa kedua perekonomian itu, meminjam istilah Daniel Bell, adalah perekonomian yang dimobilisasi, di mana birokrasi negara merencanakan dan mengatur semua sektor perekonomian.

Di Uni Soviet, Stalin adalah orang yang merampungkan semua fondasi perekonomian yang berlangsung hingga periode Gorbachev. Dalam model Stalinis tersebut, prioritas ekonomi adalah memperluas industri-industri berat yang memproduksi bahan-bahan mentah dan mesin—batu bara, baja, traktor, truk, dll. Industri-industri konsumen dan jasa hampir sepenuhnya diabaikan (Goldman, 1983). Sang perencana pusat negara, Gosplan, merancang hampir semua target hasil kotor (*val*) yang akan diproduksi oleh berbagai industri. Para manajer dalam industri-industri tersebut tidak banyak memiliki otonomi untuk melakukan apa yang mereka anggap tepat untuk meningkatkan bisnis mereka.

Harga ditetapkan oleh Goskomtsen. Setiap tahun, menurut Shemelev dan Popov (1989: 167), Goskomtsen harus menyetujui 200.000 harga dan tarif barang-barang dan jasa. Karena harga dalam model Stalinis ini bukan merupakan cerminan dari dinamika hubungan antara permintaan dan penawaran, tidak terdapat metode yang jelas bagaimana para birokrat di Goskomtsen bekerja. Kata kunci mereka adalah “harga-harga yang diatur secara sosial”. Namun tak seorang pun yang benar-benar memahami apa maksudnya. Menurut Daniel Bell (1991: 52), apa yang sesungguhnya dilakukan oleh para birokrat tersebut adalah membuat “perkiraan-perkiraan liar yang didasarkan pada jenis aritmetika ekonomi primitif, suatu sudut pandang yang sama ‘rumit’-nya sebagaimana pernyataan Lenin... bahwa menjalankan administrasi negara sama kompleksnya seperti menjalankan kantor pos!”

Sektor-sektor pertanian dibagi menjadi perkebunan kolektif dan negara. Para pekerja di perkebunan-perkebunan negara

(*soukhozy*) dijamin dengan gaji yang pasti, sedangkan di perkebunan-perkebunan kolektif (*kolkhozy*) mereka bisa mendapatkan bonus jika target hasil bisa ditingkatkan. Pekerjaan-pekerjaan menggarap tanah, bercocok tanam, dan memanen di kedua perkebunan tersebut diputuskan bukan oleh para petani melainkan oleh para birokrat yang bekerja sebagai manajer perkebunan. Dalam merancang model pertanian ini, Stalin menggunakan metode koersif yang sangat ketat yang merupakan salah satu bentuk kekejaman di masanya (Medvedev 1989: 230-240). Tujuan dasarnya adalah menggunakan sektor-sektor pertanian sebagai penopang yang menjadi tempat untuk menghasilkan sumberdaya-sumberdaya yang dibutuhkan bagi industrialisasi. Harga hasil-hasil pertanian karena itu dipatok sangat rendah agar para pekerja di kota-kota bisa mengkonsumsinya. Dengan kata lain, para petani dikorbankan. Mereka harus menggarap tanah yang bukan milik mereka sendiri, memberi makan sapi-sapi yang bukan milik siapapun, di bawah bimbingan ketat para manajer perkebunan, dengan gaji yang rendah (lihat Goldman 1983: 63-87; Desai 1989: 15-19).

Di Cina, model ekonomi Stalinis ini merupakan cetak-biru bagi Rencana Lima Tahun Pertama-nya (FFYP) pada pertengahan 1950-an, yang menjadi dasar bagi perkembangan perekonomian berikutnya. Penggunaan model Soviet ini, menurut Harry Harding (1987: 14), sangat ironis karena “Partai [Komunis Cina] berhasil merebut kekuasaan hanya ketika ia menolak model pemberontakan kota Soviet dan lebih memilih strategi peperangan terus-menerus para petani”.

Superbirokrasi Stalinis tersebut kemudian dibentuk--yang merancang dan mengatur hasil dan harga berbagai industri dan perusahaan nasional. Perluasan industri berat juga ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam sistem ekonomi tersebut, dengan mengorbankan industri ringan dan industri konsumen. 38 persen investasi modal dari budget negara dialokasikan

ke konstruksi industri-industri berat—di Uni Soviet alokasi ini 30%. Dan kepemilikan pribadi di sektor industri kota sepenuhnya diberikan kepada negara dan perkumpulan-perkumpulan pekerja pada 1956 (Riskin, 1987).

Di sektor-sektor pertanian, tanah dan modal, yang telah didistribusikan ulang melalui reformasi tanah kepada para petani pada awal 1950-an, digabungkan, pertama-tama ke dalam “tim bantuan bersama”, kemudian ke koperasi-koperasi, dan kemudian ke perkebunan-perkebunan kolektif, mirip dengan perkebunan-perkebunan kolektif Soviet. Pada 1957, ketika proses kolektivisasi ini akhirnya selesai, terdapat total 760.000 hingga 800.000 koperasi perkebunan, masing-masing terdiri atas 160 keluarga, atau 600 hingga 700 orang (Hsu 1990: 653). Di perkebunan-perkebunan kolektif ini keputusan dalam hal produksi tidak ada pada para petani melainkan pada para kader partai dan pejabat pemerintah. Di sini, sebagaimana dijelaskan Gordon White (1987: 414), ketika para petani tersebut tidak menyukai keputusan para kader atau pejabat lokal, “mereka biasanya hanya dapat menggunakan metode-metode perlawanan informal (menggerutu sendiri atau semi-publik, malas bekerja, pencurian kecil-kecilan, dan penghindaran kerja)”.

Tentu saja, di Cina, perwujudan model Stalinis tersebut bukan tanpa tentangan. Secara umum kita dapat mengatakan bahwa setelah FFYP, apa yang terjadi adalah serangkaian eksperimen terus-menerus untuk memodifikasi, atau bahkan menjauh dari, ajaran-ajaran ekonomi dasar Stalinis tersebut. Para pemimpin Cina bukan merupakan murid-murid yang tidak kritis dari kawan-kawan Soviet mereka. Mereka mencoba mencari jalan sendiri dengan ciri-ciri Cina yang kuat. Beberapa isu menarik perhatian mereka, seperti perbedaan yang semakin besar antara sektor kota dan pedesaan, kesenjangan yang semakin meningkat di antara kelompok-kelompok masyarakat, korupsi dan birokratisasi negara.

Kita pada dasarnya bisa membagi dua reaksi yang berbeda terhadap model Stalinis di Cina, yang dampak-dampaknya memengaruhi ekonomi hingga akhir 1970-an. Pertama, reaksi teknokratik-modernis, yang dilancarkan selama periode perbaikan setelah Lompatan Besar ke Depan. Di sini, para pemimpin Cina, yang dipimpin bukan oleh Mao melainkan oleh Deng Xiaoping dan Liu Shaoqi, mencoba untuk merasionalisasikan perencanaan birokratis tersebut dengan memberi otoritas yang lebih besar kepada para manajer dan teknokrat. Negara juga memberikan “keleluasaan yang besar bagi otoritas-otoritas di unit-unit produksi lokal untuk memberikan insentif-insentif keuangan bagi para pekerja dan petani untuk memacu semangat dan meningkatkan produksi” (Meisner, 1986: 226).

Namun andil yang paling penting dari reaksi teknokratik-modernis ini terletak pada pengakuan para pemimpin bahwa pertanian, dan bukan industri-industri berat, harus menjadi fondasi Cina untuk membangun suatu perekonomian yang kuat. Dengan demikian, model Stalinis tersebut dibalikkan. Karena itu, dari 1963 hingga 1965 andil pertanian terhadap pembentukan modal naik menjadi 18,8% dari hanya 7,8% selama periode FFYP (Riskin, 1987: 152). Dari eksperimen “kebijakan-kebijakan ekonomi baru” inilah reformasi pada akhir 1970-an tersebut menampakkan hasilnya, sebagaimana yang akan saya jabarkan nanti.

Reaksi kedua adalah reaksi Maois. Melalui Lompatan Besar ke Depan dan Revolusi Budaya, apa yang coba dilakukan Mao pada dasarnya menyerang kecenderungan-kecenderungan dasar dalam model Stalinis tersebut (birokratisasi, sentralisasi) dengan visi populis dan egaliternya. Sebagaimana di Yunnan beberapa dekade yang lalu, ia mencoba untuk menggantikan jaringan ketat birokrasi dengan aktivitas-aktivitas massa yang spontan dan revolusioner. Dari sisi ekonomi, reaksi Maois ini, dalam ungkapan Schurmann, lebih merupakan produk visi dan

bukan sebuah rencana. Tentu saja, selama Revolusi Budaya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Meisner (1986: 374, 383), Mao memiliki andil yang signifikan dalam memperbaiki model ekonomi tersebut dengan memperluas industrialisasi pedesaan dan dengan memindahkan kontrol atas banyak perusahaan dari kementerian di Peking ke administrasi provinsi untuk mendesentralisasi bangunan industri negara.

Namun sampai tingkat tertentu kita bisa berkata bahwa, terlepas dari semangat revolusioner dan egaliternya, reaksi Maois tersebut gagal melucuti ciri-ciri dasar model Stalinis tersebut. “Setelah 1969, struktur dasar hubungan-hubungan produksi di berbagai pabrik,” tulis Meisner, “sebagian besar masih tetap sama seperti pada tahun-tahun sebelum 1966” (1986: 382). Antara 1970-1975, sektor pertanian hanya menerima 10% dari investasi negara, dan dengan demikian kurang dari jumlah yang diterimanya dalam periode reaksi teknokratis-modernis yang saya jabarkan di atas. Dan obsesi untuk memperluas industri-industri berat dengan mengorbankan industri-industri konsumen dan kecil tetap tidak berubah: antara 1970-1975 perluasan tersebut menghabiskan 50% dari total investasi negara. Pendeknya, reaksi Maois tersebut, sebagai sebuah model ekonomi alternatif, memperkuat beberapa elemen dasar model Soviet tersebut, meskipun pada saat yang sama ia mengubah elemen-elemen yang lain (Harding, 1987: 17).

Reformasi Ekonomi

Model ekonomi Stalinis inilah yang ingin dikikis oleh reformasi di Soviet di bawah Gorbachev dan di Cina di bawah Deng. Reformasi tersebut didorong oleh berbagai kesulitan ekonomi di kedua negara itu. Di Uni Soviet, sejak pertengahan 1960-an, perekonomian hampir berhenti tumbuh. Industri-industri berat hanya bisa menghasilkan bahan-bahan mentah dan kebutuhan-kebutuhan dasar, tanpa mampu bergerak ke tahap perkembang-

an industri berikutnya untuk menghasilkan produk-produk berteknologi maju. Dan pada akhir 1970-an, seperti yang ditulis oleh Paul Kennedy (1987: 491), Uni Soviet telah menjadi salah satu importir biji padi terbesar di dunia (40 juta ton per tahun). Di wilayah sosial, vodka menjadi alat bagi para pekerja untuk lari dari kenyataan yang pahit dan menyakitkan di tempat kerja (Hosking 1990: 401). Pada 1980, angka kematian bayi di negara ini adalah 27,7—tertinggi di kalangan negara-negara industri.

Di Cina, apa yang terjadi sangat berbeda. Kinerja ekonomi di akhir era Maois tidak begitu buruk. Sejak 1965, industri tumbuh di atas 10% per tahun, pertanian 4%, dan GNP 6,5% (Riskin, 1987: 257). Krisis yang terjadi lebih struktural, yang dapat dilihat dari kenyataan bahwa ketika industri dan pertanian tumbuh sangat cepat selama 10 tahun, hasil padi dan konsumsi per kapita hanya tumbuh sedikit (4,0% dan 1,1%), dan standar hidup riil para petani tidak membaik (Hsu, 1990: 843). Bagi Riskin (1987), kelemahan-kelemahan dasar dari era Maois akhir adalah irasionalitas rencana-rencana birokratis, dan kurangnya insentif bagi perekonomian untuk menghasilkan barang-barang konsumsi dan jasa—suatu kelemahan yang inheren dalam model ekonomi Stalinis.

Pada titik ini, kita dapat berkata bahwa perbedaan antara reformasi di Uni Soviet dan Cina dapat dilihat dari kedalaman dan intensitas krisis yang mendorong reformasi tersebut. Deng tidak menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi separah yang dihadapi Gorbachev.

Perbedaan mencolok antara reformasi di Cina dan Uni Soviet tersebut dapat dilihat dalam keberanian, pragmatisme, dan konsistensi program-program reformasi mereka. Di Cina, seperti yang akan saya tunjukkan di bawah, setelah Plenum Ketiga pada 1978, Deng menjalankan berbagai program yang konsisten, pragmatis, dan berorientasi ke depan, untuk mengikis warisan ekonomi Stalinis-Maois. Sebaliknya, Gorbachev, terle-

pas dari keberhasilannya dalam merevitalisasi perusahaan-perusahaan koperasi berskala-kecil, dan terlepas dari berbagai pencapaian besarnya di wilayah hubungan internasional dan liberalisasi sistem politik, gagal menjalankan suatu program yang signifikan—*shock-therapy* dalam bahasa para pelaku pasar bebas—untuk mengangkat perekonomian dari kemandekan (Aslund 1991). Dan sampai tingkat tertentu, Gorbachev bahkan bisa dianggap sebagai rintangan bagi reformasi ekonomi yang sesungguhnya: ketika program 500-hari diperkenalkan oleh Kelompok Shatalin pada 1990—sebuah program untuk melakukan reformasi berjangkauan-luas dan berani di wilayah ekonomi—ia mengorganisasi, dalam ungkapan Aslund, sebuah “sirkus sejati” untuk menghalanginya (Aslund, 1991: 209).

Pertanian

Reformasi di bidang pertanian merupakan contoh yang sangat jelas tentang betapa berani dan konsistennya reformasi ekonomi di Cina, dan betapa tidak tepat dan membingungkannya reformasi di Uni Soviet. Para pembaharu Cina, yang terinspirasi oleh eksperimen sebelumnya pada 1960-1965, menjadikan sektor-sektor pertanian sebagai target pertama mereka dan menjadikannya sebagai tulang-punggung bagi reformasi lebih jauh di bidang ekonomi. Pertama, dimulai dengan panen musim panas pada 1979, harga hasil-hasil pertanian meningkat 20%, dengan premi 50% tambahan bagi penjualan-penjualan di atas-kuota. Setiap tahun hingga 1984, harga-harga ini meningkat sekitar 3 sampai 4%. Dan ketika peningkatan harga ini terlalu banyak menyerap bujet negara, kuota yang didapatkan menjadi lebih kecil, dan dengan demikian meningkatkan hasil-hasil pertanian yang dapat dijual dengan bebas dengan harga pasar. Jadi, reformasi ini membalikkan kecenderungan dasar model Stalinis yang mengatur harga-harga hasil pertanian sangat rendah untuk mendukung industrialisasi yang cepat.

Kedua, dan yang paling penting, adalah diperkenalkannya sistem pertanggungjawaban (*pao-kan tao-hu*). Dalam sistem ini tanah secara formal tetap publik, namun dalam praktik hal ini melucuti sistem komune kolektivis. Masing-masing keluarga petani bisa menyewa tanah, menyewa buruh, bebas memilih benih, menggarap tanah, dan sebagainya. Dengan kata lain, para petani diberi hak untuk “memiliki” tanah dan diberi tanggungjawab penuh untuk menjalankan keseluruhan proses produksi (Hsu, 1990: 844). Meskipun negara tetap sangat terlibat dalam mendapatkan hasil pertanian dan memberikan subsidi, reformasi ini pada dasarnya mengubah produksi pertanian dari pekerjaan kolektif menjadi pekerjaan pribadi. Pada 1984, 98% keluarga petani termasuk dalam sistem pertanggungjawaban ini.

Hasil reformasi tersebut sangat spektakuler. Dari 1979 hingga 1985, nilai kotor hasil pertanian naik 10,5% per tahun. Pada 1984, negeri itu menghasilkan 407 juta ton padi, suatu rekor dalam sejarahnya. Dan menurut Paul Kennedy, “antara 1979 dan 1983—ketika banyak negara di dunia mengalami depresi ekonomi—800 juta orang Cina di wilayah pedesaan meningkat penghasilannya sekitar 70%” (1987: 452).

Banyak orang menganggap bahwa ketika Gorbachev menjalankan reformasi pertaniannya, ia akan membebaskan para petani dari rezim Stalinis yang sangat kejam dan mengikuti contoh Cina. Namun, seperti dikatakan oleh Hendrick Smith (1991: 210), di Uni Soviet “sektor pertanian merupakan sebuah rawa yang stagnan, sebuah simbol yang sangat jelas dari apa yang salah dengan kebijakan ekonomi Soviet”. Ia pernah menjadi menteri pertanian: ia tahu bahwa pada 1982 setengah dari 50.000 negara bagian dan perkebunan-perkebunan kolektif mengalami kerugian. Dengan demikian, Gorbachev memiliki alasan untuk mengikis sistem yang ada, seperti yang dilakukan Cina 6 tahun sebelumnya.

Namun, anehnya, Gorbachev tidak melakukan apa yang ia anggap akan dilakukannya. Ia memulai reformasi pertaniannya “bukan di tingkat bawah, dengan para petani, seperti yang dilakukan Deng Xiaoping, melainkan di tingkat atas, dengan birokrasi” (Smith, 1991: 211). Langkah penting pertamanya adalah membentuk Komite Negara untuk Agroindustri—sebuah kementerian-super baru—yang mengkoordinasi 5 kementerian yang lain. Dalam reformasi ini, para birokrat masih memberi perintah kepada para petani tentang bagaimana dan apa yang akan diproduksi. Tidak ada yang berubah kecuali cara perintah datang dari atas. “Hal ini melanggengkan mentalitas perintah ...dan tampak semakin memperparah kekacauan pertanian, bukan mengatasinya” (Smith, 1991: 212).

Memang, setelah menyadari bahwa reformasi yang ia jalankan gagal, Gorbachev membubarkan kementerian-super tersebut pada 15 Maret 1989, dan menyerukan dilaksanakannya reformasi baru yang secara bertahap akan membawa sektor-sektor pertanian ke sebuah sistem pasar baru yang akan memberi kebebasan sepenuhnya kepada para petani untuk memilih dan menjual produk-produk mereka. Namun di sini faktor-faktor birokratis dan politik memainkan peran penting: Ligachev, saat itu orang kedua di dalam partai, dan orang-orang garis keras yang lain berhasil mencegah langkah reformasi baru ini. Karena itu, pada 1990, menurut Shemelev dan Popov (1991: 103), 90% perekonomian riil di sektor pedesaan masih dijalankan oleh sistem administratif lama. Dengan kata lain, reformasi pertanian tersebut gagal mengikis warisan dasar Stalinis.

Harga

Untuk melihat bagaimana reformasi berjalan di Cina dan Uni Soviet, kasus menarik berikutnya adalah reformasi harga. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, pengaturan harga

merupakan salah satu prinsip paling mendasar dari model Stalinis. Harga dibekukan dan dipatok sangat rendah, yang tidak mencerminkan apa yang disebut sebagai “nilai barang” yang digambarkannya. Karena itu, alokasi sumberdaya tidak bisa efisien dan hubungan perekonomian dengan pasar internasional tidak dapat dihitung secara rasional. Tanpa meninggalkan, atau paling tidak mengubah, ajaran dasar model Stalinis ini, keseluruhan perekonomian tidak bisa menjadi efisien dan perdagangan luar negeri tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, mereformasi sistem harga merupakan suatu langkah yang mutlak bagi reformasi sejati.

Di Cina, mengikuti contoh Hungaria beberapa tahun sebelumnya, reformasi harga dijalankan pada awal 1980-an, setelah diumumkan pada April 1979. Tujuannya pada dasarnya memberi pasar suatu peran yang jauh lebih besar dalam menentukan harga. Dalam praktik, apa yang dilakukan para pembaharu tersebut adalah menetapkan tiga kategori harga: harga pasti (diatur oleh pemerintah), harga mengambang, dan harga pasar. Industri-industri yang paling penting seperti baja, batu bara, dan minyak tanah masuk ke dalam harga tetap, namun harga-harga dari banyak barang konsumen biasa dan barang produsen dibiarkan bergerak sesuai dengan kondisi pasar (Riskin, 1987: 352).

Pada 1985, jumlah produk industri yang dijual dengan harga pasti menurun dari 256 menjadi 29, dan dengan berakhirnya pembelian yang ditetapkan atas produk-produk pertanian, harga daging, ikan, sayuran, dan unggas dibiarkan bergerak bebas sesuai dengan kondisi pasar (Harding, 1987: 111-112). Dan dua tahun sebelumnya, berbagai perusahaan diperbolehkan untuk menetapkan harga sendiri untuk 510 komoditas.

Dengan demikian, menjalankan reformasi ini secara radikal sangat berbahaya karena hal ini mendorong angka inflasi naik dan meningkatkan defisit bujet negara. Indeks harga eceran,

misalnya, naik menjadi 6% pada 1980, 10-11% pada 1985, 7% pada 1986, dan 8% pada 1987; dan defisit bujet negara antara 1978 dan 1985 naik hingga Y100 miliar. Namun, para pembaharu Cina berusaha untuk terus mendorong reformasi sepanjang 1980-an, dengan mengadopsi strategi yang fleksibel dan pragmatis: melakukan penghematan ketika persoalan menjadi terlalu berbahaya, dan maju terus ketika persoalan terkendalikan.

Di Uni Soviet, tidak ada reformasi harga yang signifikan. Hal ini sangat ironis, karena di Uni Soviet pada pertengahan 1980-an terdapat lebih banyak alasan untuk mereformasi sistem harga yang ada: harga roti tidak berubah sejak 1952, dan harga eceran resmi dari negara atas daging dan produk-produk harian tidak berubah sejak 1962. Selain itu, pada akhir 1980-an, sebagaimana yang digambarkan Shemelev, di Uni Soviet ada 25 juta produk yang berbeda yang berada dalam sistem harga yang tersentralisasi, yang perlu diatur ke dalam 25 juta harga yang berbeda oleh Goskomtsen (Hewett dan Winston, ed., 1991: 153). Sangat jelas bahwa tidak banyak hal yang dapat diperbaiki sebelum mereformasi sistem harga yang tak rasional ini.

Tentu saja terdapat beberapa usaha untuk mengundang dan menjalankan reformasi harga ini. Contoh paling penting dari usaha ini adalah diperkenalkannya Undang-Undang tentang Perusahaan Negara pada 1987, yang memuat beberapa usulan tentang penetapan harga. Namun proposal reformasi itu sendiri sangat ambigu dan membingungkan. Ia menyebutkan sekitar tiga kategori harga, yang mengikuti contoh Cina dan Hungaria, namun tidak pernah menjelaskan secara mendetail apa lingkup masing-masing kategori tersebut. Ia samasekali tidak menyebut harga eceran. Selain itu, ia secara membingungkan menyatakan bahwa penetapan harga harus mencerminkan “biaya sosial yang dibutuhkan”. Pendeknya, seperti yang di-

katakan Aslund, proposal reformasi ini “membentuk suatu campuran mustahil dari prinsip-prinsip yang saling bertentangan” (1989: 132).

Segera setelah diumumkannya proposal itu, Valentine Pavlov, Ketua Goskomtsen, mengeluarkan sebuah undang-undang otoritatif di Pravda. Ia menyatakan kembali bahwa, seperti yang dikutip oleh Aslund (1989: 132), Goskomtsen akan menetapkan harga-harga “bahan bakar dasar, bahan mentah, dan jenis-jenis produksi dasar yang lain.” Tidak banyak ruang yang diberikan kepada pasar untuk menentukan harga. Dengan kata lain, proposal reformasi tersebut gagal, bahkan sebelum ia dijalankan.

Usaha kedua dilakukan pada 1990, ketika Kelompok Shatalin mengusulkan program 500-hari kepada Majelis Agung Soviet. Program ini merupakan program yang paling radikal yang pernah diusulkan oleh para pembaharu. Ia mengusulkan untuk secara radikal membebaskan sistem harga, dalam jangka waktu yang sangat dekat. Namun, sekali lagi, kelompok garis keras, kali ini dipimpin oleh Gorbachev sendiri, berhasil menghalangi proposal ini. Majelis Agung Soviet menolak program tersebut. Dengan demikian, Uni Soviet pada dasarnya tetap memberlakukan sistem harga Stalinis hingga keruntuhannya pada 1991.

Industri dan Perdagangan

Dalam wilayah reformasi ini, pada dasarnya apa yang dilakukan oleh para pembaharu Cina adalah: Pertama, membuat perusahaan-perusahaan negara lebih responsif terhadap realitas perdagangan yang terkait dengan kualitas dan tuntutan pasar. Didorong oleh eksperimen yang berhasil di bidang pertanian, mereka mencoba membuat industri dan perusahaan menjadi lebih efisien dan kompetitif dengan memperkenalkan Sistem Pertanggungjawaban Industri. Dalam sistem ini, meskipun pe-

merintah pusat masih memegang hak untuk memutuskan rencana-rencana makro-ekonomi, perusahaan-perusahaan negara dituntut untuk bertanggungjawab atas semua keputusan ekonomi mereka, serta atas keuntungan atau kerugian mereka. Mereka juga diizinkan memakai sebagian keuntungan mereka untuk bonus, kesejahteraan pekerja, dan inovasi-inovasi yang lain. Para manajer dan pekerja dengan demikian diberi lebih banyak insentif material untuk bekerja lebih keras dan lebih efisien. Pada 1980, 6.600 perusahaan negara telah masuk dalam sistem ini; dan pada akhir 1982 semua perusahaan industri.

Langkah kedua yang dijalankan oleh para pembaharu tersebut adalah merevitalisasi perekonomian kota dengan memberi prioritas yang lebih besar pada industri konsumen, industri ringan, dan industri jasa agar lebih maju. Dengan demikian obsesi untuk membangun industri-industri berat yang ambisius dibalikkan dan sampai tingkat tertentu diredam. Namun langkah paling penting dalam hal ini adalah keputusan pada awal 1980-an untuk lebih memajukan banyak perusahaan swasta berskala kecil, khususnya yang terkait dengan perusahaan-perusahaan konsumen dan jasa. Hasilnya: bisnis swasta bertambah banyak dari 100.000 pada 1978 menjadi 5,8 juta pada 1983, dan pada 1985 menjadi 17 juta (Hsu 1990: 852). Dibantu oleh reformasi harga di atas, perusahaan-perusahaan swasta merupakan sektor yang paling cepat tumbuh dalam industri Cina pada paruh pertama 1980-an, dengan rata-rata angka pertumbuhan 80% per tahun (Harding, 1987: 129).

Langkah ketiga dalam reformasi ini adalah dijalkannya Kebijakan Pintu Terbuka. Dengan kebijakan ini otoritas-otoritas lokal diperbolehkan untuk mengelola investasi asing tanpa persetujuan pemerintah pusat. Dan berbagai undang-undang baru, peraturan tentang pertanggungjawaban dan perlindungan paten dijalankan. Tujuan dasar dari semua langkah ini adalah

untuk menarik lebih banyak investasi dan teknologi asing, serta untuk menghubungkan perekonomian Cina dengan pasar internasional.

Dan salah satu elemen penting dari kebijakan baru ini adalah keputusan untuk membuka zona-zona ekonomi khusus dan membuka berbagai kota sebagai laboratorium bagi model pembangunan masa depan, dan sebagai mata rantai langsung Cina dengan modal internasional. Keputusan ini dapat dikatakan merupakan cerminan dari rasa percaya diri budaya dan politik dalam menjalankan eksperimen ekonomi dengan kapitalisme. Dalam zona-zona ekonomi khusus dan kota-kota terbuka ini perusahaan asing diizinkan untuk beroperasi, praktis dengan andil kepemilikan 100%, mengangkat para pekerja sendiri, dan “memiliki” tanah dengan menyewanya selama berdekade-dekade. Hasilnya, zona-zona dan kota-kota terbuka ini menjadi jendela bagi perekonomian Cina ke dunia luar, yang sangat membantu perdagangan luar negerinya.

Dampak semua reformasi industri dan perdagangan itu sangat mengesankan. Sejak 1978 hasil industri tumbuh sekitar 10% per tahun. Antara 1978 dan 1986, perdagangan Cina dengan negara-negara lain meningkat 2,5 kali lipat. Andil barang-barang manufaktur dalam komposisi ekspornya meningkat dari 55,1 pada 1978 menjadi 62,5 pada 1986. Pada 1978 perdagangan Cina dengan AS adalah -US\$541 juta (defisit), pada 1984 menjadi US\$320 juta (surplus). Andil industri jasa dalam GNP meningkat dari 18,7% pada 1980 menjadi 21,5% pada 1985, dan pada tahun ini juga industri ini mempekerjakan 73,68 juta orang (lihat Hsu, 1990; Harding 1987).

Di Uni Soviet, reformasi penting di wilayah industri dan perdagangan ini adalah diperkenalkannya Undang-Undang Perusahaan Negara pada 1987, undang-undang yang telah saya sebutkan di atas. Di bawah undang-undang ini setiap pabrik harus bertanggungjawab atas keuntungan dan kerugiannya, dan

para direktornya, alih-alih mengikuti rencana yang ditetapkan oleh para birokrat Moskow, diberi kebebasan untuk menandatangani kontrak dengan perusahaan industri lain. Dengan demikian, undang-undang ini merupakan suatu usaha penting untuk ke luar dari warisan sentralisasi Stalinis yang berlebihan.

Namun dalam praktik undang-undang ini memunculkan ambiguitas dan kebingungan bagi para manajer di berbagai perusahaan karena undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa aktivitas-aktivitas perusahaan harus didasarkan pada rencana negara (Brand, 1992). Keputusan-keputusan negara, yang melingkupi hampir semua hasil dari perusahaan-perusahaan negara, harus diberi prioritas tertinggi oleh industri—ini merupakan sistem komando lama dengan nama baru. Perusahaan-perusahaan tersebut juga tetap tunduk pada alokasi investasi modal dan suplai bahan negara. Pendeknya, seperti yang dijelaskan H. Brand (1992), “praktik kontrol pusat tetap berlaku meskipun lingkupnya agak dikurangi”.

Usaha reformasi lain yang penting dijalankan ketika koperasi-koperasi berskala kecil diperbolehkan beroperasi dalam perekonomian. Di bawah Undang-Undang tentang Koperasi yang baru, yang disahkan pada 1988, berbagai koperasi dalam praktik bisa mempekerjakan tenaga kerja sendiri, secara legal diizinkan untuk membentuk bank, menjual saham dan surat obligasi, dan mendapatkan bahan-bahan mentah dari pasar bebas. Satu keluarga dengan tiga orang dewasa diizinkan untuk membentuk sebuah koperasi dan mempekerjakan jumlah non-anggota yang tidak terbatas dengan dasar kontrak. Selain itu, koperasi-koperasi tersebut diberi hak kepemilikan—bukan atas tanah, melainkan atas mesin dan perlengkapan yang digunakan dalam produksi.

Dari sisi ekonomi, reformasi ini merupakan reformasi paling liberal yang pernah dijalankan di Uni Soviet selama masa Gorbachev. Jika diperbandingkan, lingkup reformasi ini ten-

tu saja tidak seluas—dan seberani—seperti yang dijalankan di Cina. Namun, menurut Hendrik Smith (1991), undang-undang koperasi yang melegalkan reformasi ini merupakan piagam hukum pertama bagi perusahaan swasta di Uni Soviet sejak periode NEP pada 1920-an. Dan dampaknya samasekali tidak buruk: pada 1990 terdapat sekitar 110.000 koperasi dalam berbagai jenisnya yang beroperasi; pada 1991 jumlah ini menjadi 245.300 (White, 1992: 119). Pada 1989, koperasi-koperasi tersebut memiliki andil sekitar 5% dari hasil kotor nasional (*New York Times*, 13 Mei 1990).

Dalam perdagangan luar negeri, langkah-langkah yang diambil sejak 1987 sekali lagi mencerminkan ambiguitas dan inkonsistensi reformasi ekonomi tersebut. Pada Januari 1987, Kementerian Perdagangan Luar Negeri dicabut monopolinya. 20 cabang kementerian dan 70 asosiasi besar kemudian diberi hak untuk menjalankan perdagangan luar negeri. Namun sebuah badan kementerian-super juga dibentuk untuk “mengkoordinasi” 20 kementerian dan 70 asosiasi ini. Karena itu, reformasi ini pada dasarnya mengubah monopoli perdagangan luar negeri dari satu birokrasi-super ke yang lain (White, 1992: 121).

Sebuah dekrit baru untuk menarik investasi luar negeri juga dikeluarkan pada 1987. Namun dekrit tersebut mengandung banyak kewajiban dan aturan yang samasekali tidak menarik: bagian Soviet atas sebuah perusahaan paling tidak harus 51%; presiden direktur dan manajer umum harus orang Soviet; kongsi usaha harus dipisahkan dari pasar domestik, dan dipaksa untuk membeli dari, dan menjual kepada, perusahaan-perusahaan Soviet melalui asosiasi-asosiasi perdagangan luar negeri Soviet, dll.

Karena itu, dekrit reformasi itu mengandung berbagai kontradiksi pada dirinya sendiri. Tidak mengherankan jika hasilnya mengecilkan hati: pada Juli 1988 hanya 66 kongsi

usaha yang didaftarkan, sebagian besar darinya adalah usaha-usaha kecil; pada Januari 1990 hanya 337 kongsi usaha yang mulai menjalankan bisnis mereka (White, 1992: 120; Aslund, 1988: 140).

Mencari Penjelasan-penjelasan Sosio-politik

Kita telah melihat bahwa di Uni Soviet reformasi ekonomi tidak dijalankan seluas dan seberani di Cina. Untuk melucuti warisan ekonomi Stalinis, reformasi ekonomi selama era Gorbachev tampaknya mengandung ambiguitas, kesetengahhatian, dan ketidak-konsistenan. Di Cina, meskipun benar bahwa peran fundamental pemerintah pusat dan banyak warisan sosialis dipelihara, reformasi ekonomi pada akhir 1980-an dijalankan dengan berbagai inovasi baru untuk membuka sebuah horison ekonomi baru. Kebijakan Pintu Terbuka yang telah saya kemukakan di atas, misalnya, merupakan ekspresi kepercayaan-diri untuk memutuskan hubungan dengan warisan keterpencilan ekonomi dan ideologis masa lalu, demi untuk mencoba dan belajar sesuatu yang baru. Hal tersebut merupakan suatu langkah pragmatis, namun memiliki implikasi-implikasi yang fundamental. Dan reformasi pertanian—yang mengubah Cina dari pengimpor menjadi pengeksport bahan makanan dalam kurang dari satu dekade—merupakan suatu tindakan yang sangat tepat untuk meninggalkan masa lalu Stalinis-Maois.

Mengapa perbedaan yang mencolok itu terjadi? Mengapa para pembaharu Soviet, tidak seperti Cina, gagal melakukan serangkaian reformasi ekonomi yang baik?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, salah satu penjelasan yang paling umum adalah dengan menghubungkan reformasi ekonomi dengan reformasi politik, dan menyalahkan yang terakhir ini untuk kegagalan yang pertama. Argumen dasar penjelasan ini adalah bahwa para pemimpin Cina bisa melakukan apa yang mereka lakukan di wilayah ekonomi tersebut

karena mereka menjaga struktur politik otoriter tidak berubah. Mereka bisa bergerak dengan cepat, pasti, dan menjalankan berbagai inovasi ekonomi yang berani karena mereka tidak harus menghadapi kekacauan yang dihasilkan oleh sistem politik yang terliberalkan. Sebaliknya, menurut penjelasan ini, Gorbachev mulai dengan reformasi politik, atau paling tidak mulai mereformasi perekonomian pada saat yang sama ketika ia menghancurkan warisan-warisan politik Stalinis. Meskipun reformasi politik yang ia lakukan mungkin secara moral tampak bagus, hal itu bukan merupakan suatu langkah taktis, karena Gorbachev membutuhkan kekuasaan yang kuat dan otoriter untuk menanamkan program-program baru pada sistem ekonomi yang usang dan lapuk.

Jenis penjelasan ini, menurut saya, tidak terlalu meyakinkan. Memang penjelasan ini mungkin benar sampai tingkat tertentu, namun hanya jika, dalam kasus Soviet, kita berbicara tentang 3 tahun terakhir era Gorbachev, ketika berbagai kekuatan, baik kanan maupun kiri, yang diakibatkan oleh reformasi politiknya menciptakan banyak rintangan bagi kekuasaannya. Namun, dalam 4 tahun pertama masa kekuasaannya, sebelum Kongres Wakil Rakyat dibentuk, kekuasaan Gorbachev tidak kurang kuat dibanding kekuasaan Deng. Untuk beberapa tahun pertama ia adalah kepala sebuah struktur politik yang otoriter, sebagaimana halnya Deng—namun ia tidak menjalankan suatu reformasi ekonomi yang signifikan, kuat dan berjangkauan-luas sebagaimana yang dilakukan Deng untuk melucuti warisan ekonomi Stalinis. Dalam reformasi pertanian seperti yang telah kita lihat sebelumnya, misalnya, ia menjalankan reformasi yang pada akhirnya memberikan kekuasaan yang lebih pada birokrasi pusat, yakni kementerian-super yang baru, sebelum ia benar-benar mulai meliberalisasi sistem politik.

Selain itu, dalam kasus Cina, jelas tidak benar jika kita berkata bahwa para pemimpin Cina tidak mereformasi sistem

politik pada saat yang sama ketika mereka mereformasi ekonomi. Sejak 1978, beberapa langkah penting diambil untuk melonggarkan kehidupan budaya dan intelektual, memperluas basis partisipasi rakyat, memisahkan partai dari pemerintah, merasionalisasi dan mereorganisasi militer, dan menciptakan basis yang lebih kuat untuk mewujudkan supremasi hukum (lihat Harding, 1987). Salah satu hasil dari semua reformasi politik ini dapat dilihat dalam kenyataan bahwa sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an di Cina, di bawah Deng, terjadi serangkaian gerakan intelektual “liberal” yang menuntut reformasi politik yang lebih besar yang, seperti yang kita semua tahu, berpuncak pada Lapangan Tiananmen pada 1989. Meskipun Deng tidak bergerak sejauh Gorbachev dalam meliberalisasi sistem politik dengan mendorong sebuah pemilu umum yang “bebas”, misalnya—seperti yang dilakukan Gorbachev pada akhir 1980-an—reformasi politik yang ia lakukan bagaimanapun juga merupakan suatu langkah penting dalam mengubah Cina menjadi, dalam bahasa Harding, sebuah sistem otoriter konsultatif.

Jadi, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya benar. Ia gagal menjelaskan mengapa Gorbachev, misalnya, pada tahun-tahun awal pemerintahannya, ketika reformasi politiknya belum terjadi, tidak dengan tegas berusaha melucuti warisan-warisan ekonomi Stalinis. Penjelasan tersebut juga tidak membantu kita memahami mengapa para pemimpin Cina, tidak seperti para pemimpin Soviet, bisa berhasil dalam menjalankan reformasi ekonomi berskala luas ketika mereka juga mereformasi sistem politik.

Bagi saya, penjelasan yang lebih tepat mungkin harus melihat kenyataan bahwa di Uni Soviet, ketika Gorbachev dan para pembaharu lain berkuasa, negara itu telah mengalami 25 tahun Stalinisme yang begitu mengakar, dengan tingkat ketatan ideologis yang sangat tinggi, di bawah Stalin dan 20

tahun Stalinisme yang stagnan di bawah Brezhnev. Sejarah panjang keketatan dan stagnasi ideologis, seperti yang dijelaskan Zbigniew Brzezinski (1989), membekukan negeri itu dan menjadikannya sangat sulit untuk menerima eksperimen reformasi apapun.

Sebaliknya, di Cina para pembaharu memimpin sebuah negeri yang terus-menerus menjalankan eksperimen-eksperimen sejarah untuk mencari jalannya sendiri dan memperbaiki model Stalinis sejak model ini diteguhkan setelah Rencana Lima Tahun Pertama pada akhir 1950-an. Republik Rakyat Cina adalah suatu republik eksperimen, negeri dengan politik yang terus-menerus bercecabang dan berbagai pembalikan kebijakan yang dramatis. Inovasi-inovasi kebijakan yang mulai setelah Majelis Umum Ketiga pada Desember 1978 dapat dilihat, dari perspektif ini, sebagai kelanjutan dari eksperimen historis yang panjang tersebut dalam bentuk yang lain, dan juga dalam arah yang sangat berbeda.

Selain itu, perbedaan sejarah ini diperkuat dengan perbedaan kepemimpinan—faktor agensi manusia yang sangat penting dalam jalannya reformasi. Di sini kita bisa berkata bahwa, dalam kasus Soviet, Gorbachev, meskipun ia adalah seseorang yang berpandangan ke depan dan demokratis, masih merupakan seorang fungsionaris komunis (*apparatchik*), seseorang yang telah menghabiskan 25 tahun hidupnya untuk membangun kariernya *di dalam* sistem usang yang ingin ia segarkan kembali. Bahkan ketika ia ingin mereformasinya, ia tidak bisa bergerak terlalu jauh dari apa yang telah ia pelajari di bawah sistem tersebut (Kaiser, 1992).

Selain itu, Gorbachev, bahkan hingga masa-masa akhir kekuasaannya, tidak pernah memberi tujuan praktis yang jelas dan tegas dari reformasi ekonominya. Memang ia memberikan banyak pidato dengan kata-kata kunci seperti “*uskoreniye*” dan “*perestroika*”, yang menarik perhatian dunia. Ia menulis sebuah

buku, yang menarik pembaca di seluruh dunia, dan di dalamnya ia berbicara tentang “perubahan-perubahan revolusioner”, “gerakan historis”, “angin kedua sosialisme”. Kata-kata kunci ini, seperti yang telah umum kita tahu, memang menyebarkan suatu gelombang baru semangat politik di Uni Soviet—semua itu membangunkan raksasa yang tertidur. Namun dari sudut pandang ekonomi, kata-kata ini tidak memancing apa-apa kecuali kebingungan. Anders Aslund, ekonom Swedia yang tinggal selama tiga tahun di Moskow di puncak kekuasaan Gorbachev dan mengamati dengan cermat jalannya reformasi ekonomi tersebut, mencoba menemukan makna praktis sejati kata “*perestroika*”—dan, pada 1991, ia sampai pada kesimpulan bahwa baginya “*perestroika*” adalah konsep yang kabur, sebuah kata misterius yang tak seorang pun yang benar-benar tahu apa maknanya, mungkin bahkan Gorbachev sendiri.

Dan, seperti yang ditulis Zbigniew Brzezinski (1989), pada pertengahan dekade 1980-an bukan hanya Gorbachev, melainkan juga sebagian besar pembaharu di Uni Soviet, yang masih terjangkiti keketatan ideologis, suatu ketidakmampuan untuk berpikir jauh melampaui ortodoksi ideologis yang ada. Jadi, ketika mereka memulai reformasi ekonomi, program-program yang mereka jalankan tidak dengan tegas terputus dengan masa lalu Stalinis. Mereka tampak ambigu, setengah-hati, ketika mereka harus memilih apakah masuk dengan cepat ke dalam ekonomi pasar atau secara bertahap mereformasi sistem tersebut dengan menggunakan pendekatan birokratis dan dari atas ke bawah.

Sebaliknya, di Cina, Deng adalah seorang pemimpin yang bisa melampaui ortodoksi ideologis dan mengatasi birokrasi yang ada—ia pernah menjadi korban ortodoksi ideologis ketika ia mencoba, bersama Liu Shaoqi, untuk memodernisasi sistem Stalinis tersebut pada awal 1960-an. Ia ambil bagian dalam revolusi dan, tidak seperti Gorbachev, tidak menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai seorang birokrat atau seorang

aparatus partai. Ketika ia sekali lagi berkuasa pada akhir 1970-an, setelah melalui suatu perjuangan keras untuk bertahan hidup, ia menjadi tahu bagaimana mengesampingkan ortodoksi dan menempatkan ideologi sebagai hal sekunder untuk mencapai tujuan-tujuan praktisnya.

Deng sang pembaharu adalah Deng sang pragmatis yang, tidak seperti Gorbachev, dengan jelas mendefinisikan apa yang ingin ia lakukan terhadap negerinya. Pada Desember 1979, PM Jepang, Masayoshi Ohira, yang sedang berkunjung bertanya: “Apa tujuan Empat Modernisasi anda?” Deng dengan cepat menjawab bahwa tujuannya adalah melipat-empatkan GNP saat itu dari US\$250 miliar menjadi US\$1 triliun pada akhir abad, dengan GNP per kapita US\$1.000 (Hsu, 1990: 841-842). Jawaban tersebut mungkin terlalu sederhana, namun bagaimanapun juga hal itu memperlihatkan suatu determinisme untuk mencapai suatu tujuan praktis yang jelas, tanpa secara kabur mencampuradukkannya dengan ortodoksi ideologis dan retorika muluk-muluk, seperti yang dilakukan oleh hampir setiap pemimpin komunis.

Para pembaharu Cina, tidak seperti para pemimpin Soviet, memperlihatkan banyak contoh tentang bagaimana mereka secara ideologis fleksibel dan pragmatis dalam usaha mereka untuk mengubah negeri mereka. Hu Qiaomu, misalnya, ketika menyampaikan pidato di depan Dewan Negara pada awal 1980-an, menyampaikan seruan untuk “mengelola perekonomian dengan sarana-sarana ekonomi” dan mempelajari pengalaman negara-negara kapitalis (lihat Nina Halpern 1985: 1003). Hu Qili, saat berbicara dengan para propagandis partai beberapa saat setelah Kongres Partai ke-13, memberikan suatu panduan umum: “Apapun yang menguntungkan perkembangan kekuatan-kekuatan produktif diharuskan atau diizinkan oleh sosialisme, dan apapun yang tidak menguntungkannya bertolak belakang dengan sosialisme ilmiah” (dikutip dalam Brzezinski

1989: 174). Fleksibilitas seperti ini dapat dipastikan membuka ruang bagi inovasi ekonomi yang lebih luas, serta kemungkinan yang jauh lebih luas untuk belajar bahkan dari pusat-pusat kapitalisme dunia.

Jadi, singkatnya, semua perbedaan antara para pembaharu di Cina dan Uni Soviet bisa digunakan sebagai dasar bagi penjelasan yang lebih memadai dalam memahami jalannya reformasi ekonomi tersebut. Para pemimpin Cina, dibanding para pemimpin Soviet, lebih memiliki faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi baru yang tegas dan berani untuk mengikis warisan Stalinis-Maois mereka. Karena itu tidak mengejutkan jika di Cina, seperti yang telah kita lihat sebelumnya, sejak awal 1980-an arah dasar reformasi ekonomi telah dihamparkan dengan cukup jelas; sementara di Uni Soviet, bahkan hingga akhir era Gorbachev, arah sebenarnya dari reformasi ekonomi masih diperdebatkan di kalangan para pemimpinnya.

Memang, terlalu menekankan faktor agensi manusia (kepemimpinan) ini akan menjadikan penjelasan kita sangat menyederhanakan. Faktor-faktor kepemimpinan penting, namun semua itu diterapkan dan diwujudkan dalam keadaan dan realitas struktural tertentu, yang membantu atau merintangangi para pemimpin dalam menjalankan reformasi. Dalam hal ini kita misalnya bisa melihat kenyataan bahwa Uni Soviet terdiri atas banyak bangsa yang berbeda, yang seringkali bermusuhan satu sama lain. Di republik-republik Baltik, Ukraina, dan Georgia misalnya, tuntutan akan otonomi yang lebih besar dari otoritas Rusia terus-menerus dilancarkan. Dalam keadaan seperti ini, tidak mudah bagi Gorbachev untuk membuka zona-zona ekonomi baru atau membentuk kota-kota terbuka di tempat-tempat tertentu sebagaimana yang dilakukan Deng di Cina, karena hal itu akan menyebabkan ketidakseimbangan regional yang lebih besar yang pada akhirnya akan memperdalam konflik

nasional. Memberi kesempatan bagi republik-republik Baltik (Lithuania, Latvia, Estonia) untuk membuka suatu wilayah perdagangan bebas dengan negara-negara Skandinavia yang kaya dan terindustrialisasi—yang, dari sudut pandang ekonomi, akan sangat menguntungkan—sangat berbahaya bagi Uni Soviet karena rakyat mereka akan memiliki alasan yang lebih besar untuk menuntut liberalisasi dari “imperialisme” Rusia.

Sebaliknya, di Cina, mayoritas rakyatnya adalah bangsa Han, dan hubungan di antara berbagai etnis jauh kurang bermusuhan dibanding di Uni Soviet. Karena itu, Cina yang terdesentralisasi, sebagaimana yang dikemukakan Brzezinski (1989: 178), “masih akan merupakan satu Cina”, sedangkan Soviet yang terdesentralisasi akan merupakan suatu kekaisaran yang terpecah-pecah—dan sekarang ini kita tahu bahwa hal ini benar. Zona-zona ekonomi dan kota-kota terbuka tidak akan memecah-belah Cina.

Pendeknya, keadaan obyektif, kepemimpinan, dan pengalaman historis penting. Dalam menjelaskan dan membandingkan jalannya reformasi ekonomi di Cina dan Uni Soviet kita tidak harus terpaku hanya pada satu dasar. Gorbachev dan Deng: para pembaharu ini merupakan pemain-pemain yang sangat penting, dan kemampuan mereka, atau kekurangan mereka, sebagai seorang pemimpin membantu kita dalam memahami proses reformasi ekonomi yang mereka jalankan. Namun banyak faktor lain—historis, sosial, atau struktural—yang harus dipertimbangkan untuk menjadikan pemahaman kita lebih menyeluruh. Proses reformasi—sosial, politik, atau ekonomi—bagaimanapun juga merupakan bagian dari proses sejarah yang rumit. Dan sejarah, seperti yang kita tahu, tidak berjalan hanya dengan satu kaki.

Daftar Rujukan

1. Aslund, Anders, *Gorbachev's Struggle for Economic Reform*, 1989, Pinter Publisher, London.
2. Bell, Daniel, "Socialism and Planning", *Dissent*, Winter 1991.
3. Brand, H., "Why the Soviet Economy Failed", *Dissent*, Spring 1992.
4. Brzezinski, Zbigniew, *The Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century*, 1989, Charles S. Sons, New York.
5. Desai, Padma, *Perestroika in Perspective*, 1989, Princeton University Press.
6. Harding, Harry, *China's Second Revolution: Reform After Mao*, 1987, The Brookings Inst.
7. Halpern, Nina, "China's Industrial Economic Reform", *Asian Survey*, Vol. xxv, Oct. 1985.
8. Hsu, Immanuel, *The Rise of the Modern China*, 1990, Oxford Univ. Press.
9. Kennedy, Paul, *The Rise and Fall of the Great Power: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, 1987, Random House.
10. Riskin, Carl, *China's Political Economy: The Quest for Development Since 1949*, 1987, Oxford Univ. Press.
11. Shemelev, Nikolai, dan Popov, Vladimir, *The Turning Point: Revitalizing the Soviet Economy*, 1989.

The Brave New World

SEJAK 1945 ekonomi global mengalami pertumbuhan sangat pesat yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia sebelum Perang Dunia II. Dari 1950 hingga 1980 saja, GNP dunia berlipat empat kali, dari US\$2 triliun menjadi sekitar US\$8 triliun (Kennedy 1993: 48). Apa yang lebih mencolok adalah bahwa selama periode ini, watak ekonomi dunia telah berubah: ia menjadi terglobalkan. Dunia yang kita hidupi sekarang, dalam hal ekonomi, adalah sebuah dunia yang saling terkait satu sama lain, sebuah dunia tanpa batas.

Membuat dan menjual satu produk sekarang merupakan kerja bareng banyak negara. Menjadi semakin umum bahwa sebuah produk, misalnya, dibuat oleh para pekerja Malaysia, menggunakan teknologi Korea, ditopang oleh para investor Hong Kong, dan dipasarkan di Meksiko oleh sebuah perusahaan New York. Dengan kata lain, keseluruhan proses produksi dan distribusi tersebut menjadi ter-transnasionalisasi-kan.

Dalam keadaan seperti ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Robert Reich, tidak lagi mudah untuk berkata bahwa ada sesuatu yang disebut “produk Amerika” yang dibuat oleh “perusahaan Amerika”, tidak lagi mudah untuk membedakan antara [milik] “kita” dan “mereka” (1992: 3-9).

Uang, serta perusahaan-perusahaan global, tidak mengenal negara. Karena komputer dan peralatan-peralatan berteknologi tinggi lainnya, miliaran dollar bergerak melintasi batas-batas negara 24 jam sehari. Terutama setelah deregulasi finansial dunia yang bermula pada akhir 1970-an, sebuah fenomena baru muncul: uang menjadi komoditas, sebuah tujuan pada dirinya sendiri. Pertukaran uang luar negeri (FX) sekarang ini jauh melampaui jumlah yang digunakan untuk pembelian jasa, barang, atau investasi internasional perusahaan-perusahaan dunia.⁶⁴ Uang telah menciptakan, meminjam ungkapan Ohmae, sebuah “kekaisaran dirinya sendiri”; dengan aturan-aturannya sendiri, yang seringkali tidak cocok dengan aturan-aturan dan kepentingan-kepentingan sebuah negara tertentu. Kekaisaran baru yang “tak bertanah-air” ini memadukan perdagangan-perdagangan finansial besar di Singapura, Toronto, Stockholm, New York, dan Jakarta dalam satu pasar yang saling terkait.

Ketika perekonomian dunia menjadi semakin terintegrasi, otoritas dan kemampuan negara berubah. Sekarang ini tidak lagi mungkin bagi sebuah pemerintahan untuk mengelola secara makro perekonomian domestiknya dan mengatur perdagangan luar negerinya tanpa memperhatikan kecenderungan-kecenderungan dalam, dan sifat dari, perekonomian global. Kemampuan negara untuk memberlakukan kebijakan menurun.

Jika Bundesbank Jerman, misalnya, mengetatkan pasokan uangnya untuk meredam memanasnya perekonomian, akan ada begitu banyak dana dari luar negeri yang bisa diperoleh oleh suatu perusahaan domestik yang sehat tanpa banyak kesulitan (di Jepang saja, tabungan pribadi dan sektor korporasi menghasilkan surplus modal lebih dari US\$1 miliar setiap hari, yang tentu saja harus diinvestasikan di suatu tempat). Jika

64 Menurut Ohmae (1990: 157), total volume *harian* pertukaran uang dalam perdagangan luar negeri di antara perusahaan-perusahaan Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat pada 1988 berjumlah sekitar US\$600 miliar.

Washington memutuskan untuk memberlakukan pajak yang lebih tinggi untuk membayar utang-utangnya, yang membuat biaya relatif operasi di negara tersebut kurang menguntungkan, berbagai perusahaan dan modal bisa dengan mudah berpindah ke negara lain. Jika para birokrat Prancis berusaha untuk menghalangi impor mobil Jepang, mereka harus siap untuk menghadapi perselisihan tajam dengan warga Eropa lainnya, Mr. Major, yang negaranya merakit 80 persen perangkat Nissan Bluebirds.

Bersamaan dengan melemahnya kemampuan negara, muncul kekuatan otoritas-otoritas sub-nasional. Karena pemerintah nasional tidak bisa mengontrol perekonomian domestik,⁶⁵ dan karena berbagai kemungkinan besar yang dibuka oleh modal global, otoritas-otoritas sub-nasional tersebut (misalnya, Kota London atau Negara Bagian Washington) kini memiliki peran yang semakin besar. The Research Triangle di Carolina Utara, serta the Route 128 di luar Boston, dan the Silicon Valley di California muncul sebagai aktor-aktor penting, yang mencari modal di luar negara tersebut dengan menggunakan daya tarik dan akses bisnis mereka sendiri. 50 negara bagian di Amerika Serikat, seperti yang dikemukakan Pollins, telah meningkatkan program-program mereka demi untuk berpartisipasi secara aktif dalam gelanggang perekonomian internasional (1993: 26).

Jadi, dalam perekonomian global kita sekarang, bukan hanya kemampuan negara nasional yang menurun, namun pada saat yang bersamaan juga muncul lebih banyak pemain dari tingkat sub-nasional yang berusaha menjalankan bisnis dengan cara mereka sendiri. Dengan demikian, apakah kita sekarang ini harus berkata bahwa negara telah menjadi usang? Apakah negara, yang diambil kontrolnya atas kemampuannya yang per-

65 Tentang poin ini, lihat Pollins (1993: 25).

nah ia miliki, ditakdirkan oleh perekonomian global untuk hanya menjadi pemain kelas-dua?

Tidak ada jawaban yang mudah atas pertanyaan-pertanyaan itu. Paul Kennedy, Robert Gilpin, dan Lester Thurow misalnya, menjelaskan bahwa negara nasional sebagai kekuatan dominan di dunia tidak akan berubah dalam jangka pendek. Negara, sebagaimana yang dikatakan Kennedy, tetap merupakan “lokus utama identitas” dari sebagian besar orang: “terlepas dari siapa majikan mereka dan apa pekerjaan mereka, individu-individu membayar pajak kepada negara, dan bisa melakukan perjalanan hanya jika mendapatkan paspor darinya” (1993: 134). Bagi Gilpin dan Thurow, terdapat beberapa persoalan dunia—misalnya, stabilitas pertukaran finansial dunia (Gilpin 1987), dan penanganan persoalan-persoalan lingkungan dunia, serta persaingan ekonomi global (Thurow 1992)—yang hanya bisa dipecahkan oleh negara nasional. Jadi, meskipun kemampuannya berkurang oleh perekonomian global, negara samasekali tidak musnah. Ia masih merupakan pemain kelas-satu.

Sulit untuk menyangkal argumen tersebut. Posisi terbaik yang bisa kita ambil mungkin adalah posisi moderat: negara masih merupakan kekuatan yang sangat kuat, namun ia sekarang harus membagi kekuasaannya dengan pemain-pemain lain (misalnya, otoritas-otoritas sub-nasional, kekaisaran FX yang “tak bertanah-air”, perusahaan-perusahaan global) yang muncul selama dua dekade terakhir. Dengan kata lain, dunia yang tak terbatas tersebut adalah sebuah dunia poliarkis di mana kekuasaan tersebar, meskipun tidak rata, di antara banyak pemain penting.⁶⁶ Posisi moderat ini memungkinkan kita untuk melihat beberapa persoalan dunia—watak serta kemungkinan pemecahan persoalan-persoalan tersebut—secara lebih jelas. Dari sudut pandang moderat kita, stabilitas hubungan-

66 Tentang posisi ini, lihat Brown (1974).

hubungan moneter dunia, misalnya, tidak dapat diteguhkan hanya melalui kerjasama antarnegara. Kepentingan, dan juga reaksi, para aktor non-negara tersebut juga harus diperhatikan. Hal ini berarti bahwa jika hubungan yen-dollar hendak distabilkan, tindakan apapun dari Washington atau Tokyo akan tidak ada gunanya jika hal itu dilakukan tanpa melihat apa yang terjadi, atau akan terjadi, di Wall Street New York atau di pusat-pusat perusahaan global di San Francisco, Frankfurt, dan Seoul.

Daftar Rujukan

1. Brown, Seyom (1974), *New Forces in World Politics*, Brookings Institution.
2. Kennedy, Paul (1993), *Preparing for the Twenty-First Century*, Random House.
3. Gilpin, Robert (1987), *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press.
4. Ohmae, Kenichi (1990), *Borderless World: Power and Strategy in the Interlink Economy*, HarperCollins Publisher.
5. Thurow, Lester (1992), *Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America*, Time Warner Comp.
6. Reich, Robert B. (1992), *The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st-Century Capitalism*, Vintage Books.
7. Pollins, Brian M. (1993), *Governance in the Age of Global Capital*, draft of a coming book.

Merosotnya Third-worldism

DALAM BEBERAPA tahun terakhir kita melihat perubahan dramatis dalam hubungan Timur-Barat. “Kegagalan besar” komunisme dan dampak-dampaknya merupakan salah satu peristiwa politik dan ekonomi yang paling penting di abad kita.

Peristiwa penting lain dalam beberapa tahun terakhir ini adalah merosotnya *Third-Worldism*. Hal ini mengubah hubungan ekonomi antara Utara dan Selatan. Perubahan ini tidak dramatis—dan terjadi sepanjang 1980-an hampir tanpa ledakan besar, tanpa revolusi.

Perubahan ini memperluas lingkup pasar dunia—banyak negara Dunia Ketiga, yang terbiasa melindungi pasarnya, kini membuka pintunya dan menyatukan dirinya ke dalam kapitalisme global. Perubahan ini juga mengubah sikap banyak pemimpin Dunia Ketiga terhadap praktik-praktik bisnis dan akumulasi modal dunia.

Di Dunia Ketiga, kebijakan-kebijakan yang berorientasi ke luar sekarang ini menjadi umum. Dampak-dampaknya mungkin tidak sebesar runtuhnya komunisme. Namun jika pengalaman baru di hampir setengah penduduk dunia ini berhasil, seluruh dunia akan menjadi lebih baik.

Esai ini akan menjabarkan bagaimana *Third-Worldism* muncul dan mengapa ia merosot. Kegagalan *Third-Worldism* sebagai sebuah gagasan, atau sebuah “ideologi”, menurut saya, merupakan salah satu faktor yang menjelaskan kemerosotannya.

Munculnya Third-Worldism

Dunia Ketiga, sebagai sebuah gerakan internasional, mulai pada pertengahan 1950-an. Secara formal, ia dilancarkan oleh negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin untuk mengungkapkan netralitas dan independensi mereka dari dua *super power* dunia yang saling bersaing. Dunia Ketiga ingin dilihat sebagai sebuah kekuatan pada dirinya sendiri, dengan kepentingan-kepentingannya sendiri.

Apa yang mendasari gerakan ini adalah kekecewaan yang semakin besar pada sejarah pasca-kolonialnya: Dunia Ketiga melihat bahwa kemiskinan dan ketidakberdayaannya terus berlanjut. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan mereka, banyak negara Dunia Ketiga dipenuhi dengan optimisme bahwa mereka akan segera ke luar dari kemiskinan mereka. Dekade 1950-an membuktikan bahwa optimisme ini hanyalah ilusi: alih-alih modernisasi ekonomi, apa yang dialami negara-negara ini adalah kemerosotan ekonomi.

Dengan kata lain, Dunia Ketiga merupakan sebuah gerakan yang dilancarkan bukan hanya untuk mengungkapkan netralitas politik, melainkan juga—dan ini yang lebih penting—untuk menemukan cara untuk ke luar dari persoalan-persoalan kemiskinan dan ketidakberdayaan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dalam hal ini, apa yang diinginkan Dunia Ketiga tersebut adalah suatu penjelasan yang sistematis tentang kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka yang berkanjang. Ia memerlukan suatu “ideologi” untuk menjelaskan “mengapa kemerdekaan

politik mereka tidak melepaskan mereka dari berbagai kesulitan mereka” (Bissel, 1990: 24). Selain itu, dalam hal hubungannya dengan negara-negara lain, para pemimpin Dunia Ketiga membutuhkan suatu agenda internasional yang jelas yang bisa menarik perhatian dunia pada berbagai penderitaan yang dipikul oleh rakyat mereka.

Jawabannya ditemukan dalam analisis teori-teori dependensia dan sistem-dunia. Teori-teori ini muncul dalam panggung intelektual dunia pada saat Dunia Ketiga tersebut perlu menegaskan sejarah pasca-kolonialnya dan tempatnya di arena internasional.

Terdapat beberapa varian dalam aliran dependensia dan juga dalam aliran sistem-dunia tersebut.⁶⁷ Bagi sebagian pemikir, seperti Andre Gunder Frank, misalnya, satu-satunya cara bagi Dunia Ketiga untuk memecahkan berbagai persoalannya adalah dengan melancarkan sebuah revolusi menyeluruh untuk melepaskan perekonomiannya dari perekonomian imperialistik negara-negara Utara yang kaya. Bagi sebagian yang lain, seperti Prebisch dan Wallerstein, revolusi tidak diperlukan karena nasib Dunia Ketiga bisa ditingkatkan jika sistem tatanan perekonomian internasional yang ada bisa diubah dan diperbarui kembali.

Namun, terdapat gagasan-gagasan tertentu yang sama-sama diyakini oleh teori-teori ini. Bagi aliran dependensia—yang mendasarkan banyak asumsinya terutama pada gagasan-gagasan Marx dan Lenin—kapitalisme global, dengan Utara sebagai intinya, menciptakan hubungan ketergantungan yang, dalam rumusan Gunder Frank, hanya meningkatkan keterbelakangan Dunia Ketiga. “Sistem kapitalisme [global],” tulis Paul Baran (1957: 249), “yang pernah menjadi suatu mesin perkembangan

67 Untuk penjabaran yang bagus tentang varian-varian ini, lihat Gilpin (1987) dan Spero (1977).

ekonomi yang begitu kuat [di Utara], telah berubah menjadi beban yang sangat besar bagi kemajuan [di Dunia Ketiga].”

Dunia Ketiga, menurut aliran dependensia, secara sistematis dihisap dan dihalangi untuk berkembang oleh Utara yang kaya, kapitalis, industrial. Perdagangan internasional, bantuan ekonomi, dan perusahaan-perusahaan multinasional merupakan mekanisme-mekanisme atau lembaga-lembaga yang melayani kepentingan Utara untuk merampok kekayaan Dunia Ketiga. Paling banter, apa yang dilakukan Utara untuk membantu “mengembangkan” Dunia Ketiga adalah semata-mata memperkaya beberapa kelompok orang yang, pada gilirannya, menghisap warga Dunia Ketiga yang lain.

Bagi aliran sistem-dunia, struktur sistem ekonomi internasional secara inheren menghalangi Dunia Ketiga untuk menjalankan perdagangan yang menguntungkan dengan Utara. Aliran ini berpendapat bahwa syarat-syarat perdagangan antara Utara dan Dunia Ketiga cenderung semakin menguntungkan yang pertama dan merugikan yang kedua.⁶⁸ Demikianlah Dunia Ketiga dipaksa untuk mengeksport komoditas-komoditas primer dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai impor barang-barang manufakturnya dari Utara. Dengan kata lain, pertukaran yang tidak seimbang ini, menjebak Dunia Ketiga dalam lingkaran keterbelakangan ekonominya.

Dengan demikian, bagi aliran dependensia dan sistem-dunia ini, apa yang harus dilakukan Dunia Ketiga adalah melindungi dirinya sendiri sejauh mungkin dari Utara yang imperialistik atau dari ketidakseimbangan perdagangan internasional. Secara domestik, pemerintah Dunia Ketiga harus melindungi pasarnya dan memajukan industri nasionalnya dengan mengambil langkah-langkah proteksionis dan dengan menjalankan

68 Untuk penjelasan singkat namun mendalam tentang posisi strukturalis ini, lihat Gilpin (1987: 276) dan Pollins (1988: 2-7).

kebijakan-kebijakan pengganti-impor. Secara internasional, Dunia Ketiga harus bersatu untuk “memaksa” Utara menerima aturan-aturan dan prosedur-prosedur internasional baru yang menguntungkan atau setidaknya tidak merugikan kepentingan ekonomi Dunia Ketiga.

Sebagaimana yang telah kita lihat, teori-teori ini tampak memberikan suatu penjelasan yang kurang lebih menyeluruh tentang persoalan-persoalan dasar yang dihadapi oleh Dunia Ketiga terkait dengan kemiskinannya dan ketidakberdayaannya dalam hubungan ekonomi internasional. Teori-teori ini memberikan berbagai penjelasan yang saling terkait dan yang bisa diubah menjadi tindakan politik dan program ekonomi.

Selain itu, teori-teori ini bisa memuaskan hasrat Dunia Ketiga untuk memahami dirinya sendiri sebagai entitas yang dihisap, dan yang kemiskinan dan ketidakberdayaannya bukan disebabkan oleh dirinya sendiri melainkan oleh orang lain. Karena itu, dengan menerima teori-teori ini para pemimpin politik Dunia Ketiga bisa menghubungkan kemiskinan dan ketidakberdayaan negaranya dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan politik dan ekonomi global.

Semua itulah alasan mengapa teori-teori ini diterima luas oleh para pemimpin Dunia Ketiga. Teori-teori ini menjadi tulang-punggung teoretis dari apa yang seringkali disebut sebagai *Third-Worldism*, yang umum terdapat di Dunia Ketiga sepanjang 1960-an dan 1970-an.

Tentu saja terdapat beberapa negara, terutama di Asia Timur dan Tenggara, yang tidak menerima gagasan *Third-Worldism* ini dari awal (misalnya, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Thailand). Namun, gagasan ini tersebar luas mulai dari India dan Indonesia hingga Brasil, Argentina, dan Tanzania—di beberapa negara (misalnya India, Brasil, dan Tanzania) gagasan ini diterapkan sepenuhnya; di beberapa negara yang lain (misalnya Indonesia dan Malaysia) gagasan ini umumnya

digunakan sebagai retorika oleh para penguasa untuk memperluas dukungan politik dalam negeri dan memperkuat posisi internasionalnya.

Jadi, selama 1960-an dan 1970-an, di Asia, Afrika dan Amerika Latin, kebijakan-kebijakan seperti nasionalisasi, penganti-impor, dan redistribusi ekonomi berdasarkan garis populis dan anti-kapitalis berlaku. Menurut John Grimmon dari *The Economist* (13/11/1993), untuk menjalankan kebijakan-kebijakan itu pemerintahan-pemerintahan Dunia Ketiga mengambil risiko defisit bujet yang sangat besar dan menetapkan angka pertukaran yang tinggi.

Secara internasional, panggung utama *Third-Worldism* adalah forum-forum dan konferensi-konferensi PBB. Nada yang diungkapkan oleh para pemimpin Dunia Ketiga dalam forum-forum dan konferensi-konferensi ini seringkali konfrontatif.

Dalam hal ini, usaha-usaha Dunia Ketiga untuk meningkatkan kepentingannya terwujud: UNCTAD dibentuk; Utara menerima tawaran untuk menambahkan seksi-seksi perdagangan dan pembangunan baru dalam kesepakatan GATT; dan perlakuan istimewa dijalankan oleh semua negara maju (Spero 1977). Semua ini sangat substansial, meskipun bagi sebagian besar negara Dunia Ketiga hal itu dianggap kurang memunculkan hasil-hasil yang memuaskan. Seksi baru pada GATT tersebut, misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi Dunia Ketiga untuk menjual produk-produk mereka di Utara dan menutup lebih banyak pasar domestiknya karena, untuk alasan pembangunan, mereka diizinkan untuk tidak dikenakan penerapan prinsip non-diskriminatif.

Merosotnya Third-Worldism

Pada akhir 1970-an dan sepanjang 1980-an keadaan mulai berubah. Pada masa ini menjadi lebih jelas bahwa *Third-Worldism*

tersebut tidak membawa Dunia Ketiga ke mana-mana. Berhadapan dengan berbagai kesulitan ekonomi dalam negeri, banyak negara Dunia Ketiga mulai melakukan reformasi dan internasionalisasi perekonomiannya.

Selain itu, selama masa ini Dunia Ketiga terpaksa menerima kenyataan bahwa, alih-alih konfrontasi, kerjasama dengan Utara lebih realistik untuk memecahkan persoalan kemiskinan dan ketakberdayaannya.

Sebelum kita bergerak lebih jauh membahas perubahan ini, penting untuk diingat bahwa *Third-Worldism*, sebagai sekumpulan pengetahuan, pada dasarnya tidak meyakinkan. Popularitasnya yang begitu luas di Dunia Ketiga, sebagaimana yang dijelaskan Peter Berger (1986), pada dasarnya bukan karena keunggulan-keunggulan teoretisnya, melainkan karena alasan-alasan di luar lingkup wacana akademis. Peter Berger dengan jelas mengemukakan alasan “non-akademis” dari popularitas *Third-Worldism* ini:

Jika akar-akar keterbelakangan tersebut dicari *di luar* masyarakat sendiri, seseorang seringkali terhindarkan dari introspeksi-diri yang menyakitkan (dan memalukan), dan seseorang mendapatkan kambing-hitam eksternal yang sangat memuaskan. Kombinasi motif politik dan psikologis ini cukup memadai untuk menjelaskan popularitas pandangan *Third-Worldism* ini di Dunia Ketiga (Berger, 1986: 128).

Sebagai sekumpulan pengetahuan, *Third-Worldism* tidak meyakinkan karena banyak pertanyaan yang tidak terjawab. *Third-Worldism* mengatakan bahwa jika seorang kapitalis New York atau London mengakumulasi modalnya di Dunia Ketiga, ia melibatkan dirinya dalam sebuah proses imperialistik. Ia hanya merampok kekayaan Dunia Ketiga. Namun bagaimana jika seorang kapitalis New York mengumpulkan modalnya di

Eropa? Bagaimana jika seorang kapitalis Eropa atau Singapura berinvestasi di New York, apakah itu imperialistik? Lebih jauh, bagaimana dengan hubungan di antara negara-negara non-kapitalis—jika perekonomian Kuba atau Korea Utara sangat bergantung pada perekonomian Uni Soviet atau Cina (sebagaimana yang terjadi sebelum komunisme runtuh), apakah ini juga merupakan suatu hubungan ketergantungan, dan jika ya, mengapa hal ini terjadi tanpa kapitalisme? Baik Wallerstein, Prebisch, maupun Gunder Frank tidak dapat memberikan jawaban bagi pertanyaan-pertanyaan penting ini.

Bagaimana dengan Jepang? “Jika memang ada korban imperialisme,” kata Berger, “itu adalah Jepang” (1986: 128). Keberhasilan modernisasi pertamanya terjadi selama masa Meiji—hal ini merupakan hasil langsung dari agresi imperialis, ketika Kommodor Perry pada 1853, dengan todongan senjata, memaksa rakyat Jepang untuk membuka pintu mereka bagi penetrasi kapitalis. Mukjizat kedua Jepang terjadi setelah Perang Dunia II, di bawah “kolonialisme” militer Amerika, dan di bawah bantuan langsung dan berskala-besar ekonomi Amerika. Mengapa hal ini terjadi? Jika hubungan ketergantungan memang mencegah suatu negara dari modernisasi ekonomi, bukankah kita sekarang seharusnya melihat Jepang sebagai salah satu negara termiskin di dunia?

Selain pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab ini, *Third-Worldism* tidak meyakinkan sebagai suatu kumpulan pengetahuan karena terdapat banyak cacat di dalamnya. Ia melihat hubungan dagang sebagai suatu hubungan *zero-sum*. Ia juga mendorong mentalitas anti-bisnis dan anti-perdagangan di kalangan politisi dan perencana ekonomi di Dunia Ketiga. Ia menjadikan orang-orang di Dunia Ketiga gagal mengakui bahwa di zaman kita perdagangan internasional dan pasar internasional merupakan potensi yang menunggu untuk dimanfaatkan dan dijelajahi dengan kreativitas kita.

Third-Worldism menyesatkan orang-orang di Dunia Ketiga dengan membuat mereka melihat persoalan kemiskinan mereka terutama sebagai persoalan merosotnya perdagangan komoditas primer mereka. Ia gagal menunjukkan pada Dunia Ketiga bahwa persoalan utama bagi masa depannya adalah bagaimana mengubah perekonomiannya dari produsen komoditas primer menjadi produsen barang-barang manufaktur (lihat Gilpin 1987: 288). Dengan kata lain, *Third-Worldism* menanamkan pesimisme, bukan optimisme.

Secara teoretis, harga produk-produk primer cenderung menurun dari waktu ke waktu, bukan terutama karena monopoli di Utara atau karena “hubungan imperialistik antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan”, melainkan karena perubahan teknologis dan perkembangan industri. Karena itu, merosotnya perdagangan komoditas primer hendaknya tidak terlalu dicemaskan sebuah negara—apa yang seharusnya ia lakukan adalah berkonsentrasi dalam meningkatkan daya saing globalnya dan membuka dirinya pada dunia untuk mengembangkan basis teknologi dan industrinya.

Cacat lain dari *Third-Worldism* bisa dilihat pada anjurannya untuk melakukan nasionalisasi dan penggantian-impor. Kedua langkah ini, jika sepenuhnya dijalankan, hanya akan sangat memperbesar campuran-tangan birokrasi. Hal ini akan menciptakan sebuah perekonomian yang sangat tidak efisien. Dalam hal penggantian impor, tidak ada penjelasan yang meyakinkan yang diberikan oleh *Third-Worldism*. Selain itu, seluruh perusahaan pengganti-impor pada dasarnya sangat mahal bagi konsumen maupun pemerintah—yang terakhir ini harus mengambil risiko mengalami defisit bujet yang sangat besar untuk membayar perusahaan ini.

Terdapat kasus-kasus di mana *Third-Worldism* membantu memberikan ‘telur emas’ ke beberapa negara Dunia Ketiga. Sebagai contoh adalah keberhasilan Brasil, Argentina, dan

Meksiko pada 1960-an dan awal 1970-an. Dalam periode itu GDP per kapita negara-negara ini meningkat lebih dari 5% per tahun. Namun, keberhasilan ini ternyata tidak bertahan lama: pada 1980-an perekonomian negara-negara ini runtuh (lihat Grimmond 1993; Crook 1989). Dalam periode ini utang mereka meningkat tajam, inflasi melambung, dan GDP per kapita merosot.⁶⁹

Bagi sebagian besar negara Dunia Ketiga yang percaya pada gagasan *Third-Worldism*, ‘telur emas’ yang dinikmati oleh Meksiko, Argentina dan Brasil selama 1960-an dan awal 1970-an tersebut tidak pernah datang. Sebagian besar dari negara tersebut tidak pernah mengalami suatu periode pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebaliknya, andil keseluruhan mereka dalam ekspor barang-barang manufaktur dunia menurun.⁷⁰

Selain itu, bagi semua negara ini, akhir 1970-an dan 1980-an benar-benar merupakan suatu periode yang sangat buruk: karena kenaikan harga minyak dan resesi global yang terjadi tiba-tiba (pada awal 1980-an), perekonomian mereka terpuruk dalam krisis yang sangat dalam. Bagi negara-negara ini, periode ini seringkali disebut “dekade yang hilang”.

Krisis inilah yang menyebabkan *Third-Worldism* menjadi kurang populer. Negara-negara Dunia Ketiga, pada awal 1980-an, mulai melakukan reorientasi diri dan mengambil langkah-langkah yang tidak sesuai dengan *Third-Worldism*. Dunia Ketiga mulai lebih membuka perekonomian mereka terhadap investasi

69 Dalam hal inflasi, Brasil 2.750% per tahun, Argentina 3.080%, dan Meksiko sekitar 80%. Dalam hal GDP per kapita, Brasil mengalami kemerosotan dari \$2.481 pada 1980 menjadi \$2.449 pada 1988; Argentina dari \$3.359 menjadi \$2.862; dan Meksiko dari \$2.872 menjadi \$2.588. Dalam hal utang luar negeri, Argentina meningkat dari \$32,4 miliar menjadi \$53,9; Brasil dari \$68,7 miliar menjadi \$109,4 miliar; dan Meksiko dari \$78,0 miliar menjadi \$93,7 miliar (lihat Kennedy 1993: 203; Grimmond 1993: 7).

70 Jika termasuk Brasil, Argentina, dan Meksiko (namun tanpa menyertakan negara-negara Asia Timur), andil total Dunia Ketiga dalam ekspor barang-barang manufaktur dunia merosot dari sekitar 10% pada 1965 menjadi 6% pada 1980 (*The Economist*, 02/10/1993).

asing dan mengubah orientasinya dari perekonomian penganti-ekspor ke perekonomian yang lebih berorientasi ekspor.

Selain krisis ekonomi ini, ada satu faktor lagi yang tidak boleh dilupakan, yang juga menjelaskan mengapa *Third-Worldism* menjadi semakin tidak populer. Pada awal 1980-an, menjadi semakin jelas bahwa apa yang terjadi di Asia Timur dan Tenggara—di mana *Third-Worldism* tidak pernah dianggap sebagai suatu gagasan yang bagus—adalah suatu mukjizat ekonomi.

Selama 1960-an dan 1970-an, sementara sebagian besar perekonomian Dunia Ketiga terseok-seok, negara-negara Asia Timur dan Tenggara ini mengalami angka pertumbuhan yang menakjubkan (sekitar 6-7% per tahun pada 1970-an, dan 8-9% pada paruh kedua 1980-an). Negara-negara ini, yang secara konsisten menjalankan kebijakan berorientasi ekspor, memperlihatkan kepada dunia bahwa Selatan atau Dunia Ketiga bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perdagangan dan hubungan dekat dengan kapitalisme global. Mukjizat negara-negara ini pada dasarnya merupakan contoh tentang betapa menyensatkannya *Third-Worldism* (Harris 1986; Bissel 1990; Berger 1986).

Masa Depan

Pada 1990 *Third-Worldism* tidak lagi populer di Dunia Ketiga. Sebagian besar negara penting di Dunia Ketiga kini mereformasi perekonomian mereka. Di sini kebijakan-kebijakan seperti deregulasi, devaluasi, serta debirokratisasi kini dijalankan untuk mengikis warisan-warisan lama *Third-Worldism*. Kini mereka lebih membuka diri kepada dunia.

Beberapa negara (seperti Meksiko) sangat berhasil dalam menjalankan reformasi—perekonomian mereka bisa ke luar dari krisis 1980-an dan mulai kembali tumbuh pada awal 1990-an. Sebagian negara yang lain (seperti negara-negara di Asia

Selatan) masih harus menunggu bahwa langkah-langkah mereka dalam meninggalkan *Third-Worldism* membuahkan hasil.

Bagi pemerintahan di Dunia Ketiga, reformasi adalah sebuah pertarungan. Jika hal ini tidak segera memperbaiki standar hidup orang-orang di jalanan, pemerintah akan ditumbangkan. Reformasi akan menjadi kematian secara politik jika rakyat menganggap bahwa hal itu hanya meningkatkan beban kehidupan mereka. *Third-Worldism*, dalam satu atau lain bentuk, akan kembali jika pertarungan reformasi ini gagal.

Daftar Rujukan

1. Spero, Joan Edelman (1977), *The Politics of International Economic Relations*, Martin's Press.
2. Harris, Nigel (1986), *The End of the Third World*, Penguin.
3. Gilpin, Robert (1987), *The Political Economy of International Relations*, Princeton.
4. Berger, Peter (1986), *The Capitalist Revolution*, Basic Books.
5. Bissel, Richard E. (1990), "Who Killed the Third World?", *The Washington Quarterly*, Autumn.
6. Kennedy, Paul (1993), *Preparing for the Twenty-first Century*, Random House.
7. Pollins, Brian (1988), "International Power and Unequal Exchange", *Quarterly Report*, OSU, Mershon Center, Winter, Vol. 12, No. 3.

Apa yang Harus Kita Lakukan Bagi Dunia Ketiga?

UNTUK MENULIS tentang hubungan antara Dunia Ketiga dan negara-negara industri kaya, kita perlu bertolak dari asumsi ini: pembangunan (ekonomi) yang pertama sangat bergantung pada perdagangannya dengan yang kedua.

Negara-negara industri menghasilkan $\frac{3}{4}$ penghasilan dunia (*The Economist*, 25/09/1993). Dengan kata lain, negara-negara ini adalah satu-satunya kelompok negara yang mampu menciptakan permintaan yang tinggi atas barang dan jasa Dunia Ketiga. Inilah alasan mengapa jika negara-negara industri maju tersebut mengurangi permintaan mereka, karena berbagai alasan (misalnya: resesi atau proteksionisme), Dunia Ketiga akan menderita.

Dari perdagangan Dunia Ketiga bisa memperoleh matauang asing yang diperlukan untuk membeli mesin dan teknologi dari negara-negara industri maju itu, yang sangat penting untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih baik. Jika proses ekspor-impor ini terus berjalan dalam jangka panjang, Dunia Ketiga akan menjadi lebih baik.

Kaum strukturalis atau para teoretisi dependensia benar, namun karena alasan yang salah. Sebagaimana yang dikemukakan Pollins (1988: 5-7), *terms of trade* produk-produk primer

Dunia Ketiga memang menurun—tapi produk-produk primer bukan merupakan satu-satunya barang yang bisa dibuat dan dijual Dunia Ketiga: mereka bisa bergeser ke produksi modern dan membuat barang-barang manufaktur atau semi-manufaktur. Jika pemerintah Dunia Ketiga bisa menjalankan perekonomian yang bagus dan membangun lingkungan yang pro-bisnis, dan bisa mendapatkan pertolongan yang masuk akal dalam hal keuangan eksternalnya, proses pergeseran ke produksi ekonomi modern bukan sesuatu yang mustahil. Dengan kata lain, perdagangan, pada dirinya sendiri, tidak mengodratkan Dunia Ketiga menjadi pecundang. Perdagangan, sebagaimana yang diyakini kaum liberal, merupakan suatu permainan *positive-sum* (Gilpin, 1987: 172-180).

Sejarah tiga dekade terakhir ini memberi kita suatu contoh yang sangat jelas dari asumsi sederhana dan pro-perdagangan ini. Negara-negara paling berhasil di Dunia Ketiga (yakni nagana-naga besar dan kecil Asia Timur dan Tenggara) adalah negara-negara yang lebih bergantung pada ekspor barang dan jasa ke negara-negara industri (Harris, 1986). Sebaliknya, negara-negara yang mengalami berbagai masalah sejak akhir 1970-an (sebagian besar di Amerika Latin dan Afrika) adalah negara-negara yang sangat bergantung pada mekanisme pengganti-impor atau pada orientasi swadaya (*The Economist*, 23/09/1989).

Dengan demikian, dari asumsi pro-perdagangan ini, kita dapat berkata bahwa hal terbaik yang bisa dilakukan untuk membantu Dunia Ketiga adalah memelihara dan memperluas rezim perdagangan yang menjamin aliran barang dan jasa yang lebih bebas dari Dunia Ketiga ke negara-negara industri, dan sebaliknya. Dengan kata lain, apa yang harus kita lakukan adalah memperkuat rezim perdagangan liberal dunia. Dalam hal ini, tugas yang paling mendesak yang harus dilakukan dunia industri adalah menegaskan kembali GATT sebagai tulang-punggung hubungan perdagangan kita.

Prinsip-prinsip GATT (misalnya, perjanjian non-diskriminasi) memungkinkan negara-negara Dunia Ketiga untuk secara otomatis mendapatkan keuntungan dari konsesi dan tawar-menawar yang dilakukan di antara negara-negara besar. Selain itu, GATT mencegah negara-negara kuat untuk secara selektif memperlakukan bea-cukai atau kebijakan-kebijakan lain yang merugikan pihak-pihak yang lebih lemah. Dengan demikian, GATT, dalam ungkapan Feinberg dan Boylan, merupakan “pelindung terbaik pihak yang lemah [yakni Dunia Ketiga]” (1992: 194).

Dalam dua dekade terakhir GATT diperlemah oleh beberapa kecenderungan baru dalam ekonomi dunia kita. Beberapa contoh di antaranya: pertama, proteksionisme baru (misalnya rintangan-rintangan non-tarif dan proteksionisme sektoral) sekarang ini lebih sering dijalankan oleh negara-negara besar. Bukti-buktinya sangat meyakinkan: sebagai contoh, pada 1980 proporsi barang manufaktur terhadap rintangan non-tarif adalah 20%, pada 1983 hal ini meningkat hingga sekitar 30% (Gilpin, 1987: 192). Kecenderungan kedua adalah pembentukan blok-blok ekonomi regional. Ada tanda-tanda bahwa blok-blok ini akan menjadi pulau-pulau yang dilindungi oleh tembok-tembok perdagangan (Thurow 1993: 27-66).

Sangat jelas bahwa jika kecenderungan-kecenderungan ini terus berlanjut, korban pertama adalah pihak-pihak terlemah dunia kita (yakni Dunia Ketiga). Karena itu, jika negara-negara kaya menegaskan sekali lagi prinsip-prinsip mulia GATT, hal itu dilakukan juga demi kepentingan Dunia Ketiga.

Tentu saja, untuk memperbaiki kehidupan Dunia Ketiga, tidak cukup jika kita hanya bersandar pada satu mekanisme (yakni perdagangan bebas). Semata-mata perdagangan bebas tidak memadai. Negara-negara industri juga harus mengurangi kecenderungan matauang-matauang utama (dollar, yen, dan mark) menjadi terlalu tidak menentu. Jika nilai dollar atau yen terus-menerus naik turun dalam jangka waktu yang relatif pen-

dek, para pengeksport dan pengimpor Dunia Ketiga akan sangat kesulitan untuk merancang suatu rencana jangka panjang. Selain itu, sebagaimana yang diperlihatkan oleh peristiwa-peristiwa pada awal 1980-an, perubahan mendadak nilai matauang utama (dalam kasus ini nilai dollar naik) akan menjerumuskan banyak negara Dunia Ketiga ke dalam persoalan keuangan besar.

Penting juga untuk membantu keuangan eksternal Dunia Ketiga dan juga memberi bantuan untuk membangun infrastruktur ekonomi mereka. Dalam hal ini kita bisa melihat suatu kecenderungan yang menarik dalam keuangan internasional: bangkitnya (dalam bentuk-bentuk baru) aliran modal swasta ke Dunia Ketiga (*The Economist*, 25/09/1993). Pada 1981, ketika aliran modal kotor ke Dunia Ketiga adalah \$156,9 miliar, proporsi pinjaman bank komersial dan pinjaman resmi sangat tinggi (46,1% dan 26%). Sekarang ini (1992), ketika aliran modal ke Dunia Ketiga adalah \$229,2 miliar, proporsi FDI (*Foreign Direct Investment*), surat obligasi, PE (*Portfolio Equity*), dan dana bantuan dari sumber-sumber keuangan swasta meningkat pesat.⁷¹

Semua ini berarti bahwa Dunia Ketiga kini bisa kurang bersandar pada pinjaman bank komersial, yang seringkali disertai dengan bunga tinggi. Hal ini juga berarti bahwa risiko modal yang dipinjam oleh Dunia Ketiga sekarang ini tersebar secara lebih aman. Dan yang paling penting: hal ini berarti bahwa sekarang ini terdapat tekanan yang lebih besar bagi pemerintahan di Dunia Ketiga untuk mereformasi kebijakan mereka (yakni tidak banyak campur-tangan dalam perekonomian). Para investor swasta tidak akan masuk ke negara-negara di mana terdapat terlalu banyak aturan “anti-bisnis” yang diberlakukan

71 FDI dari 8,3% pada 1981 menjadi 16,7% pada 1992; surat obligasi dari 1,2% menjadi 9,4%; PE dari 0,1% menjadi 5,7%; dan dana bantuan dari 7,3% menjadi 13,1% (*The Economist*, 25/09/1993).

oleh pemerintah yang sangat aktivis. Hal ini sangat penting, karena salah satu persoalan yang paling mendasar dari negara-negara Dunia Ketiga bisa dilihat dari kenyataan bahwa pemerintah mereka (yang sebagian besar tidak kompeten) terlalu ikut campur dalam perekonomian. Dengan kata lain, bentuk-bentuk keuangan internasional yang baru ini bukan hanya mengurangi risiko dan biaya modal, melainkan juga memaksa pemerintah di Dunia Ketiga untuk menjalankan reformasi ekonomi demi menciptakan suatu lingkungan bisnis yang lebih bersahabat dan kondisi makro-ekonomi yang stabil.

Karena itu penting bagi negara-negara industri untuk mendorong kecenderungan baru dalam keuangan internasional ini. Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, namun yang paling penting, sebagaimana dikemukakan oleh Clive Crook dari *The Economist*, adalah bagaimana negara-negara industri menjaga 'rumah' mereka sendiri tetap tertib. Jika, misalnya, suku bunga di AS naik secara dramatis (karena pemerintah menghisap sebagian besar uang untuk membayar utangnya yang semakin besar), yang menjadikan para investor keuangan berpikir bahwa lebih baik memindahkan uang mereka ke sebuah bank di New York ketimbang membeli surat obligasi beberapa perusahaan di Malaysia atau Peru, kecenderungan internasional baru ini akan berbalik, dan sangat mungkin Dunia Ketiga sekali lagi akan terperosok ke dalam persoalan besar dan tidak mampu membayar utang mereka.

Penting dicatat bahwa kita tidak dapat membantu apapun jika negara-negara Dunia Ketiga tidak membantu diri mereka sendiri. Dalam dunia perdagangan liberal, mereka yang memiliki kinerja yang lebih baik akan bertahan. Untuk melakukan hal itu, mereka harus mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi yang bernas (misalnya, pembatasan fiskal, inflasi yang rendah, angka pajak yang masuk akal). Seperti yang telah saya kemukakan di atas, kecenderungan baru dalam keuangan interna-

sional tersebut sekarang ini “memaksa” pemerintahan-pemerintahan di Dunia Ketiga untuk melakukan hal ini. Namun “pengaruh eksternal” ini hanya sebagian dari cerita: apa yang juga diperlukan adalah motivasi dan tekad internal negara-negara Dunia Ketiga. Mereka yang tidak memiliki motivasi dan tekad ini akan menjadi pecundang dalam dunia baru kita.

Memang ada beberapa negara Dunia Ketiga (sebagian di Afrika Sub-Sahara, dan sebagian di Asia Selatan) yang, menurut beberapa pemikir, bagaimanapun juga akan menjadi pecundang. Lihat saja negara-negara di Afrika Sub-Sahara. Banyak dari mereka yang masih berada dalam “keadaan alamiah”, dalam pengertian bahwa masing-masing kelompok suku di satu negara ingin menggorok tenggorokan satu sama lain dalam memecahkan konflik-konflik politik, ekonomi, dan budaya. Selain itu, banyak di antara mereka samasekali tidak memiliki sumberdaya ekonomi dan sumberdaya manusia yang sangat dibutuhkan untuk mulai membuat sesuatu untuk diekspor. Lester Thurow, dalam bukunya yang menarik, *Head to Head*, menulis lelucon ini: jika karena alasan tertentu Tuhan menghadiahi Anda Afrika Sub-Sahara untuk Anda perintah, satu-satunya pilihan yang cerdas adalah mengembalikannya lagi kepadanya.

Bagi negara-negara ini (Dunia Ketiga di dalam Dunia Ketiga) mungkin tidak banyak yang bisa kita lakukan, paling tidak untuk sementara ini. Kita mungkin bisa memberikan bantuan kemanusiaan. Kita juga bisa memberikan pinjaman pembangunan yang murah. Namun semua usaha mulia ini akan sia-sia, kecuali jika negara-negara ini mulai menjauh dari “keadaan alamiah” mereka.

Daftar Rujukan

1. Feinberg, Richard E., dan Delia M. Boyland, 1992, *Modular Multilateralism: North-South Economic Relations in the 1990s*, Washington Quarterly, Winter.

2. Gilpin, Robert (1987), *The Political Economy of International Relation*, Princeton.
3. Harris, Nigel (1986), *The End of the Third World*, Penguin Books.
4. Pollins, Brian (1988), *International Power and Unequal Exchange*, Quarterly Report, Mershon Center, OSU, V. 12, Winter.
5. Thurow, Lester (1993), *Head to Head*, Warner Books.

Kapitalisme, Sosialisme, dan Dunia Ketiga

(Bagaimana Peter Berger Bergerak ke “Kanan”)

SOSIALISME DAN KAPITALISME, sebelum Gorbachev mulai mengikis ajaran-ajaran dasar sosialisme pada pertengahan 1980-an, dianggap sebagai dua pilihan paham yang saling bersaing bagi pembangunan di Dunia Ketiga.⁷² Memang, setelah Perang Dunia II, salah satu persoalan utama dalam pembangunan Dunia Ketiga berkenaan dengan persoalan apakah sosialisme atau kapitalisme, atau perpaduan dari keduanya, yang merupakan cara tercepat dan teraman untuk ke luar dari kemiskinan dan ketertinggalan.

72 Mengemukakan hal ini bukan berarti mengatakan bahwa setelah Gorbachev, sosialisme hanya akan menjadi bagian sejarah. Tentu saja, sosialisme masih akan menarik banyak pengikut di Dunia Ketiga bahkan berdekade-dekade setelah runtuhnya kekaisaran Soviet. Sosialisme, sebagaimana kapitalisme, adalah sebuah ideologi modern yang mencoba untuk memberi berbagai penjelasan tentang bagaimana membentuk sebuah masyarakat yang adil dan damai. Sosialisme, sebagai suatu usaha intelektual manusia, akan terus-menerus diperbaiki, mungkin sampai sebagian besar jejak Marx sulit dilacak di dalamnya. Namun, tentu saja “persaingan” antara sosialisme dan kapitalisme di Dunia Ketiga sebagaimana yang terjadi setelah Perang Dunia II dan sebelum Gorbachev pada 1980-an tidak akan sama lagi. Kapitalisme, setelah runtuhnya kekaisaran Soviet, dianggap sebagai pilihan yang lebih baik bagi masyarakat yang modern dan dinamis.

Salah satu teoretisi sosial besar yang mencoba untuk membahas persoalan sosialisme dan kapitalisme jika diterapkan di Dunia Ketiga adalah Peter L. Berger. Pada 1974, bukunya, *Pyramids of Sacrifice* (Basic Books), diterbitkan. Dalam buku ini Berger menulis bahwa baik kapitalisme maupun sosialisme telah mengakibatkan korban manusia yang begitu besar di Dunia Ketiga. Kedua ideologi atau model pembangunan ini bukannya tanpa mitos-mitos; dan berbagai mitos ini harus ditolak. Posisinya netral: baik sosialisme maupun kapitalisme bisa ditolak, atau diterapkan, jika “kalkulus penderitaan” dan “kalkulus makna” diperhitungkan. Dua belas tahun kemudian, ia menulis sebuah buku lain, *Capitalist Revolution* (Basic Books). Di sini ia memperlihatkan bahwa ia telah meninggalkan posisi sebelumnya. Ia berkata bahwa bagi Dunia Ketiga, kapitalisme secara moral merupakan pertarungan yang lebih aman. Ia menjelaskan bagaimana kapitalisme telah menghasilkan kekuatan produktif terbesar dalam sejarah manusia dan bagaimana kisah sukses kapitalisme di Eropa Timur merupakan suatu kabar buruk bagi Marxisme. Pendeknya, dalam buku ini, sebagaimana yang ia tulis sendiri, ia bergerak ke “kanan”.

Dalam tulisan ini saya mencoba untuk menjabarkan gagasan-gagasan Berger dalam buku-buku di atas. Fokus saya adalah gagasan Berger tentang kapitalisme dan sosialisme dan penerapan mereka dalam Dunia Ketiga. Saya juga akan berusaha melihat mengapa Berger meninggalkan “netralitas” dan bergerak ke “kanan”.

Piramida Korban

Gagasan kapitalisme tentang pembangunan, bagi Berger, pada dasarnya merupakan “suatu proyeksi universal dari ‘Mimpi Amerika’—sebuah visi tentang keberlimpahan ekonomi dalam konteks demokrasi politik dan masyarakat kelas yang dinamis” (hlm. 38). Karena itu, bagi para pemimpin Dunia Ketiga yang

percaya pada cara pembangunan ini, apa yang mereka janjikan kepada rakyat mereka adalah keberlimpahan materiil dan kebebasan politik. Namun bagi Berger, gagasan bahwa pembangunan kapitalis di Dunia Ketiga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat umum adalah sebuah mitos (“mitos pertumbuhan, yang tertanam dalam suatu mitologi kemajuan dan modernitas yang menyeluruh”) [hlm. 39]. Dan sebagaimana yang kemudian akan ia tunjukkan dalam penilaiannya atas pertumbuhan ekonomi Brasil, janji akan kebebasan politik “ditunda” demi untuk mengejawantahkan mitos pertumbuhan.

Untuk mengkritik model-model kapitalis tersebut, Berger mulai dari dua pertanyaan: siapa yang menetapkan model tersebut? Siapa, jika ada, yang mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan tersebut? Dalam menjawab pertanyaan pertama, Berger sekadar menyatakan bahwa yang menentukan model tersebut adalah para teknokrat, pengusaha, birokrat, administrator, dan ahli-ahli sosial yang lain. Masyarakat pada umumnya, yang paling terkena dampak dari keputusan mereka, sangat jarang ditanya dalam proses pembuatan keputusan.

Dalam menjawab pertanyaan kedua, ia menyatakan bahwa kecenderungan-kecenderungan dalam Dunia Ketiga memperlihatkan bahwa kaum miskin tidak mendapatkan apapun: efek menetes ke bawah atau efek penyebaran samasekali tidak terjadi:

Di banyak negara Dunia Ketiga terdapat suatu distribusi yang semakin jauh berbeda dalam hal pendapatan dan kekayaan. Yakni, kelas-kelas bawah mendapatkan lebih *sedikit*, dan bukan lebih banyak, saat proses [pembangunan kapitalis] tersebut berjalan. Kondisi dasar mereka juga tidak banyak mengalami perbaikan. Terdapat *lebih banyak* kelaparan dan penyakit sekarang ini dibanding beberapa dekade yang lalu, bukan hanya dalam kaitannya dengan angka absolut,

namun bahkan ketika penambahan populasi diperhitungkan. Apa yang mencolok, di banyak negara Dunia Ketiga terdapat *peningkatan* pengangguran dan kekurangan pekerjaan (hlm. 47; huruf miring berasal dari teks asli).

Penting untuk dicatat di sini bahwa Berger tidak menolak gagasan-gagasan dari para teoretisi dependensia bahwa pembangunan kapitalis bisa menghasilkan “perkembangan bagi yang kurang-berkembang”. Ia bahkan menjelaskan dengan cukup panjang lebar gagasan-gagasan utama dari teori-teori dependensia, tanpa mengkritiknya. Ia mengatakan bahwa terdapat berbagai kemungkinan bahwa mereka yang mendapatkan keuntungan dari proses pembangunan tersebut adalah kepentingan-kepentingan asing, para kapitalis lokal, dan kaum birokrat; dan bahwa keputusan-keputusan penting dalam politik dalam negeri dilakukan di luar negara-negara Dunia Ketiga tersebut (hlm. 47-53).

Berger menjadikan pembangunan di Brasil sebagai contoh dari pembangunan kapitalis. Pemerintahan militer, setelah merebut kekuasaan pada 1964, membangun negeri tersebut. Pemerintahan ini mencoba untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan pada saat yang sama ia juga mendedahkan kontrol otoriter pada masyarakatnya. Para teknokrat yang bekerja dengan rezim tersebut percaya bahwa kekayaan harus diciptakan sebelum hal itu dapat didistribusikan. Mereka percaya bahwa meskipun dalam jangka-pendek sebagian orang akan dirugikan dan kesenjangan meningkat, dalam jangka panjang semua kelompok akan mendapatkan keuntungan.

Sebagai akibatnya, menurut Berger, Brasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Pada 1972, angka pertumbuhan GNP adalah 11,3 persen. Antara 1964 dan 1970, GNP meningkat 52 persen; dan dalam periode yang sama produksi industri meningkat 69 persen.

Namun pertumbuhan yang begitu besar ini, dalam pandangan Berger, ditopang terutama oleh, dan pada gilirannya juga menciptakan, perluasan industri dengan modal-intensif yang begitu besar, banyak di antaranya memproduksi barang-barang konsumen yang tahan lama dan didanai dan/atau dikontrol oleh kepentingan asing. Barang-barang yang diproduksi tersebut (mobil, TV, dan sebagainya) merupakan kemewahan yang tak terjangkau oleh sebagian besar penduduk (prioritas produksi diarahkan bagi konsumsi kalangan minoritas). Modal asing yang digunakan dalam jenis industri ini menyebabkan utang nasional yang sangat besar dan jelas menghasilkan “ketergantungan”. Dengan demikian meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, pengangguran meningkat. Yang lebih buruk, proporsi tenaga kerja yang terlibat dalam pekerjaan industri tersebut menurun (hlm. 143).

Kesenjangan populasi juga terjadi. Pada 1970, 1/3 dari total pendapatan nasional berada di tangan 5% penduduk, sementara 40% penduduk termiskin hanya memperoleh 10% pendapatan. Dan “antara 1960 dan 1970 upah minimum riil diperkirakan merosot sekitar 30%” (hlm. 144).

Karena itu, bagi Berger, gambar keseluruhan Brasil adalah suatu gambar tentang dua bangsa, “yang satu relatif makmur, dan yang lain berada dalam berbagai bentuk penderitaan” (hlm. 144). Lima belas juta orang hidup di wilayah kemakmuran, delapan puluh lima juta di wilayah penderitaan. Pendeknya, Brasil tampak seperti sebuah Swedia yang melapisi sebuah Indonesia—dan, perlu diingat, “Swedia” ini bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari, oleh, dan untuk dirinya sendiri (hlm. 145).

Gambar keseluruhan tersebut, menurut Berger, bahkan lebih menyedihkan ketika kita melihat bahwa dalam menjalankan kebijakannya, rezim militer tersebut menindas lawan-lawannya dan menunda berlakunya hak-hak dan kebebasan sipil (hlm. 147). Alasan utama rezim ini dalam melakukan pe-

nindasan tersebut adalah: stabilitas harus ditegakkan lebih dahulu sebelum pertumbuhan ekonomi bisa dicapai. Dari waktu ke waktu, penindasan ini menjadi suatu tindakan untuk penindasan itu sendiri; ia memiliki logikanya sendiri dan ia berbeda dengan apapun yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi; ia sekadar merupakan suatu tindakan untuk memelihara kekuasaan. Dengan demikian, penderitaan ekonomi dibarengi dengan penindasan politik. Secara keseluruhan, keadaan ini memunculkan beban yang sangat berat untuk ditanggung oleh masyarakat umum.

Menyangkut kapitalisme, Berger mengkritik sosialisme karena kegagalannya untuk memberikan “kargo” yang dijanjikan pada rakyatnya. Lebih dibanding kapitalisme, sosialisme mengandung berbagai mitos: mulai dari mitos revolusi, mitos tentang “orang-orang terpilih” (partai pelopor), hingga mitos penyelamatan dari keterasingan yang ada dalam modernitas. Lebih menarik bagi para pemimpin di Dunia Ketiga untuk “menggunakan” model pembangunan sosialis karena ia mengandung janji-janji “emosional” lebih banyak.

Model pembangunan sosialis, menurut Berger, memunculkan suatu sentralisasi birokratis dan menghalangi tiap-tiap usaha untuk mencapai sesuatu. Sebagai akibatnya, model tersebut menghasilkan ketidakefisienan dan produktivitas yang rendah. Dengan kata lain, model sosialis tersebut “memiliki suatu kecenderungan inheren untuk kembali pada kebiasaan-kebiasaan ekonomi yang buruk dan tidak efisien sebagaimana yang ada dalam sistem sosial pra-modern” (hlm. 80).

Ketergantungan terjadi bukan hanya di negara-negara yang menggunakan model kapitalis, melainkan juga di negara-negara yang menggunakan model sosialis. “Komunitas negara-negara sosialis” berarti bahwa terdapat satu negara sosialis (Uni Soviet) yang mendominasi negara-negara sosialis yang lain; dan negara dominan ini “dimotivasi oleh kepentingan eko-

nomi negara itu sendiri, sebagaimana yang terjadi pada negara kapitalis...”. (hlm. 82). Dengan demikian, sebuah negara Dunia Ketiga yang “disusupi” oleh kekuatan ekonomi Soviet akan melihat bahwa keputusan-keputusan ekonominya yang penting tidak dibuat secara otonom, ketergantungannya terus-menerus meningkat, keseimbangan perdagangannya buruk, dan utangnya meningkat (hlm. 82).

Sosialisme, bagi Berger, mengandung suatu kecenderungan inheren ke arah totalitarianisme karena alasan yang sederhana: “sosialisme pada dasarnya akan berusaha untuk menyerap perekonomian dalam negara, dan dengan demikian sangat meningkatkan potensi totaliter yang terakhir ini” (hlm. 86). Karena itu, tidak mengejutkan melihat bahwa di banyak negara sosialis, termasuk negara-negara di Dunia Ketiga yang menggunakan model pembangunan sosialis, teror digunakan sebagai alat politik yang “sah”.

Berger menggunakan pembangunan di Cina sebagai contoh dari pembangunan sosialis. Benar, menurut Berger, bahwa rezim sosialis Cina telah berhasil dalam mengikis kelaparan. Selama berdekade-dekade, kaum sosialis (kaum komunis) adalah kelompok “yang pertama membentuk suatu otoritas pusat yang kuat di seluruh negeri itu, yang memungkinkan mereka untuk menjalankan berbagai usaha untuk mengatasi kelaparan yang sangat sulit dilakukan selama ini” (hlm. 156). Berger juga menjelaskan bahwa di bawah model sosialis tersebut, orang-orang Cina dalam hal nutrisi dan kebutuhan-kebutuhan dasar menjadi lebih baik dibanding keadaan mereka sebelumnya sebelum kaum komunis berkuasa. Dan selain itu, pencapaian ini diraih tanpa kesenjangan:

[Di Cina Komunis] hampir dapat dipastikan bahwa *distribusi* keuntungan-keuntungan ekonomi sekarang ini jauh lebih egaliter dibanding sebelum 1949. Kecuali mungkin pada pa-

ra pemimpin politik yang berkecimpung dalam kemewahan Kota Imperial, tidak banyak kelompok yang secara ekonomi istimewa, dan kesenjangan pendapatan di antara kelompok-kelompok pekerjaan mungkin merupakan salah satu yang terkecil di dunia (hlm. 157; huruf miring berasal dari teks asli)

Namun bagi Berger, semua pencapaian ini harus dibayar dengan biaya manusia yang sangat besar: segera setelah berkuasa, rezim komunis tersebut menyebarkan teror pada rakyatnya, sebuah rantai teror yang mengerikan. Keyakinan-keyakinan dan program-program seperti “Perjuangan Terus-Menerus”, “Lompatan Besar ke Depan”, “Reformasi melalui Kaum Buruh”, dan “Revolusi Budaya Besar Kaum Proletar”, memaksa orang-orang untuk menanggung pemerintahan teror. Karena itu, Berger kemudian mengatakan bahwa “siapapun yang melihat pada catatan rezim komunis tersebut sejak 1949, bahkan dengan obyektivitas yang tidak begitu besar, akan terkesan oleh jumlah penderitaan manusia yang begitu besar yang secara langsung bisa dilacak pada tindakan-tindakan rezim tersebut. Ini adalah rekaman kematian, penderitaan, dan ketakutan...”. (hlm. 154).

Dalam hal penindasan langsung oleh organ-organ negara, Berger menulis, “Brasil dibandingkan dengan Cina seperti Swiss dibandingkan dengan kekaisaran Genghis Khan.” Dalam hal keadilan ekonomi, “Cina dibanding Brasil adalah seperti utopia *kibbutz* dibandingkan Eropa pertengahan di masa jayanya feodalisme.” (hlm. 162-163).

Kedua model pembangunan tersebut menuntut ongkos manusianya sendiri, penderitaan manusianya sendiri. Meskipun kedua model sebagaimana yang diterapkan di Brasil dan Cina tersebut harus ditolak, secara teoretis keduanya dapat diperbaiki. Dan bagi Berger, untuk memperbaiki model-model ini, “kalkulus penderitaan” dan “kalkulus makna” harus diper-

hitungkan. Yang pertama merujuk pada gagasan bahwa penderitaan manusia (kematian, ketakutan, penderitaan) tidak boleh dipertaruhkan untuk “mencapai pertumbuhan masa depan” atau janji masyarakat komunistik. Yang kedua merujuk pada gagasan bahwa setiap orang memiliki nuraninya sendiri; demikian juga setiap kelompok manusia. Mereka semua memiliki sistem maknanya sendiri yang harus dihargai oleh siapapun yang ingin menerapkan model-model pembangunan atas kehidupan mereka. Dan karena model-model pembangunan tersebut mengandung makna dan nilai pada dirinya sendiri, orang-orang harus ditanya sebelum suatu model tertentu diterapkan. Pendeknya, apa yang coba diperkenalkan Berger melalui konsep-konsep ini adalah kalkulus moral: manusia tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai suatu agregat; mereka harus diperlakukan dengan hormat.

Revolusi Kapitalis

Perpaduan teknologi modern (industri) dan kapitalisme, menurut Berger, merupakan suatu kekuatan yang paling produktif: “Kapitalisme industri telah menghasilkan kekuatan produktif terbesar dalam sejarah manusia” (hlm. 36). Alasannya, bagi Berger, adalah kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan pasar memberikan insentif terbaik bagi produktivitas yang terus-menerus meningkat:

...pasar, dengan rujukan-rujukan harganya, adalah komputer pertama yang ditemukan oleh manusia; hingga sekarang ini, pasar tidak memiliki saingan dalam menyediakan baik informasi maupun insentif bagi tiap-tiap individu cerdas yang ingin memperbaiki nasib ekonomi mereka. Tentu saja, individu-individu ini adalah orang-orang yang dalam keadaan “baik” akan menjadi para pengusaha. Sang insinyur mungkin memiliki motif-motif yang sangat berbeda; ia mungkin tidak memiliki aspirasi ekonomi samasekali; ia

hanya ingin memperbaiki berbagai peralatannya dan melihat bagaimana peralatan tersebut bisa dibuat berfungsi. Namun ekonomi pasar memberikan konteks sosioekonomi yang paling menjanjikan di mana di dalamnya jenis kecerdasan manusia ini, yakni kecerdasan insinyur, bisa berkembang. Dan inilah alasan mengapa perpaduan kapitalisme dan teknologi modern merupakan suatu perpaduan yang produktif. (hlm. 37)

Dengan kata lain, pasar, dengan semua faktor di dalamnya, seperti hubungan ‘rasional’ antara permintaan dan penawaran, ‘kebebasan’ untuk melakukan bisnis dan mendapatkan keuntungan, serta dorongan untuk menjadi kaya, memberi konteks sosio-ekonomi yang optimal bagi teknologi modern untuk menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat manusia.

Di sisi lain, sosialisme, meskipun ia juga bisa berjalan bersama teknologi modern (industri), memiliki kemampuan inherent untuk menginstitutionalisasi produktivitas yang rendah (di sini posisi Berger tidak berbeda dari posisinya dalam buku sebelumnya). Menurut Berger, benar bahwa Uni Soviet, misalnya, adalah sebuah negara industri maju. Namun “ia secara intrinsik mustahil untuk merencanakan efisiensi bagi perekonomian sebuah negara-bangsa modern, khususnya jika hal itu secepat Uni Soviet. ‘Rencana’ tersebut jarang sekali berjalan sebagaimana diinginkan”. (hlm. 176). Berger kemudian melanjutkan:

sebagian besar ekonom setuju bahwa persoalan ini inherent karena penghapusan pasar menghilangkan informasi yang disediakan oleh sistem harga. Usaha-usaha untuk memperkenalkan komputer (utopia yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “sosialisme matematis”) juga terus-menerus gagal. Sebagaimana yang dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi Hungaria, bahkan seorang birokrat yang sangat ketat lebih fleksibel ketimbang komputer yang paling fleksibel. (hlm. 176)

Selain produktivitas ekonomi, kapitalisme juga sejalan dengan kebebasan politik (demokrasi). “Semua demokrasi,” tulis Berger, “adalah kapitalis; tidak ada demokrasi yang sosialis.” (hlm. 76). Tentu saja Berger juga mengakui bahwa banyak masyarakat kapitalis tidak demokratis. Namun baginya, kapitalisme merupakan syarat yang diperlukan, meskipun tidak memadai, bagi demokrasi. Ia menolak argumen Joseph Schumpeter bahwa asosiasi antara demokrasi dan kapitalisme hanyalah kebetulan sejarah, dan bahwa demokrasi mungkin dijalankan baik dalam sosialisme maupun kapitalisme.

Negara modern, karena kontrolnya atas banyak sumberdaya seperti teknologi dan birokrasi, melambangkan akumulasi kekuasaan dalam sejarah manusia. Dengan demikian, negara modern memiliki “kecenderungan inheren untuk memperluas kekuasaannya semakin jauh ke dalam masyarakat, kecuali jika ia dicegah dengan berbagai pembatasan yang terlembagakan” (hlm. 79). Dan bagi Berger, hanya kapitalisme yang menyediakan pembatasan-pembatasan ini: ia menciptakan dinamikanya sendiri, sektor-sektor ekonomi dan sosialnya sendiri, yang merupakan wilayah yang relatif otonom. Kapitalisme memunculkan para pengusaha, pengacara, dst., yang independen dan bebas dari kontrol negara. Kapitalisme juga memunculkan sektor-sektor bisnis yang bebas dari campur-tangan negara. Sebaliknya, sosialisme, karena kecenderungannya untuk membirokratisasikan semua sektor ekonomi, tidak memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertindak secara independen dari negara. Ia tidak memberi kemungkinan bagi benih-benih demokrasi untuk berkembang. Karena itu, sementara kapitalisme “sesuai” dengan demokrasi, sosialisme “sesuai” dengan kecenderungan totalitarian negara modern.

Setelah menjelaskan “fenomena umum” kapitalisme dan sosialisme ini, Berger kemudian mengulas Dunia Ketiga dan proses pembangunannya. Di sini ia memberikan suatu penilaian

yang “kuat”: “Pembangunan kapitalis, dibanding pembangunan sosialis, lebih mungkin memperbaiki standar kehidupan materiil orang-orang di Dunia Ketiga sekarang ini, termasuk kelompok-kelompok termiskin” (hlm. 136).

Untuk mempertahankan argumen ini, ia pertama-tama tentu saja harus menolak teori-teori dependensia, teori-teori yang dalam bukunya yang sebelumnya ia puji-puji. Dalam hal ini ia berkata: “Sangat sulit mengatakan bahwa, *secara keseluruhan*, masuknya ekonomi kapitalis ke negara-negara Dunia Ketiga telah membahayakan perekonomian negara-negara tersebut” (hlm. 126; huruf miring dari teks asli). Ia mengecam gagasan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional hanya merupakan agen-agen “sang metropolis” untuk melanggengkan keterbelakangan di Dunia Ketiga; sebaliknya, baginya, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut, “terlepas dari dosa-dosa apapun yang mungkin telah mereka lakukan di berbagai tempat, adalah sarana-sarana yang paling penting bagi transfer modal dan teknologi ke negara-negara Dunia Ketiga, pelatihan orang-orang pribumi dalam berbagai keahlian ekonomi modern, dan penerimaan pajak ke dalam keuangan Dunia Ketiga” (hlm. 127).

Imperialisme tidak ada kaitannya dengan keterbelakangan atau pembangunan di Dunia Ketiga. Dengan demikian, tingkat ketergantungan sebuah perekonomian nasional, “tidak relevan dengan persoalan pembangunan” (hlm. 129). Untuk mempertahankan argumen ini Berger mengatakan bahwa Jepang adalah contoh sempurna. “Jika memang ada korban imperialisme, itu adalah Jepang” (hlm. 128). Namun Jepang kemudian menjalankan salah satu pembangunan yang paling mengesankan dalam seluruh sejarah negara modern. Keberhasilan pembangunan kapitalis di Asia Timur memberi alasan lain—dan paling kuat—bagi Berger untuk menolak teori-teori dependensia. Saya akan menjelaskan pandangan Berger atas negara-negara

ini dalam paragraf berikutnya. Singkat kata, bertentangan dengan teori-teori dependensia yang sebelumnya ia puji, Berger kini menyimpulkan bahwa: “Masuknya sebuah negara Dunia Ketiga ke dalam sistem kapitalis internasional cenderung menguntungkan perkembangannya” (hlm. 129).

Alasan terkuat bagi Berger untuk memilih model pembangunan kapitalis sebagai model terbaik bagi Dunia Ketiga adalah kekagumannya atas keberhasilan perekonomian negara-negara Asia Timur (Jepang dan Empat Naga Kecil). Negara-negara ini, dalam dua atau tiga dekade proses pembangunannya, telah hampir sepenuhnya mengikis kemiskinan, mengalami angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi (7% hingga 10% per tahun), menciptakan suatu dasar yang sangat kuat bagi berbagai produksi manufaktur, dan telah meningkatkan kemampuan (pendidikan) sumberdaya manusianya dengan sangat cepat. Selain itu, mereka memperlihatkan bahwa pembangunan negara mereka bisa menghasilkan kesetaraan ekonomi relatif yang lebih besar ketimbang sebagian besar negara industri Barat. Jepang misalnya. Pada 1977, rasio 20% kelompok pendapatan tertinggi dibanding terendah adalah 4,1 (AS pada 1972 adalah 9,5; Swedia pada 1972 adalah 5,6; dan UK pada 1979 adalah 5,6). Atau Taiwan misalnya. Dari 1964 hingga 1979, *share* pendapatan 20% keluarga termiskin meningkat dari 7,7 menjadi 8,6%, sementara *share* 20% keluarga terkaya menurun dari 41,1 menjadi 37,5%. Pendeknya, dalam kesimpulan Berger, perkembangan ekonomi Asia Timur menyangkal, atau bahkan menolak, tesis Kuznets. Pada masa-masa awal pembangunan di AS, Britania, Prancis, dan Jerman, ketidaksetaraan yang begitu besar terjadi sebelum kesetaraan ekonomi relatif bisa dicapai dengan dasar yang lebih kokoh. Di Asia Timur, dalam tahap-tahap awal pembangunan Taiwan, misalnya, si miskin lebih cepat menjadi lebih kaya dibanding si kaya menjadi lebih kaya. (hlm. 140-152).

Pendeknya, bagi Berger, keberhasilan perekonomian Asia Timur adalah suatu mukjizat, Kasus Kedua dalam sejarah pembangunan ekonomi kapitalis. Dan karena itu, menurut Berger, “Asia Timur menegaskan kekuatan produktif yang superior dari kapitalisme industri” (hlm. 153).

Berger menjelaskan bahwa, di bawah kapitalisme, kunci keberhasilan ekonomi negara-negara ini terletak dalam budaya Sinitik yang mendorong orang untuk bekerja lebih keras, menghormati otoritas, dan bersikap asketis. Dengan demikian, baginya, Etika Sinitik tersebut merupakan ganti (atau dalam istilah Berger: “padanan fungsional”) dari Etika Protestan yang dianggap Weber memiliki peran penting dalam perkembangan kapitalisme Barat. (hlm. 161)

Jelas bahwa dalam *Capitalist Revolution*, Peter Berger meninggalkan “netralitas”-nya dan bergerak ke “kanan”. Bagi Dunia Ketiga, menurutnya, model pembangunan kapitalis adalah pertarungan yang secara moral lebih aman. Sebagaimana yang bisa kita lihat dari berbagai penjelasan di atas, ia menolak posisinya sebelumnya⁷³ karena baginya kapitalisme sangat mungkin akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar, dan bisa memunculkan dorongan-dorongan yang diperlukan untuk membangun demokrasi. Namun faktor paling penting yang mengubah posisinya adalah pengakuannya akan realitas empiris: mukjizat ekonomi Asia Timur. Dalam hal ini, menarik untuk melihat bagaimana ia menggambarkan pengalamannya dalam Pendahuluan *Capitalist Revolution*:

73 Dalam salah satu artikelnya yang ia tulis pada 1985, satu tahun sebelum *Capitalist Revolution* diterbitkan, Berger berkata: “Jelas, *Pyramids of Sacrifice* kini usang, karena berbagai perubahan yang terjadi di dunia....” (Berger dan Novak, *Speaking to the Third World*, Washington DC., 1985, hlm. 23).

Ketika saya mulai menyibukkan diri saya dengan persoalan-persoalan (pembangunan) ini secara lebih serius dibanding 15 tahun yang lalu, saya sangat terbuka pada kemungkinan bahwa sosialisme mungkin merupakan suatu bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang lebih manusiawi. Tekanan bukti-bukti empirislah—yang masuk ke dalam pikiran saya selama bertahun-tahun kerja—yang mendorong saya untuk meyakini pandangan yang sekarang ini saya yakini. Mungkin ini merupakan salah satu dari berbagai ironi karier pribadi saya bahwa.... saya bergeser ke “kanan” meski sekelompok kolega saya dalam ilmu sosial bergeser ke “kiri”.

...Titik balik bagi saya terjadi pada pertengahan 1970-an, ketika saya pertama kali mengalami Asia dan terutama masyarakat-masyarakat yang mungkin disebut orang sebagai “bulan sabit kemakmuran”, yang terentang mulai dari Jepang hingga ke semenanjung Malaya. Pengalaman dengan Asia Timur tersebut menjadikan saya sulit untuk tetap berada di tengah-tengah antara model pembangunan kapitalis dan sosialis. (hlm. 10 dan 12)

Kini bagaimana kita menilai *Capitalist Revolution* tersebut? Pertama-tama, penting untuk dicatat bahwa *Capitalist Revolution* tersebut diterbitkan pada masa ketika gelombang privatisasi atau liberalisasi ekonomi terjadi di banyak negara Dunia Ketiga, suatu gelombang yang mencerminkan pengakuan terhadap pasar sebagai mekanisme yang lebih baik untuk mengelola barang dan jasa.

Dengan demikian, jika kita mengingat bahwa tiga tahun setelah penerbitan buku itu "Kekaisaran" Soviet mulai runtuh, kita dapat mengatakan bahwa kini “tidak ada gunanya” menentang Berger. Terlepas dari para ideolog yang keras kepala, setiap orang yang berakal sehat kini tampaknya meyakini pandangan bahwa kapitalisme merupakan satu-satunya mekanisme yang memadai bagi masyarakat-masyarakat modern

untuk mengalokasikan, mendistribusikan, dan menghasilkan barang dan jasa yang mereka perlukan.

Jadi persoalannya sekarang adalah: jenis kapitalisme apa? Seberapa jauh peran pemerintah dalam pasar diperbolehkan? Di mana batas yang optimal antara usaha publik dan privat? Terutama bagi negara-negara Dunia Ketiga yang ingin mengikuti keberhasilan ekonomi Asia Timur, pertanyaan-pertanyaan ini jelas lebih penting ketimbang pernyataan atau proposisi bahwa “kapitalisme lebih baik dibanding sosialisme”. Karena itu, bagi para pembaca pada 1992 yang ingin menemukan cara yang lebih baik bagi pembangunan di Dunia Ketiga, *Capitalist Revolution* karya Berger tersebut tampak telah “usang”. Karya tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan lama. Atau sebagaimana yang dikemukakan Lester C. Thurow: Buku Berger tersebut adalah sebuah buku yang sangat bagus, namun buku itu menghindari isu-isu riil. Memang, keyakinan Berger bahwa Etika Sinitik memainkan peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan ekonomi kapitalis Asia Timur pada dirinya sendiri merupakan “resep” bagi Dunia Ketiga. Hal itu mengandaikan bahwa untuk bisa berhasil, negara-negara Dunia Ketiga yang lain juga harus mengambil elemen-elemen Etika Sinitik tersebut: mereka harus bekerja keras, menghormati otoritas, dan bersikap asketis. Namun jenis jawaban “budaya” bagi pembangunan di Dunia Ketiga ini hampir bukan merupakan jawaban yang baru. Terlalu terlambat sekarang ini bagi Berger untuk memancing suatu perdebatan yang bermanfaat tentang pembangunan dengan hanya menggunakan “perspektif budaya”.

Berger tentu saja telah memberi kita suatu pemahaman yang sangat bernilai tentang bagaimana kapitalisme dan sosialisme berjalan “secara umum”. Dan karena sebagian besar dari kita sekarang ini—dengan melihat “falsifikasi empiris” yang terjadi di negara-negara komunis dua atau tiga tahun

yang lalu—sama-sama meyakini bahwa kapitalisme merupakan satu-satunya sistem sosio-ekonomi yang paling memadai bagi suatu masyarakat di zaman modern, tugas berikutnya adalah menemukan peran yang tepat bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan, mencari hubungan ekonomi yang optimal antara sektor publik dan privat, dan mempelajari berbagai kebijakan publik yang mengusung kepentingan terbaik negara-negara Dunia Ketiga untuk menciptakan baik pertumbuhan ekonomi maupun kesetaraan sosial. Berger mungkin memerlukan buku lain untuk menyelesaikan tugas yang sulit namun menarik ini.

Hentikan Kebiadaban:

**Tentang Integrasi Nasional, Separatisme,
Konflik Etnik dan Daerah**

Akankah Sejarah Berulang?

SETELAH PEMILU pertama pada 1955, sistem politik kita waktu itu sah untuk disebut sebagai sistem demokratis. Tetapi sayangnya ia berumur sangat singkat, kurang lebih hanya tiga tahun. Baru 44 tahun kemudian kita bisa mengadakan pemilu yang sama bebasnya lagi. Tetapi, akankah sistem pemerintahan demokratis yang sudah diawali oleh pemilu yang relatif bebas dan jujur ini juga akan berumur pendek? Akankah sejarah berulang?

Kedua pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan pasti. Tetapi kita mungkin bisa melihat masa lalu, sekadar untuk memperoleh beberapa kearifan yang dapat membantu kita untuk mengerti kemungkinan masa depan. Dalam hal ini kita bisa mempelajari apa yang terjadi pada eksperimen demokrasi pertama pada pertengahan 1950-an. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya eksperimen itu? Apakah faktor-faktor itu, paling tidak benih-benihnya, sudah mulai muncul lagi sekarang, saat kita untuk kedua kalinya melakukan eksperimen demokrasi?

Mengenai kegagalan eksperimen demokrasi pada 1950-an, sudah cukup banyak analisis yang diberikan oleh kalangan sejarawan dan ilmuwan politik. Tetapi kalau dirangkum secara se-

derhana, faktor-faktor penyebab gagalnya eksperimen itu adalah sebagai berikut:

Pertama, terkikisnya legitimasi sistem politik. Pemilu 1955, sama dengan Pemilu 1999, tidak menghasilkan pemenang mutlak. Hal ini mengharuskan pembentukan koalisi antarpartai untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyelesaikan soal-soal fundamental yang masih tersisa setelah revolusi kemerdekaan, yaitu perumusan dasar negara dan pembaharuan konstitusi. Tetapi ikatan-ikatan koalisi partai ternyata kemudian berjalan dengan cair dan tanpa pola yang jelas. Koalisi mereka berumur singkat. Dan setiap kali koalisi pecah, pemerintah pun berganti.

Yang terjadi kemudian adalah kebuntuan politik. Sistem politik pada umumnya, dan pemerintah khususnya, tidak mampu menjalankan peran yang diembannya. Rumusan dasar negara dan konstitusi yang baru tidak kunjung terselesaikan. Rencana pembangunan ekonomi yang dirancang pertama kali pada 1956 terbengkalai, dan pada saat yang hampir sama eksperimen ekonomi untuk mengangkat nasib kaum pribumi dengan Program Benteng berubah menjadi arena korupsi dan kemunafikan. Waktu itulah istilah “pengusaha Ali-Baba” dan istilah “kongkalikong” (antara politisi partai, kaum birokrat, dan kaum pengusaha) menjadi sangat populer.

Semua hal ini berlawanan dengan harapan masyarakat pada saat itu. Setelah pengalihan kedaulatan pada Desember 1949, kabinet yang terbentuk jatuh bangun dan tingkat ketidakpastian politik mencapai titik yang berbahaya. Karena itu, masyarakat berharap bahwa Pemilu 1955 dapat menyelesaikan persoalan ini dan memberi kepastian politik yang lebih tinggi. Dan wajar juga jika mereka berharap bahwa pemerintahan pertama hasil pemilu nantinya akan mulai membangun jembatan emas menuju masyarakat yang lebih makmur, melakukan langkah-langkah untuk mulai meninggalkan segala kesulitan ekono-

mi yang dialami sejak zaman Jepang dan zaman revolusi kemerdekaan. Tetapi harapan ini kemudian terkikis, dan bersamanya terkikis pula legitimasi sistem politik yang ada saat itu.

Kedua, merebaknya pemberontakan daerah. Di tengah jatuh banggunya pemerintahan di Jakarta, semangat perlawanan daerah terhadap pusat menguat di Sulawesi dan Sumatra. Dua tahun setelah Pemilu 1955, Panglima Daerah Militer Indonesia Timur Kolonel Sumual mengambil-alih kepemimpinan dengan memberlakukan keadaan darurat secara sepihak. Setahun kemudian, gerakan Permesta ini disusul oleh gerakan revolusioner di Bukit Tinggi (PRRI), yang dimotori antara lain oleh Panglima Daerah Militer Sumatra Barat Letkol Husein dan didukung oleh beberapa pentolan politik nasional yang berasal dari Masyumi dan PSI, seperti Sjafruddin Prawiranegara, Mohammad Natsir, dan Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Walau berbeda latar belakang dan tujuannya, kedua pemberontakan daerah itu menciptakan hal yang sama, yaitu krisis integritas negara. Kita mungkin bisa berdebat soal keabsahan pemberontakan mereka secara moral, tetapi tindakan pemberontakan itu sendiri menciptakan dualisme otoritas dan krisis konstitusional. Dengan pemberontakan demikian, Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan hukum dan unit teritorial terancam pecah atau kehilangan kewibawaan.

Ketiga, peran Soekarno dan tentara. Soekarno dan tentara adalah dua pemeran terpenting dalam masa revolusi kemerdekaan. Tetapi sistem politik setelah pengalihan kedaulatan pada 1949 dan Pemilu 1955 tidak memberi tempat yang jelas bagi keduanya. Karena itu, dengan munculnya dua faktor di atas, yaitu krisis legitimasi sistem politik dan merebaknya pemberontakan daerah, kedua aktor terpenting yang melahirkan republik kita itu kemudian memperoleh basis pembenaran untuk “menyelamatkan negara” dan mengambil-alih kepemimpinan secara langsung.

Tentara memberi sumber kekuatan riil untuk menyelesaikan berbagai persoalan pemberontakan daerah, sementara Soekarno mengembalikan secara simbolis kewibawaan dan keutuhan negara. Dengan kemahiran retorikanya dan dengan mengan-dalkan posisinya sebagai Bapak Bangsa, Soekarno meyakinkan masyarakat bahwa sumber perpecahan dan segala persoalan bangsa saat itu adalah partai-partai politik. Sebagai jalan ke luarnya, Soekarno menawarkan solusi non-partai, yaitu konsepsi demokrasi terpimpin yang langsung dipimpinya sendiri.

Di lihat dalam konteks kemelut di zaman itu, solusi non-partai demikian bukan hanya cukup masuk akal, tetapi juga secara politik mendapat sambutan luas dan antusias dari masyarakat.

Ketiga faktor itulah yang hadir secara bersamaan dan menjadi penyebab runtuhnya eksperimen demokrasi pertama kita. Ketiganya berhubungan dengan erat dan saling memperkuat. Tanpa kehadiran faktor pertama, misalnya, faktor kedua mungkin tidak akan muncul. Jika pemerintah pusat di Jakarta dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, peluang bagi merebaknya ketidakpuasan daerah akan mengecil. Dan tanpa kehadiran kedua faktor itu, jelas Soekarno dan tentara tidak memiliki alasan apapun untuk mengambil-alih kekuasaan dan memainkan peran politik mereka secara langsung.

Demikian pula, walaupun faktor pertama dan kedua sudah muncul, namun jika Soekarno dan tentara memilih melakukan peran yang berbeda, maka jalan sejarah pada akhir 1950-an dan awal 1960-an bisa berbeda samasekali.

Pertanyaan kita sekarang adalah apakah faktor-faktor yang menguburkan eksperimen demokrasi seperti itu juga sudah mulai hadir sekarang? Apakah tanda-tandanya sudah dapat kita rasakan? Mungkin betul bahwa sekarang masih terlalu dini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Tetapi, di tengah suasana politik dan kondisi kemasyarakatan yang berkembang akhir-

akhir ini, sulit bagi kita untuk berkata dengan meyakinkan bahwa benih faktor-faktor itu tidak atau belum terlihat samasekali.

Tanda-tanda cairnya koalisi antarpantai seperti yang terjadi pada 1950-an sudah bisa mulai terlihat dengan cukup jelas. Sepuluh bulan lalu koalisi Poros Tengah dan Golkar membendung PDI-P dengan menaikkan Abdurrahman Wahid ke pangung kekuasaan. Sekarang kita semua tahu bahwa kedua kelompok pertama itu adalah pihak-pihak yang paling kritis terhadap tokoh yang mereka naikkan sendiri. Di kalangan Poros Tengah sendiri pun ikatan-ikatan yang terjadi tidak sekokoh yang tampak di permukaan. Dalam soal hubungan Islam dan negara misalnya, sebagian pendukung PAN dan Amien Rais bisa dengan sengit bertentangan dengan tokoh dan massa pendukung PPP. Demikian pula, PDI-P dan PKB bisa sepakat dalam satu hal, tetapi dalam hal lain lagi keduanya bisa menjadi seteru yang fanatik.

Pada 1950-an, cairnya basis koalisi antarpantai berakibat langsung pada jatuh bangunnya kabinet pemerintah. Sekarang hal ini memang belum kita lihat. Tetapi bukankah isu-isu di sekitar *reshuffle* kabinet sudah memberi indikasi ke arah sana? Kalau ia benar terjadi, dan dilakukan secara luas dan menyangkut posisi-posisi kementerian yang vital, maka sesungguhnya secara praktis satu kabinet sudah jatuh, dalam waktu kurang dari setahun (kabinet koalisi pertama setelah Pemilu 1955 yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo berusia lebih panjang dari itu!).

Yang masih agak kabur adalah dampak cairnya basis koalisi antarpantai saat ini dengan berbagai kesulitan pemerintah dalam melakukan perannya, seperti pembangunan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan sebagainya. Tetapi, di sini pun kita sudah mulai cukup sering mendengar keluhan bahwa berbagai kesulitan pemerintah selama ini bersumber dari pertentangan kepentingan dan perbedaan konsepsi para elite partai politik.

Malahan, dalam dua tiga bulan terakhir sudah muncul suara-suara yang berkata bahwa kabinet dan lembaga-lembaga pemerintahan hanya akan bekerja dengan baik jika dipimpin oleh tokoh-tokoh non-partai, kaum profesional dan aktor-aktor non-politis. Bukankah suara-suara seperti ini dapat menjadi indikasi yang cukup jelas bahwa legitimasi dan kepercayaan pada partai dan pemimpinnya memang sudah mulai surut? Betul bahwa sekarang suara-suara semacam itu mungkin belum sekeras suara-suara antipartai yang terjadi pada akhir 1950-an. Tetapi, adakah jaminan bahwa ia tidak akan menemukan momentumnya untuk semakin merasuk ke dalam kesadaran masyarakat luas?

Singkatnya, benih-benih faktor pertama yang bisa menyebabkan gagalnya eksperimen demokrasi kedua kita sudah mulai muncul. Tingkat perkembangannya di tahun-tahun mendatang memang belum pasti, tetapi yang jelas dia sudah muncul dan mungkin sedang menanti momentum sejarah untuk mengangkanya menjadi gejala politik dominan.

Bagaimana dengan faktor berikutnya? Sekarang memang tidak ada pemberontakan daerah yang dipimpin oleh kombinasi elite militer dan tokoh politik nasional seperti yang terjadi pada 1950-an. Yang terjadi akhir-akhir ini di banyak daerah lebih berbentuk kerusuhan dan munculnya aspirasi nasionalisme lokal pada tingkat massa. Bentuk yang pertama dengan baik diwakili oleh konflik-konflik di Maluku dan Poso, sementara bentuk yang kedua oleh maraknya aspirasi kemerdekaan di Aceh dan Irian Jaya.

Gerakan Permesta dan pemberontakan PRRI menimbulkan dualisme otoritas dan menyebabkan negara mengalami krisis kewibawaan. Apa yang terjadi di Maluku, Poso, Aceh, dan Irian Jaya pada dasarnya juga berakibat sama, malahan dalam kadar tertentu, karena terjadi pada tingkat massa, dampaknya sebenarnya lebih dahsyat lagi. Di Maluku misalnya, negara sudah

betul-betul terpuruk wibawa dan otoritasnya, sehingga aparat-aparat negara di semua tingkat sepertinya sudah kehilangan akal harus berbuat apa. Sepanjang sejarah republik kita, belum pernah hal yang seperti ini terjadi, di mana konflik-konflik yang begitu keras dan memalukan di tingkat massa samasekali tidak dapat dijembatani dan diselesaikan oleh negara.

Seperti juga dengan faktor sebelumnya, faktor ini belum dapat diperkirakan dengan pasti ke mana arah dan perkembangannya. Tetapi dengan kualitas kepemimpinan yang kita punyai sekarang, dan terutama dengan keanehan dan ketidakpastian kebijakan yang ditempuh oleh Presiden Gus Dur, saya menduga bahwa persoalan-persoalan ini hanya akan semakin genting, bukan sebaliknya. Selama 10 bulan terakhir kita sudah bisa membaca sosok Gus Dur sebagai seorang pemimpin. Ia bukan tokoh yang kuat dan tidak memiliki kemampuan untuk melahirkan kebijakan yang konsisten dan efektif.

Singkatnya, Gus Dur tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk berperan sebagai pemimpin tertinggi yang dapat mengembalikan kewibawaan dan otoritas negara. Dia adalah *the wrong man, in the wrong place, and at the wrong time*. Di bawah kepemimpinan Gus Dur, bangsa kita sepertinya terkunci oleh sebuah hukum yang sering dikenal sebagai "*Murphy's Law*": apa saja yang mungkin menjadi buruk, akan menjadi buruk.

Jadi, faktor kedua yang dapat menggagalkan eksperimen demokrasi kita juga sudah ada. Yang belum ada saat ini adalah faktor terakhir, yaitu sosok yang memainkan peranan Soekarno dan tentara pada akhir 1950-an. Dalam hal ini kita bisa sedikit berlapang dada, sebab dalam waktu dekat ini sosok demikian mungkin belum akan muncul di horizon politik kita. Megawati bukan Soekarno, dan tentara saat ini masih sedang mengalami *post-Soeharto shock* yang membuatnya kehilangan inisiatif untuk bertindak dengan tegas.

Generasi pemimpin TNI yang ada saat ini tidak memiliki kredibilitas yang tinggi sebagaimana yang dinikmati oleh generasi Jenderal Nasution pada 1950-an. Walau demikian, kita jangan lupa pada sebuah diktum, yakni sejarah sering menciptakan aktor-aktornya sendiri. Jika tingkat kredibilitas partai-partai politik terus menurun, jika pemerintah sulit menjalankan perannya dengan baik, dan jika konflik-konflik dan aksi-aksi separatisme di daerah terus- menerus terjadi dan wibawa negara terus terpuruk, maka pada waktunya nanti akan lahir aktor-aktor alternatif yang menawarkan solusi “baru” (anggur lama di botol baru!) Dan, seperti yang terjadi pada akhir 1950-an, solusi semacam ini mungkin akan didukung oleh rakyat secara antusias.

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyebarkan pesimisme atas masa depan sistem demokrasi kita, melainkan lebih untuk mengingatkan kita semua untuk tidak berpikir bahwa demokrasi sudah menjadi milik kita selama-lamanya. Dari pengalaman kita sendiri, dan juga dari pengalaman banyak negara lain, sudah terbukti bahwa sistem yang ideal ini berkembang sering tidak dengan mengikuti garis sejarah yang lurus.

Demokrasi hanya bisa berkembang dan menjadi kokoh dalam waktu yang lama dan bertahap. Tetapi, ia dapat tumbang dan ditumbangkan dalam waktu yang relatif cepat. Karena itu, mata kita harus senantiasa terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan negatif yang mungkin akan menguburkan harapan kita bersama.

Dengan menyadari bahwa beberapa kemungkinan demikian sudah mulai muncul di permukaan, kita bisa melakukan hal-hal penting yang dapat mempertahankan eksperimen besar kita kali ini, terus-menerus. Sejarah mungkin akan berulang, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk mencegahnya.

17 Agustus 2000

Pemberontakan Daerah dan Demokrasi

(“Rejoinder” buat Asvi Warman Adam)

DALAM SATU TULISAN belum lama ini, saya mencoba menelusuri beberapa kemungkinan yang bisa menggagalkan eksperimen demokrasi kita saat ini (*Akankah Sejarah Berulang, Kompas, 17/8/00*). Dalam melakukan hal itu saya melihat kembali ke masa lalu dan mencari faktor-faktor yang menguburkan eksperimen demokrasi pada 1950-an. Saya ingin memetik pelajaran dari sejarah dan dengan itu menyumbangkan pikiran, betapapun kecilnya, agar kita tidak terjerumus ke lubang yang sama untuk kedua kalinya.

Tulisan ini ditanggapi Asvi Warman Adam (*Demiliterisasi Sejarah Indonesia, Kompas, 2/9/00*). Dalam tanggapannya, Asvi tidak membahas tulisan saya secara utuh. Dia tidak ingin berbicara soal demokrasi dan problem demokratisasi secara umum. Yang disoroti sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini adalah masalah pemberontakan daerah, yaitu gerakan Permesta dan PRRI.

Asvi keberatan jika pemberontakan daerah dimasukkan sebagai salah satu faktor untuk menjelaskan rontoknya ekspe-

rimen demokrasi pada kurun 1950-an. Buat dia, pemerintah Soeharto-lah yang selalu berpendapat begitu. Karena itu, siapa-pun yang berbicara dengan nada sama, termasuk saya, berarti sudah termakan propaganda Orde Baru.

Atas tanggapan itu, saya ingin mengatakan beberapa hal. Namun sebelumnya, saya ingin menyinggung suatu hal yang sebenarnya tidak penting secara substansial, tetapi perlu dikemukakan untuk menjernihkan sebuah masalah yang cukup sering mengganggu dalam perdebatan sejarah di negeri kita.

Pandangan yang mengatakan, pemberontakan daerah yang dilakukan gerakan Permesta dan PRRI adalah aksi-aksi di luar hukum, berbahaya, dan berhubungan erat dengan gagalnya eksperimen demokrasi, sebenarnya bukanlah monopoli Soeharto dan Orde Baru semata. Banyak sejarawan dan ilmu politik mengatakan hal yang hampir sama, tentu dengan sudut pandang dan motivasi berbeda-beda. Misalnya, WF Wertheim, sejarawan Belanda, dalam bukunya yang terbit sebelum Orde Baru lahir (1959), *Indonesian Society in Transition*, malah menjelaskan, gerakan PRRI dan Permesta adalah kudeta dan aksi ilegal.

Hal itu juga diutarakan Herbert Feith. Dalam tulisannya, "Dynamics of Guided Democracy", yang terbit pada 1963 dalam sebuah buku yang disunting Ruth McVey, *Indonesia*, Feith lebih jauh lagi menjelaskan, pemberontakan daerah itulah yang menjadi salah satu dari dua faktor mengapa Soekarno dan Jenderal Nasution begitu cepat dapat menguburkan sistem demokrasi parlementer pada 1958-1959.

Tentu saja kita boleh tidak setuju dengan pandangan Wertheim dan Feith. Meski banyak dikenal sebagai ilmuwan serius dan tekun, keduanya bukan pemegang kebenaran terakhir. Namun demikian, ketidaksetujuan itu harus berdasarkan

pada argumen dan bukti-bukti sejarah yang kuat, bukan dengan *argumentum ad hominem*. Orang pasti akan terkesima jika kita berkata, Wertheim dan Feith keliru sebab pandangan mereka sudah termakan propaganda Orde Baru.

Kini, soal yang lebih substansial. Saya menganggap, pemberontakan daerah yang dimotori gerakan Permesta dan PRRI menciptakan krisis integritas negara. Negara kehilangan kewibawaan karena terciptanya dualisme otoritas dan para pemimpin partai serta aparat militer mengambil hukum di tangan mereka sendiri. Krisis semacam itulah, salah satunya, yang memancing Soekarno dan tentara untuk lebih memainkan peran politik mereka secara langsung dengan mendeklarasikan situasi darurat, dan kemudian menguburkan sistem demokrasi parlementer. Pendapat saya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Herbert Feith itu.

Bagi saya, bila kita lihat dengan saksama apa yang sesungguhnya terjadi pada kurun 1950-an, penolakan Asvi terhadap fakta bahwa pemberontakan daerah menciptakan krisis integritas negara menjadi agak membingungkan. Coba kita lihat gerakan Permesta. Diproklamirkan pada 2 Maret 1957, gerakan ini memang tidak ingin melepaskan diri dari republik. Walau begitu, para pemimpinnya, misalnya Komandan Militer Indonesia Timur Letkol Ventje Sumual, memaksakan berlakunya situasi darurat, dan dengan itu mengambil-alih pemerintahan secara langsung di daerah yang ada di bawah kekuasaannya. Pada saat itu wilayah kekuasaan Komando Militer Indonesia Timur tersebar dari Sulawesi hingga Bali serta seluruh kepulauan di Nusa Tenggara dan Maluku. Artinya, otoritas politik di hampir setengah wilayah republik yang sah direbut dengan paksa secara sepihak, dan dibarengi ancaman bersenjata.

Apakah itu bukan berarti krisis integritas negara? Bayangkan bila sekarang seluruh Panglima Kodam di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku bersatu serta melakukan hal yang

sama. Mereka mengangkat senjata, memproklamasikan situasi darurat, dan menyatakan tidak lagi tunduk pada pemerintah yang sah di bawah Presiden Abdurrahman Wahid. Bisakah sistem demokrasi menjawab tantangan yang demikian besar? Bila semua pemimpin regional, militer atau bukan, menerapkan cara yang sama dalam memperjuangkan kepentingan mereka, tidakkah situasi yang tercipta akan menggiring kita semua ke jurang perpecahan dahsyat yang merontokkan republik yang sudah dibangun dengan begitu banyak pengorbanan ini?

Bila contoh itu masih belum meyakinkan, mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu pemberontakan PRRI. Gerakan yang muncul setahun setelah Permesta ini justru lebih dahsyat lagi, sebab ia dimotori tidak hanya oleh petinggi militer regional di Sumatra, tetapi juga oleh pentolan-pentolan politik nasional yang ikut melahirkan republik kita seperti Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara dan Prof. Sumitro Djojohadikusumo, serta didukung bantuan senjata oleh salah satu negeri adikuasa, yaitu Amerika Serikat.

Gerakan ini membubarkan pemerintahan lokal dan salah satu pemimpinnya, yaitu Letkol Husein, Komandan Militer Sumatra Tengah, memberi ultimatum pada pemerintah pusat. Mereka memberi waktu lima hari bagi pemerintah di Jakarta untuk membubarkan kabinet yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, dan menggantikannya dengan sebuah kabinet profesional yang dipimpin Hatta atau Sultan Hamengku Buwono IX. Bila ultimatum ini tidak dipenuhi, mereka mengancam akan mendirikan pemerintahan sendiri di Sumatra, yang mereka sebut pemerintahan revolusioner.

Bila hal demikian tidak dapat disebut sebagai krisis yang membahayakan konstitusi dan mengancam integritas negara sebagai sebuah lembaga yang mengatur pembagian wewenang dan otoritas yang ada dalam sebuah masyarakat, terus terang saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Kabinet Ali Sastroamidjojo

saat itu adalah kabinet hasil Pemilu 1955 yang demokratis. Jadi pemerintah di Jakarta waktu itu, dengan segala kekurangannya, sudah sah untuk disebut sebagai pemerintahan yang dipilih oleh rakyat secara bebas. Tetapi, tokoh-tokoh PRRI tidak sabar menunggu pemilu berikutnya untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Sebaliknya, dengan ancaman bersenjata, dan dengan meminta bantuan senjata dari pihak asing, mereka ingin memaksakan kehendak serta menjatuhkan pemerintah pusat.

Sekali lagi, bayangkan bila hal demikian terjadi sekarang. Peran Masyumi pada 1950-an, katakanlah, dimainkan Poros Tengah saat ini, di bawah pimpinan Amien Rais. Mereka gagal memaksa Soekarno dan Hatta membubarkan kabinet, dan karena itu mereka ke Sumatra dan bergabung dengan para pimpinan militer di sana. Dari Padang kedua kubu ini lalu membubarkan pemerintahan sipil dan memberi ultimatum pada Soekarno disertai ancaman bersenjata dan ancaman untuk mendirikan negara di dalam negara.

Harus kita sebut sebagai apa peristiwa semacam itu? Apa yang akan diakibatkannya? Apakah gerakan demikian harus dipandang hanya sebagai gejala lokal dan hasil pertikaian internal tentara yang tidak memiliki konsekuensi luas dan mendalam? Jika pemberontakan demikian terjadi sekarang, apakah negara sebagai sebuah kesatuan hukum dan teritorial memang tidak akan terancam?

Saya mengerti bahwa terhadap semua itu Asvi masih bisa berkata, pemberontakan daerah terjadi sebab tokoh-tokoh di daerah memiliki alasan kuat untuk melakukannya. Dalam hal ini Asvi menyinggung soal ketimpangan pusat dan daerah, atau Jawa dan luar Jawa. Asvi seolah ingin berkata, karena kuat dan sahnya alasan demikian, gerakan Permesta dan PRRI yang ingin mengoreksi berbagai ketimpangan yang ada antara pusat

dan daerah, tidak dapat disebut sebagai pemberontakan yang mengancam negara dan menjatuhkan demokrasi.

Dengan cara ini, meski tidak dijelaskan secara eksplisit, Asvi ingin mengesampingkan pertimbangan mengenai metode penyelesaian masalah dan lebih menekankan soal substansi isu yang diperjuangkan para pentolan Permesta dan PRRI.

Bagi saya, pada tingkat tertentu, hal ini bisa diterima. Terhadap pemerintahan seperti dipimpin Hitler, Stalin, dan Pol Pot, misalnya, pemberontakan bersenjata menjadi sah dan perlu secara moral. Dalam hal ini, mereka yang memberontak terhadap Hitler di Jerman, Stalin di Uni Soviet, dan Pol Pot di Kamboja, tidak dapat dikatakan sebagai penghancur negara. Justru sebaliknya, mereka harus disebut patriot sejati, sebab tingkat kejahatan pemerintahan Hitler, Stalin, dan Pol Pot memang sudah luarbiasa besarnya.

Pertanyaan saya sekarang, tindakan apa dari pemerintahan Ali Sastroamidjojo yang sudah bisa digolongkan sebagai kejahatan yang mendekati tindakan Hitler di Jerman, misalnya, sehingga pemberontakan bersenjata PRRI sudah bisa dianggap sah secara moral? Pada periode 1950-an, adakah ketimpangan Jawa dan luar Jawa yang sudah sedemikian besar sehingga mekanisme-mekanisme politik yang demokratis tidak lagi bisa mengatasinya? Bila ketimpangan itu ada, apakah ia bagian rencana yang disengaja dari pemerintah pusat, atau ia terjadi bukan karena kesalahan siapapun?

Bagi saya, jawaban dari semua pertanyaan itu sudah jelas. Dalam soal ketimpangan ekonomi Jawa dan luar Jawa, misalnya, tidak ada indikator ekonomi pada periode itu yang mengatankan, persoalan yang ada sudah sedemikian parah. Waktu itu kita semua hampir sama miskinnya. Memang, dalam periode 1952-1959 ada kecenderungan yang menunjukkan, secara relatif tingkat kesulitan ekonomi lebih meningkat di luar Jawa ketimbang di Jawa. Tetapi hal ini bukan kesalahan kabinet Ali

Sastroamidjojo dan bukan pula bagian dari rencana jahat siapapun.

“Bonanza” ekonomi yang datang dari Perang Korea berakhir pada 1952, dan setelah itu pasar dunia bagi barang andalan ekspor kita yang banyak berasal dari luar Jawa, menurun drastis. Salah satu andalan ekspor ini adalah karet mentah, yang umumnya berasal dari Sumatra. Pada 1952 ekspor kita mencapai Rp2,5 miliar, tetapi pada 1958 angka ini hanya Rp1,7 miliar. Jadi tidak heran jika tokoh-tokoh di Sumatra mengeluh karena penghidupan rakyat di sana menjadi lebih susah (inilah sebenarnya yang menjadi sebab mengapa penyelundupan yang dilakukan tokoh-tokoh militer, merebak di daerah saat itu, lalu menambah ketegangan yang ada dengan pemerintah pusat).

Selain itu, walaupun ada kesalahan yang bisa ditimpakan kepada pemerintahan di Jakarta, mungkin dapat ditemukan pada kebijakan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah terhadap dollar. Selama delapan tahun (1952-1959) nilai dollar dipatok (satu dollar AS = Rp11,47), tanpa mempertimbangkan fluktuasi ekonomi internasional. Pada saat kinerja ekonomi menurun, nilai tukar rupiah secara riil (bukan nilai patokan pemerintah) ikut menurun. Sialnya, penurunan nilai tukar ini tidak diiringi peningkatan permintaan akan ekspor kita di luar negeri, seperti yang saya singgung di atas. Jadi, pengeksport produk-produk pertanian yang umumnya ada di luar Jawa seperti sudah jatuh dan tertimpa tangga pula.

Namun, betapapun kelirunya kebijakan semacam itu, ia bukan suatu hal yang harus diatasi dengan pemberontakan bersenjata dan pembentukan negara di dalam negara. Kesalahan semacam itu adalah kesalahan kebijakan biasa yang sangat umum dilakukan pemerintah di mana pun. Resep terbaik untuk mengatasinya adalah persuasi dalam mekanisme demokratis, bukan ultimatum dan aksi pemberontakan terhadap negara.

Jadi, walaupun saya mencoba mengikuti alur pemikiran Asvi, saya tetap tidak menemukan alasan mengapa pemberontakan daerah pada kurun 1950-an harus “diromantisir” dan dianggap sah. Buat saya, landasan perjuangan Permesta dan PRRI keliru secara moral, dan metode penyelesaian persoalan yang mereka gunakan sangat berbahaya dan mengancam integritas negara secara sangat serius. Apa jadinya negeri kita jika setiap kesalahan kebijakan di Jakarta harus disusul dengan pembubaran pemerintahan lokal serta pemberlakuan undang-undang darurat secara sepihak di Makassar dan Padang?

Semua ini saya katakan bukan untuk membuka lagi luka lama atau untuk mengecilkan tokoh-tokoh penting seperti Mohammad Natsir, Prof. Sumitro Djojohadikusumo, dan Sjafruddin Prawiranegara. Secara pribadi saya amat menghargai tokoh-tokoh ini, meski saya juga menyadari kekurangan mereka. Saya hanya ingin agar kita menatap sejarah sebagaimana adanya, dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi.

18 September 2000

Teori dan Kerusuhan di Dua Kota

KERUSUHAN DI TASIKMALAYA dan Situbondo sudah selayaknya membuat kita menarik napas dalam-dalam. Dalam peristiwa ini ribuan orang menggelar “pengadilan jalanan” dan—meminjam kata Kiai Makmun, tokoh pesantren di Tasikmalaya—mengumbar nafsu angkara murka serta berkelakuan seperti binatang. Selama beberapa jam di dua kota ini situasi sosial berubah menjadi “situasi alamiah” ala Hobbes: manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Mengapa kerusuhan “primitif” ini muncul berturut-turut justru pada saat pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat? Apakah kerusuhan ini menandakan memburuknya hubungan etno-religius di negeri kita? Seperti terbaca di berbagai media, jawaban paling populer yang diberikan para pengamat, aktivis, dan pejabat terhadap kedua pertanyaan ini, sederhananya, dapat disebut sebagai teori kesenjangan.

Menurut teori ini, akar persoalan kerusuhan sosial di dua kota itu adalah kesenjangan sosial-ekonomi yang makin melebar. Pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru memang sangat berhasil. Tapi, menurut teori ini, hasil pembangunan hanya dinikmati segelintir kalangan. Mayoritas masyarakat hanya mendapat tetesannya.

Dalam teori ini, “mayoritas” yang tersisih itu adalah umat Islam dan pribumi, sedangkan yang “segelintir kalangan” adalah kaum non-Islam dan non-pri. Ini berarti kesenjangan sosial-ekonomi yang melebar itu berimpitan dengan perbedaan etnik dan religius. Perimpitan semacam inilah yang melahirkan potensi kecemburuan sosial yang sangat tajam. Jika potensi demikian sudah muncul, maka kita tinggal mencari faktor pemicu kecil bagi lahirnya kerusuhan besar. Dengan demikian, bagi teori ini, nuansa dan pengungkapan etno-religius dari kerusuhan di Situbondo dan Tasikmalaya hanyalah bentuk luarnya. Akar persoalannya terletak pada realitas “obyektif”: pada kondisi sosial-ekonomi kita yang makin timpang.

Buat saya, teori ini memang cukup mudah dimengerti sesuai dengan *popular sentiment* yang ada dalam masyarakat kita, karena itu sangat gampang menjadi teori yang dominan. Tapi justru karena itu pula kita harus hati-hati dan melontarkan beberapa pertanyaan. Setidaknya ada beberapa hal yang membuat saya ragu atas teori ini.

Pertama, kalau teori ini benar, maka kita bisa bertanya: kenapa kerusuhan itu justru terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya? Kenapa bukan di Jakarta dan Surabaya? Di dua kota ini, terlebih Jakarta, ekses-ekses ketimpangan hidup berdampingan sangat ekstrem. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, maka Tasikmalaya, dengan cuaca pegunungannya yang sejuk, mungkin dapat disebut sebagai *civitas dei*-nya Santo Agustinus, kota utopia yang bersih dari keserakahan. Sebaliknya, Jakarta adalah “surganya” ketimpangan dan keberlebihan dalam segala hal. Singkatnya, kalau teori kesenjangan benar, maka Jakarta mestinya sudah lama porak-poranda dilanda kerusuhan massa.

Kedua, teori ini bersandar pada sebuah asumsi yang akhir-akhir ini jarang dipertanyakan lagi, yaitu bahwa kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat kita meningkat tajam. Dari

fakta yang ada, asumsi semacam ini patut diragukan, atau paling tidak diperdebatkan lebih-jauh. Kalau kita amati kecenderungan dalam Index Gini sejak 1969 hingga 1993, angka-angka yang tampak tak banyak berubah. Pada 1969-1970, misalnya, rasionya 0,34%; pada 1981 0,33%, dan pada 1993 0,34%. Ini berarti, dari ukuran tertentu (dalam hal ini indeks pengeluaran rumahtangga dari hasil survei nasional), dalam realitas ketimpangan kita tak terjadi perubahan berarti selama 20 tahun ini. Kita tak lebih timpang, atau lebih merata, akibat pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Tentu, kalau memakai ukuran yang berbeda, kesimpulan berbeda dapat pula dimunculkan. Kita mungkin akan tiba pada angka-angka yang sedikit lebih kecil atau sedikit lebih besar. Namun saya kira akan sangat sulit mencari dukungan faktual dan dapat diuji secara akademis bagi asumsi bahwa realitas ketimpangan kita “meningkat tajam”.

Dua alasan ini memang belum memadai untuk menolak samasekali teori kesenjangan itu. Yang penting adalah, untuk memahami peristiwa penting seperti di Situbondo dan Tasikmalaya itu, kita jangan terpaku sepenuhnya pada sebuah penjelasan yang tampaknya “sudah benar”. Kita juga harus membuka diri pada teori yang berbeda, bahkan mungkin berlawanan dengan apa yang ingin kita percayai.

Dalam hal ini teori lain yang patut dipikirkan adalah teori yang lebih bersifat psikologis-kultural. Teori ini menerima kenyataan bahwa memang ketegangan etno-religius masih hidup subur dalam masyarakat kita. Kita masih memandang manusia lain berdasarkan asal-usulnya, kelompoknya, sukunya, dan agamanya. Kita belum memandang seseorang sebagai individu, sebagai si Ruly atau si Tuti, melainkan sebagai “keturunan asing”, atau “Islam”, atau “pribumi”. Lebih jauh lagi, akhir-akhir ini melalui kebijakan publik dalam beberapa bidang kehidupan (misalnya perkawinan dan distribusi ekonomi), kita

cenderung mendorong terjadinya proses institusionalisasi bagi cara pandang semacam ini.

Bagi teori ini, dengan kata lain, akar persoalan kerusuhan sosial seperti di Situbondo dan Tasikmalaya harus dicari pada dimensi yang lebih bersifat subyektif. Dalam hal ini kita harus melihat bagaimana pendidikan *civic* diberikan dalam bentuk indoktrinasi yang membosankan sejak SD hingga universitas, dalam dogmatisme pendidikan agama, dalam retorika yang digunakan pemimpin, dalam pencarian legitimasi bagi sebuah negara nasional, dan masih banyak lagi.

Semua ini tentu saja tak harus benar dan relevan. Mungkin setelah kita teliti dan diskusikan, penjelasan lain akan muncul dan secara empiris lebih meyakinkan. Karena itu pula saat ini kita sangat membutuhkan perdebatan dan diskusi-diskusi publik yang terbuka terhadap berbagai persoalan mendasar dalam masyarakat kita. Kita harus mengerti apa yang terjadi, dan dari situ kita baru bisa mengambil langkah untuk mengatasinya. Kalau semua ini tak kita lakukan, haruskah kita menunggu peristiwa-peristiwa lain yang lebih besar, yang bisa merontokkan dasar-dasar kebangsaan kita?

11 Januari 1997

Jalan Skotlandia Buat Aceh

MASALAH ACEH makin rumit. Kalau memang benar para pelaku rangkaian pengeboman di Jakarta belakangan ini terkait, langsung atau tidak, dengan gerakan separatisme di Tanah Rencong, maka kompleksitas masalah yang ada sekarang sudah berkembang dua atau tiga tingkat lebih tinggi.

Singkatnya, masalah Aceh akan berkembang sebagaimana yang sudah terjadi dalam hubungan antara Inggris dan Irlandia Utara, lengkap dengan rangkaian teror dan pengeboman yang terjadi terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Masalah di Irlandia Utara ini sudah berumur hampir seabad, tapi sampai sekarang darah masih saja tumpah, sementara peluang perdamaian masih simpang-siur.

Sangatlah tragis kalau sejarah Aceh akan mengarah ke jalan buntu seperti itu, karena yang paling merugi justru rakyat Aceh sendiri.

Buat saya, cara terbaik bagi Aceh untuk menghindari ke-buntungan sejarah demikian adalah dengan membanting setir dan memilih “Jalan Skotlandia”.

Orang Skot, seperti juga orang Irlandia dan orang Aceh, adalah pemuja independensi dan sangat bangga akan keagungan subkultur mereka. Orang Skot dan orang Irish punya sejarah

panjang menentang hegemoni Inggris, negeri tetangga mereka yang lebih besar dan lebih kuat. Keduanya merasa tertindas, dan karena itu mereka membenci segala sesuatu yang berbau Inggris. Mereka ingin “merdeka”, dan dari satu generasi ke generasi lainnya mereka melawan dengan pedang. Film *Braveheart*, yang dibintangi Mel Gibson dan Sophie Marceau, dengan sangat bagus menggambarkan heroisme, sekaligus tragedi, orang Skot pada akhir abad ke-13 dalam melakukan perlawanan.

Walaupun memiliki tradisi perlawanan yang sama, pada awal abad ke-18 Skotlandia dan Irlandia kemudian memilih jalan yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Orang Skot mengubah metode perjuangan, dan secara sadar memilih jalan unifikasi. Mereka memutuskan tradisi dan melupakan mimpi untuk membentuk negara sendiri. Mereka justru ingin memakai Inggris, yang waktu itu sedang berkembang pesat, untuk mencapai tujuan-tujuan besar “non-politis”, seperti pengembangan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Energi mereka yang besar mereka alihkan, dari energi perlawanan menjadi energi pembangunan.

Hasilnya? Ekonomi Skotlandia maju pesat. Dunia industri mereka meroket. James Watt, penemu mesin uap itu, adalah salah satu “produk” yang gemilang dari strategi perjuangan baru ini. Dalam soal kebudayaan dan keilmuan, hasilnya lebih dahsyat lagi.

Di bidang ilmu alam, lahir Lord Kelvin, salah satu motor ilmu fisika pasca-Newton. Dalam ilmu ekonomi, muncul Adam Smith, yang kerap dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi modern. Dalam filsafat dan pemikiran kebudayaan, lahir David Hume dan Adam Ferguson. Secara bersama-sama mereka membuat Mazhab Skotlandia, yang dikenal luas sebagai salah satu penyumbang terpenting dalam dunia pemikiran modern yang dampaknya masih terus terasa hingga kini di semua belahan dunia.

Pada akhir abad ke-18, universitas-universitas terkemuka di Edinburgh dan Glasgow, dua kota terbesar Skotlandia, menjadi perguruan-perguruan terbaik di Eropa. Dan pada zaman itu, banyak anak kaum aristokrat Inggris yang dikirim ke Skotlandia untuk mendapatkan pendidikan terbaik—sebuah bukti bahwa bangsa Skot sudah berhasil menaklukkan penakluk mereka, *on their own terms*.

Berbeda dengan orang Skot, orang Irlandia tetap setia pada tradisi dan cita-cita yang mereka warisi turun-temurun. Mereka tetap berjuang dan melawan. Hasilnya? Sebagian orang Irish di Selatan memang sudah berhasil membuat negara mereka sendiri yang terlepas dari kekuasaan Inggris. Tapi sebagian lagi, di Utara, masih terus berjuang dan menumpahkan darah hingga hari ini. Dan di Selatan ataupun di Utara, tidak pernah lahir seorang James Watt, atau Adam Smith, atau David Hume.

Orang Skot berhak untuk bertepuk dada sambil berkata, “Kami bangsa besar. Sebab, kami sudah menyumbang banyak bagi berkembangnya peradaban dunia.” Apa yang bisa dikatakan oleh orang Irish? Mungkin: “Kami bangsa tangguh. Sebab, kami telah menumpahkan banyak darah dan mempersembahkan anak-anak kami untuk menolak hegemoni Inggris.”

Saya kira kita tahu kebanggaan mana yang lebih bermakna. Kembali ke soal Aceh. Kalau suku bangsa yang terkenal keras dan tangguh di ujung barat Nusantara ini salah memilih jalan, yaitu Jalan Irlandia, bisa dibayangkan bahwa 50 tahun dari sekarang pun situasi yang ada di sana belum akan banyak berubah. Mudah-mudahan saya keliru, tapi dalam hal ini sejarah sudah cukup memberi pelajaran.

Karena itu, lebih baik Aceh banting setir. Lupakan soal pembentukan negara. Persetankan mimpi-mimpi Sultan Iskandar Muda untuk mempersatukan Sumatra. Lupakan semua itu. Dan mulai sekarang, Aceh, dengan 70 persen uang gas dan

minyak yang bisa mereka miliki sendiri, bisa membangun rakyatnya dalam dunia ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Siapa tahu akan lahir James Watt dan Adam Smith dari Serambi Mekah.

8 Oktober 2000

Jalan California Buat Papua

(Catatan buat Prof. Liddle dan Kawannya)

RUPANYA SEDANG TERJADI dialog hangat antara Prof. William Liddle dan seorang kawannya. Dialog Ohio-Jakarta ini tepat waktu, sebab memang masalah Papua sedang menjadi kontroversi. Banyak orang ingin tahu, bagaimana sebenarnya persoalan di provinsi paling timur ini harus dimengerti dalam keseluruhannya.

Di harian ini Liddle berkata, ia terperangah mendengar gagasan kawannya (*Panggilan Sejarah*, 30/8/03). Apa pasal? Menurut sang kawan, Papua harus dibangun dengan “strategi California”. Daerah ini harus dimekarkan dan dibuka sepenuhnya bagi kaum pendatang, bila perlu dengan subsidi pemerintah.

Hanya cara itulah yang dapat mengubah Papua, dari daerah tertinggal menjadi kawasan maju yang penuh pesona, seperti California bagi AS. Seratus tahun lalu, wilayah di Pantai Barat ini masih merupakan daerah terbelakang, *the wild wild west*. Kini, ia menjadi raksasa ekonomi, dilengkapi Silicon Valley dan Hollywood yang menjadi simbol kreativitas ilmu dan kebudayaan manusia.

California bisa, mengapa Papua tidak? Yang membuat Liddle terperangah adalah metode yang ditawarkan sang kawan.

Metode ini agak berbau *politically incorrect*, tabu di telinga “pengamat dan pemain internasional” yang banyak dikenalnya.

Liddle memberi peringatan dari masa lalu. Orang Papua, kata Liddle, jangan sampai bernasib seperti Orang Indian di Amerika. Ekspansi ke barat memang membesarkan Amerika, namun mematikan kehidupan orang Indian. Inilah yang dikhawatirkan Liddle. Ia mengimbau agar masalah ini cepat diselesaikan lewat program kemitraan baru.

Imbauan Liddle itu patut didengarkan. Tetapi, mungkin yang lebih penting untuk dijawab lebih dulu adalah: Betulkah argumen yang disampaikan kawan Liddle? Mengapa Liddle harus terperangah? Bila usulan kawannya itu keliru, di mana letak kekeliruannya?

Kalau boleh memberi sedikit catatan dalam dialog antara Liddle dan kawannya, saya ingin mulai dengan asumsi yang melandasi pandangan kaum pengamat dan aktivis pembela Papua, sebuah pandangan yang *politically correct*. Dalam pandangan ini, orang Papua dianggap lebih berhak atas tanah Papua ketimbang pendatang. Mereka adalah tuan di tanah itu, dan karena itu harus memperoleh keistimewaan yang sesuai.

Dalam tulisannya, Liddle tidak menjelaskan dasar pandangannya. Kebenaran pandangan ini sudah dianggap jelas, karena itu tidak perlu diuraikan lagi.

Namun, betulkah itu? John Quincy Adams, Presiden ke-6 AS, pernah bertanya, “*But what is the right of the huntsman to the forest of a thousand miles over which he has accidentally ranged in quest of prey?*” Adams berbicara soal orang Indian, tetapi pertanyaannya cukup relevan bagi kita kini. Jawabannya tidak semudah yang diasumsikan kaum yang mengaku sebagai pembela Papua.

Secara keseluruhan Tanah Papua seluas 414.000 km². Sebagian kecil tanah ini, katakanlah 10 persen, dapat dianggap sebagai tanah adat buat sekitar 1,5 juta penduduk asli yang

terbagi dalam ratusan suku. Dengan porsi tanah 10 persen pun, tingkat densitas bagi seluruh suku yang ada masih berkisar 37 jiwa/km². Jadi, hampir sama dengan densitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Barat, dua daerah yang masih kekurangan penduduk.

Sebenarnya, eksistensi tanah adat masih bisa dipertanyakan. Asumsi di baliknya amat komunalistik. Siapa yang menguasai tanah adat? Kepala suku, pentolan-pentolan suku, dukun? Bisakah tanah ini ditransfer secara sah dalam proses jual-beli? Tetapi, kalau pun kita lewatkan pertanyaan demikian dan untuk sementara menerima eksistensi tanah adat, porsi 10 persen pun sudah menciptakan keleluasaan yang jauh di atas daerah seperti Jabar yang memiliki densitas 1.047 jiwa/km².

Bila penduduk asli dianggap memiliki lebih dari itu, katakanlah 20 persen, saya kira masih masuk akal. Namun, bila lebih dari itu? 50 persen? Seluruh Tanah Papua? Di sinilah pertanyaan John Quincy Adams, dalam bentuknya yang lain, harus dijawab: kalau kebetulan puncak sebuah gunung terlihat dari tempat perburuan sebuah suku, berhakkah suku itu mengklaim gunung itu sebagai miliknya? Kalau dianggap berhak, apa dasarnya?

Di luar tanah adat hanya ada dua jenis pemilikan, tanah milik negara (dalam hal ini, negara mewakili seluruh warganegara, termasuk penduduk asli Papua) dan milik pribadi. Dalam dua kawasan inilah pertimbangan yang digunakan harus sepenuhnya berdasarkan konteks Indonesia, bukan Papua semata.

Beberapa aspek dari pertimbangan itu berkait densitas penduduk, potensi alam dan kebutuhan akan lahan garapan. Bukankah amat tidak adil jika jutaan penduduk miskin di Jabar yang sesak tidak boleh atau dipersulit mencari hidup di lahan kosong di Papua?

Migrasi tidak boleh dipaksakan. Tetapi bila penduduk miskin di suatu provinsi padat memang mau untuk itu, pemerintah

wajib membantu mereka sejauh mungkin, misalnya dengan memberi lahan gratis.

Itulah yang dimaksud kawan Liddle sebagai jalan California. Saya kira sang kawan benar. Papua harus dibuka seluas-luasnya, dan metode pemekaran wilayah administrasi dari satu menjadi tiga, bahkan enam provinsi adalah konsekuensi dari kebutuhan praktis yang ada.

Sejauh ini, kemajuan Papua lebih banyak dilihat dalam perspektif pembagian hasil antara pusat dan daerah. Pembagian hasil yang lebih tinggi akan membuat penduduk asli seketika lebih makmur. Saya setuju jika ini terjadi. Tetapi, saya kira Liddle sepakat, kemajuan sebuah masyarakat pada hakikatnya tidak terletak di sana. Emas dapat menjadi rahmat, tetapi sekaligus kutukan.

Warga Papua, seperti warga lain, harus menjadi modern. Dengan potensi manusia yang ada kini, jalan ke modernitas hanya dapat terjadi jika pintu bagi daerah ini terbuka luas bagi pendatang. Konflik dan kompetisi pasti terjadi. Tetapi, itulah yang dapat memicu mereka untuk beradaptasi dengan zaman. *Adapt or perish*: inilah kehendak sejarah yang berlaku di mana pun, termasuk Papua.

Bila kenyataan itu ditutupi dengan argumen moral sentimental, kita sebenarnya sedang menggiring warga Papua hidup bagai di “kebun binatang”. Haruskah mereka terus hidup di gunung dan lembah, tanpa perlu tahu dunia bergerak cepat?

Catatan akhir yang ingin saya singgung adalah analogi nasib warga asli Papua dan orang Indian, meski tidak tepat betul. Sebanyak 13 koloni yang pertama kali merdeka di AS awalnya tidak memiliki batas wilayah jelas. Thomas Jefferson, presiden ke-3 AS, bahkan pernah berpikir untuk memberi pengakuan kedaulatan bagi suku Comanche, Pawnee, dan Apache yang bermukim di barat sungai Mississippi.

Saat Louisiana dibeli dari Prancis pada 1803, yang melipatgandakan wilayah legal AS, tidak ada keterangan tentang batas

tanah dalam dokumen pembelian. Karena itu, masalah penguasaan tanah adalah persoalan pelik. Ekspansi ke Barat, *Manifest Destiny*, harus melewati wilayah suku-suku Indian, yang selalu memaksa negeri Paman Sam itu berhadapan dengan masalah yang sama hingga akhir abad ke-19.

Indonesia lebih beruntung, karena lahir pada pertengahan abad ke-20. Ia lahir dengan batas wilayah jelas, setidaknya hampir seluruhnya, dan karena itu ekspansi ke mana pun tidak lagi menjadi keharusan. *Destiny* negeri ini sudah terjamin dalam batas wilayah yang sudah ada dan diakui dunia.

Analogi Liddle tentu tidak sepenuhnya keliru. Keprihatinan yang ada di baliknya perlu didengarkan. Warga Papua tidak boleh mengalami nasib seperti orang Indian, yang dalam kehidupan Amerika modern hanya menjadi catatan kaki yang menyedihkan. Cuma masalahnya, apakah keprihatinan demikian harus menjadikan kita sentimental? Bagi saya, ia justru harus menjadi pemicu agar kita memandang ke depan, mengajak warga Papua berani melihat kenyataan. Masa lalu adalah pelajaran, bukan tujuan perjalanan.

5 September 2003

Aceh, Ujian Pertama dan Terakhir

DENGAN DISELENGGARAKANNYA rapat raksasa proreferendum di Banda Aceh yang berlangsung 8 November lalu, kini sikap sebagian besar masyarakat di Negeri Rencong ini sudah semakin jelas. Mereka menuntut agar diberi hak untuk memutuskan apakah ingin terus bersama Indonesia atau membentuk negara sendiri yang merdeka dan berdaulat penuh.

Apakah tuntutan itu harus dipenuhi? Apakah sudah saatnya sekarang ini bagi kita untuk mempertaruhkan keutuhan Indonesia dan menghadapi setiap kemungkinan yang menyertainya?

Kita harus berpikir matang dan mendalam untuk menjabraknya. Saya sendiri cenderung berpendapat bahwa kita harus menegaskan sejelas-jelasnya pada kaum proreferendum di Aceh bahwa keutuhan teritorial Indonesia sudah final. Sistem pemerintahan, hubungan pusat-daerah (otonomi khusus, negara federal, atau *status quo*) dan sebagainya bisa didiskusikan bersama dengan beragam cara, tetapi semua ini harus tetap berada dalam sebuah sistem besar yang kita sebut Republik Indonesia.

Pendapat saya ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, hak atas referendum bukanlah bagian dari hak-hak asasi atau

hak-hak demokrasi. Tuntutan kebebasan manusia berbeda secara mendasar dengan tuntutan pembentukan negara. Yang pertama adalah hak yang secara hakiki melekat pada manusia sebagai individu. Yang kedua adalah hak yang lebih bersifat konvensional, dan karena itu sangat bergantung pada konteks politik, sejarah, dan keseimbangan kekuatan di mana tuntutan itu dilontarkan.

Karena itu, agak keliru jika kita berkata bahwa penyelenggaraan referendum di Aceh adalah manifestasi dari hak-hak asasi warga masyarakat di sana. Setiap warga Aceh, sebagaimana juga warga lainnya, tentu saja berhak mendapatkan kebebasan berbicara, berorganisasi, mendapatkan persamaan di depan hukum, dan sebagainya. Tetapi, dari segi prinsipil, pada setiap warganegara tidak melekat hak untuk membentuk negara sesuai dengan kehendak mereka sendiri.

Kalau prinsip yang mendasari referendum dijalankan secara konsekuen, maka pada ujungnya yang terjadi adalah situasi anarkis, di mana setiap kelompok-mungkin berdasarkan etnis, mungkin agama, mungkin kelompok bahasa, atau apa saja-boleh membentuk negara kapan pun mereka kehendaki. Bumi ini akan menjadi semakin sempit dan penuh konflik jika setiap kaum yang berbeda menjadikan perbedaan mereka sebagai alasan untuk membentuk negara sendiri.

Alasan saya yang kedua dan yang lebih penting adalah konsekuensi kemerdekaan Aceh terhadap kondisi politik di Indonesia. Jika lepasnya Timtim adalah akhir bagi sebuah persoalan yang mengganggu Indonesia selama dua dekade terakhir, maka lepasnya Aceh akan berakibat sebaliknya. Ia buat Indonesia adalah awal bagi sebuah persoalan dahsyat yang justru secara potensial jauh lebih berbahaya ketimbang apa yang sekarang terjadi di Aceh.

Kalau sekarang Aceh lepas, maka terhadap daerah lain yang juga meminta hal yang sama (Riau, Irian Jaya, Maluku, dan Sulawesi Selatan, misalnya), kita tidak lagi punya argumen apapun untuk membendunginya. Dalam soal keutuhan Indonesia, Aceh adalah ujian pertama dan terakhir sekaligus.

Saat ini kita tidak bisa meramalkan berapa banyak negara yang akan muncul dari serpihan-serpihan Indonesia. Yang jelas, jika Balkanisasi terjadi, basis-basis konflik justru akan meluas secara simultan, seperti yang sudah kita saksikan di Yugoslavia dan beberapa negara pasca-komunis lainnya.

Rumit dan dalamnya konflik yang akan terjadi dalam situasi “pasca-Indonesia” bisa dilihat misalnya di Sulawesi Selatan (Sulsel), sebuah daerah yang, seperti di Aceh, juga punya semangat kedaerahan yang kental. Di daerah ini ada sebuah hal yang tidak pernah diungkapkan secara terbuka; suku Bugis tidak akan pernah mau tunduk di bawah kekuasaan suku Makassar dan sebaliknya. Lebih jauh lagi, terhadap kedua suku besar ini suku-suku yang lebih kecil, seperti suku Mandar dan Toraja, belum tentu dengan suka rela mau menjadi bagian dari sebuah Republik Bugis-Makassar.

Di samping itu, di dalam suku Bugis pun, terjadi berbagai perpecahan (Luwu, Bone, Wajo) yang secara historis hanya pernah bersatu jika ada lawan bersama (kerajaan Gowa-Makassar) atau disatukan di bawah tekanan dari penguasa yang kuat, yaitu Belanda (VOC) dan Arung Palakka.

Selama ini di Sulsel, konflik-konflik lokal tidak pernah mencuat karena adanya sebuah payung bersama yang kokoh, yaitu Republik Indonesia. Tetapi jika payung ini dilepas, saya tidak melihat alasan mengapa konflik-konflik lokal yang historis itu tidak akan mencuat kembali, sebuah hal yang pasti menggejutkan para mahasiswa romantik “prokemerdekaan” di Makassar yang mungkin belum belajar tentang sejarah mereka sendiri.

Setiap orang yang mengerti sejarah dan sosiologi masyarakat Indonesia akan tahu bahwa potensi konflik-konflik lokal bukan cuma ada di Sulsel. Di setiap daerah, hal itu bersembunyi di balik permukaan. Bahkan di beberapa daerah, seperti di Ambon dan Pontianak, ia sudah mencuat dan meminta korban darah yang tidak sedikit.

Terhadap semua itu harus kita tambahkan lagi berbagai kemungkinan konflik antara negara-negara “pasca-Indonesia” itu sendiri, antara Republik Riau dan Republik Bugis-Makassar, misalnya. Negara-negara ini, antara lain, akan berhadapan dengan soal pelik yang berhubungan dengan distribusi kantong-kantong penduduk yang sudah telanjur tersebar. Orang Bugis, misalnya, sudah berada di hampir segala penjuru Nusantara, dan telah membuat kampung-kampung Bugis di hampir semua kota besar kita.

Harus diapakan mereka oleh Negara Maluku, Negara Riau, Negara Aceh dan sebagainya itu? Di Yugoslavia, bahkan di Eropa selama ratusan tahun, persoalan kantong-kantong penduduk inilah yang (sering) menjadi salah satu dasar konflik dan peperangan yang berlarut-larut. Apakah hal yang sama tidak akan terjadi di Sumatra dan daerah lainnya?

Singkatnya, di ujung Balkanisasi Indonesia, yang menunggu bukanlah firdaus kemerdekaan, tetapi sebuah proses rumit yang bisa sangat berdarah dan berlarut-larut. Situasi anarkis di Timtim pasca-referendum beberapa saat lalu mungkin akan kelihatan cukup tenteram jika kita bandingkan dengan kemungkinan yang akan kita hadapi.

Oleh karena semua itulah, saya harap Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan tokoh-tokoh yang saat ini memegang biduk republik, hendaknya berpikir berkali-kali sebelum memutuskan pemberian referendum di Aceh. Tentu saja pertanyaannya kemudian adalah, kalau bukan referendum, lalu apa?

Melihat semangat rakyat Aceh sekarang, kelihatannya mereka akan berkata bahwa referendum adalah harga mati. Tentu saja kita semua berharap bahwa dalam waktu dekat ini rakyat Aceh akan berubah pikiran. Pemerintahan Gus Dur saat ini harus berusaha sekuat mungkin untuk meyakinkan rakyat Aceh bahwa Indonesia bukanlah sebatas Orde Baru atau Orde lama, tetapi lebih merupakan sebuah upaya terus-menerus untuk merealisasikan gagasan tentang kebebasan dan keadilan bagi setiap warganegara dari Sabang sampai Merauke. Gus Dur, dengan segenap kemampuan yang dimilikinya, harus membujuk dan memohon pada rakyat Aceh untuk tetap menjadi bagian Indonesia.

Namun, kalau setelah semua usaha dilakukan dan kaum proreferendum masih tetap pada pendirian mereka, maka sejak sekarang kita harus bersiap untuk dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit: referendum atau perang (atau kalau diperhalus, aksi bersenjata menumpas separatisme). Dalam suasana seperti sekarang, pilihan ini mungkin tidak begitu nyaman bahkan untuk didiskusikan sekalipun. Tetapi kita harus jujur dan berani menghadapi kenyataan. Pada saatnya nanti, kita tidak mungkin lagi menyembunyikan pilihan ini di bawah karpet terus-menerus.

Pilihan seperti itu adalah pilihan antara yang buruk dan yang buruk. Kita tentu harus memilih kemungkinan buruk yang minimal. Dan buat saya, proses Balkanisasi Indonesia beserta semua kemungkinan pertikaian terbuka dan kekacauan yang akan menyertainya, adalah kemungkinan paling buruk yang harus kita hindari.

20 November 1999

Konflik Maluku dan Reorientasi Ilmu Sosial

KONFLIK ANTARAGAMA DI MALUKU telah berlangsung setahun lebih. Korban yang tewas sudah lebih seribu jiwa, sementara jumlah penduduk yang terpaksa mengungsi, menurut kabar terakhir, setidaknya sudah dua ratus ribu orang. Hingga sekarang tanda-tanda perdamaian masih simpang-siur.

Kita juga tahu bahwa bukan cuma di Maluku hal demikian pernah terjadi. Di beberapa daerah bentuk dan skala konflik memang berbeda-beda, tetapi tingkat keberingasan berbagai konflik itu hampir sama. Satu kelompok menyerang, membakar, atau membantai kelompok lain. *Lupus est homo homini*, manusia yang satu menjadi serigala bagi manusia lainnya.

Pertanyaan Tak Terjawab

Bagaimana kita menjelaskan munculnya konflik-konflik itu? Mengapa saat ini berbagai kelompok dalam masyarakat begitu garang terhadap kelompok lainnya? Kenapa perseteruan atas dasar agama dan etnik kembali bermunculan seperti cendawan di musim hujan, baik di pelosok-pelosok desa maupun di kota-kota yang relatif besar seperti Ambon, Sambas, bahkan Jakarta? Mengapa ia terjadi sekarang, sebuah periode di mana justru

Sang Demos harus bersuka-cita menyambut datangnya era baru dan lepasnya mereka dari belenggu sistem otoriter?

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat penting untuk dijawab sekarang. Dalam jangka panjang, berbagai persoalan yang ada akan sulit diselesaikan secara tuntas kalau kita tidak mengerti apa yang sesungguhnya terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana proses terjadinya. Tanpa penyelesaian yang tuntas, konflik-konflik seperti itu, seperti kata Goenawan Mohamad beberapa saat lalu, pada akhirnya akan melemahkan dasar-dasar sistem demokrasi yang baru saja mulai kita kembangkan. Masyarakat akan kecewa pada demokrasi, dan diam-diam mulai merindukan kembalinya zaman lama yang tenteram dan teratur.

Namun sayangnya, kalau kita membaca berbagai media massa dalam setahun terakhir ini, bahkan sejak beberapa tahun sebelumnya saat berbagai konflik semacam itu mulai bermunculan, di Situbondo dan Tasikmalaya misalnya, penjelasan-penjelasan yang ada sangat lemah dan cenderung berputar-putar di tempat.

Dari segi tanggungjawab keilmuan, kaum ilmuwan sosial-lah yang sebenarnya harus tampil ke depan dan memberi jawaban-jawaban yang memuaskan. Tetapi sampai sekarang semua itu masih berupa harapan. Ironisnya, banyak di antara mereka malah mengambil jalan pintas dengan ikut-ikutan memakai teori konspirasi dan menyerukan adanya hantu-hantu provokator di balik segala perkara yang kita hadapi. Penjelasan seperti ini hanya mencerminkan kemalasan berpikir dan secara politik sebenarnya cukup berbahaya, sebab ia justru semakin mendorong terciptanya sebuah situasi di mana setiap orang akan saling menuduh dan mencurigai.

Ilmuwan sosial memang telah berusaha mendudukan masalah dengan lebih baik. Tetapi penjelasan-penjelasan yang dikemukakan terus mengulang apa yang sudah dikatakan ber-

kali-kali. Mereka cenderung berkata bahwa akar masalah segala perkara yang ada terletak pada soal kesenjangan ekonomi, keadilan, atau pengalaman penindasan di masa Orde Baru. Tema-tema semacam inilah yang terus di bolak-balik tanpa dirinci lebih jauh.

Lebih jauh lagi, dihadapkan pada fakta-fakta sederhana, jawaban-jawaban seperti itu dengan cukup mudah bisa ditolak. Misalnya, dari fakta umum menurut indikator tertentu (Indeks Gini) kita tahu bahwa selama 25 tahun terakhir, sebelum jatuhnya Soeharto, distribusi ekonomi cenderung konstan, tidak membaik atau memburuk, berkisar antara 0,32 dan 0,35. Dalam soal ini, seorang ekonom kawakan Australia, Prof. Hal Hill, pernah berkata bahwa apa yang dicapai oleh pemerintahan Orde Baru selama lebih dari dua dekade merupakan *a resounding success*.

Selain itu kita juga tahu bahwa persoalan kesenjangan justru lebih tajam di kota-kota besar, bukan di daerah-daerah rawan konflik seperti Ambon, Ternate, Sambas, Tasikmalaya, dan Situbondo. Dan selama krisis ekonomi dalam dua tahun terakhir, justru daerah yang jauh dari pusat-pusat industri dan perdagangan, seperti Halmahera dan Kepulauan Maluku umumnya, yang secara relatif diuntungkan, sebab basis perekonomiannya mereka masih sangat bersifat agraris.

Tentu saja para ilmuwan sosial penganut penjelasan kesenjangan ekonomi masih bisa berkelit. Mereka, misalnya, bisa berargumen bahwa jika indikator yang digunakan berbeda, kesenjangan ekonomi di mana konflik sosial terjadi sebenarnya memburuk. Namun soalnya adalah kaum ilmuwan yang berpendapat begini tidak pernah memberi penjelasan terinci apa yang mereka maksudkan dengan indikator alternatif itu dan bagaimana ia dihubungkan dengan konflik-konflik etnoreligius.

Katakanlah konsentrasi ekonomi, atau yang lebih spesifik lagi, akses ke dalam dunia perbankan lokal adalah yang di-

maksudkan sebagai indikator alternatif itu. Tetapi adakah seorang ilmuwan sosial yang pernah mencoba memberi penjelasan empiris tentang indikator-indikator seperti ini di Maluku? Apakah mereka sudah mencoba membuktikan bahwa kelompok Islam di Ambon misalnya, sudah semakin menguasai akses dunia perbankan lokal, dan karena itu memicu perasaan penolakan dari kaum Kristen yang mayoritas? Sejak terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya beberapa tahun lalu, pernahkah para ilmuwan sosial penganut penjelasan kesenjangan ekonomi berusaha mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang bisa mendukung argumen mereka? Saya khawatir jawaban terhadap semua pertanyaan ini adalah negatif, tidak jauh berbeda.

Kaum ilmuwan sosial penganut penjelasan “semua kesalahan Orde Baru” pun tidak jauh berbeda. Berbagai jawaban yang mereka kemukakan terlalu bersifat umum dan cenderung hanya menghujat masa lalu secara agak sembrono. Mereka sering lupa bahwa buat seorang ilmuwan sikap kritis dan penolakan terhadap represi politik adalah satu hal, dan upaya untuk menerangkan peristiwa-peristiwa sosial secara obyektif adalah hal lain lagi. Dari mereka kita akan sukar mengerti persisnya tindakan kesalahan seperti apa dari pemerintahan Soeharto yang berhubungan langsung dengan berbagai kerusuhan akhir-akhir ini.

Katakanlah kita sepakat bahwa salah satu kesalahan besar Orde Baru adalah represi militer yang berlangsung bertahun-tahun. Secara logis kita juga bisa memperkirakan bahwa tingkat represi semacam ini bervariasi di berbagai kota dan daerah, tergantung pada kemungkinan tantangan dan perlawanan yang dapat diberikan oleh penduduk di kota itu. Jadi di Surabaya, misalnya, sebuah kota besar dengan aktivitas buruh, mahasiswa, dan kelas menengah yang cukup dinamis, tingkat represi militer cenderung lebih tinggi ketimbang di Ternate, Maluku Utara, sebuah kota yang buat Orde Baru sangat pinggiran dan

karena itu hampir tidak berarti apa-apa. Singkatnya, di Surabaya kehadiran dan represi militer jauh lebih terasa ketimbang di tempat yang jauh seperti Ternate.

Kalau pandangan ilmuwan sosial di atas benar, maka tentu bukan di Ternate, tetapi masyarakat Islam dan Kristen di Surabaya yang akan saling membunuh setelah turunnya Soeharto. Tetapi fakta yang kita lihat adalah sebaliknya. Malahan, banyak dari konflik yang terjadi justru berlangsung di daerah-daerah di mana sentuhan Orde Baru sesungguhnya relatif tidak begitu intensif.

Singkatnya, pandangan yang berkata bahwa penyebab segala konflik yang berlangsung sekarang semuanya adalah kesalahan rezim penguasa di masa lalu masih harus dirinci dan dibuktikan lebih jauh. Para penganut pandangan ini harus menyelesaikan pekerjaan rumah mereka untuk meyakinkan kita bahwa penindasan masa lalu berhubungan langsung dengan beringasnya berbagai kelompok masyarakat saat ini.

Hal itulah yang sayangnya masih belum kita lihat sampai sekarang. Orde Baru jadinya terus-menerus menjadi momok yang, ironisnya, dipakai oleh sebagian ilmuwan sosial (dan juga oleh sebagian aktivis LSM, wartawan, dan politisi) dengan se-suka hati untuk menjelaskan hampir setiap peristiwa negatif yang terjadi dalam masyarakat. Mengapa gagal?

Itulah kegagalan besar kaum ilmuwan sosial saat ini. Dan itu terjadi justru pada saat pikiran-pikiran segar mereka sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Penyebab kegagalan ini mungkin terletak pada fakta bahwa kaum ilmuwan sosial sekarang, terutama tokoh-tokoh utamanya (para “pengamat”), sudah terlalu sibuk mengisi kebutuhan yang muncul mendadak dalam era reformasi, yaitu kebutuhan akan informasi yang bersifat instant dan kontroversial. Lebih dari yang sudah-sudah, waktu mereka kini sudah sangat terbatas untuk merenung secara mendalam, apalagi untuk melakukan sejumlah penelitian yang sistematis.

Akan tetapi mungkin juga sebabnya lebih mendalam lagi. Di zaman Orde Baru, terutama dalam 15 tahun terakhir, teori-teori yang populer di kalangan ilmuwan sosial kita (dan juga terutama di kalangan aktivis) berkisar pada varian teori-teori negara, otoritarianisme-birokratik, ketergantungan, dan sosiologi kritis. Teori-teori semacam ini, walau masing-masing berbeda, pada dasarnya adalah semacam sapuan-sapuan besar untuk menggambarkan perilaku sosial-politik makro. Melalui teori negara, misalnya, yang terutama ingin dijelaskan adalah perilaku politik negara dan bagaimana ia dihubungkan dengan kecenderungan-kecenderungan besar dalam masyarakat, seperti kapitalisme, sosialisme, peradaban teknokratis, militerisme, dan otoritarianisme.

Selain teori-teori demikian, ada lagi sebuah teori lain yang juga sangat populer dalam beberapa tahun terakhir ini, yaitu teori tentang masyarakat sipil (saking populernya, kita bahkan bisa mendengar istilah “masyarakat sipil” atau “masyarakat madani” diucapkan dalam pidato-pidato para pejabat hampir setiap hari). Secara umum, penggunaan teori ini dalam ilmu-ilmu sosial kita cenderung melihat masyarakat sebagai *the innocent party* yang berhadapan dengan negara yang represif. Masyarakat tidak dianggap sebagai sebuah entitas yang problematik. Kalau toh ada konflik atau persoalan dalam masyarakat, ia lebih dipandang sebagai akibat penetrasi negara, atau cerminan dari manipulasi dan pertentangan para elite yang mengendalikan negara. Karena itu sebenarnya tidak terlalu mengherankan jika kaum ilmuwan sosial penganut teori ini juga sangat mudah untuk berkata bahwa konspirasi kaum elitelah yang menjadi penyebab dari berbagai konflik sosial. Jadi, sama dengan teori-teori sebelumnya, teori ini pun pada akhirnya lebih memusatkan penjelasannya pada negara, yang dianggap sebagai sumber dari segala persoalan politik.

Teori-teori seperti itu memang mungkin cukup menarik untuk digunakan sebagai dasar konseptual dalam membedah

dan menjelaskan dinamika rezim Orde Baru. Dan waktu itu pun semua orang sadar bahwa persoalan politik utama adalah kuat dan dominannya negara terhadap masyarakat. Di bawah Soeharto, negara mengatur, mengintimidasi, membangun, dan memimpin masyarakat.

Akan tetapi sekarang hal itu sudah berbalik 180 derajat. Saat ini, seperti yang tercermin dari konflik-konflik keras di Maluku, justru masyarakatlah, Sang Demos, yang menjadi persoalan utama yang kita hadapi. Negara memang tetap menjadi sumber masalah, tetapi bukan karena ia kuat dan dominan, tetapi justru karena ia lemah dan hampir tak berdaya untuk menjalankan perannya sebagai alat penegak hukum dan tata tertib.

Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika teori-teori yang populer selama bertahun-tahun kini tiba-tiba kehilangan “subyek” yang ingin dijelaskannya, dan kemudian kehilangan daya tariknya. Dan kaum ilmuwan sosial kita pun harus kembali mengunyah berbagai penjelasan yang bersifat sangat umum dalam menerangkan sejumlah masalah yang ada sekarang, terutama dalam menerangkan terjadinya berbagai konflik sosial. Karena itulah, “teori” tentang kesenjangan ekonomi, keadilan, dan pengalaman penindasan di bawah Orde Baru kemudian menjadi primadona di kalangan mereka.

Reorientasi

Kalau semua itu benar, maka mungkin dari situlah kita bisa mulai melihat apa yang diperlukan agar ilmu-ilmu sosial kembali menjadi relevan. Dalam hal ini ilmu-ilmu sosial harus lebih banyak lagi memusatkan perhatian mereka pada studi-studi tentang masyarakat secara lebih terinci. Kalau dua dekade lalu ada seruan *bringing the state back in*, maka saat ini yang mungkin harus ditegaskan lagi adalah *bringing the society back in*. Sang Demos-lah yang kini harus dikenali dengan lebih

baik agar kita bisa menggambarkan berbagai peristiwa penting yang ada sekarang, atau yang akan terjadi dalam saat-saat mendatang.

Dalam upaya ini kita juga harus meninggalkan pendekatan yang mengandalkan sapan-sapan besar dalam memandang realitas, setidaknya untuk sementara. Kita harus mempelajari perilaku mikro, pola-pola interaksi lokal, hubungan penduduk asli dan kaum pendatang, perubahan hierarki kekuasaan di kota-kota kecil dan menengah, perubahan demografis dan dampaknya pada komposisi suku dan agama di sebuah komunitas, pola pengajaran guru agama di pesantren maupun di sekolah negeri, dinamika hubungan pendeta dan umatnya, tingkat resistensi kultur lokal terhadap masuknya ide-ide kosmopolitan, naik-turunnya jumlah perkawinan campuran di sebuah daerah, dan masih banyak lagi.

Semua itu, dalam konteks sosial sekarang, sebenarnya merupakan topik-topik besar yang hanya bisa dipahami lebih jauh jika kita mau menelitinya dalam skala makro. Kalau kita bisa mengerti hal-hal demikian dengan lebih baik, saya yakin bahwa kita bisa mulai menjelaskan dengan lebih terinci mengapa konflik-konflik seperti yang terjadi di Maluku mengambil bentuk yang begitu keras dan berdarah.

Reorientasi fokus ilmu-ilmu sosial juga akan lebih berhasil jika diiringi dengan pembalikan kecenderungan yang selama ini terjadi di kalangan tokoh-tokoh ilmuwan sosial kita. Sadar atau tidak, mereka dalam beberapa tahun terakhir terlalu Gramscian, terlibat cukup jauh dalam kegiatan aktivisme dan proses politik dalam pengertian sempit. Hal ini sesungguhnya bisa dimaklumi, sebab untuk meruntuhkan rezim yang kukuh seperti rezim Orde Baru dan membangun sesuatu yang besar dan baru (Orde Reformasi), dukungan praktis dan bersifat langsung dari setiap elemen masyarakat, termasuk kaum ilmuwan, memang sangat dibutuhkan. Akan tetapi sekarang situasi telah

berubah, dan tuntutan masyarakat pun menurut saya sudah berbeda. Dari para ilmuwan sekarang yang dibutuhkan terutama adalah ide-ide segar yang mampu menjelaskan berbagai hal yang saya singgung di atas tadi.

Singkatnya, para pentolan ilmu-ilmu sosial sekarang harus lebih banyak kembali ke dunianya. Dari tempat inilah mereka dapat menjelaskan peran mereka dengan lebih baik dan membantu kita semua untuk menjelaskan realitas dan menawarkan jalan ke luar dari berbagai persoalan yang ada.

9 Januari 1999

Hentikan Kebiadaban

DAFTAR KEBIADABAN bertambah lagi. Kali ini di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hanya dalam beberapa hari, ratusan orang tewas, dan puluhan ribu lainnya menjadi pengungsi, tercabut dari tempat mereka mencari hidup dan membesarkan anak-anak mereka. Kerugian harta benda tidak sedikit. Inilah kekerasan dalam bentuknya yang paling telanjang.

Sedihnya, sementara semua itu berlangsung selama beberapa hari, eksistensi Republik Indonesia seolah menguap di angin. Para pemimpin pemerintahan di pusat dan di daerah tak berdaya dan sepertinya tak mengerti harus berbuat apa. Negara berubah fungsi, bukan lagi sebagai sebuah lembaga penegak hukum dan penjamin keamanan warganya, tetapi hanya sebagai panitia pengatur pengungsi.

Kita sudah menyaksikan kebrutalan dan kebiadaban yang hampir sama di banyak daerah dalam dua tahun terakhir. Dan setiap kali semua itu terjadi, kita hanya bisa melihat dan mendengar para pemimpin pemerintahan berbicara tanpa substansi, saling menuduh dan melempar tanggung jawab tanpa mampu menghentikan darah yang terus tumpah. Sulit untuk mengusir kesan, para pemimpin kita yang terhormat itu lupa bahwa fungsi mereka yang paling fundamental—*raison d'être*-nya setiap

negara modern—adalah memberi perlindungan hukum dan keamanan pada masyarakat.

Sebagai warga republik, sudah saatnya kita menyerukan setegas-tegasnya bahwa semua itu harus dihentikan. Daftar korban sudah terlalu panjang. Sampit dan Palangkaraya harus menjadi peristiwa terakhir.

Mulai hari ini, pemerintah dan aparatnya harus bisa mengubah cara pandang dan cara penyelesaian konflik-konflik yang brutal. Selama masa reformasi, negara berubah menjadi macan ompong. Setiap kali terjadi pembakaran dan pembantaian oleh kelompok yang satu terhadap kelompok lainnya, tokoh-tokoh pemegang jabatan publik, baik sipil maupun militer, hanya sanggup menyerukan dialog dan mengimbau agar kelompok-kelompok tersebut berhenti bertikai, saling memaafkan dan berdamai.

Kalau toh aparat pemaksa diterjunkan ke kawasan pertikaian, hal ini biasanya dilakukan dengan luarbiasa lamban dan penuh keraguan. Para pembantai berlari dan mengejar korban-nya seperti serigala yang haus darah, sementara petugas hukum dan keamanan bergerak seperti siput yang peragu.

Semua itu sudah waktunya harus ditinggalkan. Peran negara dan aparatnya yang kuat dan tegas tidak berarti pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Justru sebaliknya. Tanpa peran semacam itu demokrasi akan berubah bentuk menjadi anarki, di mana kebebasan kelompok yang satu menjadi ancaman dan pembantaian bagi kelompok lainnya.

Demokrasi adalah sebuah metode pengambilan keputusan publik. Di bawah Orde Baru peran negara memang sangat kuat, tetapi ia diputuskan secara tertutup hanya oleh segelintir aktor di puncak kekuasaan tertinggi. Sekarang kita harus mengembalikan peran negara yang kuat semacam itu, tetapi de-

ngan proses pengambilan keputusan yang demokratis. Artinya, para wakil rakyat di DPR dan lembaga eksekutif harus menjadi aktor-aktor utama yang mengambil keputusan politik untuk memberi wewenang yang jelas bagi aparat-aparat negara, yaitu TNI dan Polri, dalam mengemban perannya.

Di Amerika Serikat, misalnya, cara semacam itu sudah lazim dilakukan. Dua tahun lalu, waktu pertemuan tahunan WTO (*World Trade Organization*) diselenggarakan di Seattle, Negara Bagian Washington, ribuan kaum aktivis anti-globalisasi dan kaum anarkis melakukan demonstrasi damai. Tetapi, sebagian dari mereka tidak dapat menahan diri dan mulai memecahkan kaca pertokoan dan perkantoran di pusat kota. Pada saat itu juga, walikota dan DPRD Seattle memutuskan pemberlakuan darurat sipil dan melarang setiap individu berada di pusat kota tanpa seizin aparat keamanan. Kota Seattle langsung berada di bawah komando polisi, yang tidak segan-segan menahan dan menembak kalau memang perlu. Semua ini dilakukan sebelum satu tetes darah pun terkur.

Sementara walikota dan polisi Seattle bergerak, gubernur dan tentara cadangan, The National Guard, sudah bersiap-siap dengan perannya masing-masing. Jika pada hari itu juga situasinya makin tak terkendali, para wakil rakyat dan pemimpin lembaga eksekutif di negara bagian di Pantai Barat Amerika ini akan langsung menerapkan situasi darurat militer. Semua itu mereka siapkan untuk melindungi warga dan melumpuhkan kaum yang ingin bertindak biadab dan brutal. Dengan cara demokratis, mereka sudah memilih dengan tegas: lebih baik melumpuhkan, menahan, dan kalau perlu menembak kaum perusuh ketimbang mengorbankan warga yang tak berdosa.

Hanya cara itulah sekarang yang masuk akal untuk kita tempuh. Tentu saja, dalam jangka panjang stabilitas dan keamanan yang hakiki hanya akan tercipta jika rasa kebersamaan masyarakat sudah melampaui garis-garis kesukuan dan keaga-

maan yang sempit, atau jika masyarakat primordial telah berubah menjadi masyarakat madani. Namun dalam jangka pendek, kita tidak memiliki alternatif lain. Kebiadaban harus dilawan, dan saat ini kita hanya memiliki satu alat untuk itu, yaitu aparat negara.

Yang jelas, kita tidak mungkin menutup mata terhadap semua penderitaan dan kebiadaban yang sudah terjadi selama dua tahun terakhir. Kejadian di Sampit, Palangkaraya, Sambas, Poso, Ambon, Wamena, dan di banyak daerah lainnya, telah sangat menusuk rasa kemanusiaan serta mencabik-cabik konsepsi ke-Indonesia-an yang kita junjung tinggi. Sudah saatnya sekarang kita menghentikan semua itu.

2 Maret 2001

Dialog Frans Seda dan Amien Rais

DALAM MERAYAKAN usianya yang ke-70, Frans Seda sempat memberikan wawancara panjang yang dimuat di sejumlah media. Di sini, dengan lugas dan terbuka Frans Seda menyinggung topik hubungan antaragama yang memang saat ini sedang hangat.

Di majalah Forum (No. 14, Oktober 1996) misalnya, tokoh yang pernah berperan penting di era awal Orde Baru ini menjelaskan bahwa jika dulu hubungan antaragama sangat mesra, maka sekarang "bangsa kita kembali dikotak-kotakkan". Buat dia, pengkotakan ini sudah sedemikian rupa sehingga sebetulnya diskriminasi agama telah tercipta. Contohnya, menurut Frans Seda, "orang baru bisa dapat duit kalau agamanya ini, kalau agamanya lain sudahlah, kau tidak usah berharap".

Wawancara yang gamblang semacam itu, terlebih jika diutarakan oleh seorang bekas pemimpin tertinggi Partai Katolik seperti Frans Seda, tentu akan menimbulkan penafsiran yang cukup jauh. Dalam konteks politik kita sekarang, salah satu penafsiran yang bisa dilakukan adalah bahwa Frans Seda, melalui wawancara itu, justru sedang mengkritik kecenderungan revitalisasi peran politik Islam, sebagaimana yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Terbukanya peluang penafsiran demikian, bisa ditebak, tentu akan menimbulkan reaksi balik dari sejumlah tokoh Islam. Dan benar saja! Amien Rais, Ketua PP Muhammadiyah dan intelektual Islam yang tulisannya sering tajam itu kemudian menulis tanggapan di harian *Republika* (10/10/1996). Tanggapan ini adalah tanggapan yang cukup santun, walau isinya menggigit, tak kalah gamblangnya, dan bersifat polemis.

Bagi Amien Rais, pendapat Frans Seda adalah pendapat yang "aneh-aneh dan cenderung bermuatan SARA". Menurut Amien, Frans Seda justru harus berempati terhadap nasib umat Islam yang sepanjang 1970-an dan 1980-an menjadi obyek diskriminasi. Waktu umat Islam mengalami nasib buruk itu, kata Amien Rais, "Kami semua diam seribu bahasa karena kami dicekam rasa takut. Kami tidak berani protes, takut dituduh SARA."

Di akhir tanggapannya, Amien Rais menolak "tuduhan" Frans Seda: "Saya yakin tidak ada satu noktah pun dalam pikiran orang Islam untuk melakukan diskriminasi berdasar suku, ras, golongan, dan agama. Kami hanya ingin sebuah kehidupan nasional yang representatif dan meritokratis."

Apa yang bisa dikatakan terhadap "dialog" kedua tokoh penting ini? Perlukah ia ditampilkan di forum publik? Buat saya, pembicaraan terbuka demikian, walau belum bersifat dialog langsung, harus disambut gembira. Apalagi, ia dilakukan oleh dua tokoh yang sangat representatif mewakili pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontroversi hubungan agama dan politik. Harus diakui, kata-kata yang digunakan dalam "dialog" tersebut memang cukup tajam. Namun demikian, saya kira kita semua bisa melebarkan ruang-ruang kultural kita untuk tidak terlalu menghiraukan tajamnya kata-kata itu, dan lebih memperhatikan substansi pendapat masing-masing pihak.

Kalau toh ada catatan yang bisa diberikan terhadap "dialog" Frans Seda-Amien Rais, yang ingin saya anjurkan adalah agar kedua belah pihak melakukan semacam klarifikasi terhadap tuduhan dan argumen masing-masing dalam soal diskriminasi agama. Betulkah secara faktual bahwa, misalnya, untuk "dapat uang" orang harus beragama tertentu, seperti sinyalemen Frans Seda? Betulkah terjadi diskriminasi sistematis terhadap umat Islam sepanjang 1970-an dan 1980-an, seperti kata Amien Rais?

Klarifikasi semacam ini penting, sebab selama ini dalam diskursus hubungan agama dan politik, kita terlalu sering membaca gosip dan pernyataan miring terhadap golongan ini atau sekelompok itu yang sulit ditelusuri asal-usul dan bukti-buktinya. Yang terjadi dalam banyak hal adalah semacam *prejudice exchanges*. Jika kita berani mengatakan fakta yang sebenarnya, atau sebaliknya mengakui bahwa kecurigaan yang ada tidak berdasarkan bukti yang memadai, maka buat saya titik terang untuk mencari metode kerukunan beragama yang sejati mungkin sudah mulai tampak.

Selain klarifikasi faktual, kita juga harus memperhatikan bahwa proses pengambilan kesimpulan tentang diskriminasi seyogyanya dilakukan dengan hati-hati. Katakanlah ada sebuah fakta bahwa Amien Rais, untuk memberikan ceramah akademik di kampus, menemui berbagai hambatan politis (hal ini sungguh terjadi pada pertengahan 1980-an). Tapi apakah fakta ini membuktikan terjadinya diskriminasi terhadap Islam? Ataukah, karena Amien Rais saat itu sangat kritis terhadap Orde Baru, seperti juga Y. B. Mangunwijaya yang Katolik dan Arief Budiman yang sekular, maka hambatan politis itu terjadi? Dalam hal yang terakhir ini kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa diskriminasi yang terjadi bukanlah terhadap agama tertentu, tetapi terhadap mereka yang kritis pada pemerintah, apapun agama yang dianutnya. Logika seperti ini, terhadap kesimpulan Frans Seda tentang diskriminasi terhadap kaum non-Islam, dapat pula diterapkan.

Catatan lain yang ingin saya sampaikan adalah terhadap pernyataan penting Amien Rais bahwa umat Islam ingin menegakkan kehidupan kebangsaan yang representatif dan meritokratis. Dalam hal meritokrasi, saya kira kita semua setuju bahwa metode seleksi sosial ini tidak problematik, paling tidak secara ideal. Yang rajin, pintar, tekun, dan teguh, itulah yang "menang". Meritokrasi, singkatnya, adalah aspirasi universal yang secara konsepsional telah dianggap "selesai". Yang tersisa tinggalah proses penjabarannya.

Tapi tidak demikian halnya dengan representasi. Mekanisme seleksi sosial dengan cara ini masih sangat problematik. Dari tinjauan konsepsional, persoalan pertama yang kita hadapi adalah mengenai garis batas representasi itu. Kalau misalnya kita menghitung proporsi pejabat suatu departemen menurut agama masing-masing, maka kenapa kita juga tidak memasukkan unsur daerah dan etnis misalnya? Apa alasan kita untuk mendasarkan representasi hanya pada kriteria agama, dan tidak yang lainnya?

Katakanlah kita menerima argumen representasi dalam keseluruhannya, maka bayangkanlah betapa akan repotnya kita. Setiap kali kita akan mengangkat pegawai, pejabat, atau memilih pemenang tender proyek, proporsi menurut variabel agama, etnik, dan asal daerah harus kita perhitungkan. Dan jika ini memang kita lakukan, maka pada suatu batas tertentu, ia pasti akan bertentangan dengan ideal kita yang lain, yaitu meritokrasi. Bagaimana gerangan kita menyelesaikan problematik ini? Adakah metode yang baik untuk mengatasi ketegangan antara ideal meritokrasi dan prinsip representasi?

Di Amerika, salah satu perwujudan dari argumen representasi adalah kebijakan *affirmative action*. Kebijakan ini bertujuan untuk lebih menyeimbangkan proporsi warna kulit (pu-

tih dan non-putih) dan gender dalam berbagai hierarki dan jabatan-jabatan sosial, politik dan ekonomi, termasuk proporsi mahasiswa di berbagai kampus. Saat ini, walau dianggap bertujuan cukup mulia, kebijakan ini mulai banyak dianggap kontra-produktif, karena justru meluaskan kultur ketergantungan, mengurangi harga diri kelompok sasaran kebijakan itu sendiri, serta mengikis dasar-dasar sistem meritokratik, terutama di dunia universitas.

Jika di Amerika hal yang semacam ini terjadi pada penerapan argumen representasi, bagaimana dengan kita? Apakah tidak mungkin bahwa *unintended consequences* dari kebijakan semacam itu akan semakin diperburuk mengingat jalinan-jalinan sosial kita yang lebih kompleks dan tingkat kemampuan ekonomi kita yang jauh lebih terbatas?

Tentu, semua pertanyaan ini tidak ditujukan hanya pada Frans Seda, Amien Rais atau pada kalangan agama tertentu saja. Kita semua dituntut untuk menjawab dan membahasnya, dengan dingin dan rasional. Barangkali hal ini bisa menjadi agenda berikutnya dalam "dialog" yang sudah diawali oleh Frans Seda dan Amien Rais. Kalau bukan oleh tokoh-tokoh seperti mereka, oleh siapa lagi masalah sangat mendasar dalam kehidupan kebangsaan kita ini harus dibicarakan dan diperdebatkan? Oleh massa di jalan-jalan, dengan cara-cara yang juga bersifat jalanan dan brutal seperti di Situbondo barusan ini?

30 Oktober 1996

Lincoln

DI PUNDAK ABRAHAM LINCOLN terletak nasib Amerika Serikat pada paruh kedua abad ke-19. Saat ia dilantik menjadi presiden pada Maret 1861, sebelas negara bagian republik modern pertama itu memisahkan diri dan memproklamasikan kemerdekaan mereka dengan membentuk negara konfederasi. Kaum separatistis di negara-negara bagian di selatan ingin berdaulat penuh. Mereka menganggap perbudakan adalah bagian dari sistem sosial mereka. Dengan naiknya Lincoln, mereka curiga bahwa negeri-negeri bagian di utara akan memaksakan kehendak dan menghapuskan sistem sosial yang sudah berakar itu.

Gerakan separatisme itu didukung luas oleh masyarakat di selatan, kecuali oleh para budak tentunya, dan ditopang oleh kekuatan militer dan pasukan-pasukan milisi yang sangat tangguh. Mereka juga punya banyak ahli perang yang piawai, seperti Jenderal Robert E. Lee dan Jenderal Thomas “Stonewall” Jackson.

Singkatnya, Amerika Serikat pada 1861 berada pada titik tergenting dalam perjalanannya. Dan Lincoln-lah, seorang anak petani dari Springfield, Illinois, yang kemudian menjadi pengacara sukses, yang harus memimpin negerinya mengatasi gelombang separatisme itu. Sejarah tidak memberinya

pilihan: ia harus mengambil langkah-langkah besar atau negernya akan terdampar ke tepian sejarah.

Buat Lincoln, negara bentukan Revolusi 1776 itu sudah final dan tidak dapat dipecah-pecah. “*It will become one thing, or all the other*”, tidak ada jalan tengah. Amerika Serikat harus utuh, kalau tidak ia akan terpecah ke dalam serpihan-serpihan yang berbeda dan bermusuhan.

Pada awalnya, Lincoln memberi jalan kompromi yang cukup luas kepada kaum separatis. Ia menawarkan pembatasan, bukan penyalpangan perbudakan, sejauh kaum separatis mau bergabung lagi ke dalam negara perserikatan. Dalam pidato pelantikannya, ia mengingatkan bahwa masyarakat di selatan dan utara ditakdirkan sebagai satu bangsa dengan satu tanah air. Ia berharap kaum separatis tidak bertindak didorong oleh gelora perasaan semata, tetapi juga oleh kesadaran nurani yang mendalam, “*the better angels of our nature*”.

Tapi tawaran kompromi Lincoln ditolak. Semangat separatisme di selatan sudah terlalu bergemuruh. Mereka sudah membentuk pemerintahan sendiri. Mereka sudah mengangkat senjata dan bertekad mempertahankan “kemerdekaan” itu untuk seterusnya. Dengan sikap kaum separatis seperti itu, Lincoln tidak melihat kemungkinan lain kecuali menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan politik, yaitu keutuhan negara.

Pada Desember 1861, perang saudara pun meledak. Selama dua tahun pertama, kaum utara mengalami berbagai kekalahan dalam banyak pertempuran. Akibatnya, semakin banyak kalangan di utara yang mendukung seruan “perdamaian dengan segala konsekuensinya”. Sebagian lagi mendesak Lincoln agar mengambil langkah yang lebih radikal dalam memerangi kaum selatan. Dalam teater militer, kaum utara terdesak. Dalam panggung politik, dukungan bagi Lincoln semakin sempit dan terpecah.

Dalam situasi kritis itulah kepemimpinan Lincoln diuji. Kadang ia menyikut, tetapi lebih sering dengan kemampuan persuasinya yang memukau, ia melakukan berbagai hal untuk menyabarkan kaum radikal dan menyuntikkan tekad serta meniupkan harapan pada kaum pesimis yang semakin antiperang. Ia merangkul para pengkritiknya, tanpa harus sepenuhnya menjadi boneka di tangan mereka.

Dalam melakukan semua itu, Lincoln bertindak sebagai seorang pragmatis yang diilhami oleh sebuah visi besar, yaitu keutuhan Amerika Serikat. Tetapi sesungguhnya yang membuat dia menjadi pemimpin terbesar sepanjang masa di negerinya, dan di negeri lain yang mencintai kebebasan, adalah kemampuan dia untuk berubah dan mengembangkan visinya, sambil tetap memperluas dukungan politik yang dibutuhkannya.

Visi awalnya, perang untuk negara, pada akhir tahun kedua pemerintahannya dia kembangkan menjadi perang untuk pembebasan. Yang terakhir ini dia wujudkan dengan merancang Deklarasi Emansipasi, yang kemudian menjadi dokumen historis bagi penghancuran sistem perbudakan. Dengan visi baru ini, perang sipil yang dipimpinnya menjadi bermakna lebih mendalam sekaligus berdampak lebih luas. Perang itu menjadi sesuatu yang lebih mulia, karena ia bukan lagi sekadar aksi bersenjata untuk mempertahankan keutuhan negara. Kaum patriot di utara kemudian berubah menjadi pejuang pembebasan.

Visi itu ternyata bergema jauh ke dalam sukma masyarakat di utara. Ia kemudian menjadi pengikat baru dan sumber motivasi yang menggelorakan, yang membantu mereka untuk bertahan, dan kemudian menghancurkan kekuatan kaum separatis pada 1864 dan 1865.

Pertikaian utara-selatan itu, dengan korban 630 ribu jiwa, tercatat sebagai perang saudara terbesar sepanjang sejarah manusia, hingga kini. Tapi sejarah juga mencatat bahwa ia meng-

ubah Negeri Paman Sam itu secara fundamental. Sejak saat itulah prinsip yang mereka junjung tinggi, yaitu bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, betul-betul ditanamkan dalam kesadaran nasional mereka.

Enam bulan setelah kemenangan kaum utara, Lincoln ditembak mati oleh seorang pendukung fanatik sistem perbudakan. Jasadnya memang berkalang tanah, tapi sesungguhnya ia terus hidup sepanjang masa.

16 Juli 2000

Hukum Liddle:

Tentang Pemilu dan Partai Politik

Hukum Liddle

PROFESOR WILLIAM LIDDLE menolak sistem pemilihan presiden secara langsung, setidaknya untuk beberapa periode pemilu. Saya tidak sepakat dengannya, tapi saya sadar bahwa argumen-argumen dia cukup kuat dan sangat menarik. Untuk mengkritik guru besar ilmu politik kenamaan ini dengan baik, saya ingin mulai dengan menjelaskan apa yang saya sebut sebagai Hukum Liddle, *Liddle's Law*.

Hukum ini berangkat dari sebuah teori yang diawali oleh ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger, pada 1950-an. Menurut Duverger, dalam karya klasiknya yang terbit pada 1954, *Political Parties*, jika pemilihan langsung diadakan dan sistem pemilu diselenggarakan dengan metode mayoritas sederhana, yang akan tercipta dalam jangka panjang adalah sistem politik yang hanya akan memunculkan dua partai yang dominan. Beberapa partai kecil mungkin tetap hadir dalam sistem ini, tapi kompetisi kekuatan hanya akan terjadi di antara dua partai besar.

Logikanya jelas. Dalam pemilu, setiap partai ingin menang, tapi kursi presiden atau perdana menteri hanya satu. Tidak ada partai atau kandidat yang ingin membuang banyak waktu dan biaya yang begitu besar untuk ikut pemilu jika dia tahu bahwa

pada akhimya dia akan kalah. Karena itu, partai kecil akan bergabung dengan partai lainnya yang memiliki kedekatan aspirasi, betapapun kecilnya. Penggabungan ini akan bejalan sedemikian rupa sehingga pada ujungnya yang bertarung hanyalah dua partai atau kubu besar.

Teori ini kelihatannya sederhana, tetapi dalam pembuktian empiris sulit ditolak. Dengan beberapa pengecualian, semua negeri yang memakai pola pemilihan langsung dengan metode mayoritas sederhana memang hanya dikuasai oleh dua partai besar. Contoh terbaik dalam hal ini adalah Amerika Serikat dan Inggris. Di kedua negeri ini memang ada partai-partai kecil, tetapi peranannya tidak pernah penting. Dinamika politik di Amerika Serikat hanya dipengaruhi oleh kompetisi antara Partai Republik dan Partai Demokrat, sementara di Inggris antara Partai Konservatif dan Partai Buruh.

Karena ketepatannya dalam menjelaskan realitas, banyak kalangan yang berkata bahwa teori ini adalah satu-satunya teori dalam ilmu sosial yang bersifat pasti, sebagaimana teori keunggulan komparatifnya David Ricardo dalam ilmu ekonomi. Duverger sendiri berkata bahwa teorinya itu sudah mendekati *a true sociological law*.

Teori seperti itulah yang diadaptasi Liddle untuk membaca dan meramalkan dinamika politik kita. Pertanyaan besar yang ada di benaknya adalah, jika dua kubu besar terbentuk di Indonesia, apa garis politik dan basis ideologi yang memisahkan kedua kubu ini. Sumber-sumber mobilisasi apa yang akan digunakan partai politik dalam merebut dukungan bagi kandidatnya? Di Amerika Serikat dan Inggris garis pemisah itu berdasarkan perbedaan program dan ideologi modern. Apakah hal yang sama juga, akan terjadi di Indonesia?

Ternyata tidak. Setelah meneliti perilaku pemilih dalam Pemilu 1999 dengan cermat (bersama muridnya, Saiful Mujani, dan sejumlah peneliti UI, antara lain Eep Saifulloh Fatah, yang

kini juga menjadi muridnya), Liddle menyimpulkan bahwa perilaku pemilih sekarang belum banyak berbeda dari perilaku pemilih pada 1955, sewaktu pemilu pertama diadakan. Empat puluh lima tahun silam, seperti yang dikatakan Clifford Geertz, basis pertarungan antarpolisi mengikuti garis primordial. Rakyat memilih tidak berdasarkan persetujuan mereka terhadap program partai secara rasional, tetapi lebih berdasarkan pada loyalitas dan identitas agama, daerah, dan suku. Sekarang, peran suku dan daerah mungkin agak berubah, tetapi peran agama tetap. Dulu dan sekarang, agama dan identitas keagamaan tetap menjadi basis mobilisasi politik dan legitimasi kekuasaan.

Sebenarnya, sebagai seseorang yang menginginkan Indonesia menjadi demokratis, modern, dan makmur sekaligus, Liddle tidak menginginkan hal itu terjadi. Agama ia harapkan hanya berada di arena politik secara tidak langsung. Tapi dia seorang ilmuwan, dan karena itu ia harus mengatakan apa yang sesungguhnya akan terjadi, bukan apa yang seharusnya atau apa yang dia inginkan terjadi.

Karena itulah Liddle kemudian menyimpulkan bahwa kalau pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung saat ini diselenggarakan, akan tercipta koalisi besar kaum Islam di satu pihak, dan kaum sekular-nasionalis dan kaum non-Islam di pihak lain. Hanya dua kubu inilah yang akan mendominasi peta politik Indonesia. Kesimpulan seperti inilah yang saya sebut sebagai Hukum Liddle.

Lalu apa implikasi dari hukum seperti itu? Buat Liddle, soalnya jelas: jika dua kubu besar berdasarkan garis primordial mendominasi arena politik, yang akan terjadi di masa depan adalah rangkaian kerusuhan yang dimotori oleh kaum fanatik. Pemilu akan menjadi arena pertarungan prasangka, bukan dialog untuk membela program politik yang rasional. Dan kalau sudah begitu, demokrasi Indonesia pasti akan terancam. Karena

itu, Liddle mengusulkan bahwa sistem pemilihan seperti yang sudah kita lakukan selama ini (MPR memilih presiden) dipertahankan dulu untuk beberapa periode pemilu.

Apa yang bisa dikatakan tentang analisis Liddle itu? Buat saya, pada tingkat tertentu ia sulit ditolak. Bukti empirisnya memang belum ada, karena kita belum pernah melakukan pemilihan presiden secara langsung. Namun, kita bisa mengambil sebuah model yang cukup tepat untuk “menguujinya”.

Sewaktu Gus Dur terpilih sebagai presiden sepuluh bulan lalu, ia dipilih secara langsung oleh sekian ratus anggota MPR. Sekarang, anggaplah semua anggota MPR ini adalah keseluruhan penduduk Indonesia. Di sini kita bisa melihat ada banyak partai plus golongan di lembaga tertinggi ini. Tapi, dalam proses pemilihan presiden, ada berapa kubu besar yang tercipta? Ada berapa kandidat yang pada akhirnya bersaing ketat? Apa garis perbedaannya? Ternyata, hanya ada dua kubu dan dua kandidat dominan (Megawati dan Gus Dur), dan garis pemisahnya persis seperti yang diramalkan oleh Hukum Liddle itu. Jadi, hukum ini benar dan posisinya dapat diangkat menjadi sebuah teori yang bisa memperkaya khazanah studi Indonesia.

Namun, pertanyaan kita kemudian, kalau Hukum Liddle itu memang sulit ditolak kebenarannya, apakah implikasinya demikian pula. Seperti yang sudah saya singgung tadi, Liddle menolak sistem pemilihan langsung berdasarkan implikasi hukum itu, bukan substansi hukum itu sendiri. Apakah implikasi dualisme kecenderungan berdasarkan garis agama di negeri kita harus berujung pada pertarungan kaum fanatik dan hilangnya moderasi dan basis-basis kompromi? Apakah proses pemilu hanya akan dikuasai oleh kaum fundamentalis di kedua kubu, dan kaum moderat akan bersembunyi di sudut-sudut sejarah?

Jawaban saya, tidak. Liddle hanya bisa benar jika distribusi ideologi dan komposisi aspirasi dalam masyarakat kita meng-

ikuti sebuah kurva yang disebut oleh Anthony Downs, dalam bukunya yang terkenal, *Economic Theory of Democracy* (1957), sebagai kurva lonceng terbalik. Dalam kurva semacam ini, kaum pemilih yang berada di tengah, yaitu kaum moderat dari kedua kubu, berjumlah sangat kecil. Semakin garis kurva ini bergerak ke titik di ekstrem kiri atau kanan, semakin besar jumlah pemilih yang dicakupnya, mengikuti garis kurva yang menaik.

Kurva ini mengimplikasikan bahwa setiap politisi atau kandidat dari kedua kubu hanya bisa menang dalam pemilu jika mereka bergerak menjauhi kaum moderat. Mereka harus bergerak ke titik ekstrem di kubunya masing-masing, karena di sanalah terdapat jumlah pemilih terbesar. *Politicians go where the voters are*. Hal inilah yang membuat Liddle khawatir bahwa proses pemilu hanya didominasi oleh pertarungan prasangka-prasangka kaum fanatik.

Buat saya, kekeliruan Liddle terletak di sini: ia menerima begitu saja bahwa kurva semacam itulah yang menggambarkan distribusi ideologi dan komposisi aspirasi dalam masyarakat kita. Kalau Indonesia hanya Maluku dan Poso, mungkin Liddle benar. Namun, untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, kurva yang lebih tepat untuk digunakan adalah kurva lonceng normal. Dengan kata lain, asumsi yang digunakan Liddle sebenarnya terbalik.

Dalam kurva lonceng normal, kaum ekstrem di kedua belah pihak memang ada, tapi jumlahnya relatif kecil. Kaum ekstrem semacam ini adalah, di satu pihak, mereka yang menginginkan negara Islam dan pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan publik secara hitam putih, seperti di Afghanistan di bawah kaum Taliban atau Iran di bawah Khomeini, tanpa peduli akan risiko sosial, politik, dan ekonomi yang akan mengiringinya, dan di pihak lain adalah kaum sekular-nasionalis yang, seperti pengikut Kemal Attaturk di Turki pada awal abad ke-20, betul-betul

anti-Islam dan menganggap setiap hal yang berbau Islam dan Arab pasti jelek, terbelakang, serta berbahaya.

Jumlah pemilih terbesar berada di ruang tengah, menjauhi kedua titik ekstrem tersebut. Mereka, misalnya, adalah kaum Islam yang memilih PDI-P, tanpa peduli dengan isu-isu religius, atau pendukung Golkar yang Islam dan Kristen, atau sebagian pendukung PAN dan PKB yang memang menginginkan ekspresi keislaman yang lebih kental dalam arena publik, tetapi lebih banyak bersifat simbolik ketimbang bersifat legal-formal. Mereka inilah yang tersebar di ruang tengah di kedua kubu.

Jika saya benar, kita sebenarnya tidak perlu terlalu khawatir untuk memilih presiden secara langsung. Malah, ia mungkin akan memperkuat demokrasi kita. Mengikuti implikasi yang ada pada kurva lonceng normal itu, setiap politisi dan kandidat partai yang ingin merebut kursi kepresidenan harus merebut ruang tengah, tempat sebagian besar pemilih berada. Politisi yang menjauhi mereka dan bergerak ke titik ekstrem hanya akan merugikan dirinya sendiri, persis seperti yang terjadi dalam setiap pemilihan presiden di Amerika Serikat. Politisi ekstrem akan mendapat tepuk tangan dari kaum fanatik, tetapi bukan kursi kekuasaan.

27 Agustus 2000

Nasib Partai Golkar

KASUS BULOGGATE II dan penahanan sementara Akbar Tandjung dapat dilihat sebagai ujian terhadap Partai Golkar. Pada Pemilu 1999, dalam situasi terjepit dan dicerca dari kiri dan kanan, partai ini masih mampu meraih dukungan 24 juta suara atau sekitar seperempat dari keseluruhan warganegara yang diberi hak untuk memilih.

Prestasi semacam itu bukan sesuatu yang bisa dipandang dengan sebelah mata. Suka atau tidak, jutaan rakyat telah menitipkan aspirasi mereka pada partai ini, dan dalam sistem demokrasi titipan aspirasi rakyat itulah yang harus menjadi pedoman dalam menghadapi setiap perkara.

Karena itu, dalam ujian menghadapi kemelut sekarang ini, Partai Golkar harus mampu mengedepankan masa depannya sebagai partai untuk membela kepentingan jutaan penduduknya, bukan masa depan dan nasib individu-individu tertentu, betapapun penting dan berjasanya mereka selama ini.

Tentu sangatlah wajar jika para pemimpin dan massa Partai Golkar membela pemimpinnya yang berada dalam situasi terjepit. Apalagi, sosok seorang Akbar Tandjung memang mudah membangkitkan simpati. Mantan Mensesneg di era Presiden Habibie ini pada dasarnya adalah seorang yang santun

dan bersahabat, dengan kata-kata yang selalu terukur dan emosi yang senantiasa terjaga. Demikian pula, sebagai politisi ia telah terbukti mampu mengemudikan biduk partainya melewati berbagai kesulitan politik sebagai *The New Order's ruling party*, dan muncul sebagai pemenang kedua dalam pemilu yang relatif bebas, terbuka dan representatif.

Namun, semua ini tidak boleh menghapuskan garis demarkasi antara kepentingan yang pribadi dan bersifat individual serta kepentingan yang sepenuhnya mengatasi unsur-unsur pribadi, yaitu kepentingan partai dalam jangka panjang.

Terlepas dari cara pandang kita dalam melihat kasus Bulogate II, kader-kader serta pengurus Partai Golkar memang dituntut dari sisi moral untuk membela pemimpin mereka sampai titik terjauh, dalam koridor hukum yang berlaku. Dalam situasi krisis dan tak pasti seperti sekarang ini, ekspresi dan perjuangan yang dilandasi oleh rasa setia kawan adalah sebuah nilai plus tersendiri yang dapat membangkitkan inspirasi pada banyak orang.

Namun pada saat yang sama mereka juga harus mampu melihat bahwa apapun yang telah dan akan terjadi pada seorang Akbar Tandjung, partai tetap harus hidup dan memper-timbangkan pilihan-pilihan politiknya secara rasional.

Dalam hal terakhir ini, pilihan-pilihan yang ada pada tokoh-tokoh yang menentukan perjalanan Partai Golkar pada dasarnya sudah cukup jelas. Di satu pihak, karena luka, kemarahan, dan emosi sesaat, mereka bisa mengambil strategi bumi hangus atau strategi oposisi permanen terhadap pemerintah yang berkuasa saat ini, dan khususnya terhadap Presiden Megawati dan PDI Perjuangan sebagai basis politiknya. Dalam hal ini mereka, misalnya, dapat mengumumkan penarikan kader-kader mereka dari Kabinet Gotong-Royong yang dipimpin Megawati-Hamzah Haz.

Di pihak lain, mereka dapat menjadikan kemelut yang menimpa partai dan pimpinan mereka sekarang sebagai momentum untuk memperbaiki dan menyempurnakan partai, sekaligus untuk merebut simpati banyak orang. Dalam hal ini mereka dapat menyerukan bahwa mereka mendukung proses hukum sepenuh-penuhnya dan tetap ingin membantu pemerintah saat ini dalam mengatasi berbagai persoalan yang ada lewat kader-kader mereka yang andal di lembaga eksekutif, seperti Jusuf Kalla, atau lewat proses legislasi yang sehat di parlemen.

Hanya pilihan kedua inilah yang sesuai dengan kepentingan jangka panjang Golkar sebagai partai politik. Bahkan lebih jauh lagi bisa dikatakan bahwa pilihan semacam ini bukan hanya baik bagi Partai Golkar, tetapi juga baik bagi proses transisi demokrasi di negeri kita.

Mengapa? Berdasarkan hasil Pemilu 1999, kita tahu bahwa secara alamiah masyarakat politik Indonesia adalah sebuah entitas yang sangat terpilah, *a highly fragmented polity*, di mana tidak ada satu pun kekuatan yang mampu mendominasi arena politik. Hal inilah yang hingga sekarang menjadi persoalan terbesar dalam menciptakan stabilitas permanen dan membangun struktur penentuan publik yang efektif dalam proses transisi kita.

Kesulitan demikian hanya dapat diatasi dengan munculnya sebuah koalisi dominan dari dua partai besar yang memiliki ideologi yang kurang lebih sama, atau setidaknya tidak berbeda secara diametral. Bagi saya, dalam jangka panjang, koalisi dominan yang dapat memenuhi tuntutan semacam itu dan mendominasi panggung politik hanya mungkin dilakukan oleh PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kalau sekarang ini keduanya membangun basis koalisi yang kukuh, maka sebenarnya sebuah persoalan politik yang fundamental telah terselesaikan, sebab telah tercipta sebuah kekuatan dengan suara yang melampaui 50 persen+1 di parlemen.

Bahwa sekarang semua itu belum atau masih sulit terjadi, saya kira kita semua sudah mengerti dengan baik. Tetapi di situ pulalah soalnya: jika strategi bumi hangus atau strategi oposisi permanen yang dipilih oleh tokoh-tokoh yang mengemukakan Partai Golkar dalam menghadapi kemelut saat ini, kemungkinan koalisi demikian pasti akan semakin menjauh. Dalam hal ini Partai Golkar akan menjadikan PDI-P dan Presiden Megawati sebagai *bete noire*, seteru yang perlu dilawan serta dipatahkan terus-menerus. Namun, jika strategi kedua, atau strategi kompromi dan *full-disclosure* yang dipilih, kemungkinan pembentukan koalisi dominan tadi masih tetap terbuka.

Dan pada hemat saya, justru hal itulah yang saat ini harus dilakukan, jika pertimbangannya adalah kontribusi Partai Golkar yang positif terhadap proses transisi demokrasi di negeri kita. Dalam perjalanan hidup individu maupun partai politik, kemelut dan krisis seringkali tak dapat dihindarkan. Yang harus dilakukan adalah menjadikan kemelut itu sebagai batu loncatan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Kemelut harus dilihat bukan sebagai proses kehancuran, tetapi sebagai sesuatu yang mendewasakan.

10 Maret 2002

Konvensi Partai Golkar Akal-akalan?

SETELAH BANYAK DIPUJI, Konvensi Partai Golkar kini menuai sejumlah kritik. Nurcholish Madjid mundur dari konvensi ini, sebagian kalangan intelektual dan beberapa politisi partai-partai baru menyambutnya dengan berkata, sejak awal konvensi itu hanya akal-akalan, sebuah proses yang penuh politik uang serta diatur sedemikian rupa sehingga yang akan keluar sebagai pemenang akhirnya adalah Akbar Tandjung, sang ketua umum yang sarat masalah itu.

Saya menghormati hak Nurcholish Madjid untuk mundur. Tetapi, apakah aneka kecaman dari berbagai kalangan terhadap konvensi itu cukup adil dan akurat? Apakah para pengkritik mengerti apa yang sebenarnya mereka katakan?

Dalam hal Akbar Tandjung, misalnya, kita sepakat, kesertaannya dalam konvensi justru merugikan partainya sendiri. Namun, apakah ia otomatis akan keluar sebagai pemenang atau salah satu pemenang? Bahwa posisinya kuat, tentu (tiap *incumbent* memiliki keuntungan sendiri). Tetapi betulkah ia pasti menang?

Dalam tahap konvensi untuk memilih lima kandidat calon presiden yang prosesnya akan dimulai 1 September, unit pe-

milih yang paling menentukan ada di Daerah Tingkat II (kota dan kabupaten). Di sini, karena adanya aturan tentang *voting block*, bukan pengurus partai di kabupaten atau kota yang akan menjadi penentu, namun pengurus partai di tingkat kecamatan dan ormas-ormas yang terkait dengan Partai Golkar di Dati II.

Apakah Tandjung dapat mengontrol dan mengatur suara puluhan ribu kader dan aktivis Partai Golkar yang tersebar di tingkat kecamatan dan kabupaten, dari Sabang hingga Merauke? Siapa yang bisa menebak isi kepala puluhan ribu kader dan aktivis akar rumput ini?

Dalam proses penjurangan nama yang berakhir pekan lalu, di mana unit pemilihnya adalah pengurus partai di tingkat provinsi, Tandjung hanya menempati urutan ke-5, di bawah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto, dan Jusuf Kalla. Sebagai ketua umum, pengaruh Tandjung paling kuat terasa pada tingkat pengurus provinsi. Tetapi, pada tingkat ini pun ia ternyata tidak sekuat yang diduga banyak orang. Karena itu, bila kita bicara tentang suara di tingkat kabupaten dan kecamatan, sebenarnya kita sedang berhadapan dengan sebuah ketidakpastian, sebuah wilayah yang belum pernah terjamah proses pemilihan langsung pimpinan politik sebagaimana terjadi dalam konvensi ini. Di *terra incognita* ini, segala hal mungkin terjadi, termasuk tersingkirnya Tandjung dari posisi lima besar.

Memang, ketidakpastian itu akan menciut drastis saat proses konvensi memasuki tahap terakhir, tahap pemilihan dari lima menjadi satu kandidat capres yang akan berlangsung 11-13 Februari 2004. Posisi Tandjung sebagai ketua umum lebih berpengaruh pada tahap ini. Namun, di sini pun pengaruh itu sebenarnya terbatas, baik karena aturan mengenai *voting block* maupun karena jumlah suara Dati II yang demikian mendominasi.

Pada tahap ini, seluruh pengurus DPP yang jumlahnya lebih seratus hanya mendapat hak suara 18, dan para pengurus DPD di 30 provinsi mendapat hak masing-masing tiga suara.

Artinya, jumlah suara yang dimiliki pengurus di tingkat pusat dan Dati I adalah 108 suara (18+90), sementara jumlah kota dan kabupaten adalah 416 dan masing-masing akan mendapat satu suara. Belasan suara selebihnya akan dibagi oleh ormas partai yang ada di ibu kota.

Katakanlah dalam puncak konvensi nanti Kandidat A dan B adalah dua dari lima nama yang memperebutkan posisi capres Partai Golkar. Dalam penentuan di kalangan DPP, jika dari 103 pengurus ternyata 52 di antaranya mendukung Kandidat A dan 51 mendukung Kandidat B, maka capres resmi DPP adalah Kandidat A, dan otomatis skor suara yang diperolehnya adalah 18, dan Kandidat B tidak memperoleh apa-apa (inilah yang disebut sebagai *voting block*).

Dalam penentuan di kalangan masing-masing DPD I, Kandidat A ternyata masih unggul, meski tidak sepenuhnya, misalnya dengan menjadi pilihan dari 22 DPD I. Dalam hal ini Kandidat A mendapat tambahan 66 skor suara (22x3). Jadi, saat ini situasi amat tidak berimbang, Kandidat A mendapat skor 84, sementara Kandidat B hanya 24 (8x3).

Kemudian, dalam penentuan di kalangan pengurus DPD II ternyata Kandidat B yang lebih populer mendapat dukungan dari 250 DPD II, sementara Kandidat A hanya memperoleh 150 dukungan, dan sisanya dibagi ke tiga kandidat lainnya. Jadi, Kandidat A mendapat tambahan 150 skor suara sementara Kandidat B mendapat tambahan 250.

Meski tidak lagi mendapat tambahan suara dari belasan ormas yang ada di ibu kota, pemenang konvensi adalah Kandidat B dengan 274 suara. Kandidat A yang kuat di tingkat pusat dan provinsi harus gigit jari karena tidak mampu merebut lebih banyak dukungan di kalangan pengurus dan aktivis partai di tingkat kota dan kabupaten.

Jadi, bisa dikatakan, tahap puncak ini pun, dominasi kader-kader partai yang jauh dari pusat kekuasaan amat terasa.

Secara keseluruhan, suara mereka mencapai hampir 80 persen dari total suara yang ada dalam konvensi. Hanya kandidat yang dapat merebut dukungan merekalah yang dapat muncul sebagai pemenang Konvensi Partai Golkar.

Untuk merebut dukungan itu, peran uang merupakan salah satu faktor penting. Seorang kandidat tidak mungkin terpilih jika ia hanya menelepon atau berkirim surat kepada para aktivis dan tokoh partai di daerah. Para kandidat harus berkeliling ke 30 provinsi dan setidaknya ke 70 persen dari 416 kabupaten dan kota yang ada di penjuru Tanah Air.

Semua itu tak mungkin dilakukan dalam waktu relatif singkat tanpa dana besar untuk membeli atau menyewa pesawat terbang, membayar hotel untuk rombongan dan tim sukses, menyediakan makan dan minum pada acara-acara pertemuan, membagi kaos dan bendera partai, menyewa bus, memberi kontribusi dana bagi kegiatan partai di daerah, bahkan memberi ongkos transportasi bagi aktivis partai di kecamatan untuk hadir dalam forum pertemuan di ibu kota kabupaten, dan sebagainya. Apa boleh buat, demokrasi memang mahal, apalagi dalam sebuah negeri besar seperti negeri kita.

Namun, dana besar saja tidak cukup. Sang kandidat harus mampu membujuk, bertukar-pikiran, dan mendengarkan aspirasi banyak kader dan pengurus partai di daerah. Ia harus terbang ke seluruh penjuru Tanah Air untuk bersalaman dan membangkitkan harapan kader-kader partai serta meyakinkan mereka bahwa ia adalah pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam proses itulah sebenarnya terletak nilai penting konvensi ini. Ia adalah sebuah eksperimen demokrasi di tingkat awal, sebuah *prelude* bagi pemilihan langsung presiden tahun depan yang baru pertama kali terjadi di republik ini. Partai-partai besar lain tidak melakukannya. Kita harus mengamati apa yang terjadi dalam konvensi ini, kelemahan maupun kele-

bihannya, guna mempelajari lebih saksama hal-hal yang masih bisa ditingkatkan agar pemilihan presiden tahun depan bisa lebih baik.

Tandjung, bahkan Nurcholish Madjid, hanya sebagian kecil dari proses besar yang sedang berlangsung. Demokrasi Indonesia akan terus terseok bila kita lebih merasa nyaman dan senang bertepuk dada dalam mengorek hal-hal kecil, dan pada saat sama melupakan potret besar yang jauh lebih penting.

Jadi, bukannya tergesa-gesa melontarkan kecaman dan menuduhnya sebagai akal-akalan. Kaum intelektual harus memberi apresiasi memadai dan mendorong agar konvensi berjalan lancar, dengan atau tanpa keterlibatan ketua umumnya yang kontroversial itu.

Dalam politik berlaku adagium, *the road to heaven is not always paved with good intentions*. Para politisi Partai Golkar yang merancang konvensi ini mungkin ada yang berniat jelek dan ingin mengalihkan perhatian publik dari kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi proses konvensi ini, setelah berjalan, ternyata memiliki dinamika sendiri yang tak dapat dikontrol siapapun. Niat pembentukannya mungkin tak sesuai niat para malaikat, namun konvensi ini ternyata menjadi panggung demokrasi menarik.

5 Agustus 2003

Konvensi Partai Golkar Tidak Demokratis?

(“Rejoinder” untuk Eep Saifulloh Fatah)

SKEPTISISME TERHADAP KONVENSI PARTAI GOLKAR sah-sah saja, bahkan baik dan perlu. Namun, sikap ini harus dilandasi pemahaman akurat atas fakta-fakta. Jika tidak, ia akan mudah terjerumus dalam sinisme berlebihan.

Tanggapan Eep (“Konvensi Partai Golkar Tidak Demokratis”, *Kompas*, 13/8/2003) patut disambut baik. Namun, beberapa kekeliruan dalam tanggapannya tentang hal-hal yang sederhana mengharuskan saya menjelaskan lagi mekanisme konvensi, berikut hal-hal yang belum sempat saya singgung.

Kejutan

Penjelasan Eep tentang *voting block* sebenarnya persis dengan yang telah saya katakan. Bedanya, Eep menganggap metode ini “menyeragamkan aspirasi” pengurus partai, karena itu tidak demokratis.

Bagi saya, pada dirinya metode ini masih bersifat “netral”. Ia lazim digunakan dalam sistem pengumpulan suara pemilu di berbagai negara, disebut mekanisme *first-past-the-post*. Ha-

nya satu kandidat (atau lima kandidat, jika tahapnya masih prakonvensi) yang langsung mendapat skor tertentu yang telah ditetapkan, dan kandidat lain harus gigit jari.

Metode ini harus dilihat dalam konteks, yaitu hubungan skor yang ditetapkan dengan sumber-sumber suara lainnya dalam konvensi yang sama. Inilah yang dilewatkan Eep.

Dalam dua tahap konvensi tingkat nasional, misalnya, skor 18 yang dimiliki DPP kelihatan besar. Namun, skor yang dimiliki himpunan pengurus di provinsi adalah 90 karena masing-masing mendapat blok suara dengan skor 3, sementara skor suara bagi kabupaten dan kota adalah 416 (tanpa *voting block*).

Tanpa bantuan kalkulator pun kita mudah memahami, dalam konvensi tingkat nasional, hak suara terbanyak (mendekati 80 persen) dimiliki pengurus partai tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, berbeda dari Eep, saya tetap berpendapat pusat gravitasi konvensi ada pada pengurus-pengurus di daerah, bukan di pusat.

Jika kita berbicara pada tingkat konvensi yang lebih rendah lagi, yaitu pada proses penentuan lima kandidat di daerah tingkat (dati) II yang akan berlangsung pada 1 September hingga 8 Oktober, cakupan konvensi ini akan jauh melebar, sebab ia langsung melibatkan kader Partai Golkar di tingkat kecamatan.

Di Kabupaten Gunung Kidul, misalnya, ada 15 kecamatan. Pengurus DPD II mendapat *voting block* dengan skor 3, sementara tiap kecamatan mendapat suara 1, sama dengan jatah sayap-sayap partai yang ada di daerah ini. Jadi, total suara bagi pengurus kecamatan adalah 15, atau lima kali lebih besar ketimbang skor suara yang dimiliki oleh sekitar 50 orang pengurus di tingkat kabupaten.

Karena itu, buat saya, metode *voting block* justru mengecilkan peran struktur partai di tingkat atas. Ia membuka lebih banyak peluang bagi unsur-unsur ketakpastian dan kejutan

dalam proses penentuan kandidat calon presiden di Partai Golkar.

Boneka?

Apabila dijumlah secara keseluruhan, akan ada setidaknya 20.000 kader partai di tingkat kabupaten, kota, serta kecamatan yang berpartisipasi dalam tahap awal seleksi lima nama kandidat. Siapa yang bisa menebak dan mengatur isi kepala kader dan pengurus yang demikian banyak dan tersebar dari Sabang hingga Merauke?

Bagi Eep, mungkin hal itu dapat dilakukan dengan mudah oleh “para pengemudi” di belakang layar. Betulkah itu?

Atau, jika kita persempit arena konvensi ini hanya pada tahap puncak enam bulan mendatang, betulkah 416 pengurus partai di datu II akan mudah diatur pengurus DPP? Seorang *ventriloquist* bergoyang kaki di Slipi, Kantor Pusat Partai Golkar, dan mengatur tokoh-tokoh daerah sebanyak itu bagaikan boneka-boneka manis?

Di situlah letak perbedaan mendasar antara saya dan Eep. Bagi saya, tak gampang mengatur kader dan aktivis partai di daerah. Jangankan seorang Akbar Tandjung, Megawati sekalipun, dengan posisinya sebagai ketua umum, presiden, dan putri Bung Karno, cukup kerepotan memaksakan keseragaman suara tokoh partainya di beberapa provinsi dan kabupaten.

Angin politik sekarang sedang bertiup ke daerah. Kandidat yang ingin menang harus membujuk, mendekati, dan melakukan dialog dengan tokoh dan aktivis partai di begitu banyak tempat yang berbeda. Tampaknya hal itu semakin disadari para kandidat yang bersaing dalam konvensi ini. Setiap minggu mereka kini rajin berkeliling ke seluruh penjuru angin, kadang dengan mengunjungi tiga provinsi dalam sehari. Untuk apa mereka melakukan perjalanan yang melelahkan dan membutuhkan dana besar jika bukan untuk merebut dukungan dari daerah?

Yang harus kita dorong kini adalah agar proses yang baik seperti itu terus berlanjut, bukan sebaliknya. Kita berharap agar melaluinya akan lahir seorang calon pemimpin yang teruji dan sanggup berkomunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang begitu beragam, di dalam dan di luar komunitas Partai Golkar.

Celah

Meski saya keberatan dengan cara pengungkapannya yang cenderung bersifat *ad hominem*, semangat yang terkandung di balik tanggapan Eep bisa saya pahami. Saya yakin dia dan kita semua merindukan dunia kepartaian yang lebih dinamis dan berakar.

Agar Konvensi Partai Golkar dapat semakin mendekati kaidah-kaidah yang demokratis, saya ingin menyinggung sebuah kelemahan yang belum disinggung Eep.

Dalam desain konvensi ini ada sebuah persoalan yang kelihatannya sederhana, tetapi bisa berakibat fatal jika tidak segera diatasi. Pada buku panduan resmi yang dikeluarkan Panitia Konvensi Partai Golkar, halaman 23/f dan 26/c, tertera mekanisme pengambilan suara dilakukan “secara tertutup”.

Dengan cara ini, hanya Tuhan dan Mr X yang memasukkan daftar nama ke kotak suara yang mengerti apakah susunan nama yang dituliskannya sama dengan komposisi hasil konvensi di kabupaten atau provinsi yang diwakilinya.

Saya maklum, pencantuman aturan *voting* tertutup mungkin dilandasi niat baik, untuk mendorong agar anggota pengurus tidak takut pada atasannya guna melakukan pilihan berbeda. Akan tetapi, niat baik ini ternyata berakibat sebaliknya jika diaplikasikan dalam konteks konvensi secara keseluruhan, karena ia membuka celah bagi inkonsistensi suara dari unsur-unsur daerah ke pusat, melebarkan peluang bagi sikap saling curiga di antara sesama pengurus, serta dalam batas-batas ter-

tentu memberi insentif bagi merebaknya politik uang. *The road to hell is not always paved with bad intentions.*

Sekarang belum terlambat untuk mengatasi kelemahan ini, dan sebenarnya ada beberapa cara sederhana untuk melakukannya. Pembagian formulir kertas suara dari pusat, turun ke daerah secara bertingkat, dan langsung diisi pada saat konvensi adalah salah satunya. Namun, masih ada beberapa cara lain yang bisa cukup efektif.

Di situlah tantangan bagi tokoh-tokoh Partai Golkar. Mereka sudah memulai langkah awal yang baik. Kini mereka harus meneruskan hingga ke konsekuensinya yang paling ujung. Di depan mereka terbentang sebuah peluang untuk membuktikan, partai mereka yang dulu terpuruk dan dikecam dari kiri dan kanan kini menjadi sebuah partai pelopor yang memberi contoh positif bagi partai-partai lain.

Apabila itu mereka lakukan, kaum yang kini skeptis, bahkan sinis sekalipun, mungkin akan berubah pikiran dan menjadi lebih *fair* serta realistis dalam melihat konvensi ini.

19 Agustus 2003

200 Partai, Siapa Takut?

PEMILU 2004 semakin mendekat dan sepanjang 2003 ini bisa ditebak bahwa berbagai harapan dan kecemasan politik akan merebak silih berganti. Dalam soal kecemasan, salah satu yang paling menonjol belakangan ini adalah mengenai jumlah partai yang akan bertarung dalam pemilu.

Sekarang jumlah partai yang mendaftarkan diri secara resmi sudah melewati angka 200. Ini membuat sebagian kalangan khawatir bahwa proses pemilu akan riuh-rendah dengan begitu banyaknya isu, aspirasi, dan tokoh, yang pada akhirnya hanya akan membingungkan rakyat. Selain itu, ada juga yang cemas bahwa tingkat konflik akan semakin tinggi seiring dengan semakin banyaknya jumlah partai yang berebut kursi kekuasaan.

Beralasankah kecemasan demikian? Buat saya tidak.

Satu hal yang sampai sekarang masih kurang dipahami adalah, dengan disahkannya empat amendemen konstitusi tahun lalu, pemilu pada dasarnya dibagi menjadi dua: yang satu untuk memilih anggota parlemen (lokal dan nasional), dan yang satunya lagi untuk memilih presiden. Dalam pemilu untuk menentukan presiden, akan terjadi penyederhanaan secara radikal dari jumlah kandidat yang mewakili partai atau kelompok partai.

Pada pemilu tahap pertama, jika kita lihat komposisi dan kombinasi pemimpin yang ada sekarang, jumlah pasangan presiden-wakil presiden yang memiliki peluang realistis dalam menarik dukungan besar dari publik paling jauh hanya berjumlah tiga atau empat pasangan. Memang mungkin akan ada sepuluh, atau lebih, pasangan kandidat lainnya, tapi kehadiran mereka lebih merupakan bumbu penyedap yang memberi warna tersendiri bagi Pemilu 2004.

Pada pemilu tahap kedua, sebuah kemungkinan yang hampir pasti terjadi, jumlah pasangan kandidat yang bersaing akan ciut menjadi dua. Kalau harus menebak orangnya, saya kira yang akan muncul pada tahap kedua ini adalah Megawati (dan wakilnya) serta Amien Rais atau Hamzah Haz (dan wakilnya).

Saya mungkin bisa keliru dalam tebakan itu, tapi tidak dalam satu hal ini: dalam pemilihan presiden, kompetisi antarpartai tidak akan terjadi. Yang kita saksikan pada 2004 nanti adalah pertarungan tokoh-tokoh yang diwarnai secara pekat oleh kompetisi antara blok politik Islam dan kaum nasionalis-sekular. Dalam hal ini, politik, seperti kata James Madison, salah satu tokoh pendiri Republik Amerika Serikat, akan kembali pada hakikatnya yang paling dasar, yaitu proses kompetisi antara gagasan-gagasan fundamental yang hidup dalam suatu masyarakat.

Jadi, yang akan kita saksikan nanti pada akhirnya adalah persaingan dua kandidat presiden berikut pasangan mereka masing-masing, serta dua blok gagasan fundamental yang dalam literatur politik kita sering disebut sebagai aliran politik. Tajamya persaingan yang terjadi di sini dapat diminimalisasi dengan berbagai cara, misalnya dengan pemilihan pasangan yang mewakili blok politik yang berbeda. Tapi hal ini adalah soal lain yang akan saya tulis pada kesempatan tersendiri.

Dalam soal pemilu untuk memilih anggota parlemen, penyederhanaan yang sama, walau dalam bentuk berbeda, juga

akan terjadi. Jumlah partai yang terdaftar di Departemen Kehakiman akan berbeda dari jumlah partai yang lolos seleksi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dalam perkiraan saya, dengan aturan-aturan yang ada, dari 200 partai yang terdaftar, KPU akan meloloskan tidak lebih dari 50 partai sebagai peserta pemilu. Jadi, jumlah yang ada kira-kira tidak akan jauh berbeda dari jumlah partai peserta Pemilu 1999. Bahkan saya tidak akan terlalu kaget jika pada pemilu tahun depan angka yang lolos seleksi jauh lebih kecil dari itu.

Dari puluhan partai lama dan baru yang akan bersaing merebut kursi perwakilan, jumlah yang akan mendominasi panggung politik juga tidak akan berbeda dari apa yang sudah kita lihat sebelumnya. Sejauh ini saya tidak terlalu percaya bahwa tahun depan akan ada kejutan dari langit, ketika satu partai politik yang sekarang kecil, atau sebuah partai baru, tiba-tiba muncul bagaikan gelombang besar.

Lima partai yang sekarang mendominasi parlemen akan memperoleh distribusi suara yang tidak jauh berbeda. Variasi yang masuk akal, jika tak terjadi peristiwa dahsyat di negeri kita yang saat ini belum bisa diramalkan, adalah plus-minus lima persen. Buat saya, salah satu pertanyaan besar yang ada dalam soal ini adalah apakah Partai Golkar juga tercakup dalam kalkulasi konservatif demikian. Berapa jumlah suara yang bisa diperolehnya? Pada pemilu lalu, partai ini memperoleh 24 juta suara. Jika tahun depan suara ini berkurang drastis melampaui garis batas yang normal, katakanlah menjadi 14 juta suara, terbuka kesempatan bagi sebuah partai baru untuk muncul menjadi pemain baru di parlemen kita, dengan catatan bahwa limpahan suara ini tidak jatuh pada partai-partai yang kini sudah dominan.

Pertanyaan lainnya berhubungan dengan kemungkinan pembentukan koalisi di antara partai-partai besar yang ada. Jika koalisi ini terjadi, fragmentasi politik yang negatif terhadap proses pembuatan kebijakan publik akan bisa dihindari. Dalam

banyak hal, Machiavelli benar. Politik selalu bersandar pada kekuatan, dan pemerintahan yang efektif hanya mungkin jika bertumpu pada kekuatan (baca: kursi di parlemen) yang memadai untuk itu.

Dalam hal itulah, bukan terhadap munculnya 200 partai baru, saya sebenarnya agak cemas. Selama ini koalisi yang ada sangat bersifat *ad hoc* dan cair. Yang dibutuhkan dalam menyongsong Pemilu 2004 adalah koalisi yang semipermanen dan terencana jauh sebelum pemungutan suara berlangsung.

Saat ini memang sudah terdengar suara-suara untuk merumuskan koalisi semacam itu. Namun, sejauh ini saya baru mendengar angin surga, belum kerja politik yang konkret dari kaum politikus di partai-partai besar.

12 Januari 2003

Banteng dan Beringin: BerseTERU atau BerseKUTU?

MEMANG BANYAK PARTAI yang dapat menjadi peserta Pemilu 2004. Tapi yang akan menentukan warna kompetisi politik cuma dua partai, yaitu PDI-P dan Partai Golkar. Hanya salah satu dari keduanya yang mungkin menang. Partai-partai besar lainnya (PPP, PKB, dan PAN) hanya akan menjadi pelengkap dalam koalisi antarpartai, dan partai-partai baru yang bermunculan dalam setahun terakhir tampaknya belum mampu menembus dominasi pemain lama.

Itulah salah satu yang bisa disimpulkan jika kita mempelajari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga independen, seperti Danareksa Research Institute (DRI), International Republican Institute (IRI), serta Universitas Islam Negeri Jakarta yang bekerjasama dengan Ford Foundation. Keempat lembaga ini melakukan penelitian terhadap *voting behaviour* masyarakat Indonesia dengan basis metodologi yang kuat.

Dari ketiga penelitian tersebut, memang terlihat satu fakta menarik: proporsi *undecided voters*, yaitu mereka yang saat ini belum menentukan pilihan, ternyata cukup besar. Variasi angkanya berkisar 35 hingga 50 persen dari jumlah responden. Artinya, kalau diterjemahkan dalam konteks Pemilu 2004, ma-

sih ada sekitar 50 juta pemilih yang tetap terbuka untuk diperebutkan oleh siapapun.

Tapi sebenarnya fakta itu hanyalah sebuah kemungkinan berdasarkan hasil proyeksi statistik. Dalam kenyataannya, sebagian dari 50 juta pemilih itu tidak akan memilih samasekali. Di Amerika Serikat, misalnya, hanya setengah dari pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Di negeri-negeri demokrasi lainnya, variasi *voter turnout* berkisar 60 hingga 70 persen. Dari sini mungkin bisa diperkirakan bahwa, dari 50 juta pemilih di negeri kita yang masih ragu-ragu saat ini, sekitar 20 juta hingga 30 juta di antaranya yang pada akhirnya akan mencoblos partai dan tokoh favorit mereka.

Sekitar 30 juta suara (25 persen dari total pemilih) adalah jumlah yang sangat besar. Apakah mereka akan menjadi suatu *voting block* tersendiri? Saya kira tidak. Mereka akan terpecah mengikuti pola distribusi suara yang memang sudah ada. Dan sebagian pecahan suara inilah pada akhirnya yang akan menentukan pemenang Pemilu 2004, PDI-P atau Partai Golkar.

Pertaruhan yang sesungguhnya terletak pada upaya merebut pecahan *undecided voters* itu. Apakah partai berlambang banteng yang akan lebih jeli? Atau, malah partai beringin yang lebih tahu bagaimana harus merebut dukungan kelompok pemilih yang saat ini masih skeptis dan terus menunggu?

Jawabnya masih belum jelas. Namun, dari kecenderungan yang ada akhir-akhir ini, tampaknya Partai Golkar sedang mendapat angin untuk melaju lebih cepat. Dari hasil survei DRI, misalnya, terlihat bahwa antara Oktober 2002 dan Februari 2003 terjadi penurunan suara yang cukup signifikan bagi PDI-P, sementara dukungan bagi Partai Golkar bertambah, bahkan di daerah seperti Jawa Tengah yang pada pemilu lalu menjadi salah satu basis terkuat partai berlambang banteng itu.

Yang paling menarik, turunnya suara PDI-P ternyata terjadi paling drastis di kalangan pemilih yang berpenghasilan teren-

dah, sementara penambahan suara bagi Partai Golkar terutama karena didorong oleh peningkatan dukungan dari kalangan yang sama. Pada tingkat tertentu, hal ini mencerminkan bahwa di kalangan *wong cilik* rupanya sedang terjadi suatu *political realignment* yang tak kasatmata, sebuah eksodus politik dari kandang banteng ke partai beringin.

Partai yang pernah berkuasa di bawah pemerintahan Orde Baru ini mungkin dianggap lebih mampu menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi yang masih terus menjepit kalangan bawah. Mungkin pula sebagian orang kini merindukan kembalinya zaman pertumbuhan ekonomi tinggi yang pernah berlangsung di bawah kepemimpinan Soeharto.

Semakin dekat ke pemilu, apa yang sering disebut sebagai *bandwagon effect* akan semakin kuat pengaruhnya. Pergeseran yang satu akan memengaruhi pilihan yang lainnya, dan seterusnya sehingga partai yang dianggap atau dipersepsikan sebagai partai favorit akan memperoleh dukungan yang semakin besar. Jika efek seperti ini nantinya juga meluas dan memengaruhi sebagian pecahan *undecided voters* yang akan menjadi penentu pemenang Pemilu 2004, sebaiknya PDI-P mempersiapkan diri untuk menerima kabar buruk.

Masih tersisa waktu sepuluh bulan sebelum rakyat menjatuhkan pilihannya. Banyak hal masih dapat terjadi. Partai Golkar mungkin tergelincir, sementara peluang bagi PDI-P tetap terbuka untuk menyadari kekeliruannya dan kemudian berupaya merebut kembali kepercayaan rakyat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh kedua partai terbesar ini dalam beberapa bulan mendatang juga akan memengaruhi hasil akhir dalam perebutan posisi presiden. Memang, komposisi dukungan partai di parlemen tidak harus sama dengan distribusi suara bagi tokoh-tokoh yang memperebutkan posisi nomor satu di lembaga eksekutif. Namun perbedaan ini tidak akan terlalu jauh. Partai dan tokohnya tetap terkait erat.

Kecenderungan demikian terlihat cukup jelas dalam survei yang dilakukan oleh DRI dan IRI. Secara faktual, menurunnya suara PDI-P diikuti oleh melemahnya dukungan terhadap Megawati. Tetapi, berbeda dari distribusi dukungan pada partai-partai, posisi putri Bung Karno ini relatif tetap dominan. Jarak yang ada antara Megawati dan tokoh yang merebut posisi kedua cukup jauh berada di atas jarak yang ada antara PDI-P dan pesaing utamanya.

Hal itu berarti bahwa, bagi banyak kalangan, tokoh alternatif yang mampu menggantikan posisi Megawati belum muncul. Dalam soal persaingan antarpolisi, PDI-P sudah menemukan pesaing yang hampir seimbang. Namun, dalam perebutan posisi presiden, belum satu pun yang dapat menyaingi Presiden RI ke-5 itu. Saya kira perbedaan demikian terjadi karena faktor Akbar Tandjung. Dalam semua survei yang pernah saya amati, dukungan responden terhadap ketua umum partai berlambang beringin ini selalu jauh lebih kecil ketimbang dukungan terhadap para tokoh dari partai besar lainnya.

Bahkan bisa disimpulkan bahwa jarak dukungan yang jauh antara Akbar Tandjung dan partainya merupakan satu-satunya pengecualian dari pola keterkaitan antara partai dan tokohnya. Partai Golkar memperoleh peningkatan dukungan yang cukup besar, sementara suara bagi ketua umumnya selalu berada di batas air. Dalam satu segi hal ini memperlihatkan bahwa Partai Golkar sebenarnya adalah sebuah partai modern. Sebab, ia tak bergantung pada popularitas tokohnya (bandingkan jika Megawati tidak lagi memimpin PDI-P). Namun, dari segi lain, fakta sederhana itu juga menunjukkan bahwa Akbar Tandjung memang harus berbesar hati untuk mengakui bahwa, dalam proses pemilihan presiden, dirinya hanya menjadi beban partainya. Sebagai kandidat, ia tidak akan pernah bisa mendekati perolehan Megawati, terlepas dari putusan akhir pengadilan terhadap kasus hukum yang kini menyimpannya.

Semua itu tentu saja tidak berarti bahwa posisi Megawati sudah relatif aman. Jika Partai Golkar pada akhirnya tidak memunculkan Akbar Tandjung sebagai kandidat presiden, dan sebagai gantinya menyodorkan seorang kandidat yang populer, relatif muda, serta dianggap mampu mengatasi persoalan-persoalan yang mendesak, terutama berbagai masalah yang masih tersisa dari krisis ekonomi selama ini, persaingan dalam memperebutkan posisi presiden pasti akan berlangsung seru.

Dalam hal itulah terletak pentingnya konvensi nasional di Partai Golkar. Kalau perhelatan ini berhasil memilih seorang kandidat presiden yang ideal, Megawati harus bekerja ekstra-keras untuk tetap mempertahankan posisi dominan yang sejauh ini tetap dimilikinya. Hanya satu hal yang dapat mengubah secara drastis peluang terjadinya kompetisi yang seru dalam pemilihan presiden, yaitu jika pada akhirnya Megawati menggandeng kandidat yang muncul lewat konvensi Partai Golkar sebagai wakil presiden. Jadi, bukannya berseteru, Megawati dan PDI-P mengajak Partai Golkar dan kandidatnya bersekutu. Jika ini terjadi, pemilu untuk memilih tokoh nomor satu di lembaga eksekutif praktis sudah berakhir sebelum dimulai. Sebab, pemenangnya bisa ditebak dengan mudah.

Tetapi jalan menuju ke sana agak licin, masih mengandung sekian teka-teki. Dengan meningkatnya popularitas Partai Golkar akhir-akhir ini, bukankah para tokohnya akan tergoda untuk meraih *the ultimate prize*? Mengapa mereka harus puas dengan posisi ban serep jika kemungkinan untuk lebih dari itu sesungguhnya masih terbuka, misalnya dengan memimpin koalisi ABM (asal bukan Mega)? Di kubu Partai Golkar sendiri, jawaban terhadap pertanyaan itu agaknya masih mendua. Para tokoh partai beringin ini masih perlu waktu sebelum meletakkan semua kartu mereka di atas meja.

Demikian pula halnya dengan kubu Megawati. Yang terlihat sekarang adalah sikap yang sangat hati-hati dalam ber-

bicara mengenai paket presiden dan wakilnya. Mereka menunggu apa yang akan terjadi pada konvensi Partai Golkar, serta melihat perkembangan politik yang terjadi di panggung yang lebih besar. Skenario drama Pemilu 2004 tertulis pada pilihan-pilihan yang kini sedang dipertimbangkan oleh kedua kubu tersebut. Para tokoh dari partai lainnya hanya bisa melirik dari pinggir arena. Dan kita semua siap bertepuk tangan, atau menguap dengan jemu.

6 Juli 2003

PRD dan Megawati

SETELAH “PERISTIWA SABTU KELABU” yang lalu, topik yang hangat diberitakan adalah PRD, “partai” sejumlah aktivis yang kini dituding biang keladi kerusuhan. Siapa gerakan aktivis-aktivis muda militan itu? Bagaimana kita menempatkan posisi mereka dalam sejarah dunia pergerakan politik kita? Bagaimana hubungan mereka dengan Megawati? Pertanyaan semacam inilah, implisit atau eksplisit, yang banyak disodorkan berbagai media kepada masyarakat. Sayang, banyak ulasan dan laporan yang agak bias, dengan sumber sepihak dan cenderung menghakimi.

Kalau mau lebih arif memahami mereka, menurut saya, kita harus melihat mereka sebagai bagian dari pergerakan politik pemuda yang lebih luas dalam 10 tahun belakangan. PRD (Partai Rakyat Demokratik)—yang sebagian tokoh pendirinya di Yogyakarta sekitar enam tahun silam disebut “anak-anak Gang Rhode”—pada dasarnya adalah perkembangan dan radikalisasi dari pergerakan pemuda tersebut.

Ada baiknya kita mengingat bahwa setelah pembersihan kampus pada 1978—menyusul meluasnya gerakan mahasiswa pada tahun itu yang mengkritik Pemerintah Orde Baru—pergerakan mahasiswa praktis melemah, hancur hingga ke akar-

akarnya. Yang tersisa dan aktif setelah itu umumnya organisasi kepemudaan dukungan pemerintah, seperti KNPI dan Menwa.

Situasi ini berlangsung hingga sekitar delapan tahun. Pada sekitar 1986, mulai terlihat tanda-tanda perubahan. Beberapa mahasiswa di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung membentuk kelompok studi, dan memandang secara kritis organisasi pemuda yang ada. Dalam satu-dua tahun—dengan dukungan publikasi simpatik dari media utama, seperti *Kompas* dan *Tempo*—format aktivis kepemudaan baru ini menjadi populer dan relatif cukup meluas dalam kehidupan kampus.

Kelompok-kelompok diskusi yang baru ini menghidupkan kembali tradisi panjang pergerakan pemuda yang dirintis, antara lain, oleh Hatta dan Soekarno pada 1920-an. Lalu Rahman Tolleng, Soe Hok Gie, dan Sjahrir pada 1960-an. Dalam berbagai kelompok diskusi inilah pada akhir 1980-an, terjadi semacam perlawanan intelektual terhadap strategi depolitisasi Orde Baru, yang dianggap terlalu menyempitkan cakrawala berpikir kaum muda.

Format aktivitas baru ini sangat cair dan lentur. Pengelompokan di kalangan mereka tak mengikuti garis ideologi dan politik kepartaian. Pada suatu saat, jika berdiskusi bersama Nurcholish Madjid, mereka bisa sangat terpukau oleh semangat modernisasi Islam dan merindukan kembalinya Masyumi. Di saat lain, waktu membahas ide-ide Arief Budiman, mereka larut dan terbuai oleh cita-cita besar kaum sosialis. Singkatnya, satu-satunya pengikat mereka adalah romantisme pada perubahan dan kerinduan akan ide alternatif yang dapat mendorong pembaruan masyarakat.

Hanya sekitar empat tahun kemudian bentuk aktivisme semacam itu mulai dianggap tak lagi memadai sebagai wahana penyaluran aspirasi kritis pemuda. Dalam banyak hal, ketidakuasan ini didorong berbagai perkembangan politik penting, baik dalam konteks domestik maupun dunia. Pada Februari

1989, misalnya, terjadi “pemberontakan” mahasiswa di Beijing, yang menuntut dimulainya langkah demokratisasi secara radikal (peristiwa Tiananmen). Pada saat yang hampir sama, muncul gerakan massa dalam sistem komunisme, yang menuntut kebebasan politik yang lebih besar, yang akhirnya berujung pada keruntuhan sistem itu di pengujung 1991.

Didorong berbagai peristiwa penting ini, sebagian aktivis merasa bahwa tibalah saatnya memulai format kegiatan pemuda yang baru, yaitu aksi demonstrasi dan mimbar bebas. Di kalangan mereka sendiri, aksi semacam ini disebut “kegiatan baris-berbaris” dan “aksi parlemen jalanan”. Buat mereka, kegiatan dalam kelompok diskusi terlalu abstrak, jauh dari realitas konkret yang dihadapi masyarakat. Mereka menolak “intelektualisme”, dan ingin terjun langsung membela rakyat serta mendorong perubahan.

Maka, sejak awal 1990-an, kegiatan kelompok diskusi mulai surut, walau tak berhenti samasekali. Kelompok diskusi kehilangan elan, digantikan bentuk romantisme yang lebih radikal. Dan sejak saat itulah kita menyaksikan rangkaian demonstrasi dan mimbar bebas di dalam dan di luar kampus, yang dimotori aktivis muda itu.

Seperti dalam kelompok diskusi sebelumnya, aktivis baru ini tak bersifat homogen. Di satu pihak, terdapat kelompok yang hanya ingin melakukan aksi di dalam kampus dengan isu yang umum dan moderat. Di pihak lain, muncul kelompok aktivis yang meluaskan jaringan di luar kampus dan berupaya melakukan aliansi dengan kelompok yang mereka anggap strategis, seperti kaum buruh, petani kecil, dan kaum urban yang miskin dan tergesur.

Kelompok ini, selain lebih militan, disiplin dan sadar akan pentingnya organisasi, juga lebih mengalami pengkristalan ideologi. Dalam hal yang terakhir, para aktivis di kelompok kedua ini dapat disebut sebagai aktivis sosialis-progresif yang

bekerja pada dataran praktis. Dunia perdebatan ide dan pertarungan imajinasi hampir samasekali mereka tinggalkan, bahkan mereka olok-olok. Dengan sadar mereka memandang diri sebagai penerus tradisi “kiri-radikal” dalam pergerakan politik kebangsaan kita, yang cikal-bakalnya telah dirintis, sejak pertengahan 1920-an.

Ke dalam kelompok inilah para aktivis muda pendiri PRD dapat digolongkan. Dalam bentuknya yang embrional di Yogyakarta dulu, jumlah mereka sebenarnya sangat kecil. Tapi, karena kesungguhan, penguasaan teknik demonstrasi, dan kejelasan ideologi yang mereka miliki, posisi mereka menjadi cukup penting di dunia aktivisme di Yogyakarta.

Sejak awal, persoalan utama kelompok ini—seperti juga persoalan gerakan pemuda secara umum—adalah kecilnya basis dukungan publik. Para aktivis itu harus menghidupkan kembali kepekaan politik publik, yang lebih dari 20 tahun terakhir diredam. Walaupun dalam dua tahun terakhir terlihat beberapa “kemajuan” dalam mendekatkan diri mereka ke dalam jaringan buruh dan kaum tergesur di kota, besarnya kelompok mereka tak meningkat secara berarti. Mereka tetap saja menjadi pelaku politik pinggiran.

Munculnya Megawati sebagai tokoh yang dapat menghidupkan kembali kepekaan politik publik itu, buat mereka menjanjikan jalan ke luar dari sebuah *impasse*. Di pihak lain, Megawati pun—dengan kian derasnya tekanan terhadap dirinya—membutuhkan dukungan dari unsur pergerakan pemuda yang cukup militan dan berani mengambil risiko, untuk mendorong perubahan. Maka yang terjadi: perjumpaan kepentingan dari unsur dalam tradisi pergerakan pemuda dengan elemen sah dari sistem politik Orde Baru (PDI) yang terdesak, dan karena itu mencari kaki ke “bawah”.

Dekrit Gus Dur: Tentang Kepemimpinan

Tipe Kepemimpinan Baru

AKHIR-AKHIR INI, dalam mendiskusikan kemungkinan peralihan generasi kepemimpinan, rasanya kita terlalu sering berbicara tentang tokoh-tokoh yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Dalam kadar tertentu, itu sebenarnya wajar saja. Namun, pembicaraan seperti itu tidak boleh membuat kita lupa bahwa yang terpenting sebetulnya bukan lagi pada soal siapa melainkan pada apa dan bagaimana bentuk kepemimpinan baru itu. Dengan kata lain, yang harus kita perhatikan bersama bukan lagi sekadar tokoh atau pemimpin (*leader*) tapi kepemimpinan (*leadership*).

Karena itu, pertanyaan-pertanyaan mendesak untuk kita jawab adalah, secara ideal, bentuk kepemimpinan seperti apa yang sebaiknya diterapkan oleh generasi baru nanti. Dengan berbagai tantangan di masa depan, faktor-faktor apa yang akan menentukan keberhasilan seorang pemimpin? Cukupkah jika ia mewarisi begitu saja bentuk kepemimpinan yang selama ini dominan? Dalam era Orde Baru selama ini, kalau kita menggunakan tipologi yang pernah dikemukakan oleh Prof. Herbert Feith, tipe kepemimpinan yang dominan adalah tipe administrator. Dalam tipe itu, kepemimpinan didefinisikan lebih sebagai kemampuan untuk menciptakan negara modern dengan segala perangkat teknis-administratifnya.

Sang pemimpin, dalam tipe itu, bukanlah seseorang yang menguasai retorika dan teknik-teknik persuasi. Walaupun memiliki kekuasaan politik yang amat besar, ia sesungguhnya adalah seorang non-politisi *par excellence*, teknokrat, birokrat, jenderal. Keahliannya bukanlah dalam membujuk dan merayu masyarakat, tetapi dalam memecahkan masalah teknis—dengan duduk di belakang meja—serta merealisasi wewenang birokratisnya. Kalau toh ia ingin memobilisasi dukungan masyarakat luas, biasanya ia melakukannya tidak dengan bujukan dan rayuan tetapi lebih bersandar pada kekuasaan politis-birokratis yang dimilikinya.

Namun, buat generasi kepemimpinan baru kita, tipe kepemimpinan seperti itu jelas sudah harus direvisi. Memang, selama ini kepemimpinan tipe administratif yang non-politis itu telah membantu tercapainya pembangunan ekonomi yang pesat dan pertumbuhan institusi pemerintahan yang cukup kuat. Prof. Widjojo Nitisastro, misalnya, telah melakukan dasar-dasar pembangunan ekonomi yang cukup kukuh, melalui praktik yang nyaris sempurna dari kepemimpinan semacam itu.

Tetapi, di masa depan, persoalan kita sudah sangat berbeda, dan untuk menghadapinya dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda. Cepat atau lambat, masyarakat kita akan semakin kritis dan mulai mengerti hak-haknya. Mereka tidak ingin hanya menjadi obyek yang terus-menerus diatur oleh pemimpin mereka. Masyarakat ingin dibujuk, dirayu, dan dikeloni. Kalau tidak, potensi destruktif akan mereka kembangkan sebagaimana yang barangkali menjadi salah satu pemicu berbagai kerusuhan belakangan ini. Akibat yang paling gawat, jika hal semacam itu terus berlangsung, adalah perpecahan nasional, rontoknya pilar-pilar kesatuan republik kita.

Selain gejala seperti itu, gejala lain yang patut kita perhatikan adalah kebijakan ekonomi kita sekarang mengalami *fatigue*, kelesuan. Pada akhir 1960-an dan pertengahan 1980-an, dalam menghadapi krisis ekonomi, kaum teknokrat mampu

membuat inovasi kebijakan yang berani dan berdampak jauh. Sekarang, dalam menghadapi persoalan ekonomi yang baru, seperti tuntutan pemerataan, kita malah kembali ke cara lama, yaitu lebih mengandalkan intervensi birokrasi dan metode etatisme.

Untuk menghadapi kecenderungan dan persoalan baru yang demikian, jelas tipe kepemimpinan yang dibutuhkan adalah tipe kepemimpinan yang lebih “sadar politik”. Sebagaimana umumnya pemimpin kenegaraan di negeri-negeri yang telah demokratis, ia adalah seseorang yang mengerti bahwa untuk menggerakkan masyarakat dalam mencapai tujuan tertentu (stabilitas politik, persatuan bangsa, pertumbuhan ekonomi), yang pertama harus dilakukan adalah merebut hati dan membangkitkan simpati masyarakat terhadap tujuan tersebut. Buat pemimpin seperti itu, praktik pemerintahan adalah seni menciptakan berbagai kemungkinan dengan mengandalkan visi dan argumen yang masuk akal.

Kalau toh ia seorang teknokrat, misalnya, ia adalah seorang teknokrat-plus atau dalam terminologi yang akhir-akhir ini mulai populer, seorang *technopol* (teknokrat yang politisi). Jika ia seorang jenderal, ia adalah seseorang yang sadar bahwa logika kepemimpinan dalam masyarakat berbeda 180 derajat dengan logika dalam memimpin pertempuran. Yang pertama membutuhkan dialog dan persuasi, yang kedua sepenuhnya dapat bersandar pada komando dan hierarki. Jika ia seorang birokrat, ia mengerti perbedaan besar antara “pemerintah” dan pelayan masyarakat.

Mungkinkah tipe seperti itu akan menjadi ciri khas generasi pemimpin-pemimpin baru kita nanti? *Wallahualam*. Yang jelas, dari segi tuntutan sejarah, rasanya kita tidak punya pilihan lain.

Gus Dur di Titik Nadir

JULUKAN PALING TEPAT bagi Gus Dur sekarang adalah “*the rapidly shrinking president*”, presiden yang mengerdil dengan cepat. Betapa tidak. Saat terpilih delapan bulan silam, ia dianggap sebagai produk sebuah kompromi nasional, dan karena itu diharapkan dapat menciptakan ruang-ruang politik yang lebih luas untuk membawa negeri kita ke luar dari kemelut. Dengan Megawati sebagai wakil dan dengan basis legitimasi yang kuat, ia dianggap memiliki kesempatan besar untuk mulai menancapkan dengan kukuh pilar-pilar demokrasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjamin stabilitas sosial.

Di luar negeri, Gus Dur dipuja dan seolah dianggap mukjizat demokrasi. Mereka terkagum-kagum, dan dengan antusias berharap Gus Dur akan menjadi contoh pertama seorang pemimpin Islam yang demokratis dan berhasil memerintah negerinya. Harian terpenting di Amerika Serikat *The New York Times*, bahkan menempatkan posisi Gus Dur di tempat yang lebih penting ketimbang Sri Paus dan Dalai Lama.

Tetapi, apa yang kita lihat sekarang? Bahkan dari kalangan yang mendukungnya pun, seperti Partai Kebangkitan Bangsa dan para aktivis serta intelektual yang berkumpul di Kuta, Bali, beberapa waktu lalu, argumen yang mereka berikan untuk te-

tap mempertahankan Gus Dur sudah sangat defensif. Mereka tidak lagi berkata bahwa Gus Dur harus dipertahankan karena ia pemimpin yang terbaik, tetapi karena kemungkinan buruk, yaitu konflik-konflik keras di kalangan massa yang mungkin akan mengiringi penggantian Gus Dur. Argumen mereka dilandasi oleh ancaman dan kecemasan. Bukan lagi oleh harapan dan optimisme.

Inilah bukti terbaik betapa Gus Dur, dalam waktu relatif singkat, telah terpuruk ke posisi yang sangat rendah—sesuatu yang mungkin akan dicatat sebagai hal tragis dalam sejarah politik kita kelak. Mengapa semua itu terjadi? Mengapa harapan terhadapnya begitu cepat berganti menjadi kekecewaan dan kecemasan?

Menurut saya, penyebabnya tidak terletak pada faktor-faktor eksternal, seperti persekongkolan politik, hantu konspirasi, dan semacamnya. Penyebabnya terletak pada Gus Dur sendiri. Setelah delapan bulan berkuasa, kita sudah bisa melihat Gus Dur yang sesungguhnya. Kita sudah bisa membaca pola kepemimpinannya, kemampuan memerintah, dan moralitas politik yang melekat padanya.

Potret yang tampak sejauh ini: dari segi kepemimpinan, nilai yang bisa diberikan kepadanya adalah C minus. Ia tidak berhasil melakukan metamorfosis kepemimpinan, dari pemimpin tradisional menjadi pemimpin modern. Gus Dur samasekali tidak memiliki perencanaan yang terperinci tentang apa yang harus ia lakukan. Dan, kalau toh Gus Dur memang memiliki sebuah agenda, kita tahu, ia mampu mengubah, mengaburkan, dan menelakung agenda itu, setiap hari. Dalam takaran tertentu, “fleksibilitas” seperti ini memang perlu bagi seorang politikus untuk mengarungi medan politik yang kompleks. Tetapi, pada Gus Dur, takarannya sudah sangat overdosis. Akibatnya, tidak seorang pun saat ini yang mengerti apa yang akan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah.

Dari segi moralitas publik, nilai yang diperoleh Gus Dur malah lebih jelek: D minus. Gus Dur terlalu sering memberi contoh yang sangat jelek bagi publik. Dalam banyak kesempatan, saat harus menjelaskan masalah Ambon, Aceh, atau masalah-masalah besar lain yang kita hadapi, ia selalu menuduh orang itu atau orang ini yang menjadi penyebab segala masalah. Ia bukan cuma pengikut “kultur konspirasi”, tetapi dialah salah satu sumber dan penciptanya. Ia terus-menerus menuduh dan mencari kambing hitam. Pengaruh dari contoh yang diberikan Gus Dur ini sebenarnya bukan lagi jelek, tetapi sudah berbahaya. Sudah begitu, Gus Dur juga tidak mampu menjadi pelita kejujuran. Sebaliknya, kata-katanya samasekali tidak bisa dipegang (orang yang agak kasar akan berkata, dia adalah seorang pembohong).

Betul bahwa kadang-kadang, karena keterbatasan manusia dan hakikat kekuasaan itu sendiri, seorang politikus terpaksa harus menelak kata-kata dan menyembunyikan kebenaran. Tetapi seorang politikus negarawan akan mengerti, itu semua adalah bagian dari sebuah taktik untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan mulia. Persoalannya, pada Gus Dur, penelak kata-kata itu bukan bagian dari sebuah tujuan yang lebih besar, melainkan hanya sebagai akibat dari kelemahan pribadinya.

Dari segi kepiawaian politik, nilai Gus Dur juga tidak lebih baik. Dalil pertama seorang politikus kawakan adalah “carilah kawan sebanyak mungkin, dan jangan menciptakan musuh kalau memang tidak perlu”. Dalil ini sedari awal sudah dilanggar oleh Gus Dur. Ia menciptakan musuh terus-menerus, tanpa sebab-sebab yang jelas, dan tanpa kalkulasi kekuatan riil. Akibatnya, kalau kelemahan moral Gus Dur membuat kita bertanya akan kredibilitas dia, kelemahannya dalam kalkulasi politik menyebabkan dia kehilangan basis-basis dukungan yang semula dinikmatinya. Pertanyaan kita kemudian: lalu apa? Karena su-

dah berada di titik terendah, apakah Gus Dur sudah perlu diturunkan sekarang?

Kalau memegang kekuasaan sepenuhnya untuk menentukan nasib Gus Dur, saya akan memberinya kesempatan paling lama enam bulan lagi. Saya akan memberi dia peringatan sekeras-kerasnya, tetapi saya tetap memberi dia peluang untuk berubah. Kalau memang berubah, silakan jalan terus. Kalau tidak, ya sudah, palu harus diketuk. Negara kita terlalu besar, dan urusan kita terlalu banyak hanya untuk direpotkan terus-menerus oleh seorang Gus Dur.

3 Agustus 2000

Dari Langit

KAMU KOK MEMPROTES dan mengeluhnya ke aku, Gus? Soal kompromi politik dan nasib kursi kekuasaanmu, itu urusanmu sendiri. Perkaranya kau sendiri yang bikin. Aku jangan diikut-ikutkan, *dong*. Sebenarnya aku masih ingin menolongmu. Tapi coba kautempatkan dirimu dalam posisiku. *Kan*, aku juga harus mempertanggungjawabkan langkah-langkahku di hadapan anak buahku. Malaikat-malaikat itu, *lo*. Coba, apa yang harus kukatakan kepada mereka untuk membelamu? Sulit betul. Malaikatku di seksi intelijen bilang, dua pekan lalu kau memecat Djohan Effendi, sahabatmu di Forum Demokrasi yang kau minta untuk memimpin Setneg sejak setahun silam. Terus terang, banyak malaikatku sudah lama bersimpati kepada Djohan. Dia orang yang santun dan luarbiasa jujur. Orang seperti dia tidak mungkin pernah mencuri dan mempertaruhkan kemaslahatan publik untuk kepentingan pribadi. Dengan memecat dia, kau membuat malaikat-malaikatku jadi bertanya. Kenapa kau sering memecat orang yang jujur dan tak terbiasa berbohong? Apa yang ingin kau sembunyikan?

Selain masalah sepele seperti itu, masih banyak lagi soal yang jauh lebih penting. Salah satunya datang dari laporan malaikatku di seksi politik dunia non-akhirat—saya tidak perlu

menyebut namanya—bahwa kau sekarang sudah sangat sering menduakan aku. Memang, aku mengerti, kau dan teman-temanmu di NU sering dekat dan mengaku-aku dekat dengan segala jenis arwah dan roh gaib. Kalau pada tingkat kultural, *sih*, aku maafkan semua itu. Katakanlah, itu warisan kultur pedesaan yang memperkaya kehidupan manusia, ciptaan-ciptaanku yang terkadang merepotkan itu.

Tapi, Gus, lain soalnya kalau semua itu menyangkut masalah politik dan proses kenegaraan. Kau berurusan dengan orang yang hidup, bukan yang mati. Dengan mereka yang terakhir ini, soalnya memang jauh lebih mudah. Mereka tidak punya hak suara. Dan kau tak perlu meyakinkan mereka bahwa kau pemimpin yang berhasil. Kamu bisa seenaknya saja, tidak perlu bersusah-payah merebut hati mereka. Dengan mereka yang hidup, itulah persoalanmu. Suaraku adalah suara rakyat yang hidup, yang merasa, yang bisa jengkel dan menimbang-nimbang. Tapi, sejauh ini, apa yang kau lakukan terhadap mereka?

Nol besar. Setahun lebih sudah kau mendapat kesempatan emas untuk berbuat baik terhadap mereka. Wakil-wakil mereka yang sah sudah memberimu peringatan berkali-kali. Tapi kau lebih sering menendang, menyikut, berkelit, dan mengancam.

Dengan semua itu, posisiku agak terjepit sekarang. Kalau aku mengulurkan tangan dan menolongmu, seperti yang terkadang aku lakukan, reaksi para malaikatku pasti akan keras dan memojokkan. Anggota DPR *sih* masih mendingan. Coba kau diprotes para malaikat. Bisa minta ampun tujuh turunan.

Jadi, maaf, Gus. Kali ini aku tak mungkin membantu. Kalau urusan lain di waktu berbeda, pasti aku akan berusaha menolong. Tapi, soal kompromi politik dan kursimu yang kini sedang oleng, aku angkat tangan. Kau selesaikanlah sendiri.

Cuma, aku ada sedikit pertanyaan—hanya ini yang bisa aku lakukan untuk sementara. Kau ini mau dikenang sebagai

pemimpin seperti apa? Kalau mandat kekuasaanmu dicabut bulan depan, kau ingin meninggalkan kesan apa? Dalam beberapa generasi ke depan, kau ingin namamu dikenang dengan penuh syukur dan takzim, atau dicerca dan terus-menerus menjadi bahan olok-olok? Indonesia, seperti negeri lainnya, akan terus menilai karya para pemimpinnya. Kau ingin hanya menjadi pecundang sejarah, tokoh paradoksal yang dianggap menyusahkan rakyat banyak?

Jawabannya ada di tanganmu. Kau belajarlah pada Al Gore, wapresnya Bill Clinton, yang hampir mengalahkan George W. Bush dalam pemilu di AS pada akhir tahun lalu. Namanya menjadi lebih harum justru setelah dia menerima kekalahan dengan besar hati. Dia menerima kenyataan dan mengorbankan kepentingan dirinya demi kepentingan yang jauh lebih besar. Dia tidak pernah mengancam dan menendang dengan panik. Pidato penerimaan kekalahan yang dibacakan Gore akan menjadi salah satu pidato terbaik dan paling bersejarah di Negeri Abang Sam pada abad ke-21. Dengan itu, tanpa menjadi presiden pun, nama Gore akan tetap harum dalam sejarah.

Kalau tidak mau belajar dari negeri yang jauh, kau bisa belajar dari negerimu sendiri. Tepatnya dari tokoh yang kau gantikan, B.J. Habibie. Dia memang memiliki banyak kelemahan sebagai politisi. Dia terlalu naif untuk peran yang membutuhkan ketangkasan Machiavellian ini. Tapi, lihatlah, namanya kini semakin harum, bukan sebaliknya. Pada titik tertentu, dia menerima realitas dan melakukan tindakan yang sangat arif. Dia mundur dengan sukarela, melepaskan kursinya, karena tahu dukungan wakil rakyat untuknya tidak lagi memadai. Tindakan seperti ini akan terus dikenang.

Itulah pelajaran yang baik, Gus. Kalau kau membutuhkan diri terhadap pelajaran ini, sungguh sayang. Kau bisa berlaku nekat-nekatan dan memukul atau merusak banyak hal di sisa waktu kekuasaanmu, seperti banteng terluka yang merangsek

ke mana-mana. Kalau itu yang menjadi pilihanmu, aku tidak bisa bilang apa-apa lagi. Cuma, pikirkanlah hal itu baik-baik. Jadi, sekali lagi, semuanya aku serahkan kembali ke tanganmu. Aku ada banyak urusan saat ini. Kapan-kapan aku mengirim surat lagi kepadamu.

15 Juli 2001

Dekrit Gus Dur

PARA AKTOR di panggung sejarah akan dinilai bukan terutama oleh apa yang dikatakan, melainkan oleh apa yang dilakukan, terutama ketika berhadapan dengan krisis yang mengancam dirinya sendiri.

Dekrit Gus Dur, apapun namanya, adalah senjata pamungkas politik yang hanya mungkin dilaksanakan dengan dukungan TNI dan Polri. Kita patut bersyukur, kedua alat negara ini ternyata tetap utuh dan menolak penerapan dekrit itu. Tapi, seandainya kedua institusi pemaksa itu pecah dan terbagi dalam faksi-faksi pro dan kontra—suatu hal yang memang “dicari” oleh Abdurrahman Wahid—pertaruhan keras di kalangan massa akan menjadi sebuah kemungkinan yang sangat riil. Jika ini terjadi, darah akan tumpah dan proses pelembagaan demokrasi kita akan mundur beberapa langkah.

Saya sebenarnya tidak terlalu heran bahwa Gus Dur mau mempertaruhkan apa yang tidak seharusnya menjadi bahan pertaruhan dalam arena politik yang demokratis. Selama beberapa bulan, ia sering mengancam, jika Sidang Istimewa MPR diselenggarakan untuk mencabut mandatnya, gerakan separatis di sekian daerah akan marak dan Republik bisa pecah. Dengan cara ini, ia memberikan insentif bagi para politisi di daerah

untuk menjadikan agenda separatisme sebagai bagian dari proses politik yang normal.

Artinya, keutuhan negara bagi tokoh seperti Gus Dur boleh saja dimasukkan dalam proses negosiasi kekuasaan partai atau kepentingan orang per orang. Dengan cara berpikir seperti ini, Gus Dur sudah tidak lagi mampu menarik garis demarkasi antara kepentingan politik, di satu pihak, dan negara sebagai institusi besar tempat berbagai kepentingan ini berinteraksi secara terpola di pihak lain.

Jika batas semacam itu saja bisa dilanggarnya tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia pasti mampu dan siap melakukan apapun, termasuk mendeklarasikan dekrit yang secara potensial dapat mengancam nyawa banyak orang dan menyulitkan proses pelebagaan demokrasi. Selain itu, dekrit Gus Dur memperlihatkan sebuah persoalan besar, yang terjadi lebih pada tingkat konseptual. Yang terancam oleh SI MPR adalah posisi Gus Dur sebagai presiden, bukan negara. Dalam hal tertentu, sidang ini malah bisa dipandang sebagai proses politik yang memperkuat institusi negara, karena para aktor yang terlibat di dalamnya diharuskan berkompetisi untuk mencari argumen dalam menutup beberapa celah konstitusional yang memang ada dalam pengaturan hubungan lembaga eksekutif dan legislatif. MPR, sebagai lembaga politik tertinggi, juga sedang belajar menjadi lembaga demokrasi, dengan proses yang tentu saja tidak selalu mendatangkan kekaguman dan rasa hormat. Dengan memaklumkan dekrit, Gus Dur ingin memotong proses ini dan mempersonifikasikan dirinya sebagai negara itu sendiri. "Aku adalah negara, negara adalah aku": jika yang satu terancam, yang lainnya demikian pula.

Sejarah sudah memberikan banyak pelajaran bahwa sistem kediktatoran selalu dimulai dengan cara berpikir semacam itu, dengan alasan-alasan yang tentu saja berbeda dari satu negeri ke negeri lainnya serta dari satu tokoh ke tokoh lainnya.

Saya tidak berkata bahwa jika dekrit Gus Dur terlaksana, yang pasti terjadi hari ini adalah sebuah sistem kediktatoran yang fanatik dengan dirinya sendiri. Sistem seperti ini hanya bisa ada jika faktor-faktor lain dalam masyarakat ikut mendukung.

Tapi, yang jelas, konstruksi konseptual di balik dekrit itu bisa menjadi pemicu bagi bangkitnya faktor-faktor demikian dalam waktu yang relatif singkat. Hampir semua diktator yang pernah ada dalam sejarah modern selalu datang secara tak terduga dalam proses perputaran sejarah yang relatif cepat, yang biasanya dimulai dengan proses pembubaran atau pengebirian parlemen. Karena semua itulah, kalau diminta untuk menggambarkan turunnya Gus Dur dari kursi kepresidenan, hanya ada dua kata yang muncul di benak saya: *disgraceful exit*.

Di masa lalu, dia memiliki peran yang cukup penting dalam memperluas dasar-dasar masyarakat terbuka yang demokratis. Dia melawan Orde Baru—saya sebenarnya tidak begitu yakin bahwa kata “melawan” dalam hal ini cukup tepat penggunaannya—dengan gaya dan kelebihan sendiri yang bagi banyak kalangan sangat memukau.

Sayangnya, pada hari terakhir kekuasaan politiknya, Gus Dur memilih jalan yang berbeda, sebuah jalan antidemokratik yang akan terus dikenang sebagai salah satu contoh buruk dalam perjalanan sejarah republik kita. Ia mengawali kariernya di dunia politik dengan cemerlang. Ia mengakhirinya dengan kepedihan, buat kita semua. Semoga tokoh-tokoh politik kita di masa mendatang tidak lagi pernah mencoba jalan itu.

Megawati dan Soal Persiapan Jadi Presiden

SAMPAI SAAT INI perkembangan politik masih belum beranjak dari skenario pasca-memorandum kedua. Tidak ada peristiwa besar yang membalikkan ramalan-ramalan yang ada secara radikal. Kemungkinan Megawati Soekarnoputri untuk menjadi Presiden ke-5 RI sudah mencapai tingkat yang hampir absolut.

Memang, peran faktor X yang dapat menggagalkan transfer kekuasaan bulan depan masih terus membayang di mata. Di hari-hari mendatang sebagian anggota DPR/MPR masih dapat tergoda oleh uang atau janji jabatan menteri dan posisi basah lainnya. Beberapa pentolan Polri dan TNI masih dapat dibius dengan pangkat dan aroma kekuasaan, dan dengan itu mendukung penerapan dekrit presiden untuk membubarkan parlemen.

Akan tetapi, jika semua itu tidak terjadi, jalan Megawati akan mulus. Ia akan menjadi pemimpin baru, yang tentunya juga disertai dengan merebaknya harapan-harapan baru dari berbagai kalangan masyarakat. Pertaruhan kekuasaan Megawati tinggi betul, yaitu sistem demokrasi itu sendiri serta kemaslahatan 210 juta rakyat dari Sabang sampai Merauke.

Dalam banyak aspek kemasyarakatan, kondisi yang ada setelah jatuhnya Soeharto dapat digambarkan oleh ungkapan Prancis di era pasca-Revolusi: *Plus ça change, plus la même chose*, semakin situasinya berubah, semakin semuanya sama saja. Malah, bagi sebagian orang ungkapan ini sebenarnya keliru sebab kondisi yang ada semakin memburuk.

Demokrasi tidak akan lama bertahan dalam kondisi demikian. Karena itu dalam konteks kesejarahan yang ada sekarang, Megawati tidak boleh gagal sebagai pemimpin. Tentu kita tidak perlu bermimpi bahwa ia akan menjadi semacam Ratu Adil, pelaku superheroik yang hanya ada di dunia mitologi. Tetapi, mestinya tidak terlalu keliru bila kita berharap bahwa dengan segala keterbatasan yang ada padanya, Megawati akan muncul sebagai pemimpin efektif yang berhasil mengatasi tantangan zamannya.

Untuk itu, dia dan pembantu-pembantu terdekatnya harus memikirkan secara saksama banyak hal yang perlu demi suksesnya pemerintahan baru kelak. Buat saya, yang pertamanya harus dilakukan Megawati adalah menentukan satu atau dua tujuan besar yang konkret. Tujuan yang ingin dan mungkin dicapai olehnya. Hal inilah yang harus dia jadikan sebagai titik di horizon, yang memberi arah bagi perahu pemerintahannya.

Dan dengan itu pula kekuasaan Megawati dapat memiliki fokus yang jelas. Tanpa fokus semacam ini, sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki seorang pelaku sejarah, dampak kehadirannya tak akan banyak berarti. Semua pemimpin besar yang hidup di alam demokrasi dikenang bukan karena mereka membuat banyak hal sekaligus. Franklin D. Roosevelt terus dikenang karena dia melahirkan negara kesejahteraan ala Amerika, dengan tekanan utama pada kebijakan asuransi sosial. Nama Winston Churchill masih ditulis dengan tinta emas karena ia berperan penting dalam membangkitkan semangat perlawanan yang heroik terhadap Hitler pada saat-saat yang sangat kritis dalam Perang Dunia II.

Saya tidak berkata bahwa Megawati harus menjadi Roosevelt atau Churchill. Tetapi, pelajaran dari kedua tokoh ini cukup jelas: untuk mencapai sukses, seorang pemimpin harus memiliki fokus yang jelas mengenai apa yang ingin dicapainya. Kalau fokus pemerintahan Megawati meluas, abstrak, dengan tujuan yang terlalu beragam dan saling bertentangan, saya khawatir semuanya akan berujung pada kegagalan. Kalau ini terjadi, bukan hanya Megawati dan PDI Perjuangan yang akan terpuruk.

Tujuan apa, dalam kondisi saat ini, yang secara ideal tepat serta secara praktis mungkin dicapai oleh pemerintahan Megawati? Pada hemat saya, di antara pilihan-pilihan yang ada, tujuan demikian harus berhubungan dengan dua hal, yaitu penciptaan ketertiban umum serta pengambilan langkah-langkah tegas untuk memulihkan kondisi perekonomian, khususnya dunia perbankan. Kedua hal ini saling berhubungan. Yang satu tak mungkin tercapai jika yang satunya lagi diabaikan.

Sekarang kita belum mengerti apakah kedua hal itu akan dijadikan sebagai fokus utama pemerintahan baru kelak. Tetapi, Megawati harus segera memutuskan, dalam waktu dan kondisi yang terbatas, tujuan yang akan menjadi *mission sacre* dari seluruh bangunan kekuasaannya.

Selain soal tujuan, Megawati dan pembantu-pembantu terdekatnya juga harus memikirkan mengenai jalan atau metode kepemimpinan. Bagaimana tujuan-tujuan yang dipilihnya dapat dicapai? Dengan apa mencapainya? Sebagai pemimpin yang diatur oleh kaidah-kaidah yang ada dalam sistem demokrasi, apa yang harus dilakukannya dalam berhadapan dengan realitas politik, sebuah dunia yang memiliki logikanya sendiri?

Roosevelt, misalnya, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, bertindak sangat pragmatis dan betul-betul men-

jadi politisi, dalam pengertian yang sebenarnya. Untuk merealisasikan kebijakan-kebijakannya, dia sering membujuk, merangkul, dan memberi angin pada lawan-lawan politiknya. Namun tidak jarang pula dia menyikut, menohok dan menengcilkan mereka, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh sistem politik di AS. Dia melakukan begitu banyak eksperimen kebijakan pada tingkatan yang lebih mikro untuk mencapai tujuan besarnya, dengan sikap yang terus-menerus optimistis.

Apakah Megawati akan mengikuti model kepemimpinan yang sama? Sejauh ini, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ini memang lebih sering diam dan berbicara melalui pembantu-pembantu terdekatnya. Namun, beberapa indikasi menunjukkan bahwa saat ini dia sudah lebih mampu bertindak sebagai politisi yang menawarkan kompromi di satu pihak, dan bersikap tegas menolak segala perundingan politik di lain pihak. Semakin tersudutnya posisi Presiden Abdurrahman Wahid dalam berhadapan dengan Megawati adalah salah satu bukti dari hal ini.

Selain itu, yang paling menggembirakan adalah kemampuan Megawati untuk lebih bersifat pragmatis dalam memilih kebijakan. Dia dan sebagian kalangan di partainya mewarisi ide-ide nasionalisme dan populisme yang kental dari Bung Karno. Namun, dalam urusan yang berhubungan dengan isu-isu ekonomi, dia tetap memilih dan mendengarkan pendapat dari tokoh seperti Prof. Widjojo Nitisastro dan Prof. Emil Salim.

Kemampuan seperti itulah yang akan semakin dibutuhkannya. Dia akan sering berhadapan dengan tembok-tembok besar. Dia harus mengerti, kapan dia harus melabrak dan meruntuhkannya dengan kekuatan penuh, kapan harus mengambil jalan memutar untuk menghindarinya. Dia harus mampu mempertimbangkan kedua pilihan ini secara pragmatis, dengan mata yang terus tertuju pada tujuan-tujuan besar yang ingin dicapainya.

Churchill pernah berkata bahwa *to govern is to choose*, seorang pemimpin senantiasa harus mengambil pilihan-pilihan sulit dalam kondisi yang terbatas. Jika Megawati memutuskan untuk lebih memakai kekuatan dan melabrak tembok-tembok yang merintanginya, dia harus mengerti bagaimana memainkan kartu-kartu politik kekuasaan, sebagaimana layaknya seorang pengikut Machiavelli yang sejati, tanpa mengorbankan aturan-aturan yang umum berlaku dalam sistem demokrasi. Jika yang dipilih adalah “politik jalan memutar”, dia harus lebih sering menawarkan kompromi dan merangkul seteru politik yang paling memusuhinya sekalipun, tanpa terjebak dalam hutan belukar negosiasi politik yang tak berujung-pangkal.

Pilihan-pilihan demikian pada akhirnya terpulang pada Megawati. Kita semua berharap, Megawati kini sedang mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut tanggungjawab yang demikian besarnya. Indonesia kini betul-betul dahaga akan seorang pemimpin yang efektif. Semoga kali ini sejarah akan berpihak pada kita.

17 Juli 2001

Megawati ke Amerika

AKHIRNYA, PRESIDEN RI berangkat ke Amerika Serikat (AS) pada Senin, 17 September. Perjalanan ini semula tidak mengundang kontroversi. Namun, dengan terjadinya teror besar di New York dan Washington, DC, pekan lalu, muncul berbagai seruan agar Megawati menunda keberangkatannya ke negeri yang sedang terlanda bencana itu.

Tidak kurang dari Amien Rais, Ketua MPR, yang ikut mendukung seruan itu. Amerika sedang berduka dan berada dalam proses kepedihan yang dalam. Karena itu, menurut Amien, alangkah baiknya jika Megawati menghormati hal itu dan menunggu saat yang lebih baik untuk ke Gedung Putih.

Alasan demikian bisa dipahami. Tapi, buat saya, argumen bagi keberangkatan Megawati sebenarnya lebih kuat. Justru dengan kunjungan ini, Megawati dapat mewakili Indonesia untuk menyampaikan simpati secara langsung dan, lewat CNN, ABC, CBS, dan media semacamnya, dapat “bertamu” ke ruang-ruang keluarga di seantero penjuru Amerika untuk menyatakan betapa kita semua memahami kepedihan mereka.

Hal sederhana semacam itu, dalam konteks yang ada sekarang, pasti memiliki dampak strategis yang cukup penting, baik bagi kita maupun bagi Amerika sendiri. Suka atau tidak, di

mata publik AS, peristiwa teror yang meminta korban ribuan jiwa dan meruntuhkan gedung kembar World Trade Center dan membakar sebagian sisi Pentagon itu dianggap berkaitan erat dengan kaum Islam fundamentalis. Anggapan ini bisa keliru, bisa benar. Namun, itulah kenyataan yang ada sekarang.

Megawati adalah presiden dari negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Karena itu, bagi George W. Bush, penerimaan Megawati di Gedung Putih nanti pasti sangat berguna untuk meyakinkan dunia bahwa, dengan memproklamasikan perang terhadap terorisme dalam segala bentuknya, Amerika tidak memusuhi negeri-negeri Islam.

George W. Bush dapat menggunakan pertemuannya dengan Megawati untuk berseru bahwa masyarakat Islam, baik yang berada di Timur Tengah, Asia, maupun di Amerika sendiri, tidak perlu khawatir dengan tekad negeri adidaya yang dipimpinnnya untuk mengejar serta menghancurkan kaum teroris hingga ke pelosok dunia mana pun.

Bagi kita dan bagi Megawati sendiri, hal yang sama pun dapat dilakukan, untuk mencapai tujuan yang berbeda. Inilah saat yang terbaik untuk menunjukkan sikap bersahabat kita terhadap masyarakat AS. Fokus Megawati dalam pertemuan dengan George W. Bush di Gedung Putih harus ditempatkan dalam kerangka itu. Soal bantuan dana, penjadwalan utang, isu kerjasama militer, agenda IMF dan Bank Dunia bisa diurus pada tingkat menteri.

Jika peristiwa teror 11 September tidak terjadi, fokus kunjungan Megawati tentu harus berbeda, yaitu sesuai dengan rencana semula yang lebih berhubungan dengan hal-hal terakhir tadi. Namun, konteks yang ada sekarang secara radikal sudah berubah, dan untuk itu tujuan kunjungan di akhir musin panas ini pun harus menyesuaikan diri.

Di beberapa kota yang dikunjungi Megawati dalam beberapa hari ini, pers AS pasti akan berusaha mendengarkan apa yang akan dikatakannya. Di sinilah Presiden RI atau Menlu

yang mewakilinya dapat menitipkan pesan bahwa bersama rakyat Amerika, Indonesia juga akan turut memerangi akar-akar terorisme dalam segala bentuknya.

Lewat pers AS, kita bisa menjelaskan bahwa di berbagai belahan dunia, salah satu akar politik yang paling dalam dari terorisme di zaman modern bukan hanya bersumber pada isu-isu keagamaan, tapi juga pada isu dan persoalan separatisme. Inggris, Spanyol, dan banyak negeri lainnya sudah mengalami hal itu. Dan Indonesia, pada saat ini, mungkin telah memasuki tahap sejarah yang menyedihkan, ketika aspirasi nasionalisme lokal cenderung berubah menjadi gerakan bersenjata yang selalu meminta korban warga tak berdosa.

Singkatnya, lewat pers AS dan lewat pertemuannya dengan George W. Bush, Megawati dapat menggunakan kunjungannya untuk mencapai dua tujuan utama: memperkuat komitmen AS pada keutuhan teritorial Indonesia, serta pada saat yang sama meminta dukungan politik yang lebih eksplisit agar kita bisa menghadapi akar-akar terorisme di negeri kita secara lebih tegas, kalau perlu dengan penggunaan kekuatan bersenjata secara penuh, seperti yang ingin dilakukan oleh AS di saat-saat mendatang, menyusul malapetaka di New York dan Washington, DC.

Tentu, tujuan strategis demikian bisa tercapai, bisa pula tidak. Kalau tercapai, Megawati akan kembali ke Jakarta dengan *political capital* yang lebih besar untuk menyelesaikan beberapa persoalan domestik yang mendesak, seperti yang terjadi di Aceh.

Kalau tidak, setidaknya Megawati sudah “menyapa” rakyat AS dan menyampaikan uluran simpati pada saat yang paling tepat. Biasanya, kenangan semacam ini akan bertahan lama, suatu hal yang tentu akan meneguhkan sekali lagi persahabatan kita dengan negeri pelopor demokrasi modern itu.

Bush Goyah, Pelajaran Buat Mega

DARI LANGIT turun ke bumi, *life is back to normal*. Itulah yang bisa dikatakan mengenai Presiden Bush menyongsong Pemilu 2004. Hal yang sama terjadi pada Presiden Megawati. Untuk terpilih kembali, keduanya harus bekerja keras dan mengubah strategi.

Setelah teror 11 September 2001, popularitas Bush ada di langit, memecahkan salah satu rekor yang selama ini dinikmati Presiden AS. Dia menggebrak dan memimpin negerinya melawan kaum teroris di sudut-sudut dunia. Dia mempersatukan publik melawan musuh bersama. Sampai musim semi tahun ini, posisi itu tidak berubah. Bahkan, “sukses besar” dalam invasi Irak menambah popularitasnya. Ia ada jauh di atas, tak terjangkau oleh para kandidat dari Partai Demokrat yang tengah bersiap-siap menyongsong pemilu tahun depan.

Namun pada pertengahan musim panas, tiba-tiba badai datang, bagai angin puyuh yang kerap menyapu Texas. *Casus belli*-nya bermacam-macam, dari bom yang meledak di Markas PBB, Baghdad, hingga angka pengangguran yang tak juga kunjung membaik. Hari demi hari popularitas Bush melorot. Sekarang diperkirakan hanya tinggal setengah pemilih yang siap mendukung kembalinya Bush sebagai orang nomor satu di AS.

Bonus politik Peristiwa 9/11 sudah berakhir. Posisi Bush hampir kembali lagi ke titik awal, saat dia menang tipis melawan Al Gore pada Pemilu 2000. Ia kini harus berjuang sebagai politisi di zaman normal, tanpa bantuan momentum sejarah.

Hal itu membangkitkan harapan para kandidat Partai Demokrat. Kini mereka merasa pintu telah terbuka. Tidak heran, di kalangan mereka mulai muncul semboyan yang agak mencubit, *like father, like son: one term only*.

Di kubu Bush sendiri, perubahan itu disambut aneka reaksi, dari penolakan hingga rasa waswas. Untung, ia memiliki seorang penasihat politik piawai, Karl Rove. Dari belakang layar, tokoh yang dijuluki si *boy genius* itu kini mulai mengubah strategi di Gedung Putih.

Sebelumnya, Bush lebih banyak mengayun langkah yang sesuai harapan kaum konservatif di garis keras. Di penguujung musim panas ini, Karl Rove banting setir dengan memperluas basis Bush dan merebut suara pemilih independen. Ia harus memainkan strategi yang mirip dengan apa yang dikembangkan Dick Morris dalam menyelamatkan posisi Bill Clinton pada Pemilu 1996.

Mungkin langkah Bush-Rove itu akan berhasil, mungkin pula tidak. Yang jelas, presiden ke-43 AS ini kian menyadari, dua tahun setelah aksi teror di New York dan Washington DC, pendulum politik dan suasana hati masyarakat kini mulai bergeser. Ia harus berubah bersamanya, sambil tetap mempertahankan ide-ide dasar yang menjadi landasan perjuangan Partai Republik.

Bagaimana dengan Presiden Megawati? Dari semua itu, adakah pelajaran yang dapat dipetiknnya?

Berbeda dengan Bush, popularitas Megawati tidak pernah mencapai langit. Namun sama dengan presiden AS, Megawati

harus menerima kenyataan, dukungan terhadapnya kini menyusut. Dalam berbagai survei akhir-akhir ini, ia masih menduduki tempat teratas, tetapi dengan proporsi yang kian mengecil.

Tokoh-tokoh lain mulai bermunculan. Seperti para kandidat dari Partai Demokrat, mereka mulai melihat jalan yang kian terbuka. Posisi Megawati dianggap kian lama kian goyah, karena itu bukan tidak mungkin ia dikalahkan.

Sebenarnya, posisi Megawati bisa lebih baik. Operasi penumpasan gerakan separatis di Aceh dan reaksi keras terhadap kaum teroris pasca-Bom Bali adalah dua kebijakan yang didukung luas hingga kini. Sebagai presiden, dengan cara-cara yang sah, ia dapat memanfaatkan kedua kebijakan populer itu untuk menaikkan dukungan terhadap dirinya.

Sayang, Megawati tidak melakukan itu. Yang memanfaatkan justru tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dengan posisi sebagai Menko Polkam, dialah yang sering tampil menjelaskan, membela, dan menjawab langsung aneka pertanyaan mengenai kebijakan di Aceh dan langkah melawan kaum teroris di berbagai media, terutama televisi.

SBY tampil sebagai *the tough guy*, manakala masyarakat merindukan tokoh dan kebijakan yang tegas. Tidak heran, dalam beberapa jajak pendapat nama SBY kini agak mencuat, seiring dengan kian menguatnya harapan semacam itu. Dia mengisi sebuah ruang kosong yang ditinggalkan pemiliknya.

Bila mau, peran itu dapat dimainkan Megawati sendiri, dengan sentuhan yang lebih membangkitkan simpati. Bahkan ia dapat menggunakan posisi SBY guna memperkuat dukungan terhadapnya. Demikian pula dengan semua menteri dalam Kabinet Gotong Royong.

Namun, itulah masalahnya. Sejauh ini ia belum memiliki strategi yang secara sadar dikembangkan guna meningkatkan popularitas dirinya. Mungkin putri Bung Karno ini beranggapan, tanpa diatur sekalipun, “kebenaran” akan muncul sendiri dan dukungan rakyat mengalir lagi.

Bila Megawati mau terpilih tahun depan, anggapan demokrasian harus ditinjau kembali. Ia harus banting setir, seperti Bush. Dalam politik di alam demokrasi, tidak ada hal yang datang begitu saja. Peluang harus direbut, dukungan dicari, dan strategi disiapkan dengan saksama.

Dalam hal strategi, apa yang dapat dikembangkan Megawati? Bidikan Bush-Rove mengarah ke pemilih independen, sambil sejauh mungkin mempertahankan pendukung tradisional kaum konservatif. Bisakah Megawati dan tim suksesnya melakukan hal serupa, dalam konteks berbeda?

Dalam banyak hal, tugas Karl Rove dan tim sukses Bush di West Wing, Gedung Putih, lebih gampang. Tingkat akurasi survei di AS jauh lebih tinggi, dan karena itu profil pemilih serta preferensi mereka bisa dideteksi dari waktu ke waktu di semua daerah. Strategi yang dikembangkan setiap kandidat, termasuk Bush, adalah hasil deteksi ini.

Di negeri kita, metode dan teknik survei masih pada tingkat awal. Tidak mudah membangun akses pada pemilih yang tersebar di pelosok kabupaten. Jaringan telepon terlalu kecil untuk digunakan sebagai sarana survei yang menyeluruh.

Namun demikian, apa yang dilakukan sejauh ini oleh berbagai lembaga survei bukan tanpa manfaat. Beberapa fakta yang diungkapkan perlu diperhatikan. Dalam satu hal, khusus bagi Megawati, terlihat kecenderungan, justru kelompok berpenghasilan rendah di daerah perkotaan yang paling banyak berpaling dari kandang banteng. Dari segi wilayah, posisi Megawati paling merosot di DKI, Jateng, dan Jatim, tiga provinsi yang bisa dianggap wilayah tradisional PDI-P.

Strategi apapun yang dirumuskan Megawati dan timnya, kemerosotan dukungan di kelompok dan wilayah demikian harus dapat dihentikan. Syukurlah jika strategi ini bisa dikem-

bankan lebih jauh guna membujuk kelompok pemilih yang hingga kini masih berstatus *undecided*.

Jumlah kelompok terakhir ini amat besar, hampir separuh total pemilih. Sebagian dari mereka, agaknya tidak akan memilih Megawati. Namun sebagian lagi masih menunggu dan menimbang, apakah ketua umum partai berlambang banteng ini masih pantas diberi kepercayaan memimpin bangsa lima tahun lagi.

Megawati, seperti Bush, harus membuktikan kemampuan dirinya. Ia mungkin berhasil, mungkin tidak. Tetapi kita semua akan memetik manfaat jika ia mencobanya sepenuh hati, dan sebagai akibatnya kompetisi politik para calon pemimpin menjadi lebih tajam dan membangkitkan inspirasi.

Demokrasi, kalau saya boleh menyitir ucapan John Maynard Keynes tentang bekerjanya roda ekonomi, hanya bisa berkembang jika para politisi memiliki nafsu binatang untuk berkuasa. Justru karena ingin memerintah, kaum politisi harus bekerja keras membangun dukungan.

Saya yakin, Megawati ingin merebut kemenangan dalam Pemilu 2004 bukan karena alasan kekuasaan semata. Ada sesuatu yang lebih besar yang ingin diraihinya. Kini kita tunggu, untuk mencapai hal itu, maukah ia bertindak sebagaimana layaknya politikus di mana pun, berusaha tanpa lelah untuk merayu dan merebut hati rakyat.

18 September 2003

Perluah Setneg dan Setkab Dipisah?

SALAH SATU masalah penting yang belum terselesaikan dalam tubuh pemerintahan Presiden Megawati saat ini adalah masalah pemisahan dua lembaga vital, yaitu Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Masalah ini tertunda-tunda terus dan, setelah lima bulan, kontroversi di sekitarnya masih bisa kita baca di berbagai media massa.

Hal itu patut disayangkan karena kinerja pemerintahan Megawati dalam banyak hal bergantung pada kecepatan, prestasi kerja, serta perilaku tokoh-tokoh yang menduduki posisi utama dalam dua lembaga penting itu. Kalau tiga atau empat kementerian tidak berfungsi dengan baik, Megawati mungkin masih bisa memerintah dengan efektif. Tapi, kalau Setneg/Setkab macet, tertutup, atau berjalan dengan agendanya sendiri, kepemimpinan Megawati pasti juga akan macet dan kehilangan elannya sebagai tumpuan harapan masyarakat untuk mengangkat negeri kita ke luar dari berbagai krisis yang telah men-celik selama ini.

Sejauh ini, alasan di balik tertundanya pemisahan Setneg/Setkab bersumber pada penolakan Bambang Kesowo, tokoh yang kini dipercaya oleh Presiden Megawati untuk memimpin kedua

lembaga itu. Dari berbagai laporan, yang kita baca di media massa, argumen Bambang Kesowo bersandar pada satu hal, yaitu keefektifan pengawasan dan pengaturan tugas yang dilimpahkan oleh presiden kepada menteri-menterinya. Jika kedua lembaga itu dipisah, menurut lulusan Harvard yang telah bertahun-tahun membangun karir di Sekretariat Negara ini, kinerja presiden sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan akan tidak efisien karena mata-rantai keputusan dan kewenangan yang harus dilalui akan melebar dan bertambah panjang.

Argumen seperti itu dalam beberapa hal cukup masuk akal. Namun, ia belum menjawab hal yang fundamental: apakah fungsi kedua lembaga penting itu memang tak terpisahkan sedemikian rupa sehingga kinerja optimalnya hanya bisa tercapai dengan unifikasi, bukannya diversifikasi? Kalau fungsi-fungsi itu hampir sama dan sebangun, kenapa pula harus ada dua lembaga dengan dua nama yang berbeda? Jika di bawah Orde Baru penyatuan keduanya dianggap sukses, apa alasan yang dapat diberikan untuk berkata bahwa ia akan mendatangkan hasil yang sama dalam arena yang sudah jauh lebih terbuka dan demokratis?

Sampai sekarang, saya belum mendengar jawaban yang memadai terhadap pertanyaan sederhana seperti itu. Pada hemat saya, lembaga Sekretariat Negara, sesuai dengan namanya, berperan mengelola negara sebagai sebuah institusi besar yang memiliki simbol-simbol dan begitu banyak aset serta urusan administratif-protokoler yang berhubungan dengan presiden sebagai kepala negara. Dalam hal ini, peran Menteri-Sekretaris Negara memang lebih baik dijalankan oleh seorang birokrat administrator yang sepenuhnya terlepas dari proses politik.

Lembaga sekretariat presiden menjalankan peran yang samasekali berbeda. Lembaga ini merupakan organ politik pemimpin eksekutif karena berkaitan langsung dengan tugas dan kewajiban presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden di-

lengkapi dengan kabinet yang dipilihnya karena ia harus membuat kebijakan serta mengkomunikasikan kebijakan tersebut agar didukung oleh publik dan parlemen. Di sinilah peran penting Sekretaris Kabinet: ia membantu presiden dalam memerintah dan membuat kebijakan, mengkoordinasikan anggota-anggota kabinet agar bekerja secara terpadu melayani visi pemimpin mereka, mengatur aspek komunikasi kebijakan dan pidato-pidato presiden, mengurus hubungan presiden dengan parlemen, dan semacamnya. Di Amerika Serikat, peran semacam ini dimainkan oleh Kepala Staf Gedung Putih, yang biasanya diisi oleh politisi kepercayaan presiden.

Bahwa di masa Orde Baru dan sebelumnya kedua lembaga itu disatukan, saya kira ini harus dilihat lebih sebagai proses pembagian kerja kelembagaan yang terhambat. Dan khususnya dalam era Soeharto, unifikasi demikian memang wajar adanya karena saat itu birokratisasi dunia politik berjalan tanpa perlawanan sama-sekali.

Tapi sekarang panggung pemerintahan sudah berbeda 180 derajat dan era Sudharmono atau Moerdiono sebagai sebuah kekuatan besar tersendiri sudah lewat. Saat ini, kantor kepresidenan dan ruang-ruang rapat di berbagai kementerian harus terkait secara organis dengan proses politik dalam masyarakat. Presiden membutuhkan ruang-ruang tertentu yang membuatnya cukup leluasa untuk memerintah sebagai politisi dan pemimpin partai, bernegosiasi, bertemu, dan membujuk berbagai elemen dalam masyarakat. Ia dan anggota kabinetnya harus dapat memanfaatkan media massa untuk menyampaikan pesan agar masyarakat mengerti apa yang sedang dilakukan oleh tokoh eksekutif dalam mengangkat nasib mereka.

Semua itu sarat dengan dimensi politis, bukan birokratis atau administratif semata. Jika kedua hal ini dikacaukan atau dicampuradukkan, saya khawatir, dalam masa transisi yang sulit dan tak pasti ini, presiden kita, siapapun orangnya, akan

sukar memperoleh dukungan yang memadai untuk mengambil inisiatif kebijakan penting yang sudah lama ditunggu masyarakat.

17 Februari 2002

Despot Paling Keji

KEKEJAMAN DAN KEKEJIAN Stalin telah terkenal di seluruh dunia. Namun hanya sedikit penulis yang berhasil menuliskan itu semua dalam detail yang kaya dan panoramik. Dr Medvedev jelas merupakan salah satu di antaranya. Ia menulis bukan hanya sebagai seorang sejarawan yang bagus, melainkan juga sebagai seorang penuntut yang jujur dan tajam, yang menangani kasusnya berdasarkan begitu banyak informasi yang berasal dari korban-korban para tiran.

Dalam buku ini dia memperkirakan bahwa sebanyak 20 juta orang mati, dan beberapa juta orang yang lain disiksa dengan keji, di tangan pasukan polisi dan birokrasi Stalin. Dr Medvedev memperlihatkan bagaimana, dalam usahanya untuk menghancurkan sisa-sisa pasukan lama dari era Lenin dan membangun “sosialisme dalam satu negara”, Stalin menggunakan mekanisme teror. Pendeknya, bagi Dr Medvedev, Stalin telah melakukan suatu kejahatan “yang sulit dicari padanannya dalam sejarah dunia... tidak ada satu tiran atau despot di masa lalu yang membunuh dan menyiksa begitu banyak warganegara sendiri”.

Stalinisme merupakan sebuah sistem pemerintahan yang teroristik dan diktatorial, yang terkonsolidasikan melalui kultus

pribadi sang diktator. Akar sistem ini, bagi Dr Medvedev, tidak terletak dalam gagasan-gagasan Marx atau dalam warisan revolusioner Lenin. Stalinisme hanya sebuah penyimpangan: “Stalinisme samasekali bukan tak-terelakkan”. Stalin hanyalah seorang devian keji yang merintangangi komunisme dalam membangun suatu masyarakat yang manusiawi dan sejahtera. Stalin “tidak pernah merupakan seorang komunis sejati”.

Di sini kita bisa melihat bahwa, dalam usahanya yang jujur dan tajam untuk mencari kebenaran, Dr Medvedev mengulangi apologi terkenal para Leninis yang keras kepala. Bagi mereka, tidak ada satu hal pun yang secara inheren salah dengan Marxisme dan praktik-praktik revolusioner Leninis. Kegilaan dan paranoia Stalin-lah yang menciptakan teror yang sistematis dan kekaisaran kejahatan. Dengan demikian, tugas pertama untuk membangun kembali sistem Soviet adalah mencuci “semua lapis noda Stalinis”.

Sulit untuk menerima jenis pietisme Leninis ini. Pertama-tama, kita tahu bahwa teror, sebagai alat kekuasaan, dibenarkan dan digunakan oleh Lenin. Pada 1901 Lenin⁷⁴ berkata, “Pada dasarnya kita tidak pernah meninggalkan teror dan tidak bisa meninggalkannya.” Dan beberapa bulan sebelum Revolusi Oktober, ia menulis bahwa kaum Bolshevik harus menjalankan kediktatoran; dan definisinya tentang kediktatoran adalah “sebuah kekuasaan yang tidak dibatasi oleh hukum apapun, tidak terikat oleh aturan apapun, dan secara langsung didasarkan pada paksaan”. Partai Bolshevik harus menjadi satu-satunya pemegang kebenaran.

Bukan hanya dalam kata-kata dan pemikiran Lenin mempersiapkan lahirnya Stalinisme. Dalam praktik, apa yang ia lakukan ketika ia berkuasa, menurut Brzezinski, adalah “kon-

74 Di sini semua ucapan dan kutipan Lenin diambil dari *The Grand Failure* karya Zbigniew Brzezinski (1989: 17-21).

frontasi yang hampir sepenuhnya dengan masyarakat”. Lenin menciptakan sebuah partai tertinggi yang dilengkapi dengan pasukan polisi rahasia untuk—dalam ungkapan Brzezinski—“mendorong bukan meluruhnya *negara* melainkan *masyarakat* sebagai sebuah entitas yang otonom”.

Lenin, dengan kata lain, mempersiapkan dasar sebuah negara yang sangat terpusat bagi Stalin, yang didasarkan sepenuhnya pada kekuatan paksaan, dan yang di dalamnya tidak ada aktivitas spontan dan otonom yang bisa dijalankan. Apa yang dilakukan Stalin adalah memperluas warisan Leninis ini dalam skala yang sangat besar.

Karena itu, kita harus membaca buku Dr Medvedev dari sudut pandang ini: bagaimana seorang murid ekstrem Lenin, yang memiliki kecenderungan-kecenderungan psikologis seperti haus akan kekuasaan, paranoia, kekejian, dan ambisi yang tidak terbatas, mencoba dengan seluruh kemampuannya (“tanpa dibatasi oleh hukum apapun, tanpa terikat oleh aturan apapun”) untuk mewujudkan komunisme dalam realitas.

Mengapa Stalin “sangat berhasil” menjalankan hal ini? Apakah Rusia merupakan sebuah tanah yang subur bagi semua jenis tiran? Apakah Marx benar ketika ia menulis bahwa “Setiap orang memiliki aturan-aturannya sendiri”? Dr Medvedev tampak eklektik dalam memecahkan persoalan-persoalan ini. Ia mengutip seorang penulis Arab, al-Kawakibi, yang menyatakan bahwa “orang-orang awam adalah makanan dan kekuasaan seorang despot; ia berkuasa atas mereka dan dengan bantuan mereka menindas yang lain”. Sampai tingkat tertentu ia juga setuju dengan Richard Pipes, yang berkata bahwa Stalinisme merupakan kelanjutan dari patrimonialisme Rusia abad ke-18 dan 19 dalam bentuk yang lain. Namun Dr Medvedev juga tidak sepenuhnya menolak argumen Irina Ilovaiskaya bahwa Revolusi Oktober memutus sejarah Rusia ketika ia jelas “sedang bergerak ke arah liberalisasi... ke arah keseimbangan dan kestabilan Eropa”.

Dari eklektisisme ini tentu saja tidak ada sesuatu yang secara teoretis dapat kita setujui atau tidak setujui. Menyetujui setiap hal berarti tidak menyetujui apapun. Namun mungkin tidak fair untuk meminta Dr Medvedev memecahkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagai seorang sejarawan—bukan seorang teoretisi—ia telah melakukan tugasnya dengan sangat baik: ia mencatat, menggambarkan, dan menyingkap tindakan-tindakan seorang despot paling keji yang pernah ada dalam sejarah manusia.

21 Januari 1993

Menuju Pelembagaan Reformasi:

Tentang Isu-isu Seputar Reformasi

Kaum Aktivistis Kebablasan

MPR TELAH MENIPU RAKYAT. Itulah yang diserukan oleh Koalisi Organisasi Non-Pemerintah di tengah-tengah Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jumat 8 Agustus silam. Dalam semangat anti-politik yang pekat, kaum aktivis non-partai yang tergabung dalam koalisi ini dengan dramatis menyobek rancangan pembentukan Komisi Konstitusi yang dibuat oleh para politisi di MPR. Mereka berpikir, hanya ide mereka yang murni, dan segala yang lainnya adalah sebetulnya penipuan kepada rakyat.

Kaum aktivis di luar lembaga perwakilan memang harus mengambil jarak dan senantiasa bersikap skeptis terhadap kaum politisi. Tetapi, saya kira, sebagian dari wakil mereka yang tergabung dalam Koalisi Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) sudah kebablasan: skeptisisme mereka sudah berubah menjadi sinisme yang penuh amarah. Bahkan saya agak khawatir, pandangan-pandangan yang mereka lontarkan selama Sidang Tahunan MPR yang berakhir pekan lalu bisa melemahkan dasar-dasar legitimasi sistem demokrasi itu sendiri.

Tentu saja, saya bisa memahami sebagian kekecewaan mereka. Keempat amandemen yang telah dilahirkan oleh MPR sejak empat tahun silam masih menyisakan beberapa persoalan.

Dalam soal bikameralisme, misalnya, tidak terdapat penjelasan yang memadai tentang fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga penting yang seharusnya diberi kewenangan sebagaimana yang dinikmati oleh lembaga Senat di Amerika Serikat.

Selain itu, dalam soal hubungan antara lembaga-lembaga tinggi negara, dalam hal ini antara presiden dan DPR, prinsip *check and balances* belum sepenuhnya tampak dengan terang-benderang. Dalam mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR, presiden hanya diberi waktu selama 30 hari untuk mempertimbangkannya. Dan jika presiden tidak setuju, undang-undang itu tetap akan berlaku (Pasal 20 Ayat 5).

Artinya, sementara DPR dapat mengontrol presiden, hal sebaliknya tidak terjadi. Sebab, presiden tidak diberi hak veto yang eksplisit. Hak veto yang ada hanya berlaku implisit: presiden diberi wewenang merumuskan undang-undang bersama DPR (Pasal 20 Ayat 2).

Dalam hal ini, kita bisa bertanya: mengapa hubungan antara DPR dan presiden dibuat dengan penuh ambiguitas sedemikian rupa sehingga bisa menimbulkan konflik kelembagaan di masa depan? Mengapa presiden, sebuah lembaga dengan legitimasi yang kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, tidak diberi hak yang eksplisit untuk mengontrol DPR agar terjadi perimbangan kekuasaan dalam menentukan aturan-aturan yang langsung berpengaruh pada kehidupan umum?

Daftar kelemahan dan kekurangan yang ada masih bisa diperpanjang lagi. Namun, semua itu bukanlah kelemahan yang bersifat fundamental yang akan menyebabkan demokrasi kita macet dan rontok. Kekecewaan yang begitu dalam di kalangan para aktivis tidak sebanding dengan derajat kelemahan yang ada dalam konsitusi “baru” kita.

Buat saya, berbagai kelemahan yang ada terlalu kecil untuk menutupi sukses besar yang telah dihasilkan oleh MPR dalam

empat amandemen. Dengan segala keterbatasan dan dengan distribusi kursi partai yang menyulitkan pengambilan berbagai keputusan besar, MPR telah menghasilkan konstitusi baru yang lebih sesuai dengan semangat zaman.

Kini, setiap warganegara secara eksplisit dijamin kebebasannya dalam berserikat, berkumpul, dan berpendapat (dalam konstitusi “lama”, hak-hak itu kabur karena masih diatur dalam undang-undang). Selain itu, setiap warganegara sekarang dapat memilih pemimpinnya secara langsung, tidak ada lagi golongan perwakilan yang tak terpilih dalam parlemen. TNI-Polri sudah menyatakan sayonara tanpa letupan-letupan yang berbahaya, serta substansi Pasal 33 tentang perekonomian lebih mengikuti semangat perkembangan dunia. Singkatnya, sekarang kita telah memiliki konstitusi yang dapat digunakan untuk mendorong proses transisi demokrasi yang lebih baik di masa depan.

Sekali lagi, sukses yang telah dicapai ini bukan berarti di kemudian hari perbaikan di sana-sini tidak lagi dibutuhkan. Dan dalam sistem demokrasi, upaya-upaya perbaikan dan perubahan demikian adalah proses politik. Dengan atau tanpa Komisi Konstitusi sebagaimana yang diusulkan oleh kaum aktivis di Koalisi Ornop atau oleh petinggi-petinggi TNI-Polri, yang perlu terus diingat adalah bahwa proses demikian akan melibatkan pertentangan dan perbedaan konsepsi tentang berbagai hal yang ideal.

Dalam proses itu, tidak satu pihak pun yang berhak mengatakan bahwa hanya dirinya yang membawa kebenaran dan kemurnian. Justru demokrasi perlu, seperti kata Isaiiah Berlin, karena dalam dunia nyata ada banyak kebenaran yang masing-masing mungkin saling bertentangan—dan karena itu kita harus mencari cara damai dan terlembaga untuk bernegosiasi dan mengambil keputusan yang mengatasnamakan semua.

Itulah yang perlu disadari oleh setiap komponen prodemokrasi, terlebih oleh kaum aktivis yang sejauh ini hidup dan

karirnya memang diabdikan untuk mendukung gagasan demikian. Kalau pihak terakhir ini sudah mulai tak sabar dan terjebak dalam sinisme berlebihan terhadap proses politik dan terhadap kaum politisi, transisi demokrasi kita akan kehilangan salah satu motornya yang dapat diandalkan.

Dua pekan lalu, kaum aktivis sudah kebablasan. Mereka harus membuktikan bahwa, dalam momen-momen historis lainnya di saat-saat mendatang, hal itu tak akan terjadi lagi.

19 Agustus 2002

Konstitusi 2002 dan Dua Perkara

SAYA SENANG bahwa tiga aktivis Koalisi Ornop, yaitu Bambang Widjojanto, Todung Mulya Lubis, dan Mochtar Pabottingi, menanggapi kolom Goenawan Mohamad dan kolom saya dengan antusias.

Dari mereka bertiga, kalau kita sederhanakan, ada dua soal yang menjadi biang perkara, yaitu masalah prosedural dan substansial. Yang pertama berhubungan dengan metode pengambilan keputusan yang merumuskan dan mengesahkan Konstitusi 2002 dengan empat amandemennya, sementara yang kedua berkaitan dengan substansi yang ada dalam amandemen tersebut.

Dalam soal prosedural, ketiga aktivis Koalisi Ornop ini berpandangan bahwa mekanisme perumusan dan pembahasan amandemen konstitusi di Panitia Ad Hoc I serta pengesahannya dalam sidang-sidang MPR bukanlah mekanisme yang tepat. Menurut Mochtar Pabottingi, misalnya, dalam mekanisme ini terkandung apa yang disebutnya sebagai “irasionalitas prosedural”.

Tanpa bersandar pada argumen legal-formal, penolakan ketiganya lebih bertopang pada tuduhan miring terhadap kualitas

moral-personal dari kaum politisi yang duduk di lembaga MPR kita sekarang. Mereka menganggap kaum yang terakhir ini sebagai kaum partisan dengan kepentingan sempit, jangka pendek, yang tidak mewakili bangsa secara keseluruhan, dan karena itu tidak layak diberi kewenangan merumuskan konstitusi.

Argumen semacam ini agak mengherankan. Sebab, kaum aktivis di Koalisi Ornop sebenarnya meminta mandat dari MPR untuk membentuk komite konstitusi. Dan juga kita tahu bahwa selama beberapa tahun terakhir ini Koalisi Ornop cukup aktif melobi dan memengaruhi kaum politisi di Senayan untuk menerima ide-ide mereka.

Saya sebenarnya khawatir bahwa tudingan miring tadi lebih disebabkan oleh ketidakberhasilan mereka untuk sepenuhnya menyuntikkan konsepsi mereka kepada kaum politisi di MPR. Jika sejumlah wakil rakyat tidak setuju pada konsepsi yang datang dari Koalisi Ornop, mengapa mereka harus dituding sebagai orang berpikiran sempit? Bukankah yang terjadi di sini adalah perbedaan konsepsi yang wajar adanya antara pihak yang satu dan yang lainnya?

Terus-terang, di sini saya mencium aroma Brahminisme politik yang berlebihan. Bambang Widjojanto, misalnya, berkata bahwa “koalisi kami adalah Koalisi untuk Konstitusi Baru, karena melibatkan banyak pihak di luar komunitas LSM seperti kaum intelektual dan para guru besar yang menggunakan rasionalitas politik dan nurani keberpihakannya tidak pada kepentingan politik jangka pendek dan keinginan ‘sesembahan’ politiknya”.

Pandangan semacam ini dalam substansinya bersifat otoritarian, sesuatu yang ironis dikatakan oleh tokoh-tokoh yang ingin mengusulkan konstitusi demokratis. Soeharto dan kaum militer pada era Orde Baru, serta Soekarno pada zaman Orde Lama, pada dasarnya berpandangan sama: kaum politisi di partai dan parlemen berpikiran sempit, karena itu kewenangan mereka harus dilucuti. Masyarakat harus dipimpin oleh kaum

terpilih—pemimpin revolusi, jenderal, intelektual, guru besar, teknokrat, dan semacamnya—yang “rasional”, berpikiran jauh ke depan, tanpa kepentingan politik sesaat.

Dalam hal inilah sebenarnya terletak salah satu perbedaan antara saya serta Goenawan Mohamad dan ketiga aktivis Koalisi Ornop tersebut. Kami tidak berpikir bahwa ada satu golongan pun yang berhak mengatakan bahwa dirinya adalah pihak yang mewakili nurani dan kebenaran (atau, dalam istilah favorit Mochtar Pabottingi cs., “kepentingan jangka panjang”). Para guru besar dan kaum intelektual pun bisa berpikiran sempit, dengan moral yang bobrok.

Titik berangkat kami berdua adalah Pemilu 1999. Dengan segala kekurangannya, pemilu ini adalah Pemilu yang sah, yang menghasilkan sekian banyak politisi di parlemen yang berhak mengatakan bahwa merekalah wakil rakyat yang *legitimate*. Dan dalam sistem hukum kita, salah satu kewenangan mereka adalah mengubah dan merumuskan konstitusi.

Tentu saja, aspek legal-formal dan prosedural semacam ini bukanlah akhir dari semua argumen. Bisa saja sebuah metode pengambilan keputusan yang benar dan sah menghasilkan sebuah hal yang secara substantif keliru, serta dalam konsekuensinya berbahaya secara ekstrem bagi rakyat banyak. Jika hal ini terjadi, terbuka kemungkinan untuk mengkritik, bahkan menolak metode yang sah tersebut.

Karena itu, hasil atau produk keputusan yang dihasilkan oleh suatu prosedur yang benar juga perlu dikaji. Jadi, dalam hal ini yang harus dilihat bukanlah kualitas para perumusanya (kaum politisi di parlemen, misalnya) tetapi produk-produk konkret yang mereka hasilkan.

Di sinilah biang perkara berikutnya yang dipersoalkan oleh Bambang Widjojanto, Todung Mulya Lubis, dan Mochtar Pabottingi harus dipersoalkan. Betulkah, seperti yang dikatakan oleh Mochtar Pabottingi, misalnya, bahwa secara substansial

“[h]asil rangkaian amandemen atas UUD 1945 samasekali tidaklah memodali negara kita untuk melangkah lebih maju...”? Dalam konteks transisi demokrasi, apakah Konstitusi 2002 dengan empat amandemennya sepenuhnya merupakan langkah mundur, atau sebaliknya?

Untuk mendukung pendapat yang samasekali negatif, seperti yang dilontarkan oleh Mochtar Pabottingi, harus ada susunan argumen yang logis yang menerangkan bahwa pemilihan langsung presiden dengan dua tahap, misalnya, atau pelucutan wewenang MPR dalam menunjuk presiden sebagai mandataris adalah hal-hal yang akan meruntuhkan atau mengacaukan proses transisi demokrasi.

Sayangnya, Mochtar Pabottingi cs. tidak kunjung membangun argumen semacam itu. Yang muncul adalah argumen-argumen yang mencampuradukkan antara apa yang ada dalam aturan-aturan tertulis yang merupakan produk hukum tertinggi (konstitusi) dan kenyataan bobroknya situasi politik kita sekarang ini. Kita bisa sepaham bahwa situasi politik sekarang sedang dalam krisis yang menyedihkan, tetapi kita bisa berbeda dalam melihat apakah sebuah aturan merupakan aturan yang baik dan ideal untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut.

Selain itu, ada pula argumen-argumen mereka yang menyamakan begitu saja kelemahan yang merupakan bagian dari ketidaksempurnaan dengan kekeliruan yang secara ekstrem berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Dalam soal hubungan DPR dan presiden, misalnya, seperti yang saya singgung dalam kolom saya sebelumnya, sayang sekali bahwa prinsip *check and balances* tidak tampak secara eksplisit. Bagi Bambang Widjojanto dan Mochtar Pabottingi, kelemahan semacam ini menandakan bahwa langit sudah runtuh.

Mereka lupa bahwa prinsip itu tetap terkandung dalam Konstitusi 2002, walau secara implisit. Bahwa hal ini bisa membawa konflik kelembagaan di masa depan, tentu saja. Tapi kon-

flik semacam ini, kalau toh terjadi, tetap bisa dihadapi secara kreatif dalam aturan-aturan yang ada (oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya). Dalam hal ini harus diingat bahwa di Amerika Serikat hingga hari pun ini ketegangan kelembagaan dalam kasus-kasus tertentu, antara lembaga presiden dan Kongres dalam memutuskan tindakan ekstrem seperti perang, masih tetap terjadi.

Jadi kelemahan memang ada, tetapi Goenawan Mohamad dan saya melihatnya lebih sebagai bagian dari ketaksempurnaan yang mungkin tidak dapat dihindari dari proses politik demokratis, setidaknya untuk saat ini.

Singkatnya, buat kami, langit belum runtuh. Malah sebaliknya. Dari segi substansinya, empat amandemen yang terkandung dalam Konstitusi 2002 adalah sebuah lompatan ke depan dalam konteks transisi demokrasi.

Sejak awal kemerdekaan, salah satu soal besar yang ada dalam sistem ketatanegaraan kita adalah masalah yang berhubungan dengan hak-hak politik individu dan kewenangan negara. Kemerdekaan berpendapat, misalnya, diakui secara malu-malu, yang membuka kemungkinan bagi aparat negara untuk mengesahkan secara hukum tindakan mereka yang merampas kebebasan berpendapat. Soekarno melakukan hal ini, demikian pula Soeharto. Mereka dapat melakukan hal demikian tanpa jelas-jelas dianggap melanggar UUD 1945.

Sekarang semua itu sudah berbeda, karena pengakuan terhadap hak-hak politik individu ditulis secara eksplisit, tidak lagi malu-malu. Kalau Mochtar Pabottingi cs. mengatakan bahwa tidak ada paradigma baru yang tampak dalam Konstitusi 2002, saya kira mereka keliru: pergeseran perimbangan legal antara negara dan individu, antara otoritas publik dan batas kebebasan, adalah pergeseran paradigmatis yang tidak kecil artinya.

Kaum politisi, kata Alexander Pope, penyair Inggris abad ke-18, tak mungkin terhindar dari kearifan-kearifan masa silam.

Kalimat-kalimat yang tertulis dalam Konstitusi 2002 mungkin memang cukup sederhana, tapi ia adalah hasil pergulatan panjang dalam sejarah, yang dari segi konseptual perdebatannya sudah dimulai bukan hanya sejak adanya Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tiga tahun silam, tetapi sudah ada sejak awal kemerdekaan, bahkan sejak awal pergerakan kebangsaan kita.

Demikian pula dengan beberapa pasal lainnya, seperti bertahannya hubungan agama dan negara sebagaimana yang selama ini telah kita kenal, bergesernya kekuasaan pusat ke daerah, munculnya lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah serta Mahkamah Konstitusi, serta diterimanya metode pemilihan presiden secara langsung. Semua ini adalah unsur kelembagaan baru yang telah hadir dalam bentuk gagasan di masyarakat bukan hanya dalam era reformasi dalam empat tahun terakhir ini.

Bahwa semua itu tidak otomatis akan membuat kita lebih demokratis secara seketika, saya kira kita semua sepakat. Tetapi pandangan yang mengatakan bahwa unsur-unsur baru itu samasekali tidak berguna, atau justru akan menghambat proses demokrasi, pada hemat saya adalah pandangan yang terlalu pesimistis.

Karena itulah mungkin tidak berlebihan jika peran MPR dalam mengetuk hasil akhir rangkaian perubahan konstitusi pada Agustus silam diberi apresiasi yang layak. Apa yang perlu dikecam harus dikecam. Demikian pula, jika sesuatu yang baik muncul, seharusnya kita bisa berkata, *our compliment is in order*.

Dan yang menarik buat saya adalah sebuah fakta bahwa pembaruan penting bisa juga dilahirkan oleh sebuah lembaga perwakilan yang tak berisi tokoh pendiri bangsa sekaliber Soekarno, Hatta, Sjahrir. Para politisi di Senayan saat ini hanyalah sejenis aktor di panggung publik yang dengan mudah padanannya dapat kita temukan di lembaga parlemen di negeri demokratis mana pun.

Sebagian orang mungkin menangis sedih, dan sebagian lagi meluapkan kecaman, terhadap ketiadaan tokoh-tokoh besar tersebut. Tapi bagi saya justru di situlah salah satu kelebihan Konstitusi 2002: ia lahir lewat tangan-tangan kaum politisi yang, seperti kata Goenawan Mohamad, bukanlah wakil Tuhan, dan bukan pula wakil para setan.

Dari tangan-tangan seperti itu tak terhindarkan adanya berbagai kelemahan. Tapi republik kita memang bukan republik Plato, di mana kesempurnaan datang dalam sebuah paket besar sekaligus.

20 Oktober 2001

Tunda Dulu Sistem Distrik

DALAM MENYUSUN sistem politik baru yang demokratis, kini kita dihadapkan pada beberapa pilihan politik yang mendasar. Salah satu pilihan itu berhubungan dengan sistem pemilihan (*electoral system*) yang akan diterapkan untuk menentukan para politisi yang berhak memperoleh kursi di lembaga legislatif. Sejak pemilu pertama pada 1955 hingga pemilu terakhir Orde Baru, sistem yang berlaku adalah sistem proporsional. Kini kita harus menentukan, apakah sistem yang sama dilanjutkan atau kita memilih sistem yang samasekali baru, yaitu sistem distrik?

Kalau kita ikuti pendapat yang populer di kalangan tokoh-tokoh reformis saat ini, jawaban terhadap pilihan itu tampaknya sudah agak jelas: sistem distrik akan diperjuangkan sebagai sistem baru dalam pemilu yang akan datang. Argumen para tokoh reformis itu bervariasi, namun pada intinya mereka beranggapan bahwa dengan sistem distrik para pemilih akan lebih mengenal tokoh yang dipilihnya. Karena itu, menurut mereka, dengan menggunakan sistem ini kualitas demokrasi kita bisa ditingkatkan.

Argumen semacam itu memang cukup masuk akal. Namun, sebelum pada akhirnya pilihan dijatuhkan pada sistem distrik,

sebaiknya kita berpikir lebih jauh mengenai kelemahan-kelemahannya yang mendasar dan persyaratan utama yang dibutuhkan agar sistem demokrasi kita bisa berjalan baik.

Personalisasi Politik

Ada dua persoalan utama dalam sistem distrik yang patut kita pikirkan bersama. Pertama, sistem ini cenderung memperlemah basis kepartaian dan, sebaliknya, mendorong meluasnya “personalisasi” politik. Mengapa?

Pemilih dalam sistem ini tidak lagi terutama memilih partai, tapi orang per orang. Seperti yang terjadi dalam proses pemilu di Amerika Serikat, setiap tokoh lokal yang populer di kawasan pemilihnya (distrik), akan memperoleh kursi di lembaga legislatif nasional, dengan atau tanpa dukungan partai. Untuk terpilih menjadi wakil rakyat, seseorang tidak lagi perlu meniti karir dalam partai apapun. Artinya, partai tidak lagi menjadi lembaga utama dalam proses mobilisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik. Dan karena itu ikatan-ikatan kepartaian pun cenderung akan menjadi sangat lemah.

Kecenderungan semacam itu akan berakibat cukup fatal sebab saat ini, untuk memperkuat fondasi sistem demokrasi kita, partai-partai politik justru harus diperkuat, bukan sebaliknya. Selama 30 tahun di bawah kepemimpinan Soeharto kehidupan kepartaian dibabat habis. Dan karena itu, setelah Soeharto turun dari kursi kekuasaan, dinamika kehidupan kepartaian praktis harus kita mulai dari awal lagi.

Tanpa sistem kepartaian yang kuat, gedung legislatif di Senayan bisa-bisa akan berisi individu-individu yang tidak memiliki basis ikatan dan loyalitas yang jelas. Mereka akan cenderung bergerak seperti himpunan burung yang terbang dengan seribu arah yang berbeda. Tawar-menawar dan negosiasi kepentingan, yang memang normal terjadi dalam lembaga legislatif, tidak lagi bertumpu pada kepentingan partai, tapi pada kepentingan individual para wakil rakyat. Hal ini nantinya

akan mengakibatkan tingginya derajat ketidakpastian dalam interaksi politik di lembaga perwakilan kita.

Lokalisasi Politik

Persoalan kedua sistem distrik adalah kecenderungannya dalam mendorong “lokalisasi” politik. Sebagian besar individu yang terpilih sebagai wakil rakyat dalam sistem distrik dengan sendirinya adalah tokoh-tokoh daerah. Mereka akan berusaha merebut suara dengan bersandar pada *platform* politik lokal, bukan nasional.

Gedung MPR/DPR di Senayan akan “diserbu” oleh aktor-aktor daerah yang berasal dari berbagai kabupaten di seantero penjuru Tanah Air. Aktor-aktor ini akan bertarung dalam panggung politik nasional untuk memperjuangkan kepentingan politik lokal—kalau tidak begitu, mereka tidak lagi akan terpilih dalam pemilu berikutnya.

Dalam pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, aspirasi dan kepentingan daerah selalu takluk di bawah kepentingan nasional. “Bias nasional” semacam ini, kalau kita menggunakan sistem distrik, mungkin akan kita balikkan menjadi “bias lokal”. Artinya, dari titik ekstrem yang satu kita bergerak ke titik ekstrem lainnya.

Dalam praktik, setiap wakil rakyat di parlemen hanya akan mendukung sebuah kebijakan pemerintah di Jakarta jika kebijakan tersebut secara langsung dapat memperkuat posisi dia di kalangan pemilihnya. Bisa dibayangkan, mengingat begitu bervariasinya unsur dan komposisi daerah kita, betapa penyusunan kebijakan nasional nantinya akan menjadi sangat rumit dan berlarut-larut.

Tunda Dulu

Karena kedua persoalan semacam itulah maka saya menganjurkan agar penerapan sistem distrik ditunda dulu, setidaknya untuk satu periode pemilu. Kalau kita memang akan mengada-

kan pemilu enam bulan atau setahun lagi, sebagaimana yang dijanjikan Presiden Habibie, sebaiknya kita menggunakan sistem pemilihan yang selama ini sudah kita gunakan, yaitu sistem proporsional.

Anjuran ini saya berikan bukan karena saya menentang reformasi. Justru sebaliknya. Langkah-langkah reformasi hanya akan berhasil jika kita memikirkannya dengan matang. Selain itu pekerjaan yang menunggu kita masih sangat banyak, dari perubahan undang-undang, reorganisasi kepartaian, penerapan asas-asas *trias politica*, dan sebagainya. Dengan memaksakan penggunaan sistem distrik secepat-cepatnya, kita hanya akan menambah beban yang tidak perlu bagi “bayi demokrasi” yang baru saja kita lahirkan.

Sistem proporsional memang banyak kelemahannya juga. Tapi berbagai kelemahan ini bukanlah penyebab terjadinya sistem otoriter dan meluasnya NKK (nepotisme, kolusi, korupsi) di bawah pemerintahan Soeharto. Sejak 1971, sistem pemilu apapun yang digunakan pasti tidak akan membuat kita lebih demokratis dan bersih dari NKK, karena pemerintahan Soeharto sangat kuat dan dominan dalam mengatur dan mengkooptasi setiap elemen dalam masyarakat.

Jadi, kalau kita menggunakan sistem pemilu yang selama ini sudah kita pakai, tidak berarti bahwa kita akan terus mempertahankan sistem otoriter dan melanggengkan NKK. Sejauh aturan dan pelaksanaan pemilunya demokratis—misalnya dengan dihilangkannya lembaga litsus dan diterapkannya Pasal 28 UUD 1945 dengan konsekuen—maka hasil akhirnya juga akan demokratis, yang diwujudkan dalam pemerintahan dan lembaga legislatif yang mencerminkan komposisi kepentingan dan aspirasi rakyat.

2 Juni 1998

Menuju Pelebagaan Reformasi

SAAT INI proses reformasi memasuki periode kritis. Apa yang mungkin terjadi di depan pada dasarnya bisa disederhanakan ke dalam dua alternatif, yaitu *consolidated anarchy* dan *consolidated democracy*. Alternatif pertama terjadi jika periode kritis yang terjadi sekarang tidak berhasil kita lewati: transisi politik mengalami perumitan ke dalam, involusi, tanpa perkembangan kelembagaan yang lebih baik. Dalam situasi ini, aksi-aksi reformasi hanya berlangsung secara *ad hoc*, tanpa pola yang jelas dan tanpa penciptaan dasar kelembagaan baru.

Bahkan lebih buruk lagi, aksi-aksi demikian terjadi bersamaan dengan aksi atau inisiatif politik lainnya yang berlawanan dengan logika reformasi itu sendiri. Karena itu dalam situasi *consolidated anarchy*, situasi politik yang tercipta akan ditandai oleh derajat ketidakpastian yang tinggi, sinisme, aksi-aksi anarkis dari massa kelas bawah serta kecurigaan etno-religius yang berlarut-larut. Bukan tidak mungkin, dalam beberapa tahun, kondisi seperti ini akan membawa kita kembali ke periode otoritarian dengan cirinya yang militeristik dan sultanistik.

Sebaliknya, jika periode kritis ini bisa kita lewati dengan relatif mulus maka kita akan menuju pada alternatif kedua. Dalam hal ini proses transisi yang sekarang terjadi akan ber-

ujung pada penciptaan sebuah sistem yang lazim disebut sebagai *consolidated democracy*.

Dalam sistem itu konflik-konflik mendasar yang kita saksikan sekarang memang tidak akan selesai, tetapi setidaknya konflik-konflik tersebut terlembagakan, dan dengan demikian setiap aktor yang terlibat di dalamnya bisa mematuhi aturan main politik yang sama yang mereka pandang sebagai aturan yang absah. Masyarakat pun akan kembali ke kehidupan yang “normal”; normal dalam pengertian bahwa pertarungan di ruang publik hanya dimainkan oleh para politisi, aktivis, dan tokoh-tokoh publik, sementara warganegara umumnya mengisi ruang privat dalam kegiatan keseharian yang tenang.

Tentu saja kita semua berharap bahwa alternatif kedua itulah yang akan kita lalui. Kita akan menjadi salah satu model demokrasi yang menarik buat negeri sedang berkembang lainnya. Negeri kita akan menjadi contoh yang baik untuk mencari penyelesaian damai dari konflik besar yang sedang terjadi dalam era pasca-Perang Dingin ini, yaitu konflik etnik dan agama.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana kita mencapai alternatif kedua tersebut? Bisakah kita mencapainya secara damai dan tertib? Adakah semacam “kehendak sejarah” bagi kita untuk berhasil menjadi negeri demokratis?

Terus-terang, tidak ada jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan itu—kemampuan ilmu pengetahuan sosial sangat terbatas; lagi pula, seperti kata Max Weber, hanya para demagog yang suka dan bisa melakukan prediksi bagi masa depan, bukan ilmuwan sosial. Dalam tulisan ini saya hanya bisa mengemukakan beberapa prasyarat agar alternatif kedua itu bisa dicapai.

Apakah prasyarat-prasyarat itu? Dalam pikiran saya ada dua prasyarat yang saling berkaitan, yaitu keinginan dan kemampuan bernegosiasi serta pemilihan prioritas politik yang

jelas dan realistis. Kenapa kedua hal itu penting? Untuk menjawab hal ini kita harus melihat dulu sifat transisi politik yang terjadi sejak runtuhnya rezim Orde Baru.

Kalau mau disederhanakan, transisi politik yang terjadi sejak tiga bulan terakhir diwarnai oleh perimbangan kekuatan secara negatif di antara berbagai kelompok dan kekuatan politik, di kalangan reformis maupun di kalangan kaum yang berkuasa sekarang.

Maksud saya adalah tidak satu pun kelompok, sejak saat menjelang turunnya Soeharto hingga saat ini, yang betul-betul memiliki *sufficient power* untuk menang secara mutlak. Kaum reformis dan kelas menengah memiliki kekuatan moral dan kebenaran argumen. Tapi mereka terpecah, tanpa organisasi, dan dengan jumlah yang relatif kecil; jika kaum reformis tidak memiliki kelemahan semacam ini, maka jelas situasi kita akan sangat berbeda dari saat ini. Demikian pula dengan kaum yang selama ini menjadi bagian dari *the ancient regime*: mereka memiliki dukungan organisasi dan uang, tapi mereka pun terpecah dan, yang terpenting, sebagian dari mereka mengalami proses delegitimasi dan demoralisasi yang dahsyat.

Karena ketiadaan *sufficient power* untuk menang secara mutlak itulah maka semua pihak, baik kaum reformis maupun dari para penjaga *status quo*, hanya menang sebagian (atau kalah sebagian, tergantung darimana kita memandangnya). Sebagian tuntutan kaum reformis dipenuhi (Soeharto turun), tapi sebagian lagi terlupakan; sebagian keinginan pemerintah terpenuhi, tapi sebagian lagi dihujat habis-habisan.

Karena perimbangan kekuatan semacam itulah maka transisi politik kita bisa disebut sebagai *reforma pactada*, reformasi yang harus dinegosiasikan, seperti yang terjadi di Spanyol pada pertengahan 1970-an misalnya. Dalam transisi semacam ini, karena masing-masing hanya memiliki “sebagian” dari kekuatan yang dibutuhkan untuk memenangkan pertarungan politik, maka setiap pihak yang bermain dalam arena politik, baik kaum

reformis yang terdiri atas berbagai macam kelompok itu maupun kaum yang memegang kekuasaan, harus sanggup melakukan tawar-menawar untuk mencapai tahap reformasi yang lebih lanjut, yaitu tahap pelembagaan.

Karena itulah, sebagaimana yang saya katakan di atas, keinginan dan kemampuan bernegosiasi saat ini merupakan syarat mutlak untuk mendorong proses transisi politik kita setahap lebih maju.

Kita harus mengerti bahwa *consolidated democracy* adalah sebuah tujuan politik. Dalam *reforma pactada*, tujuan politik hanya dapat dicapai melalui negosiasi. Hal ini kelihatannya sederhana tapi buat saya, dalam konteks transisi kita sejak Soeharto turun, justru pada aspek inilah kita bisa melihat satu hal yang sangat mengkhawatirkan. Kita sudah terlalu lama tidak terlatih untuk berkompromi, mencari titik temu, bukan perbedaan kepentingan.

Semua pihak, termasuk kaum reformis sendiri, seringkali menuntut suatu hal yang menyempitkan ruang-ruang untuk melakukan kompromi. Dari pihak pemerintah, selain melakukan beberapa langkah yang menarik, desakralisasi kekuasaan dan simbol kepresidenan misalnya, juga terlalu banyak memperlihatkan ketidakpekaan pada semangat zaman yang baru sehingga terkesan mereka lebih menjadi bagian dari masa lalu, dan karena itu menyulitkan langkah-langkah mereka sendiri dalam membuka ruang dialog dengan berbagai kekuatan pembaruan.

Selain itu, negosiasi hanya mungkin terbuka jika ada semacam rasa percaya (*trust*) di antara pihak-pihak yang berperan di arena publik. Sayangnya, yang justru meluas sekarang adalah *chronic distrust*, sebuah rasa tidak percaya pada siapa saja, termasuk di antara kaum reformis itu sendiri.

Prasyarat yang berikutnya adalah kemampuan untuk menciptakan prioritas reformasi atau agenda politik yang sederhana

dan realistis. Dalam hal ini kaum reformis “di luar sistem” maupun simpatisan ide-ide reformasi “di dalam sistem” harus mampu melihat dengan jelas bahwa prioritas terpenting dalam tahap transisi saat ini adalah penciptaan pemilu yang bersih, jujur, dan adil sehingga lembaga legislatif yang akan menjadi produknya dianggap sebagai lembaga yang absah. Hanya lembaga inilah yang dapat mengupayakan terjadinya pelebagaan reformasi sebagaimana yang saya singgung di atas tadi. pemilu yang bersih, dengan kata lain, adalah jembatan untuk mencapai tahap reformasi lebih lanjut.

Seperti juga pada aspek negosiasi tadi, soal pemilihan prioritas ini kelihatannya sederhana dan sepele. Tapi kalau kita membaca koran dan mengikuti berita serta ulasan televisi saat ini, saya kira kita justru akan melihat bahwa di semua kalangan *sense of priority* ini belum tampak—sebelum 21 Mei 1998, prioritas kaum reformis jelas, yaitu tumbanganya Soeharto; sekarang, adakah yang bisa memberi penjelasan sederhana tentang hal apa yang terpenting yang harus dilakukan? Kita baca, dengar dan lihat terlalu banyak hal yang ingin diperjuangkan atau dilakukan secara serempak. Kita kebanjiran agenda reformasi. Akibatnya: proses reformasi kehilangan fokus yang jelas.

Dengan memilih pemilu yang bersih sebagai prioritas dalam agenda reformasi, kita mungkin terpaksa harus melupakan untuk sementara beberapa hal yang mungkin menarik tapi tidak mendesak jika dilihat dari perspektif yang lebih luas (misalnya, tuntutan perombakan kabinet). Dalam hal ini kita memang harus memilih.

Kita hendaknya tidak melupakan bahwa politik pada dasarnya adalah sebuah seni untuk menentukan pilihan dalam situasi yang terbatas. Kalau kita ingin mengerjakan semua hal sekaligus dalam waktu singkat, saya khawatir realitas politik akan menghukum kita melalui krisis dan ketidakpastian yang berlanjut terus-menerus.

Tiga Faktor Penyebab SI MPR

SIDANG ISTIMEWA (SI) MPR tidak terjadi begitu saja. Ia terjadi bukan karena para anggota partai di DPR ingin menjatuhkan seorang presiden, bukan pula karena Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan sudah patah arang dengan seseorang yang sejak awal dikenal sebagai “sahabat politik” mereka.

Hal-hal itu memang ikut memberi warna pada proses politik yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Namun, faktor-faktor penyebab yang lebih fundamental, *causa prima* SI MPR, harus dicari di tempat lain.

Beberapa ilmuwan politik telah mencoba menunjukkan bahwa prahara politik yang kita alami selama periode pasca-Soeharto ini pada dasarnya bersumber pada kelemahan-kelemahan mendasar yang ada pada konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Bagi pandangan ini, terjadinya SI MPR hanyalah salah satu dimensi saja dari prahara itu, sebuah peristiwa politik yang mungkin tak terhindarkan mengingat begitu tak jelas dan kelirunya beberapa pasal yang ada dalam konstitusi kita.

Pandangan semacam ini dalam beberapa hal benar. Konstitusi kita memang jauh dari sempurna. Salah satu sebabnya adalah karena ia dirumuskan dan ditulis dalam situasi yang

menjepit dan tergesa-gesa oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Juni 1945. Rentang waktu yang digunakan dalam proses penulisan kurang lebih hanya tiga minggu. Bagaimana mungkin kita merumuskan hukum-hukum dasar bagi suatu bangsa yang besar dan kompleks hanya dalam 20 hari?

Bandingkanlah hal itu dengan proses perumusan dan penulisan konstitusi Amerika Serikat. Setelah republik modern pertama dalam sejarah ini memproklamasikan kemerdekaannya pada 4 Juli 1776, ratifikasi konstitusi baru terjadi empat belas tahun kemudian. Dan dalam proses perumusan yang panjang ini terjadi banyak perdebatan yang sangat memukau di antara para *founding fathers* negeri itu, seperti Thomas Jefferson dan James Madison. Selama bertahun-tahun, mereka berdebat, ber-kirim surat, mengadu argumen tentang konsep kekuasaan, tentang hal-hal yang paling dasar dari sebuah masyarakat modern, dan bentuk-bentuk pemerintahan yang paling baik untuk mengaturnya. Hasil-hasil perdebatan inilah, salah satunya, yang mewarnai konstitusi AS.

Tentu, selain soal ketergesaan, kekurangan-kekurangan yang ada dalam UUD 1945 juga disebabkan oleh beberapa faktor lain, seperti paham-paham besar yang populer di kalangan tokoh-tokoh bangsa kita waktu itu, minimnya ahli hukum tata negara yang betul-betul piawai, pengaruh kolonialisme Jepang dan Belanda, dan sebagainya. Namun, apapun sebabnya, kekurangan-kekurangan itu bersifat mendasar, riil, dan jika digunakan untuk betul-betul mengatur sebuah masyarakat modern yang kompleks, akibatnya akan negatif, untuk menggunakan sebuah kata yang agak netral.

Contohnya adalah pada aturan-aturan yang menentukan posisi lembaga-lembaga negara yang utama seperti MPR, DPR, dan Presiden. Dalam satu hal, sebagian kalangan bisa menafsirkan bahwa hubungan yang ada di antara ketiga lembaga ini serupa dengan hubungan-hubungan yang umumnya ada dalam

sistem presidensial, di mana seorang presiden memainkan peran yang sangat dominan dalam memutar roda pemerintahan. Dalam hal lain lagi, sebagian kalangan yang berbeda bisa menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang dimaksudkan oleh konstitusi kita sesungguhnya bersifat parlementer dalam cara kerjanya.

Perbedaan-perbedaan penafsiran semacam itulah yang membuka ketidakpastian dan mendorong para aktor di panggung politik untuk melakukan persetujuan tanpa pola yang jelas, serta untuk mengambil langkah-langkah yang sering mengejutkan. Salah satu faktor mengapa Presiden Abdurrahman Wahid, misalnya, sering mengambil langkah-langkah soliter yang terkesan tidak mempedulikan para politisi di DPR mungkin bisa dijelaskan dari sudut ini: dia menyangka dan menafsirkan sendiri bahwa posisinya sangat kuat, sebagaimana layaknya seorang *chief executive* dalam suatu sistem presidensial.

Ruang ketidakpastian dan kelemahan dalam hukum-hukum dasar itulah yang pada dasarnya menggiring para politisi, baik yang berada di partai maupun di dunia pemerintahan, ke dalam sebuah situasi yang kembangan-kembangannya telah kita saksikan dalam setahun terakhir. Ujung dari semua ini sekarang sudah memasuki daerah pertaruhan “hidup-mati” dalam wujudnya yang terlembaga, yaitu penyelenggaraan SI MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

Selain faktor konstitusional seperti itu, terjadinya SI MPR juga disebabkan oleh hadirnya dua faktor lain, yaitu cair dan lenturnya konfigurasi politik kita, serta kelemahan Abdurrahman Wahid sendiri sebagai seorang pemimpin pemerintahan modern.

Dalam soal konfigurasi politik, semua persoalan yang ada dapat dilihat dengan jelas pada komposisi perolehan suara partai-partai besar dalam Pemilu 1999 yang silam. Komposisi

ini bersifat sedemikian rupa sehingga tidak ada satu partai pun yang bisa mendominasi arena politik. Artinya, para politisi, baik yang berada di parlemen maupun di lembaga eksekutif, harus melakukan tawar-menawar terus-menerus, sebuah hal yang tentu saja diperburuk oleh beberapa ketidakpastian yang ada dalam konstitusi kita mengenai batas-batas serta kewajiban-kewajiban yang harus ada dalam proses semacam ini.

Sebenarnya, untuk sementara waktu kelemahan semacam ini mungkin bisa diatasi jika muncul seorang pemimpin atau politisi yang tangkas, populer, serta pandai memanfaatkan peluang untuk membangun konsensus dan dukungan politik terhadapnya. Pemimpin semacam ini, dengan segala sumberdaya yang tersedia, misalnya dengan memanfaatkan posisi eksekutif yang memiliki peluang-peluang khusus untuk memerintah, bisa memperkecil dampak negatif dari cairnya hubungan-hubungan yang ada dalam arena politik.

Itulah yang diharapkan dari Abdurrahman Wahid saat ia diangkat sebagai presiden, lewat sebuah proses pemilihan demokratis yang mengalahkan Megawati, Ketua PDI-P yang waktu itu oleh sebagian kalangan dianggap terlalu bersebelahan dengan kelompok Islam. Sebagai Pemimpin NU, organisasi Islam terbesar di Tanah Air, ia dikenal sangat toleran, seorang pluralis yang tumbuh dari tradisi pesantren yang pekat. Sebagai salah satu komentator persoalan-persoalan sosial budaya yang terkemuka, ia dikenal cerdas dan jenaka. Sebagai politisi yang harus mengarungi berbagai karang politik Orde Baru, ia diakui sebagai tokoh yang pandai berkelit sambil sesekali menggigit.

Singkatnya, Abdurrahman Wahid naik ke tampuk kekuasaan dengan berbagai harapan besar dan dukungan yang luas dari masyarakat pada umumnya. Di kalangan pers asing pun, nama Abdurrahman Wahid tidak kurang harumnya.

Sayangnya, sejarah membuktikan bahwa harapan itu hanya sekadar harapan. Sebagai pemimpin sebuah organisasi peme-

rintahan modern yang bernama Negara Republik Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid terlalu sering mengacaukan banyak hal yang tidak semestinya terjadi. Ia lupa pada batas-batas yang harus dijaga sepenuhnya oleh seorang pemimpin yang bertanggungjawab, seperti batas antara apa yang publik dan yang privat, apa yang rasional dan yang irasional, apa yang boleh dan tidak boleh dijadikan alat dalam percaturan kekuasaan.

Sama sedihnya, ia juga ternyata melupakan begitu saja sebuah dalil primer dalam politik: kalau bisa memperbanyak kawan, kenapa menambah musuh? Yang terlihat pada Abdurrahman Wahid dalam setahun terakhir ini adalah upayanya, yang hampir sepenuhnya tak terpahami, untuk mencari musuh terus-menerus. Bahkan, banyak pihak yang semula menjadi pendukung antusiasnya terdesak, dipojokkan, dan kemudian mengambil jalan yang samasekali berseberangan dengannya, atau malah menjadi musuh politiknya yang fanatik.

Hasil dari semua itulah yang kita lihat sekarang. Selama setahun sistem politik kita yang masih rentan ini mengolah faktor-faktor yang saya jelaskan di atas dengan berbagai guncangan dan prosesnya sendiri. Sebagian dari guncangan ini bisa diramalkan sebelumnya, sebagian lagi tidak.

Hal yang terakhir ini misalnya terlihat pada betapa terkejutnya kita melihat gejala yang sering disebut sebagai *the fading away of the state*, memudarnya otoritas negara dan pemerintahan dalam banyak interaksi kemasyarakatan. Kita masih memiliki pemerintah secara formal, tetapi dalam banyak urusan di mana ia sangat dibutuhkan (Ambon, Sampit, Poso, dan sebagainya), ia menghilang dan hampir menjadi aktor yang tidak relevan kehadirannya, kalau tidak malah mempersulit situasi yang sudah sulit.

Sekarang ketiga faktor itu bertemu sedemikian rupa sehingga “metode” pengolahan yang tersisa adalah Sidang Istimewa

wa MPR, sebuah penyelesaian kelembagaan yang kita harapkan berlangsung secara damai dan tertib.

Max Weber pernah berkata para demagog dan para peramal tidak mendapat tempat dalam dunia ilmu sosial. Kita memang tidak pernah bisa meramalkan masa depan. Namun, tentu tidak keliru jika kita berharap bahwa SI MPR akan mengantarkan datangnya sebuah pemerintahan baru yang lebih efektif dan mampu membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Semoga!

22 Juli 2001

Konsensus Elite dan Politik Kekuatan

(Tanggapan buat Denny JA)

SETELAH PEMILU dua tahun silam, sebenarnya sudah bisa terbaca persoalan politik kita yang fundamental. Persoalan ini bersumber pada komposisi dukungan yang diperoleh partai-partai besar, di mana tidak satu pun di antara mereka yang memiliki suara mayoritas mutlak, sebuah kondisi yang diperlukan untuk melahirkan *force majeure* dalam berhadapan dengan pilihan-pilihan tindakan publik. PDI-P memang muncul sebagai pemenang pemilu, namun dukungan riil yang dimilikinya tidak memadai untuk membentuk pemerintahan baru.

Kita harus berhadapan dengan konsekuensi dari kenyataan politik semacam itu. Sejauh ini apa yang tampak di mata adalah potret yang buram. Sulit mencari prestasi pemerintah yang saat ini bisa dibanggakan. Lembaga eksekutif sepertinya tidak memiliki otoritas apapun untuk melakukan langkah-langkah penting dan mengandung risiko, sementara hubungan-hubungan politik di lembaga perwakilan terus-menerus bersifat cair dan penuh kontroversi.

Sesungguhnya Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berpeluang untuk mengurangi dampak negatif dari keterpecah-

an politik yang kita hadapi. Dengan kekuasaan formal dan simbolik yang cukup besar sebagai presiden, ia bisa membujuk dan membentuk koalisi yang mampu menjadi poros politik untuk mendukung pemerintahannya. Tapi, ternyata Gus Dur tidak memiliki kemampuan untuk itu. Bukannya memberi solusi, ia malah menjadi bagian dari persoalan itu sendiri, dan dilema transisi demokrasi yang kita alami menjadi semakin kompleks.

Adakah jalan ke luar dari semua itu? Salah satu jawaban populer yang sering kita baca di berbagai media bertolak dari teori konsensus elite. Menurut para pendukung teori ini, karakter transisi politik kita mirip dengan apa yang terjadi di berbagai negeri lain yang mengalami proses *reforma pactada*, sebuah istilah akademis untuk menggambarkan proses reformasi yang dinegosiasikan di antara kaum elite. Demokratisasi bisa berjalan maju di berbagai negeri ini karena kaum elite membuat pakta di antara mereka dan sepakat membagi kekuasaan serta memerintah secara bersama.

Kita harus meniru proses seperti itu. Secara teknis, menurut pendukung teori ini, proses negosiasi politik cukup mudah dilakukan karena di negeri kita kaum elite yang benar-benar menentukan sebenarnya hanya segelintir orang. Merekalah yang harus bertemu secara rutin untuk menuntaskan berbagai isu besar yang ada. Inilah jalan terbaik, sebuah solusi pragmatis yang mampu membawa kita ke luar dari kebuntuan politik saat ini.

Buat saya, solusi lewat konsensus elite kedengarannya memang menarik. Apalagi, ia memang agak sesuai dengan salah satu elemen dalam kultur politik kita yang sering menekankan konsensus, kompromi, dan dialog dalam berhadapan dengan masalah-masalah yang ada. Setiap berhadapan dengan sebuah *impasse*, kita selalu berseru agar para elite bertemu, berkumpul mencari jalan ke luar bersama.

Namun, betapapun menariknya solusi semacam ini, saya tetap melihat bahwa ia mengandung berbagai kelemahan yang tak terhindarkan. Salah satunya adalah masalah teknis yang terkait

dengan setiap proses pembagian kekuasaan. Bagaimana porsi pembagian peran dan tanggungjawab dari segelintir kaum elite yang terlibat dalam kesepakatan itu? Bagaimana perbedaan kekuatan dan dukungan riil dari tokoh-tokoh ini tercermin dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan roda pemerintahan?

Dalam arena ekonomi, misalnya, pemerintah harus mengambil serangkaian kebijakan, dari penentuan anggaran tahunan, pajak, utang, nasib BUMN hingga ke hubungan kita dengan IMF dan Bank Dunia. Siapa yang bertanggungjawab terhadap apa? Haruskah pengambilan kebijakan terpenting dipercayakan pada tokoh PDI-P dan Golkar, dua partai dengan dukungan rakyat terbesar, serta soal yang remeh-temeh diberikan pada tokoh-tokoh PAN, PKB, PPP dan elite nonpartai? Maukah mereka diberi porsi remeh-temeh? Bagaimana persisnya pengaturan semacam ini?

Karena rumitnya, saya khawatir bahwa solusi kesepakatan elite hanya mengalihkan persoalan yang ada, bukan menyelesaikannya. Memang, persoalan teknis demikian bisa dihindari dengan asas “semua untuk satu, satu untuk semua”. Tapi, dengan begini, kita berhadapan dengan persoalan lain lagi, sebuah persoalan yang lebih bersifat prinsipial ketimbang sekadar persoalan pengaturan teknis kekuasaan.

Jika PDI-P dan PAN misalnya, masing-masing dengan 34% dan 7% dukungan suara rakyat, diberi peran dan tanggungjawab yang sama dalam menentukan soal-soal besar yang kita hadapi, sesungguhnya buat apa lagi kita menyelenggarakan pemilu? Bukankah pesta demokrasi ini justru diadakan untuk melihat pilihan-pilihan rakyat? Tidakkah sistem demokrasi, sebagai sebuah metode pengambilan keputusan publik, diterapkan justru agar perbedaan pilihan-pilihan demikian tercermin dalam proses perumusan kebijakan pemerintah, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif?

Karena berbagai kelemahannya, saya cenderung menganjurkan agar kita berpikir secara mendalam sebelum mencoba solusi kesepakatan elite. Solusi ini hanya bisa diterima jika jalan lain memang sudah tidak ada, atau walaupun ada, ia akan melahirkan situasi yang lebih buruk lagi.

Untungnya, dalam menghadapi dilema transisi demokrasi, kita sebenarnya masih memiliki pilihan lain. Asumsi dasar dari solusi yang berbeda ini adalah perlunya penciptaan kekuatan riil yang bisa mendominasi panggung politik, paling tidak hingga Pemilu 2004. Persoalan politik, seperti kata Machiavelli, harus diselesaikan dengan *power politics*, bukan dengan nasihat-nasihat moral serta imbauan-imbauan normatif agar kaum elite bertemu dan membuat konsensus.

Dalam kondisi kita sekarang, persyaratan bagi munculnya kekuatan besar yang sanggup mendominasi panggung politik hanya bisa tercapai jika PDI-P dan Golkar membangun koalisi bersama. Dukungan suara rakyat buat keduanya hampir mencapai 60 persen, sebuah jumlah yang memadai untuk digunakan sebagai modal politik bagi pemerintahan yang efektif. Dengan kekuatan riil yang dimilikinya, koalisi kedua partai ini dapat mengambil langkah-langkah kebijakan baru yang tegas, memberi kepastian politik dan melembagakan demokrasi.

Jalan ke luar semacam ini secara teknis lebih mudah (membagi kekuasaan di antara dua partai dengan jumlah suara hampir sama jauh lebih sederhana) serta secara prinsipil tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah demokrasi. Dalam hal yang terakhir ini kita harus ingat bahwa demokrasi bermula dan berakhir di kotak suara. Hingga pemilu berikutnya PDI-P dan Golkar memiliki hak penuh untuk memegang kendali utama roda pemerintahan di negeri kita.

Pertanyaan kita kemudian tentunya: mungkinkah koalisi demikian terwujud? Bagaimana prosesnya? Bukankah PDI-P dan Golkar dalam Pemilu 1999 merupakan seteru yang saling

menggigit? Yang satu besar karena menjadi korban Orde Baru, yang lain karena menjadi alat Orde Baru—mungkinkah keduanya bertemu?

Jawaban saya, sangat mungkin. Dalam politik tak ada kawan dan musuh abadi. Secara ideologis kedua partai ini sesungguhnya hampir tidak memiliki perbedaan mendasar. Selain itu, proses politik di lembaga legislatif yang terjadi sekarang, yaitu penentuan Memorandum Kedua dan SI MPR buat menentukan nasib Gus Dur, tampaknya sedang menggiring terjadinya koalisi besar itu secara alamiah. Kalau proses ini berlanjut dan mandat Gus Dur ditarik kembali, Megawati otomatis akan menjadi presiden dan Akbar Tandjung berpeluang besar untuk menempati posisi kedua di RI. Kalau semua ini terjadi, setidaknya secara *de facto* PDI-P dan Golkar sudah berada dalam perahu yang sama, dan perumusan koalisi besar yang dominan tinggal selangkah lagi.

Tentu saja semua itu bisa gagal. Proses penentuan memorandum buat Gus Dur dapat berhenti di tengah jalan dan kita kembali melihat dunia politik yang berputar di tempat. Di sinilah terletak peran kaum pemimpin yang mampu bertindak dan melihat jauh ke masa depan. Mampukah Megawati dan Akbar Tandjung menjadi *historical actors*, pelaku-pelaku sejarah yang membawa rakyatnya ke arah perubahan fundamental? Beraniakah mereka?

Dengan kekuatan dan dukungan riil yang mereka miliki, keduanya sekarang memperoleh kesempatan emas untuk berbuat sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang banyak. Semoga mereka merebut kesempatan ini.

25 April 2001

Kegagalan SI MPR: Rahmat Terselubung

GAGALNYA SIDANG TAHUNAN MPR 2001 dalam mengubah metode pemilihan presiden tentu mengecewakan banyak pihak. Dari kalangan yang kecewa ini, MPR mungkin dianggap sebagai lembaga dengan legitimasi yang merosot drastis karena menunda pengesahan hal-hal penting yang sudah menjadi kebutuhan sejarah.

Saya bisa memaklumi kekecewaan semacam itu. Namun, di pihak lain, saya juga melihat bahwa dengan menunda selama setahun, kita justru memiliki peluang untuk memengaruhi para wakil rakyat agar merumuskan metode pemilihan presiden yang lebih baik ketimbang dua alternatif yang ada dalam Sidang Tahunan MPR lalu.

Kedua alternatif itu punya kelemahan-kelemahan yang mendasar. Dalam sistem yang diusulkan oleh PDI-P, misalnya, jika pada pemilihan langsung tidak ada kandidat yang memperoleh suara 50 persen+1, penentuan presiden akan dilakukan dalam sidang MPR. Sistem pemilihan semacam ini tidak mengurangi, tetapi justru menambah, tingkat ketidakpastian yang melekat dalam sistem politik kita.

Katakanlah dalam beberapa periode pemilu akan muncul seorang kandidat yang sangat populer dan cukup karismatis,

maka persyaratan mayoritas mutlak (50 persen+1) dapat dipenuhi dalam pemilihan tingkat pertama. Hasilnya adalah seorang presiden dengan posisi yang relatif kuat karena memiliki legitimasi langsung dari rakyat. Namun, dalam periode pemilu lainnya, kandidat semacam itu tidak muncul. Dan seperti yang terjadi selama ini, MPR kembali memilih siapa yang berhak menjadi orang nomor satu di negeri kita.

Jadi, dalam prinsipnya, sistem yang ditawarkan PDI-P mengandung dualisme legitimasi. Pada periode yang satu, kita memiliki presiden yang langsung dipilih rakyat. Pada periode lainnya, kita harus dipimpin oleh kepala pemerintahan yang dipilih oleh MPR. Kadang kita memakai sistem yang bekerja dengan karakter presidensial, kadang kita kembali lagi dengan sistem politik semi-parlementarian seperti yang ada sekarang. Dengan kemungkinan seperti ini, kerinduan kita untuk melihat sistem politik yang lebih sederhana dan memberi kepastian yang lebih besar pasti hanya akan menjadi angan-angan yang indah.

Alternatif lainnya, yaitu metode pemilihan yang ditawarkan PPP dan PKB, memang dapat menghindari kelemahan semacam itu. Dalam sistem ini, jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas mutlak, pemilu akan diulang dan rakyat kembali harus memilih salah seorang dari dua kandidat yang mencapai posisi teratas dalam pemilu tingkat pertama.

Walau alternatif ini relatif lebih baik ketimbang alternatif pertama, ada pertanyaan yang masih harus dijawab oleh para pendukung sistem pemilihan bertingkat ini. Kalau memang pemilihan tingkat kedua harus kembali ke rakyat lagi, kenapa harus repot-repot mengulang pemilu, dengan kemungkinan hasil akhir yang berbeda samasekali? Kenapa harus dua tingkat? Kenapa tidak sekali pemilu saja?

Terhadap pertanyaan demikian, jawaban yang sering kita dengar terbagi dalam dua argumen. Argumen pertama pada

intinya berkata bahwa hanya dengan kemenangan dengan mayoritas mutlaklah legitimasi presiden dapat menjadi kuat, dan hanya pada pemilihan tingkat kedualah posisi mayoritas mutlak ini dapat tercapai. Buat saya, argumen ini mengacaukan pengertian legitimasi dan dukungan politik.

Legitimasi adalah soal prosedur yang sah. Jika kita sepakat bahwa dalam pemilu tingkat pertama siapapun yang mencapai dukungan terbesar, dengan prinsip *plurality*, akan menjadi presiden, berarti baik kemenangan dengan 35 persen, 45 persen, maupun 65 persen dukungan suara rakyat akan sama sahnya. Yang penting di sini, kemenangan itu dicapai dengan mengikuti prosedur yang ada, bukan jumlah nominal suara yang berhasil dicapai.

Argumen kedua terhadap pertanyaan di atas berkata bahwa jika pemilu hanya dilaksanakan sekali, daerah luar Jawa akan terus tertinggal karena para kandidat presiden hanya akan berkonsentrasi merebut suara di Pulau Jawa. Saya tidak pernah tahu bagaimana argumen seperti ini bisa dibuktikan.

Bahwa ada konsentrasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat besar, kita semua mengerti. Tapi kita juga tahu bahwa penduduk Pulau Jawa adalah entitas demografis, bukan politis. Secara politis, Pulau Jawa tidak pernah satu dan homogen. Karena itu, kekhawatiran bahwa para kandidat presiden hanya akan berkonsentrasi untuk memenangi pemilu di Pulau Jawa sebenarnya adalah kekhawatiran tanpa dasar yang jelas.

Singkatnya, metode pemilihan presiden yang ditawarkan oleh PPP dan PKB sebenarnya hanya memperpanjang rantai politik, tanpa dasar yang benar-benar meyakinkan. Kita harus menyaksikan pertarungan dua ronde yang agak rumit hanya karena konsepsi tentang legitimasi yang keliru dan kecemasan yang tak berdasar.

Karena itulah, gagalnya Sidang Tahunan MPR dalam mengambil keputusan tentang metode pemilihan presiden pada

Jumat malam lalu saya anggap lebih sebagai *blessing in disguise*, rahmat terselubung.

Setahun adalah waktu yang cukup untuk meyakinkan para wakil kita di lembaga tertinggi itu bahwa kedua alternatif yang ada sekarang bukanlah metode pemilihan yang ideal. Kalau kita memang ingin berubah ke arah yang lebih baik dengan sistem politik yang sederhana dan lebih memberi kepastian, yang paling ideal adalah sistem pemilihan langsung dengan satu tingkat dan berdasarkan pada prinsip *plurality*.

18 November 2001

Indonesia: Persoalan Demokratisasi

I

PERPOLITIKAN DI AKHIR masa Orde Baru (Orba) berubah. Perubahan ini mungkin terlalu lambat dan *terlalu diatur dari atas*. Namun, peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini merupakan petanda yang bagus bahwa otoritarianisme Orba menjadi lebih lunak.

Terdapat banyak contoh untuk mendukung argumen ini: mulai dari keberhasilan Megawati, pengadilan militer setelah Pembunuhan Massal Dili, pembentukan Komite Hak Asasi Manusia, jumlah pemogokan buruh yang semakin banyak, kritik pers dan mahasiswa yang semakin tajam, dan persaingan yang setengah terbuka di kalangan beberapa elite kekuasaan utama, dan sebagainya. Semua ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan transformasi politik yang terjadi di Thailand awal 1990-an dan Korea Selatan pada akhir 1980-an. Pentingnya kasus-kasus Indonesia ini hanya bisa dipahami sepenuhnya jika kita berpikir bahwa lima tahun sebelumnya, tidak ada seorang pun yang berani untuk berspekulasi bahwa Megawati, misalnya, akan menjadi Ketua PDI, atau bahwa Habibie akan menekan militer dengan berbagai manuver politiknya dalam merehabilitasi

Petisi 50 dan memilih para sekutunya untuk menjadi *pengurus inti* Golkar. Selain itu, bahasa pers, jika kita membandingkannya dengan yang terjadi 2 tahun yang lalu, misalnya, sekarang ini jauh kurang eufimistik.

II

Pertanyaan pertama: Mengapa perpolitikan Orba berubah? Jawaban untuk pertanyaan ini adalah bahwa Orba terjebak oleh keberhasilan ekonominya sendiri. Secara ekonomi, apa yang terjadi di Indonesia dalam 20 tahun terakhir adalah sebuah mukjizat. Sementara sebagian besar negara Dunia Ketiga mengalami persoalan ekonomi yang begitu besar pada 1970-an dan khususnya pada 1980-an, ekonomi Indonesia berjalan dengan relatif baik.

Mukjizat ekonomi ini mengubah negeri itu dalam beberapa hal. Dua di antaranya adalah, pertama, hal itu menciptakan jaringan aktivitas ekonomi yang lebih luas di luar kontrol pemerintah. Jaringan ekonomi swasta ini kompleks dan pada dasarnya merupakan sumber kekuasaan politik yang sangat penting yang bisa dimobilisasi oleh mereka yang ada di luar pemerintah. Interaksi sosial di wilayah ekonomi swasta ini tidak bisa dengan mudah dikontrol oleh komunitas politik. Interaksi yang kompleks ini adalah apa yang disebut Schumpeter sebagai “skema hal-ihwal kaum borjuis”, yang membantu mengubah Eropa (Barat) feodal menjadi bangsa-bangsa demokratis.

Kedua, hal itu menciptakan suatu masyarakat “baru” yang sering disebut masyarakat sipil. Yang pertama di atas merujuk pada panggung, arena tindakan; sementara yang kedua merujuk pada para aktornya. Mereka ini—yakni para anggota masyarakat sipil—adalah orang-orang yang berpendidikan, yang mempertaruhkan hidup mereka dalam aktivitas-aktivitas ekonomi swasta, dan yang biasanya berpikir bahwa roti semata-mata tidak memadai untuk mencapai suatu kehidupan yang baik. Dalam ba-

hasa Hegelian, apa yang umumnya dilakukan oleh para aktor baru ini adalah mencari pengakuan sebagai seorang manusia politik yang independen—dengan kata lain, mereka pada dasarnya akan mendukung terciptanya sebuah sistem politik di mana mereka, dan bukan para penguasa, adalah sang tuan.

Pendeknya, keberhasilan ekonomi Orba menghasilkan prasyarat-prasyarat struktural (yakni, panggung dan para aktornya) yang bertindak sebagai dasar perubahan politik yang kita lihat sekarang ini.

Sebagian orang berkata, dengan alasan yang baik, bahwa semata-mata keberhasilan ekonomi tidak dapat menjelaskan proses-proses politik dan arah tujuannya. Politik, bagi mereka, sangat otonom. Karena itu, mereka berkata bahwa jalannya perubahan politik di akhir masa pemerintahan Soeharto harus dilihat terutama dari dinamika internal rezim: perbedaan dan ketegangan yang semakin besar di kalangan para pemain kunci Orba membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas.

Saya tidak melihat alasan mengapa kita menolak gagasan bahwa politik memiliki kehidupannya sendiri ini. Selain Indonesia, kita bisa memperlihatkan banyak contoh yang menegaskan proposisi ini. Masyarakat di bawah Kekaisaran Kedua merupakan suatu masyarakat yang sangat maju, dan memiliki sektor ekonomi kapitalis modern yang sangat maju. Namun, ketika Hitler muncul, masyarakat sipil menyerahkan kekuasaan mereka ke tangan beberapa demagog. Singapura merupakan contoh lain yang sangat bagus. Adanya sektor ekonomi yang sangat modern dan masyarakat sipil dalam negara-kota ini tidak diikuti, sampai sekarang, oleh muncul dan berkembangnya sistem demokratis.

Apa yang bisa kita katakan adalah bahwa tanpa keberhasilan ekonomi dan dampaknya pada wilayah sosial, dalam kasus Indonesia, ketegangan di dalam rezim tidak akan menghasilkan bentuk perubahan-perubahan politik yang kita lihat sekarang

ini (Dalam kasus Jerman, kita dapat berkata bahwa rekonstruksi pasca-Perang, yang membangun kembali demokrasi, tidak akan berhasil dengan mudah tanpa adanya masyarakat sipil dan sektor ekonomi kapitalis modern yang sebelumnya telah ada). Kita harus ingat bahwa pada awal dan pertengahan 1970-an, ketika Soeharto tidak sekuat sekarang, juga ada perbedaan dan persaingan di dalam rezim. Alih-alih demokratisasi, perbedaan dan persaingan ini menghasilkan kekuasaan otoriter yang lebih terpusat di mana Soeharto praktis berkuasa sendirian.

Sebuah kasus bagus untuk melihat bagaimana kombinasi perubahan sosio-ekonomi dan persaingan elite menghasilkan berbagai perubahan politik dapat dilihat dalam bangkitnya kekuatan Islam dalam dua atau tiga tahun terakhir: kebutuhan Soeharto akan dukungan dari kelompok-kelompok Islam untuk mengimbangi militer searah dengan jumlah kelas menengah dan intelektual Muslim yang semakin meningkat (sebagaimana yang berulang kali dikatakan Nurchilish Madjid: mereka merupakan salah satu produk penting dari keberhasilan ekonomi). Para pendukung utama Habibie bukanlah kelompok-kelompok Islam dari “masyarakat lama” (misalnya NU, Muhammadiyah, dan Media Dakwah/kuasi-Masyumi). Para pendukungnya adalah “para intelektual baru” (sebagian besar dari mereka dikirim oleh pemerintah untuk belajar di AS dan Eropa), para mahasiswa di berbagai universitas (yang sangat disubsidi oleh pemerintah), para elite birokrasi (yang sebagian besar menikmati berbagai privilese ekonomi dan politik dalam proses perluasan ekonomi tersebut). Tanpa mereka, Habibie tidak akan memiliki basis yang jelas.

III

Akankah berbagai perubahan tersebut memunculkan sebuah sistem politik yang demokratis? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita tentu saja harus memperjelas apa yang kita maksud

dengan “demokrasi”. Bagi saya, penjelasan terbaik tentang demokrasi diberikan oleh Schumpeter dalam karya besarnya, *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Demokrasi Schumpeterian adalah sebuah sistem persaingan yang terbuka dan *fair* di kalangan elite politik untuk mendapatkan kekuasaan. Rakyat (yang kebebasan “negatif” dasarnya diakui) merupakan hakim terakhir yang memutuskan siapa yang akan memerintah mereka. Dengan demikian, para elite yang bersaing tersebut harus memainkan permainan politik, sementara rakyat bermain kartu dan melihat sepakbola: hubungan di antara keduanya diteguhkan melalui mekanisme pemilu yang jujur dan terbuka.

Penting untuk diingat bahwa ketika Schumpeter berbicara tentang demokrasi, ia berbicara tentang tujuan-tujuan politik (misalnya, persaingan terbuka di kalangan elite), bukan tentang tujuan-tujuan ekonomi. Ia membuat suatu perbedaan yang sangat jelas antara wilayah politik dan wilayah ekonomi. Dengan demikian, dalam perdebatan tentang Indonesia sekarang ini, hal ini berarti bahwa demokrasi adalah satu hal, dan pertumbuhan ekonomi atau liberalisasi ekonomi adalah hal lain. Untuk mencapai tujuan ekonomi, hadirnya demokrasi bisa baik atau buruk.

Sebagian kalangan tidak mengakui perbedaan ini. Kadang mereka tampak berbicara tentang demokratisasi, namun apa yang mereka bayangkan sebenarnya adalah liberalisasi ekonomi atau kemajuan ekonomi.

Dengan konsepsi tentang demokrasi yang sederhana ini, apa yang bisa kita katakan tentang Indonesia pada akhir 1980-an dan 1990-an? Sekarang ini pertanyaan ini tampak memerlukan jawabannya sendiri. Munculnya Megawati dan Habibie, misalnya, bisa dipahami sebagai munculnya politisi-politisi sipil yang lebih kuat yang, dengan basis yang lebih kuat, bisa bersaing dengan para perwira militer. Sampai sekarang ini, selain Soeharto, para perwira militer tersebut masih merupakan

pemegang kekuasaan terkuat di negeri ini. Jika Megawati dan Habibie bisa bertindak sebagaimana para politisi yang baik dalam memperluas dan memperkuat basis mereka, bukan mustahil persaingan elite dalam politik pasca-Soeharto akan menghasilkan suatu jenis interaksi politik yang satu langkah lebih dekat pada interaksi demokratis.

Sejauh ini Habibie telah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang politisi yang sangat bagus. Megawati, sejauh ini, dianggap oleh banyak orang sebagai simbol kepemimpinan alternatif yang mampu menarik dukungan luas dari mereka yang tidak puas dengan keadaan yang ada sekarang ini. Fakta-fakta ini memperlihatkan pada kita bahwa, dalam kaitannya dengan proses demokratis, perubahan politik yang kita lihat sekarang ini menuju ke arah yang benar.

Saya memahami bahwa pandangan ini sangat optimistik, yang bagi sebagian orang dianggap didasarkan pada asumsi yang salah tentang proses politik atau watak komunitas politik Indonesia. Berbagai kritik terhadap pandangan ini bisa dirangkum ke dalam dua argumen. Yang pertama mengatakan bahwa jika kita melihat pada sifat masyarakat Indonesia pada awal 1990-an, masyarakat tersebut masih merupakan “masyarakat lama” sebagaimana yang kita lihat pada 1950-an dan 1960-an. Tidak ada yang berubah secara mendasar: *politik aliran* masih berlaku, mungkin tersembunyi, namun bagaimanapun berfungsi sebagai pembagian dasar masyarakat yang setiap saat bisa dimanfaatkan lagi oleh para elite politik.

Karena itu, argumen tersebut beranggapan bahwa satu-satunya sumber kekuasaan, simbolis atau riil, yang bisa dimobilisasi oleh Megawati atau Habibie, misalnya, adalah sumber kekuasaan yang berada dalam wilayah *politik aliran* tersebut. Hal ini berarti bahwa Megawati, misalnya, harus memobilisasi hantu lama tersebut—ini adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Menurut argumen ini, jika hal ini terjadi, maka kita

harus melupakan demokrasi, karena militer akan terpaksa mengambil langkah keras dan menerapkan aturan yang lebih ketat agar hantu lama tersebut tidak bangkit lagi, atau karena—jika militer tidak melakukan apapun, suatu hal yang sangat tidak mungkin—apa yang akan terjadi samasekali bukan demokrasi karena demokrasi tidak pernah bisa dibangun berdasarkan politik “tradisional” ini.⁷⁵

Argumen kedua menyatakan bahwa persaingan elite yang semakin besar yang kita lihat sekarang ini sebenarnya merupakan suatu persaingan yang “dikontrol”: Megawati, Habibie, Harmoko, Try Sutrisno, Faisal Tanjung, dan praktis setiap orang di panggung utama, adalah boneka-boneka Soeharto—mereka bertindak dan berperilaku sebagaimana yang diinginkan atau diizinkan Soeharto. Semua yang sedang kita lihat adalah bagian dari Skema Besar Soeharto. Jika Soeharto merencanakan sesuatu, itu dapat dipastikan bukan demokrasi.

Apa yang muncul setelah Soeharto? Argumen kedua ini memberi suatu penjelasan yang sederhana: bahwa akan ada Soeharto lain yang muncul dari militer (yang masih terlalu kuat dan terlalu terkonsolidasi untuk bisa disaingi oleh para pemain lain) yang akan mengulangi lagi cerita lama. Soeharto baru ini mungkin akan memberi satu atau dua kompromi sebagai kosmetik orde terbaru tersebut, namun garis dasar politik otoriter tersebut tetap tidak berubah.

Jika argumen pertama yakin bahwa masyarakat Indonesia tidak berubah dan karena itu tidak mampu memainkan politik baru yang diperlukan untuk membangun demokrasi, argumen kedua percaya bahwa “boneka-boneka” Soeharto tersebut tidak memiliki rencana sendiri, atau tidak mampu memanfaatkan

75 Perhatikan bahwa mereka yang mengikuti argumen ini tidak pernah menyetujui demokrasi Schumpeterian yang, dalam konteks kita sekarang ini, bisa dikemukakan seperti ini: sejauh terdapat persaingan yang terbuka dan jujur, apapun sumberdaya yang dimobilisasi (apakah keagamaan, etnis, atau kelas) para politisi tidak menjadi masalah. Demokrasi adalah proses, bukan substansi politik.

kesempatan apapun untuk mendapatkan kekuasaan apapun. Boneka adalah boneka.

Kedua argumen ini cukup masuk akal. Ada beberapa bagian dari argumen-argumen ini yang sangat sulit disangkal. Namun, keduanya gagal meyakinkan saya karena beberapa alasan. Kritik utama saya untuk argumen pertama tersebut adalah bahwa ia gagal memahami bahwa dalam dua dekade terakhir masyarakat telah diubah oleh perkembangan ekonomi. Tentu saja hal ini tidak berarti bahwa “masyarakat lama” dan hantu lama *politik aliran* tersebut tidak lagi ada, atau bahwa semua itu tidak lagi bisa dimobilisasi oleh elite-elite politik.

Hal ini semata-mata berarti bahwa, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, telah ada begitu banyak orang (aktor) dan wilayah interaksi sosio-ekonomi (panggung) yang cocok untuk demokrasi. Mereka mungkin, atau mungkin tidak, bisa dimobilisasi secara baik dalam proses perubahan politik. Pada titik ini kita berbicara tentang kepemimpinan dan ketrampilan politik: sekarang ini terserah para elite akan mengambil kartu yang mana, yang baru atau yang lama. Argumen pertama salah ketika mengatakan bahwa sebagian besar elite harus mengambil kartu lama untuk bisa bertahan.

Kritik lain terhadap argumen pertama ini adalah bahwa ia melihat *politik aliran* sebagai sesuatu yang pada dasarnya berbahaya bagi demokrasi. Argumen ini gagal melihat bahwa sangat mungkin bagi sistem kompetisi elite yang terbuka dan *fair* (demokrasi) untuk menampung pengelompokan politik yang *plural*. Jika Habibie secara terbuka memobilisasi komunitas Islam, apa masalahnya bagi demokrasi sejauh ia setuju dengan aturan-aturan dasar dan tertulis dari persaingan? Jika ia menang, hal itu mungkin tidak baik bagi ekonomi. Lalu kenapa? (Bagi George Will dan William Buckley Jr., kemenangan Clinton tidak bagus bagi perekonomian, namun mereka tidak berkata bahwa pemilu itu tidak demokratis).

Pada titik ekstrem, benar bahwa hantu lama tersebut sangat tidak baik bagi demokrasi: hantu itu menjebak orang dalam kebencian dan permusuhan lama tanpa ada pemecahan. Namun, sejauh ini saya tidak melihat ada elite penting yang memberi tanda bahwa ia akan membawa garis lama tersebut ke titik ekstrem (bagaimanapun mereka tidak sebodoh itu).

Untuk argumen kedua, kritik saya hampir serupa. Di sini saya harus menyebut “hukum” konsekuensi yang tidak diniatkan. Katakanlah benar bahwa semua persaingan yang meningkat ini sebenarnya merupakan persaingan yang telah “dirancang”, yang diatur oleh Soeharto untuk satu tujuan: memelihara kekuasaannya.

Saya tidak melihat alasan mengapa tujuan ini hanya bisa dicapai dengan mengorbankan proses demokratis. Jika Soeharto hanya bisa memelihara kekuasaannya beberapa tahun ke depan dengan membiarkan para elite di sekitarnya bersaing satu sama lain, bukankah hal ini juga berarti bahwa proses demokratisasi awal sebenarnya telah dimulai? Dari sejarah kita tahu bahwa banyak negara mulai melakukan demokratisasi bukan dengan letupan-letupan di jalan, melainkan dengan renegekan dan intrik di istana.

Tentang masalah Soeharto baru. Seperti yang telah saya katakan di atas, argumen kedua ini yakin bahwa setelah persaingan yang “dirancang” tersebut, ketika Soeharto meninggal, militer akan kembali menciptakan seorang Soeharto. Argumen ini pada dasarnya naif. Saya tidak perlu mengulangi lagi bahwa Indonesia pada 1990-an bukanlah Indonesia pada 1960-an. Selain itu, militer sekarang ini tidak lagi sangat kuat, sebagaimana yang dikemukakan argumen ini. Militer sekarang ini telah kehilangan sebagian besar kekuatan persuasinya—sebagaimana yang ia miliki menjelang runtuhnya Orde Lama. Untuk menciptakan Soeharto baru, sumberdaya apa yang sekarang militer miliki? Kekerasan terbuka sekarang ini tidak begitu bermanfaat sebagai alat politik utama—terlalu mahal akibatnya.

Hingga sekarang ini umum dipercaya bahwa militer adalah pihak yang melindungi dan menjaga Soeharto dalam kekuasaannya. Saya kira kini pandangan ini salah. Hubungan tersebut juga bisa dibalik. Soeharto-lah yang melindungi dan menjaga posisi para perwira militer sekarang ini dalam politik sipil. Saya sangat yakin bahwa ketika Soeharto sudah tidak ada lagi di panggung politik, kekuatan militer akan sangat merosot. Sejauh ini saya tidak pernah mendengar gagasan apapun dari para perwira tinggi tersebut yang memberi tahu kita apa yang akan mereka lakukan jika mereka kehilangan si Orang Besar itu. Sebagaimana yang kita tahu dari banyak kasus belakangan ini, jika Orang Besar mereka tersebut memiliki kepercayaan pada orang lain yang berasal dari elite sipil, mereka—para perwira tinggi militer itu—terkesan kebingungan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, dan bertindak hanya sebagai seorang “reaksioner”. Apakah mereka adalah jenis para perwira yang akan menciptakan seorang Soeharto baru?

Setelah Perang:

Tentang Amerika dan Isu-isu Internasional

Gore, Bush, dan Kita

RAKYAT AMERIKA SERIKAT akan memilih presiden baru, pada 7 November. Sampai saat ini persaingan masih amat ketat. Secara kuantitatif kecenderungan yang terlihat menunjukkan sebuah gejala yang lazim disebut *statistical dead heat*, posisi dominan seorang kandidat masih ada dalam jangkauan kesalahan sampel penelitian.

Meski demikian, apa yang terjadi dalam sepekan terakhir menunjukkan, George W. Bush, Gubernur Negara Bagian Texas dan putra mantan Presiden George Bush, sudah mulai sedikit di atas angin. Wakil Presiden Albert Gore memang masih bisa menikung tajam dan mencuat pesat di saat-saat terakhir. Tetapi, kalau itu tidak terjadi, era kaum demokrat akan segera berakhir dan negeri Paman Sam sekali lagi akan memasuki era kaum republikan.

Apa dampak perubahan itu buat kita? Akankah warna dan prioritas kebijakan luar negeri AS berubah dengan cukup berarti? Apakah Presiden Bush akan lebih baik ketimbang Presiden Gore, dipandang dari sudut kepentingan kita?

Jawaban saya cenderung positif, meski bisa keliru besar, sebab dalam politik banyak hal dapat berubah tanpa sebab-sebab yang jelas. Namun, bila Anda saksama mengikuti kampa-

nye Bush dan Gore selama sebulan terakhir serta mendengar rencana-rencana kebijakan luar negeri mereka, maka mungkin Anda tidak akan banyak berbeda pendapat dengan saya.

Albert Gore lebih mewakili arus moralisme dalam politik luar negeri. Buat politisi seperti dia, posisi Amerika Serikat sebagai satu-satunya negeri adikuasa menciptakan peluang emas untuk mencapai tujuan-tujuan moral di tiap pelosok dunia melalui kekuatan riil yang dimilikinya di bidang ekonomi dan militer. Kompleksitas tindakan dan pilihan kebijakan dalam politik internasional direduksi menjadi *manichaeen choice*, yaitu pilihan-pilihan antara baik dan buruk, jahat dan mulia, secara hitam-putih. Dalam hal ini dunia lebih dipandang sebagai arena realisasi nilai-nilai moral, apapun definisinya, dan politik luar negeri hanyalah salah satu alat untuk mencapainya.

Tentu saja tidak ada politisi di Washington DC yang akan sanggup menerapkan doktrin moralisme secara konsekuen tanpa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan praktis negerinya secara realistis. Namun, pada Gore, setidaknya dari apa yang bisa diamati dalam proses kampanye pemilu sejauh ini, nuansa moralisme terlihat kental. Dia cenderung memandang dunia lebih sebagai seorang misionaris. Ditambah sosok kepribadiannya yang cenderung agresif, politisi dari Negara Bagian Tennessee ini akan semakin menguatkan kecenderungan AS untuk bertindak sebagai polisi global dalam soal-soal yang berkaitan dengan berbagai isu kontemporer, seperti hak-hak asasi dan lingkungan hidup.

Bagi kita, kebijakan Gore akan menciptakan dampak yang dilematis dan kontraproduktif. Bantuan dan hubungan ekonomi, misalnya, akan makin sering diukur dengan berbagai kriteria non-ekonomi yang cenderung menyudutkan para pengambil keputusan ekonomi, baik di Jakarta maupun di Washington DC.

Waktu Tragedi Atambua terjadi beberapa waktu lalu, Presiden Bank Dunia James Wolfensohn sempat mengeluarkan ancaman agar Indonesia segera bertindak tegas menyelesaikannya. Selama lebih dari 30 tahun, baru pertama kali seorang pejabat tertinggi Bank Dunia menyampaikan ancaman semacam itu secara eksplisit, mengenai sesuatu hal yang sebenarnya tidak berhubungan samasekali dengan pelaksanaan program-program pembangunan dan reformasi ekonomi. Di bawah Gore, hal seperti ini kemungkinan besar akan makin sering terjadi.

Di bidang politik, dampaknya mungkin bukan hanya kontraproduktif, tetapi juga bisa tragis. Kini pemerintah dan aparat keamanan membutuhkan kepercayaan diri dan ruang bernafas yang memadai untuk menerapkan hukum serta menyelesaikan persoalan-persoalan separatisme. Pemerintah, polisi, dan tentara sampai sekarang tidak berani bertindak tegas menegakkan otoritas mereka sebagai penegak hukum dan alat pertahanan negara antara lain karena mereka terus dihantui reaksi dunia, yang dalam hal ini paling diwarnai suara Amerika Serikat.

Gore akan membuat suara seperti itu makin nyaring, dan ruang yang ada bagi pemerintah kita untuk mengambil tindakan-tindakan tegas serta mengandung risiko akan makin sempit. Akibatnya mudah ditebak: pemerintah makin ragu mengambil keputusan, kerusuhan sosial serta gelora pemberontakan terus terjadi, dan daftar korban makin panjang. Inilah ironi politik luar negeri yang terlalu moralistik. Ia dijalankan dengan motivasi mulia, tetapi hasil akhirnya justru bisa menambah penderitaan manusia dalam jumlah besar.

Berbeda dengan Gore, George W. Bush adalah wakil yang hampir sempurna dari arus realisme dalam politik. Bagi dia dan penasihat-penasihat terdekatnya, seperti Condoleeza Rice, Paul Wolfowitz, dan Jenderal Colin Powell, kebijakan luar ne-

geri hanya mengabdikan pada satu tujuan, yaitu kepentingan AS yang riil.

Mereka menyadari keterbatasan kemampuan AS dalam memaksakan kehendaknya di seluruh belahan dunia. Bagi mereka, justru karena posisi AS sebagai satu-satunya negeri adikuasa, maka kaum politisi harus ekstra hati-hati dalam melakukan proyeksi kekuatan ke manca negara.

Bush tentu tidak mungkin menghindari sepenuhnya dari tuntutan agar kebijakan luar negeri pemerintahannya juga mencerminkan sentimen moral rakyat AS yang sangat memuja demokrasi dan hak-hak asasi. Tetapi, orang seperti Bush, Rice, Wolfowitz, dan Powell mengerti, demokrasi hanya bisa tumbuh dalam masyarakat yang telah siap untuk itu. Proses demokratisasi di Asia atau di Afrika tidak bisa terjadi hanya lewat dekret yang dikeluarkan Gedung Putih.

Bila ternyata Bush *cs.* ingin dan bisa membantu proses demokratisasi dalam sebuah masyarakat, dalam situasi yang normal mereka cenderung akan melakukannya lebih dengan menekankan metode-metode non-politis, seperti intensifikasi hubungan dan bantuan ekonomi, bantuan pendidikan, kesehatan, dan semacamnya.

Dilihat dari kacamata kepentingan kita, justru hal itulah sekarang yang sebenarnya sangat dibutuhkan.

Jika Gore menjadi Presiden, posisi menteri luar negeri di kabinetnya kemungkinan akan diisi Richard Holbrooke, Dubes AS di PBB yang sangat agresif itu. Lewat Holbrooke kita mungkin akan makin banyak mendapat ceramah dan tuntutan-tuntutan moralistik tanpa pertimbangan yang saksama akan kompleksitas faktor-faktor domestik.

Kalau Bush yang terpilih, salah satu kandidat kuat untuk menduduki posisi penting itu adalah Paul Wolfowitz, tokoh simpatik yang pernah menjadi dubes populer di Jakarta. Berbeda dengan Holbrooke, dia sangat mengerti berbagai kom-

pleksitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di tangan seorang Wolfowitz (atau Colin Powell), pelaksanaan politik luar negeri AS akan menjadi lebih elegan dan realistis. Dan bagi kita, semua itu tentu lebih baik.

2 November 2000

Pemilu AS, Drama Politik, dan Tuntutan Akal Sehat

SEJAK AWAL KAMPANYE, semua orang sudah tahu bahwa persaingan Wakil Presiden Al Gore dan Gubernur Texas George W. Bush akan seru. Tetapi tidak ada satu pun yang menduga bahwa semuanya akan berlangsung seseru dan seketat yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ini. Sejak Selasa malam, rakyat AS menyaksikan sebuah drama politik besar yang hanya datang sekali atau dua kali dalam seabad.

Belum pernah terjadi dalam sejarah Amerika modern, jabatan politik tertinggi yang oleh rakyat dianggap sebagai personifikasi sistem demokrasi mereka ditentukan hanya oleh segelintir pemilih.

Empat dekade silam kompetisi antara Richard Nixon dan John Kennedy juga berlangsung ketat. Tetapi perbedaan dukungan bagi keduanya di Negara Bagian Illinois, yang waktu itu menjadi penentu untuk memenangkan jumlah keseluruhan dewan pemilih, *electoral college*, masih berkisar pada angka ratusan ribu.

Sekarang, menurut hasil penghitungan ulang versi *Associated Press*, Bush berhasil mengungguli Gore di Florida hanya dengan perbedaan 327 suara. Memang, komite pemilu setempat

masih menunggu penghitungan kertas suara yang datang dari penduduk Florida yang bermukim di luar AS (mereka memberi batas waktu hingga 17 November). Namun sudah bisa ditebak, komposisi perbedaan suara tidak akan banyak berubah. Karena warga Florida di luar negeri umumnya adalah kaum republikan, Bush tetap akan menang, dengan perbedaan di bawah dua atau tiga ribu suara. Artinya, kurang dari 0,1 persen dari jumlah pemilih di Florida yang pada akhirnya menentukan siapa yang menjadi presiden ke-43 AS, sebuah jabatan politik yang juga kerap dikatakan sebagai jabatan terpenting di dunia. Oleh kalangan pers AS, kemenangan seperti ini dijuluki sebagai *razor-thin victory*, kemenangan setipis pisau silet.

Dengan hasil akhir seperti itu, tidak heran jika kubu Al Gore, di bawah pimpinan mantan Menlu Warren Christopher dan Ketua Kampanye William Daley, enggan menerima begitu saja kekalahan mereka. Karena itu, dalam tiga hari belakangan ini rakyat Amerika menyaksikan sesuatu yang hanya disaksikan oleh nenek-moyang mereka pada abad ke-19: dengan menggerakkan pengacara, aktivis, pendeta dan massa, kubu yang terancam kalah menuntut pemilu ulang di beberapa kawasan pemilihan serta membuka kemungkinan yang bisa menggiring negeri mereka ke arah kebuntuan politik.

Akal Sehat

Semua itu membuat banyak orang menduga dalam beberapa hari mendatang, retorika politik di kubu kaum republikan dan kubu kaum demokrat akan semakin tajam dan memanas.

Pada hemat saya, krisis dan pertikaian Bush-Gore tidak akan berlangsung terlalu lama. Tuntutan paling keras yang di-suarakan oleh kubu Al Gore sesungguhnya bersandar pada argumen yang sangat lemah. Mereka menuduh bahwa desain kertas suara di Palm Beach, sebuah kabupaten di Florida Selatan dengan 400.000 pemilih, membingungkan dan menipu

rakyat. Karena kebingungan ini setidaknya ada 3.000-an suara pendukung Gore yang tanpa sadar beralih ke Patrick Buchanan, sebuah jumlah yang cukup besar untuk memenangkan Gore mengingat perbedaan suara yang begitu tipisnya.

Namun, kalau kita perhatikan desain kertas suara yang dalam tiga hari terakhir sudah menjadi buah bibir di setiap rumahtangga di AS itu, sesungguhnya tidak ada hal yang membingungkan di dalamnya. Di situ terlihat sangat jelas bahwa di sisi setiap nama kandidat ada tanda panah yang menunjukkan lingkaran mana yang harus dicoblos. Anak saya yang berumur tujuh tahun pasti bisa memilih lingkaran mana yang ditujukan untuk Bush, Gore, Buchanan, dan seterusnya.

Lagi pula, desain kertas suara itu sudah digunakan pada pemilu empat tahun lalu, dan dibuat oleh kaum demokrat sendiri. Seminggu sebelum Pemilu 2000, contoh kartu suara sudah dikirimkan ke setiap pemilih dan dibicarakan secara luas di setiap koran lokal. Pada saat itu tidak terlontar satu pun keberatan dari warga Palm Beach. Bahkan pada menit terakhir sebelum pemilih mencoblos, tersedia beberapa anggota komite pemilih yang bisa menjawab berbagai pertanyaan kalau masih ada ketidakjelasan yang tersisa.

Dengan semua itu, kalau memang ada yang masih mengklaim, beberapa hari setelah pemilu berlangsung, bahwa pemilu harus diulang karena dia bingung, apakah itu bukan sesuatu hal yang terlalu dicari-cari? Apakah rakyat AS begitu bodohnya sehingga untuk mengerti arah tanda anak panah saja tidak bisa, dan memerlukan satu atau dua hari untuk merenungkannya? Setiap pemilih adalah warga dewasa yang harus bertanggungjawab terhadap tindakannya. Kalau mereka keliru dan bingung, kenapa 100 juta pemilih lainnya harus menanggung akibatnya?

Karena menyadari lemahnya argumen kubu Al Gore dan potensi bahaya dari retorika politik yang memanas serta ke-

tidakpastian politik yang berlarut-larut, sejumlah tokoh dan organisasi yang semula mendukung Gore sudah mulai berbalik arah. Contoh paling jelas bisa terlihat pada koran paling berpengaruh di AS, yaitu *The New York Times* dan *The Washington Post*. Kedua koran ini secara terbuka mendukung Gore sebelum pemilu kemarin. Tetapi, dalam tajuk rencana yang terbit Jumat, 10 November, mereka mengecam keras langkah-langkah kubu Gore.

The New York Times menulis, tindakan mereka akan “meracuni udara politik”, sementara *The Washington Post* menuding bahwa William Daley yang memimpin tim “perlawanan” kaum demokrat di Florida telah mengayun “langkah-langkah lebih lanjut yang tidak bertanggungjawab”. Kedua koran ini secara implisit menganjurkan agar Gore menerima kekalahan dengan besar hati, kalau penghitungan suara terakhir pada 17 November memang menunjukkan posisi Bush tetap tak tergoyahkan.

Dan saya kira Gore akan tunduk pada tuntutan akal sehat semacam itu. Demokrasi Amerika yang dasar-dasarnya diciptakan oleh Thomas Jefferson dan James Madison terlalu besar dan terlalu penting untuk dihancurkan hanya oleh ambisi kekuasaan segelintir orang.

Setelah drama politik ini berakhir, rakyat AS akan kembali melihat kehidupan politik yang berjalan normal. Bertahun-tahun kemudian, mereka akan mengenang Pemilu 2000 sebagai salah satu ujian yang membuktikan bahwa sistem demokrasi mereka adalah sistem yang matang, dan mereka layak berbangga karenanya.

12 November 2000

Darurat Sipil di Cincinnati

“KERUSUHAN SUDAH TAK TERKENDALIKAN LAGI. Kaum perusuh telah membahayakan keselamatan serta harta benda penduduk kota kita. Dengan sangat menyesal saya memutuskan, mulai malam ini seluruh kawasan kota berada dalam situasi darurat sipil.”

Itulah yang dikatakan Charles Luken, Walikota Cincinnati, Kamis dua pekan lalu, 12 April, di hadapan wakil masyarakat yang memenuhi gedung DPRD setempat. Dengan pengumuman ini, Cincinnati, salah satu kota besar AS di Negara Bagian Ohio yang cukup banyak menyimpan sejarah perjuangan anti-perbudakan, berada langsung di bawah komando polisi dan walikota. Kebebasan dibatasi dan warga kota dilarang ke luar rumah dari pukul 8 malam hingga pukul 6 keesokan paginya.

Keputusan drastis itu adalah reaksi terhadap rangkaian peristiwa yang berlangsung beberapa hari berturut-turut sejak tewasnya Timothy Thomas, seorang pemuda berkulit hitam, di tangan seorang polisi berkulit putih. Bagi warga keturunan Afrika di Cincinnati, tindakan polisi yang sewenang-wenang ini adalah cermin dari ketidakadilan rasial. Buat mereka, prasangka polisi sudah sedemikian buruknya sehingga setiap orang ber-

kulit hitam yang dianggap mencurigakan akan ditahan atau ditembak tanpa penyelidikan yang lebih saksama.

Tidak aneh, dengan amarah yang meluap, berbagai kelompok warga keturunan Afrika melakukan protes terhadap kematian Timothy Thomas. Pada hari pertama, ungkapan protes mereka di pusat kota berlangsung cukup tertib. Namun, di hari kedua berubah: mereka mulai melempar, membakar, dan menjarah. *The Cincinnati Enquirer*, salah satu koran lokal yang cukup ternama, menggambarkan bahwa saat itu sebagian kawasan kota yang mereka cintai sudah mirip Lebanon, sebuah daerah tak bertuan yang mengerikan.

Situasi tak berubah pada hari ketiga. Malah, sebagian warga kaum hitam sudah semakin kehilangan kendali. Mereka mulai menyakiti warga lainnya yang tak berdosa. Salah seorang di antara mereka bahkan menembak seorang polisi, yang untungnya waktu itu sedang memakai rompi anti-peluru.

Setelah penembakan polisi itulah Charles Luken lalu memutuskan pemberlakuan undang-undang darurat sipil. Dia dan para anggota DPRD Cincinnati, yang sebagian adalah politisi keturunan Afrika, tidak melihat pilihan lain. Mereka ingin mencegah terjadinya eskalasi kerusuhan dengan sikap tegas; kalau perlu, dengan senjata. Malah, Charles Luken juga menegaskan bahwa bila kerusuhan semakin meningkat dalam beberapa hari, ia tidak akan segan untuk meminta turunnya tentara cadangan, *The National Guard*, yang lebih terlatih untuk bersikap keras.

Yang menarik, keputusan Walikota Cincinnati seperti itu tidak diprotes secara luas oleh publik Amerika. Bahkan setelah keputusan itu diambil, pers nasional AS tidak menganggap Charles Luken melakukan tindakan kontroversial yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan dan hak-hak asasi. *The New York Times*, koran paling berpengaruh di AS, tidak menulis tajuk tentang hal ini. Berita mengenai kebijakan tegas di Cincinnati hanya dimuat di halaman A10.

Koran-koran lokal di Negara Bagian Ohio memang mengulas peristiwa itu dengan panjang-lebar. Berbagai sudut persoalan yang ada di Cincinnati dibahas dengan mendalam, seperti persoalan ketimpangan rasial, kemiskinan, dan prasangka polisi. Namun, tidak ada satu pun berita yang mempertanyakan atau mengkritik keputusan pemberlakuan situasi darurat sipil itu. Di koran-koran ini akan sia-sia kalau kita mencari kutipan dari kaum aktivis hak asasi manusia yang biasanya dikenal galak—di negeri orang ataupun di negeri mereka sendiri.

Mengapa publik Amerika diam saja terhadap pemberlakuan situasi darurat sipil itu? Apakah karena dalam hal ini sasarannya adalah kaum berkulit hitam? Saya kira tidak. Dalam satu hal, itu harus dimengerti secara historis. Dalam sejarah negeri ini, belum pernah terjadi peristiwa aparat keamanan memakai otoritas mereka yang khusus, seperti yang dimungkinkan oleh situasi darurat itu, untuk merebut kekuasaan dari kaum politisi. Rakyat Amerika tidak pernah mengalami hidup di bawah “rezim keamanan” dan, karena itu, mereka terbebas dari trauma sejarah yang banyak ditemukan di negeri sedang berkembang, termasuk di negeri kita.

Dalam hal lain lagi, hal itu mungkin lebih berhubungan dengan pandangan umum mengenai hubungan order dan kebebasan. James Madison, salah seorang perumus konstitusi AS pada akhir abad ke-18, pernah berkata bahwa tanpa ketertiban dan aturan hukum yang tegas, tidak akan ada kebebasan dan hak-hak asasi. Kedua hal terakhir ini harus diperjuangkan dan dijunjung tinggi oleh setiap individu, tapi semuanya harus berlangsung dalam kerangka hukum yang jelas dan tanpa merugikan atau membahayakan individu lainnya. Pandangan inilah yang menjadi semacam kesepakatan bersama, sebuah kontrak sosial yang mengatur hubungan rakyat dan pemerintah yang mereka pilih sendiri. Hal ini menjadi dasar filosofis yang dipegang teguh dan tak pernah dipertanyakan lagi.

Apa yang dilakukan oleh Walikota Charles Luken di Cincinnati, karena itu, bisa dilihat sebagai sebuah penegasan kembali pandangan semacam itu, dalam bentuknya yang sangat eksplisit. Jadi, kita tidak perlu heran jika keputusan dia berlalu begitu saja tanpa penolakan keras dari publik Amerika.

29 April 2001

Presiden Bush dan Pertaruhan Amerika

DRAMA AKBAR itu berakhir sudah. Rabu (13/12) malam pekan lalu, lewat pidato yang memukau, Wakil Presiden Al Gore dengan besar hati menerima kekalahannya dan menyampaikan selamat buat George W. Bush. Apa yang bermula sebagai konflik partisan antara dua kandidat dan dua partai politik mengenai jumlah suara yang mereka dapatkan dalam Pemilu 2000, berakhir dengan peneguhan kembali kebesaran Amerika. Dalam persaingan, mereka bertarung sepenuh hati seperti beruang yang terluka, tetapi setelah hakim bicara, semua pihak patuh dan menerima keputusan pengadilan, betapapun menyakitkan keputusan itu.

Tanggungjawab kepemimpinan di negeri pelopor demokrasi ini akan segera beralih ke pundak George W. Bush. Pada 20 Januari nanti dia akan disumpah sebagai Presiden ke-43 Amerika Serikat, menggantikan Bill Clinton. Di depannya sudah terbentang setumpuk masalah besar dan sejak sekarang dia harus meyakinkan rakyatnya, dia pantas mendapat kehormatan untuk memimpin mereka semua.

I'm a uniter, not a divider, saya seorang pemersatu, bukan pemecah-belah. Inilah mantra Bush selama masa kampanye

pemilu. Setelah dilantik nanti, tantangan pertama yang dihadapi adalah bagaimana ia mewujudkan mantra itu setelah persekutuan pasca-pemilu yang luarbiasa seru selama 36 hari. Ia harus mampu merangkul kembali pendukung Partai Demokrat yang merasakan kepahitan mendalam akibat kekalahan mereka di Florida. Sebagai presiden, Bush dituntut menunjukkan bahwa pemerintah yang dipimpinnya akan membela dan mengangkat nasib mereka.

Dalam dunia kebijakan, tantangan terbesar Bush bersumber pada masalah klasik dalam kapitalisme modern, yaitu bagaimana ia merumuskan kembali perimbangan peran negara dan pasar, bagaimana ia mengatasi tarik-menarik antara langkah-langkah birokratis dan aksi-aksi sukarela di masyarakat. Sebagai wakil kaum Republikan, agenda kebijakan Bush selama masa kampanye dengan jelas memperlihatkan, ia ingin mengikuti jejak Ronald Reagan dan mendorong perluasan peran pasar dengan inovasi-inovasi yang berani.

Hal ini, misalnya, terlihat dalam programnya melakukan pemotongan pajak yang besar (1,3 triliun dollar AS selama 10 tahun ke depan) dan pada saat yang sama mendorong langkah-langkah privatisasi program kesejahteraan sosial, *social security*. Program terakhir ini, yang dimulai Presiden Franklin D. Roosevelt pada 1935, adalah ikon paling penting negara kesejahteraan ala Amerika, dan karena itu sering dianggap sakral, bahkan juga oleh kaum Republikan.

Bagi Bush dan para penasihat terdekatnya, kedua pilihan kebijakan besar itu penting dilakukan mengingat dalam 10 tahun ke depan, karena pertumbuhan ekonomi yang pesat, pemerintah AS akan menikmati surplus besar, yaitu sekitar 2,2 triliun dollar AS. Surplus yang fantastis ini tidak boleh digunakan pemerintah untuk makin memperluas perannya. Rakyatlah yang harus langsung menikmati rezeki itu, dalam bentuk pemotongan pajak yang tidak pandang bulu, *across the board*.

Ketimbang kaum birokrat dan politisi, rakyatlah yang lebih tahu bagaimana membelanjakan uang sebesar itu.

Memang tidak begitu jelas bagaimana Bush bisa memotong pajak yang demikian besar sekaligus membiayai privatisasi program kesejahteraan sosial yang lebih sering dikenal sebagai program jaminan pensiun, sebagaimana diinginkannya. Namun, dalam pikiran dia dan para penasihatnya, Amerika tidak punya pilihan selain melakukan langkah berani ini, sebab tanpa privatisasi, program sosial terpenting itu akan bangkrut dalam satu generasi ke depan.

Kini tiga pekerja di AS menanggung seorang pensiunan (setiap pekerja harus membayar pajak jaminan kesejahteraan yang langsung digunakan negara federal untuk membiayai kaum pensiunan). Dalam 20 tahun, karena perkembangan demografis yang tidak terhindarkan, perimbangan ini akan menjadi 2,1:1. Artinya hanya sekitar dua orang yang bekerja untuk menanggung seorang pensiunan. Akibatnya, pada 2020, tanpa program privatisasi kesejahteraan sosial, negara tidak lagi mungkin membiayai puluhan juta kaum berumur yang kebanyakan menggantungkan hidupnya pada program itu. Bisa dibayangkan malapetaka seperti apa yang akan menunggu jika ini terjadi.

Singkatnya, Bush ingin agar pasar—bukan pemerintah serta kaum birokrat—yang berdiri di posisi terdepan menyongsong peluang menghadapi tantangan Amerika di masa depan. Inilah perbedaan hakiki antara Bush dan Gore, antara kaum Republikan dan kaum Demokrat, dan ini pula yang menjadi pertarungan politik terbesar dalam pemilu yang baru saja berakhir.

Pertanyaannya kemudian, mampukah Bush menghadapi tantangan-tantangan besar itu dan mewujudkan agenda politiknya? Dengan mandat memerintah yang amat terbatas karena dia hanya mengalahkan Al Gore dengan selisih suara amat tipis, bisakah Bush mengambil langkah-langkah besar dan berani?

Hanya sejarah yang akan menjawab semua itu. Hambatan yang ada di depan Bush kini luarbiasa besar, seperti Gunung Himalaya politik yang sulit didaki. Dari hasil Pemilu 2000, komposisi kursi di Kongres terbagai hampir sama rata antara kaum Republikan dan kaum Demokrat. Di Senat (lembaga perwakilan negara bagian) perimbangannya persis 50-50 dan di House of Representatives (DPR) kaum Republikan hanya unggul 11 kursi, sebuah jumlah yang jauh dari memadai untuk mendukung agenda politik Bush.

Dalam sistem politik AS, jika perimbangan seperti itu terjadi, biasanya yang akan tercipta adalah apa yang sering disebut *political gridlock*, kebuntuan politik. Dalam situasi semacam ini, tidak satu pun inisiatif kebijakan mendasar dapat dilahirkan.

Satu-satunya cara agar Bush bisa menghindari situasi demikian adalah dengan berusaha merangkul kaum Demokrat yang moderat, yaitu mereka yang selama ini dikenal sebagai *The New Democrats*. Ia harus bisa melakukan hal ini tanpa meninggalkan basis pendukungnya di Partai Republik, dan tanpa berkompromi terlalu jauh dalam pelaksanaan agenda yang sudah ia janjikan selama pemilu.

Semua hal itu amat tidak mudah. Satu-satunya harapan, Bush mungkin bisa berhasil mengatasinya terletak pada kualitas kepemimpinan Bush sebagaimana tercatat selama dia memainkan peran sebagai Gubernur Texas, salah satu negara bagian terbesar di AS.

Bush bukan seorang ideolog, dan dia tidak memiliki minat untuk menjadi filsuf-negarawan. Namun, selama memimpin Texas, dia membuktikan dirinya sebagai seorang *deal-maker* ulung, dengan kepribadian menarik yang dengan alamiah gampang menarik simpati banyak orang. Di negara bagian yang

kaya minyak ini, Bush amat berhasil dalam bekerjasama dan menarik dukungan kaum Demokrat.

Apakah langkah-langkahnya yang berhasil di Texas juga bisa diterapkan di Washington DC? Sebagian pengamat cukup skeptis terhadap hal ini. Tetapi, sebagian lagi tetap menaruh harapan besar. Kalau kaum skeptis yang benar, pada Pemilu 2004 kita akan melihat Al Gore (atau Senator Hillary Clinton) merontokkan pemerintahan Bush. Namun, jika kaum optimistis yang benar, George W. Bush akan mencatatkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Amerika, sebagaimana yang dilakukan Ronald Reagan lebih sepuluh tahun lalu.

19 Desember 2000

Setelah Perang

PERANG USAI SUDAH, dan kini kita bertanya bagaimana nasib Irak selanjutnya. Sejarah akan menilai Perang Teluk II bukan pada prosedur terjadinya, melainkan pada hasil akhirnya, yaitu Irak yang demokratis dan meninggalkan segala kepahitan yang dialaminya di bawah kepemimpinan Saddam Hussein. Kalau hal ini tercapai, Perang Teluk II akan dicatat sebagai perang yang membebaskan, bukan sebaliknya.

Sejauh ini cukup banyak kalangan yang meragukan bahwa Irak akan mengikuti keberhasilan Jepang dan Jerman. Di akhir Perang Dunia II, kedua negeri ini porak-poranda (jauh lebih buruk ketimbang Irak) dan diduduki oleh pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Tapi setelah itu, yang terjadi adalah keajaiban. Dalam satu dekade, keduanya menjadi negeri demokrasi yang stabil. Dan setelah itu, dari puing-puing kehancuran, mereka tumbuh menjadi dinamo ekonomi yang bahkan dapat menyaingi negeri-negeri penakluk mereka.

Irak tidak mungkin mengulang pengalaman kedua negeri itu. Masyarakat Jepang dan Jerman adalah masyarakat yang relatif homogen, sementara masyarakat Irak terpecah tajam dalam garis-garis etnis dan agama. Jauh sebelum PD II, Jepang dan Jerman telah mengadopsi modernitas dan telah tumbuh

menjadi dinamo industri. Jepang pada 1905 telah mengalahkan Rusia pada saat Irak masih di bawah penaklukan Imperium Ottoman.

Singkatnya, bagi kaum yang pesimistis, Irak dalam tahun-tahun mendatang adalah negeri yang akan semakin terperosok dalam kalam, dengan siklus kekerasan yang tanpa henti. Nasib Somalia dan Haiti, bukannya Jepang dan Jerman, adalah masa depan Irak.

Tapi betulkah? Tentu saja jalan Irak akan lebih panjang dan sulit ketimbang apa yang telah dialami Jepang dan Jerman. Masyarakat Irak memang terbelah dalam garis etnis (Arab dan Kurdi) dan agama (Sunni dan Syiah). Tapi kemajemukan bukanlah musuh demokrasi. Dengan konstruksi sistem politik yang tepat, ia malah dapat menjadi sumber kekuatan.

Saya setuju dengan pandangan Thomas Friedman, kolumnis *The New York Times* yang tajam itu, bahwa keunikan Irak adalah karena ia merupakan satu-satunya negeri di dunia Arab yang memiliki empat hal sekaligus, yaitu minyak, air, otak, dan tradisi sekularisme. Arab Saudi dan Kuwait hanya memiliki minyak, Israel cuma punya otak, sementara di Suriah dan Mesir hanya ada air dan tradisi sekularisme.

Dengan modal semacam itu, tidak ada alasan bangsa Irak tidak bisa mulai membangun negerinya. Dengan jatuhnya rezim Saddam Hussein, peluang itu sekarang terbuka. Kalau ada yang bisa Irak pelajari sekarang dari Jepang dan Jerman, hal itu terletak pada kemampuan kedua negara ini untuk segera melupakan kepahitan masa lalu dan lebih memikirkan masa depan segera setelah perang usai. Menolak sikap *defeatism*, bangsa Jepang dan Jerman tidak mengorek luka mereka terus-menerus. Bahkan terhadap AS, sang penakluk mereka, kedua negeri ini bersikap konstruktif. Bukannya meminta AS segera hengkang setelah situasi normal kembali, Jepang dan Jerman justru menggunakan negeri adikuasa ini untuk terus membela

dan membantu mereka dalam masa-masa sulit selama Perang Dingin, bahkan hingga saat ini.

Memang, keberhasilan Irak juga tidak ditentukan hanya oleh diri mereka sendiri, setidaknya untuk saat ini. Sekarang peranan AS adalah sebuah *force majeure*. Tidak ada yang dapat memulihkan kembali hukum dan ketertiban di Irak dalam dua atau tiga bulan ke depan kecuali kekuatan AS (kekuatan PBB hanya macan kertas, sebagaimana terbukti di Bosnia dan Rwanda beberapa tahun silam). Negeri penakluk ini harus menjamin bahwa infrastruktur dan berbagai kebutuhan dasar kembali tersedia, serta birokrasi pemerintahan yang minimal dapat berfungsi kembali. Namun, setelah itu apa?

Yang saya khawatirkan adalah, karena desakan politik dalam negeri atau karena hal lainnya, AS cepat angkat kaki dari Irak, seperti yang terjadi di Somalia setelah puluhan tentaranya tewas oleh amukan massa. Fareed Zakaria menulis di majalah *Newsweek* pekan silam bahwa Negeri Abang Sam bisa segera henggang atau membantu membangun demokrasi di Irak, tetapi tidak keduanya sekaligus.

Sejak awal, selain alasan keamanan nasional, Presiden Bush dan para pembantunya, seperti Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Condoleeza Rice, dan Paul Wolfowitz, menyiratkan bahwa perang terhadap rezim Saddam Hussein dilakukan berdasarkan prinsip *democratic imperialism*.

Dalam menjalankan peran sebagai imperator demokrasi, AS tentu bisa bertindak bijaksana dengan mengajak semakin banyak negara untuk terlibat di dalam proses pemerintahan transisi dan pembangunan kembali infrastruktur Irak. Dalam hal ini peran PBB sangat penting, setidaknya untuk memperkuat aspek legitimasi dan meyakinkan rakyat Irak bahwa dunia bersama mereka. Setelah Perang Dunia II, Sir Winston Churchill pernah berkata, *in war resolution, in peace magnanimity*. Kearifan ini harus di-suarakan kembali oleh Presiden Bush dan para pembantunya.

Setelah lima tahun menjadi semacam prokonsul Romawi di Jepang, Jenderal MacArthur kembali ke negerinya dengan diiringi tangis oleh sebagian warga di Tokyo. Dua tahun setelah kepergian MacArthur, AS memulihkan sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Jepang, yang samasekali sudah meninggalkan cirinya yang militeristik dan otoriter. Dengan kebijakan yang tepat, dan juga sedikit keberuntungan, hal itu. bukan tidak mungkin terulang di Irak.

Yang jelas, jika Irak memang bisa memanfaatkan peluang yang sekarang terbuka, di kawasan Timur Tengah akan muncul sebuah model negara yang baru samasekali. Di kawasan ini demokrasi dan pembangunan ekonomi adalah kata-kata yang asing. Sebagaimana Jepang memberi contoh keberhasilan pada negeri-negeri di Asia Timur, Irak bisa menjadi mercusuar dan memulai sebuah proses yang menguak harapan negeri-negeri tetangganya.

27 April 2003

Sirkus Amerika?

BAGI JUWONO SUDARSONO, panggung politik Amerika Serikat saat ini sudah menyerupai sirkus (*Gatra*, 5 Juli 1997). Dengan sejumlah aktor pemeran—seperti senator, presiden, pengusaha, aktivis buruh, dan wartawan—Amerika mempertontonkan proses politik yang hanya layak menjadi bahan tertawaan.

Betapa tidak? “Untuk beberapa bulan selama 1995-1996,” tulis Juwono, “Gedung Putih berubah menjadi hotel penginapan orang-orang Asia.” Dengan contoh ini, antara lain, Juwono ingin menggambarkan bahwa sirkus Amerika itu ternyata adalah pertunjukan yang dimaksudkan bukan untuk menyenangkan penontonnya (yaitu rakyat Amerika), melainkan hanya untuk mengeruk keuntungan buat para pemeran sirkus itu sendiri. Para pemain sirkus itu berkolusi!

Bisakah sirkus itu diubah, direformasi? Tak mungkin lagi. Bagi Juwono, panggung politik Amerika sudah sedemikian parah sehingga usaha perubahan apapun pasti akan sia-sia. Sambil mengutip sebuah film klasik Hollywood, *Mr. Smith Goes to Washington*, Juwono berkata bahwa tipe politikus seperti Mr. Smith, seorang politikus yang jujur dan idealis, sudah tak mungkin lagi ditemukan di Washington. Zaman bagi aktor politik yang jujur sudah lewat.

Apa yang bisa kita katakan terhadap “analisis” politik Amerika seperti ini? Pertama-tama tentu kita bisa perlihatkan kepada Juwono, beberapa fakta yang disodorkannya, kalau bukan keliru, sangatlah bersifat selektif. Katakanlah soal Gedung Putih yang menurutnya berubah menjadi “hotel penginapan orang-orang Asia”, selama beberapa bulan itu. Memang beberapa “kawan dekat” Clinton yang berkebangsaan Asia diundang menginap di Gedung Putih, termasuk di antaranya barangkali adalah James Riady, bos Grup Lippo. Tak perlu diragukan lagi bahwa selain sopan santun perkawanan, undangan menginap ini juga pasti bermotif ekonomi (Clinton butuh dana kampanye).

Tapi kita tak boleh lupa bahwa selama masa kepresidenan Clinton, ribuan orang sudah berkunjung ke Gedung Putih, dan ratusan di antaranya sempat diundang menginap oleh keluarga Clinton. Jadi para pengusaha Asia itu hanya sebagian kecil dari “tamunya istana”. Sebagian besar lainnya malah, menurut Harian *The New York Times*, bukanlah pengusaha. Mereka berasal dari berbagai kalangan: artis, penyair, penulis, pemenang Hadiah Nobel, kawan lama Clinton dan Hillary, tokoh masyarakat, serta bekas pejabat.

Dengan kata lain, kalau kita tak terlalu selektif memilih fakta seperti yang dilakukan Juwono, kita justru bisa berkata bahwa beragamnya tamu yang menginap di Gedung Putih sesungguhnya bisa menjadi semacam simbol yang mencerminkan betapa pusat kekuasaan di Amerika bersifat terbuka. Pusat kekuasaan tak dianggap anker, terisolasi, *unfriendly*. Berapa banyak sih istana kepresidenan di dunia ini yang demikian terbuka bagi publik?

Selain pemilihan fakta yang selektif seperti itu, Juwono tampaknya terlalu terpaku pada eksekusi, sehingga lupa untuk lebih memperhatikan substansi proses politik serta hakikat kekuasaan di Amerika.

Memang seringkali politisi dan pemimpin di Negeri Paman Sam ini bertindak aneh-aneh, menurut ukuran kita. Apa yang mereka lakukan sering menggelikan, seperti pemain sirkus politik. Lebih jauh lagi, dalam banyak forum publik, sikap saling menuduh dan saling menyalahkan sering muncul di antara mereka. Mereka saling sikat dan saling sikut. Kalau Thomas Hobbes, filsuf Inggris di abad ke-17, hidup lagi sekarang, maka dia mungkin berkata bahwa kebenaran teorinya ternyata sudah terbukti di Washington: seorang politikus adalah srigala bagi politikus lainnya.

Mengapa eksekutif-eksekutif seperti ini sampai terjadi? Sebabnya tak lain adalah tingkat kompetisi politik yang sangat tinggi. Di Amerika tak dikenal sistem komando dan sistem penyeragaman. Politisi mereka tak mengenal metode 4-D (datang, duduk, diam, duit). Kalau “mandataris” mereka, yaitu Presiden Clinton, bilang A, jangan harap kemudian akan terdengar suara kor berkepanjangan menyerukan A.

Politisi Amerika harus bertarung, beradu argumen untuk memengaruhi kebijakan publik. Ia harus membuktikan bahwa ia memang layak mewakili kepentingan kelompok yang memilihnya. Kalau tidak, ia tak lagi akan terpilih dalam pemilihan berikut.

Dengan tingkat kompetisi yang tinggi semacam ini, Amerika dapat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakatnya yang sangat majemuk. Rakyat Amerika adalah rakyat yang cerewet, kritis, dengan kepentingan yang sangat beragam. Dengan rakyat seperti ini, wajar saja jika politisi mereka harus pula menari-nari dengan banyak kepentingan, tuntutan, dan harapan.

Tentu, dalam proses penyaluran aspirasi politik, bisa terjadi bermacam eksekutif, seperti yang berusaha digambarkan oleh Juwono. Tapi kita harus mengerti, eksekutif adalah eksekutif, produk sampingan yang ada atau tidaknya sebenarnya tak terlalu penting.

Kalau eksek-eksek itu bisa dihilangkan, masyarakat Amerika pun pasti akan bersyukur. Kalau tidak, *no big deal*. Yang penting bagi mereka, substansi proses politik Amerika terus berjalan, yaitu proses perwakilan masyarakat majemuk terbuka.

12 Juli 1997

Demokrasi Amerika

AMERIKA DIKUASAI oleh oligarki elite. Sumber kekuasaan oligarki ini: uang. Inilah pendapat dasar Juwono Sudarsono tentang politik Amerika sebagaimana dituliskannya di *Gatra* akhir-akhir ini.

Di Gettysburg pada 1863 Abraham Lincoln berpidato tentang Amerika. Amerika, kata Lincoln, adalah sebuah negeri “yang dipersembahkan bagi sebuah gagasan bahwa manusia diciptakan sama”. Dan karena itu pemerintahan Amerika diatur mengikuti semboyan: “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat”.

Kalau Juwono benar, kita hanya bisa mencibirkan idealisme Lincoln semacam ini. Sebab hingga kini politik Amerika ternyata diatur hanya oleh segelintir elite yang berkantong tebal di Washington. Pendapat Juwono ini tergolong sangat keras. Agar pendapat sekeras ini tak menjadi retorika belaka, Juwono harus mendukungnya dengan argumen yang kukuh dan bukti yang meyakinkan. Sayangnya, kedua hal ini tak kita temukan.

Ralph Nader dan Hedrick Smith—yang dikutip Juwono untuk mendukung argumennya—tak dianggap serius dalam dunia pemikiran di Amerika. Mereka lebih dianggap sebagai *popularizers of ideas*. Pendapat Smith, misalnya, bahwa dasar kekuasaan politik di Amerika adalah “uang, uang, dan uang”, bersumber pada asumsi Marxisme yang paling vulgar. Dengan

argumen semacam ini sulit bagi kita untuk mengerti kompleksitas dinamika politik.

Analisis Juwono, dalam banyak hal, bersumber pada argumen C. Wright Mills, seorang pemikir yang lebih serius ketimbang Nader dan Smith. Walaupun dikemukakan pada akhir 1950-an, argumen Mills ini hingga sekarang masih cukup populer di berbagai kalangan. Salah satu sebabnya: ia memungkinkan kita sangat menyederhanakan masalah dan kemudian menuding.

Di mana kelemahan Mills dan Juwono? Di negeri mana pun—demokratis atau tidak, di Washington atau di Jakarta—selalu ada lapisan elite. Hal ini sangat *trivial*, kita bisa memakluminya tanpa harus berpikir keras. Yang sesungguhnya relevan sebagai persoalan politik adalah sifat kekuasaan para elite itu. Inilah yang membedakan antara sistem yang demokratis dan yang otoriter.

Mills agaknya tak menyadari persoalan sederhana ini. “Konsep elite kekuasaan,” kata Mills menjelaskan dalam bukunya yang terkenal, *The Power Elite*, “tak terkait samasekali dengan cara pengambilan keputusan. Konsep ini berhubungan dengan siapa yang terlibat dalam proses tersebut”. Dengan konsep seperti ini, Mills dengan sadar tak mempedulikan sifat kekuasaan politik. Sebaliknya, yang ia tekankan adalah komposisi aktor politik.

Ketidakpedulian Mills terhadap sifat kekuasaan politik dan sebaliknya perhatian Mills yang terpusat pada siapa yang berkuasa itulah yang mengaburkan pandangannya tentang persoalan politik dan demokrasi di Amerika. Ketidakpedulian semacam inilah yang secara konseptual tak memungkinkan Mills membedakan antara Jefferson dan Lenin, antara Roosevelt dan Hitler. Dan ini pula yang menjebak tokoh-tokoh teori tentang elite lainnya, seperti Mosca dan Michels.

Jika sifat kekuasaan dijadikan kriteria utama maka pertanyaan penting yang berhubungan dengan demokrasi adalah:

Apakah kontrol terhadap elite politik berjalan? Apakah pemilihan terhadap mereka fair dan terbuka? Bagaimana cara mereka mengambil keputusan? Apakah pers dibredel? Dan di hadapan kriteria-kriteria inilah potret kita terhadap politik Amerika tak sederhana tudingan Juwono.

Dalam proses pengambilan keputusan, misalnya, yang paling penting dalam sistem Amerika adalah mekanisme yang memungkinkan perdebatan terbuka di antara para elite di Kongres, Senat, dan Gedung Putih. Tentu saja kombinasi kekuatan uang, ide, karisma pribadi, dan organisasi memengaruhi hasil akhir perdebatan ini. Tapi semua ini tak bisa menghilangkan fakta dasar bahwa, di antara para elite di Washington, perdebatan terbuka berlangsung terus-menerus. Dan rakyat, berkat pers yang bebas, menyaksikannya secara luas.

Kalau kita ikuti, perdebatan dalam perumusan kebijakan di Kongres, Senat, dan Gedung Putih sering berlangsung bertele-tele dan sering emosional. Hal ini untuk sebagian orang membosankan dan berlebihan. Tapi justru di balik perdebatan yang berkepanjangan itu terletak esensi sifat kekuasaan Amerika. Perdebatan-perdebatan ini sesungguhnya adalah bentuk tawar-menawar yang terus-menerus antara penguasa dan rakyat.

Gingrich dan Clinton—sebagaimana elite politik di negeri mana pun—memang “memerintah” dan merumuskan kebijakan. Dan rakyat—sebagaimana rakyat di mana pun—berada di tepi panggung. Tapi di negeri Jefferson dan Lincoln ini mekanisme yang menghubungkan rakyat dan para elite adalah tawar-menawar itu, persuasi, argumen, dan pada akhirnya kepercayaan. Di negeri yang otoriter hubungan rakyat dan penguasa lebih ditopang kecemasan dan sinisme.

Semua ini tak berarti bahwa demokrasi Amerika adalah demokrasi yang sempurna. Pidato Lincoln di Gettysburg itu betapapun adalah sebuah ideal yang tak boleh kita kacaukan dengan kenyataan.

Barangkali ada segi-segi dan argumen Juwono yang cukup menggambarkan beberapa kelemahan demokrasi di Amerika. Namun jika argumen seperti ini disampaikan berulang-ulang dan disimpulkan terlalu jauh, ia bukan saja akan mengaburkan potret besar demokrasi Amerika, melainkan juga, seperti yang dikatakan Daniel Bell terhadap pikiran-pikiran Mills, akan memberi kesan bahwa setiap kekuasaan politik—demokratis atau tidak—pada dasarnya adalah konspirasi gelap. Dan karena itu hanya meluaskan sinisme terhadap cita-cita pencapaian masyarakat yang lebih bebas.

5 Agustus 1997

Demokrasi, Alan Greenspan, dan Sembilan Sulaiman

DEMOKRASI HANYA BISA BERJALAN BAIK bila yang memegang kekuasaan bukan cuma rakyat dan wakilnya. Suara rakyat memang suara Tuhan, namun dalam beberapa hal penting suara ini harus sayup, bahkan tak boleh terdengar. Inilah kenyataan dalam demokrasi modern, sebagaimana terjadi di Amerika Serikat, yang jarang kita pahami.

Salah satu contoh terbaik dari hal itu adalah peranan Alan Greenspan. Dirut Bank Federal AS ini sering dianggap sebagai manusia paling berkuasa di Washington DC. Presiden dan wakil-wakil rakyat di kongres bisa memainkan tarif pajak, mengirim tentara ke Kosovo, membatasi tindakan aborsi dan sebagainya. Namun, hanya Alan Greenspan yang berhak mengambil keputusan dalam menentukan kebijakan moneter.

Dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga, dia bisa mengharu-birukan ekonomi AS, dalam hitungan detik. Uang adalah darahnya kapitalisme modern, dan tingkat suku bunga berfungsi sebagai katup yang menentukan seberapa banyak darah itu mengalir untuk memutar roda perekonomian. Kalau Greenspan gila sedikit, bursa saham di Wall Street akan gunjang-ganjing dan jutaan orang bisa kehilangan pekerjaan.

Jika ia bertindak bijaksana, para investor akan lega dan pertumbuhan ekonomi bisa berlangsung pesat, sebagaimana terjadi dalam delapan tahun terakhir di bawah pemerintah Bill Clinton. Tidak heran, tokoh pertama yang dikunjungi George W. Bush di Washington DC setelah ia dinyatakan sebagai pemenang Pemilu 2000 adalah Alan Greenspan, bukan Bill Clinton atau tokoh-tokoh politik lainnya.

Berbeda dengan posisi seorang presiden atau para politisi di Kongres, kekuasaan Greenspan tidak berdasarkan pada pilihan rakyat. Ia memang diangkat oleh presiden dan disetujui Senat, lembaga perwakilan negara bagian. Tetapi setelah itu, ia bebas melakukan apapun. Dalam hal ini, ia bertindak sebagai seorang *Platonic guardian*, Sang Penjaga Kemaslahatan Bersama yang terpisah dan dipisahkan dari dinamika politik. Tanpa dipengaruhi suara dan desakan rakyat, ia mengelola elemen terpenting dari perekonomian Amerika hanya bertolak pada apa yang dianggapnya baik dan perlu.

Selain peran Alan Greenspan, contoh lainnya adalah peran sembilan hakim agung di tingkat pusat (pemerintah federal). Kesembilan tokoh inilah yang mengambil keputusan final dalam segala hal yang menyangkut hukum dan keadilan. Di atas mereka tidak ada lagi otoritas yang lebih tinggi. Karena itu, mereka kerap disebut kalangan pers AS sebagai *The Nine Solomons*, Sembilan Sulaiman.

Otoritas hukum adalah fondasi tiap negara modern, sama dengan peranan uang dalam ekonomi modern. Setiap tindakan individu yang berdampak pada individu lainnya diatur dan dibatasi oleh hukum. Jadi bisa dibayangkan betapa mendasarnya kekuasaan Sembilan Sulaiman itu. Bahkan dalam pemilihan presiden pun, jika kebuntuan politik terjadi seperti kita saksikan beberapa saat lalu dalam Pemilu 2000, merekalah yang memberi keputusan terakhir untuk menentukan siapa yang berhak muncul sebagai pemenang.

Sama dengan Greenspan, hakim-hakim agung ini diangkat oleh presiden dengan persetujuan Senat. Tetapi, lebih dari Greenspan, mereka berkuasa praktis untuk seumur hidup. Setelah diangkat, mereka tidak dapat diganti dan tidak lagi dapat dikontrol siapapun. Agar tak terjangkau desakan rakyat dan tarik-menarik kepentingan politik, mereka ditempatkan di langit kekuasaan. Tidak lebih dan tidak kurang, merekalah aktor-aktor yang oleh Plato, pemikir Yunani klasik itu, disebut sebagai filsuf-negarawan.

Keterbatasan Demokrasi

Mengapa peranan semacam itu harus ada? Mengapa sistem demokrasi modern membiarkan dua hal terpenting dalam kehidupan masyarakat, yaitu uang dan hukum, diatur oleh tokoh-tokoh yang tak terpilih dalam pemilu dan karena itu tidak bertanggungjawab langsung terhadap rakyat? Bukankah rakyat yang paling berkuasa dalam setiap sistem demokrasi?

Jawabannya sederhana. Berbeda dengan yang dikatakan Jean-Jacques Rousseau, filsuf romantik Prancis pra-Revolusi, rakyat tidak memiliki kepentingan tunggal yang bersifat umum. Dengan menyebut “rakyat”, kita sebenarnya menyederhanakan sebuah mozaik kepentingan yang rumit. Baik kaum pengusaha maupun pekerja, misalnya, merupakan bagian sah dari rakyat. Kedua kelompok ini adalah warganegara yang membayar pajak dan menjadi subyek yang dilindungi hukum yang sama. Namun, kepentingan keduanya bisa berbeda, atau dalam beberapa hal tertentu mungkin berlawanan. Di antara kaum pengusaha pun, sebagaimana juga terjadi di antara kaum pekerja, ada beragam kepentingan yang tidak selalu seiring.

Bayangkan kekacauan yang akan terjadi jika arus peredaran uang harus senantiasa mengikuti dinamika kepentingan yang kompleks itu. Para politisi yang membawa kepentingan kaum pengusaha akan mendesak otoritas moneter untuk menurunkan

suku bunga, tanpa peduli pada risiko-risiko jangka panjang bagi keseluruhan sistem perekonomian. Para politisi yang dekat dengan kaum buruh akan melakukan desakan lain lagi. Singkatnya, tingkat suku bunga akan mencerminkan pertimbangan kekuatan dan tarik-menarik kepentingan politik, bukan pertimbangan faktor-faktor fundamental dalam ekonomi. Setiap ekonom tahu, hal ini dalam jangka panjang akan membawa sistem perekonomian ke tepi jurang yang terjal.

Dalam dunia hukum, akibatnya juga tidak berbeda. Hukum hanya menjadi kepanjangan tangan proses politik. Para hakim akan berubah menjadi kaum aktivis yang mewakili kepentingan-kepentingan praktis dalam masyarakat. Hukum menjadi budak rakyat, dan kelompok rakyat yang paling kuat akan menjadi Tuhan yang memegang komando atas segalanya. Pada ujungnya yang akan terjadi dengan semua itu adalah hilangnya batas antara kekuasaan dan keadilan, antara kekuatan dan kebenaran.

Dengan kata lain, rakyat bukan entitas yang seragam, sempurna dan serba mulia. Ketidaksempurnaan inilah yang mengharuskan sistem demokrasi mengerti batas-batasnya dan membiarkan tokoh-tokoh seperti Alan Greenspan dan Sembilan Sulaiman memainkan peranan vitalnya.

Demokrasi Amerika tahan uji dan berjalan relatif efektif antara lain karena kesadaran akan keterbatasan demokrasi seperti itu berakar cukup dalam, baik di kalangan elite maupun rakyat umumnya.

Pelajaran

Bagi kita, itulah pelajaran berharga. Sebagai negeri yang baru mulai menciptakan dasar-dasar sistem demokrasi, kita harus menyadari bahwa sistem yang ideal ini memiliki sejumlah keterbatasan. Karena itu, kita memerlukan lembaga-lembaga tertentu, seperti Bank Indonesia dan Mahkamah Agung, untuk berperan tanpa dicampuri kekuatan rakyat maupun kekuasaan elite politik.

Sejauh ini, sayangnya, kesadaran demikian masih sering tersingkirkan oleh dinamika percaturan kekuasaan politik. Apa yang terjadi pada Bank Indonesia dan proses pemilihan Ketua Mahkamah Agung belakangan ini menggambarkan hal itu. Sama dengan pada era-era sebelumnya, kedua lembaga penting ini masih terlalu banyak berperan sebagai kepanjangan tangan pihak-pihak di luar dirinya.

Proses penyusunan pembagian kerja serta pembatasan kekuasaan memang tidak mudah, apalagi jika menyangkut hal-hal fundamental, seperti hukum dan uang. Tetapi kita harus belajar melakukannya mulai sekarang. Kalau tidak, kapan lagi?

15 Januari 2001

Barack Obama: Superstar Politik Jalan Tengah

SETIAP GENERASI di Amerika Serikat tampaknya selalu memunculkan seorang *superstar* politik. Kali ini Barack Obama, 45 tahun, yang tampil mengisi peran itu. Ia muncul secara tak terduga dan dalam waktu relatif singkat mampu mengubah peta politik, menumbuhkan harapan dan gairah baru.

Demokrasi Amerika menjadi semakin hidup. Hillary Clinton telah membuka kemungkinan bagi sebuah sejarah baru, presiden perempuan pertama di negeri Paman Sam. Kini Obama juga menjanjikan hal yang sama: presiden kulit hitam pertama di negeri yang sama.

Konvensi Partai Demokrat dan pemilu presiden memang masih setahun lagi, tapi sejak saat ini pun daya tarik kompetisi politik yang dilakoni oleh tokoh-tokoh menarik dan berbakat (di Partai Republik ada Rudy Giuliani, pahlawan peristiwa 9/11, dan John McCain, pahlawan Perang Vietnam) sudah mulai mencuri perhatian publik.

Di kalangan Partai Demokrat sendiri, kemunculan Obama tak urung membuat kubu Hillary Clinton kalang kabut. Semula senator dari New York dan mantan *First Lady* ini dianggap sebagai kandidat teratas. Akan tetapi, sekarang posisi itu mulai goyah, dan momentum politik beralih ke Obama.

Obama yang melewati masa kecilnya di Indonesia ini (dia menyebut dirinya sebagai *Jakarta's street kid*) sekarang sedang menunggangi gelombang pasang yang terus membawanya ke posisi yang semakin tinggi. Di mana letak kekuatan *superstar* baru ini?

Sama dengan Bill Clinton dan Ronald Reagan sebelumnya, Obama memiliki kemampuan sebagai orator dengan pribadi yang karismatik. Kefasihan dan caranya berbicara, tekanan suaranya, tatapan matanya, gerak tubuhnya: semua elemen-elemen dasar ini saling memperkuat dan memunculkan citra seorang pemimpin yang sungguh-sungguh, kredibel, menawan, dan membangkitkan simpati serta harapan sekaligus. Kekuatan karisma inilah yang melembutkan kritik yang banyak ditujukan terhadapnya sebagai seseorang yang masih hijau dalam panggung pemerintahan.

Selain itu, pengalaman hidupnya juga merupakan manifestasi *The American Dream* itu sendiri. Sama seperti Colin Powell, dari keluarga menengah bawah Obama berhasil meniti tangga sukses menjadi senator kulit hitam ke-3 dalam sejarah AS, setelah sebelumnya menjadi dosen di Universitas Chicago, senator di Negara Bagian Illinois, dan presiden dari jurnal bergengsi, *Harvard Law Review*, sewaktu ia masih belajar di Universitas Harvard, salah satu perguruan tinggi terbaik di AS. Publik Amerika mudah jatuh hati pada cerita sukses semacam ini, apalagi oleh seorang anak muda kulit hitam yang tak suka mengeluh dan menyalahkan situasi di sekelilingnya, termasuk sejarah perbudakan di Amerika.

Penulis Besar

Tidak kurang dari semua kelebihan yang dimilikinya, daya tarik Obama terletak pada ide-ide yang dilontarkannya dan kemampuannya sebagai seorang penulis. Memoar yang ditulisnya sepuluh tahun lalu, *Dreams from My Father*, tentang masa

kecilnya hingga menyelesaikan kuliahnya, tentang keluarga dan lingkungan dekatnya di Chicago, kini menjadi *bestseller* dan oleh kolumnis terkenal majalah *Time*, Joe Klein, dianggap sebagai salah satu memoar terbaik yang pernah ditulis seorang politisi Amerika. Dengan memoar semacam ini, jika Obama tidak meniti karier di dunia politik, barangkali ia tetap bisa tumbuh dan mengukir nama harum sebagai salah satu penulis besar Amerika.

Bukunya yang terbaru, *The Audacity of Hope*, dalam waktu singkat juga telah menempati posisi *bestseller*. Sama dengan *Dreams*, dalam buku ini kita bisa melihat betapa Obama memiliki sensibilitas yang tinggi terhadap dimensi-dimensi manusiawi dari setiap persoalan yang ditemuinya. Ia sangat peka terhadap ironi dan tragedi dalam interaksi sosial, serta mampu menceritakan semua itu dalam penuturan yang sederhana namun cerdas dan mengalir mengenai orang-orang yang pernah bersentuhan dengannya.

Namun, berbeda dengan buku sebelumnya, kali ini Obama menulis tentang dunia kebijakan, politik, masalah sosial, agama, hingga hubungan internasional. Ia menulis dengan mata yang tertuju pada Gedung Putih, dan karena itu menawarkan sebuah *platform* kebijakan dari seorang kandidat presiden. Dan, dalam melakukannya, ia tidak terjebak dalam analisis-analisis yang kering, tetapi membingkainya dengan anekdot, cerita, dan ungkapan-ungkapan yang memberi jiwa pada analisis-analisis tersebut.

Di situlah terletak salah satu kekuatan buku ini. Setiap persoalan politik atau isu kebijakan selalu dimulai dan diakhiri dengan cerita tentang manusia, tentang kepedihan dan harapannya, tentang kekuatan dan kelemahannya. Di sini ia memperlihatkan bahwa dunia politik dan kebijakan tidak berada di ruang hampa, tetapi berhubungan langsung dengan nasib dan kehidupan manusia-manusia yang riil.

Politik Jalan Tengah

Dari segi substansi dan spektrum ide-ide yang ditawarkannya, Barack Obama bisa digolongkan sebagai politisi moderat dari tradisi liberal Amerika. Atau secara lebih sederhana ia bisa disebut sebagai *the third way politician*, politisi jalan tengah dalam tradisi yang telah dirintis Bill Clinton dan Tony Blair. Hal inilah yang membedakan Obama dengan banyak politisi kulit hitam yang cenderung memilih garis ekstrem, baik di kiri (Jesse Jackson) maupun di kanan (Alan Keyes).

Dalam membangun ekonomi Amerika, ia mengakui pentingnya peran mekanisme pasar, namun ia tetap ingin mengembangkan peran negara yang sehat dan efektif. Dalam kehidupan keagamaan, ia bisa bersimpati terhadap kaum konservatif, namun ia mengerti betul bahwa tradisi sekularisme Amerika adalah tradisi sakral yang harus terus-menerus diperkuat. Dalam menjembatani perbedaan kaum Demokrat dan kaum Republikan, ia ingin membangun *a vital center*, sebuah konsensus bersama yang mempertemukan secara kreatif pandangan-pandangan yang bertentangan.

Hampir dalam setiap isu, hal semacam itulah yang kita temui dalam buku setebal 375 halaman ini. Intuisi Obama adalah mencari moderasi dan jalan tengah. Ia ingin merangkul sebanyak mungkin kalangan. Untuk itu, ia bahkan sanggup mencari kebenaran pada lawan-lawan politiknya dan mengakui bahwa kaum Republikan seringkali memiliki pandangan yang lebih baik.

Kaum pengkritik Obama barangkali dapat menemukan titik lemah dalam pandangan dan intuisi seperti itu. Sebagian orang bisa berkata bahwa intuisi demikian sudah menjadi sebuah obsesi. Sementara sebagian lagi dapat menuduh bahwa jalan tengah bukanlah sebuah jalan ke luar, melainkan sebuah pelarian, sebuah jalan pintas untuk menghindari pilihan-pilihan sulit yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

Kritik demikian cukup mengandung kebenaran. Namun, satu hal yang jelas: Obama bukanlah seseorang yang tidak mampu menghadapi pilihan-pilihan sulit dan selalu menghindari risiko. Ia adalah salah satu dari sedikit politisi yang secara tegas menentang tindakan Bush di Irak yang waktu itu sangat populer. Sekarang, setelah Perang Irak dianggap gagal, hampir semua orang mengecam Bush—tetapi pada saat awal, Obama mengambil risiko besar dengan memilih untuk melawan arus.

Adapun mengenai jalan tengah sebagai proposisi kebijakan, barangkali memang saat ini Amerika lebih membutuhkannya. Sejarah melahirkan aktor-aktornya sendiri. Setelah zaman Bush, Amerika sekarang dahaga akan datangnya seorang pemimpin yang merangkul, seorang *heal-maker*, seorang yang sanggup membangun jembatan bagi begitu banyak perbedaan yang ada.

Tentu saja, politisi yang piawai harus mampu menjawab persoalan-persoalan praktis. Seorang *heal-maker* harus juga sanggup menjadi seorang *deal-maker*. Tanpa itu, ia hanya akan menjadi seorang nabi, bukan pemimpin pemerintahan. Karena itu, yang paling penting adalah akal sehat dan kemampuan untuk melihat fakta sebagaimana adanya. Jalan tengah sebagai sebuah proposisi kebijakan dalam praktiknya ternyata sangat fleksibel. Seperti yang bisa dilihat pada pemerintahan Bill Clinton dan Tony Blair, ia terkadang bergeser ke kanan dalam isu-isu ekonomi karena memang tidak ada lagi pilihan yang lebih baik dalam mengatasi persoalan-persoalan praktis untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat di zaman ini. Barack Obama pun akan melakukan hal itu jika ia memang menang dalam pemilu tahun depan. Dan mungkin, kalau membaca tulisan-tulisannya, ia akan melakukannya dengan lebih baik dan simpatik.

Apapun, cerita tentang Obama masih akan panjang. Untuk saat ini kita patut memberi selamat kepada publik Amerika.

Negeri mereka seolah tidak pernah berhenti melahirkan pemimpin berbakat yang penuh inspirasi. Mereka pantas bersyukur. Dan sebagai sahabat, dari jauh kita turut bertepuk tangan.

11 Maret 2007

Masalah Kerjasama

KITA SEKARANG ini memasuki sebuah era yang dicirikan oleh internasionalisasi perekonomian domestik. Hampir setiap hal penting dalam perekonomian kita sekarang ini pada dasarnya bersifat global. Dalam keadaan baru ini, karena alasan-alasan yang akan segera saya jelaskan, kerjasama ekonomi di antara negara-negara besar, sampai tingkat tertentu, dikehendaki. Kerjasama ini mungkin sangat sulit diwujudkan. Namun, sebagaimana yang dikatakan oleh Kindleberger, “Seperti demokrasi, kejujuran, dan pernikahan yang stabil, [kerjasama dalam kepemimpinan ekonomi] merupakan suatu hal yang lebih baik ketimbang pilihan-pilihan yang ada.”

Sejak 1970-an, hegemoni perekonomian Amerika Serikat (AS) menurun. Eropa, Jepang, dan kini NICs, serta banyak perusahaan multinasional dan entitas subnasional, telah muncul ke panggung utama ekonomi dunia. AS sekarang ini merupakan pengutang terbesar di dunia. Pada 1950-an, andil US. atas produk dunia adalah 40%, pada akhir 1980-an turun menjadi hanya sekitar 22%. Setelah Perang Dunia II, AS memproduksi 30% barang manufaktur dunia; pada akhir 1980-an menurun menjadi hanya 13% (Gilpin, 1987: 344). Sebagaimana yang dijelaskan Nye (1990), meskipun tidak ada negara yang

mampu menggantikan AS sebagai pemimpin ekonomi dan politik dunia, menjadi semakin jelas bahwa AS sekarang ini tidak memiliki kemampuan ekonomi maupun kehendak politik untuk memimpin dunia sendirian, sebagaimana yang dilakukannya selama masa pasca-Perang.

Dalam keadaan seperti ini, kepemimpinan ekonomi dunia hanya bisa diwujudkan dengan kerjasama di antara negara-negara besar, yakni Jepang, Jerman, Prancis, Inggris, dan tentu saja, AS (G5). Tanpa kepemimpinan kooperatif mereka di wilayah tertentu, stabilitas tatanan ekonomi liberal dunia kita akan sangat sulit dijaga, apalagi diperluas. Salah satu kunci paling penting dari pertumbuhan ekonomi dunia yang begitu besar selama tahun-tahun pasca-Perang adalah kepemimpinan AS. Amerika memberikan stabilitas dan likuiditas yang sangat dibutuhkan bagi penyesuaian ekonomi negara-negara yang tercabik oleh perang agar bisa memasuki era baru. AS juga mengawasi terjaganya tatanan ekonomi liberal dunia dengan memperkuat, misalnya, GATT, IMF, dan IBRD. Kini, dengan merosotnya kekuasaan AS, tinggal G5 yang bisa memberikan kepemimpinan.

Beberapa contoh bisa menjelaskan mengapa kepemimpinan kooperatif tersebut diperlukan dalam perekonomian baru dan global ini. Dalam dua dekade terakhir, Jepang dan NICs muncul sebagai pesaing besar Eropa dan AS. Untuk membendung aliran masuk produk-produk manufaktur yang lebih murah dari NICs, Eropa menjalankan mekanisme-mekanisme merkantilis serta neo-merkantilis. Dari 1980-1983, misalnya, total impor manufaktur EEC yang terkena restriksi meningkat dari 11% menjadi 13% (Gilpin, 1987: 207).

Di AS, argumen-argumen neo-merkantilis juga dijalankan oleh banyak pemimpin kongres—terlepas dari retorika mereka tentang keunggulan perdagangan bebas, mereka mendukung proteksionisme non-tarif untuk melindungi industri-industri

domestik yang gagal (Ray, 1988). Total impor manufaktur AS yang mengalami proteksi meningkat lebih dari dua kali lipat dari 1980 hingga 1983, yakni dari 6% menjadi 13% (Gilpin, 1987: 207).

Jika kecenderungan proteksionisme di kedua sisi Atlantik ini terus meningkat hingga tak terkendali, perdagangan liberal dunia kita akan terancam, dan perang perdagangan sekali lagi akan muncul di hadapan kita.

Contoh yang lain dapat ditemukan jika kita melihat apa yang sedang terjadi dalam hubungan fiskal dan moneter di antara negara-negara besar. Jika administrasi AS memutuskan untuk merangsang *output* dengan perluasan fiskal, akibatnya hanya akan meningkatkan defisit AS jika Jepang dan Jerman tidak memutuskan untuk memperluas instrumen-instrumen fiskal mereka. Jika ketiga negara ini bersama-sama memutuskan untuk memperluasnya, ketiganya akan menjadi lebih baik.

Jika Bundesbank memutuskan menaikkan suku bunga (seperti yang dilakukannya beberapa bulan yang lalu) untuk mengendalikan inflasi dan mengkompensasi biaya unifikasi yang sangat besar, likuiditas yang lebih besar tentu saja akan mengalir ke Jerman. Namun Italia, Spanyol, Prancis, dan UK akan berteriak (seperti yang mereka lakukan satu atau dua hari setelah keputusan Bundesbank tersebut): jika mereka juga menaikkan suku bunga, persoalan utama mereka (pengangguran) akan menjadi lebih akut, namun jika mereka tetap mempertahankan suku bunga rendah, para investor finansial akan meninggalkan negara mereka dan terbang ke Berlin atau Hamburg.

Pendeknya, hubungan moneter dalam perekonomian baru kita sangat terkait satu sama lain sehingga banyak negara, tanpa melakukan suatu kesalahan, bisa mendapatkan masalah ekonomi yang besar hanya karena keputusan moneter sebuah bank sentral. Di sini kerjasama berarti bahwa masing-masing

pemerintahan setuju untuk tidak membahayakan dan menghancurkan stabilitas ekonomi satu sama lain dengan mengambil langkah moneter yang “egoistik”.

Jadi, kepemimpinan yang kooperatif sangat diinginkan. Masalahnya: apakah hal itu bisa dijalankan? Apakah mungkin negara-negara besar tersebut bersepakat menyangkut beberapa hal mendasar, dan bertindak sesuai dengan kesepakatan tersebut? Agar berjalan, kerjasama menuntut dikesampingkannya keuntungan ekonomi jangka-pendek, jika perlu. Jika Jerman, misalnya, ingin mengeruk apapun keuntungan ekonomi yang ada di depan matanya, kerjasama tidak akan mungkin. Memang, kita masih harus melihat bagaimana, dalam watak politik dunia yang anarkis ini, pemerintah-pemerintah bisa mengedepankan kepentingan semua.

Selain itu, politik nasional, seperti yang dijelaskan oleh Alan Greenspan, “mengharuskan kerangka waktu pemenuhan yang jauh lebih pendek ketimbang yang diperlukan untuk... kerjasama untuk menyerahkan keuntungan ke suatu negara...”. (1988: 61). Karena itu, dorongan bagi masing-masing pemerintahan untuk bertindak sendiri sangat besar. Inilah yang menjelaskan mengapa kerjasama sejauh ini berjalan dengan baik hanya pada masa krisis, ketika pemerintah bisa dengan jelas melihat bahwa dalam jangka pendek, jika mereka tidak bertindak bersama, mereka semua terancam bahaya.

Selain itu, agar berjalan, kerjasama menuntut masing-masing pemerintahan bersepakat menyangkut sebuah model ekonomi dan juga menyangkut pemecahan persoalan bersama mereka. Jika Jepang dan AS melihat persoalan defisit AS dengan cara yang berbeda, kerjasama tidak akan mungkin. Sayangnya, sejauh ini, hal inilah yang terjadi: Jepang beranggapan bahwa para konsumen AS tidak cukup menabung, sementara AS beranggapan bahwa Jepang terlalu banyak membeli produknya sendiri dan pada saat yang sama terlalu melindungi

pasar domestiknya dari ekspor AS. Di sini kerjasama yang dijalankan oleh AS dan Jepang, jika jenis ketidaksepakatan tersebut terjadi, hanya akan menjadi selubung internasional.

Dengan demikian, kerjasama tidak mudah. Terlalu banyak rintangan bagi sebuah kerjasama yang efektif. Cooper dengan jelas menangkap poin ini ketika ia berkata bahwa “dunia menghabiskan 50 tahun untuk mencapai kerjasama internasional dalam sebuah wilayah yang sudah sangat jelas seperti kesehatan publik” (1988: 101). Berapa tahun yang kita perlukan untuk mewujudkan kerjasama dalam, misalnya, hubungan moneter, yang di mata sebagian besar orang jauh lebih tidak jelas dibandingkan kesehatan publik?

Daftar Rujukan

1. Cooper, Richard N. 1988, “Cooperation: Is It Desirable? Is It Likely?”, *The Washington Quarterly*, Spring 1988.
2. Feldstein, Martin ed., 1988, *International Economic Cooperation*, The Univ. of Chicago Press.
3. Fischer, Stanley, 1988, “International Macroeconomic Policy Coordination”, dalam Feldstein, Martin, ed., 1988, *International Economic Cooperation*, The Univ. of Chicago Press.
4. Gilpin, Robert (1987), *The Political Economy of International Relations*, Princeton Univ. Press.
5. Greenspan, Alan, 1988, “Prospects for International Economic Cooperation”, dalam Feldstein, Martin, ed., 1988, *International Economic Cooperation*, The Univ. of Chicago Press.
6. Kindleberger, Charles P., 1981, “Dominance and Leadership in the International Economy”, *International Studies Quarterly*, Vol. 25, Juni.
7. Nye, Joseph S., Jr., 1990, *Bound to Lead*, Basic Books.

Catatan Pribadi

Pak Bill dalam Hidup Saya

PERTAMA KALI saya bertemu Bill Liddle adalah di ruang senat mahasiswa Fisipol UGM, dalam suatu acara diskusi mahasiswa di tahun 1989. Dia kebetulan sedang berada di Yogyakarta dan salah satu kelompok studi di UGM mengundangnya berbicara mengenai politik Orde Baru; sementara saya diminta untuk menanggapi mewakili kaum aktivis mahasiswa.

Isi diskusi kami saya tidak ingat lagi. Tetapi yang masih terus melekat dalam memori saya adalah percakapan singkat dengan Bill Liddle di parkir Fisipol UGM, di bawah pohon ketapang, setelah diskusi tersebut.

“prof. Liddle, kalau saya mau melanjutkan kuliah di Amerika Serikat setelah lulus nanti, Anda bisa bantu memberi rekomendasi?” kira-kira begitu pertanyaan saya pada dia (karena belum kenal sebelumnya, saya masih memanggilnya “Prof. Liddle”, bukan “Pak Bill” yang menjadi panggilan akrabnya.)

Sampai sekarang, 18 tahun kemudian, saya masih ingat dengan baik jawaban dia, termasuk ekspresinya saat menjelaskan apa saja yang saya perlukan untuk bisa diterima sebagai mahasiswa pasca-sarjana dalam studi ilmu politik di AS. Dengan ramah dia membuka harapan buat saya dan menekankan bahwa semua itu sebenarnya cukup mudah sejauh saya memiliki nilai-nilai yang baik saat lulus nanti.

Sebelum kami berpisah dia sempat menekankan bahwa jika dibutuhkan dia pasti akan senang membantu dan memberikan rekomendasi, apalagi kalau universitas yang saya pilih adalah The Ohio State University, tempatnya mengajar. Dia mempersilakan saya untuk menulis surat ke Columbus (waktu itu belum ada email) setelah saya lulus nantinya.

Tentu saja perasaan saya agak melambung. Sebelum itu sebenarnya saya juga sudah bertanya-tanya tentang hal yang sama pada Arief Budiman, Umar Kayam, Herbert Feith, dan Mohtar Mas'ood, yang beberapa tahun sebelumnya menyelesaikan studi di Columbus, Ohio. Tetapi dengan penjelasan dan kontak dengan Bill Liddle, yang waktu itu sudah dianggap sebagai salah seorang Indonesianis senior di AS, saya pikir jalan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi di negeri Paman Sam sudah semakin terbuka.

Setahun kemudian, setelah lulus dari Fisip UGM dan kemudian mendapat kepastian bahwa saya menerima beasiswa Fulbright, saya mengontak Bill Liddle. Lamaran saya untuk studi ilmu politik diterima di beberapa universitas di AS, termasuk di Columbia University, New York, serta di OSU. Terus terang, waktu itu pilihan saya cenderung ke yang pertama, sebab universitas ini termasuk dalam *Ivy League* (kelompok universitas terbaik di AS), dengan program studi filsafat politik yang sangat kuat serta lokasinya yang berada di “pusat peradaban”.

Tetapi saya juga masih bimbang. Soalnya adalah dana dari beasiswa Fulbright, seingat saya, “hanya” US\$25.000 per tahun, sementara untuk kuliah di Columbia yang dibutuhkan adalah US\$40.000 setahun. Saya tidak tahu bagaimana menutup *gap* sebesar itu. Waktu itu belum ada lembaga semacam Freedom Institute yang dapat membantu mencarikan dana tambahan bagi mahasiswa berprestasi yang mendapat beasiswa di luar negeri.

Persoalan lain yang juga memusingkan saya adalah sebelum melanjutkan kuliah di AS saya mau kawin dulu dengan

pacar saya, Dewi, yang waktu itu juga sudah menyelesaikan studinya di jurusan antropologi UGM. Kami sudah cukup lama pacaran dan saya tidak ingin meninggalkan dia bertahun-tahun, hidup sendiri di perantauan.

Kawin dulu, urusan belakangan—begitu tekad kami waktu itu. Tapi kemudian “urusan belakangan” ini semakin membuat saya berpikir. Kalau untuk hidup sendiri saja beasiswa Fulbright masih kurang, bagaimana pula saya bisa menghidupi istri? Bagaimana jika kami punya anak nantinya? Hidup di New York dengan anak yang masih kecil dan kehidupan ekonomi pas-pasan *a la* mahasiswa di perantauan: apakah kehidupan keluarga yang normal bisa saya jalani serta proses belajar tidak akan terganggu karena memikirkan *the basic necessities of a normal life*?

Semua itu saya singgung dalam surat pada Bill Liddle. Beberapa saat kemudian saya menerima surat balasan darinya yang cukup panjang. Dia membujuk saya untuk memilih OSU dan mengatakan bahwa setelah saya menyelesaikan program master dan beasiswa Fulbright berakhir, dia akan meyakinkan teman-temannya di fakultas untuk menerima saya dalam program doktor, dengan beasiswa dari universitas dalam bentuk TA (*teaching assistanship*).

Selain itu dia juga menambahkan bahwa untuk kehidupan keluarga saya Columbus pasti jauh lebih baik dan ramah keimbang New York City. Columbus lebih kecil, lebih bersahabat, serta lebih murah. Singkatnya, Dewi dan saya pasti akan lebih merasa nyaman di Columbus, apalagi jika kami nantinya akan membesarkan seorang anak.

Surat Bill Liddle itulah yang membantu saya untuk menjatuhkan pilihan pada OSU. Arief Budiman, begitu mendengar hal ini, langsung berkata, “*Ngapain lu ke sana, jauh banget.*” (Maksudnya, jauh dari kota-kota besar di pantai timur dan pantai barat yang menjadi pusat kosmopolitanisme AS). Tapi cepat-cepat Arief menambahkan, “Saya kenal Bill. Orangnya baik banget.”

Tiga bulan setelah kawin, Dewi dan saya berangkat ke AS pada awal Agustus 1992. Di pesawat saya meyakinkan Dewi bahwa hidup baru yang akan kami jalani di Ohio nanti pasti menyenangkan, dengan lingkungan yang baik, dan saya bisa lebih memusatkan perhatian untuk belajar.

Setiba di Columbus pada awal September kami langsung membereskan apartemen dan berbagai persiapan lainnya. Setelah semua urusan yang cukup melelahkan ini selesai saya mengajak Dewi menemui Bill Liddle di kantornya, waktu itu masih di Neil Hall, sambil berjalan kaki menyusuri kampus Buckeye di awal musim gugur yang indah itu.

Itulah kedua kalinya saya bertemu Bill Liddle. Saya menyampaikan salam beberapa kawan di Yogja, dan dia menjelaskan lebih jauh tentang kehidupan universitas di AS dan tentang kota Columbus. Dalam pertemuan ini, sambil tersenyum dia sempat mengatakan bahwa perjanjian pertama antara dia dan saya adalah jika kami bertemu bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Dia ingin terus melatih bahasa Indonesianya yang memang sudah hampir sempurna itu. Perjanjian berikutnya: kalau dia menulis kolom atau makalah dalam bahasa Indonesia, dia berharap saya mau mengoreksi isi dan bahasanya. (Kemudian saya tahu, “perjanjian” semacam ini juga berlaku untuk semua mahasiswanya, sebelum dan setelah saya.)⁷⁶ Seingat saya, dalam pertemuan ini juga, saya mulai memanggilnya dengan sapaan “Pak Bill”.

76 Sebenarnya, Bill Liddle tidak perlu terlalu khawatir dengan kemampuan bahasa Indonesianya. Dari segi bahasa, kolom dan artikel yang ditulisnya tidak banyak yang perlu diubah. Di antara banyak Indonesianis yang saya kenal hanya Ben Anderson yang sedikit berada di atas kemampuan Bill Liddle. Untuk mengekspresikan pikiran dalam bahasa Indonesia dia hampir tidak menemukan kesulitan samasekali, kecuali dalam percakapan cepat, kata ganti “kami” dan “kita” selalu menjadi batu sandungan yang permanen sebagaimana umumnya yang dialami oleh setiap orang yang tumbuh dari lingkungan berbahasa Inggris. Dalam soal bahasa, tokoh yang paling dia kagumi di Indonesia adalah Goenawan Mohamad, yang dijulukinya The Indonesian Shakespeare.

Pada kuartal pertama salah satu matakuliah yang saya pilih adalah *poliscience 741: Politics of the Developing World*, yang diisi oleh Pak Bill. Untuk matakuliah ini, sebagai tugas akhir, saya menulis dua paper. Yang pertama mengulas kesi-nambungan dan perubahan pemikiran Samuel Huntington lewat dua bukunya, *Political Order in Changing Societies* (1968) dan *The Third Wave of Democratization* (1991). Draft pertama yang saya serahkan hanya diberinya catatan singkat dan saya diminta untuk menulis revisi yang lebih serius. Setelah beberapa hari begadang saya kemudian menyerahkan hasil revisi yang sudah jauh berbeda dari sebelumnya, jumlah halamannya juga berkembang, dari 15 menjadi 24.

Dalam dua atau tiga hari saya menerima kembali paper ini dari Pak Bill. Di dalamnya sudah banyak berisi catatan dan coretan dia, baik dalam mengoreksi bahasa Inggris saya maupun dalam memberi penekanan ide-ide yang ada di dalamnya. Di halaman terakhir paper ini dia memberi komentar, dengan tulisan tangannya yang tinggi-kurus, dengan lekukan yang tajam itu: “[*This is*] a very big improvement from the first draft. Your summary really captured the heart of the two books... *imaginative, thoughtful, serious...*”

Dia memberi nilai A untuk paper pertama ini, yang tentu saja sangat menyenangkan perasaan saya sebagai mahasiswa yang baru dua bulan berada di Columbus dan baru mulai mengenal sistem perkuliahan di AS.

Untuk paper yang kedua rupanya saya agak kurang beruntung. Dalam paper ini saya membahas perubahan pemikiran Peter L. Berger dalam melihat peran sistem kapitalisme di negara berkembang, juga lewat dua bukunya yang agak berbeda, *Pyramids of Sacrifice* (1974) dan *The Capitalist Revolution* (1986).

Komentarnya di halaman akhir paper kedua ini: “*Your discussion at the end was not quite as directly as you might have. Also, you should have made a clearer separation between the*

two books at the beginning... But it's a good start—a well organized paper....” Paper ini diberinya nilai A minus.

Setelah lulus *poliscience* 741 saya masih mengikuti beberapa kelas Pak Bill. Tetapi minat saya sejak awal sebenarnya bukan terutama ingin belajar tentang politik Indonesia atau mengkhususkan diri hanya pada studi perbandingan politik yang menjadi bidang spesialisasi Pak Bill. Salah satu persoalan saya adalah saya tidak memiliki cukup kesabaran untuk mempelajari satu atau dua hal saja. Terkadang kepala dan hati tidak sinkron: yang satu sudah penuh sesak, sementara yang satunya lagi masih terus tertarik dengan berbagai topik lainnya.

Untungnya Pak Bill memahami dan menerima hal itu. Saya, dan saya kira semua mahasiswa yang pernah berada di bawah bimbingan Pak Bill, merasa bersyukur bahwa dia benar-benar mempraktikkan semboyan *tut wuri handayani*. Ia membiarkan mahasiswanya untuk berkembang sendiri, mencari pengetahuan dan menelusuri minat masing-masing. Dari belakang ia seringkali hanya melontarkan pertanyaan dan mengajak diskusi.

Salah satu wilayah yang saya gemari adalah sejarah liberalisme, dalam pengertian klasik. Di UGM, pada tahun-tahun awal, saya termasuk aktivis mahasiswa kiri. Tetapi menjelang lulus saya semakin menempuh *the road less traveled by* dalam konteks pergerakan kemahasiswaan saat itu: saya semakin bergerak ke kanan. Di Columbus perubahan ini semakin insentif dan saya mencoba memahami lebih jauh tradisi pemikiran liberal.

Pak Bill menyambut baik hal itu dan mendorong saya untuk melakukannya dengan serius. Tapi saya tahu hatinya sebenarnya agak mendua. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengikut setia Franklin D. Roosevelt dan secara intelektual menjadi bagian dari arus progresif di negerinya, sebuah tradisi intelek-

tual yang dasar-dasarnya tidak selalu berimpitan dengan pemikiran liberal klasik.

Kalau dalam membaca perkembangan di Indonesia dan di negara berkembang umumnya, diskusi kami berdua biasanya berakhir dengan kesepakatan: demokrasi dan modernitas perlu diperjuangkan, ekonomi pasar diperluas, kesejahteraan ditingkatkan dan pemerintah diefisienkan. Selebihnya adalah isu-isu kembangan, seperti peran militer, pertumbuhan kelas menengah, kekuatan Islam, kebudayaan politik, peran partai dan semacamnya. Perdebatan di antara kami paling-paling hanya berkisar pada metode mencapainya, cakupan dan kecepatan pencapaiannya, serta perbedaan dalam mengevaluasi isu-isu kembangan yang mengitarinya.

Tetapi begitu mendiskusikan negara maju, khususnya AS, maka dinamika diskusi kami agak meninggi. Saya biasanya memuji Ronald Reagan dan mencoba memahami *godfather* intelektual yang berada di balik kemunculan tokoh politik ini, dari F.A. Hayek, Milton Friedman, William F. Buckley Jr. hingga Irving Kristol yang dianggap sebagai pionir gerakan neokon itu. Kalau sudah begini bukan satu atau dua kali saja Pak Bill menyinggung Richard Rorty, tokoh posmo-pragmatis yang brilian itu, dengan akibat yang agak memicu perputaran darah saya, sebab dalam beberapa tulisannya Rorty kadang menyinggung bahwa munculnya Reagan sebenarnya tidak lebih hanyalah sebetuk pencurian harta yang dilakukan oleh kaum berduit terhadap kelas menengah dan kelas bawah. Tentu saja saya sadar juga bahwa Pak Bill mengutip Rorty bukan karena “teori ekonomi” yang terlalu sederhana itu, tetapi karena pendapat Rorty yang membela tradisi progresif AS dengan penjelasan filosofis yang memang tajam dan mendalam.

Kalau sudah sampai pada tingkat itu biasanya diskusi kami berakhir tanpa kesimpulan apa-apa selain pada kesadaran bahwa kami tidak mungkin bisa mengubah pendapat masing-

masing, setidaknya untuk sementara waktu. Dan seingat saya, karena dasarnya memang seorang guru, tidak pernah sekalipun Pak Bill marah terhadap kritik yang saya lontarkan; malah, kalau pendapat saya agak lemah di matanya dia kerap merekomendasikan satu atau dua buku yang harus saya baca.

Topik lain yang seingat saya juga sering memunculkan diskusi hangat di antara kami berdua adalah masalah separatisme dan eksistensi keindonesiaan. Saya melihat masalah ini dengan berusaha menggabungkan dua aliran pemikiran, yaitu kaum pelopor argumen *raison d'état* di satu pihak serta kaum liberal klasik di pihak lain. Memang, penggabungan kedua aliran ini agak kontradiktif. Tetapi jika dilihat secara *sequential*, keduanya sebenarnya saling membutuhkan: yang satu harus mendahului yang lain.

Dalam praktik hal ini berarti bahwa sebelum demokrasi dan ekonomi pasar dapat berjalan dengan baik, unit organisasi politiknya, yaitu negara-bangsa, harus relatif beres dulu. Demokrasi dan pasar bekerja dalam sebuah konteks, dan di mana-mana dalam sejarah, konteksnya yang modern adalah negara-bangsa tersebut. Sebaliknya jika unit politik ini masih terus dipersoalkan atau terganggu, misalnya oleh separatisme atau kontestasi oleh negara lain, maka banyak hal yang tidak mungkin tumbuh dengan sehat.

Barangkali saya terlalu kaku dalam mengikuti konsekuensi pemikiran semacam itu dalam melihat kasus-kasus konkret, misalnya di Aceh dan Papua. Yang jelas, setiap kali hal itu kami bicarakan suhu diskusi akan meninggi. Pak Bill tidak menentang cara berpikir saya, tetapi dia lebih peka pada dimensi kemanusiaan serta sangat tidak yakin bahwa kaum militer (alat sekaligus pengendali *nation-state* di zaman Orba) bisa menahan diri dan menyelesaikan ketegangan di daerah. Di Aceh Pak Bill memiliki pengalaman yang cukup panjang dan seringkali dia menimba dari pengalaman ini untuk menjelaskan pendapatnya.

Harus saya akui, dalam soal ini, diskusi kami sering membuat saya merenung sendiri. Saya khawatir bahwa saya terlalu terjebak dalam dunia gagasan sehingga agak melupakan bahwa fondasi kehidupan adalah manusia-manusia konkret yang memiliki perasaan dan hidup masing-masing. Tetapi saya juga ragu, jika humanisme semacam ini saya ikuti terus ke ujungnya, termasuk dalam melihat proses pembentukan negara-bangsa, maka pembelaan terhadap sebuah unit politik yang disebut sebagai Republik Indonesia menjadi sangat rapuh, dengan konsekuensi jangka panjang yang justru ingin dihindari oleh setiap kaum humanis.

Kalau sudah berputar-putar seperti itu biasanya saya kemudian mencari bacaan-bacaan baru yang dapat membantu saya. Tetapi terus terang, dalam soal ini, setelah sekian tahun, sampai sekarang pun saya belum dapat menyelesaikan dilema yang ada dalam pikiran saya. Kalau diungkit, hal itu masih terus menggantung. Mungkin penyelesaiannya bukan terletak pada dataran konseptual tetapi pada proses kehidupan yang terus mengalir dan membawa kenyataan dan harapan baru.

Salah satu topik yang menjadi *top hit* pada pertengahan 1990-an, sebelum era reformasi, berkisar di seputar isu tentang *the nature of the New Order*—bagaimana memahaminya, bagaimana mendudukan peran Soeharto, pencapaian serta kegagalannya. Semakin lama berada di Columbus tanpa sadar saya semakin mendekati posisi Pak Bill dalam isu-isu ini. Hal demikian barangkali tidak langsung terkait dengan pergerakan ideologis seperti yang saya singgung sebelumnya, tetapi lebih berhubungan dengan pengertian yang lebih baik, setidaknya menurut saya, terhadap kompleksitas kehidupan dan kenyataan masyarakat Indonesia.

Pak Bill sendiri melihat Orba dalam banyak seginya. Kalau misalnya dia menggali sejarah kemunculan rezim yang diba-

ngun Soeharto ini, dia tidak akan terpaku hanya pada pembahasan peristiwa pembunuhan kaum komunis. Kalau memang membahas tragedi tersebut biasanya dia melihatnya dalam perspektif yang luas, yang berhubungan dengan dinamika politik saat itu, tanpa terjebak pada penghakiman sebuah rezim pemerintahan. Sebaliknya, kalau memuji keberhasilan pembangunan ekonomi Orba, hal ini tidak berarti bahwa dia memberi membenaran pada sebuah sistem politik yang otoriter.

Dalam melihat peran Soeharto secara khusus hal yang sama dia lakukan pula. Pak Bill bukan seorang Marxis tetapi dalam hal ini ia tidak berbeda jauh dengan Marx, dalam *18th Brumaire*: manusia memang membuat sejarah, tetapi dalam melakukannya mereka tidak bisa seenaknya sendiri, *man makes history, but they do not make it as they please*. Soeharto, dalam pandangan Pak Bill, adalah seorang tokoh di panggung politik yang bertindak secara rasional dalam mencapai tujuannya, membuka peluang dan menghadapi tantangan berdasarkan sumberdaya politik yang dimilikinya.

Kesadaran akan peran aktor dalam sejarah itulah yang menjadi salah satu ambisi teoretis Pak Bill. Dari kasus Indonesia yang bersifat khusus, dia ingin membangun sebuah pengertian umum yang lebih jauh tentang peran kepemimpinan, peran tokoh dalam perubahan—sebuah tema besar yang biasanya dibahas dengan menggabungkan ide-ide dari berbagai disiplin keilmuan.

Selain berusaha mewujudkan ambisi keilmuannya, Pak Bill juga tidak lupa menulis di media populer Indonesia, terutama harian *Kompas* dan majalah *Tempo*. Dia sangat bangga dengan posisinya sebagai seorang kolumnis, dan periode paling produktif Pak Bill sebagai kolumnis kebetulan bersinggungan dengan periode saya belajar di Columbus.

Bagi saya hal itu mendatangkan keasyikan sekaligus kerepotan tersendiri. Terkadang pagi-pagi benar, atau menjelang

tengah malam, dia menelpon ke apartemen saya, memberitahukan bahwa satu lagi kolom dia sudah selesai. Artinya, saya harus segera ke Derby Hall mencari *hardcopy*-nya di kotak surat saya (setelah zaman email, hal ini jauh lebih mudah) dan mengedit bahasanya.

Tidak jarang setelah menulis kolom, apalagi jika isinya bernada kritik terhadap pemerintah atau terhadap suatu kecenderungan dalam masyarakat Indonesia, Pak Bill menyampaikan keluh-kesah dan perasaan bersalah. Dia terlalu sensitif, tidak ingin dianggap sebagai orang asing, dari Amerika Serikat lagi, yang selalu menggurui orang Indonesia. Hal ini membuatnya sangat hati-hati, malah beberapa kali kebingungan sendiri merumuskan posisi yang tepat manakala berada dalam diskusi atau polemik yang hangat dan tajam.

Kalau sudah begitu, yang biasanya saya lakukan adalah mengingatkan sambil mengejek sedikit. “Pak Bill, kita semua manusia universal. Tidak ada pengkotakan Indonesia-Amerika, Timur-Barat. Hak Anda mengkritik Indonesia tidak lebih dan tidak kurang dibanding hak saya. Lagian, ilmu juga bersifat universal. Apa urusannya dengan ketersinggungan satu dua kelompok yang masih berpikir primordial?”

Setiap kali saya mengatakan hal seperti itu, reaksi Pak Bill hampir selalu sama. “Anda benar. Anda mungkin benar...” Namun dari raut wajahnya saya tahu bahwa sesungguhnya dia tidak pernah benar-benar yakin mengatakannya.

Saya bersyukur bahwa hubungan kami berdua tumbuh dari sekadar hubungan guru-murid, profesor-asisten. Setelah satu atau dua tahun hubungan kami justru lebih terasa sebagai sahabat. Hal semacam ini juga pasti dirasakan oleh mahasiswa Pak Bill lainnya, mulai dari Mohtar Mas’oed, Makarim Wibisono, Salim Said, Bahtiar Effendy, Denny JA, Saiful Mujani, Eep

Saefulloh Fatah, Takeshi Kohno, Blair King, Dody Kuskridho Ambardi dan yang lainnya.

Rumah Pak Bill yang luas dan nyaman di Upper Arlington sering menjadi tempat berkumpul teman-teman yang belajar di Columbus, lengkap dengan keluarga masing-masing, baik dalam merayakan malam tahun baru, 17 Agustusan, 4 Julian, atau jika ada teman dan tamu yang datang dari Indonesia. Setiap kali ada pertemuan semacam ini dia selalu memamerkan salah satu kelebihanannya yang jarang tertandingi oleh mahasiswanya, yaitu memasak, terutama rendang Aceh. Istri Pak Bill yang ramah dan baik hati itu, Wanda Carter, selalu memberi toleransi yang luas jika beranda atau ruang tamunya kemudian berubah menjadi arena para *talking heads* dengan diskusi yang berkepanjangan.

Pak Bill juga sering mampir ke tempat mahasiswanya. Seringkali dia mengetuk pintu apartemen saya, membawa sebuah bungkus kertas coklat yang di dalamnya berisi roti tawar yang masih hangat, buatan tangannya sendiri. Dewi dan saya sebenarnya juga sering membuat roti sendiri. Tetapi harus kami akui, setelah bertahun-tahun mencoba bermacam kombinasi resep, roti tawar kami tidak pernah seempuk dan segurih roti Pak Bill.

Seringkali kami juga mengadakan acara *barbecue* bersama kawan-kawan yang lain. Salah satu yang terus saya ingat adalah sebuah acara *barbecue* di halaman belakang apartemen saya di Trumbull Court, Buckeye Village, sehari setelah Pak Harto lengser pada 21 Mei 1998.

Saya mengerahkan segenap keahlian untuk memanggang ayam dan rusuk sapi kegemaran anak saya, Guntur, yang waktu itu masih berusia lima tahun. Takeshi Kohno, seorang kawan dari Jepang yang juga sedang menyelesaikan program doktor dalam studi Indonesia di OSU, menyempatkan diri mengambil bendera Merah Putih dari kantornya. Kawan-kawan lain juga ikut dan meluapkan perasaan dengan cara masing-masing.

Dari jauh kami semua ingin merasa terlibat, turut serta dalam proses perubahan yang sedang terjadi di tanah air.

Sore itu Pak Bill datang lengkap dengan seluruh keluarganya, Wanda, Caitlin, Adam, Craig dan Hedwig. Bagi kami peristiwa peralihan kekuasaan di Jakarta adalah sebuah momen sejarah. Bagi Pak Bill makna peristiwa itu lebih khusus lagi. Setelah lulus dari Yale Univeristy dia memulai kariernya sebagai pengamat Indonesia bertepatan dengan periode peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Lebih 30 tahun karir profesionalnya dia bangun dengan menulis dan meneliti Orde Baru, Pak Harto, TNI dan semacamnya. Kini, praktis dalam sehari, semua itu sudah berlalu.

Jadi, sambil menghirup asap *berbecue*, di tengah perayaan kami menyongsong datangnya era baru di tanah air, terasa juga sebuah suasana nostalgia, sebuah kesadaran bahwa suatu tahap dalam kehidupan sudah lewat dan tidak mungkin kembali lagi. Tapi seingat saya sore itu Pak Bill tak tampak larut dalam perasaan melankolik. Kalau saya lihat kembali foto-foto yang mengabadikan suasana sore di penghujung musim semi itu, yang tampak adalah senyum lebar dan mata yang berbinar. Dan salah satu foto favorit dalam album keluarga kami, yang terus menghiasi meja kerja saya sampai sekarang, adalah foto Guntur yang sedang tersenyum sambil berdiri memegang ujung bendera Merah Putih yang dibawa oleh Takeshi, diapit oleh kedua orangtuanya, sementara Hedwig, menantu Pak Bill, lewat di belakang sambil memegang piring yang berisi ayam dan rusuk bakar yang *mak nyus* itu.

Peristiwa lain yang juga tidak pernah saya lupakan adalah pada saat Pak Bill menelpon ke apartemen saya sekitar jam 1 dinihari, 20 Oktober 1999. “Anda berlangganan CNN? Saya ke tempat Anda sekarang.” Rupanya saluran TV langganan dia kebetulan sedang rusak, sementara CNN sedang menyiarkan secara langsung pemungutan suara di MPR untuk memilih presi-

den pengganti BJ Habibie, antara Gus Dur atau Megawati. Peristiwa seru ini berlangsung siang hari di Jakarta tetapi karena Columbus berada di belahan bumi yang persis berlawanan, siaran CNN dimulai tepat tengah malam dan berlangsung hingga subuh.

Sekitar 15 menit setelah menelepon Pak Bill muncul di pintu apartemen saya, membuka jaketnya, dan langsung duduk di sofa mengikuti siaran CNN. Sekian jam kami tidak banyak bicara, mengikuti pencatatan suara yang menegangkan. Tubuh Pak Bill yang tinggi kurus itu melingkar di sofa saya, wajahnya lurus menatap TV.

Setelah Gus Dur akhirnya terpilih dengan suara terbanyak Pak Bill menghela napas panjang. Saya lihat matanya berkaca-kaca. Dia tidak banyak bicara, tetapi saya mengerti gumpalan perasaannya.

Dia kenal Gus Dur sejak lama. Pada tokoh inilah (pemimpin Islam moderat, intelektual, aktivis sosial) dia banyak berharap. Pak Bill begitu mencintai Indonesia dan pada dinihari itulah dia langsung menyaksikan betapa proses demokrasi menghasilkan *the best of all possible worlds*. Begitu banyak harapan, begitu banyak kemungkinan baik yang dapat terjadi di masa depan—dan semua itu mungkin diwujudkan oleh seorang tokoh, seorang sahabat, yang memang sejak lama telah ia ramalkan akan menjadi pemimpin Indonesia.

Saya sendiri, seingat saya, selain merasa senang dan takjub akan denyut perputaran sejarah yang demikian intens, sebenarnya pada saat itu juga mulai merasa kuatir. Di kepala saya menggumpal sekian pertanyaan.

Tetapi saya lebih memilih diam dan mengantarkan Pak Bill, setelah siaran itu selesai, mengambil jaketnya dan menuju pintu untuk kembali ke Upper Arlington, menyetir mobilnya menembus gelap di musim gugur.

Dalam kehidupan mahasiswa, masa yang paling menyenangkan sekaligus menguras energi adalah masa penelitian dan penulisan disertasi. Tidak ada lagi kuliah, paper dan ujian. Tetapi pada saat yang sama segenap pikiran harus dicurahkan untuk meneliti serta menulis satu topik yang spesifik dan menyumbangkan sebuah pengertian baru, atau merevisi pengertian lama, mengenai topik tersebut.

Pada umumnya penulisan disertasi dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap penelitian dan pengumpulan bahan serta tahap analisis dan penulisannya. Untuk itu, pada awal April 1996, saya sekeluarga ke Indonesia dan selama 10 bulan saya harus menggali informasi dan melakukan wawancara di Jakarta yang berkaitan dengan topik disertasi saya, yaitu peran ide dalam perubahan kebijakan ekonomi. Saya bukan peneliti yang tekun dan karena itu periode penelitian ini saya lewati tidak dengan hasil yang maksimal.

Setelah tahap ini saya lalui, kami balik lagi ke Columbus. Seharusnya saya langsung menulis dan menyelesaikan disertasi. Tetapi saya merasa bahan yang ada belum memadai dan juga perumusan ide di kepala saya belum kental benar. Selain itu, hanya beberapa bulan setelah kami tiba lagi di Columbus krisis moneter terjadi dan situasi di Jakarta gonjang-ganjing, yang tentu saja sangat menarik untuk diamati tetapi dengan akibat bahwa perhatian dan fokus pikiran saya jadi terbelah. Jadinya, selama kurang lebih setahun penulisan disertasi saya hanya berjalan di tempat.

Pak Bill sangat sabar, bahkan mungkin terlalu sabar. Melihat situasi penulisan saya yang belum jelas, dia tidak pernah mendesak atau menegur saya. Sesekali dia bertanya, tetapi umumnya dia menunggu saja, berharap bahwa masa-masa tanpa kejelasan itu segera berlalu.

Saya mulai lagi mengerjakan disertasi pada pertengahan 1998, dan bab demi bab segera mengalir ke Pak Bill. Setiap kali

saya menyerahkan satu bab, beberapa hari kemudian halamannya sudah penuh dengan komentar dan coretan Pak Bill. Saya revisi, dia koreksi lagi, demikian seterusnya sehingga nasakah yang ada memuaskan kami berdua.

Itulah masa yang paling menyenangkan selama saya belajar di Columbus. Puncaknya adalah pada saat bab-bab terakhir sudah mendekati penyelesaian, menjelang musim dingin 1999. Semua langkah saya jadi lebih ringan dan hidup terasa penuh dan berharga.

Saat disertasi saya rampung Pak Bill termasuk dalam salah satu dari empat komite penguji. Dia lebih banyak mendengarkan serta membiarkan tiga profesor lainnya untuk bertanya. Kalau tidak lupa, salah satu pertanyaan dia adalah tentang Max Weber dan Clifford Geertz, bagaimana saya menghubungkan peran ide-ide yang ada dalam disertasi saya dengan kebudayaan dan jaringan makna yang banyak ditulis oleh kedua tokoh pemikir tersebut.

Saya tidak ingat lagi jawaban saya. Yang saya ingat adalah, setelah ujian tersebut selesai, Pak Bill bersama ketiga anggota komite lainnya menandatangani sebuah formulir yang mengesahkan kelulusan saya. Setelah itu kami berdua, beserta beberapa kawan, keluar ruangan dan menyusuri Oval Mall untuk mencari makan siang.

Setelah diwisuda pada musim panas 2000 saya dan keluarga masih tinggal lagi di Columbus, mengajar beberapa mata-kuliah selama setahun. Walaupun sudah cukup lama berada di AS saya masih ingin memperpanjang masa tinggal kami beberapa saat lagi. Guntur saat itu masih kelas 1 SD, dia sangat menyenangi lingkungannya dan kami ingin kemampuan bahasa Inggrisnya betul-betul baik sebelum pulang ke Indonesia. Dewi juga masih sangat menikmati pekerjaannya sebagai per-

sonal banker di Huntington Bank yang tepat berada di tengah kota Columbus.

Selain itu, mengajar kelas saya sendiri di universitas merupakan tantangan tersendiri, sebuah pekerjaan yang menyenangkan dan mengenalkan saya lebih jauh dengan alam pemikiran mahasiswa yang berasal dari berbagai negara.

Saya mendapat sebuah ruangan kecil sebagai ruang kerja di lantai 4 Derby Hall, tepat di atas kantor Pak Bill. Jika sempat saya selalu mampir ke lantai bawah atau mengajak Pak Bill ngobrol sambil makan siang di Oval Mall di depan fakultas.

Beberapa saat setelah wisuda, Pak Bill mendorong saya untuk mengirimkan naskah disertasi saya ke beberapa penerbit universitas di AS dan Australia. Dia yakin disertasi tersebut layak untuk diterbitkan. Saya tentu senang dengan usul tersebut dan langsung mengikuti sarannya.

Tiga bulan kemudian saya mendapat surat dari East-West Center, University of Hawaii. Waktu itu lembaga ini sedang bekerjasama dengan Stanford University dan sedang mencari naskah-naskah di seputar topik ekonomi-politik Asia untuk diterbitkan. Mereka tertarik dengan disertasi saya, dengan beberapa catatan: selain merevisi beberapa bagian, saya masih harus menambah satu bab lagi di bagian akhir, semacam epilog, yang menghubungkan tahun penelitian disertasi saya (1989-1992) dengan apa yang terjadi setelah itu, terutama dengan adanya krismon di Indonesia pada tahun 1997-1998.

Waktu membaca surat tersebut hati saya bercabang. Saya senang bahwa sebuah lembaga yang ternama telah membuka kesempatan untuk menerbitkan disertasi saya. Tetapi saya juga galau, sebab untuk itu saya masih harus melakukan penelitian beberapa bulan lagi, melengkapi data dan menulis sebuah bab tambahan. Terus terang, setelah mengerjakannya selama tiga tahun saya sudah jenuh membaca topik di seputar disertasi saya. Saya ingin menghirup udara segar dengan mengikuti topik-topik lainnya yang juga saya gemari.

Seperti biasa, saya membawa persoalan itu ke Pak Bill. Dia mendorong saya untuk melakukan penelitian tambahan. Dia meyakinkan saya bahwa hasil akhirnya nanti pasti akan bermanfaat untuk mengerti situasi Indonesia dengan lebih baik lagi.

Tetapi dia juga tahu bahwa hati saya sudah berada di tempat lain, tidak lagi berada di seputar topik disertasi itu. Dia juga tahu bahwa saya sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin menempuh sebuah karier di dunia akademis semata—sebuah hal yang dibutuhkan sebagai sumber motivasi agar saya mau meluangkan waktu tambahan beberapa bulan meneliti dan menulis.

Setelah beberapa saat akhirnya saya memutuskan untuk mengikuti kata hati saya. Pak Bill dapat memahami sepenuhnya keputusan ini, walaupun saya tahu bahwa dia sebenarnya agak sedih juga.

Pada awal Juni 2001 kami sekeluarga kembali ke Indonesia, setelah sembilan tahun di Columbus melewati masa-masa yang indah dan mengesankan. Bersama teman-teman lain Pak Bill mengantarkan kami ke bandara. Tidak banyak yang bisa kami bicarakan. Waktu terasa berlalu begitu cepat. Di pesawat, Guntur dan Dewi menitikkan air mata.

Hidup berjalan terus, dari tahap yang satu ke tahap lainnya. Tetapi Columbus akan tetap berada di hati kami, selamanya.

Terimakasih, Pak Bill. Selamat ulang tahun ke-70.

31 Desember 2007

Surat Buat Semua

SAYA INGIN mengucapkan terimakasih atas perhatian dan simpati Anda semua, baik yang berada di tanah air maupun yang di luar negeri. Dalam waktu singkat, lewat Facebook, milis-milis di Internet, maupun media massa konvensional di tanah air, begitu banyak yang memberi komentar, salam persahabatan, dukungan, pertanyaan, keraguan, hingga kritik yang tajam terhadap saya.

Teknologi membuka berbagai kemungkinan baru, termasuk dalam menyatukan perhatian beragam komunitas dari berbagai belahan dunia untuk menyampaikan pendapat secara cepat dan personal. Hal ini tentu perlu disambut dengan tangan terbuka.

Saya minta maaf sebab tidak mungkin membalas satu per satu sapaan yang datang kepada saya.

Dalam kesempatan ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa alasan utama bagi saya untuk tampil sekarang adalah untuk memberi alternatif baru dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional. Sebenarnya, soal ini bukanlah soal saya sebagai pribadi, tetapi persoalan sebuah generasi dan sebuah bangsa yang harus terus bergerak maju.

Sejak 10 tahun terakhir, pilihan-pilihan kepemimpinan nasional tidak banyak berubah. Gus Dur dan Amien Rais tam-

paknya masih ingin ikut pemilihan presiden tahun depan, mendampingi Presiden SBY dan Wapres Kalla serta Megawati. Begitu juga Jenderal (purn.) Wiranto dan Letjen (purn.) Prabowo. Mungkin Sultan Hamengku Buwono X dan Letjen (purn.) Sutiyoso juga akan turut serta.

Saya menghormati tokoh-tokoh senior tersebut. Tapi apakah pilihan kepemimpinan nasional harus berkisar hanya di seputar mereka, sebagaimana yang terjadi setelah Soeharto lengser? Apakah di Indonesia terjadi stagnasi dalam sirkulasi kepemimpinan nasional, sehingga wajah-wajah baru tidak mungkin muncul samasekali? Jika di Amerika Serikat muncul Obama (47 tahun) dan di Rusia ada Medvedev (44 tahun), mengapa kita tidak? Bukankah Republik Indonesia sebenarnya dipelopori oleh para tokoh yang saat itu berusia muda, seperti dr Tjipto Mangunkusumo, HOS Tjokroaminoto, Soekarno, Hatta, Sjahrir?

Somebody has to do something. Kita harus menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang dinamis, berjalan mengikuti perubahan zaman dengan membuka diri terhadap berbagai kemungkinan baru. Kita harus berkata kepada para senior tersebut, *we respect you, Sir and Madam. But please give some space to our new generation.* Sudah saatnya generasi baru kepemimpinan di Indonesia turut serta dalam penentuan kehidupan bersama pada level politik yang tertinggi.

Pemikiran seperti itulah yang memberanikan saya untuk tampil sekarang. Dengan segala kelemahan yang ada, saya bersyukur mendapat kesempatan untuk melakukannya. Memang, kalau dipikir-pikir, kata beberapa kawan dekat saya, keputusan itu agak gila. Lebih banyak beraninya ketimbang pertimbangan yang dingin dan rasional.

Saya bukan menteri atau mantan menteri. Saya bukan ketua umum partai, bukan presiden atau mantan presiden, bukan jenderal berbintang, bukan anak proklamator, bukan pejabat tinggi, bukan bekas panglima TNI, bukan pula orang kaya-raya

atau anak orang kaya-raya. “Rizal,” kata kawan-kawan dekat saya itu, “*You are a bit crazy. No, damn crazy!*”

Bahkan, bukan hanya kawan-kawan saya saja, bekas guru besar saya di Columbus, AS, yang sangat saya sayangi pun, Prof. Bill Liddle, berkomentar lirih, “*The time is not yours yet. My dear Celli (nama kecil saya), you don’t have any chance whatsoever.*”

Terhadap semua itu, saya hanya bisa menjawab, “Mungkin Anda benar.” Semboyan kampanye saya pun bunyinya rada mirip, *If there is a will, there is a way*. Pada tahap awal ini, yang ada hanyalah kehendak, kemauan, keberanian, dan hampir tidak ada lagi yang lainnya. Terhadap Bill Liddle saya sempat membalas emailnya dengan kalimat ini: Pak Bill, *the “will” is here, and I am working out the “way”*.

Mungkin saya akan berhasil, mungkin pula tidak. Tapi saya ingin menegaskan satu hal: soalnya bukanlah kalah atau menang, sukses atau gagal. Bahkan sebenarnya, seperti saya telah saya singgung tadi, soalnya bukanlah tentang Rizal Mallarangeng atau siapapun. Soalnya adalah soal sebuah generasi dan sebuah negeri yang kita cintai yang harus bergerak maju, membuka peluang dan kemungkinan-kemungkinan baru.

Jika ternyata saya hanya bisa menjadi “si Kabayan yang merindukan bulan”, saya secara pribadi sudah cukup puas karena saya sudah mencoba menunjukkan bahwa Indonesia tidak membeku, stagnan dengan pilihan-pilihan yang itu-itu saja selama bertahun-tahun.

Namun, kalau toh ada sedikit harapan yang bisa dikatakan saat ini, saya sebenarnya menangkap sebuah isyarat, bahwa dalam masyarakat kita ada sebuah kerinduan terhadap sesuatu yang baru dan segar. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk membuat analisis dan proyeksi berdasarkan isyarat dini ini. Untuk sementara, saya sudah merasa senang bahwa sekarang

sudah mulai ada wacana yang memperbincangkan generasi baru sebagai pilihan kepemimpinan. Kita telah memecahkan *glass-ceiling* yang membatasi kita selama ini dalam membicarakan kemungkinan baru tersebut di forum publik.

Dengan wacana akan pilihan baru tersebut, siapapun orangnya, kita bisa mengatakan kepada dunia, bahkan kepada diri kita sendiri, *we are a country on the move*. Zaman berubah, Indonesia berubah. Zaman bergerak, Indonesia bergerak.

Buat saya secara pribadi, tentu semua itu mengandung dua sisi, sebagaimana setiap hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. *This is a serious business, but I am taking it easy*. Memang, ada beberapa hal yang menuntut pengorbanan dalam berbagai hal, termasuk kritik pedas terhadap diri saya pribadi. Tapi, saya sengaja memulai semua ini dari Banda Neira, salah satunya dari bekas rumah pengasingan dr Tjipto Mangunkusumo, sebagaimana yang terlihat dalam iklan “Dari Sabang sampai Merauke”.

Entah kenapa, saya tidak pernah berhenti kagum terhadap tokoh pergerakan kebangsaan yang satu ini, sejak masih mahasiswa sampai sekarang. Dia lahir tahun 1886 dan menjadi dokter generasi pertama hasil didikan Belanda. Sebagai dokter muda pada tahun 1920-an, dia sebenarnya bisa menduduki posisi sangat terhormat sebagai pegawai pemerintah jajahan, apalagi dia pernah mendapat penghargaan tinggi dari Belanda, Order van Oranye, karena keberhasilannya membasmi wabah pes di Malang.

Tapi ternyata dia memilih jalan berbeda dan, bersama Douwes Dekker dan Ki Hajar Dewantara, meletakkan batu pertama perjuangan politik menuju Indonesia merdeka. Dan karena itu, dia diasingkan ke Banda Neira. Di pulau terpencil inilah, di rumah yang disediakan Belanda, ia melewati hari-harinya selama 12 tahun, 1927-1939. Ia meninggal sebelum sem-

pat menyaksikan negeri yang dicintainya berhasil merebut kemerdekaan.

Bagi saya, dr Tjipto Mangunkusumo adalah sebuah inspirasi, sebuah cerita kehidupan tentang kerelaan menanggung konsekuensi dari sebuah cita-cita. Dan setiap orang, setiap kali mengambil tindakan penting, pasti mengalami hal yang sama, dalam konteks yang berbeda-beda.

Dalam konteks saya, pengorbanan yang ada terlalu kecil untuk menjadi bahan cerita. Yang ada adalah rasa terimakasih kepada banyak sahabat yang telah mendorong dan memungkinkan langkah yang saya tempuh. *This is a road less-traveled by*, kata Robert Frost, dan karena itu saya pun belum bisa menerka titik akhir dari perjalanan ini. Semuanya bergantung pada dukungan Anda dan masyarakat umumnya.

Sejauh ini, satu hal yang menyenangkan saya adalah begitu banyaknya perhatian dan tanggapan dari warga Indonesia yang sedang belajar maupun bekerja di luar negeri—Amerika Serikat, Jepang, Inggris hingga Bahrain. Dari Sabang sampai Merauke yang saya tampilkan di Youtube dapat disaksikan dari seluruh belahan dunia, secara serempak, kapan saja, dan dalam situasi apa saja.

Saya pernah sekolah, mengajar dan hidup 8 tahun di Columbus, AS. Saat itu belum ada Youtube, dan saya teringat betapa menyenangkannya mendapat kabar yang hangat dari tanah air. Tapi waktu itu hanya ada bacaan koran dan email. Dengan teknologi baru, apa yang dilihat dan didengar di Metro TV, SCTV, RCTI dan TVOne oleh warga kita di Wamena, Jayapura juga bisa disaksikan oleh mahasiswa kita di Tokyo, Washington DC., dan kota-kota lainnya di dunia.

Hal tersebut patut disyukuri. Kerinduan begitu banyak warga kita di luar negeri akan kehangatan berita di tanah air, serta keterlibatan dalam peristiwa atau isu yang sama, dapat terpuaskan. Hal ini membawa dampak positif, berupa ikatan kebang-

saan yang makin menebal, yang melewati tapal batas negara. Perasaan memiliki tanah air yang sama dan semangat yang sama akan semakin kental, walaupun, atau justru ketika, derap globalisasi semakin intensif.

Kalau saya boleh mengungkapkan kegembiraan, itulah yang bisa saya katakan sekarang. Saya sudah menyiapkan dua lagi iklan susulan, yang masing-masing akan dimuat selama 2 minggu di berbagai TV nasional dan lokal, hingga setelah 17 Agustus nanti. Ketiga seri iklan inilah yang saya sebut sebagai Trilogi Harapan Baru dan menjadi dasar filosofis awal kampanye saya. Mudah-mudahan sambutan terhadapnya juga akan sebaik yang ada saat ini.

Kepada kawan-kawan yang masih belum puas pada jawaban sementara ini, saya mohon maaf. Selain buku saya yang sudah terbit beberapa tahun lalu (*Mendobrak Sentralisme Ekonomi*, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002), dan banyak tulisan-tulisan saya di berbagai media massa (dapat dilihat di www.freedom-institute.org), saya memang masih butuh waktu untuk merumuskan hal-hal yang lebih konkret.

Pada saatnya nanti, saya akan menjelaskan semua pemikiran saya, yang saya harapkan dapat sedikit menjawab begitu banyak pertanyaan yang ada.

Salam hangat.

Jakarta, 22 Juli 2008

Sumber Tulisan

Bab I:

Individualisme dan Utopia:

Tentang Filsafat Sosial, Politik, dan Ekonomi

- *Freedom: Sebuah Kerangka Umum*, dalam Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 3-14.
- Individualisme dan Utopia, *Kompas*, 12 Februari 1996.
- Isaiah Berlin, *Ummat*, 24 November 1997.
- Wajah Lain Machiavelli, *Kompas*, 6 Oktober 1997.
- Liberal Kiri, Sosialis Kanan, *Gatra*, 28 September 1996.
- Barat dan Demokrasi, *Gatra*, 7 Juni 1997.
- Demokrasi dan Liberalisme, dalam Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 135-144.
- Individu vs Masyarakat, dalam Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 14-24.
- Persamaan di Depan Hukum, dalam Hamid Basyaib (ed.), *Membela Kebebasan: Percakapan tentang Demokrasi Liberal*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 25-33.
- Arief Budiman, *Gatra*, 17 Agustus 1996.
- Ilmuwan dan Aktivis, *Gatra*, 30 November 1996.

- Manifesto Sang Pemberontak, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Nozick, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Tentang Kebebasan Berlin vs Taylor, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Kontrak Sosial: Pedang Rousseau, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Membela Kaum Pluralis, belum pernah diterbitkan, ditulis sekitar di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Huntington: Dari Keteraturan ke Demokrasi, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Guncangan Besar, pengantar dalam Francis Fukuyama, Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Alexis de Tocqueville: Penemu Teori Demokrasi, Pengantar dalam Jhon Stone & Stephen Mennell (ed), Alexis de Tocqueville tentang Revolusi, Demokrasi, dan Masyarakat, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005

BAB II:

Pertimbangkan Kembali Masyarakat:

Tentang Negara, Pasar, dan Masyarakat

- Munculnya Negara: Antara Teori Konflik dan Integratif, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Pendekatan Otonomi Negara: Bagaimana Mengkritiknya?, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Pertimbangkan Kembali Masyarakat, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Struktur dan Aktor: Mengapa Politik Orde Baru Bertahan?, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Revolusi Cina, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Memperkuat Negara, pengantar untuk buku Francis Fukuyama,

Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad ke-21, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, November 2005.

Bab III:

Pedang Saleh Afiff: Tentang Isu-isu Ekonomi-Politik

- Teori Konspirasi dan Krisis Moneter (Bersama M. Chatib Basri), *Tempo*, 14 Februari 1998.
- Blok Cepu: *Mission Accomplished Tempo*, 27 Maret 2006.
- Kaum Intelektual, BBM, dan Iklan Freedom Institute, *Kompas*, 3 Maret 2005.
- Pedang Saleh Afiff, *Kompas*, 28 Agustus 1997.
- Profesor Widjojo, *Gatra*, 18 Oktober 1997.
- Sudradjat, Bravo, *Gatra*, 15 Februari 1997.
- Friedman, *Gatra*, 2 Agustus 1997.
- George Soros, *Gatra*, 22 Maret 1997.
- Alan Greenspan, Sang Maestro di Balik Dolar, *Kompas*, 11 November 2007.
- Resensi Buku: *The Man Who Fed the World* (Nobel Peace Prize Laureate Norman Borlaug and His Battle to End World Hunger); Penulis: Leon Hesser; Penerbit: Durban House; Tahun: 2006. *Kompas* Minggu, 22 Oktober 2006.
- Indonesia pada 1995: Pertarungan Kekuasaan dan Kebijakan, *Asian Survey*, Februari 1996.
- Indonesia pada 1996: Tekanan dari Atas dan Bawah, *Asian Survey*, Februari 1997.
- Demokrasi dan Kapitalisme: Kasus Asia Timur dan Tenggara, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Max Weber dan Kapitalisme, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Nabi yang Gagal, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Roti sebagai Senjata, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.

- Anggur Lama dalam Botol Baru, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Reformasi Ekonomi di Cina dan Uni Soviet, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- The Brave New World, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Merosotnya *Third-Worldism*, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Apa yang Harus Kita Lakukan bagi Dunia Ketiga?, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.
- Kapitalisme, Sosialisme, dan Dunia Ketiga, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.

Bab IV:

Hentikan Kebiadaban: Tentang Integrasi Nasional, Separatisme, Konflik Etnik dan Daerah

- Akankah Sejarah Berulang?, *Kompas*, 17 Agustus 2000.
- Pemberontakan Daerah dan Demokrasi, *Kompas*, 18 September 2000.
- Teori dan Kerusuhan di Dua Kota, *Gatra*, 11 Januari 1997.
- Jalan Skotlandia buat Aceh, *Tempo*, 8 Oktober 2000.
- Jalan California buat Papua, *Kompas*, 5 September 2003.
- Aceh, Ujian Pertama dan Terakhir, *Kompas*, 20 November 1999.
- Konflik Maluku dan Reorientasi Ilmu Sosial, *Kompas*, 9 Januari 2000.
- Hentikan Kebiadaban, *Kompas*, 2 Maret 2001.
- Dialog Frans Seda dan Amien Rais, *Kompas*, 30 Oktober 1996.
- Lincoln, *Tempo*, 16 Juli 2000.

Bab V:

Hukum Liddle: Tentang Pemilu dan Partai Politik

- Hukum Liddle, *Tempo*, 27 Agustus 2000.
- Nasib Partai Golkar, *Kompas*, 10 Maret 2002.

- Konvensi Partai Golkar Akal-akalan?, *Kompas*, 5 Agustus 2003.
- Konvensi Partai Golkar tidak Demokratis?, *Kompas*, 19 Agustus 2003.
- 200 Partai, Siapa Takut?, *Tempo*, 12 Januari 2003.
- Banteng dan Beringin, Berseteru atau Bersekutu?, *Tempo*, 6 Juli 2003.
- PRD dan Megawati, *Gatra*, 10 Agustus 1996.

Bab VI:

Dekrit Gus Dur: Tentang Kepemimpinan

- Tipe Kepemimpinan Baru, *Forum*, Juni 1997.
- Gus Dur di Titik Nadir, *Tajuk*, 3 Agustus 2000.
- Dari Langit, *Tempo*, 15 Juli 2001.
- Dekrit Gus Dur, *Tempo*, 30 Juli 2001.
- Megawati dan Soal Persiapan Jadi Presiden, *Kompas*, 17 Juli 2001.
- Megawati ke Amerika, *Tempo*, 17 September 2001.
- Bush Goyah, Pelajaran Buat Megawati, *Kompas*, 18 September 2003.
- Perlukah Setneg dan Setkab Dipisah?, *Tempo*, 17 Februari 2002.
- Despot Paling Keji, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.

Bab VII:

Menuju Pelembagaan Reformasi:

Tentang Isu-isu Seputar Reformasi

- Kaum Aktivistis Kebablasan, *Tempo*, 19 Agustus 2002.
- Konstitusi 2002 dan Dua Perkara, *Tempo*, 20 Oktober 2002.
- Tunda Dulu Sistem Distrik, *Kompas*, 2 Juni 1998.
- Menuju Pelembagaan Reformasi, *Kompas*, 9 September 1998.
- Tiga Faktor Penyebab SI MPR, *Kompas*, 22 Juli 2001.
- Konsensus Elite dan Politik Kekuatan, *Kompas*, 25 April 2001.
- Kegagalan SI MPR. Rahmat Terselubung, *Tempo*, 18 November 2001.

- Indonesia: Persoalan Demokratisasi, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.

Bab VIII:

Setelah Perang: Tentang Amerika dan Isu-Isu Internasional

- Gore, Bush dan Kita, *Kompas*, 2 November 2000.
- Pemilu AS, Drama Politik dan Tuntutan Akal Sehat *Kompas*, 12 November 2000.
- Darurat Sipil di Cincinnati, *Tempo*, 29 April 2001.
- Presiden Bush dan Pertaruhan Amerika, *Kompas*, 19 Desember 2000.
- Setelah Perang, *Tempo*, 27 April 2003.
- Sirkus Amerika?, *Gatra*, 12 Juli 1997.
- Demokrasi Amerika, *Gatra*, 5 Agustus 1997.
- Demokrasi, Alan Greenspan, dan Sembilan Sulaiman, *Kompas*, 15 Januari 2001.
- Barack Obama: Superstar Politik Jalan Tengah, *Kompas*, 11 Maret 2007.
- Masalah Kerjasama, belum pernah diterbitkan, ditulis di Columbus, Ohio, AS, 1993-1995.

Bab IX:

Catatan Pribadi

- Pak Bill dalam Hidup Saya, dalam Hamid Basyaib (ed.), *Dari Columbus untuk Indonesia: 70 Tahun Bill Liddle dari Murid dan Sahabat*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Surat buat Semua, *Kompas*, 5 Agustus 2008.

Tentang Penulis

RIZAL MALLARANGENG lahir 29 Oktober 1964 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua orangtuanya, baik ayah, Andi Mallarangeng, maupun ibu, Andi Asny, berasal dari keluarga yang banyak berkecimpung dalam dunia pemerintahan di berbagai pos, baik dalam pemerintahan kerajaan klasik Bugis, pemerintahan kolonial Belanda, maupun pemerintahan Republik.

Kakek buyutnya dari pihak ibu, La Temmu Page Arung Labuaja, adalah salah seorang panglima perang terakhir Kerajaan Bone yang bertahan sampai batas akhir (1905) dalam menghadapi invasi Belanda. Cerita tentang tokoh ini diangkat oleh Fredericie, seorang sejarawan Belanda, ke dalam sebuah novel, Sang Jenderal (edisi Indonesia diterbitkan Grafiti Press, 1994). Lewat penunjukan Bung Karno, Andi Patoppoi, putra La Temmu Page dan ayah Andi Asny, menjadi tokoh Bugis pertama yang menjadi bupati di Jawa, yaitu di Grobogan, Jawa Tengah, 1954-1958.

Rizal kecil yang akrab disapa Celli sudah harus berpisah dari ayahnya sejak usia tujuh tahun. Ayahnya adalah Walikota Parepare, yang meninggal karena serangan jantung pada usia 36 tahun.

Sepeninggal ayahnya, Rizal bersama kakaknya, Andi Alfian Mallarangeng, dan ketiga adiknya berada dalam asuhan ibu dan kakeknya. Melewati pendidikan kanak-kanak di TK Katolik

Parepare, Rizal kemudian melanjutkan ke jenjang berikutnya di SD dan SMP Frater Makassar. Salah satu kegemaran Rizal di masa kecil dan remaja adalah kegiatan pencinta alam dan mendaki gunung.

Selain belajar dan bermain, masa kecil Rizal dihabiskan dengan berlatih tenis. Karena prestasinya sebagai atlet tenis junior, Rizal ditarik masuk ke sekolah khusus atlet nasional, SMAN Ragunan, Jakarta. Prestasinya yang tertinggi dalam olahraga ini adalah juara ke-2 pelajar se-ASEAN, di Bangkok, Thailand, 1981.

Setamat SMA, tahun 1984 Rizal melanjutkan studinya di Fisipol UGM, Yogyakarta. Sebagai mahasiswa, Rizal aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama dalam kelompok-kelompok diskusi. Di sinilah ia banyak berkenalan dengan tokoh-tokoh pemikir seperti Soedjatmoko, Umar Kayam, Goenawan Mohamad, Arief Budiman, Y.B. Mangunwijaya, Marsillam Simanjuntak, dan Rahman Tolleng. Sesekali ia juga “turun gunung”, dengan menjadi pemimpin dan peserta demonstrasi mahasiswa, yang waktu itu masih dianggap sangat riskan karena Soeharto dan rezim Orba sedang berada di puncak kekuasaan.

Aktivisme semacam itu yang kemudian membawa Rizal hingga ke Baghdad pada Januari 1991, saat Perang Irak meletus. Atas dorongan Prof. Herbert Feith, bersama Taufik Rahzen, ia dan para aktivis perdamaian se-dunia berkemah di perbatasan Kuwait-Irak untuk menentang tindakan Presiden Bush.

Selepas dari Fisipol UGM, Rizal menjadi asisten dosen di almamaternya, sekaligus menjadi redaktur opini harian *Bernas* bersama Emha Ainun Nadjib, Butet Kertaradjasa, dan Kuskridho “Dodi” Ambardi. Harian *Bernas* waktu itu baru saja diambil alih oleh harian *Kompas*.

Pada 1992 Rizal memperoleh beasiswa Fulbright untuk melanjutkan pendidikan ke Ohio State University, Columbus, AS. Rizal ke Columbus membawa serta istrinya, Dewi

Tjakrawati, teman seangkatannya di UGM. Di universitas ini Rizal belajar di bawah bimbingan Prof. Bill Liddle.

Sambil kuliah ia sempat menjadi asisten dosen selama tiga tahun, dan sesekali meluangkan waktu untuk bekerja, baik di perpustakaan maupun menjadi loper koran. Ia memperoleh gelar doktor pada 2000 dalam studi politik, dan setelah itu menjadi pengajar di universitas ini hingga kepulangannya kembali ke Indonesia, Juni 2001.

Tiba kembali di Jakarta Rizal bergabung dengan CSIS, dan pada waktu yang hampir bersamaan ia juga diminta oleh Surya Paloh untuk bergabung dalam stasiun televisi yang baru didirikannya, Metro TV. Di stasiun TV ini Rizal berperan sebagai redaktur khusus dan pembawa acara *talk-show*, yang masih terus dilakukannya sampai sekarang.

Dua bulan di CSIS, Aburizal Bakrie, waktu itu Ketua Kadin, mengajak Rizal untuk mendirikan sebuah think tank tempat berkumpulnya para intelektual dan penulis muda. Ia menyambut baik ajakan ini dan, dengan mengajak kawan-kawannya, antara lain Ulil Abshar-Abdalla dan Ahmad Sahal (keduanya kini sedang berada di AS untuk menyelesaikan program doktor), mendirikan Freedom Institute.

Sementara melakukan semua itu, Rizal Mallarangeng juga terlibat satu kaki dalam dunia politik dan pemerintahan. Pada malam syukuran pengangkatan Megawati sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur, 23 Juli 2001, Taufiq Kiemas, suami Megawati, menelepon Rizal dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng. Taufiq Kiemas, yang dikenal Rizal sejak masih menjadi aktivis mahasiswa di UGM, mengajak Rizal untuk membantu Presiden Megawati dari dekat.

Dalam banyak perjalanan Presiden Megawati ke mancanegara, Rizal sering diminta ikut untuk membantu menuliskan pidato presiden serta memberikan berbagai pertimbangan manakala dibutuhkan.

Setelah Pemilu 2004 dan Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, Aburizal Bakrie diangkat sebagai Menko Perekonomian, dan setahun kemudian Menko Kesra. Salah seorang tokoh terkaya Indonesia ini mengajak Rizal masuk ke dunia pemerintahan, sebagai staf khusus, suatu posisi yang setara dengan jabatan eselon I.

Dalam posisi ini Rizal juga ditemani oleh sahabat-sahabatnya. Mereka tergabung dalam suatu tim yang langsung berada di bawah Menko: Dr Chatib Basri, Dr Mohammad Ikhsan, Dr Raden Pardede, Lin Che Wei, Dr Raksaka Mahi, Dr Bayu Khrisnamurti, dan Mahendra Siregar MA. Tim ahli inilah yang ikut aktif membantu Pemerintah RI dalam melakukan negosiasi berbagai kasus penting, seperti Blok Cepu (Exxon), Cemex, hingga ke perumusan kebijakan subsidi BBM dan penyiapan perencanaan pembangunan infrastruktur.

Selain itu, sebagai staf khusus Menko Kesra, Rizal terlibat aktif menyelesaikan berbagai kasus dan bencana yang terjadi di berbagai daerah. Ia menjadi Ketua Tim Interdep Pemerintah RI dalam menyelesaikan kasus kelaparan di Yahukimo, Papua, penyelesaian percepatan pembangunan pasca-konflik sosial di Poso, Sulawesi Tengah, serta menjadi Wakil Ketua Delegasi RI dalam Konferensi PBB tentang Perubahan Iklim di Bali.

Pada Februari 2008, bersama adiknya, Choel Mallarangeng dan kawan-kawan dekatnya, Rizal Mallarangeng mendirikan Fox Indonesia, sebuah lembaga konsultasi politik profesional yang pertama di Indonesia.

Rizal dikaruniai dua anak, Guntur (15) dan Surya Mallarangeng (5). Kini, selain melakukan berbagai kegiatan di Jakarta, waktu Rizal cukup banyak dilewatkan di Rawaleuga, Bogor, di kebunnya di ketinggian 1.100 meter di lembah Gunung Salak, berkebun jamur Tiram Putih, merawat kambing Boer, dan bertanam sayur-mayur.